



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BIMA 2025-2029



PEMERINTAH KOTA BIMA
2025



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BIMA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan visi, misi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 258);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 257, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan

WALI KOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Bima dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
11. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD.
12. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh PD sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
13. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran/output, hasil/outcome, dan dampak/impact).
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang ditargetkan dari asil kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

BAB II RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 2

Ruang Lingkup RPJMD meliputi :

1. Visi, Misi dan program Wali Kota;
2. tujuan, sasaran, dan strategi,
3. arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah;
4. program PD, dan;
5. Rencana Kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

- (1) RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan :
 - a. RKPD;
 - b. Renstra PD;
 - c. Renja PD; dan
 - d. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya, pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-updangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahun.
- (3) PD melaksanakan RPJMD melalui penyusunan Renstra PD dan Renja PD.

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III : Visi Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Program PD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.

- (2) Uraian dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Daerah dan PD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. capaian target tujuan dan sasaran RPJMD;
 - b. capaian target indikator kinerja daerah;
 - c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - d. efektivitas program PD dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan:
 - a. pemantauan; dan
 - b. supervisi.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kinerja:
 - a. RKPD dengan RPJMD; dan
 - b. Renja PD dengan Renstra PD
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk memastikan bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dituangkan pada RKPD dan Renja PD berkontribusi mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan; dan

- c. terjadi perubahan yang mendasar seperti, terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah.
- (2) Perubahan RPJMD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Perubahan atau pemutakhiran atas klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dapat disesuaikan pada RKPD tahun berkenaan.
- (4) Perubahan RPJMD menjadi Pedoman dalam perubahan RKPD dan perubahan Renstra PD.

Pasal 9

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan bersamaan dengan perubahan RPJMD.
- (2) Penyesuaian muatan Renstra PD dapat dilakukan tanpa harus didahului dengan perubahan RPJMD pada kondisi apabila:
 - a. terjadi perubahan organisasi dan tata kerja PD;
 - b. terjadi perubahan atau pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Penyesuaian muatan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan selama target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam RPJMD tidak berubah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Wali Kota pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Wali Kota berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama oleh Wali Kota terpilih.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 29 september 2025



Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 29 september 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2025 NOMOR 261

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA,

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (26 / 2025)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BIMA TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | I -1 |
| 1.1. Latar Belakang | I -1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusun | I -4 |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen | I -10 |
| 1.3.1 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 | I -10 |
| 1.3.2 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 | I -12 |
| 1.3.3 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 | I -14 |
| 1.3.4 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 | I -17 |
| 1.3.5 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2045 | I -17 |
| 1.3.6 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima | I -19 |
| 1.3.7 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah | I -20 |
| 1.3.8 Hubungan Antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Bima Tahun 2024-2044 | I -20 |
| 1.3.9 Hubungan Antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Daerah Sekitarnya | I -20 |
| 1.4. Maksud dan Tujuan | I -21 |
| 1.4.1 Maksud | I -21 |
| 1.4.2 Tujuan | I -21 |
| 1.5. Sistematika Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 | I -22 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II -1 |
| 2.1. Aspek Geografi dan Demografi | II -1 |



| | |
|---|--------|
| 2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah..... | II -1 |
| 2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam | II -6 |
| 2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup..... | II -12 |
| 2.1.3.1 Daya Dukung Air | II -12 |
| 2.1.3.2 Daya Dukung Lahan..... | II -13 |
| 2.1.3.3 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan | II -15 |
| 2.1.3.4 Jasa Ekosistem Penyediaan Air | II -16 |
| 2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Pangan | II -17 |
| 2.1.4.1. Indeks Ketahanan Pangan..... | II -17 |
| 2.1.4.2. Konsumsi Listrik per Kapita..... | II -19 |
| 2.1.4.3. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Layak | II -20 |
| 2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas..... | II -22 |
| 2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | II -23 |
| 2.1.5.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman..... | II -25 |
| 2.1.5.3. Pengelolaan Sampah..... | II -26 |
| 2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | II -28 |
| 2.1.6.1. Indeks Kerentanan Iklim | II -30 |
| 2.1.6.2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca | II -32 |
| 2.1.6.3. Indeks Risiko Bencana | II -35 |
| 2.1.7. Kondisi Demografis | II -39 |
| 2.1.7.1. Jumlah Penduduk | II -39 |
| 2.1.7.2. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan | II -40 |
| 2.1.7.3. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk..... | II -40 |
| 2.1.7.4. Pencatatan Sipil..... | II -41 |
| 2.1.7.5. Ketenagakerjaan..... | II -42 |
| 2.1.7.6. Proyeksi Kependudukan | II -44 |
| 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... | II -48 |
| 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi..... | II -48 |
| 2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi..... | II -48 |
| 2.2.1.2. Indeks Gini..... | II -54 |
| 2.2.1.3. Tingkat Kemiskinan..... | II -56 |
| 2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka | II -57 |
| 2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia | II -61 |
| 2.2.2. Kesehatan Untuk Semua | II -66 |
| 2.2.2.1. Prevalensi Stunting | II -66 |
| 2.2.2.2. Insidensi Tuberkulosis..... | II -68 |
| 2.2.2.3. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional | II -70 |
| 2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata | II -71 |
| 2.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah | II -71 |
| 2.2.3.2. Hasil Pembelajaran | II -72 |



| | |
|--|---------|
| 2.2.3.3. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | II -74 |
| 2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif | II -75 |
| 2.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | II -75 |
| 2.2.4.2. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja | II -76 |
| 2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju | II -77 |
| 2.2.5.1. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran | II -77 |
| 2.2.5.2. Indeks Kota Toleran..... | II -79 |
| 2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif | II -79 |
| 2.3. Aspek Daya Saing Daerah | II -80 |
| 2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia | II -80 |
| 2.3.1.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) | II -81 |
| 2.3.1.2. Tingkat Ketergantungan..... | II -81 |
| 2.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi | II -82 |
| 2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan..... | II -82 |
| 2.3.2.2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Dan Minum | II -83 |
| 2.3.2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka | II -84 |
| 2.3.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | II -85 |
| 2.3.2.5. Indeks Kapabilitas Inovasi | II -86 |
| 2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru | II -88 |
| 2.3.3.1. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau | II -88 |
| 2.3.3.2. Tingkat Penerapan Ekonomi Biru | II -89 |
| 2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi..... | II -89 |
| 2.3.4.1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia | II -89 |
| 2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global | II -90 |
| 2.3.5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB) | II -90 |
| 2.3.5.2. Net Ekspor Barang dan Jasa (Persen PDRB ADHB)..... | II -91 |
| 2.3.6. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | II -91 |
| 2.3.6.1. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi | II -92 |
| 2.3.6.2. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan | II -94 |
| 2.3.6.3. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan | II -95 |
| 2.3.6.4. Jenis dan Jumlah Bank..... | II -96 |
| 2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro..... | II -97 |
| 2.3.7.1. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB..... | II -99 |
| 2.3.7.2. Inflasi | II -100 |
| 2.4. Aspek Pelayanan Umum | II -101 |
| 2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif..... | II -101 |
| 2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum | II -101 |



| | | |
|-------------|---|---------|
| 2.4.1.2. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | II -102 |
| 2.4.1.3. | Indeks Pelayanan Publik..... | II -104 |
| 2.4.1.4. | Survei Penilaian Integritas..... | II -106 |
| 2.4.2. | Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial | II -107 |
| 2.4.2.1. | Indeks Kriminalitas | II -107 |
| 2.4.2.2. | Rasio Jumlah Petugas Keamanan dan sejenisnya terhadap jumlah Penduduk..... | II -119 |
| 2.4.3. | Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan | II -110 |
| 2.4.3.1. | Indeks Ketahanan Nasional | II -110 |
| 2.4.4. | Urusan Penunjang | II -111 |
| 2.4.4.1. | Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | II -111 |
| 2.4.4.1.1. | Pendidikan | II -111 |
| 2.4.4.1.2. | Kesehatan | II -116 |
| 2.4.4.1.3. | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | II -121 |
| 2.4.4.1.4. | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... | II -124 |
| 2.4.4.1.5. | Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... | II -126 |
| 2.4.4.1.6. | Sosial | II -127 |
| 2.4.4.2. | Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... | II -129 |
| 2.4.4.2.1. | Tenaga Kerja..... | II -129 |
| 2.4.4.2.2. | Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak..... | II -130 |
| 2.4.4.2.3. | Ketahanan Pangan..... | II -132 |
| 2.4.4.2.4. | Lingkungan Hidup | II -135 |
| 2.4.4.2.5. | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... | II -137 |
| 2.4.4.2.6. | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | II -138 |
| 2.4.4.2.7. | Perhubungan | II -139 |
| 2.4.4.2.8. | Komunikasi dan Informatika | II -142 |
| 2.4.4.2.9. | Statistik..... | II -144 |
| 2.4.4.2.10. | Persandian | II -145 |
| 2.4.4.2.11. | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | II -147 |
| 2.4.4.2.12. | Penanaman Modal | II -148 |
| 2.4.4.2.13. | Perpustakaan..... | II -151 |
| 2.4.4.2.14. | Kearsipan | II -153 |
| 2.4.4.2.15. | Kepemudaan dan Olahraga | II -154 |
| 2.4.4.2.16. | Kebudayaan | II -157 |
| 2.4.4.2.17. | Pertanahan..... | II -158 |
| 2.4.4.3. | Urusan Pilihan..... | II -159 |
| 2.4.4.3.1. | Kelautan dan Perikanan..... | II -159 |



| | | |
|------------|--|---------|
| 2.4.4.3.2. | Pariwisata..... | II -161 |
| 2.4.4.3.3. | Pertanian..... | II -163 |
| 2.4.4.3.4. | Perdagangan | II -166 |
| 2.4.4.3.5. | Perindustrian | II -168 |
| 2.4.4.4. | Unsur Pendukung Pemerintahan | II -170 |
| 2.4.4.5. | Unsur Penunjang Pemerintahan..... | II -173 |
| 2.4.4.5.1. | Urusan Perencanaan dan Keuangan | II -173 |
| 2.4.4.5.2. | Urusan Kepegawaian..... | II -178 |
| 2.4.4.5.3. | Urusan Penelitian dan Pengembangan..... | II -180 |
| 2.4.4.6. | Unsur Pengawasan Pemerintahan | II -181 |
| 2.5. | Hasil Evaluasi Indikator Kinerja..... | II -183 |
| 2.5.1. | Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2024..... | II -183 |
| 2.5.2. | Capaian Program Pendukung Sasaran atau Indikator Kinerja Daerah (IKD)..... | II -192 |
| 2.5.3. | Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024..... | II -216 |
| 2.5.4. | Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's) Kota Bima Tahun 2022..... | II -221 |
| 2.6. | Gambaran Keuangan Daerah..... | II -256 |
| 2.6.1. | Indikator Makro Ekonomi..... | II -256 |
| 2.6.1.1. | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | II -256 |
| 2.6.1.2. | Kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pengeluaran PDRB | II -263 |
| 2.6.2. | Kinerja keuangan masa lalu | II -256 |
| 2.6.2.1. | Pendapatan Daerah | II -269 |
| 2.6.2.2. | Belanja Daerah | II -276 |
| 2.6.2.3. | Pembiayaan Daerah | II -283 |
| 2.6.2.4. | Neraca Daerah | II -286 |
| 2.6.3. | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu | II -296 |
| 2.6.3.1. | Proporsi Penggunaan Anggaran | II -296 |
| 2.6.3.2. | Analisis Pembiayaan..... | II -296 |
| 2.6.4. | Kerangka Pendanaan | II -303 |
| 2.6.4.1. | Proyeksi Pendapatan Daerah | II -303 |
| 2.6.4.2. | Proyeksi Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama..... | II -310 |
| 2.6.4.3. | Perhitungan Kerangka Pendanaan | II -314 |
| 2.7. | Permasalahan dan Isu Strategis | II -320 |
| 2.7.1. | Permasalahan Pembangunan | II -320 |
| 2.7.1.1. | Tingkat ketenteraman dan perlindungan masyarakat belum optimal, serta nilai-nilai agama dan budaya belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan sosial | II -322 |



| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 2.7.1.2. | Kualitas SDM masih tertinggal, minimnya prestasi serta partisipasi dalam pembangunan. | II -324 |
| 2.7.1.3. | Kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik masih rendah, capaian indeks reformasi birokrasi yang belum memadai..... | II -329 |
| 2.7.1.4. | Kualitas lingkungan hidup menurun dan risiko bencana meningkat, pesatnya urbanisasi dan belum optimalnya mitigasi perubahan iklim. | II -331 |
| 2.7.1.5. | Layanan infrastruktur wilayah belum merata, dan kawasan perkotaan masih menghadapi persoalan kekumuhan | II -334 |
| 2.7.1.6. | Kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan pembangunan inklusif di Kota Bima | II -338 |
| 2.7.2. | Isu Strategi | II -340 |
| 2.7.2.1. | Analisis Isu Global | II -340 |
| 2.7.2.1.1. | Sustainable Development Goals (SDGs) | II -340 |
| 2.7.2.1.2. | Perubahan Demografi..... | II -353 |
| 2.7.2.1.3. | Geo Politik dan Geo Ekonomi | II -355 |
| 2.7.2.1.4. | Perkembangan Teknologi..... | II -356 |
| 2.7.2.1.5. | Perubahan Iklim dan Pemanasan Global | II -357 |
| 2.7.2.1.6. | Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru..... | II -358 |
| 2.7.2.2. | Isu Strategis Nasional..... | II -360 |
| 2.7.2.3. | Isu Strategis Provinsi NTB..... | II -367 |
| 2.7.2.4. | Isu Strategis Daerah Kota Bima..... | II -368 |
| BAB III. | VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | III -1 |
| 3.1. | RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPD Tahun 2025-2045..... | III -1 |
| 3.1.1 | Pembangunan Tahap Pertama Tahun 2025-2029 | III -5 |
| 3.1.2 | Arah kebijakan Tahap Pertama Tahun 2025-2029 | III -6 |
| 3.2. | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | III -7 |
| 3.2.1. | Visi Pembangunan Kota Bima Tahun 2025-2029 | III -7 |
| 3.2.2. | Misi..... | III -8 |
| 3.2.3. | Tujuan Dan Sasaran..... | III -18 |
| 3.2.3.1. | Tujuan | III -19 |
| 3.2.3.2. | Sasaran..... | III -21 |
| 3.3. | Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan | III -26 |
| 3.3.1. | Strategi Umum | III -26 |
| 3.3.2. | Strategi Berdasarkan Tujuan Sasaran..... | III -34 |
| 3.3.3. | Arah Kebijakan | III -38 |
| 3.3.3.1. | Arah Kebijakan Perwilayahan | III -38 |



| | |
|--|--------------|
| 3.3.3.2. Arah Kebijakan Per Sasaran | III -48 |
| 3.3.3.3. Tema Pembangunan Tahunan | III -56 |
| 3.3.3.4. Program Unggulan | III -56 |
| BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PERANGKAT DAERAH | IV -1 |
| 4.1. Program Perangkat Daerah | IV -1 |
| 4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Dengan Pelayanan Dasar..... | IV -1 |
| 4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... | IV -6 |
| 4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan..... | IV -17 |
| 4.1.4. Unsur Pendukung urusan pemerintahan..... | IV -20 |
| 4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah..... | IV -21 |
| 4.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan..... | IV -23 |
| 4.1.7. Unsur Kewilayahan | IV -24 |
| 4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum..... | IV -25 |
| 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... | IV -69 |
| BAB V. PENUTUP..... | V -1 |
| 5.1. Pedoman Transisi | V -1 |
| 5.2. Kaidah Pelaksanaan..... | V -2 |
| 5.3. Kerangka Pengendalian..... | V -4 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|--------|
| Tabel 2.1. | Sungai di Kota Bima..... | II -3 |
| Tabel 2.2. | Daya Dukung Air Kota Bima Tahun 2023..... | II -13 |
| Tabel 2.3. | Daya Dukung Lahan Kota Bima Tahun 2030..... | II -15 |
| Tabel 2.4. | Distribusi Luas Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di Kota Bima..... | II -16 |
| Tabel 2.5. | Distribusi Luas Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Air di Kota Bima | |
| Tabel 2.6. | Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024..... | II -17 |
| Tabel 2.7. | Daya Listrik Terpasang dan Jumlah Kebutuhan Listrik Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -19 |
| Tabel 2.8. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bima Tahun 2024 | II -24 |
| Tabel 2.9. | Indeks Kerentanan Perubahan iklim Kota Bima | II -31 |
| Tabel 2.10. | Distribusi Luas Layanan Jasa Ekosistem pengaturan iklim Kota Bima | II -33 |
| Tabel 2.11. | Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2024..... | II -39 |
| Tabel 2.12. | Jumlah Penduduk Kota Bima berdasarkan Tingkat Pendidikan Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2024 | II -40 |
| Tabel 2.13. | Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2020-2024 (Jiwa/km2)..... | II -41 |
| Tabel 2.14. | Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2024..... | II -41 |
| Tabel 2.15 | Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2020-2024 ... | II -42 |
| Tabel 2.16. | Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Kegiatan Utama Tahun 2024 | II -43 |
| Tabel 2.17. | Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bima Tahun 2025-2030 | II -45 |
| Tabel 2.18. | Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Bima Tahun 2025-2030 | II -46 |
| Tabel 2.19. | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (miliar) Tahun 2020-2024 | II -49 |
| Tabel 2.20. | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), Tahun 2020–2024 | II -51 |
| Tabel 2.21. | Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2020-2024..... | II -52 |
| Tabel 2.22. | PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2019-2023 | II -54 |



| | | |
|-------------|--|---------|
| Tabel 2.23. | Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Bima Tahun 2023-2024 | II -60 |
| Tabel 2.24. | Indeks Pembangunan Manusia Kota Bima Menurut Komponen Pembentuknya Tahun 2020-2024 | II -66 |
| Tabel 2.25. | Disabilitas yang bekerja 2023-2024 | II -77 |
| Tabel 2.26. | Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Bima Tahun 2020-2024..... | II -81 |
| Tabel 2.27. | Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -96 |
| Tabel 2.28. | Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Bima Tahun 2020-2024 . | II -96 |
| Tabel 2.29. | Jenis dan Jumlah Bank di Kota Bima Tahun 2020-2024..... | II -97 |
| Tabel 2.30. | Angka Kriminalitas Kota Bima Tahun 2019-2023..... | II -97 |
| Tabel 2.31. | Lama Proses Perijinan Kota Bima Tahun 2024 | II -98 |
| Tabel 2.32. | Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2019-2024 Kota Bima | II -101 |
| Tabel 2.33. | Gambaran umum kondisi layanan urusan wajib bidang pendidikan di Kota Bima Tahun 2021-2024..... | II -112 |
| Tabel 2.34. | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -114 |
| Tabel 2.35. | Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Bima Tahun 2019-2023 | II -114 |
| Tabel 2.36. | Rasio Guru/Murid Sekolah Negeri di Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -115 |
| Tabel 2.37. | Rasio Guru/Murid Madrasah Negeri di Kota Bima Tahun 2019-2023 | II -115 |
| Tabel 2.38. | Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-rata per 1000 Jumlah Murid Di Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -116 |
| Tabel 2.39. | Perkembangan Pelayanan Kesehatan Kota ahun 2020-2024 | II -117 |
| Tabel 2.40. | Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -119 |
| Tabel 2.41. | Indikator Kinerja Kunci Layanan Kesehatan Tahun 2021-2024... | II -120 |
| Tabel 2.42. | Kondisi Jalan di Kota Bima Tahun 2020-2024 (km) | II -121 |
| Tabel 2.43. | Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2019-2023..... | II -122 |
| Tabel 2.44. | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Bima Tahun 2019-2023 | II -122 |
| Tabel 2.45. | Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2020-2024 | II -123 |
| Tabel 2.46. | Perkembangan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -123 |
| Tabel 2.47. | Persentase Permukiman Kumuh dan Rumah Layak Huni di Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -125 |
| Tabel 2.48. | Luas Permukiman yang Tertata di Kota Bima Tahun 2019-2023. | II -125 |
| Tabel 2.49. | Jumlah Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni di Kota Bima Menurut Kecamatan Tahun 2024 | II -125 |



| | | |
|-------------|---|---------|
| Tabel 2.50. | Kondisi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Bima Tahun 2020 – 2024..... | II -126 |
| Tabel 2.51. | PMKS di Kota Bima Tahun 2020–2024..... | II -127 |
| Tabel 2.52. | Angka Pengangguran di Kota Bima Tahun 2020 – 2024 | II -129 |
| Tabel 2.53. | Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Terhadap Penduduk Usia Kerja Kota Bima Tahun 2024 | II -130 |
| Tabel 2.54. | Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan di Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -130 |
| Tabel 2.55. | Perkembangan IPG dan IDG Nasional, Provinsi dan Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -131 |
| Tabel 2.56. | Indikator Kinerja Kunci Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... | II -132 |
| Tabel 2.57. | Perkembangan Pola Pangan Harapan Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -133 |
| Tabel 2.58. | Perkembangan Cadangan Pangan Kota Bima Tahun 2021-2024. | II -134 |
| Tabel 2.59. | Urusan Wajib Non Dasar Lingkungan Hidup | II -135 |
| Tabel 2.60. | Jumlah dan Produksi Sampah di Kota Bima Tahun 2020-2024 ... | II -136 |
| Tabel 2.61. | Penanganan Sampah Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2019 – 2023..... | II -136 |
| Tabel 2.62. | Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2020 – 2024 | II -137 |
| Tabel 2.63. | Urusan Wajib Non Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2024..... | II -138 |
| Tabel 2.64. | Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana Tahun 2021-2024 | II -138 |
| Tabel 2.65. | Jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan di Kota Bima Tahun 2021-2023..... | II -139 |
| Tabel 2.66. | Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Trayek di Kota Bima Tahun 2021-2024 | II -140 |
| Tabel 2.67. | Ketersediaan Prasarana Perhubungan di Kota Bima Tahun 2018-2024 | II -140 |
| Tabel 2.68. | Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Bima Tahun 2020-2024 . | II -141 |
| Tabel 2.69. | Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan..... | II -142 |
| Tabel 2.70. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | II -143 |
| Tabel 2.71. | Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika | II -144 |
| Tabel 2.72. | Persentase Satu Data Kota Bima..... | II -144 |
| Tabel 2.73. | Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik Tahun 2021-2024 | II -145 |
| Tabel 2.74. | Penurunan Kasus Informasi Kebocoran Daerah..... | II -146 |
| Tabel 2.75. | Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian Tahun 2021-2024 | II -146 |



| | | |
|--------------|---|---------|
| Tabel 2.76. | Pertumbuhan UMKM di Kota Bima Tahun 2020 – 2024..... | II -147 |
| Tabel 2.77. | Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2024 | II -148 |
| Tabel 2.78. | Nilai Investasi PMDN di Kota Bima Tahun 2024..... | II -150 |
| Tabel 2.79. | Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal Tahun 2021-2024 | II -151 |
| Tabel 2.80. | Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan Tahun 2021-2024 | II -152 |
| Tabel 2.81. | Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan Tahun 2021-2024 | II -154 |
| Tabel 2.82. | Prestasi dan Prasarana Olahraga Kota Bima Tahun 2020-2024 .. | II -154 |
| Tabel 2.83. | Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2024..... | II -156 |
| Tabel 2.84. | Perkembangan Pranata Adat Yang Terbentuk di Kota Bima Tahun 2020 – 2024 | II -157 |
| Tabel 2.85. | Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan Tahun 2021-2024 | II -158 |
| Tabel 2.86. | Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan | II -159 |
| Tabel 2.87. | Perkembangan Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2020-2024..... | II -160 |
| Tabel 2.88. | Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2020-2024 | II -161 |
| Tabel 2.89. | Capaian Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2021-2024 | II -163 |
| Tabel 2.90. | Perkembangan Produksi Pertanian di Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -164 |
| Tabel 2.91. | Capaian Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2021-2024 | II -165 |
| Tabel 2.92. | Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -166 |
| Tabel 2.93. | Capaian Urusan Pilihan Perdagangan Tahun 2021-2024 | II -167 |
| Tabel 2.94. | Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut Klasifikasi Industri di Kota Bima Tahun 2024 | II -168 |
| Tabel 2.95. | Capaian Urusan Pilihan Perdagangan Tahun 2021-2024 | II -170 |
| Tabel 2.96. | Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -170 |
| Tabel 2.97. | Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima Tahun 2022-2024 | II -171 |
| Tabel 2.98. | Jumlah Produk Hukum Yang Dihasilkan Tahun 2020-2024..... | II -172 |
| Tabel 2.99. | Capaian Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Pengadaan Tahun 2021-2024 | II -173 |
| Tabel 2.100. | Capaian Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Tahun 2022-2024 | II -174 |
| Tabel 2.101. | PAD Pemerintah Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -176 |
| Tabel 2.102. | Capaian Urusan Penunjang Keuangan Tahun 2021-2024..... | II -177 |



| | |
|---|---------|
| Tabel 2.103. Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2024..... | II -179 |
| Tabel 2.104. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023..... | II -179 |
| Tabel 2.105. Capaian Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Pengadaan Tahun 2021-2024 | II -180 |
| Tabel 2.106. Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023-2024 | II -180 |
| Tabel 2.107. Persentase Penurunan temuan hasil pengawasan Tahun 2022-2024 | II -181 |
| Tabel 2.108. Capaian Urusan Penunjang Pengawasan Tahun 2021-2024 | II -182 |
| Tabel 2.109. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bima Tahun 2019-2024 | II -184 |
| Tabel 2.110. Capaian kinerja IKD Kota Bima Tahun 2024 | II -193 |
| Tabel 2.111. Tingkat Capaian Menurut Bidang SPM Kota Bima Tahun 2024 ... | II -217 |
| Tabel 2.112. Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Bima Tahun 2022-2023 | II -223 |
| Tabel 2.113. Proyeksi PDRB Kota Bima Tahun 2025-2031..... | II -259 |
| Tabel 2.114. Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Tahun 2024-2031..... | II -260 |
| Tabel 2.115. PDRB berdasarkan pengeluaran ADHB | II -262 |
| Tabel 2.116. PDRB berdasarkan pengeluaran ADHK | II -262 |
| Tabel 2.117. Proyeksi kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB adhb..... | II -263 |
| Tabel 2.118. Proyeksi kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB adhb..... | II -264 |
| Tabel 2.119. Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -267 |
| Tabel 2.120. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -270 |
| Tabel 2.121. Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -278 |
| Tabel 2.122. Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -285 |
| Tabel 2.123. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -287 |
| Tabel 2.124. Analisis Rasio Likuiditas Neraca Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -293 |
| Tabel 2.125. Analisa Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -295 |
| Tabel 2.126. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -296 |
| Tabel 2.127. Defisit Riil Anggaran Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -298 |



| | | |
|--------------|---|---------|
| Tabel 2.128. | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -300 |
| Tabel 2.129. | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -302 |
| Tabel 2.130. | Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026-2030.. | II -306 |
| Tabel 2.131. | Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030 (miliar Rupiah) . | II -309 |
| Tabel 2.132. | Proyeksi Belanja Tahun 2025-2029 (miliar Rupiah) | II -312 |
| Tabel 2.133. | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 (miliar Rupiah)..... | II -315 |
| Tabel 2.134. | Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2029 (miliar Rupiah) | II -317 |
| Tabel 2.135. | Tingkat Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat Belum Optimal, Serta Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Belum Sepenuhnya Tercermin Dalam Kehidupan Sosial..... | II -323 |
| Tabel 2.136. | Kualitas SDM masih tertinggal, minimnya prestasi serta Partisipasi dalam pembangunan | II -326 |
| Tabel 2.137. | Kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik masih rendah, Capaian indeks reformasi birokrasi yang belum memadai | II -330 |
| Tabel 2.138. | Kualitas lingkungan hidup menurun dan risiko bencana meningkat, pesatnya urbanisasi dan belum optimalnya mitigasi perubahan iklim..... | II -332 |
| Tabel 2.139. | Layanan infrastruktur wilayah belum merata, dan kawasan Perkotaan masih menghadapi persoalan kekumuhan | II -335 |
| Tabel 2.140. | Kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan pembangunan inklusif di Kota Bima..... | II -339 |
| Tabel 2.141. | Indikator TPB Kota Bima yang Belum Tercapai Target Nasional (SBT) | II -343 |
| Tabel 2.142. | Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 | II -372 |
| Tabel 3.1 | Arah kebijakan RPJPD Kota Bima Tahun Pertama 2025-2029..... | III -6 |
| Tabel 3.2 | Perumusan Penjelasan Misi | III -10 |
| Tabel 3.3. | Penyelarasan Visi dan Misi Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bima Tahun 2025-2029 | III -16 |
| Tabel 3.4. | Keselarasan Misi, Isu Strategis dan Penetapan Tujuan yang Menjawab Isu Strategis..... | III -20 |
| Tabel 3.5. | Penetapan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima Tahun 2025-2030 | III -22 |
| Tabel 3.6. | Keselarasan Antara Sasaran Strategis dan Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 | III -32 |
| Tabel 3.7. | Strategi Pembangunan Daerah berdasarkan Tujuan dan Sasaran | III -35 |
| Tabel 3.8. | Fungsi dan Kegiatan Utama Pelayanan di Kota Bima | III -38 |



| | | |
|-------------|---|---------|
| Tabel 3.9 | Indikasi Program Utama RTRW Kota Bima tahap II 2026-2031 .. | III -42 |
| Tabel 3.10 | Indikasi program RTRW Kota Bima Kawasan Strategis Tahap II 2026-2031..... | III -47 |
| Tabel 3.11. | Arah Kebijakan RPJMD Kota Bima Berdasarkan Strategi Umum.. | III -56 |
| Tabel 3.12. | Tema Pembangunan Tahunan | III -58 |
| Tabel 3.13. | Kegiatan Unggulan Pemerintah Tahun 2025-2029..... | III -59 |
| Tabel 3.14. | Perumusan Program Prioritas RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 | III -67 |
| Tabel 4.1 | Rencana Program dan Pendanaan Tahun 2025-2030 | IV -27 |
| Tabel 4.2. | Indikator Kinerja Utama Kota Bima Tahun 2025-2030 | IV -71 |
| Tabel 4.3. | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bima Tahun 2025-2030 | IV -73 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------|--|--------|
| Gambar 1.1. | Visi Indonesia Emas 2045..... | I -11 |
| Gambar 1.2. | 17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan | I -12 |
| Gambar 1.3. | Visi dan Misi Presiden..... | I -13 |
| Gambar 1.4. | 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas Presiden dan 8 (Delapan) Program Hasil Terbaik Cepat | I -14 |
| Gambar 1.5. | Visi NTB Emas 2045..... | I -15 |
| Gambar 1.6. | Arah Pembangunan dan Sasaran Visi RPJPD Provinsi NTB 2025-2045..... | I -16 |
| Gambar 1.7. | Visi Pembangunan Daerah RPJPD Kota Bima 2025-2045 | I -18 |
| Gambar 1.8. | Sasaran Visi RPJPD Kota Bima 2025-2045 | I -18 |
| Gambar 1.9. | Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya | I -21 |
| Gambar 2.1. | Peta Administrasi Kota Bima | II -2 |
| Gambar 2.2. | Peta DAS Sori Padolo | II -6 |
| Gambar 2.3. | Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2020-2024 | II -20 |
| Gambar 2.4. | Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Layak Tahun 2024..... | II -21 |
| Gambar 2.5. | Proyeksi Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Layak Tahun 2025-2030..... | II -22 |
| Gambar 2.6. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 | II -23 |
| Gambar 2.7. | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 | II -26 |
| Gambar 2.8. | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 | II -27 |
| Gambar 2.9. | Peta Rawan Bencana Kota Bima | II -30 |
| Gambar 2.10. | Peta SIDIK di Kota Bima..... | II -32 |
| Gambar 2.11. | Peta Layanan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kota Bima .. | II -33 |
| Gambar 2.12. | Proyeksi Penurunan Emisi GRK Tahun 2025-2030 | II -35 |
| Gambar 2.13. | Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024 | II -36 |
| Gambar 2.14. | Kawasan Rawan Bencana Tahun 2024 | II -37 |
| Gambar 2.15. | Proyeksi Penduduk Kota Bima Tahun 2025-2029 | II -47 |
| Gambar 2.16. | Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima Tahun 2020-2024..... | II -48 |
| Gambar 2.17. | Perkembangan Indeks Gini Kota Bima Tahun 2020-2024..... | II -55 |
| Gambar 2.18. | Tingkat Kemiskinan Kota Bima, 2020-2024..... | II -56 |
| Gambar 2.19. | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -59 |
| Gambar 2.20. | Indeks Pembangunan Manusia Kota Bima, 2020-2024 | II -63 |
| Gambar 2.21. | Angka Harapan Hidup Kota Bima, 2020-2024 | II -64 |
| Gambar 2.22. | Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bima, 2020-2024 | II -65 |
| Gambar 2.23. | Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Kota Bima, 2020-2024 | II -65 |



| | |
|--|---------|
| Gambar 2.24. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita .. | II -67 |
| Gambar 2.25. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Tahun 2023-2024 | II -69 |
| Gambar 2.26. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun | II -72 |
| Gambar 2.27. Hasil Asesmen Kompetensi Minimum Kota Bima Tahun 2021-2024 | II -73 |
| Gambar 2.28. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024 | II -74 |
| Gambar 2.29. Proyeksi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025-2030 | II -76 |
| Gambar 2.30. Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi NTB dan Kota Bima | II -83 |
| Gambar 2.31. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Dan Minum | II -84 |
| Gambar 2.32. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2024 | II -85 |
| Gambar 2.33. Indeks Kapabilitas Inovasi Tahun 2022-2024..... | II -88 |
| Gambar 2.34. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -91 |
| Gambar 2.35. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi Tahun 2020-2024 | II -92 |
| Gambar 2.36. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan Tahun 2020-2024..... | II -95 |
| Gambar 2.37. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Tahun 2020-2024 | II -99 |
| Gambar 2.38. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021-2024 | II -103 |
| Gambar 2.39. Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2024 | II -105 |
| Gambar 2.40. Nilai Survey Penilaian Integritas Tahun 2021-2024 | II -107 |
| Gambar 2.41. Indeks Kriminalitas Tahun 2020-2023 | II -108 |
| Gambar 2.42. Rasio Jumlah Petugas Keamanan dan sejenisnya terhadap jumlah Penduduk..... | II -109 |
| Gambar 2.43. Indeks Ketahanan Nasional Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -111 |
| Gambar 2.44. Perkembangan Pengunjung Perpustakaan di Kota Bima Tahun 2020 – 2024 | II -151 |
| Gambar 2.45. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima Tahun 2020-2024..... | II -256 |
| Gambar 2.46. PDRB adhb Tahun 2020-2024..... | II -257 |
| Gambar 2.47. PDRB adhk Tahun 2020-2024..... | II -258 |
| Gambar 2.48. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 | II -258 |
| Gambar 2.49. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -273 |
| Gambar 2.50. Proporsi Realisasi Komponen Pembentuk PAD Kota Bima Tahun 2020-2024 | II -274 |



| | |
|---|---------|
| Gambar 2.51. Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bima | II -276 |
| Gambar 2.52. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Total Belanja | II -281 |
| Gambar 2.53. Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Modal Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024..... | II -282 |
| Gambar 3.1 Sasaran Visi RPJPD Kota Bima 2025-2045 | III -1 |



**TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG MAJU,
BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kota Bima dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025–2029. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah lima tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen RPJMD ini disusun berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen perencanaan daerah dengan RPJMN 2025–2029, RPJPD Provinsi NTB 2025–2045, serta RPJMD Provinsi NTB 2025–2029. Hal ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kota Bima untuk menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan provinsi secara terintegrasi.

RPJMD ini memuat visi pembangunan Kota Bima yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan, yakni “Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan ke dalam misi pembangunan, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja utama pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen ini telah melalui proses yang partisipatif dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi dan dukungan seluruh komponen masyarakat.

RPJMD ini juga selaras dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2025–2045 dan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025–2045. Dalam penyusunannya, RPJMD ini telah diarahkan agar selaras dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta memperhatikan keterpaduan dengan RPJPD Provinsi NTB 2025–2045 dan RPJMD Provinsi NTB 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan visi NTB Emas 2045. Keselarasan ini penting untuk




memastikan sinergi antar level pemerintahan demi tercapainya pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kami berharap, dokumen RPJMD ini dapat menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bima selama lima tahun ke depan, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.


Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan meridai setiap langkah kita dalam membangun Kota Bima yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wali Kota Bima,



A. RAHMAN



RPJMD Kota Bima 2025-2029

DASAR HUKUM

UU Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- 1.(1)Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2.Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan **perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya**

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 260 ayat (1)

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 277

bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD **diatur dengan Peraturan Menteri.**

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pasal 2



KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 263 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah "Merupakan Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program KDH"

MEMUAT

Pasal 12 Permendagri 86/17

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN juga berpedoman pada RTRW

Substansial

RPJMD merupakan penjabaran secara konkrit dari visi, misi dan Program KDH serta seluruh aktivitas Pemda dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Formal

RPJMD menjadi landasan penyusunan RKPd dan Renstra yang disusun oleh Kepala PD sebagai penjabaran program dalam RPJMD kedalam kegiatan-kegiatan strategis yang menunjang visi dan misi KDH.
Pasal 263 ayat (4) dan pasal 272 UU No. 23 Tahun 2014

Operasional

RPJMD memuat arah kebijakan untuk peningkatan kinerja Pemda yang menjadi tanggung jawab KDH dan PD dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam merespon pemenuhan kebutuhan pembangunan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah

Faktual

RPJMD menjadi instrumen untuk menilai keberhasilan unsur penyelenggaraan Pemda dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini mengingat keberhasilan penyelenggaraan Pemda dinilai dengan cara membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja penyelenggaraan Pemda dengan tepat kinerja, pagu indikatif, yang direncanakan dalam RPJMD dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam kelompok sasaran penerima manfaat dan lokasi kegiatan Renstra PD.

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Utama RPJPD Kota Bima tahun 2025-2045 khususnya pada tahapan lima tahun pertama yaitu tahun 2025-2029. Tahapan lima tahun pertama ini merupakan fondasi transformasi pelaksanaan RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2045, dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD tahun 2025- 2029 mengacu pada target RPJPD Kota Bima di tahun berkenaan. Terdapat 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk menunjukkan tercapainya tujuan dan sasaran utama pembangunan pada masing-masing tahapan pelaksanaan RPJMD.

RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan dari Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih guna mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat menuju Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan.

Dokumen RPJMD yang memuat berbagai arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah juga diintegrasikan dengan Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Walikota Bima dan wakil Walikota Bima terpilih telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto dan terhitung sejak pelantikan tersebut paling lambat enam bulan RPJMD sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah sudah ditetapkan. Dalam kaitan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Provinsi NTB terhitung sejak tanggal 26 Februari Tahun 2025 telah memulai proses penyusunan RPJMD Provisni NTB Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. RPJMD Kota Bima juga disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMN dan RPJMD Provinsi NTB. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Pembangunan Kota Bima selama periode sebelumnya telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam berbagai bidang pembangunan dengan perjalanan dan berbagai dinamika dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pencapaian pembangunan yang telah berhasil diwujudkan di Pemerintah Kota Bima diantaranya pada aspek pembangunan manusia, dimana pada tahun 2020 indeks pembangunan manusia (IPM) di angka 75,81 meningkat hingga mencapai angka 78,24 di tahun 2023, dimana capaian ini berada diatas capaian Provinsi NTB dan Nasional. IPM Provinsi NTB di angka 72,37 dan IPM Nasional di angka 74,39.

Peningkatan IPM ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan pada semua dimensi pembangunan yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pada dimensi kesehatan, umur harapan hidup dari 72,27 tahun pada tahun 2020 meningkat menjadi 72,97 tahun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya kualitas kesehatan di Kota Bima. Pada dimensi pendidikan, rata-rata lama sekolah dari 10,95 tahun pada tahun 2020 meningkat menjadi 10,96 tahun pada tahun 2024. Sementara itu, pada dimensi ekonomi yang diukur dengan pengeluaran per kapita masyarakat juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 11.1 juta rupiah



per orang per tahun pada tahun 2020 meningkat menjadi 12.36 juta per orang per tahun pada tahun 2024.

Pada indikator lain juga menunjukkan progresivitas yang baik. Hal ini ditunjukkan dari menurunnya angka kemiskinan dari 8,35 persen pada tahun 2020 sedikit menurun menjadi 8,12 persen pada tahun 2024. Begitu juga halnya dengan tingkat pengangguran terbuka dari 4,42 persen pada tahun 2020 dapat diturunkan hingga 3,57 persen pada tahun 2023. Sedangkan capaian indikator Gini Rasio Kota Bima mengalami progres yang negatif. Pada tahun 2018 Gini Rasio senilai 0,417 dan selama lima tahun terakhir angka tersebut berfluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan. Angka Gini Rasio mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,429. Namun mengalami penurunan menjadi sebesar 0,411 pada tahun 2023.

Angka Gini Rasio tersebut termasuk tinggi, kendati demikian Pemerintah Kota Bima terus berupaya untuk menurunkan angka gini ratio agar terjadi pemerataan pendapatan, dengan salah satu upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan melalui fasilitasi kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran. Intervensi Pemerintah Kota Bima terus difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya yang bersumber dari sektor ekonomi dengan serapan tenaga kerja yang signifikan serta meningkatkan pendapatan utama masyarakat yang saat ini masih dengan penghasilan rendah.

Berdasarkan kondisi terakhir ini, beberapa aspek secara rata-rata Kota Bima masih berada diatas capaian rata-rata Provinsi NTB, namun capaian rata-rata Provinsi NTB masih berada dibawah capaian rata-rata Nasional pada hampir semua aspek. Hal ini masih perlu kerja keras bagi Pemerintah Kota Bima untuk mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang dimilikinya. Pada aspek sumber daya manusia, perlu mengoptimalkan potensi demografi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, sebagai daerah perkotaan yang memiliki peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi NTB, perlu terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Selanjutnya kebutuhan akan infrastruktur juga masih tinggi, mengingat ketimpangan ekonomi baik secara individual maupun wilayah



masih relatif tinggi. Hal ini sangat mempengaruhi dan menghambat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi permasalahan dan berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks, maka perlu di desain perencanaan pembangunan daerah yang kerbelanjutan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberlanjutan pembangunan di daerah perlu dituangkan kedalam perencanaan pembangunan daerah yang secara bertahap telah ditetapkan jangka waktunya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJPD Kota Bima 2008-2028 akan berakhir pada tahun 2025, sesuai ketentuan 1 (satu) tahun sebelum periodisasi RPJPD berakhir, sudah harus menetapkan RPJPD Kota Bima yang baru dengan periodisasi tahun 2025-2045. Hal ini sejalan dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, diperlukan perencanaan yang komprehensif, sinergis, dan berbasis data yang akurat. RPJMD Kota Bima 2025-2029 menjadi instrumen utama dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah yang berlandaskan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Oleh karena itu, dokumen ini akan menjadi pedoman dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang merupakan dasar dalam penyusunan RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 - 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 11) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163);
 - 13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 - 14) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);



- 25) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
- 26) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 27) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 28) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 29) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 30) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 38) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat: (4-121/2024); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 205);
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (8-283/2024)), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 207);
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 6 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (7-136/2025));



- 42) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 257, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 113).
- 43) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 20025-2045 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 258 NOREG Peraturan Daerah Kota Bima: (92/2024));
- 44) Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang dapat menggambarkan penyelarasan yang menjadi tujuan Pembangunan dari pusat sampai ke daerah memiliki hubungan yang sinergitas yang dapat di jabarkan sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan keterpaduan Visi dan Misi Indonesia Emas 2045. Selain visi dan misi, penyusunan RPJMD juga memperhatikan arah kebijakan nasional, sinkronisasi dengan tahapan pembangunan nasional serta menyelaraskan Indikator Utama Pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

RPJPN Tahun 2025-2045 disusun dengan kerangka cita-cita besar bangsa Indonesia dalam Sasaran, Misi (Agenda), Arah (Tujuan), dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan yang mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila.



Visi Indonesia 2045:
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar 1.1. Visi Indonesia Emas 2045

Visi bernegara Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 tersebut dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan yaitu (1) Transformasi Sosial, (2) Transformasi Ekonomi, (3) Transformasi Tata Kelola, (4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, (6) Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, (7) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dan (8) Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) misi (agenda) transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi tersebut dijabarkan ke dalam 17 arah (tujuan) pembangunan sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan



(Sustainable Development Goals) yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Tujuh belas arah (tujuan) pembangunan tersebut diukur dengan 45 indikator utama keberhasilan pembangunan.



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar 1.2. 17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan

RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Tahap Pertama RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2045 yang dalam penyusunannya memperhatikan RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMD ini mencerminkan pelaksanaan Visi, Misi, Arah Pembangunan yang diwujudkan dalam pencapaian Indikator Utama Pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

1.3.2 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator utama pembangunan dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2045. Selain itu, pengembangan isu-isu strategis daerah juga disusun dengan melakukan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045 maupun kebijakan strategis nasional lainnya.

Sinergitas RPJMD Kota Bima 2025-2029 dengan RPJMN menjadi hal penting yang dilakukan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Visi dalam RPJMN 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".



Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi yang kuat yang telah dibangun pada masa presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara dengan negara maju di tahun 2045 dan mencapai Indonesia Emas 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Visi

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

| | |
|---|---|
| <p>ASTA CITA</p> <p>1</p> <p>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).</p> | <p>ASTA CITA</p> <p>5</p> <p>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</p> |
| <p>ASTA CITA</p> <p>2</p> <p>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</p> | <p>ASTA CITA</p> <p>6</p> <p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.</p> |
| <p>ASTA CITA</p> <p>3</p> <p>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p> | <p>ASTA CITA</p> <p>7</p> <p>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.</p> |
| <p>ASTA CITA</p> <p>4</p> <p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</p> | <p>ASTA CITA</p> <p>8</p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p> |

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Gambar 1.3. Visi dan Misi Presiden

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins.



| Program Prioritas | Program Hasil Terbaik Cepat |
|--|---|
| 1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air | 1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil |
| 2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara | 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten |
| 3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi | 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional |
| 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi |
| 5 Pemberantasan Kemiskinan | 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut |
| 6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba | 6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara |
| 7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat | 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) |
| 8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi | 8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23% |
| 9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif | |
| 10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas | |
| 11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup | |
| 12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani | |
| 13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan | |
| 14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya | |
| 15 Melanjutkan Hillirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi | |
| 16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah | |
| 17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga | |

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Gambar 1.4. 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas Presiden dan 8 (Delapan) Program Hasil Terbaik Cepat

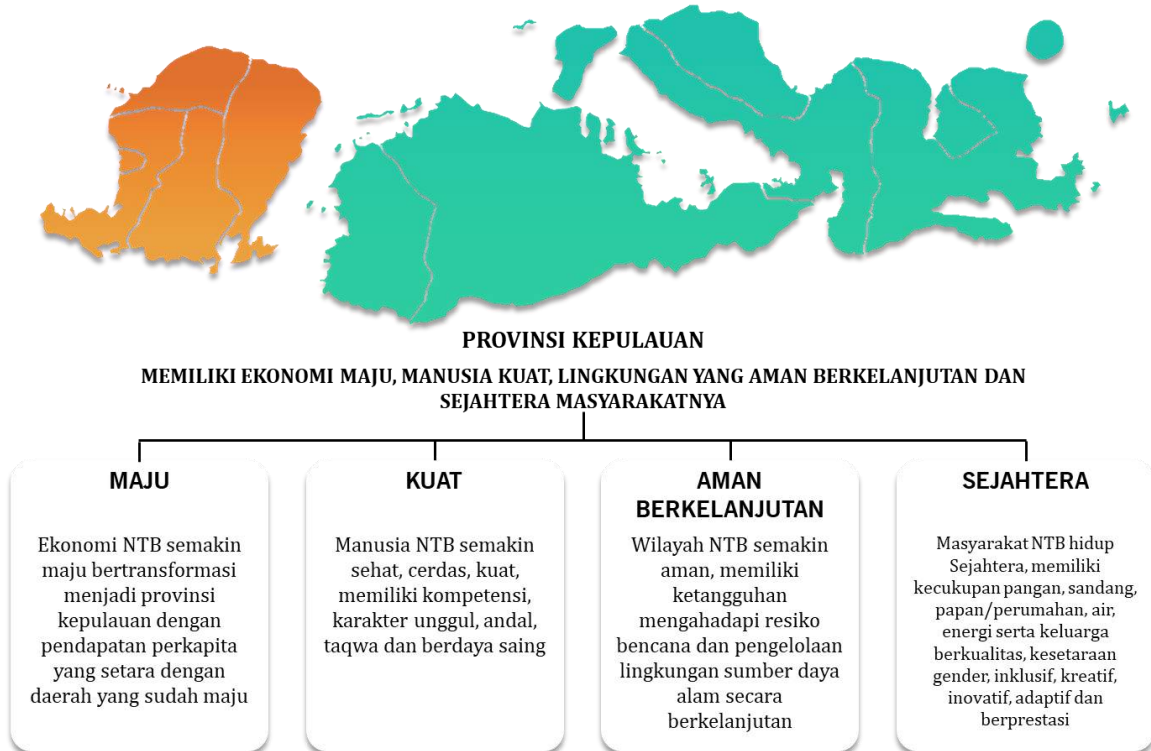
1.3.3 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045

RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan keterpaduan Visi dan Misi NTB Emas 2045. Selain visi dan misi, penyusunan RPJMD juga memperhatikan tahapan pembangunan, arah kebijakan Provinsi NTB, serta menyelaraskan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan yang termuat dalam RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045.



VISI NTB EMAS 2045

NTB PROVINSI KEPULAUAN YANG MAJU, KUAT, AMAN
BERKELANJUTAN DAN SEJAHTERA

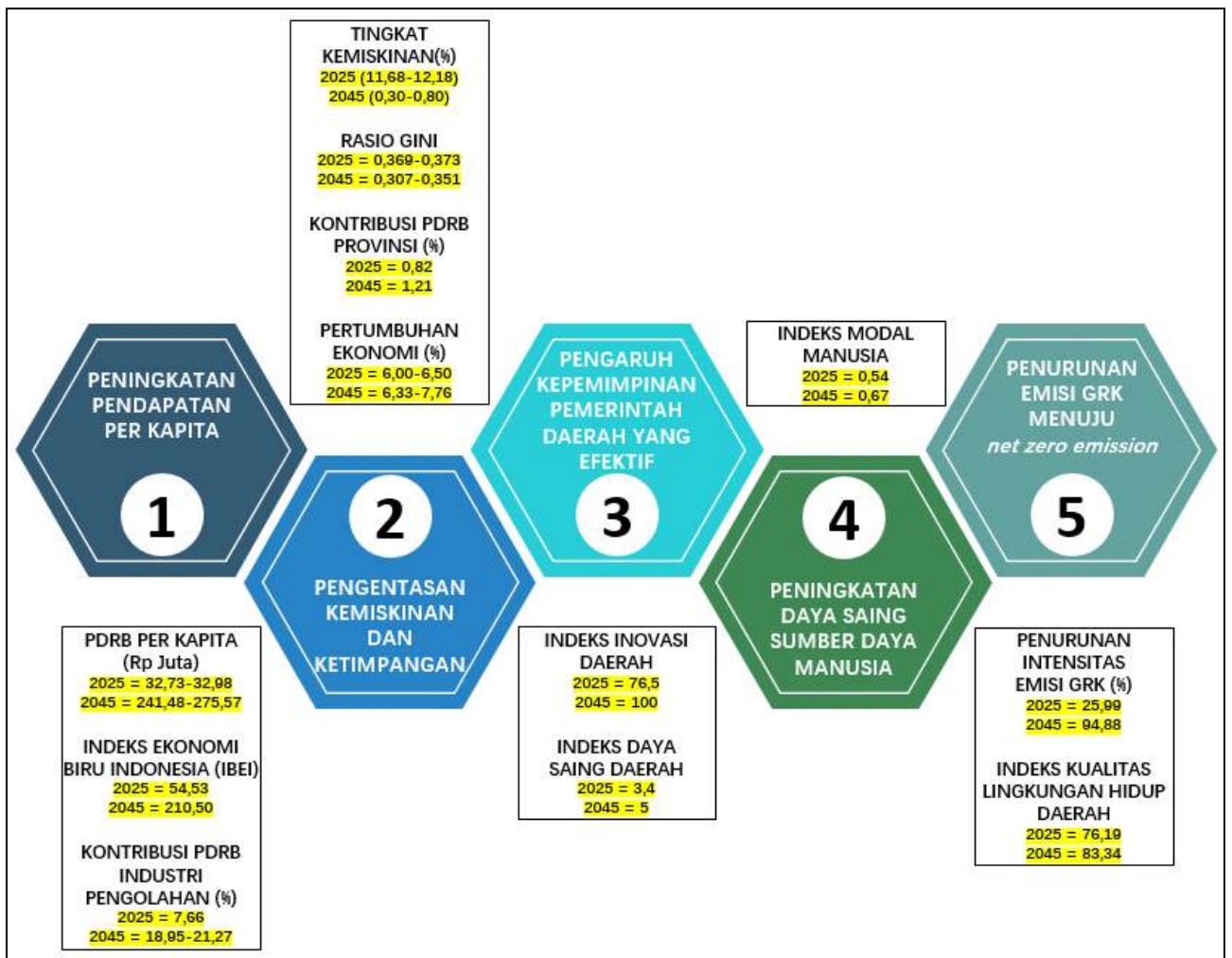


Sumber: RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Gambar 1.5. Visi NTB Emas 2045

Arah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 20 tahun mendatang ditetapkan untuk mencapai Visi NTB Emas 2045 yaitu NTB Provinsi Kepulauan yang Maju, Kuat, Aman, Berkelanjutan dan Sejahtera. RPJMD Kota Bima perlu menyelaraskan visi daerah dengan visi provinsi untuk memastikan arah pembangunan yang harmonis. Arah serta sasaran pembangunan provinsi NTB ditetapkan pada gambar berikut:





Sumber: RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Gambar 1.6. Arah Pembangunan dan Sasaran Visi RPJPD Provinsi NTB 2025-2045

RPJPD Provinsi NTB 2025-2045 juga menetapkan misi sebagai alat untuk mencapai Visi NTB Emas 2045 yang terdiri dari 8 misi dan 17 sasaran pokok pembangunan. Hal ini mencerminkan bahwa RPJPD Provinsi NTB juga memperhatikan dan selaras dengan RPJPN. Delapan misi pembangunan jangka panjang di Provinsi NTB yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;



7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas.

1.3.4 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Pengembangan isu-isu strategis daerah tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029. Selain itu, untuk menjaga keselarasan perencanaan pembangunan, RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan arah pengembangan wilayah dan juga dukungan Kota Bima atas target-target dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.

1.3.5 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2045

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Penyusunan RPJMD Kota Bima mempedomani RPJPD periode 2025-2045 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.

RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran periode lima tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2025-2045 yang memiliki visi mewujudkan ***Kota Bima Maju, Berkelanjutan dan Religius Tahun 2045***. Tahapan lima tahun pertama ini merupakan fondasi transformasi pelaksanaan RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2045.





VISI KOTA BIMA 2045



MAJU

Mencakup kemajuan ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan yang efektif dan transparan, serta kemandirian dalam mengelola sumber daya dan juga mampu untuk beradaptasi dengan perubahan global.



BERKELANJUTAN

Mencakup keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial dan berkomitmen pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, menjaga keanekaragaman hayati, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.



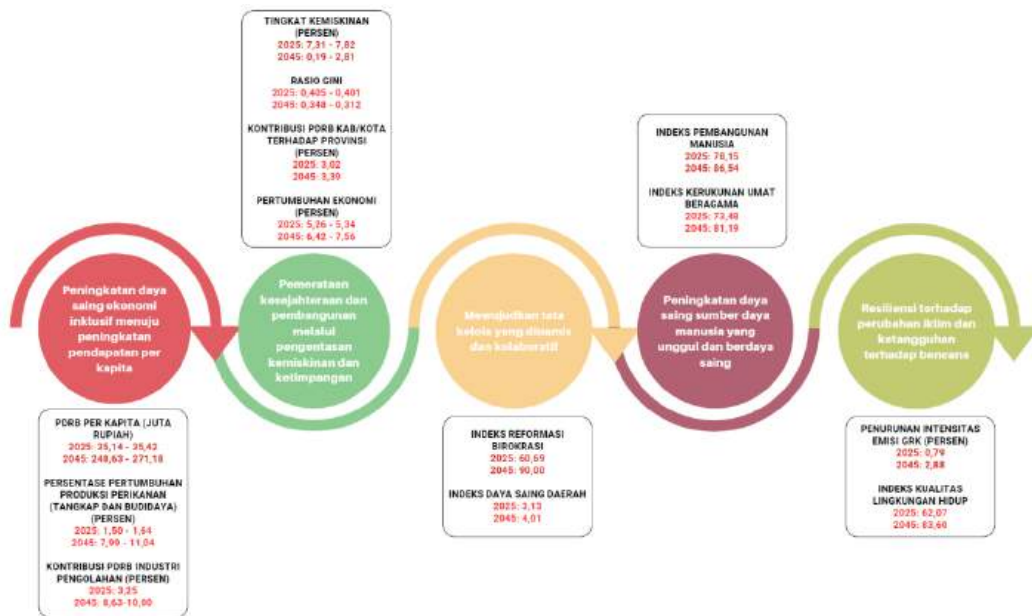
RELIGIUS

Mencerminkan komitmen untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan sebagai perwujudan filosofi *Dou Mbojo ma Maja Labo Dahu*.

Sumber: RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2029

Gambar 1.7. Visi Pembangunan Daerah RPJPD Kota Bima 2025-2045

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan sasaran visi yang disinkronkan dengan sasaran visi pada RPJPN dan RPJPD Provinsi NTB 2025-2045. Penyelarasan visi serta sasaran pembangunan untuk mencapai cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu mencapai Indonesia Emas 2045.



Sumber: RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2029

Gambar 1.8. Sasaran Visi RPJPD Kota Bima 2025-2045



Pun demikian dengan penetapan misi pada RPJPD Kota Bima juga mempedomani dan selaras dengan misi pada RPJPN dan RPJPD Provinsi NTB 2025-2045. RPJPD Kota Bima menetapkan delapan misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Kolaboratif;
4. Membangun Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi;
5. Mewujudkan Kota Bima Religius yang Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas;
8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan

Penyusunan RPJMD Kota Bima mempehatikan arah kebijakan tahap pertama RPJPD Kota Bima 2025-2045. Pada tahap pertama Pembangunan ini direncanakan untuk fokus pada pemulihan lingkungan hidup, pengembalian fungsi lahan sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah, titik berat Pembangunan ekonomi pada Green Economic dengan meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Fokus lain pada tahap pertama ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui wajib belajar 13 tahun.

1.3.6 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima

RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman didalam menyusun rencana kerja tahunan di dalam periode tersebut dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 terkait dengan penyelarasan sasaran, strategi, kebijakan, beserta program prioritas Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.



1.3.7 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Renstra PD merupakan penjabaran RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang berfungsi untuk menentukan tujuan dan sasaran beserta indikasi program serta kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

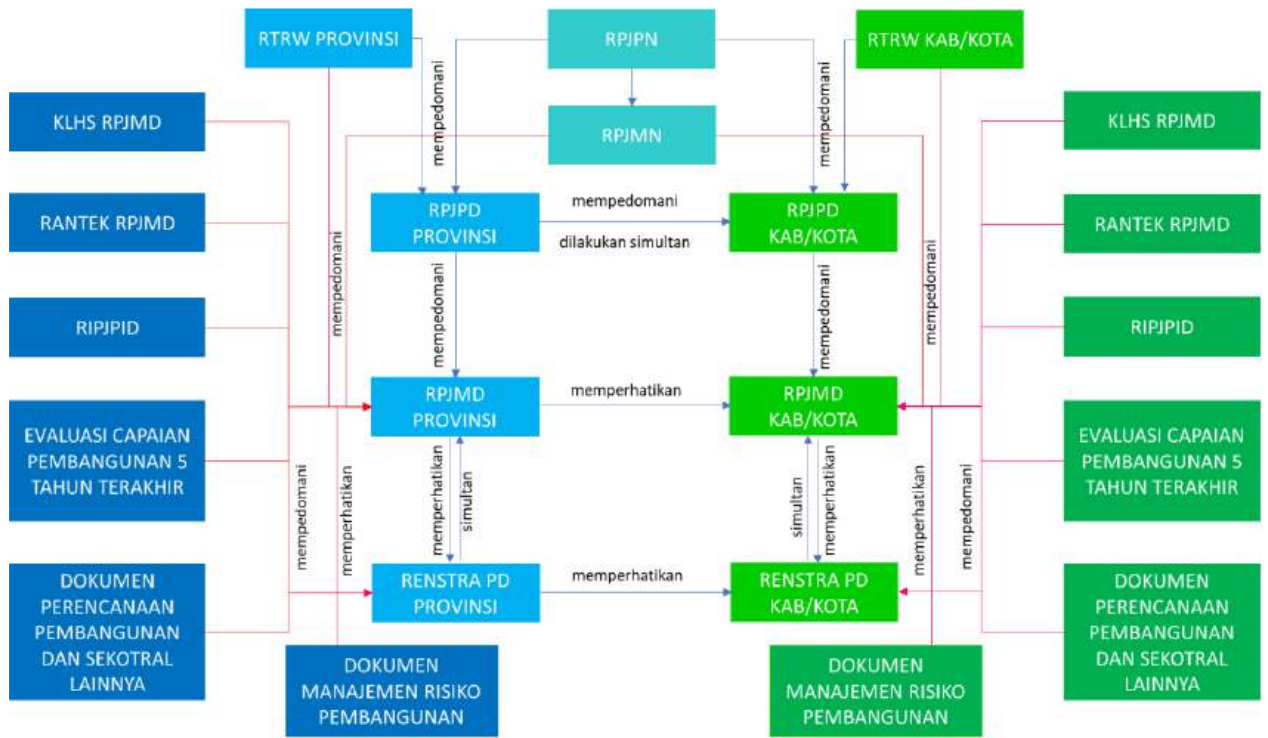
1.3.8 Hubungan Antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Bima Tahun 2024-2044

Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima Tahun 2024-2044 yaitu "Penataan ruang wilayah Kota Bima bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari gugusan kepulauan, dengan pembangunan berbagai sektor dalam masyarakat berbudaya yang luhur." Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang dan mengalokasikan sumber daya pembangunan sesuai dengan indikasi program rencana tata ruang dalam jangka waktu panjang.

1.3.9 Hubungan Antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Daerah Sekitarnya

Hubungan antara dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan dokumen serupa daerah sekitar yang meliputi Kabupaten Bima diidentifikasi dengan kesamaan sasaran strategis antara lain pertumbuhan ekonomi, dan lingkungan hidup yang asri dan ramah.





Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 1.9. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Bima ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator kinerja pembangunan daerah Kota Bima tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPd periode tahun 2025-2029.

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Bima selama kurun waktu 2025-2029;



2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Bima dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Pusat;
3. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bima yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025-2029; serta
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029

RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dan disesuaikan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 serta latar belakang penyusunan RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029, baik yang berskala nasional, provinsi maupun kota.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, yaitu:



- 1.3.1 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045
- 1.3.2 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029
- 1.3.3 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045
- 1.3.4 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029
- 1.3.5 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2045
- 1.3.6 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima
- 1.3.7 Hubungan antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 1.3.8 Hubungan Antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Bima Tahun 2024-2044
- 1.3.9 Hubungan Antara RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Daerah Sekitarnya
- 1.4 Maksud, Tujuan dan Fungsi
Menjelaskan secara ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029.
- 1.5 Sistematika Dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis serta hasil evaluasi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.



2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan mengenai kondisi geografi daerah, kondisi demografi, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketahanan energi, air dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dan karakteristik demografi penduduk.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang meliputi kesejahteraan ekonomi, kondisi kesehatan semua penduduk, kondisi pendidikan masyarakat, kondisi perlindungan sosial, kondisi penguatan peran agama, dan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang meliputi daya saing sumber daya manusia, iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi makro.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang meliputi kondisi tata kelola pemerintahan, kondisi pembangunan hukum, dan Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

2.1.4 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja

Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan tahun 2023.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; serta



kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, juga perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan- kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis

Menguraikan mengenai permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan disajikan disajikan dalam dua bentuk, yang pertama berdasarkan urusan dan kedua adalah rumusan permasalahan pembangunan tingkat daerah. Permasalahan Pembangunan di tingkat Urusan sebagai pijakan untuk penetapan program prioritas, sedangkan permasalahan pembangunan tingkat daerah menjadi pijakan untuk perumusan isu strategis daerah.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan identifikasi permasalahan pembangunan. Isu strategis mendukung perumusan visi dan misi daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerja tujuan dan sasaran. Perumusan Visi, Misi dan Tujuan harus menunjukkan kerangka



logis sistematis dan komprehensif, agar mampu menjadi dasar pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan untuk mencapainya. Bab ini juga menjabarkan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menjelaskan tentang bagaimana strategi dan arah kebijakan serta program program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung Perangkat Daerah untuk mewujudkan misi dan mencapai visi daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan kebijakan alokasi pendanaan/anggaran program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui penentuan pagu indikatif kepada perangkat daerah, sehingga alokasi anggaran ke dalam program benar-benar dapat mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Bab ini juga menjelaskan apa dan bagaimana pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator dan target kinerja yang terukur dan tepat dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang akhirnya akan mampu mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

BAB V PENUTUP

Menyajikan ketentuan mengenai Kaidah Pelaksanaan dan Kerangka Pengendalian. Kaidah Pelaksanaan berfungsi sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkup pemerintah daerah maupun masyarakat dan Kerangka Pengendalian menyampaikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan perencanaan, sedangkan Kaidah Pelaksanaan menyampaikan berbagai petunjuk penggunaan dokumen RPJMD bagi aparatur pemerintah maupun stakeholder pembangunan lainnya.



RPJMD Kota Bima 2025-2029

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KEAMANAN, KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA

1. Keterlambatan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat belum optimal
2. Angka Pelanggaran Keterlibatan, Kenyamanan dan Keindahan (K3) yang masih tinggi
3. Nilai agama, budaya dan kearifan lokal belum diimplementasikan dalam kehidupan secara optimal



KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT

1. Masih rendahnya kualitas Sumber daya Manusia Kota Bima
2. Umur Harapan Hidup Masyarakat Kota Bima yang masih rendah
3. Data rata-rata Literasi Sekolah yang masih rendah
4. Kontribusi perempuan di dalam proses pembangunan masih rendah
5. Daya saing SDM Kota Bima yang masih rendah
6. Sedikitnya masyarakat Kota Bima yang berprestasi di Tingkat Nasional



KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN, REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Rendahnya Nilai Indeks RB



LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN SERTA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN KLIM

1. Merusaknya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya suhu perkotaan
3. Indeks risiko bencana pada level sedang



PENANGGULANGAN KEMISKINAN, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF

1. Adanya Peningkatan Indeks Gini periode 2019-2022
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memang masih lebih tinggi daripada Provinsi NTB
3. Rendahnya tingkat pendapatan, produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat
4. Masih ada kemiskinan ekstrem di Kota Bima



INFRASTRUKTUR DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah
2. Kuruh kawasan perkotaan



2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara astronomis Kota Bima terletak antara 8^o20'-8^o30' Lintang Selatan dan antara 118^o41'-118^o48' Bujur Timur dengan orientasi wilayah berada pada sebelah timur Teluk Bima Pulau Sumbawa. Luas wilayah Kota Bima adalah 222,25 km² yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur, Asakota, Mpunda dan Raba dengan batas wilayah:

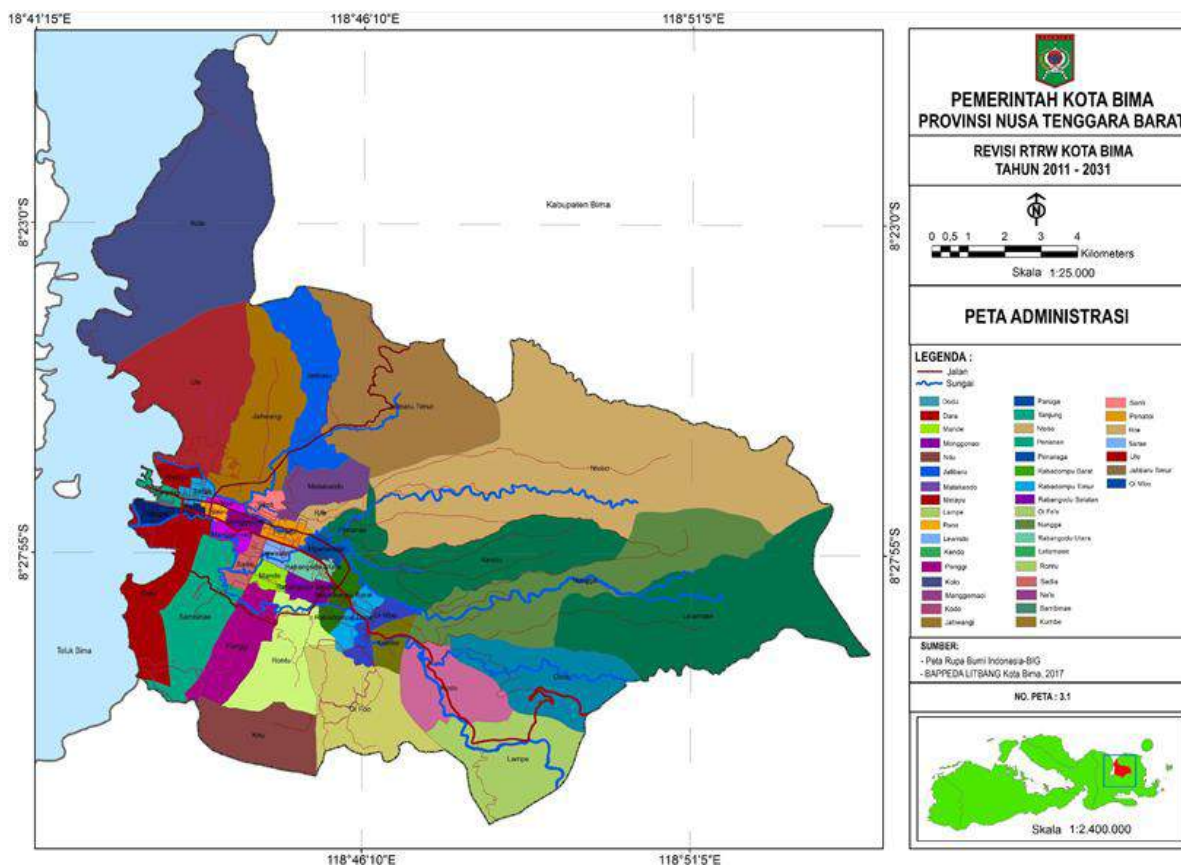
- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

Asakota merupakan kecamatan terluas dengan luas area mencapai 69,03 km² atau 31,06 persen dari luas Kota Bima. Pada urutan kedua ada Kecamatan Rasanae Timur dengan luas area mencapai 28,83 persen, selanjutnya Kecamatan Raba dengan luas sebesar 28,67 persen, Kecamatan Mpunda sebesar 6,88 persen. Sementara itu, Rasanae Barat adalah kecamatan dengan luas area paling kecil yaitu 10,14 km² atau 4,56 persen dari luas Kota Bima.

Topografi Kota Bima didominasi oleh dataran rendah yang mencakup 43 persen wilayahnya dengan ketinggian antara 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut. Selain itu, wilayahnya juga memiliki lanskap bervariasi mulai dari datar, landai, hingga lereng curam dengan kemiringan lebih dari 40%, menciptakan lingkungan yang dinamis untuk berbagai aktivitas kehidupan dan pertumbuhan ekonomi. Sungai-sungai yang mengalir dari utara dan timur, seperti Sungai Lampe, menjadi sumber irigasi vital dan suplai air bagi masyarakat. Sebagai kota yang berada di jalur cincin api, Kota Bima menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Tantangan ini mendorong pentingnya pengelolaan daerah yang matang dengan kesiapsiagaan mitigasi bencana yang efektif, termasuk pengembangan ruang evakuasi dan sistem tanggap darurat demi keselamatan warga dan aset kota.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bima



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2024-2044

Lingkungan hidup Kota Bima menjadi perhatian utama dengan keberadaan hutan seluas lebih dari 3.000 hektar yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan bagian dari siklus ekologi penting. Lebih dari 1.900 hektar hutan tersebut dikelola melalui skema perhutanan sosial oleh 27 kelompok tani hutan di 12 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, menghadirkan peran masyarakat sebagai penjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, perubahan penggunaan lahan untuk lahan pertanian yang didominasi oleh tanaman jagung perlu dikelola secara hati-hati mengingat penanaman jagung sebagian masih menggunakan lahan yang tidak sesuai, yaitu pada kawasan dengan tingkat keterlerangan curam. Perhatian perlu diberikan pada lahan jagung yang berada pada kawasan hutan dan kawasan tidak sesuai lainnya agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan risiko bencana diminimalisir dengan melakukan konservasi lahan serta sistem pertanian yang berwawasan lingkungan.



Kota Bima juga menonjol di bidang pendidikan dengan program pengembangan kota pendidikan yang bertujuan mencetak sumber daya manusia unggul dan kompetitif. Infrastruktur perkotaan terus berkembang guna mendukung aktivitas ekonomi, pariwisata, dan pelayanan publik, menjadikan Kota Bima sebagai pusat pertumbuhan dan inovasi di Pulau Sumbawa. Keunggulan utama Kota Bima ada pada sektor pariwisata bahari, khususnya kawasan Teluk Bima yang memikat dengan keindahan alam bawah laut dan pesisirnya. Penetapan kawasan ini sebagai kawasan strategis pariwisata daerah memperkuat pembangunan fasilitas dan layanan wisata yang ramah lingkungan serta melibatkan masyarakat lokal secara aktif, menciptakan sinergi antara pelestarian alam dan ekonomi pariwisata.

Selain itu, Kota Bima memiliki hubungan strategis dengan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Waworada Sape, KSPD Teluk Bima, dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Teluk Bima, yang bersama-sama mendorong pengembangan wilayah secara terpadu dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, harapannya, Provinsi NTB dalam 5 tahun ke depan dengan arah pengembangan wilayah perkotaan yang mencakup Kota Mataram dan Kota Bima sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan wilayah yang dapat mengakselerasi dan mendukung perkembangan penyelenggaraan MICE serta menjaga keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan pelestarian lingkungan di Kota Bima. Fokus pada program perhutanan sosial, mitigasi bencana, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan infrastruktur menjadi fondasi utama pertumbuhan kota yang mandiri dan lestari.

Wilayah Kota Bima dilewati oleh 7 (tujuh) sungai. Sungai-sungai tersebut memiliki hulu di sebelah utara dan timur Kota Bima, dan bermuara menuju Teluk Bima. Sungai terpanjang adalah Sungai Lampe yang memiliki panjang 25 km. Air sungai dimanfaatkan antara lain sebagai sumber air minum dan pengairan/irigasi.

Tabel 2.1. Sungai di Kota Bima

| Nama Sungai | | Panjang Sungai (km) | Lebar Sungai (m) | Kecamatan | |
|-------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | Hulu | Hilir |
| 1 | Sungai Lampe | 25 | 30 | Rasanae Timur | Rasanae Barat |
| 2 | Sungai Dodu | 12 | 20 | Rasanae Timur | Rasanae Timur |
| 3 | Sungai Nungga | 22 | 20 | Rasanae Timur | Mpunda |



| Nama Sungai | | Panjang Sungai (km) | Lebar Sungai (m) | Kecamatan | |
|-------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|
| | | | | Hulu | Hilir |
| 4 | Sungai Kendo | 15 | 15 | Raba | Rasanae Barat |
| 5 | Sungai Ntobo | 12 | 15 | Raba | Rasanae Barat |
| 6 | Sungai Jatiwangi | 16 | 12 | Asakota | Asakota |
| 7 | Sungai Romo | 2 | 2,5 | Asakota | Asakota |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2023

Mata air yang ada di Kota Bima teridentifikasi berada di beberapa lokasi, terutama di Kecamatan Rasanae Timur, Raba dan Asakota. Mata air ini sebagian sudah dimanfaatkan oleh warga sebagai air baku air minum dan untuk mata air dengan debit yang besar telah dimanfaatkan oleh PDAM sebagai sumber air baku.

Daerah aliran sungai (DAS) atau dalam skala luasan kecil disebut Catchment Area adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh punggung bukit atau batas-batas pemisah topografi, yang berfungsi menerima, menyimpan dan mengalirkan curah hujan yang jatuh di atasnya ke alur-alur sungai dan terus mengalir ke anak sungai dan ke sungai utama, akhirnya bermuara ke danau/waduk atau ke laut.

Sedangkan air pada DAS merupakan aliran air yang mengalami siklus hidrologi secara alamiah. Selama berlangsungnya daur hidrologi, yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut yang tidak pernah berhenti, air tersebut akan tertahan (sementara) di sungai, danau/waduk, dan dalam tanah sehingga akan dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk hidup.

Suatu DAS harus dikelola untuk menjaga fungsi hidrologis dan orografinya. Pengelolaan ini mempunyai sifat memanipulasi sumber daya alam dan manusia yang terdapat di daerah tersebut untuk mendapatkan manfaat produksinya khususnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air (water yield) untuk kepentingan bersama akan tetapi hal ini tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada sumber daya air dan tanah pada DAS tersebut.

Sori Padolo merupakan DAS yang membelah Kota Bima dan melewati pusat Kota Bima. DAS ini mempunyai hilir di Kecamatan Wawo, Kota Bima yaitu Sori Na'e dan bermuara didua sungai di Kota Bima yaitu Sori Padolo dan Sori Melayu. Peningkatan debit sungai pada saat musim penghujan sering menyebabkan



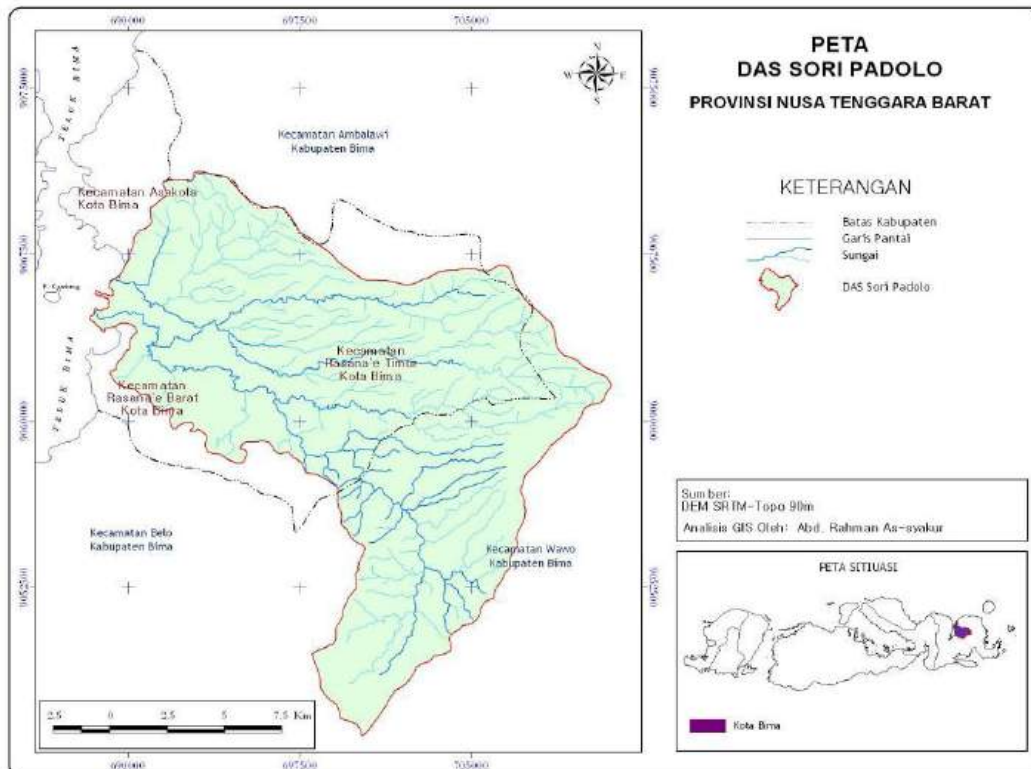
terjadinya banjir pada hulu DAS Sori Padolo. Hal ini disebabkan karena hulu DAS Sori Padolo relatif datar dengan kemiringan lereng didominasi oleh lereng 0-3%.

Luas DAS Sori Padolo adalah 25.255,92 Ha, dimana dari luas tersebut sekitar 15.603,71 Ha atau 61,78% melewati area Kota Bima dan hanya sekitar 9.652,21 Ha atau 32,22% yang melewati Kota Bima. Kecuali Desa Kolo, semua desa-desa yang ada di Kota Bima dilewati oleh DAS ini dan terdapat 14 desa yang 100% arealnya dilewati oleh DAS ini. Peta DAS dan sebaran desa-desa yang dilewatinya dapat dilihat pada Peta dan Tabel berikut.

DAS Sori Padolo didominasi oleh lereng dengan kelas lereng curam sampai sangat curam dimana luas lereng yang curam adalah 11.105,03 Ha atau 43,99% dari seluruh total luas DAS. Di areal DAS yang melewati Kota Bima, DAS ini juga didominasi oleh tingkat kelerengan yang curam yaitu sebesar 6.274,40 Ha atau 40,26% dari luas Kota Bima. Dilihat dari sebarannya, lereng yang datar mendominasi daerah hulu dari DAS Sori Padolo dan sebagian berada di hilir DAS yaitu di bagian tenggara dari DAS sedangkan lereng yang sangat curam mendominasi daerah di bagian timur laut dari DAS. Keadaan lereng yang datar di daerah hulu dan sangat curam di daerah hilir sebagian besar berada di Kota Bima, akan tetapi ada sebagian dari wilayah DAS yang mempunyai daerah datar yang berada di Kota Bima. Sebaran kondisi lereng di wilayah DAS ini dan luasannya dapat dilihat pada Peta dibawah.



Gambar 2.2. Peta DAS Sori Padolo



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2024-2044

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kota Bima memiliki beragam potensi besar untuk pengembangan daerah. Perkembangan infrastruktur dan letaknya yang strategis menjadikan kota ini sebagai pusat ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan budaya yang potensial. Dengan memanfaatkan kemampuan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki, maka pengembangan wilayah Kota Bima dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Selain itu, Kota Bima memiliki kekayaan karakteristik kehidupan sosial yang berasal dari perpaduan etnis, budaya, dan agama dari masyarakat Mbojo, Tionghoa, Arab, dan Melayu yang menjadi daya tarik khas. Potensi sosial berupa keragaman etnis, budaya dan agama masyarakat Kota Bima dapat dikemas dalam industri kreatif yang mengedepankan inklusi sosial, yaitu mencakup keterbukaan, toleransi dan interaksi sosial.

Rencana kawasan budidaya bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kota Bima. Rencana



pola ruang ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, partisipatif, dan berwawasan lingkungan sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan produksi terbagi menjadi menjadi dua yaitu hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap dengan luas masing-masing 2.927,39 ha dan 992,48 ha.
- b. Kawasan pertanian meliputi kawasan: pertanian lahan basah; sawah tadah hujan/tegalan, perkebunan dan kawasan peternakan, dimana lokasinya tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bima dengan total luasan sebesar 10.998,55 ha.
- c. Kawasan Perikanan meliputi Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan Perikanan Budidaya. Rencana kawasan perikanan tangkap di wilayah Kota Bima meliputi kawasan teluk Bima dan Kawasan perikanan budidaya direncanakan seluas kurang lebih 52,76 Ha terdapat di Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Asakota, Kecamatan Raba dan Kecamatan Mpunda.
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi meliputi Kawasan pertambangan mineral dan Kawasan pembangkitan tenaga listrik. Rencana kawasan pertambangan mineral terdiri dari kawasan peruntukan pertambangan batuan, yaitu batu, pasir, tanah urug seluas kurang lebih 4,80 ha, terdapat di Kecamatan Rasanae Timur. Rencana pembangkitan tenaga listrik yakni meliputi pengembangan kawasan pembangkitan listrik tebaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga mikro gas (PLTMG) dengan luas kurang lebih 26,95 ha.
- e. Kawasan Peruntukan Industri, yang terdiri dari kawasan industri dan pergudangan dengan kondisi eksisting di sekitar pelabuhan Bima sebagai lokasi bongkar muat barang dari pelabuhan untuk didistribusikan dan kawasan pergudangan di sekitar Kelurahan Dara, Paruga, Tanjung, Melayu, Jatibaru dan Jatiwangi.

Lokasi Pengembangan Kawasan industri dan pergudangan di Kota Bima direncanakan:

- Pengembangan industri pengeolahan hasil perikanan di Kelurahan Kolo dan industri pengolahan hasil perikanan di Kelurahan Kolo dengan luas kawasan sebesar 63,14 ha.



- Pengembangan Kawasan industri kecil atau industri tenunan tradisional dengan skala regional dan lokal berlokasi di Kelurahan Rabadompu Barat, Kelurahan Rabadompu Timur, Kelurahan Kumbe, dan di dukung oleh kegiatan industri tenun di seluruh Kelurahan di Kota Bima.
- f. Kawasan Pariwisata dengan rencana arahan lokasi Pengembangan Kawasan wisata yaitu:
- Pengembangan kawasan wisata pantai diarahkan pada kawasan pantai Lawata dan sekitarnya, kawasan pesisir teluk Bima mulai dari pantai Oi Ni'u Kawasan Lawata, sampai Amahami, kawasan pantai Kolo dan sekitarnya, dengan luas kawasan sebesar kurang lebih 22 Ha. Selain daripada itu wisata alam lainnya dikembangkan di Ndano Na'e Kelurahan Ntobo, Mata Air Tembo Kolo di Kelurahan Kolo dan Puncak Jatiwangi di Kelurahan Jatiwangi.
 - Pengembangan kawasan pariwisata belanja khususnya produk kerajinan dilakukan di Kelurahan Rabadompu Barat, Kelurahan Rabadompu Timur dan Kelurahan Oi Fo'o.
 - Pengembangan kawasan wisata budaya dan sejarah diarahkan pada kawasan Istana Bima dan sekitarnya, kawasan Makam Raja Bima dan sekitarnya, kawasan Kuburan Tolobali dan sekitarnya, kawasan Masjid Kuno Melayu dan sekitarnya, kawasan Kuburan Bata Pane dan sekitarnya.yang berada pada Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, dan Kelurahan Melayu.
 - Pengembangan kawasan pariwisata religi diarahkan di Kelurahan Paruga dan Kelurahan Pane.
 - Pengembangan kawasan wisata kuliner diarahkan di kawasan Amahami dan Coastal Road di Kelurahan Dara, dikembangkan terintegrasi dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.
- g. Kawasan Permukiman dengan rencana pengembangan perumahan seluas 1.970,3 ha yang diklasifikasikan dengan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah.
- Perumahan dengan kepadatan tinggi diarahkan di kawasan pusat kota dan sekitarnya meliputi kelurahan Melayu, Ule, Tanjung, Paruga, Dara, Sarae, Nae, Monggonao, Manggemaci, Pane, Penatoi, Lewirato, Mande, Santi,



- Rabadompu Barat, Rabadompu Timur, Rabangodu Utara, Penaraga, dan Kelurahan Sadia.
- Perumahan dengan kepadatan sedang diarahkan di kawasan sub pusat kota dan sekitarnya, meliputi kelurahan Sambinae, Panggi, Rontu, Kumbe, Oi Mbo, Jatiwangi, Jatibaru, Jatibaru Timur, Matakando, Rite, Penanae, dan Rabangodu Selatan.
 - Perumahan dengan kepadatan rendah diarahkan di kawasan pinggiran kota meliputi kelurahan Kolo, Ntobo, Kendo, Nungga, Lelamase, Dodu, Lampe, Oi Fo'ó, Nitu, dan Kodo.
- h. Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 214,94 ha meliputi:
- Kawasan Superblok Amahami seluas kurang lebih 31,51 Ha, terdapat di Kecamatan Rasanae Barat;
 - Kawasan Pasar Senggol seluas kurang lebih 9,36 Ha, terdapat di Kecamatan Rasanae Barat;
 - Kawasan Pasar Bawah Lama seluas kurang lebih 5,17 Ha, terdapat di Kecamatan Rasanae Barat;
 - Kawasan Pasar Raba, seluas kurang lebih 1,64 Ha, terdapat di Kecamatan Raba;
 - Kawasan Pasar Penaraga seluas kurang lebih 0,61 Ha, terdapat di Kecamatan Raba;
 - Kawasan Pasar Kumbe seluas kurang lebih 0,42 Ha, terdapat di Kecamatan Rasanae Timur;
 - Kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan utama seluas kurang lebih 103,80 Ha, terdapat di setiap Kecamatan di Kota Bima; dan
 - Kawasan pergudangan seluas kurang lebih 48,15 Ha, terdapat di Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota dan Kecamatan Mpunda
- i. Kawasan Perkantoran, rencana kawasan peruntukan perkantoran yaitu untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta dengan luas kawasan sebesar 40,85 Ha, dengan sebaran kawasan peruntukan perkantoran yaitu berada pada Kelurahan Penatoj, Kelurahan Sadia, Kelurahan



Lewirato, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Menggemaci, Kelurahan Paruga, dan Kelurahan Dara.

- j. Kawasan Transportasi, rencana Kawasan transportasi seluas kurang lebih 19,56 Ha, meliputi kawasan terminal penumpang, kawasan terminal barang, dan kawasan pelabuhan laut.
- k. Kawasan Pertahanan dan Keamanan, kawasan Pertahanan dan Keamanan atau lebih lazim disebut sebagai Kawasan militer dengan luasan sebesar 16,98 ha.

Sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan dapat dilihat melalui interaksi ekonomi wilayah. Koefisien Input-Output menggambarkan hubungan dinamis antar sektor produksi ekonomi melalui penyebaran input maupun output sektor-sektor ekonomi tersebut. Koefisien ini mempunyai manfaat untuk kegiatan perencanaan pembangunan maupun analisis, sebab perencanaan sektoral dengan menggunakan model yang diturunkan dari tabel Input-Output dapat dilakukan secara simultan dan memperlihatkan aspek keterkaitan antar sektor. Sejak tahun 2014, secara sektoral rata-rata distribusi PDRB tertinggi Kota Bima berada pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, diikuti dengan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, kemudian sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Transportasi dan Pergudangan.

Upaya pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan pemerintah, seperti pengembangan UMKM dan sektor pariwisata, belum mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian Kota Bima. Hal ini tercermin dari jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Bima tahun 2024 sebanyak 564 orang, padahal proyeksi di tahun 2045 idealnya wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang mencapai 1.202 jiwa. Artinya, dalam 20 tahun ke depan, Kota Bima perlu menarik wisatawan mancanegara hingga 18.288 jiwa. Selain itu, Kota Bima yang merupakan kota yang memiliki proporsi UMKM non pertanian yang sudah mencapai 80,96,7%. Namun, skala UMKM masih didominasi skala mikro sehingga memiliki kapasitas yang rendah dan sangat rentan terhadap guncangan. Kondisi ini menyebabkan UMKM di Kota Bima sulit untuk berkembang dan bersaing dengan pengusaha besar. Rasio kewirausahaan daerah Kota Bima juga masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 1,84%, sedangkan di negara maju dapat



mencapai 10 – 12% dari total penduduk. Di masa depan, pengembangan ekonomi lokal, khususnya sektor ekonomi kreatif dapat menjadi solusi yang kolaboratif dan menjadi daya dorong bagi perekonomian kota. Jika tidak menjadi perhatian khusus, dikhawatirkan UMKM dan pariwisata di Kota Bima akan terus tertinggal dan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Potensi ekonomi Kota Bima yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diantaranya melalui pengembangan ekonomi lokal melalui potensi wisata kuliner di Bima didominasi oleh makanan khas Bima seperti bingka dolu, kagape, dan pangaha bunga. Selanjutnya pengembangan wisata budaya dengan industri tenun tradisional bima dapat dikembangkan untuk memberikan daya ungkit pada perekonomian Kota Bima. Berikut merupakan kondisi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bima:

- a. Pengembangan dan pengoptimalan ekosistem wisata MICE (Meeting, Incentive, Covention dan Exhibition) akan menjadi daya ungkit bagi komponen-komponen ekonomi lain yang tentunya disertai dengan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi, dan ketersediaan supply bahan baku pada sektor ekonomi kreatif.
- b. Pengembangan UMKM masih perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kota Bima. Pertambahan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM akan berpengaruh besar terhadap sisi produktivitas, kualitas serta manajemen pengelolaan khususnya pemasaran.
- c. Jumlah pelaku usaha terampil masih rendah dikarenakan fasilitasi pembinaan tenaga kerja serta ketersediaan lembaga kursus latihan rujukan masih minim.

Kota Bima terus berinovasi dengan menghadirkan berbagai pilihan wisata baru, seperti wisata edukasi, wisata religi, wisata alam, wisata budaya dan wisata kuliner. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan minat wisatawan yang semakin beragam. Selain itu, upaya promosi gencar dilakukan melalui berbagai platform media, baik online maupun offline. Kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, agen perjalanan, dan media, juga diintensifkan untuk meningkatkan awareness dan menarik wisatawan. Kota Bima ingin memastikan bahwa semua orang mengetahui tentang berbagai potensi wisata yang ditawarkannya. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan daya tarik wisata di Kota Bima diantaranya, mengadakan pelatihan pengemasan atraksi dan paket wisata



untuk Masyarakat pelaku wisata, merintis wisata baru yang dikelola Masyarakat dan mendorong investasi, mengadakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata untuk Masyarakat pelaku wisata, meningkatkan pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata sesuai prioritas, meningkatkan jangkauan promosi dengan kombinasi media offline dan online.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan identifikasi daya dukung dan daya tampung Lingkungan hidup Indonesia yang secara spasial disusun pada skala 1 : 1.000.000 dan 1.250.000 dan diukur dengan pendekatan jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagaimana yang dilakukan dalam *millenium Ecosystem Assessment – United Nation*. Asumsinya, semakin tinggi jasa ekosistem semakin tinggi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jasa ekosistem pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisiecoregion dan penutup lahan (*lancover / Lanuse*) sebagai penaksir atau proxy.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kapasitas lingkungan dalam menerima residu, limbah dan juga kemampuan menampung kegiatan pembangunan. Secara fisik daya tampung lahan dilihat pada kemampuan lahan untuk melihat kesesuaian kegiatan pembangunan di atasnya.

2.1.3.1 Daya Dukung Air

Ketersediaan air sangat penting khususnya untuk menunjang aktivitas pertanian. Air merupakan faktor penting yang dapat menentukan berhasil tidaknya suatu tanaman tumbuh dengan optimal. Berkurangnya ketersediaan air (kekeringan) ataupun penggunaan yang berlebihan, akan sangat berdampak pada kegiatan pertanian dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, informasi mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia air bersih penting untuk diketahui, sehingga keberlanjutannya dapat dijaga serta pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik.



Daya dukung air di Kota Bima terdiri dari kategori daya dukung air belum terlampaui 2,321,5 Ha dan kategori terlampaui 18.532,84 Ha, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Daya Dukung Air Kota Bima Tahun 2023

| No | Kecamatan | Daya Dukung Air (ha) | | |
|--------------|---------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | Belum Terlampaui | Terlampaui | Jumlah |
| 1 | Asakota | 507,59 | 5.669,12 | 6.176,71 |
| 2 | Mpunda | - | 1.603,89 | 1.603,89 |
| 3 | Raba | 379,56 | 5.604,12 | 5.983,68 |
| 4 | Rasanae Barat | - | 738,04 | 738,04 |
| 5 | Rasanae Timur | 1.434,35 | 4.917,67 | 6.352,02 |
| Total | | 2.321,5 | 18.532,84 | 20.854,34 |

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029, 2025

2.1.3.2 Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan adalah kemampuan lahan dalam suatu wilayah untuk mendukung kebutuhan hidup manusia, terutama dalam penyediaan ruang dan sumber daya bagi aktivitas pertanian, permukiman, infrastruktur, dan fungsi ekologis, tanpa menurunkan kualitas lingkungan atau mengurangi potensi lahan bagi generasi mendatang. Konsep ini berangkat dari keseimbangan antara luas lahan produktif yang tersedia dan kebutuhan lahan per kapita untuk menopang kehidupan masyarakat.

Metode perhitungan daya dukung lahan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yang memadukan antara ketersediaan lahan produktif (khususnya lahan pertanian) dan jumlah penduduk yang bergantung pada lahan tersebut.

Analisis CCR (Carrying Capacity Ratio) merupakan salah satu alat analisis dalam perencanaan pembangunan pertanian daerah yang dapat menggambarkan keadaan daya dukung wilayah pertanian daerah. Informasi yang dapat diperoleh dari hasil analisa daya dukung secara umum akan menyangkut masalah kemampuan daya dukung yang dimiliki wilayah tersebut, oleh karenanya CCR / daya dukung lahan bermanfaat untuk :



- 1) Untuk mengetahui suatu wilayah pertanian masih mampu mendukung kebutuhan pokok penduduk dengan melihat pertumbuhan penduduk;
- 2) Untuk memberikan informasi kepada para perencana atau pihak lain dalam rangka mengembangkan potensi penduduk;
- 3) Dapat digunakan sebagai bahan untuk mensosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui sistem pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.

Metode ini menggunakan data luas lahan yang dipanen dalam setahun, persen penduduk petani dikalikan jumlah KK, dan rata-rata lahan dimiliki petani. Perhitungan metode ini adalah sebagai berikut:

$$CCR = \frac{A \times r}{H \times h \times f}$$

Keterangan:

CCR : kemampuan daya dukung.

A : jumlah total area yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian.

r : frekuensi panen perhektar pertahun.

H : jumlah KK (rumah tangga).

h : presentase penduduk yang tinggal.

F : ukuran lahan rata-rata.

Asumsi:

h : Penduduk yg tinggal di kota 100 %

f : yang berkerja disektor pertanian

Nilai daya dukung lahan memiliki interpretasi sebagi berikut:

- Apabila CCR >1 berarti wilayah masih dapat memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan;
- Apabila CCR <1 diwilayah tersebut tidak mungkin lagi dilakukan Pembangunan ekspansif dan eksploitatif lahan. Kemampuan memenuhi kebutuhan pokok penduduk berkurang sehingga perlu peningkatan produksi, intesifikasi, dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk;



- Apabila CCR =1 maka wilayah tersebut masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk. Pemenuhan kebutuhan masih dapat diatasi, namun kondisi ini perlu diwaspadai oleh pemerintah daerah masalah pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.3. Daya Dukung Lahan Kota Bima Tahun 2030

| No. | Kecamatan | Luas Lahan (ha) | | | Kemampuan Daya Dukung Tahun 2030 |
|-----|---------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | Sawah Irigasi Panen 3 kali/thn | Sawah Non Irigasi Panen 1 kali/thn | Non Pertanian Panen 1 kali/thn | |
| 1 | Rasanae Barat | 3,37 | - | - | 0,00 |
| 2 | Mpunda | 206,43 | - | - | 0,09 |
| 3 | Rasanae Timur | 459,22 | 146,56 | - | 0,35 |
| 4 | Raba | 358,70 | 131,67 | - | 0,15 |
| 5 | Asakota | 166,36 | 29,74 | - | 0,06 |
| | Jumlah | 1.194,08 | 307,97 | - | 0,06 |

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bima, hasil perhitungan daya dukung lahan tahun 2030 menunjukkan nilai 0,06. Artinya ketersediaan lahan produktif di Kota Bima sangat jauh di bawah kebutuhan. Kondisi ini mengindikasikan tekanan besar terhadap lahan akibat keterbatasan wilayah (Kota Bima memiliki luas hanya $\pm 222 \text{ km}^2$) serta meningkatnya kebutuhan untuk permukiman, fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi. Tekanan terhadap lahan dapat berdampak pada alih fungsi lahan pertanian, penurunan ruang terbuka hijau, dan peningkatan risiko bencana lingkungan seperti banjir.

2.1.3.3 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Kebutuhan pangan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan penduduk akan pangan yang terus meningkat tentunya akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam. Asumsi dalam memperkirakan kebutuhan pangan adalah konsumsi beras menurut Kementerian Pertanian adalah 124 kg/orang/tahun atau 0,124 ton/orang/tahun atau 340 gram/orang/hari.



Jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Bima terdiri dari kategori sangat rendah 97,69 Ha, kategori rendah 581,34 Ha, sedang 14.582,24 Ha, kategori tinggi 3.771,66 Ha, dan kategori sangat tinggi 1.821,41 Ha.

Tabel 2.4. Distribusi Luas Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di Kota Bima

| Kecamatan | Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (ha) | | | | | Jumlah |
|------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | |
| Asakota | | 77,03 | 4.352,36 | 1.245,55 | 501,77 | 6.176,71 |
| Mpunda | 30,97 | 189,94 | 869,27 | 136,05 | 377,67 | 1.603,89 |
| Raba | 28,39 | 108,29 | 4.101,94 | 1.025,79 | 719,26 | 5.983,68 |
| Rasanae Barat | 0,39 | 206,08 | 382,71 | 4,43 | 144,43 | 738,04 |
| Rasanae Timur | 37,94 | | 4.875,96 | 1.359,83 | 78,28 | 6.352,02 |
| Kota Bima | 97,69 | 581,34 | 14.582,24 | 3.771,66 | 1.821,41 | 20.854,34 |

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029

2.1.3.4 Jasa Ekosistem Penyediaan Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanan), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutup lahan.

Jasa ekosistem penyedia air di Kota Bima terdiri dari kategori sangat rendah 2.302,61 ha, kategori rendah 12.445,06 ha, sedang 5.937,18 ha, kategori tinggi 102,36 Ha, dan kategori sangat tinggi 67,13 ha.

Tabel 2.5. Distribusi Luas Layanan Jasa Ekosistem Penyedia Air di Kota Bima

| Kecamatan | Jasa Ekosistem Penyedia Air (ha) | | | | | Jumlah |
|-----------|----------------------------------|----------|----------|--------|---------------|----------|
| | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | |
| Asakota | - | 4.942,44 | 1.217,35 | 11,48 | 5,44 | 6.176,71 |
| Mpunda | 452,87 | 299,42 | 823,46 | 8,13 | 20,02 | 1.603,89 |



| Kecamatan | Jasa Ekosistem Penyedia Air (ha) | | | | | Jumlah |
|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | |
| Raba | 556,93 | 3.339,33 | 2.025,01 | 62,40 | | 5.983,68 |
| Rasanae Barat | 242,37 | 378,66 | 97,72 | 19,28 | | 738,04 |
| Rasanae Timur | 1.050,44 | 3.485,20 | 1.773,64 | 1,07 | 41,67 | 6.352,02 |
| Kota Bima | 2.302,61 | 12.445,06 | 5.937,18 | 102,36 | 67,13 | 20.854,34 |

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Pangan

2.1.4.1. Indeks Ketahanan Pangan

Hasil perhitungan indeks ketahanan pangan (IKP) didasarkan atas delapan sub-indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan yang memberikan gambaran peringkat pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Komposit sub-indikator indeks ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).
9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunan GFSI. Goodridge (2007) menyatakan apabila variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Oleh sebab itu, khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya



digunakan delapan indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, bobot rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih adalah nol karena IKP kota tidak menggunakan indikator dari aspek ketersediaan pangan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada delapan indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut-off poin IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Perkembangan IKP Kota Bima sejak tahun 2018 terus mengalami peningkatan, meskipun tidak begitu signifikan. Komponen kunci dari indeks ini untuk skala kota melibatkan aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, karena kota tidak menghasilkan pangan secara langsung, melainkan mengandalkan pasokan pangan dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya yang menjadi daerah pendukung kota tersebut. Berikut ini merupakan capaian indeks ketahanan pangan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.6. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

| NO | INDIKATOR | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 65,90 | 69,28 | 70,25 | 74,31 | 74,96 |

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, tren IKP Kota Bima mengalami peningkatan. Kota Bima mencapai tingkat IKP tertinggi sepanjang periode pada tahun 2024 dengan angka 74,96. Melihat tren ini, Pemerintah Kota Bima menargetkan IKP untuk terus mengalami peningkatan setiap tahun mengingat jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya demi menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengurangi beban masyarakat akan kebutuhan dasar.



2.1.4.2. Konsumsi Listrik per Kapita

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan.

Daya terpasang di Kota Bima pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 79.993.664 VA. Sedangkan pelanggan listrik mengalami peningkatan dari 51.116 pelanggan di tahun 2022 menjadi sebesar 55.471 pada tahun 2023, sehingga jumlah kebutuhan listrik pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 97.755.592 kWh.

Tabel 2.7. Daya Listrik Terpasang dan Jumlah Kebutuhan Listrik Kota Bima Tahun 2020-2024

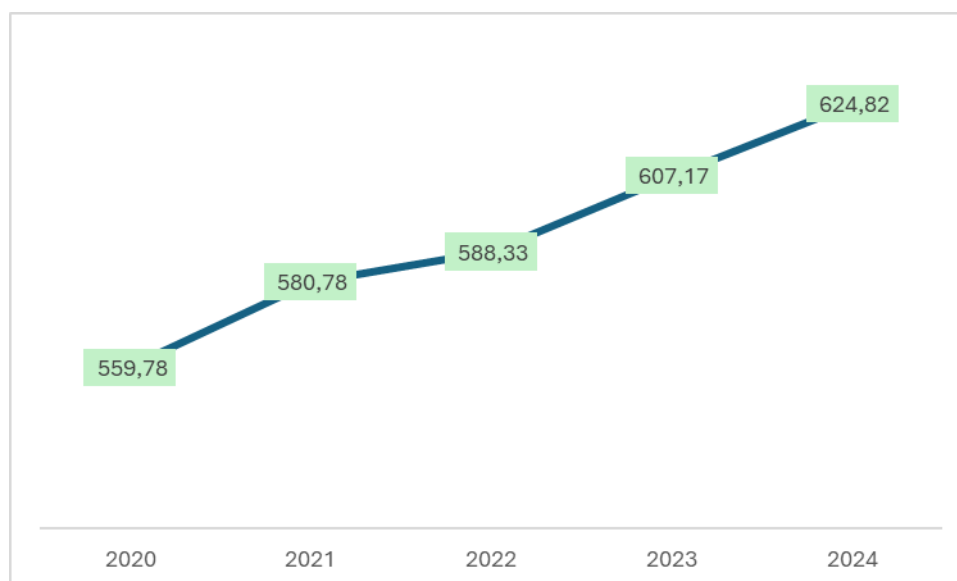
| No | URAIAN | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--------------------------|--------|---------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Daya Listrik Terpasang | VA | 64.093.020 | 69.698.37 | 74.132.370 | 78.616.270 | 82.547.083 |
| 2 | Jumlah Kebutuhan Listrik | kWh | 86.858.486,25 | 94.947.511,5 | 92.581.441 | 97.755.592 | 102.782.583 |

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Area Bima, 2025

Konsumsi listrik per kapita merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta aktivitas ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Dalam periode lima tahun terakhir (2020–2024), konsumsi listrik per kapita di Kota Bima menunjukkan tren yang meningkat, yaitu dari 559,78 kWh pada tahun 2020 menjadi 624,82 kWh pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan tahunan konsumsi listrik mencapai sekitar 2,1%, yang mencerminkan peningkatan kebutuhan energi seiring dengan tumbuhnya aktivitas masyarakat.



Gambar 2.3. *Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2020-2024*



Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Area Bima, 2025

Peningkatan konsumsi listrik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, aktivitas usaha mikro dan kecil, serta berkembangnya sektor jasa dan perdagangan di Kota Bima. Proses urbanisasi dan perluasan kawasan permukiman juga meningkatkan kebutuhan listrik rumah tangga. Kinerja PLN dan Pemerintah Daerah dalam memperluas jaringan listrik hingga ke wilayah pinggiran turut mendukung meningkatnya konsumsi. Ketersediaan infrastruktur listrik dan penambahan jumlah pelanggan baru menjadi faktor kunci.

2.1.4.3. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Layak

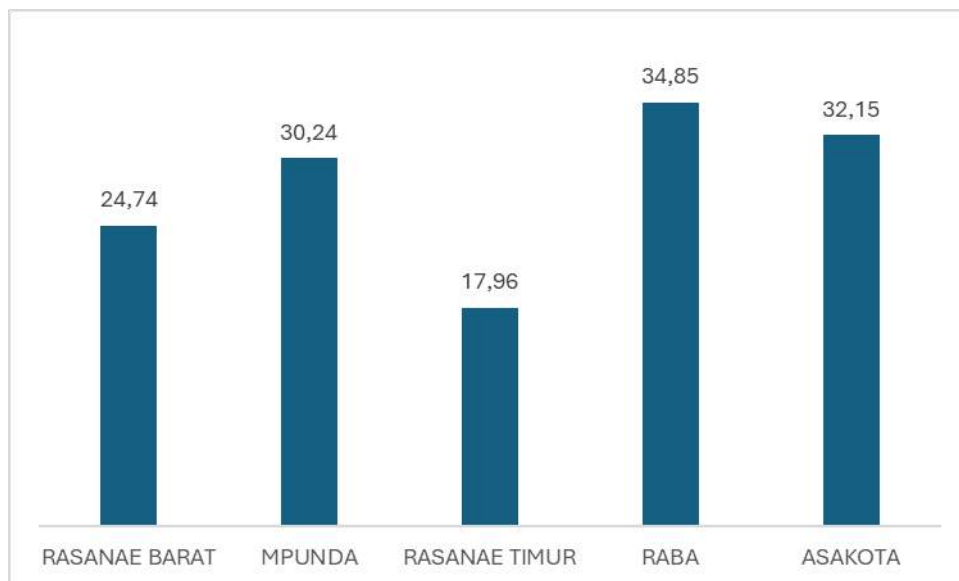
Dalam penyediaan air minum layak dan aman, pemerintah daerah perlu memprioritaskan perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun, peningkatan dan pembangunan SPAM serta pengelolaan aset yang diharapkan dapat menurunkan tingkat non revenue water (NRW)/kehilangan air maksimal 25 persen serta menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah terbangun. Pelaksanaan penyediaan air minum berpedoman pada kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai alat pengatur dalam penyelenggaraan SPAM dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Pemerintah Nomor 2



Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi "Hak Rakyat Atas Air" terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau: tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan Penyedia jasa dan tercapainya cakupan pelayanan air minum.

Pada tahun 2024, tingkat akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum layak di Kota Bima tercatat sebesar **27,99%**. Capaian ini menggambarkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkait layanan air bersih, meskipun terdapat variasi capaian antar kecamatan. Kecamatan Raba mencatat capaian tertinggi sebesar 34,85%, menunjukkan ketersediaan infrastruktur dan pelayanan air minum yang relatif lebih baik. Sementara Rasanae Timur menjadi kecamatan dengan capaian terendah yaitu hanya 17,96%, yang mengindikasikan masih minimnya cakupan layanan air minum layak di wilayah tersebut.

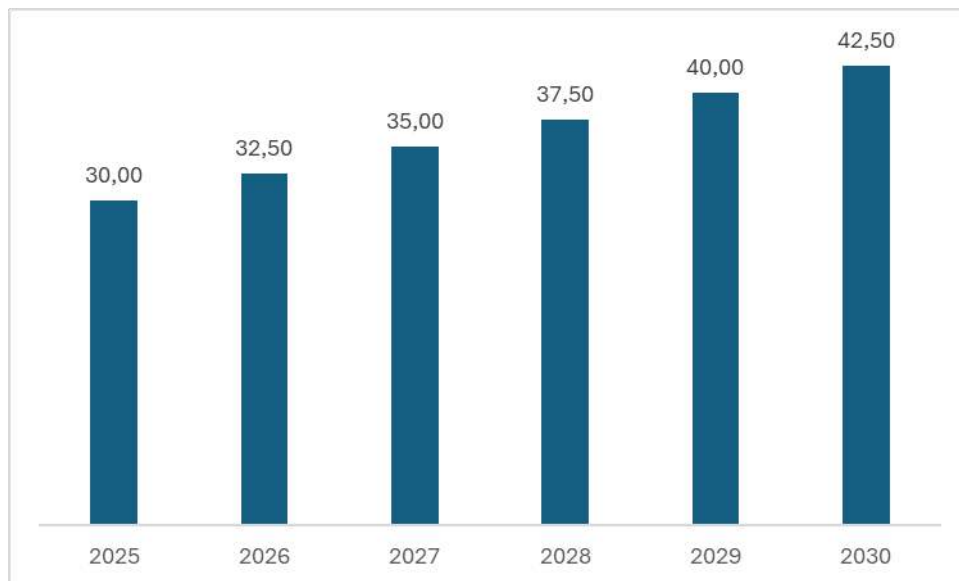
Gambar 2.4. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Layak Tahun 2024



Sumber : Sepakat, Bappenas, 2025



Gambar 2.5. *Proyeksi Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Layak Tahun 2025-2030*



Sumber: Bappeda, 2025, Hasil Analisis

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kota Bima merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Bima menghadapi tantangan serius terkait peningkatan beban lingkungan akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, aktivitas ekonomi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena lingkungan yang sehat merupakan fondasi utama bagi kehidupan yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Lingkungan yang bersih dan sehat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Dengan pengelolaan lingkungan yang baik, beban biaya kesehatan dapat ditekan dan harapan hidup meningkat. Lingkungan yang bebas dari pencemaran juga mendukung kenyamanan dan produktivitas kerja, terutama bagi sektor informal, UMKM, dan kegiatan ekonomi berbasis jasa. Kota Bima dibangun dengan tujuan untuk memiliki tata kelola lingkungan yang baik lebih menarik bagi investor, terutama untuk sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang ramah lingkungan.

Kesejahteraan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pendekatan ekonomi hijau (green

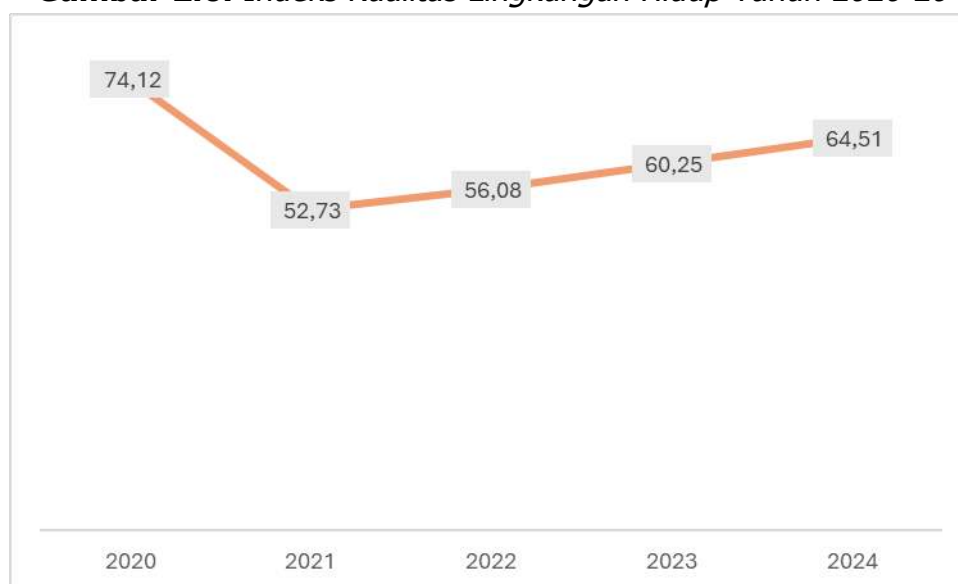


economy) dan ekonomi biru (blue economy). Keduanya menjadi fondasi strategis untuk menopang keberlanjutan sektor-sektor utama ekonomi Kota Bima, seperti perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa. Pertanian ramah lingkungan mengurangi ketergantungan pada pestisida dan pupuk kimia, yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil tani dan kesehatan petani serta konsumen. Energi terbarukan, seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), membantu menekan biaya energi bagi pelaku usaha mikro dan sektor publik. Pengembangan wisata alam dan budaya yang berbasis konservasi mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam usaha homestay, kuliner lokal, dan jasa wisata, yang menambah pendapatan.

2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dengan mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien. Nilai indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Bima untuk tahun 2024 adalah 64,51 dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 41,43 nilai Indeks kualitas Udara (IKU) sebesar 94 dan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) sebesar 49,58. Dalam rentang status IKLH, IKLH Kota Bima tahun 2024 dengan skor 64,51 termasuk dalam kriteria SEDANG ($50 = x < 70$)

Gambar 2.6. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024*



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024



Indeks Kualitas Air Kota Bima menunjukkan angka 41,43, yang termasuk dalam kategori buruk hingga sedang. Hal ini menandakan bahwa kualitas air di wilayah ini masih menjadi isu krusial yang harus ditangani secara komprehensif. Beberapa faktor yang berpengaruh antara lain pembuangan limbah domestik langsung ke badan air, khususnya di wilayah padat penduduk, minimnya sistem pengolahan air limbah (IPAL) di sektor permukiman dan komersial, penggundulan vegetasi di daerah tangkapan air yang memperparah sedimentasi dan pencemaran air.

Tabel 2.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bima Tahun 2024

| No | Indikator | Nilai | Bobot | Hasil |
|----|-------------------------------|-------|--------|-------|
| 1 | Indeks Kualitas Air | 41,43 | 37,60% | 15,58 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara | 94 | 40,50% | 38,07 |
| 3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 49,58 | 21,90% | 10,86 |
| | IKLH Kota Bima | | 100% | 64,51 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan angka 49,58, yang mencerminkan tingkat tutupan lahan yang sedang hingga rendah. Penurunan kualitas tutupan lahan di Kota Bima dipengaruhi oleh alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan komersial, terutama di pusat kota dan wilayah pesisir, minimnya perlindungan dan konservasi kawasan hijau, baik di daerah sempadan sungai maupun perbukitan serta aktivitas masyarakat di lereng dan bukit, yang meningkatkan risiko degradasi dan longsor.

Indeks Kualitas Udara mencatat angka 94, menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Bima sangat baik. Meskipun kualitas udara Kota Bima sangat baik, tantangan besar masih dihadapi dalam pengendalian pencemaran air dan perlindungan tutupan lahan. Nilai akhir IKLH sebesar 64,51 merupakan cerminan bahwa lingkungan hidup Kota Bima berada pada kondisi cukup baik, namun belum ideal. Untuk itu, kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan pendekatan ekonomi hijau, konservasi lingkungan, dan penataan ruang berbasis daya dukung ekologis sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi kota secara berkelanjutan.



Kualitas lingkungan hidup saat ini dimulai dengan mengetahui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidupnya. Dari hasil nilai IKLH Kota Bima yang dihitung sebesar **64,51** dari target nilai indeks tahun 2024 sebesar 69,44, maka dapat disimpulkan bahwa Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bima masih dalam kategori **SEDANG**, sehingga perlu di susun alternatif pengelolaan lingkungan agar terjadi peningkatan pada periode berikutnya.

2.1.5.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Penyediaan sanitasi aman merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Dalam konteks global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) khususnya Target 6.2, secara tegas menetapkan bahwa pada tahun 2030 semua orang harus memiliki akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai, serta mengakhiri buang air besar sembarangan. Target ini juga menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Sanitasi yang aman tidak hanya dilihat dari tersedianya jamban, tetapi juga dari pengelolaan limbah tinja yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan, mulai dari pemakaian, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir yang layak. Dalam konteks ini, keberadaan sistem pengolahan limbah domestik menjadi sangat vital, baik berbasis individu (onsite) maupun terpusat (offsite).

Untuk memperkuat pelaksanaan di tingkat nasional dan daerah, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Regulasi ini menetapkan lima pilar yang harus diwujudkan dalam masyarakat, yaitu:

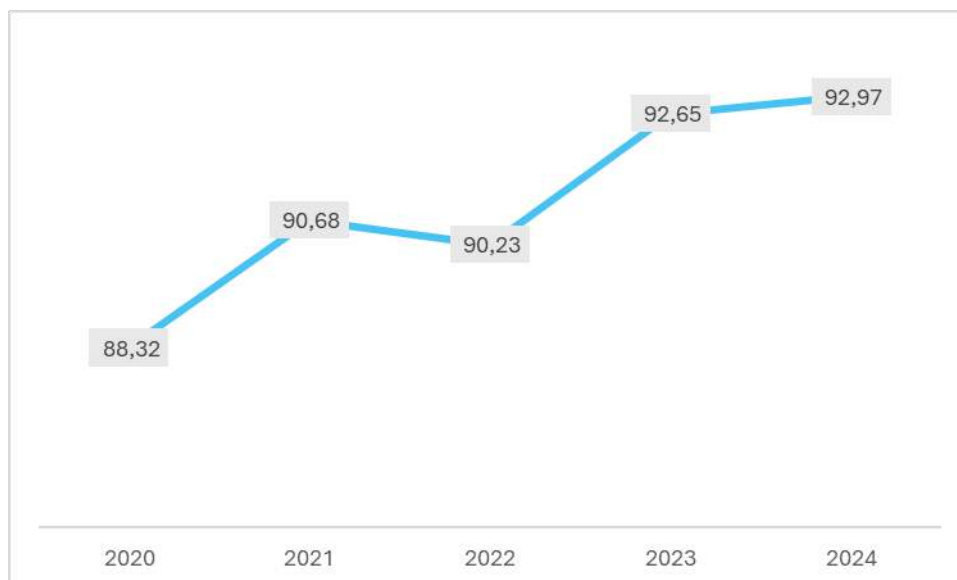
- a. Stop buang air besar sembarangan (BABS);
- b. Cuci tangan pakai sabun (CTPS);
- c. Pengelolaan air minum rumah tangga;
- d. Pengelolaan sampah rumah tangga;
- e. Pengelolaan limbah cair rumah tangga.



Dari lima pilar tersebut, pilar pertama tentang penghentian praktik buang air besar sembarangan dan penggunaan jamban sehat, menjadi pondasi penting untuk menjamin sanitasi aman. Jamban yang dimaksud harus tidak mencemari lingkungan, aman digunakan, tertutup, memiliki fasilitas pembuangan limbah tinja yang memadai, serta tidak menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

Akses terhadap sanitasi aman secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak akan lebih sedikit mengeluarkan biaya pengobatan, meningkatkan kehadiran anak di sekolah, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, menurunkan angka penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan stunting. Selain itu, sanitasi aman juga merupakan hak dasar manusia dan bagian integral dari pembangunan kota yang layak huni, inklusif, dan ramah terhadap kelompok rentan.

Gambar 2.7. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2020-204



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

2.1.5.3. Pengelolaan Sampah

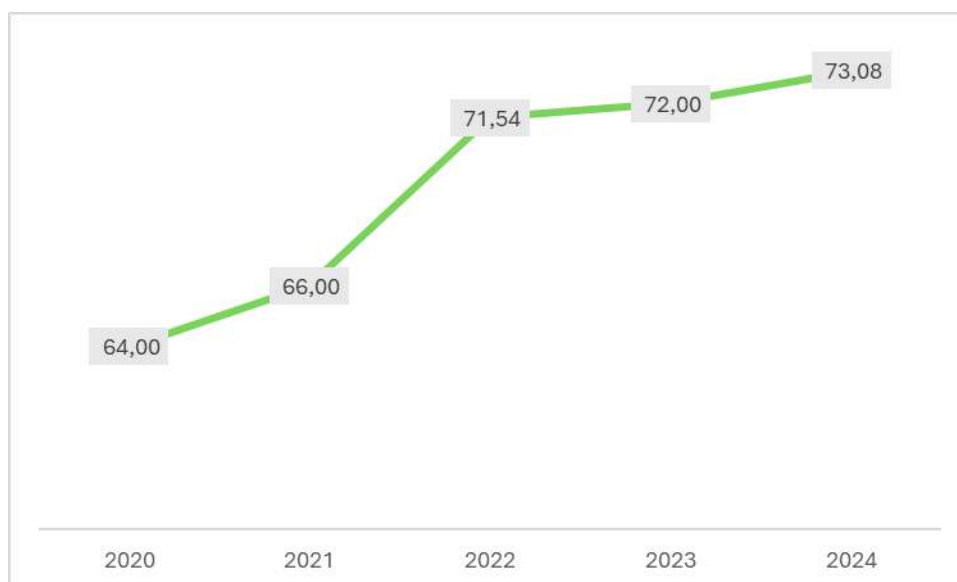
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir, mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem pengumpulan sampah secara



berkelanjutan, termasuk memberikan akses kepada seluruh rumah tangga terhadap layanan tersebut (Pasal 11 dan 12). Dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menegaskan bahwa pengumpulan sampah merupakan bagian dari sistem pelayanan persampahan yang harus dilakukan secara terjadwal dan dengan sarana angkut yang sesuai. PP ini juga mengamanatkan agar pemerintah daerah menyusun rencana dan menyediakan anggaran untuk menjamin cakupan layanan pengumpulan sampah secara optimal.

Pengelolaan sampah merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang bersih, sehat, dan layak huni. Salah satu indikator utama dalam pengelolaan sampah adalah proporsi rumah tangga yang memperoleh layanan penuh pengumpulan sampah, yaitu rumah tangga yang secara rutin dan menyeluruh terlayani dalam proses pengambilan dan pengangkutan sampah menuju TPS atau TPA sesuai standar teknis. Berdasarkan data capaian Kota Bima tahun 2020–2024, terjadi tren peningkatan yang cukup signifikan terhadap indikator ini.

Gambar 2.8. *Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah*



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025



Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah rumah tangga menunjukkan kemajuan positif, meskipun laju peningkatan cenderung melambat dalam dua tahun terakhir. Capaian tahun 2024 sebesar 73,08% menunjukkan bahwa hampir tiga per empat rumah tangga di Kota Bima telah menikmati layanan pengumpulan sampah secara menyeluruh, sementara sisanya masih berpotensi tidak terlayani atau hanya terlayani sebagian.

Capaian layanan pengumpulan sampah yang meningkat dari 64% (2020) menjadi 73,08% (2024) merupakan refleksi dari peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana-prasarana, dan perluasan jangkauan layanan persampahan. Meski demikian, masih terdapat sekitar 26,92% rumah tangga yang belum terlayani sepenuhnya, yang dapat berdampak pada meningkatnya praktik pembuangan sampah tidak pada tempatnya, timbulnya risiko kesehatan lingkungan, pencemaran, dan genangan air, dan tertinggalnya kelompok masyarakat miskin dan permukiman padat dari akses layanan.

Indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mencerminkan derajat pelayanan dasar lingkungan dan menjadi indikator kunci dalam mewujudkan Kota Bimayang Bersih, Indah, Sehat, dan Asri. Komitmen Pemerintah Kota Bima untuk mencapai cakupan layanan 100% pada tahun-tahun mendatang harus terus didukung oleh kebijakan anggaran, perbaikan infrastruktur, peningkatan SDM, dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya.

2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kota Bima merupakan salah satu daerah yang dilewati oleh jalur cincin api sehingga potensi bencana gempa bumi sangat besar. Disamping rawan bencana gempa bumi, wilayah Kota Bima juga rawan bencana banjir yang meliputi seluruh wilayah kecamatan Rasanae Barat, Sebagian Kecamatan Mpunda, Sebagian Kecamatan Raba, Sebagian Kecamatan Asakota dan sebagian Kecamatan Rasanae Timur. Pada tahun 2016 terdapat 35 kelurahan yang terpapar bencana banjir bandang dari total 38 Kelurahan pada saat itu. Potensi bencana yang lain meliputi tanah longsor, angin puting beliung, cuaca ekstrim serta bencana kebakaran yang

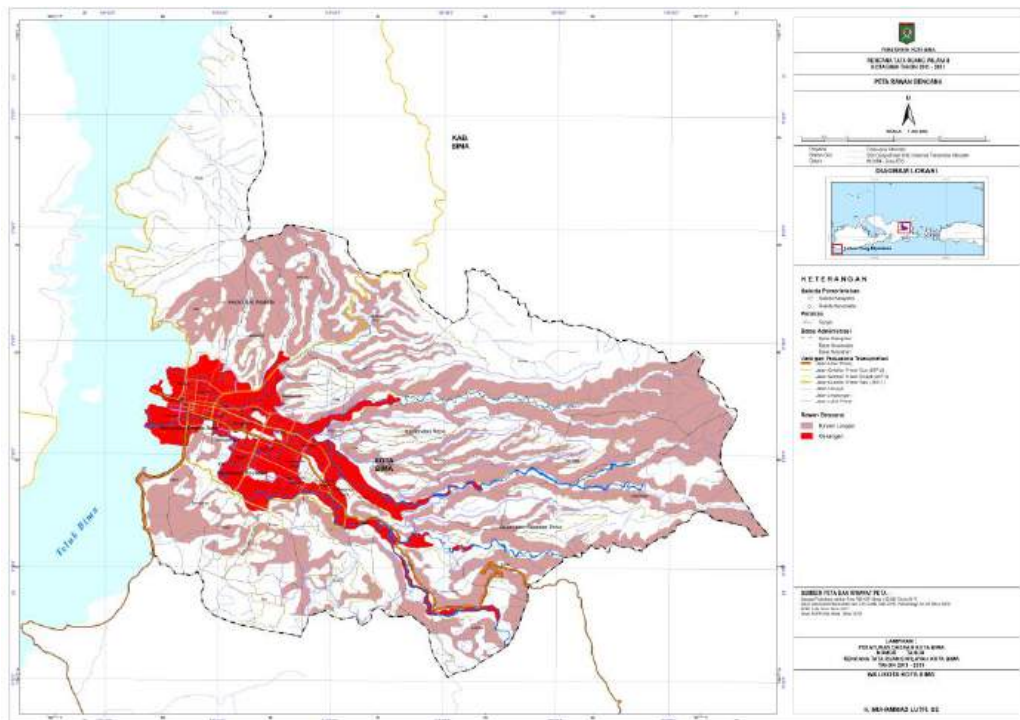


berakibat timbulnya korban jiwa, harta, benda, kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum. Dan untuk menghindari atau meminimalkan korban jiwa akibat bencana yg terjadi maka disediakan ruang evakuasi, untuk memberikan ruang yang aman sebagai tempat berlindung dan tempat penampungan penduduk untuk sementara dari bencana banjir, bencana gelombang pasang/tsunami, bencana gempa bumi, serta bencana kebakaran. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir pada kawasan pinggir sungai berupa bangunan fasilitas umum, ruang serbaguna, kantor kelurahan dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana.
2. pengembangan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami pada kawasan pesisir pantai Kota di Paruga Nae dan Lapangan Sambinae.
3. pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi dilakukan pada: bagian timur (Kecamatan Rasanae Timur di Lapangan Lampe dan Lapangan Kodo, Kecamatan Raba di lapangan Pahlawan Raba serta bangunan lainnya yang memungkinkan untuk menampung korban bencana). Bagian tengah (Kecamatan Mpunda) di Lapangan SMK 2, Lapangan Kantor Walikota Bima, dan bangunan sosial, serta bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana. Bagian barat (Kecamatan Rasanae Barat di Gedung Paruga Nae dan Satdion Manggemaci dan Kecamatan Asakota di Lapangan SPMA, bangunan sosial, dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana.



Gambar 2.9. Peta Rawan Bencana Kota Bima



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2024-2044

Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kajian iklim yang dilakukan oleh BAPPENAS pada 2012 memperkirakan bahwa pada masa mendatang secara umum curah hujan akan naik pada bulan basah dan turun pada bulan kering. Dengan demikian ancaman terhadap hujan lebat dan banjir semakin bertambah di samping faktor kapasitas lingkungan dalam menghadapi situasi curah hujan tinggi. Sementara pada musim kemarau beberapa daerah yang jauh dari akses air akan mengalami ancaman kekeringan. Selain curah hujan, dalam kajian BAPPENAS menunjukkan bahwa kenaikan suhu akan terus terjadi baik secara global yang dipengaruhi oleh meningkatnya oleh meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer dan secara mikro yang dipengaruhi oleh laju degradasi tutupan lahan yang terus meningkat. Suhu secara global ini juga memicu terjadinya peningkatan cuaca ekstrem akibat terpengaruhnya cuaca global yang dipicu suhu udara dan permukaan laut.

2.1.6.1. Indeks Kerentanan Iklim

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem.



Ketifa faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi.

Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan resiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari Potensi Desa (Podes). Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan resiko dan dampak iklim. Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan Perubahan iklim di kota Bima menunjukkan kerentanan dengan kategori tidak rentan, agak rentan dan cukup rentan.

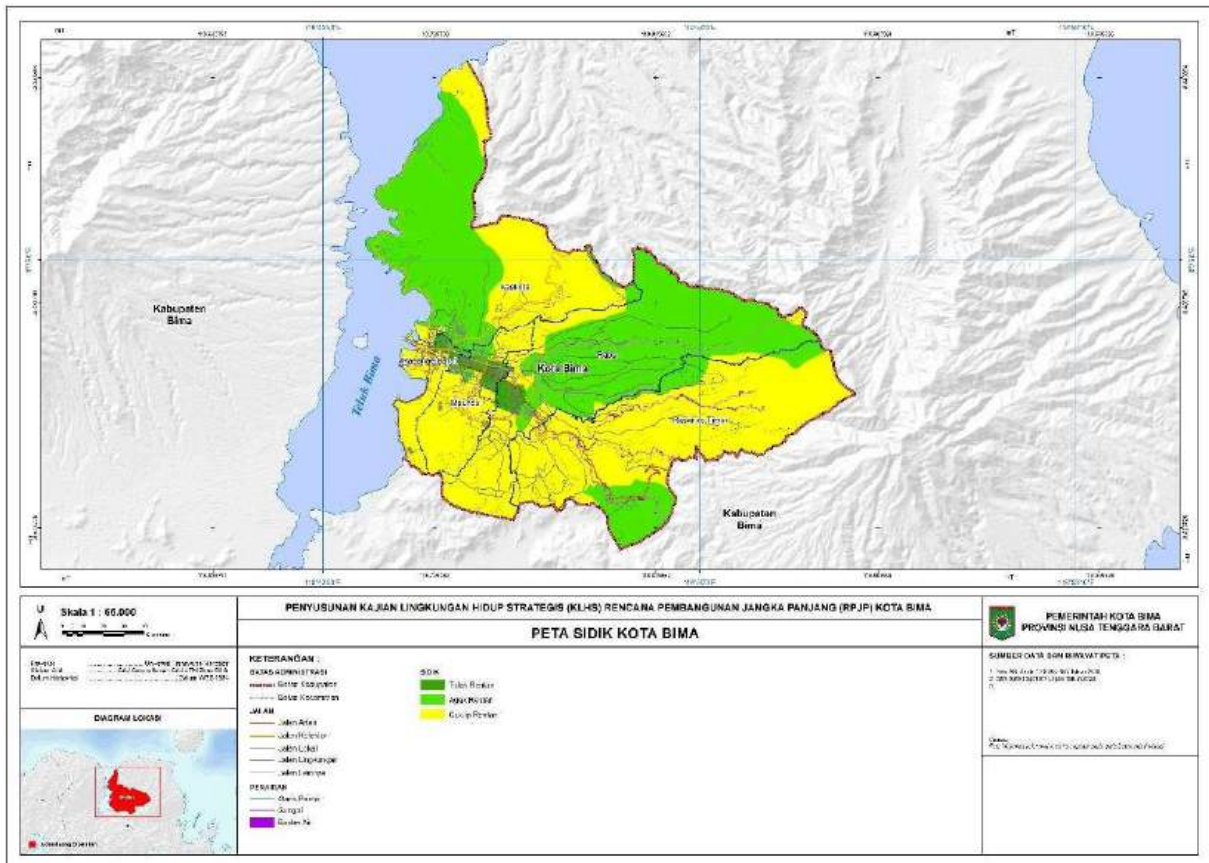
Tabel 2.9. Indeks Kerentanan Perubahan iklim Kota Bima

| Kecamatan | SIDIK (Ha) | | | Jumlah (Ha) |
|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Tidak Rentan | Agak Rentan | Cukup Rentan | |
| Asakota | 0,98 | 3.815,73 | 2.360,00 | 6.176,71 |
| Mpunda | 180,98 | 119,85 | 1.303,05 | 1.603,89 |
| Raba | 151,99 | 4.221,35 | 1.610,34 | 5.983,68 |
| Rasanae Barat | 65,49 | 30,23 | 642,32 | 738,04 |
| Rasanae timur | | 1.128,63 | 5.223,39 | 6.352,02 |
| Jumlah (Ha) | 399,44 | 9.315,80 | 11.139,10 | 20.854,34 |

Sumber : Peta Sidik Kota Bima



Gambar 2.10. Peta SIDIK di Kota Bima



Sumber : Peta Sidik Kota Bima

2.1.6.2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Pengaturan iklim memiliki peran penting dalam menjaga suhu, kelembaban hujan. Dalam Konteks global pengaturan iklim juga menyangkut isu pengendalian gas rumah kaca (GRK) dan karbon. Fungsi pengaturan iklim secara keruangan berarti menjaga wilayah – wilayah yang memiliki fungsi besar dalam penyimpanan karbon, yaitu sistem penggunaan lahan hutan. Terjaganya kelestarian hutan dengan kerapatan tinggi berarti mengurangi GRK dan menjaga kualitas iklim Lokal. Isu perubahan iklim telah dianggap sebagai isu global, karena dampaknya yang mulai dirasakan di seluruh dunia. Perubahan ekosistem, pembangunan yang tidak ramah lingkungan, serta perkembangan-perkembangan lainnya menyebabkan kondisi iklim yang berubah yang diindikasikan dengan naiknya suhu udara.

Layanan jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Bima terdiri dari kategori rendah, sedang dan tinggi yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kota Bima. Untuk



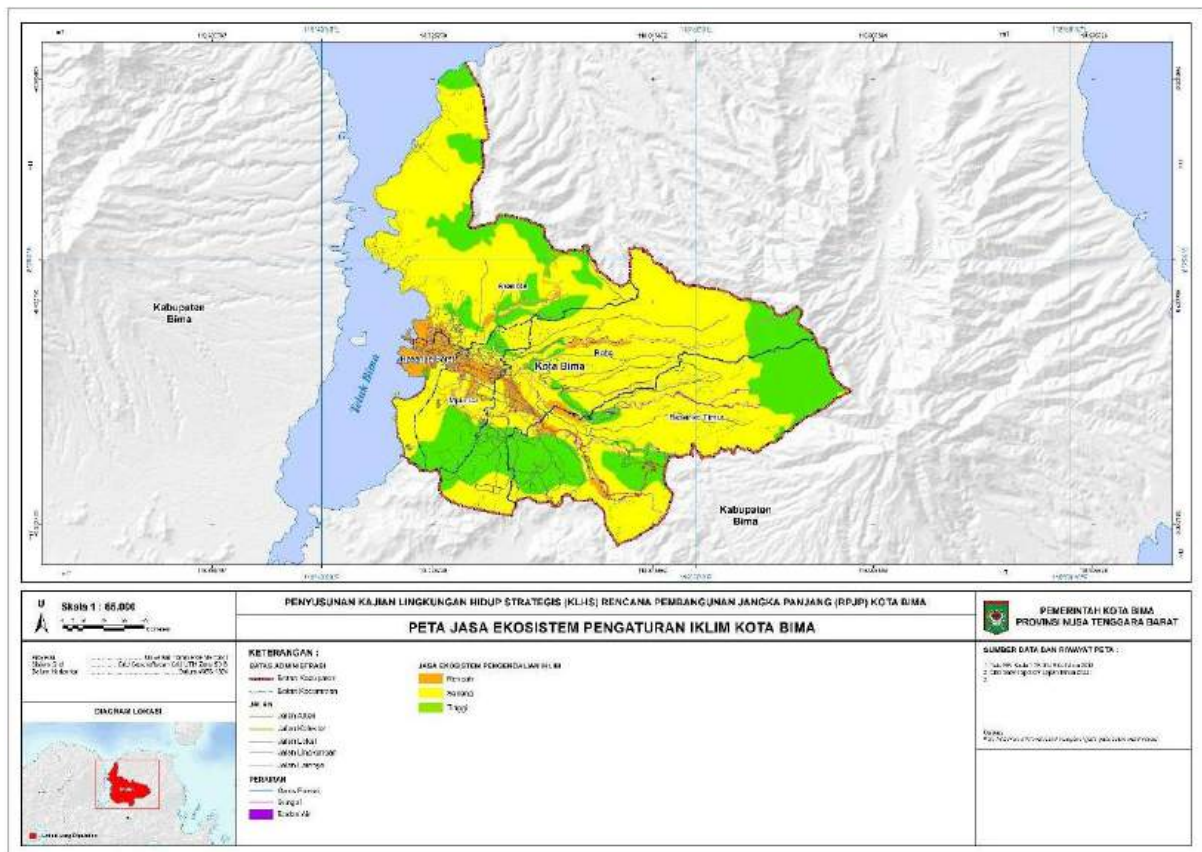
sebaran kategori yang paling luas adalah di Kecamatan Rasanae Timur seluas 2.336,74 Ha.

Tabel 2.10. Distribusi Luas Layanan Jasa Ekosistem pengaturan iklim Kota Bima

| Kecamatan | Jasa Ekosistem Iklim (Ha) | | | Jumlah (Ha) |
|---------------|---------------------------|-----------|----------|-------------|
| | Rendah | Sedang | Tinggi | |
| Asakota | 139,65 | 4.567,13 | 1.469,93 | 6.176,71 |
| Mpunda | 228,08 | 810,68 | 565,13 | 1.603,89 |
| Raba | 230,70 | 4.595,37 | 1.157,60 | 5.983,68 |
| Rasanae Barat | 312,92 | 364,54 | 60,58 | 738,04 |
| Rasanae timur | 111,69 | 3.903,59 | 2.336,74 | 6.352,02 |
| Jumlah (Ha) | 1.023,05 | 14.241,31 | 5.589,97 | 20.854,34 |

Sumber : SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA 3/2021

Gambar 2.11. Peta Layanan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kota Bima



Sumber : SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021



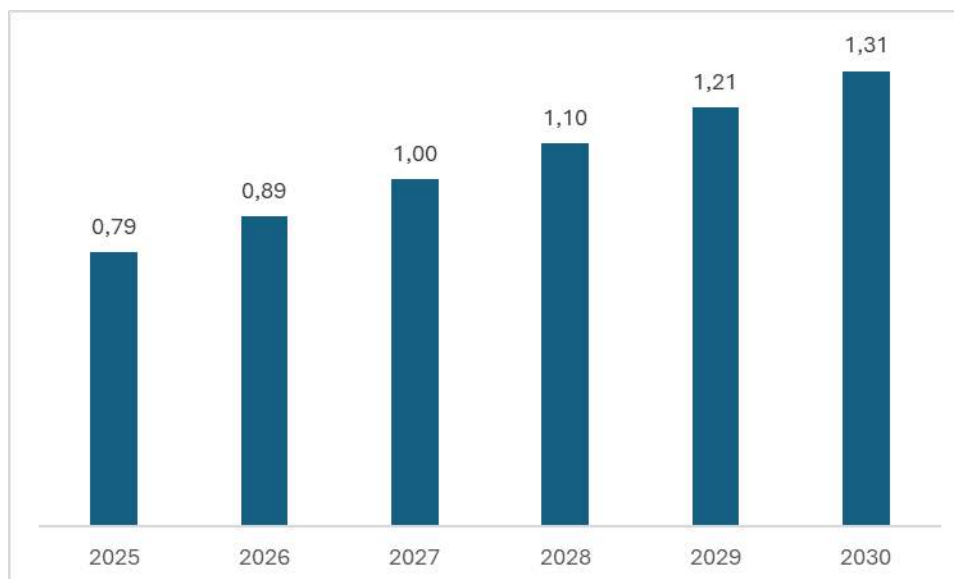
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target NDC (Nationally Determined Contribution) dan pengendalian emisi GRK, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kota Bima harus menyusun dan menerapkan strategi pengurangan emisi sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan kontribusi daerah dalam pencapaian target NDC. Menindaklanjuti hal ini, pemerintah pusat menetapkan pembangunan rendah karbon sebagai arah utama kebijakan pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2025–2029, pengendalian perubahan iklim menjadi bagian dari agenda prioritas nasional (Asta Cita), khususnya dalam meningkatkan ketahanan bencana dan memperkuat transisi energi bersih. Target penurunan GRK secara nasional sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Peran kota/kabupaten seperti Kota Bima sangat penting sebagai kontributor langsung terhadap pencapaian target tersebut.

Begitu juga dengan Provinsi NTB dalam RPJMD-nya yang menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030. Dalam dokumen pembangunan daerah ini, NTB menekankan pentingnya program mitigasi berbasis komunitas, ekonomi hijau, efisiensi energi, dan pengurangan emisi dari sektor limbah serta pertanian. Capaian Kota Bima dalam penurunan emisi GRK akan memperkuat pencapaian target provinsi dan nasional.

Isu perubahan iklim saat ini menjadi perhatian global yang berdampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah Kota Bima menunjukkan komitmennya terhadap pengendalian perubahan iklim melalui kebijakan dan program penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah berkelanjutan.



Gambar 2.12. *Proyeksi Penurunan Emisi GRK Tahun 2025-2030*



Sumber: RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2045, 2024

Berdasarkan grafik proyeksi yang disusun, target penurunan emisi GRK Kota Bima menunjukkan peningkatan capaian dari tahun ke tahun, dimulai dari 0,79% pada tahun 2025, menjadi 1,31% pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan strategi yang terencana, bertahap, dan konsisten dalam upaya menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Proyeksi tersebut tidak hanya merupakan bagian dari komitmen lokal, tetapi juga menjadi wujud kontribusi terhadap pencapaian target nasional dan provinsi.

2.1.6.3. Indeks Risiko Bencana

Bencana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Kota Bima sebagai wilayah pesisir yang dikelilingi perbukitan memiliki potensi bencana yang cukup beragam, antara lain banjir, banjir bandang, tanah longsor, gelombang ekstrem, kekeringan, kebakaran pemukiman, serta potensi tsunami. Letak geografis yang strategis sekaligus rawan bencana ini menuntut adanya strategi pembangunan yang memperhatikan prinsip mitigasi risiko bencana secara terintegrasi.

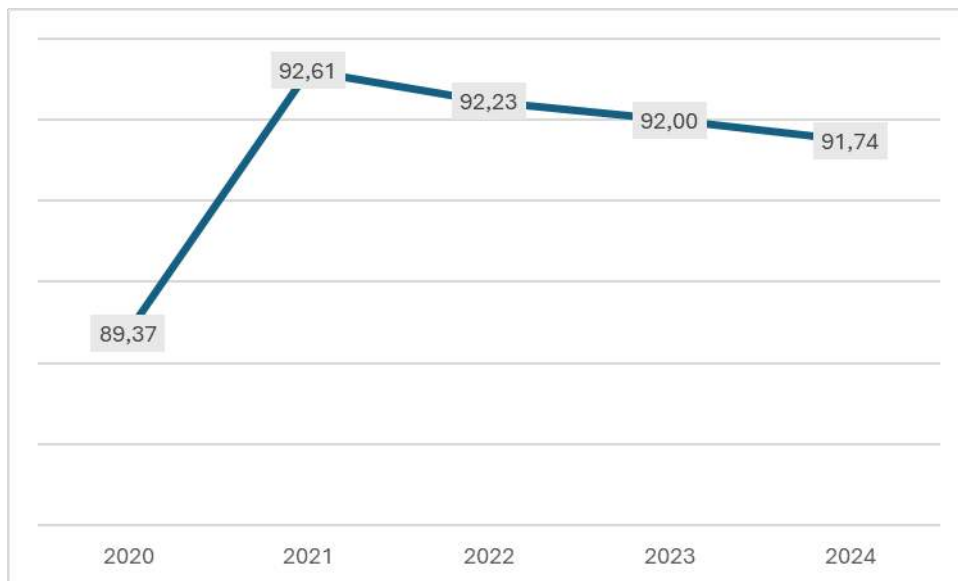
Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat potensi kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian bencana di suatu wilayah. Berdasarkan metodologi Badan Nasional Penanggulangan Bencana



(BNPB), IRB dihitung dari kombinasi Indeks Bahaya yaitu potensi kejadian bencana seperti banjir, gempa bumi, kekeringan, gelombang ekstrem, dan tanah longsor, Indeks Kerentanan meliputi kerentanan sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, serta Indeks Kapasitas yaitu kemampuan daerah dalam mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri dari bencana. Nilai IRB yang tinggi berimplikasi langsung terhadap pembangunan daerah, karena bencana dapat mengganggu stabilitas ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Bima memiliki kerentanan bencana yang cukup tinggi karena letak geografis yang berada di pesisir dengan potensi banjir rob, gelombang ekstrem, dan tsunami, kepadatan penduduk di kawasan rawan banjir dan sempadan sungai, kondisi hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, meningkatkan risiko banjir bandang dan kekeringan, penggunaan lahan yang semakin padat di kawasan rentan serta kapasitas mitigasi yang masih memerlukan penguatan, baik dari sisi infrastruktur, sistem peringatan dini, maupun partisipasi masyarakat.

Gambar 2.13. *Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024*



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

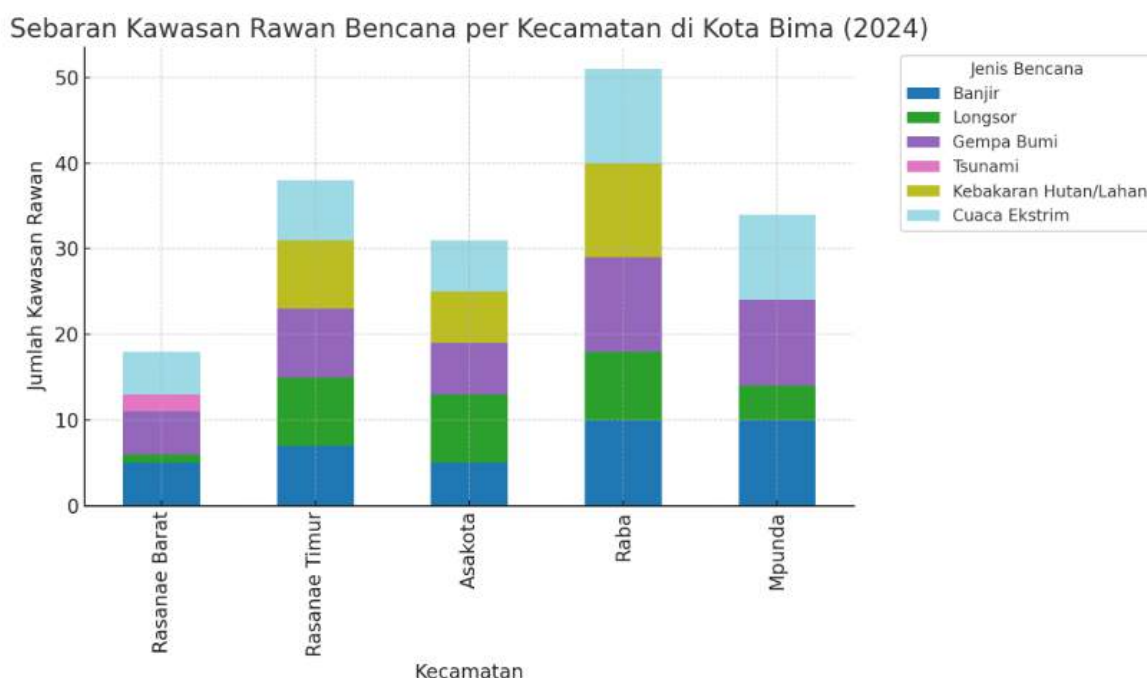
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Bima pada periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Terlihat adanya lonjakan dari 2020 ke 2021 yang menandakan peningkatan kerentanan atau paparan bahaya. Setelah itu, nilai IRB relatif stabil



namun tetap berada pada kategori tinggi. Stabilitas ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pengurangan risiko, tantangan besar masih dihadapi dalam menurunkan risiko secara signifikan.

Kota Bima memiliki 172 kawasan rawan bencana yang tersebar di lima kecamatan, dengan jenis bencana yang beragam, meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan/lahan, dan cuaca ekstrem. Jumlah ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah kota memiliki tingkat kerentanan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan penanggulangan bencana yang terencana dan terintegrasi.

Gambar 2.14. *Kawasan Rawan Bencana Tahun 2024*



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Kecamatan Raba memiliki jumlah tertinggi (51 kawasan rawan), diikuti Rasanae Timur (38 kawasan), Mpunda (34 kawasan), Asakota (31 kawasan), dan Rasanae Barat (18 kawasan). Jenis bencana yang paling banyak teridentifikasi adalah gempa bumi (40 kawasan), cuaca ekstrem (39 kawasan), banjir (37 kawasan), dan kebakaran hutan/lahan (25 kawasan). Sementara itu, kawasan rawan tsunami relatif sedikit (5 kawasan). Secara umum, pola ini menunjukkan bahwa Kota Bima memiliki



kerentanan multi-bencana dengan dominasi risiko hidrometeorologi (banjir, cuaca ekstrem) dan geologi (gempa bumi, longsor). Hal ini menuntut penguatan sistem mitigasi terpadu, termasuk pengurangan risiko bencana berbasis tata ruang dan kesiapsiagaan masyarakat.

Pengendalian risiko bencana di Kota Bima sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Dalam konteks perencanaan tata ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengharuskan pemerintah daerah mengintegrasikan peta rawan bencana ke dalam RTRW dan RPJMD. Selain itu, Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana menggarisbawahi perlunya analisis risiko bencana berbasis data spasial dan sosial-ekonomi. Hal ini penting mengingat tingginya proporsi penduduk Kota Bima yang tinggal di wilayah rawan.

Tahun 2024 tercatat 107 ribu jiwa tinggal di kawasan rawan bencana dari total penduduk Kota Bima sebanyak 157.851 jiwa. Angka ini berarti sekitar 67,8% penduduk berpotensi terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 77.224 jiwa telah memperoleh layanan informasi rawan bencana, sehingga masih terdapat kesenjangan literasi kebencanaan yang perlu diatasi.

Tingginya jumlah kawasan rawan bencana menuntut Pemerintah Kota Bima melakukan langkah-langkah mitigasi yang terstruktur. Penguatan mitigasi struktural seperti pembangunan tanggul banjir, perbaikan drainase, dan penguatan bangunan tahan gempa dan mitigasi non-struktural melalui edukasi masyarakat, pelatihan evakuasi, dan perluasan sistem informasi peringatan dini. Langkah-langkah lainnya adalah integrasi pengurangan risiko bencana (PRB) dalam perencanaan pembangunan, sejalan dengan kerangka Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 serta peningkatan resiliensi kota yang adaptif terhadap perubahan iklim, terutama mengingat meningkatnya kejadian cuaca ekstrem dan kebakaran lahan.

Dengan langkah-langkah tersebut, penurunan jumlah kawasan rawan bencana dapat menjadi indikator positif keberhasilan mitigasi risiko, sekaligus menopang target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya Target 11.5:



mengurangi secara signifikan jumlah kematian, orang yang terdampak, dan kerugian ekonomi akibat bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Nasional 2020–2044, pemerintah daerah wajib memetakan dan memperbarui data kawasan rawan bencana secara berkala, mengintegrasikan data kawasan rawan bencana dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk mencegah pembangunan di zona rawan, memperluas akses informasi kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, dan meningkatkan kapasitas mitigasi melalui infrastruktur pengendali banjir, perkuatan lereng, dan sistem peringatan dini (early warning system).

2.1.7. Kondisi Demografis

2.1.7.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2024 mencapai 165.113 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki adalah 82.338 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 82.775 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Raba dengan jumlah penduduk 41,10 (ribu) jiwa. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Rasanae Timur yaitu 20,33 (ribu) jiwa.

Tabel 2.11. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2024

| No | Kecamatan | Penduduk (ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. | Rasanae Barat | 31,00 | 0,46 |
| 2. | Mpunda | 34,80 | 1,10 |
| 3. | Raba | 20,33 | 2,28 |
| 4. | Rasanae Timur | 41,10 | 1,61 |
| 5. | Asakota | 37,88 | 2,54 |
| Jumlah Total | | 165,11 | 1,57 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025



2.1.7.2. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan secara umum didominasi oleh lulusan SLTA/ sederajat yang mencapai 47.949 jiwa atau sebesar 29,01 persen dari total penduduk. Angka penduduk berpendidikan rendah yang merupakan tamatan SD sampai SLTP sederajat mencapai 32.998 jiwa atau 19,98 persen. Jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi diploma sebesar 3.566 atau 2,16 persen dan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi sarjana dan pasca sarjana sebesar 16.519 atau 10,004 persen, dimana 20 diantaranya adalah berpendidikan S3 (dokter) dan sebanyak 797 berpendidikan S2 (Master). Sedangkan jumlah penduduk yang tidak menamatkan SD masih sangat tinggi yaitu sejumlah 19.968 jiwa atau 12,09 persen dari jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk yang belum/tidak bersekolah sebanyak 44.113 jiwa atau 26,71 persen.

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Kota Bima berdasarkan Tingkat Pendidikan Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2024

| Kecamatan | Tidak/ Belum Sekolah | Tidak Tamat SD/ Sederajat | Tamat SD/ Sederajat | SMP/ Sederajat | SMA/ Sederajat | Diploma I/II | Diploma IV/S1 | Strata II | Strata III |
|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|---------------|
| Rasanae Barat | 7.628 | 3.687 | 2.685 | 3.503 | 10.134 | 606 | 2.622 | 132 | 2 |
| Mpunda | 8.805 | 3.721 | 2.529 | 3.011 | 10.286 | 1.052 | 5.095 | 297 | 7 |
| Rasanae Timur | 5.945 | 2.739 | 2.230 | 2.311 | 5.656 | 320 | 1.107 | 20 | 0 |
| Raba | 11.126 | 4.784 | 3.703 | 3.719 | 12.213 | 1.007 | 4.340 | 205 | 7 |
| Asakota | 10.609 | 5.037 | 4.939 | 4.368 | 9.660 | 581 | 2.538 | 143 | 4 |
| Jumlah | 44.113 | 19.968 | 16.086 | 16.912 | 47.949 | 3.566 | 15.702 | 797 | 40 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima 2025

2.1.7.3. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk

Indikator penting untuk melihat persebaran penduduk adalah rasio kepadatan penduduk (*density ratio*), yang sangat berkaitan erat dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah.



Berdasarkan persebaran penduduk tahun 2024, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Barat dengan jumlah kepadatan 3057,10 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah dengan jumlah kepadatan 317,28 jiwa/km².

Tabel 2.13. Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2020 – 2024 (Jiwa/km²)

| No | Kecamatan | 2020 | 2021 | 2022* | 2023 | 2024 |
|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Rasanae Barat | 3.001,48 | 3.022,49 | 3.022,49 | 3.070,12 | 3057,10 |
| 2 | Mpunda | 2.179,97 | 2.195,22 | 2.195,22 | 2.239,79 | 2277,68 |
| 3 | Raba | 604,94 | 609,16 | 609,16 | 630,16 | 644,97 |
| 4 | Rasanae Timur | 289,93 | 291,96 | 291,96 | 303,96 | 317,28 |
| 5 | Asakota | 496,39 | 499,86 | 499,86 | 526,90 | 548,73 |
| Jumlah | | 780 | 702,92 | 702,92 | 726,04 | 742,92 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2025

Keterangan: *) menurut Kota Bima Dalam Angka Tahun 2023, data kepadatan penduduk tahun 2022 sama dengan tahun 2021.

2.1.7.4. Pencatatan Sipil

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran. Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah penduduk Kota Bima yang wajib KTP-Elektronik 111.028 jiwa. Kepala keluarga di Kota Bima, yang sudah memiliki Kartu Keluarga Nasional sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 51.598 atau 100%. Jumlah pencatatan kelahiran tahun 2024 yaitu sebanyak 96.050 jiwa.

Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2024

| Uraian | 2024 |
|---------------------------------|--------------|
| Jumlah Penduduk Wajib KTP | 115.789 Jiwa |
| Jumlah Penduduk sudah cetak KTP | 111.028 Jiwa |
| Rasio Penduduk ber-KTP | 95,89 % |
| Jumlah Penduduk ber-akte lahir | 96.050 Jiwa |
| Jumlah KK | 51.598 Jiwa |
| Sudah Cetak KK | 100 % |



| Uraian | 2024 |
|----------------------|---------|
| Rasio Kepemilikan KK | 99,88 % |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan sipil 2025

2.1.7.5. Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang termasuk dalam kategori tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia diatas 15 tahun ke atas. Sedangkan menurut ILO yang termasuk dalam katagori tenaga kerja adalah penduduk yang berusia mulai dari umur diatas 10 tahun. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan pada komponen Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Yang dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah Penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sifatnya sementara, tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lansia (penerima pensiun).

Pada tahun 2024 jumlah angkatan kerja di Kota Bima mencapai 86.914 Jiwa. Angkatan kerja sudah bekerja laki-laki sebanyak 46.366 jiwa atau lebih besar dibandingkan jumlah angkatan kerja sudah bekerja perempuan yang hanya sejumlah 37.704 jiwa. Dari jumlah tersebut, 96,73 persen angkatan kerja sudah bekerja sedangkan 3,27 persen menganggur. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja adalah sebesar 31.808 Jiwa yang terdiri dari penduduk yang masih sekolah sebanyak 10.424 jiwa dan penduduk yang mengurus rumah tangga sebanyak 17.377 jiwa dan penduduk dengan kegiatan lainnya 4.007 jiwa.

Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | JUMLAH PENDUDUK ≥ 15 THN (JIWA) | 133.836 | 137.149 | 140.438 | 116.598 | 118.722 |
| 2 | ANGKATAN KERJA (JIWA) | 99.361 | 103.498 | 98.022 | 91.046 | 86.914 |
| | Bekerja | 94.970 | 99.811 | 94.370 | 87.794 | 84.070 |
| | Pengangguran/TPT | 4.391 | 3.687 | 3.652 | 3.252 | 2.844 |
| 3 | BUKAN ANGKATAN KERJA (JIWA) | 34.475 | 33.651 | 42.420 | 25.552 | 31.808 |



| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | JUMLAH PENDUDUK ≥ 15 THN (JIWA) | 133.836 | 137.149 | 140.438 | 116.598 | 118.722 |
| | Sekolah | 8.915 | 7.278 | 12.476 | 7.926 | 10.424 |
| | Mengurus RT (%) | 20.241 | 21.855 | 23.687 | 15.116 | 17.377 |
| | Lainnya (%) | 5.319 | 4.518 | 6.253 | 2.510 | 4.007 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kota Bima pada tahun 2022 didominasi oleh 3 (tiga) sektor lapangan pekerjaan. Penduduk yang bekerja di sektor Pekerja lainnya, IRT, Pelajar, Pensiunan adalah yang paling dominan yaitu mencapai 68,78 persen. Lapangan pekerjaan selanjutnya pada sektor Dosen, Guru, PNS, TNI, POLRI yaitu sebesar 9,02 persen, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 8,71 persen serta Karyawan Swasta, BUMN, BUMD dan Honorer mencapai 8,61 persen.

Tabel 2.16. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Kegiatan Utama Tahun 2024

| Status Pekerjaan Utama | 2024 |
|--|---------------|
| Berusaha sendiri | 15.387 |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 12.993 |
| Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 2.498 |
| Buruh/karyawan/pegawai | 36.426 |
| Pekerja bebas | 5.621 |
| Pekerja keluarga/tak dibayar | 11.145 |
| Jumlah | 84.070 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan memang merupakan lapangan pekerjaan dominan bagi penduduk Kota Bima. Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah sebagai sebuah kota meskipun sektor pertanian dalam arti luas juga masih memberikan kontribusi yang cukup besar.



Pertumbuhan sektor Perdagangan dan Jasa ini pada dasarnya didukung oleh keberadaan pelabuhan laut Bima serta fungsi wilayah kota Bima dalam struktur ruang regional sebagai sub pusat pertumbuhan di bagian timur Provinsi NTB. Oleh karena itu, pengembangan kota diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Adapun sebagai Kota Jasa, Kota Bima akan lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat koleksi dan distribusi.

2.1.7.6. Proyeksi Kependudukan

Unsur kependudukan merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan. Dengan mengetahui gambaran kependudukan di masa depan, suatu daerah dapat menentukan arah pengembangan pelayanan publik di masa yang akan datang, terutama dalam konteks estimasi kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, maka dari itu, bagian ini akan secara khusus memaparkan hasil proyeksi kependudukan Kota Bima dari tahun 2025-2030. Selain menjadi pertimbangan dalam penentuan arah pengembangan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, proyeksi demografi Kota Bima juga dapat memberikan gambaran umum kondisi sumber daya manusia Kota Bima di masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui rasio ketergantungan penduduk yang merupakan perbandingan jumlah penduduk usia produktif dengan penduduk usia non produktif. Pada akhirnya, proyeksi kependudukan dalam RPJPD Kota Bima 2025-2030 ini akan menjadi fondasi penting dalam proses perumusan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil proyeksi kependudukan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bima (2023), jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2024 mencapai 165.113 jiwa yang terdiri atas 82.338 penduduk laki-laki dan 82.775 penduduk perempuan. Dengan total laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,03, jumlah penduduk Kota Bima diperkirakan akan mengalami peningkatan secara gradual setiap tahunnya, hingga pada tahun 2030 jumlah penduduk Kota Bima mencapai 174.871 jiwa dengan komposisi 87.037 jiwa penduduk laki-laki dan 87.835 jiwa penduduk perempuan atau dengan sex ratio sebesar 99 persen yang



artinya terdapat 99 penduduk laki-laki di setiap 100 perempuan di Kota Bima pada tahun 2030.

Tabel 2.17. *Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bima Tahun 2025-2030*

| Jenis Kelamin | Penduduk Tahun 2023 | Proyeksi Penduduk (jiwa) | |
|---------------|---------------------|--------------------------|--------|
| | | 2025 | 2030 |
| Laki-laki | 80.085 | 81.513 | 87.037 |
| Perempuan | 81.277 | 82.200 | 87.835 |
| Rasio | 98,53% | 99,16% | 99,09% |

Sumber : Bappeda Kota Bima, 2025, data diolah

Meskipun secara umum penduduk Kota Bima mengalami laju pertumbuhan yang meningkat, namun apabila diamati secara lebih rinci berdasarkan rentang usia, terdapat beberapa kelompok usia yang justru mengalami tren penurunan jumlah setiap tahunnya. Penduduk usia 0–14 tahun mengalami peningkatan dari 42.699 jiwa (2024) menjadi 45.161 jiwa (2025) dan diproyeksikan mencapai 46.383 jiwa pada tahun 2030. Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan populasi usia anak, yang di satu sisi menjadi potensi sumber daya manusia masa depan, namun juga menambah beban penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan dasar.

Penduduk usia produktif (15–64 tahun) pada 2024 berjumlah 111.984 jiwa. Proyeksi menunjukkan sedikit penurunan di 2025 menjadi 108.615 jiwa, namun kembali meningkat menjadi 117.698 jiwa di 2030. Fluktuasi ini bisa dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, peluang kerja, dan dinamika ekonomi daerah. Peningkatan di tahun 2030 berpotensi memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penduduk usia lanjut (> 65 tahun) meningkat secara konsisten dari 10.160 jiwa (2024) menjadi 10.249 jiwa (2025) dan 13.099 jiwa (2030). Tren ini mengindikasikan terjadinya penuaan penduduk (ageing population) yang akan memerlukan perhatian khusus pada pelayanan kesehatan lansia dan jaminan sosial.



Tabel 2.18. *Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Bima Tahun 2025-2030*

| Keelompok Umur | Penduduk Tahun 2024 | Proyeksi Penduduk (orang) | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------|
| | | 2025 | 2030 |
| 0-14 tahun | 42.699 | 45.161 | 46.383 |
| 15-64 tahun | 111.984 | 108.615 | 117.698 |
| > 65 tahun | 10.160 | 10.249 | 13.099 |
| Angka Ketergantungan (%) | 51 | 51 | 51 |

Sumber : Bappeda Kota Bima, 2025, data diolah

Rasio ketergantungan memiliki beberapa fungsi yang dapat memberikan pemahaman tentang struktur demografis suatu populasi dan dampaknya terhadap kebijakan sosial, ekonomi dan kesehatan. Berdasarkan angka ketergantungan diatas menunjukkan bahwa dalam populasi tersebut, setiap 100 penduduk produktif harus mendukung 51 penduduk yang tidak produktif pada tahun 2030.

Angka ketergantungan Kota Bima berada di kisaran 51% sepanjang periode 2024–2030. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung beban 51 orang penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Angka ini relatif moderat, sehingga beban ekonomi penduduk produktif masih tergolong terkendali, namun peningkatan penduduk lansia ke depan berpotensi menambah beban ini jika tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Peningkatan jumlah penduduk usia produktif di akhir periode proyeksi merupakan peluang untuk memanfaatkan bonus demografi, asalkan tersedia lapangan kerja yang cukup, peningkatan keterampilan, dan penguatan sektor ekonomi utama Kota Bima. Pertumbuhan penduduk usia anak memerlukan penguatan kualitas pendidikan dasar, fasilitas kesehatan ibu dan anak, serta program gizi untuk mencegah stunting. Peningkatan penduduk lansia memerlukan kebijakan yang memperkuat sistem jaminan sosial, pelayanan kesehatan geriatri, dan program pemberdayaan lansia agar tetap produktif.

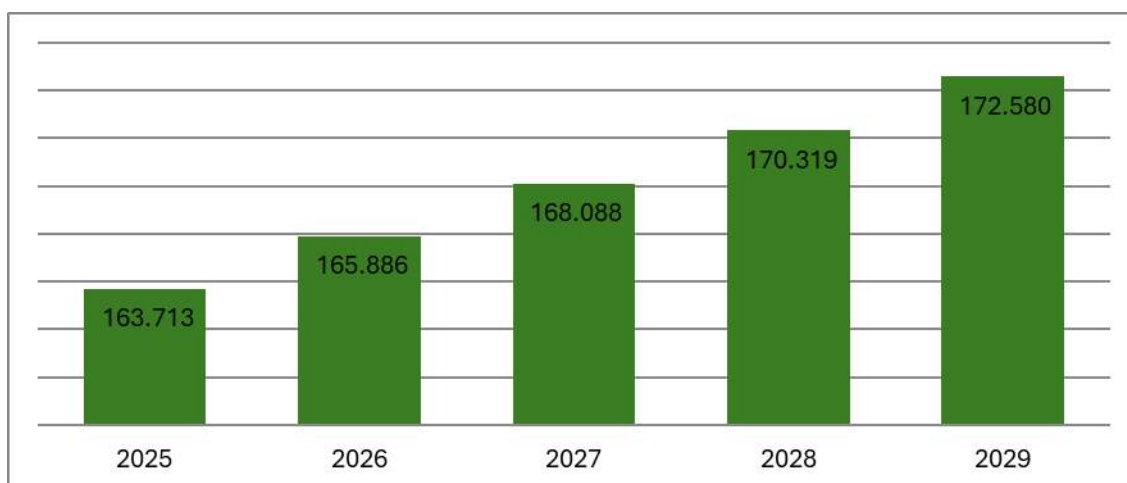
Adanya pergeseran signifikan pada struktur demografi terutama berdasarkan rentang usia yang diperkirakan terjadi dalam rentang tahun 2020-



2045, menjadi alasan kuat bagi Pemerintah Kota Bima untuk mengambil langkah intervensi spesifik pada sektor pelayanan dasar tertentu seperti pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Ketenagakerjaan. Intervensi yang dimaksud bertujuan sebagai upaya mitigasi pada kondisi-kondisi yang tidak diharapkan di masa depan, seperti timbulnya dampak sosial negatif akibat dari meningkatnya beban ketergantungan penduduk non-produktif.

Pada milestone pertama RPJPD Kota Bima 2025-2045 yaitu dalam rentang tahun 2025-2029, penduduk Kota Bima diperkirakan akan mengalami kenaikan dari sejumlah 163.713 jiwa di tahun 2025 menjadi 172.580 jiwa di tahun 2029. Tren penambahan penduduk hasil proyeksi tersebut dapat dilihat di grafik yang disajikan.

Gambar 2.15. *Proyeksi Penduduk Kota Bima Tahun 2025-2029*



Sumber : Bappeda Kota Bima 2024, data diolah

Secara struktur demografi, diagram penduduk Kota Bima di akhir tahun 2029, dimana merupakan akhir dari milestone pertama RPJPD Kota Bima 2025-2045, tidak jauh berbeda dari struktur penduduk tahun dasar (2024) namun telah mengalami pergeseran jika dibandingkan dengan diagram penduduk tahun 2020. Jika dibandingkan dengan struktur demografi tahun 2020 yang berkategori ekspansif dengan dominasi penduduk usia muda tinggi, struktur demografi Kota Bima tahun 2029 relatif mendekati diagram penduduk konstruktif dengan mayoritas penduduk yang mulai didominasi oleh usia dewasa, tetapi masih dalam rentang usai produktif. Sedangkan secara komposisi jenis kelamin, pada tahun



2029 sebaran penduduk Kota Bima masih berimbang dengan sex ratio 99%, yang artinya terdapat 99 orang penduduk laki-laki di setiap 100 penduduk perempuan di Kota Bima.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam periode 2020-2024, pertumbuhan ekonomi terus mengalami pertumbuhan dari -4,95 persen pada awal periode, hingga tahun 2024 dapat tumbuh sebesar 4,04 persen. Namun pertumbuhan ini masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dan Nasional. Terjadinya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek termasuk ekonomi secara global telah membuat pertumbuhan ekonomi Kota Bima berkontraksi di angka -4,95 persen di tahun 2020 dari angka 5,15 persen pada tahun 2019. Berbagai upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan beriringan dengan penanganan pandemi Covid-19 telah membawa perbaikan sehingga Kota Bima mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedikit meningkat sebesar 2,08 persen pada tahun 2021. Pemulihan ekonomi yang terus berlanjut membawa ekonomi Kota Bima terus tumbuh sebesar 2,70 persen di tahun 2022 hingga mencapai 4,04 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima dapat dilihat pada gambar ini.

Gambar 2.16. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima Tahun 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025



Pada tahun 2024, pertumbuhan terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha yang tersebar diseluruh wilayah Kota Bima, terutama di kawasan strategis pada sektor unggulan pariwisata meliputi pantai Amahami, pantai Lawata sampai Ni'u (batas kota) dan pantai Kolo. Pada sektor unggulan perdagangan dan jasa pada kawasan perkotaan meliputi Kelurahan Sarae, Kelurahan Tanjung (termasuk pelabuhan laut Bima), Kelurahan Paruga, Kelurahan Rabangodu Selatan dan Rabadompu Barat. Pada sektor unggulan pengembangan industri kerajinan tenun meliputi hampir diseluruh wilayah Kecamatan Raba dan Rasanae Timur.

Semakin kembali normalnya perekonomian Kota Bima sebagai dampak pelonggaran kebijakan pembatasan masyarakat mendorong meningkatnya pendapatan daya beli masyarakat disertai dengan kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi yang tercermin dari keberhasilan Pemerintah Kota Bima dalam upaya perbaikan ekonomi melalui intervensi program yang telah dilakukan. Selain itu perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima didalam merumuskan kebijakan ekonomi yang benar-benar dapat mendorong percepatan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 5,313,65 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 PDRB Kota Bima mencapai 4,986,32 triliun rupiah. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kota Bima didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan dan Konstruksi.

Tabel 2.19. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (miliar) Tahun 2020 – 2024

| Kategori | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Rp (miliar) | Rp (miliar) | Rp (miliar) | Rp (miliar) | Rp (miliar) |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 581,11 | 590,98 | 614,46 | 681,90 | 722,33 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 16,18 | 16,50 | 16,23 | 17,98 | 18,68 |



| Kategori | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Rp (miliar) | Rp (miliar) | Rp (miliar) | Rp (miliar) | Rp (miliar) |
| C | Industri Pengolahan | 127,28 | 128,84 | 134,37 | 147,13 | 159,16 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 8,22 | 8,77 | 9,69 | 9,98 | 10,60 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1,37 | 1,39 | 1,48 | 1,50 | 1,53 |
| F | Konstruksi | 349,21 | 391,63 | 381,11 | 410,79 | 417,24 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1019,53 | 1 057,95 | 1161,90 | 1.298,64 | 1.379,25 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 354,38 | 366,17 | 416,94 | 459,07 | 494,62 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 126,01 | 129,53 | 160,81 | 174,90 | 197,67 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 72,78 | 76,57 | 80,22 | 86,03 | 91,33 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 102,77 | 107,59 | 124,50 | 129,83 | 136,11 |
| L | Real Estate | 228,42 | 232,00 | 246,54 | 259,55 | 274,87 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 14,94 | 14,98 | 16,81 | 19,04 | 20,40 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 492,00 | 510,18 | 519,64 | 543,87 | 593,65 |
| P | Jasa Pendidikan | 340,64 | 363,05 | 362,86 | 392,19 | 412,03 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 138,96 | 149,58 | 155,23 | 168,93 | 184,81 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 150,17 | 155,32 | 171,83 | 185,00 | 199,39 |
| | PDRB | 4.133,09 | 4.300,61 | 4.574,61 | 4.986,32 | 5.313,65 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025



Tabel 2.20. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), Tahun 2020–2024

| Kategori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Rp (miliar) | Rp (miliar) | Rp (miliar) | Rp (miliar) | Rp (miliar) |
| A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 410,77 | 410,79 | 416,55 | 426,76 | 432,50 |
| B Pertambangan dan Penggalian | 11,99 | 12,14 | 11,43 | 11,98 | 12,13 |
| C Industri Pengolahan | 103,20 | 103,81 | 105,84 | 108,74 | 112,07 |
| D Pengadaan Listrik dan Gas | 7,67 | 8,27 | 9,06 | 9,25 | 9,79 |
| E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,96 |
| F Konstruksi | 266,80 | 284,10 | 262,18 | 276,49 | 278,82 |
| G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 695,71 | 711,18 | 739,34 | 796,68 | 832,74 |
| H Transportasi dan Pergudangan | 260,35 | 263,95 | 289,34 | 304,52 | 315,75 |
| I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 73,98 | 75,01 | 91,09 | 97,28 | 107,37 |
| J Informasi dan Komunikasi | 64,64 | 67,97 | 69,85 | 73,22 | 77,40 |
| K Jasa Keuangan dan Asuransi | 73,36 | 73,37 | 78,87 | 80,45 | 83,19 |
| L Real Estate | 155,58 | 157,37 | 164,10 | 170,82 | 178,58 |
| M,N Jasa Perusahaan | 10,35 | 10,37 | 11,14 | 12,02 | 12,62 |
| O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 279,44 | 283,97 | 282,05 | 289,51 | 311,21 |
| P Jasa Pendidikan | 244,61 | 248,06 | 246,04 | 259,95 | 265,53 |
| Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 107,06 | 113,17 | 116,40 | 125,00 | 135,20 |
| R,S,T,UJasa lainnya | 112,75 | 114,64 | 124,17 | 130,48 | 136,45 |
| PDRB | 2.879,23 | 2.939,06 | 3.018,40 | 3.174,09 | 3.302,30 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima hingga tahun 2020 setiap tahun mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2021 nilai PDRB Kota



Bima mengalami peningkatan, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan PDRB Kota Bima adalah pencapaian PAD sesuai target dan pengendalian belanja daerah yang berdampak hampir di semua sektor lapangan usaha dan mengalami peningkatan. Seiring dengan pemulihan ekonomi, nilai PDRB Kota Bima pun mengalami peningkatan.

Apabila dilihat dari nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga konstan, pada tahun 2024 mencapai 3.302,30 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 128,21 miliar rupiah (4,04%) dari nilai PDRB tahun 2023 yaitu sebesar 3.174,09 miliar rupiah.

Tabel 2.21. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2020-2024

| Kategori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------|------|-------|-------|-------|
| A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -0,52 | 0,01 | 1,40 | 2,45 | 1,34 |
| B Pertambangan dan Penggalian | -7,19 | 1,32 | -5,73 | 4,83 | 1,30 |
| C Industri Pengolahan | -0,69 | 0,59 | 1,90 | 2,74 | 3,06 |
| D Pengadaan Listrik dan Gas | 8,23 | 7,78 | 9,53 | 2,11 | 5,90 |
| E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | -2,23 | 0,06 | 1,03 | -1,97 | 0,69 |
| F Konstruksi | -12,70 | 6,48 | -7,72 | 5,46 | 0,84 |
| G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -6,00 | 2,22 | 3,96 | 7,76 | 4,53 |
| H Transportasi dan Pergudangan | -20,24 | 1,38 | 9,63 | 5,24 | 3,69 |
| I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -5,24 | 1,38 | 21,44 | 6,80 | 10,38 |
| J Informasi dan Komunikasi | 13,48 | 5,16 | 2,76 | 4,83 | 5,70 |
| K Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,95 | 0,02 | 7,49 | 2,01 | 3,40 |
| L Real Estate | 1,29 | 1,15 | 4,27 | 4,09 | 4,55 |
| M,N Jasa Perusahaan | -1,94 | 0,12 | 7,46 | 7,91 | 4,98 |



| Kategori | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -0,38 | 1,62 | -0,68 | 2,64 | 7,50 |
| P | Jasa Pendidikan | 1,35 | 1,41 | -0,81 | 5,65 | 2,15 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,83 | 5,71 | 2,85 | 7,39 | 8,16 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | -5,97 | 1,67 | 8,32 | 5,08 | 4,58 |
| PDRB | | -4,95 | 2,08 | 2,70 | 5,16 | 4,04 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan kenaikan PDRB Per Kapita, berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, pengeluaran masyarakat didominasi oleh kelompok komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga, makan dan minuman jadi, serta aneka komoditas jasa. Masing-masing kelompok komoditas tersebut menyumbang sebesar 23,27 persen, 18,07 persen dan 11,40 persen dari keseluruhan pengeluaran per kapita dalam sebulan di Kota Bima. Adapun rata-rata jumlah pengeluaran per kapita masyarakat Kota Bima dalam sebulan sebesar Rp.1.573.970.

Pada tahun 2024, penduduk Kota Bima secara rata-rata mengalami peningkatan pengeluaran baik untuk barang bukan makanan, dari yang awalnya Rp.632.595 di tahun 2023 menjadi Rp764.772 di tahun 2024, serta pengeluaran barang berupa makanan yang mengalami peningkatan dari tahun lalu sebesar Rp132.177. Kondisi ini menyebabkan secara total, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat menjadi naik dari Rp1.309.507 di tahun 2023.

Pada tahun 2024, sebesar 36,35 persen penduduk di Kota Bima memiliki pengeluaran kurang dari Rp1.000.000. Meskipun demikian, penduduk Kota Bima paling banyak berada pada kelompok dengan pengeluaran lebih dari Rp1.500.000, yaitu sebesar 44,01 persen.



Tabel 2.22. PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2020-2024

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nilai PDRB (Milliar Rupiah) | | | | | |
| - ADHB | 4.133 | 4.301,03 | 4.574,61 | 4.986,32 | 5.313,65 |
| - ADHK | 2.879,22 | 2.939,13 | 3.018,40 | 3.174,09 | 3.302,30 |
| PDRB per Kapita (Persen) | | | | | |
| - ADHB | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ADHK | -4,95 | 2,08 | 2,70 | 5,16 | 4,04 |
| - Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK | -4,95 | 2,08 | 2,70 | 5,16 | 4,04 |
| Jumlah Penduduk (ribu orang) | 155,1 | 156,2 | 157,4 | 161,3 | 165,11 |
| Pertumbuhan Jumlah Penduduk | 1,96 | 0,76 | 0,71 | 1,36 | 1,57 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

2.2.1.2. Indeks Gini

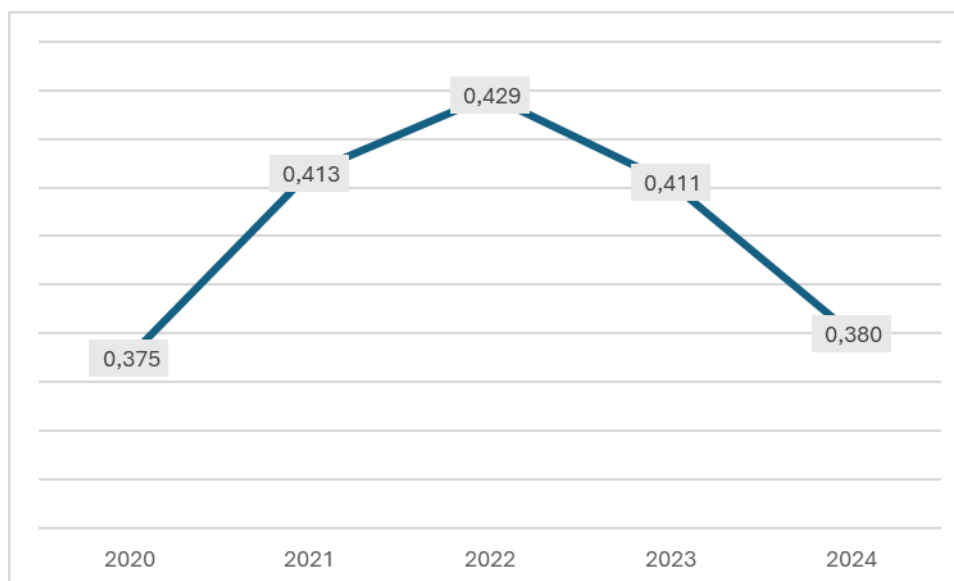
Ketimpangan pendapatan diukur dengan menggunakan salah satu metode yaitu indikator gini ratio. Nilai gini ratio berada diantara 0 dan 1. Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan sempurna. Artinya semakin tinggi mendekati angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan ketimpangan rendah jika nilainya kurang dari 0,30.

Perkembangan indeks gini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Kota Bima sempat mengalami kenaikan dari 0,375 pada 2020 menjadi puncak 0,429 pada 2022. Namun, tren ini berbalik menurun pada dua tahun berikutnya hingga mencapai 0,380 pada 2024. Secara umum, nilai Indeks Gini Kota Bima masih berada pada kategori ketimpangan sedang (mendekati rendah), yang mengindikasikan bahwa



distribusi pendapatan atau pengeluaran relatif merata dibandingkan wilayah dengan ketimpangan tinggi.

Gambar 2.17. Perkembangan Indeks Gini Kota Bima Tahun 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

Berdasarkan data, tren Indeks Gini Kota Bima menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, masa awal pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, capaian sebesar 0,375 yang berarti ketimpangan rendah. Hal ini menunjukkan penurunan aktivitas ekonomi membuat pendapatan masyarakat relatif menyempit, sehingga jarak pendapatan antar kelompok tidak terlalu jauh. Tahun 2021 capaian sebesar 0,413 (naik ke ketimpangan sedang) yang menunjukkan pemulihan ekonomi mulai berjalan, namun sektor perdagangan dan jasa pulih lebih cepat dibandingkan sektor informal, sehingga kelompok menengah-atas lebih cepat meningkatkan pendapatan dibanding kelompok bawah.

Kemudian tahun 2022 capaian sebesar 0,429 yang merupakan puncak ketimpangan pada periode 2020-2024. Pada tahun 2022, peningkatan investasi dan perdagangan menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses modal dan jaringan usaha, sementara masyarakat berpendapatan rendah belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Dan pada akhir periode yaitu tahun 2024 capaian kembali turun ke angka 0,380 atau kembali ke ketimpangan rendah yang menunjukkan distribusi pendapatan membaik seiring peningkatan inklusi keuangan,



akses UMKM terhadap pasar, dan pemerataan infrastruktur ekonomi di wilayah Kota Bima.

2.2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan ditemukan akar permasalahan dari penyebabnya. Dalam mengukur tingkat kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. gambar dibawah ini akan menggambarkan elastisitas tingkat kemiskinan Kota Bima 2018-2024.

Gambar 2.18. Tingkat Kemiskinan Kota Bima, 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

Secara umum dalam periode 2020-2024 tingkat kemiskinan di Kota Bima cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Namun terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang membawa dampak pada perekonomian Kota Bima serta menurunnya daya beli masyarakat akibat berkurangnya lahan pekerjaan, pada akhirnya meningkatkan



angka kemiskinan di Kota Bima. Tingkat kemiskinan di Kota Bima cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 sebesar 18.671 jiwa berkurang sebesar 2.141 jiwa menjadi 16.530 jiwa pada tahun 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kota Bima pada tahun 2018 sebesar 8,79 persen berkurang sebesar 0,67 persen atau menjadi 8,12 persen pada tahun 2024. Hal ini disebabkan antara lain akibat elastisitas kemiskinan yaitu adanya tingkat perubahan harga yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mempunyai kaitan erat dengan kemampuan daya beli masyarakat. Selanjutnya peningkatan inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi per September 2022 dan tingginya biaya perjalanan melalui udara. Semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya beli. Elastisitas kemiskinan di Kota Bima diantaranya disebabkan karena perubahan garis kemiskinan lebih tinggi dari tingkat inflasi.

Pemerintah Kota Bima telah melakukan upaya pemulihan ekonomi pemberdayaan masyarakat melalui penguatan UMKM, pelatihan masyarakat (keluarga miskin) dalam program penanganan kemiskinan yang terintegrasi, pengembangan kawasan wisata dan event seni budaya, serta upaya optimalisasi penyelesaian masalah kemiskinan secara terpadu dan memperkuat aspek koordinasi dalam pendataan dan verifikasi data kemiskinan daerah melalui kegiatan musyawarah kelurahan (muskel) yang dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Walikota.

Selanjutnya, diperlukan sebuah mekanisme penyelesaian masalah kemiskinan ekstrim di Kota Bima secara komprehensif melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, mempermudah akses perumahan layak, pemberdayaan perempuan serta program jaminan sosial untuk melindungi masyarakat miskin yang mengalami resiko ekonomi yang tidak terduga. Penanganan tersebut perlu melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, akademisi dan sektor swasta.

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (PTP) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara angkatan kerja terdiri



dari penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Adapun yang tergolong pengangguran yaitu:

- 1) Penduduk yang aktif mencari pekerjaan;
- 2) Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;
- 3) Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan
- 4) Penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Indikator ini menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu seperti resesi perubahan siklus bisnis, teknologi dan lain-lain.

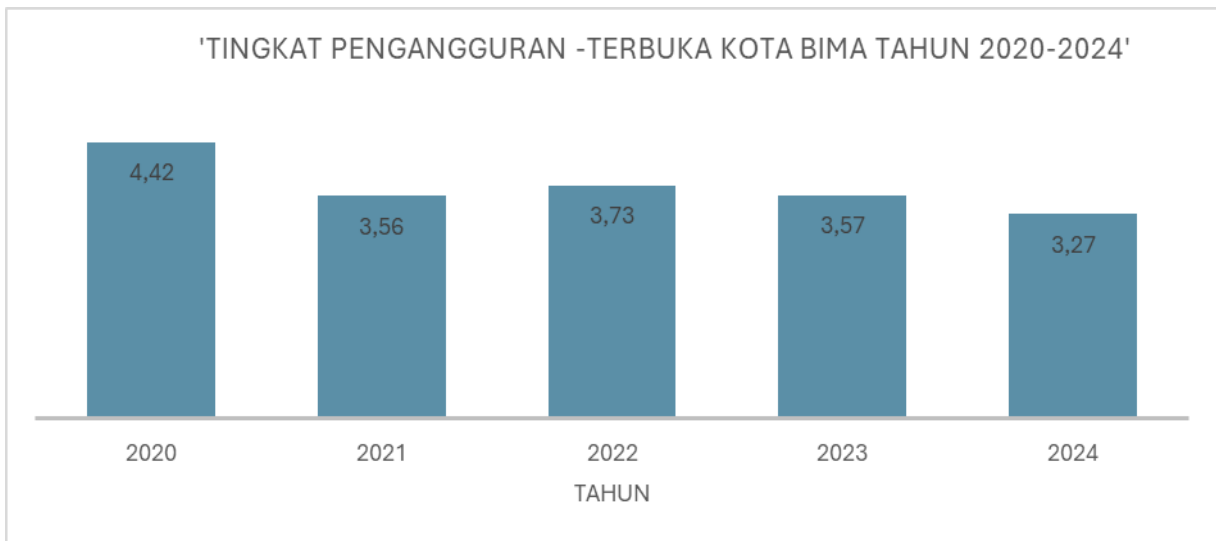
Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bima sejak tahun 2018 mengalami kecenderungan penurunan, namun terjadinya pandemi Covid-19 dan masih rendahnya kesempatan kerja berdampak pada penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja yang terdampak dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu:

- 1) Pengangguran terbuka pada tahun 2024 mencapai 2.844 jiwa;
- 2) Bukan Angkatan Kerja (BAK) pada tahun 2024 sejumlah 31.808 jiwa;
- 3) Belum/tidak bekerja pada tahun 2024 sejumlah 47.118 jiwa.

Kondisi diatas merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dan rendahnya kesempatan kerja yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sehingga total penduduk usia kerja yang terdampak pada tahun 2023 sejumlah 94.370 jiwa dengan penduduk usia kerja sebesar 118.722 jiwa dan angkatan kerja sejumlah 86.914 jiwa.



Gambar 2.19. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima Tahun 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

Selama periode Maret 2022 hingga Desember 2023, tingkat pengangguran terbuka berkurang sebanyak 398 jiwa, dari 3.650 jiwa pada Maret 2022 menjadi 2.844 jiwa pada Desember 2024 atau mengalami penurunan sebesar 0,46 persen dari 3,73 persen pada Maret 2022 menjadi 3,27 persen pada Desember 2024.

Dibandingkan dengan kondisi di tahun 2008 dimana tingkat pengangguran terbuka di Kota Bima berada pada angka 9,66 persen, maka pada tahun 2023 terdapat penurunan yang signifikan sebesar 6,09 persen atau menjadi 3,57 persen. Sementara pada tahun 2016 tidak dirilis oleh BPS Kota Bima dikarenakan keterbatasan jumlah sampel.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tampak bahwa pengangguran terbuka didominasi oleh penduduk tamatan SMA. Tahun 2022 pengangguran yang tamatan SMA sebanyak 59,26 persen, turun di tahun 2023 menjadi 50,66 persen. Hal ini disebabkan diantaranya faktor ketersediaan lapangan kerja yang cenderung banyak pada sektor informal yang menyerap tenaga kerja di bidang pertanian, perdagangan dan jasa kemasyarakatan.



Tabel 2.23. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Bima Tahun 2023-2024

| Tingkat Pendidikan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Jiwa | % | Jiwa | % | Realisasi | % |
| ≤ Sekolah Dasar | 98 | 2,66 | 151 | 4,13 | 431 | 15,15 |
| Sekolah Menengah Pertama | 105 | 2,85 | - | 0 | 166 | 5,84 |
| Sekolah Menengah Atas | 2.185 | 59,26 | 1.850 | 50,66 | 1.587 | 55,80 |
| Perguruan Tinggi | 1.299 | 35,23 | 1.651 | 45,21 | 660 | 23,21 |
| Total | 3.687 | 100 | 3.652 | 100 | 2.844 | 100 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima untuk terus berkomitmen dalam mendorong program perluasan lapangan kerja baik di sektor formal dan informal. Pada sektor formal, Dinas Tenaga Kerja berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk membangun kelembagaan dan sarana prasarana ketenagakerjaan melalui penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai wadah peningkatan kompetensi bagi pelaku UMKM, IKM dan calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga memberikan bekal bagi para pencari kerja untuk siap dalam dunia kerja. Fasilitasi juga diberikan untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan permintaan. Sedangkan, untuk sektor informal dengan mendorong para pencari kerja untuk berwirausaha, memberikan bimbingan teknis/pelatihan berwirausaha, memberikan bantuan berupa pemenuhan sarana peralatan untuk kegiatan usaha dan memberikan kemudahan akses pemasaran antara lainnya melalui pameran.

Selanjutnya perlu disusun perencanaan bagaimana menjaga iklim investasi selalu kondusif dan berkembang di Kota Bima sehingga membawa lebih banyak investasi ke Kota Bima serta berdampak pada bertambahnya kesempatan lapangan kerja. Selain itu, dari sisi tenaga kerja perlu disusun mekanisme *link and match* kebutuhan dunia kerja dengan penyediaan tenaga kerja yang tersertifikasi, terlatih



dan terampil sehingga tenaga kerja di Kota Bima memiliki keunggulan daya saing di dunia kerja.

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian perkembangan pembangunan nonfisik suatu daerah dalam jangka panjang yang direpresentasikan oleh tiga dimensi meliputi: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. IPM dalam garis besar memiliki banyak manfaat baik bagi penyelenggaraan pemerintah maupun bagi masyarakat sebagai objek dan subjek dari pembangunan. Selain sebagai indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, manfaat dari IPM antara lain:

- 1) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan manusia suatu wilayah;
- 2) Bagi pemerintah daerah, IPM digunakan sebagai salah satu alokator untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU);
- 3) Pemerintah menggunakan IPM sebagai salah satu indikator untuk menentukan target pembangunan dalam pembahasan alokasi makro di DPR RI;
- 4) Komponen IPM Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah.

Mengikuti konsep UNDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia dengan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Untuk itu IPM dibangun menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar yaitu: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (2) Pengetahuan (*knowledge*), dan (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga dimensi tersebut telah digunakan dalam penghitungan baik IPM metode lama maupun metode baru, namun dalam metode baru telah dimutakhirkan komponen penyusunnya. Pada penghitungan metode lama untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat digunakan komponen Angka Harapan Hidup saat lahir, Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Indeks ini diukur melalui 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan yang diukur melalui



Umur Harapan Hidup (UHH), dimensi pendidikan yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); dan dimensi ekonomi melalui pengeluaran perkapita.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia mengalami perubahan cara perhitungan indeks pada Tahun 2010. Perubahan perhitungan pada IPM dilakukan pada :

- a. Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS);
- b. Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada metode lama diganti dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
- c. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Sebagai kota yang sedang berkembang, Bima memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut. Seiring dengan berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan IPM semakin beragam dan multi dimensi. Keterkaitan antara IPM dengan kemiskinan, ketenagakerjaan bahkan perekonomian semakin tampak dan dapat dijadikan strategi khusus untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi program yang dicanangkan pemerintah dapat dilihat dari perkembangan setiap komponen pembentuk IPM. Selain itu, kita juga dapat melihat potensi yang dimiliki wilayah untuk meningkatkan pembangunan manusia dari masing-masing komponen IPM dan memberikan masukan bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Dengan program dan kebijakan daerah yang tepat sasaran akan mampu meningkatkan capaian pembangunan manusia.

Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bima terus mengalami pertumbuhan, sehingga pada tahun 2024 menjadikan Kota Bima dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi setelah Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan IPM Kota Bima selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 2.20. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bima, 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024

Capaian IPM Kota Bima sepanjang tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Dengan rata-rata pertumbuhan 1,01 persen per tahun. Secara umum Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bima meningkat dari 75,8 di tahun 2020 menjadi 78,91 di tahun 2024 atau meningkat 4,1 persen. Peningkatan ini sangat signifikan dan upaya yang telah dilaksanakan harus dapat dipertahankan agar Kota Bima memiliki SDM berkualitas bagus, memiliki daya saing dan unggul.

Peningkatan capaian IPM Kota Bima Tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan seluruh komponen pembentuk IPM, terutama angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

Keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup penduduk di bidang kesehatan dapat terlihat dari peningkatan AHH Kota Bima dari tahun ke tahun pada periode 2020-2024. Pada tahun 2020, penduduk Kota Bima memiliki harapan untuk dapat hidup selama hampir 72,27 tahun. Angka ini terus meningkat hingga di tahun 2024 penduduk Kota Bima memiliki harapan untuk hidup sampai usia mencapai 73,15 tahun. Dengan kata lain, terjadi peningkatan AHH Kota Bima sebesar hampir 1,22 persen selama 5 tahun atau jika diubah dalam satuan waktu AHH Kota Bima meningkat sebesar kurang lebih 0,24 persen per tahunnya.



Gambar 2.21. Angka Harapan Hidup Kota Bima, 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

Sementara harapan lamanya penduduk Kota Bima untuk bersekolah sejak tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, penduduk Kota Bima memiliki harapan untuk bersekolah selama 15 tahun, berbeda dengan di tahun 2024 dimana penduduk Kota Bima telah memiliki harapan untuk bersekolah selama 15,08 tahun. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan HLS Kota Bima sebesar 5,33 persen selama periode 2020-2024.

Sejalan dengan kondisi HLS, rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bima selama periode 2020 sampai 2024 juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, penduduk Kota Bima telah bersekolah dengan rata-rata lama bersekolah 10,49 tahun, berbeda dengan di tahun 2024 dimana penduduk Kota Bima bersekolah dengan rata-rata lama bersekolah 10,96 tahun.



Gambar 2.22. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bima, 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

Komponen lainnya yang ikut mempengaruhi indeks pembangunan manusia yaitu pengeluaran per kapita. Pengeluaran masyarakat Kota Bima berdasarkan hasil Susenas Maret tahun 2023 didominasi oleh kelompok komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga, makanan dan minuman jadi, serta aneka komoditas dan jasa. Adapun rata-rata jumlah pengeluaran per kapita masyarakat Kota Bima dalam setahun sebesar Rp 12.362.000,- pada tahun 2024.

Gambar 2.23. Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Kota Bima, 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024



Dengan demikian, dalam rangka mencapai keberhasilan dalam upaya membangun kualitas indeks pembangunan manusia dapat diukur melalui komponen yang dapat diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.24. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bima Menurut Komponen Pembentuknya Tahun 2020-2024

| Tahun | Komponen Pembentuk IPM | | | | IPM |
|-------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-------|
| | Angka Harapan Hidup (AHH) | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | Pengeluaran Per Kapita | |
| 2020 | 72,27 | 15,00 | 10,49 | 11.105.000 | 75,81 |
| 2021 | 72,37 | 15,04 | 10,65 | 11.135.000 | 77,03 |
| 2022 | 72,65 | 15,05 | 10,94 | 11.395.000 | 77,75 |
| 2023 | 72,97 | 15,06 | 10,95 | 11.740.000 | 78,24 |
| 2024 | 73,15 | 15,80 | 10,96 | 12.362.000 | 78,91 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

2.2.2.1. Prevalensi Stunting

Salah satu masalah kesehatan serius di Indonesia adalah stunting. Stunting tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik anak, tetapi juga perkembangan kognitif dan kinerja jangka panjang karena perkembangan otak yang tidak optimal. Stunting bukan hanya masalah gizi, tapi juga masalah multidimensi: melibatkan kesehatan, lingkungan, pendidikan, ekonomi, dan pola asuh. Karena itu, pencegahan stunting membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga kebijakan pemerintah. Faktor-Faktor Penyebab Stunting antara lain 1) Faktor Gizi; 2) Faktor Kesehatan Ibu; 3) Faktor Infeksi dan Kesehatan Lingkungan; 4) Faktor Sosial-Ekonomi dan Pendidikan; 5) Faktor Pola Asuh.

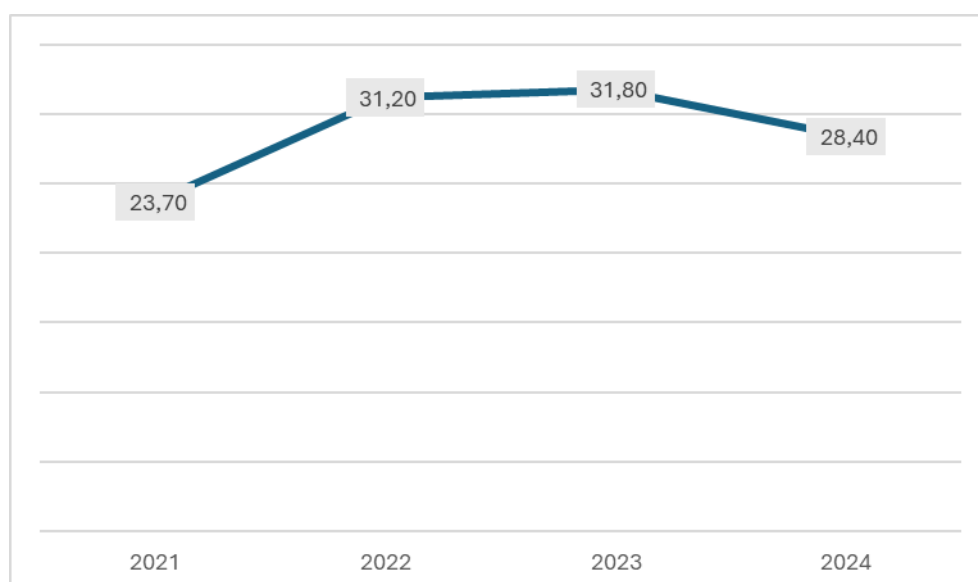
Beberapa faktor yang menjadi penyebab gizi buruk yang berdampak pada kasus stunting antara lain masalah ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Faktor ekonomi terutama kemiskinan menjadi salah satu determinan yang menjadi akar penyebab kekurangan pangan, tempat mukim yang yang berjejalan dan tidak sehat, serta ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan.



Prevalensi stunting adalah persentase jumlah balita yang memiliki tinggi badan menurut umur (TB/U) berada di bawah minus dua standar deviasi (-2 SD) dari standar pertumbuhan anak WHO. Kondisi ini menggambarkan masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai.

Stunting bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan otak, sehingga dapat memengaruhi kecerdasan, produktivitas, dan kesehatan di masa depan. Oleh karena itu, stunting menjadi salah satu indikator kunci dalam pembangunan manusia dan ketahanan nasional.

Gambar 2.24. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan data hasil pengukuran status gizi balita di Kota Bima, prevalensi stunting mengalami fluktuasi selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 23,70%, kemudian meningkat signifikan pada 2022 menjadi 31,20%. Tren ini sedikit naik pada 2023 menjadi 31,80%, namun berhasil turun pada 2024 menjadi 28,40%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan pada tahun terakhir, prevalensi stunting di Kota Bima masih berada di atas target nasional 14% pada 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.



Upaya penurunan stunting di Kota Bima sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya *Tujuan 2: Zero Hunger* (menurunkan prevalensi stunting sebagai salah satu indikator gizi buruk pada anak), dan *Tujuan 3: Good Health and Well-being* (memastikan kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia). Keberhasilan penurunan stunting berkontribusi terhadap pencapaian target gizi baik, pengurangan kesakitan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Stunting menjadi salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019. SPM ini mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, dan balita yang berfokus pada: pemantauan pertumbuhan balita; pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita gizi kurang; edukasi gizi seimbang dan pola asuh; dan pencegahan penyakit infeksi penyebab gangguan pertumbuhan.

2.2.2.2. Insidensi Tuberkulosis

Berdasarkan data, Kota Bima pada tahun 2023 dengan estimasi penemuan suspek atau terduga TBC sebanyak 4.061 pasien dan pada tahun 2024 sebanyak 2.573 pasien. TBC adalah penyakit menular yang dapat disembuhkan tetapi juga bisa menjadi epidemi jika tidak dikendalikan. Semakin tinggi cakupan treatment coverage, semakin besar peluang memutus rantai penularan. Indikator ini membantu mengukur keberhasilan program deteksi dini, pelacakan, dan pengobatan TBC.

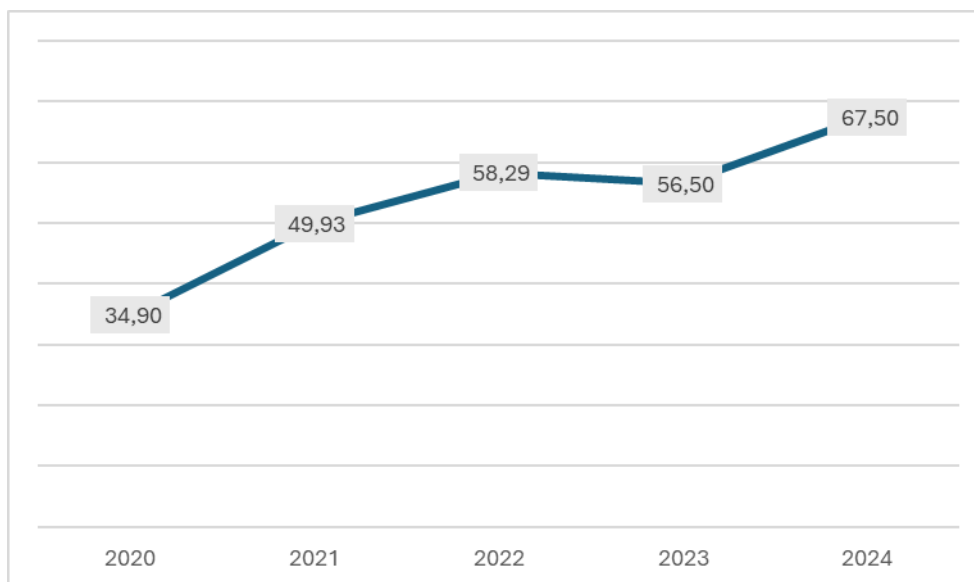
Melalui Perpres No. 67 tahun 2021 dinyatakan bahwa Penanggulangan TBC bukan hanya urusan sektor kesehatan, melainkan menjadi tanggung jawab lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah baik Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan, agar cita-cita eliminasi TBC 2030 dan Indonesia Bebas TBC 2050 dapat tercapai sehingga kerjasama dan koordinasi perlu ditingkatkan dan bersama-sama memastikan bahwa setiap kasus TB dapat terdeteksi dan diobati secara tepat dan cepat. Sehingga, dapat menurunkan angka kejadian TB di Kota Bima.

Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) adalah persentase kasus TB yang ditemukan dan diobati dari total estimasi kasus TB di wilayah tertentu pada periode tertentu. Indikator ini menggambarkan efektivitas



sistem surveilans, skrining, dan akses layanan diagnosis TB. Semakin tinggi cakupan, semakin efektif deteksi dini TB sehingga pengobatan dapat dilakukan tepat waktu untuk mencegah penularan dan komplikasi.

Gambar 2.25. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (TB) di Kota Bima menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, cakupan penemuan kasus tercatat sebesar 34,90%, kemudian mengalami kenaikan pesat menjadi 49,93% pada tahun 2021 dan 58,29% pada tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 56,50%, capaian kembali meningkat tajam di tahun 2024 hingga 67,50%. Secara umum, tren ini mencerminkan perbaikan kinerja program penanggulangan TB, baik dari sisi skrining, penegakan diagnosis, maupun akses layanan.

Namun, jika dibandingkan dengan target nasional treatment coverage sebesar 90% sesuai Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 2020–2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs) target 3.3, capaian Kota Bima masih memiliki kesenjangan sekitar 22,50% pada tahun 2024. Hal ini menandakan perlunya peningkatan upaya secara masif, terutama pada kelompok risiko tinggi, penelusuran



kontak erat, dan perluasan layanan pemeriksaan di fasilitas kesehatan primer maupun rujukan.

Dari perspektif Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, indikator penemuan kasus TB termasuk ke dalam layanan kesehatan individu wajib yang harus disediakan pemerintah daerah untuk setiap penduduk, sebagaimana diatur dalam Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Kewajiban ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan kesehatan adalah urusan wajib pelayanan dasar.

Selain itu, pencapaian target penanggulangan TB memiliki kontribusi langsung pada tujuan SDGs poin 3.3, yaitu mengakhiri epidemi TB pada tahun 2030, serta poin 3.8 mengenai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage). Dengan cakupan penemuan kasus yang semakin mendekati target nasional, diharapkan Kota Bima mampu menekan angka kejadian TB, mencegah penularan, dan mengurangi angka kematian akibat penyakit ini.

2.2.2.3. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Kesehatan adalah aset berharga bagi kita semua, dan program JKN adalah tonggak penting dalam memastikan akses pelayanan kesehatan berkualitas bagi seluruh warga Kota Bima. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) penduduk Kota Bima tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan dari 130,327 Jiwa meningkat menjadi 168,208 jiwa, Tahun 2024 menurun menjadi 166,410 Jiwa hal ini disebabkan karena meninggal dunia, pindah domisi maupun peserta mandiri karena menunggak.

Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bertujuan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Cakupan kepesertaan JKN diharapkan dapat mencakup minimal 95 persen dari total jumlah penduduk yang sifatnya inklusif, untuk semua segmen masyarakat termasuk kelompok disabilitas, kelompok rentan dan kelompok yang terabaikan, tidak bias gender, serta mencakup semua kebutuhan pelayanan dasar yang merata bagi semua individu masyarakat Kota Bima. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional masyarakat Kota Bima dari tahun 2020 sebanyak 69,49 persen terus meningkat



pada tahun 2023 mencapai angka 82,49 persen hal ini disadari betul manfaatnya oleh masyarakat karena dapat memberikan jaminan perlindungan kesehatan menyeluruh yang mencakup berbagai jenis pelayanan medis, dari yang paling dasar hingga lanjutan.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah

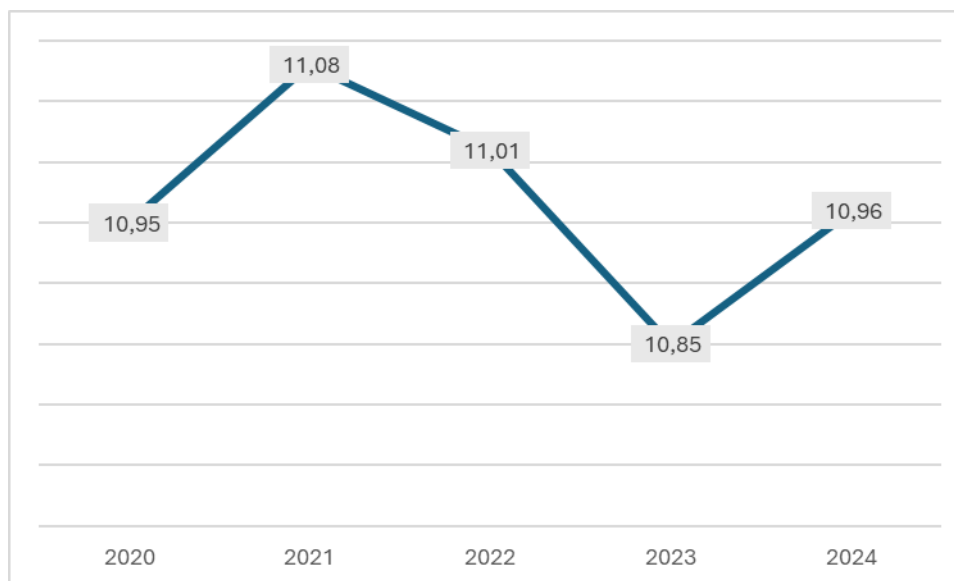
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat merepresentasikan partisipasi pendidikan dan sistem pendidikan di Kota Bima, namun belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pendidikan di Kota Bima. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Indikator ini mencerminkan capaian pendidikan formal di suatu daerah. Nilai dari Rata-Rata Lama Sekolah mempunyai makna:

- RLS \geq 12 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk sudah menamatkan jenjang pendidikan setara SMA;
- RLS 9 tahun mengindikasikan pencapaian pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD–SMP);
- RLS yang masih di bawah 9 tahun berarti banyak penduduk belum menamatkan SMP.

Semakin tinggi RLS, semakin besar peluang penduduk menguasai keterampilan yang relevan di dunia kerja, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Pendidikan berhubungan langsung dengan penghasilan. Studi BPS menunjukkan bahwa RLS yang tinggi cenderung diikuti oleh pendapatan rumah tangga yang lebih baik, mengurangi risiko kemiskinan. Pendidikan yang lebih tinggi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, kebersihan, sanitasi, serta kesadaran hukum dan lingkungan.



Gambar 2.26. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun di Kota Bima selama periode 2020–2024 berada pada kisaran 10,85–11,08 tahun. Perkembangan ini menunjukkan fluktuasi ringan, dengan sedikit kenaikan pada 2024 setelah penurunan di tahun sebelumnya. Nilai sekitar 11 tahun berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun di Kota Bima telah menempuh pendidikan hingga setara kelas XI SMA, namun belum seluruhnya menyelesaikan pendidikan menengah atas.

2.2.3.2. Hasil Pembelajaran

Untuk menggambarkan kualitas pendidikan dalam hal mutu dan pemerataan pendidikan, digunakan hasil asesmen nasional yang menilai AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar dalam platform Rapor Pendidikan yang dirilis oleh Kemendikbud. Output dari rapor pendidikan berupa capaian literasi, numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar.

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah instrumen evaluasi capaian belajar yang mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi peserta didik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan diatur dalam



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. SPM mengharuskan pemerintah daerah memenuhi standar minimal mutu layanan pendidikan, termasuk pencapaian kompetensi dasar bagi seluruh peserta didik.

Gambar 2.27. Hasil Asesmen Kompetensi Minimum Kota Bima Tahun 2021-2024



Sumber : <https://ringkas.kemdikbud.go.id/LampiranDataSPM2025>, 2025

Berdasarkan data hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang diakses melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terlihat perkembangan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kota Bima yang diukur melalui dua kategori utama, yaitu persentase satuan pendidikan dan persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada literasi membaca dan numerasi.

Dari seluruh satuan pendidikan dan peserta didik di Kota Bima, persentase satuan pendidikan maupun peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum di Kota Bima dalam kurun waktu tahun 2021-2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian numerasi masih berada di atas capaian literasi, yang hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan siswa dalam berpikir menggunakan konsep,

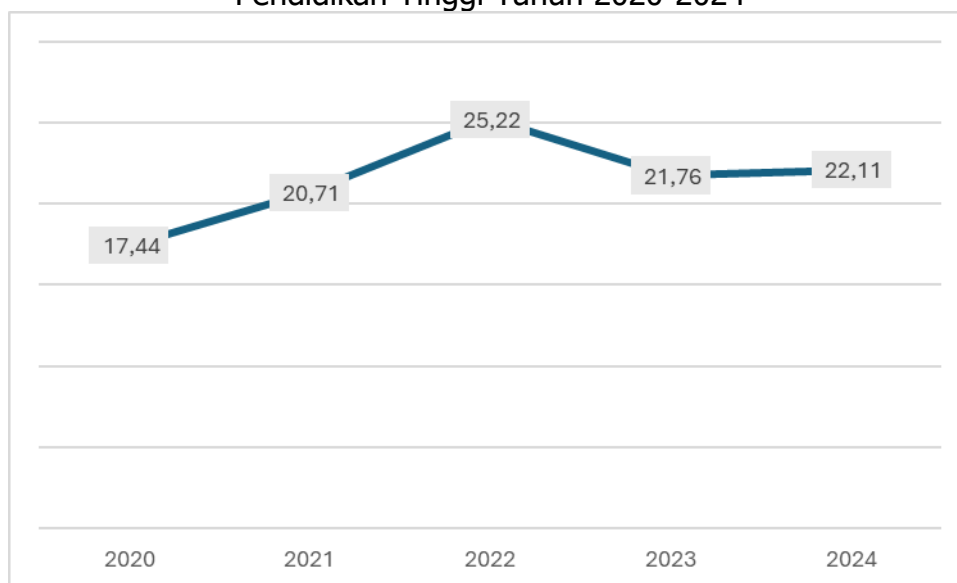


prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan sangat baik.

2.2.3.3. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Indikator ini mengukur persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, atau Doktor). Proporsi ini menjadi salah satu tolok ukur penting kualitas sumber daya manusia (SDM) karena berkaitan erat dengan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan daya saing di pasar kerja.

Gambar 2.28. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, Kota Bima Dalam Angka

Pada tahun 2024, proporsi penduduk Kota Bima berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi mencapai 22,11%, mengalami peningkatan tipis dibandingkan tahun 2023 (21,76%). Meskipun capaian ini menunjukkan tren positif, proporsi tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan target peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dicanangkan dalam RPJMN 2020–2024 maupun arah kebijakan pendidikan nasional yang mendorong perluasan akses pendidikan tinggi.



Peningkatan dari tahun 2020 yang hanya 17,44% ke 2022 yang mencapai 25,22% sempat menunjukkan akselerasi, namun tren menurun di 2023 mengindikasikan adanya tantangan dalam keberlanjutan akses ke perguruan tinggi.

Dari sisi regulasi, capaian ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur perluasan akses, pemerataan kesempatan, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

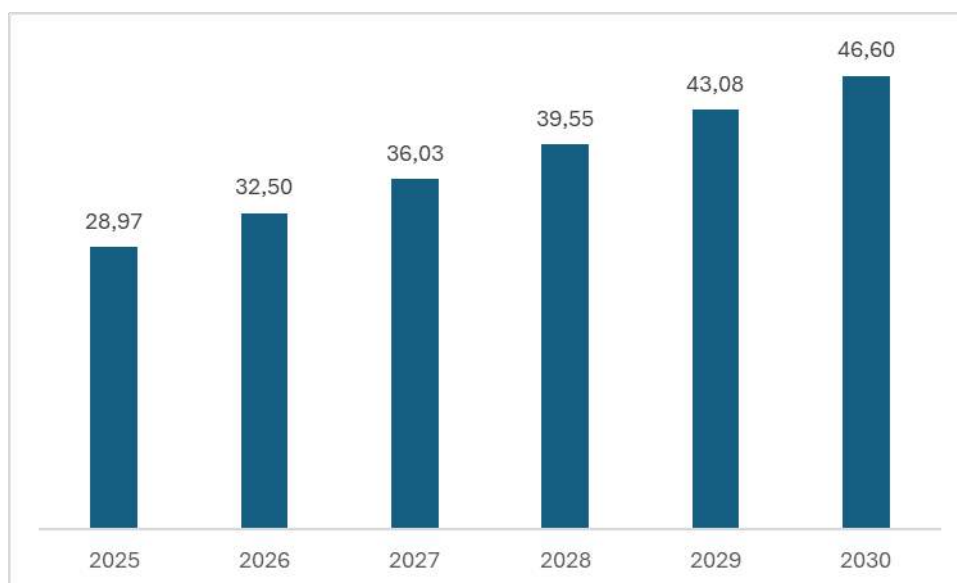
2.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Indikator ini mengukur persentase tenaga kerja yang terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dibandingkan total angkatan kerja. Kepesertaan ini mencakup jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun, yang bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja formal maupun informal. Kepesertaan yang tinggi menunjukkan adanya perlindungan tenaga kerja yang baik, sementara capaian rendah mengindikasikan potensi kerentanan sosial-ekonomi pekerja, khususnya di sektor informal.

Berdasarkan data yang ada, cakupan kepesertaan di Kota Bima menunjukkan tren yang belum sepenuhnya optimal jika dibandingkan dengan target nasional universal coverage. Tantangan yang dihadapi adalah pekerja sektor formal cenderung lebih banyak terdaftar karena kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pegawainya dan pekerja sektor informal, yang jumlahnya signifikan di Kota Bima (pedagang, nelayan, petani, dan pekerja mandiri lainnya), masih minim kesadaran dan partisipasi dalam program ini.



Gambar 2.29. Proyeksi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025-2030



Sumber: Bappeda, 2025, Hasil Analisis

2.2.4.2. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja

Perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan dan program yang dirancang oleh negara untuk mengurangi kerentanan dan risiko sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, sakit, dan disabilitas. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar warga negara, khususnya kelompok rentan. Merujuk pada sistem perlindungan sosial yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, termasuk saat menghadapi krisis (seperti bencana alam, pandemi, atau krisis ekonomi). Dalam konteks penyandang disabilitas, perlindungan sosial yang adaptif sangat penting karena kelompok ini cenderung lebih rentan terhadap dampak krisis dan memiliki kebutuhan yang lebih kompleks karena mereka yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dapat disebabkan oleh berbagai rintangan yang menghambat mereka untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Kendati memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang namun penyandang disabilitas perlu dipenuhi hak-haknya sebagai warga negara yaitu hak atas pendidikannya hingga perguruan tinggi, unit layanan umum khusus disabilitas serta memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Kota Bima dengan Jumlah penyandang disabilitas



yang tahun 2023 yaitu sebanyak 885 Orang dengan jumlah bekerja sebanyak 277 Orang sedangkan tahun 2024 jumlah disabilitas sebanyak 1018 orang dengan jumlah bekerja 207 orang.

Tabel 2.25. Disabilitas yang bekerja 2023-2024

| No | Bekerja | Tahun | |
|----|-------------|-------|------|
| | | 2023 | 2024 |
| 1 | PNS | 3 | - |
| 2 | Buruh Tani | 23 | 22 |
| 3 | Buruh Pijat | 1 | - |
| 4 | Petani | 50 | 39 |
| 5 | Pedagang | 2 | 4 |
| 6 | Swasta | 4 | 4 |
| 7 | Ojek | 1 | - |
| 8 | Lainnya | 193 | 138 |
| | Total | 277 | 207 |

Sumber : Bappeda Kota Bima 2024

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran

Sebagai masyarakat yang hidup dalam keberagaman dan dinamika zaman yang terus berkembang, kita tentu mendambakan sebuah kota Beragama maslahat dan berbudaya maju. Konsep yang mengintegrasikan nilai agama dengan budaya, lingkungan, dan pembangunan yang bukan hanya maju secara fisik dan ekonomi, tetapi juga bernilai, bermartabat, dan membawa maslahat bagi seluruh warganya, membawa kebaikan, manfaat, dan keberkahan bagi semua tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kelompok tertentu. Pelayanan publik berjalan adil, bantuan menjangkau yang membutuhkan, dan ruang hidup dirancang untuk semua kalangan, termasuk kelompok rentan. Mampu mencerminkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, gotong royong, saling menghormati, dan menjaga lingkungan. Seni, tradisi, dan kearifan lokal dijaga guna memberikan manfaat edukatif serta dikembangkan, menjadi bagian dari kehidupan modern,



melek teknologi, terbuka pada inovasi, dan mampu bersaing secara global, namun tetap berpihak pada rakyat. Infrastruktur tertata, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, dan ekonomi bergerak terus bergerak maju.

Merawat dan melestarikan cagar budaya adalah bagian dari menghormati sejarah spiritual dan budaya bangsa. Ini sejalan dengan prinsip beragama maslahat, karena upaya melestarikan memberikan manfaat edukatif, Memupuk rasa hormat pada keragaman, menjadi pengingat sejarah perjuangan dan dakwah. Agama Mendorong Pelestarian situs-situs bersejarah. Ini menunjukkan bahwa ajaran agama sejatinya mendorong perlindungan terhadap warisan budaya Leluhur itu menunjukkan bahwa masyarakatnya cerdas, sadar sejarah, punya rasa tanggung jawab dan memberikan manfaat lintas generasi dan lintas golongan. Terkait Kota Beragama maslahat dan berbudaya maju bahwa persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya Kota Bima yang telah dilestarikan pada Tahun 2024 sebanyak 45,97 persen dan Persentase warisan budaya tak benda yang ikut dilestarikan 88,8 persen.

Kota Bima sebagai salah satu kota di Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar untuk menjadi kota yang maju, bemaslahat, dan berbudaya maju. Dalam konteks modern, cita-cita ini selaras dengan semangat membangun kota toleran, yaitu kota yang menjunjung tinggi keberagaman, hidup damai dalam perbedaan, dan menjamin hak serta martabat setiap warganya. Kota Bima merupakan salah satu Kota toleran dengan indek 4,583 Persen, Peraturan Pemerintah Kota Bima sangat Mendukung Toleransi dengan kebijakan yang mendukung praktik dan promosi toleransi serta tidak ada kebijakan diskriminatif. Kota Bima cukup berhasil menciptakan lingkungan di mana keberagaman agama, suku, dan budaya dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Dalam konteks ini, toleransi tidak hanya berarti toleransi dalam arti pasif, tetapi juga mencakup pengakuan dan penerimaan aktif terhadap perbedaan, serta upaya kolaboratif untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai. Secara umum interaksi antar warga Kota Bima dalam konteks keberagaman agama dan keyakinan menunjukkan kondisi yang sangat baik hal ini ditunjukkan dengan sikap toleransi, hidup rukun saling menghormati dan menghargai antar umat beragama dan penguatan kolaborasi dalam mengelola keberagaman serta mengurangi konflik antar beragama.



2.2.5.2. Indeks Kota Toleran

Indeks Kota Toleran (IKT) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah kota mampu mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, bebas dari diskriminasi, serta menjamin hak-hak warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, suku, etnis, maupun pandangan politik. IKT yang tinggi mencerminkan stabilitas sosial, rasa aman, dan kualitas kehidupan bersama, yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Nilai indeks ini dihitung berdasarkan beberapa dimensi, yaitu:

- a. Regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung toleransi;
- b. Tindakan pemerintah daerah dalam menjaga kebebasan beragama/berkeyakinan;
- c. Tingkat peristiwa intoleransi dan penanganannya;
- d. Sikap dan perilaku Masyarakat.

Pada tahun 2023 capaian Kota Bima adalah 4,583 dan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,18 poin menjadi 4,403. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan suasana inklusif dan harmonis, baik di tingkat kebijakan maupun interaksi sosial masyarakat. Meskipun angkanya tidak anjlok tajam, tren penurunan perlu diantisipasi agar tidak berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan sumber daya manusia berkarakter adalah pendekatan keluarga. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang mampu menjalankan fungsinya secara optimal, baik dari sisi pengasuhan, pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan dasar (ekonomi, kesehatan, emosional), pelestarian nilai-nilai moral dan budaya, partisipasi dalam kehidupan sosial dan keluarga berkualitas adalah fondasi masyarakat yang sehat, adil, dan inklusif. Kinerja pembangunan keluarga di Kota Bima ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 62,96 persen pada 2023. Pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dan pintu masuk bagi pembangunan sumber daya manusia menghadapi kondisi yang perlu untuk terus mendapat perhatian.



Pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Pembangunan gender pada satu dekade terakhir menunjukkan kemunduran yang dicerminkan dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang semakin kecil. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurun dari 0,485 pada tahun 2019 menjadi 0,458 pada tahun 2020, meningkat pada 0,495 pada tahun 2021 namun kembali menurun menjadi 0,480 pada tahun 2022 dan tahun 2023. IKG terus mengalami penurunan disebabkan masih terjadi kesenjangan dalam hal akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan utamanya pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta keterwakilan pada posisi strategis. Prasyarat mewujudkan kesetaraan gender yang ideal dimana perempuan menjadi berdaya di Kota Bima menghadapi fakta yang cukup pelik jika melihat berbagai isu yang melingkupi perempuan seperti diskriminasi, kekerasan, budaya patriarki, beban ganda, ketimpangan pendapatan dan posisi lemah lainnya dibanding laki-laki. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian ke depan utamanya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta melakukan berbagai upaya untuk mereduksi posisi lemah perempuan.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kondisi SDM sebagai salah satu faktor pendorong perekonomian daerah dilihat berdasarkan Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) dan Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan). Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan untuk menghasilkan suatu output. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang ada, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu negara. Teori human capital berpendapat bahwa pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat antara lain: diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan, dan tambahan pendapatan seseorang, apabila mampu menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya.



2.3.1.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat.

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Bima pada 2019 tercatat sebesar 763 per 10.000 penduduk dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 tercatat sebesar 998 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.26. Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1. | Jumlah lulusan S1 | 6.897 | 8132 | 14.187 | 14.997 | 15.702 |
| 2. | Jumlah lulusan S2 | 433 | 665 | 674 | 735 | 797 |
| 3. | Jumlah lulusan S3 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| 4. | Jumlah lulusan S1/S2/S3 | 7.344 | 8812 | 14.887 | 15.750 | 16.519 |
| 5. | Jumlah penduduk | 155.140 | 156.224 | 157.362 | 161.362 | 165.113 |
| Rasio lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk | | 473 | 564 | 946 | 976 | 1.000 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025 dan hasil analisa

2.3.1.2. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah angka yang menunjukkan besaran beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi angka ketergantungan maka akan semakin tinggi beban penduduk produktif untuk membiayai/menanggung penduduk yang belum dan tidak produktif. Angka ketergantungan yang tinggi akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak



produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya persentase dependencyratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

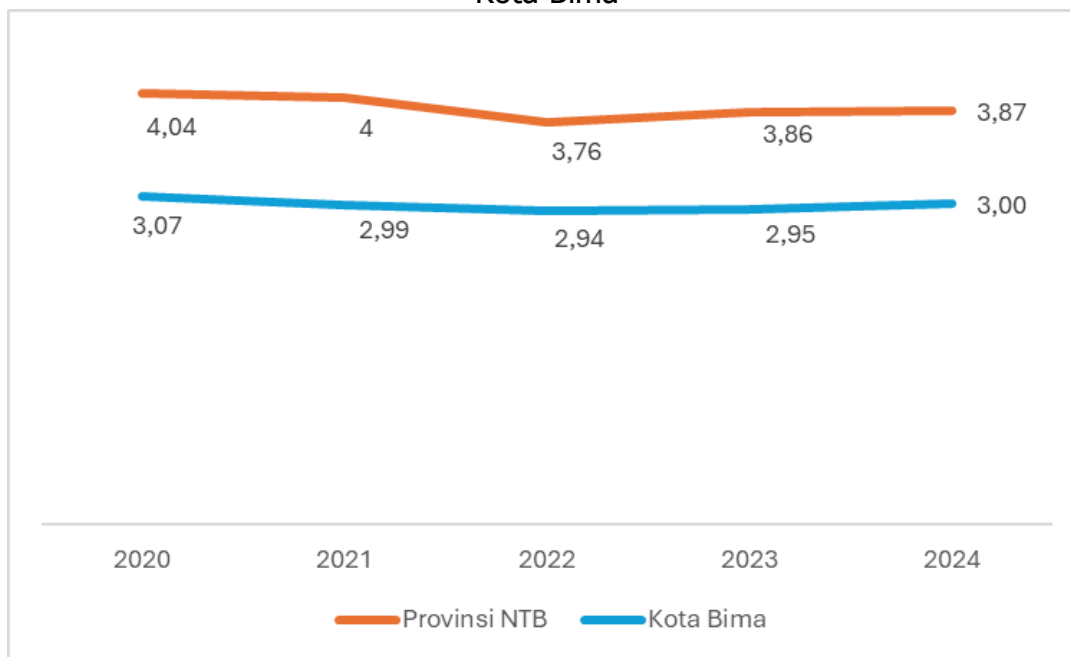
2.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui berbagai mekanisme yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan dukungan terhadap ekonomi Kota Bima. Industri pengolahan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD melalui berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi, peningkatan kegiatan ekonomi, pengolahan sumber daya alam.



Gambar 2.30. Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi NTB dan Kota Bima



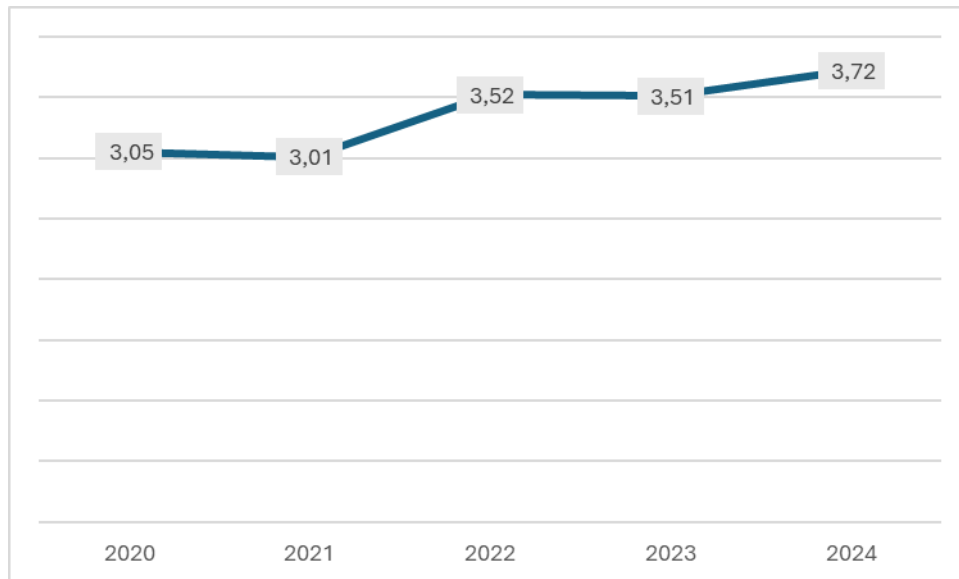
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

2.3.2.2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Dan Minum

Salah satu lapangan usaha yang juga memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Bima adalah akomodasi makan dan minum yang identik dengan sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan pada tahun 2020 jumlah sebanyak 214.169 orang, kemudian tahun 2021 kunjungan wisatawan menurun menjadi 100.799 orang, hal ini disebabkan akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 kunjungan wisatawan mengalami peningkatan sebanyak 112.170 orang, pada tahun 2023 jumlah wisatawan sebanyak 128.240 orang dan pada tahun 2024 kunjungan wisatawan meningkat menjadi 136.545 orang. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini karena adanya dampak langsung dari pembangunan sarana dan prasarana destinasi yang mampu menarik kunjungan wisatawan, beberapa destinasi itu adalah pantai lawata dan pantai kolo. Untuk kedepannya akan dilakukan penambahan destinasi-destinasi baru dan peningkatan sarana dan prasarana destinasi yang sudah ada serta memperbanyak event-event yang berdurasi sehari-hari yang mampu menarik wisatawan sehingga diharuskan untuk menginap atau tinggal sementara di Kota Bima.



Gambar 2.31. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Dan Minum



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, Kota Bima Dalam Angka

2.3.2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

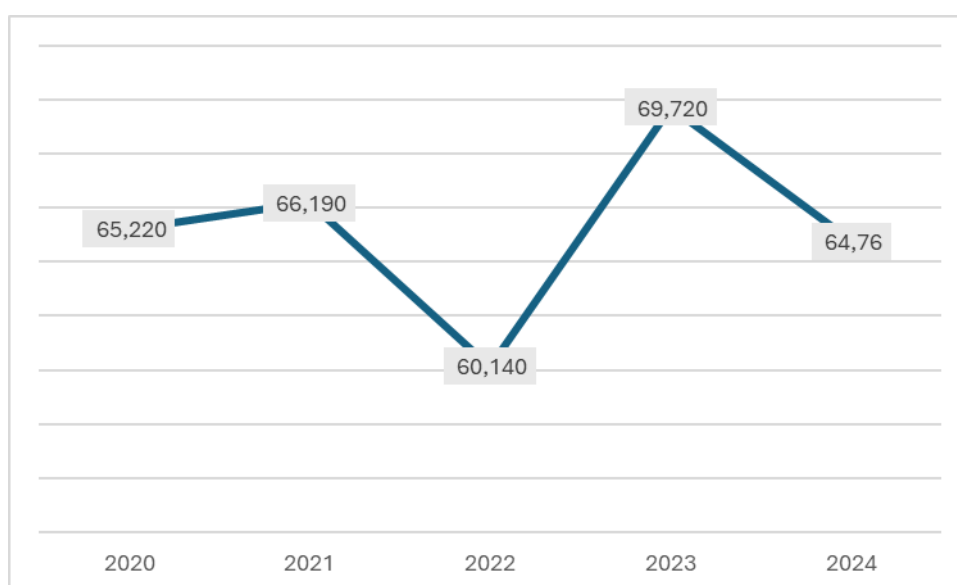
Pertumbuhan ekonomi yang baik umumnya dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT), karena setiap pertumbuhan ekonomi lazimnya akan menciptakan banyak lapangan kerja. Dan sebaliknya dengan banyaknya pengangguran berpotensi mengurangi produktivitas ekonomi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bima sejak tahun 2008 mengalami kecenderungan penurunan, namun terjadinya pandemi Covid-19 dan masih rendahnya kesempatan kerja berdampak pada penduduk usia kerja. Selama periode Maret 2022 hingga Desember 2023, tingkat pengangguran terbuka berkurang sebanyak 398 jiwa. Dari 3.650 jiwa pada Maret 2022 menjadi 3.252 jiwa pada Desember 2023 atau mengalami penurunan sebesar 0,01 persen dari 3,56 persen pada Maret 2022 menjadi 3,57 persen pada Desember 2023 sementara tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,27 persen. Hal ini disebabkan diantaranya faktor ketersediaan lapangan kerja yang cenderung banyak pada sektor informal yang menyerap tenaga kerja di bidang pertanian, perdagangan dan jasa masyarakat.



2.3.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan merupakan indikator penting dalam pengukuran kesetaraan gender di pasar kerja, yang sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Ketenagakerjaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 5 tentang kesetaraan gender serta poin 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan TPAK perempuan mencerminkan optimalisasi potensi sumber daya manusia dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Gambar 2.32. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Bima Dalam Angka 2025, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kota Bima dalam periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, TPAK perempuan tercatat sebesar 65,22%, kemudian mengalami kenaikan tipis pada tahun 2021 menjadi 66,19%. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup tajam hingga mencapai 60,14%, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja perempuan pada tahun tersebut, kemungkinan dipengaruhi oleh pemulihan pascapandemi dan keterbatasan peluang kerja di sektor tertentu.

Pada tahun 2023, capaian TPAK perempuan kembali meningkat signifikan menjadi 69,72%, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun



demikian, pada tahun 2024 persentase ini kembali menurun menjadi 64,76%. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Bima masih dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, serta faktor sosial-budaya yang memengaruhi perempuan untuk masuk atau bertahan di pasar kerja.

2.3.2.5. Indeks Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Kapabilitas inovasi juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru.

Indeks Kapabilitas Inovasi merupakan salah satu komponen penting dalam pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Bappenas. Indeks ini menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan, mengelola, dan memanfaatkan inovasi untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kapabilitas inovasi yang tinggi menjadi faktor pengungkit penting dalam meningkatkan daya saing daerah, karena inovasi mendorong efisiensi, kualitas produk/jasa, serta daya tarik investasi.

Di tingkat kabupaten/kota, Indeks Kapabilitas Inovasi dibentuk oleh enam indikator utama:

- a. Keanekaragaman tenaga kerja; mengukur tingkat variasi latar belakang pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja angkatan kerja di daerah. Tenaga kerja yang beragam mendorong kreativitas, kolaborasi lintas bidang, dan inovasi yang lebih luas.
- b. Publikasi ilmiah; menggambarkan jumlah dan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti atau institusi di daerah. Publikasi ilmiah menunjukkan kapasitas riset dan menjadi sumber pengetahuan untuk pengembangan inovasi baru.
- c. Aplikasi Kekayaan Intelektual; mengukur jumlah pengajuan paten, hak cipta, desain industri, dan jenis kekayaan intelektual lainnya. Tingginya pendaftaran



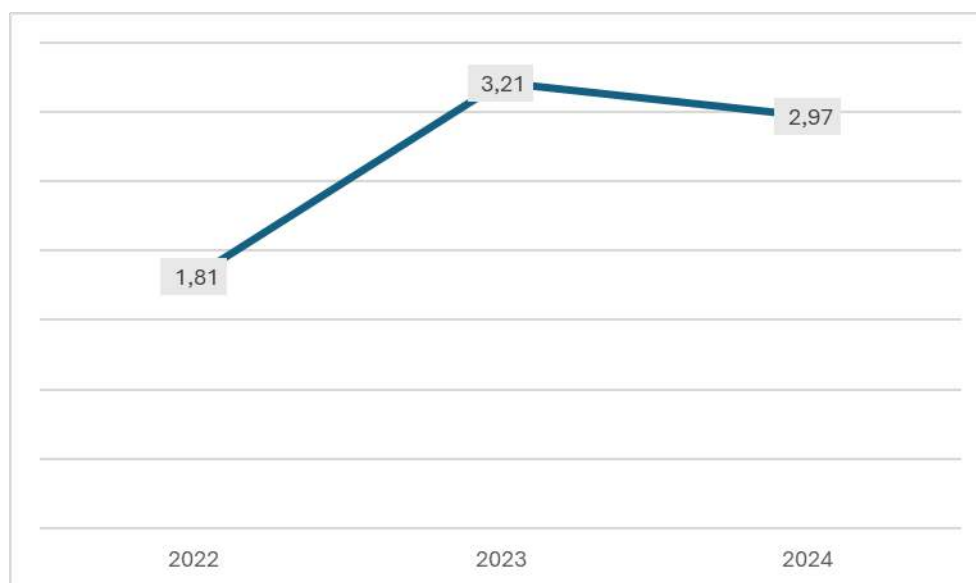
kekayaan intelektual menunjukkan adanya aktivitas penciptaan inovasi yang diakui secara hukum.

- d. Belanja riset; menggambarkan proporsi anggaran daerah yang dialokasikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D). Semakin besar belanja riset, semakin tinggi potensi terciptanya inovasi yang aplikatif.
- e. Indeks keunggulan lembaga riset; menilai kapasitas, reputasi, dan produktivitas lembaga riset yang ada di daerah. Lembaga riset yang unggul menjadi pusat inovasi dan transfer teknologi.
- f. Aplikasi merek dagang; mengukur jumlah pendaftaran merek dagang dari pelaku usaha di daerah. Merek dagang yang terdaftar menunjukkan adanya perlindungan identitas produk dan potensi penguatan daya saing pasar.

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh BRIN skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Bima sebesar 3,89 diatas skor rata-rata provinsi Nusa Tenggara Barat yakni 3,67. Posisi Kota Bima berada di urutan kedua setelah Kota Mataram dengan skor 4,31. Skor Pilar ke 12 yaitu Kapabilitas Inovasi Kota Bima adalah 2,97 di bawah Provinsi NTB yang sebesar 3,27 dan Kota Mataram 4,09. Untuk skor pilar ke 3 yaitu pilar Adopsi TIK, Kota Bima mencapai nilai 4,79 masih di bawah Kota Mataram yang mencapai nilai 4,86. Pilar adopsi TIK mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah. TIK dapat mengurangi biaya transaksi serta mempercepat pertukaran informasi dan ide pada suatu daerah sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. Sedangkan pilar kapabilitas inovasi mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.



Gambar 2.33. Indeks Kapabilitas Inovasi Tahun 2022-2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Capaian Indeks Kapabilitas Inovasi Kota Bima menunjukkan tren yang cukup positif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, indeks tercatat sebesar 1,81, yang mencerminkan kapasitas inovasi daerah masih pada tahap awal penguatan. Tahun 2023 mengalami lonjakan signifikan menjadi 3,21, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam menciptakan, mengelola, dan memanfaatkan inovasi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas riset, pendaftaran kekayaan intelektual, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Namun, pada tahun 2024 nilai indeks sedikit menurun menjadi 2,97. Meskipun terjadi penurunan, capaian ini tetap berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut dapat menjadi sinyal perlunya penguatan kembali ekosistem inovasi, khususnya pada indikator yang berpotensi mengalami perlambatan, seperti belanja riset atau pendaftaran kekayaan intelektual.

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.3.3.1. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (green investment), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (green jobs) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ekonomi



biru adalah model pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian ekosistem.

Tingkat penerapan ekonomi hijau dihitung dari persentase pertumbuhan produktivitas sektor pertanian dan rasio penggunaan EBT terhadap distribusi energi listrik. Pertumbuhan produktivitas sektor pertanian mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 persentase pertumbuhan produktivitas sektor pertanian sebesar 38,93 persen, meningkat pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 4,07 persen, menurun pada tahun 2022 sebesar 3,04 persen dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 3,50 persen dan tahun 2024 terus meningkat menjadi 6,77 persen. Capaian persentase penggunaan EBT terhadap distribusi energi listrik terus meningkat dari 0,195 persen pada tahun 2019 menjadi 0,221 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 0,33 persen.

2.3.3.2. Tingkat Penerapan Ekonomi Biru

Tingkat penerapan ekonomi biru dihitung dari presentase pertumbuhan produksi perikanan. Produktivitas perikanan pada tahun 2024 meningkat sebesar 3,56 persen yang terdiri dari persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap sebesar 2,01 persen dan persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya sebesar 1,55 persen. Produksi perikanan di Kota Bima cenderung meningkat dari tahun ke tahun atau menunjukkan trend yang positif, hal ini di dukung adanya kegiatan/upaya peningkatan produksi seperti penyediaan sarana dan prasarana perikanan, intensitas pembinaan, penyuluhan dan pendampingan pada nelayan yang semakin rutin dilakukan.

2.3.4. Transformasi Digital

2.3.4.1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Transformasi digital di Tingkat pemerintahan adalah proses adopsi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara menyeluruh dalam operasi dan layanan pemerintahan. Ini melibatkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, responsivitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan,



Trasformasi digital di tingkat pemerintahan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan inklusif. Rendahnya implementasi transformasi digital di tingkat pemerintahan dapat mengurangi kualitas pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan dapat mempersulit pemerintah menghadapi berbagai tantangan modern. Pada Tahun 2022 Nilai IMDI Kota Bima sebesar 44,57, meningkat menjadi 47,67 pada tahun 2023 dan kembali menurun pada tahun 2024 sebesar 44,26 dengan kategori cukup.

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

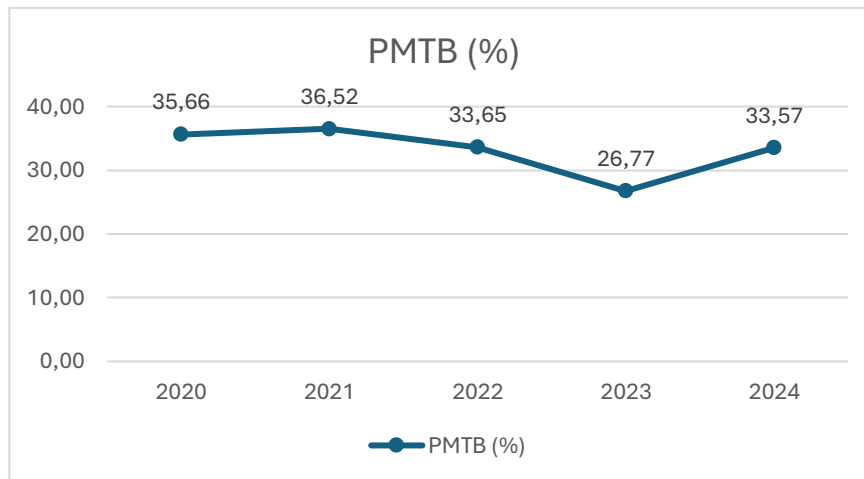
2.3.5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB)

Transformasi ekonomi dalam rangka integrasi ekonomi domestik dan global diarahkan pada menurunnya koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) serta meningkatnya ekspor barang dan jasa.

Dari sisi persentase, PMTB Kota Bima pada kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 persentase PMTB sebesar 35,66 meningkat di tahun 2021 sebesar 36,52 persen kemudian berturut turut menurun pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 33,65 persen dan 26,77 persen dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 33,57 persen. Pertumbuhan PMTB yang rendah adalah efek dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan PMTB yang kembali naik pada tahun 2024 merupakan hasil dari banyaknya kunjungan investor dari luar daerah yang menunjukkan ketertarikan terhadap peluang investasi di sektor kelautan dan industri pariwisata di Kota Bima.



Gambar 2.34. Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Bima Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Bima, Tahun 2025

2.3.5.2. Net Ekspor Barang dan Jasa (Persen PDRB ADHB)

Net Nilai Ekspor Barang dan Jasa Kota Bima selama kurun waktu 2020-2024 bernilai negatif artinya nilai impor sebagai komponen pengurang lebih besar dibandingkan nilai ekspor. Secara total, dalam kurun waktu 2020-2024 nilai net ekspor barang dan jasa menunjukkan nilai yang cukup stabil setiap tahun. Pada tahun 2020 nilai net ekspor mencapai 1.629,69 Milyar Rupiah kemudian bergerak menurun hingga tahun 2022, kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 1.681,47 Milyar Rupiah dan tahun 2024 sebesar 1.681,47 Milyar Rupiah. Sementara itu, proporsi net ekspor terhadap PDRB menunjukkan penurunan sepanjang lima tahun terakhir yaitu 39,30 persen pada tahun 2020 cenderung mengalami penurunan menjadi 31,64 persen pada tahun 2024 (BPS Kota Bima, *Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran 2019-2023*, Volume 10, 2024).

2.3.6. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Peran fasilitas wilayah/infrastruktur terhadap daya saing merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan membawa dampak positif dalam mendukung berbagai sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan pariwisata. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, pembangunan infrastruktur wilayah menjadi semakin krusial dalam meningkatkan konektivitas dan



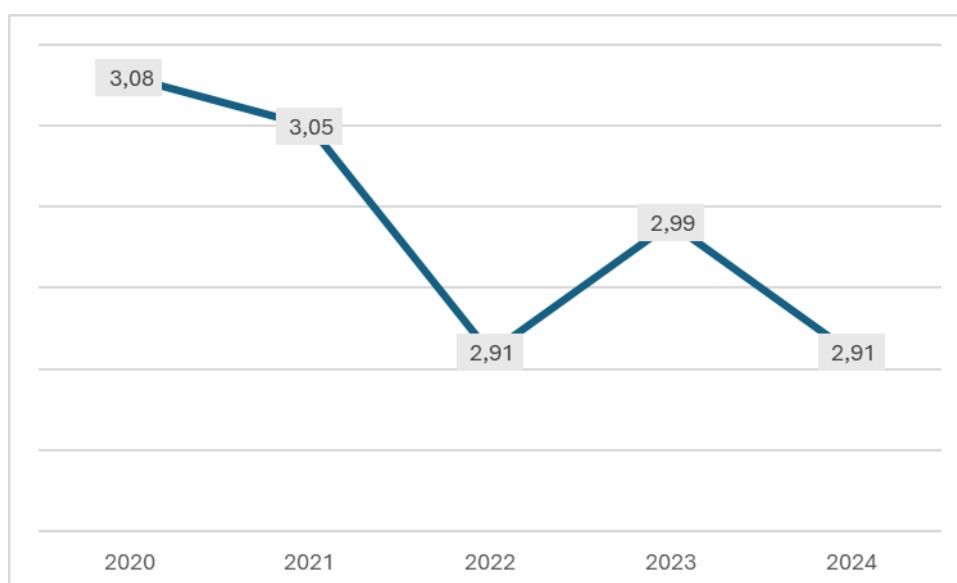
memperkuat daya saing wilayah di era modern ini. Fasilitas/infrastruktur wilayah dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut.

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah produktif adalah 10.909 dari luas seluruh wilayah budidaya sebesar 11.669 km².

2.3.6.1. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi

Indikator Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi adalah ukuran persentase sumbangan nilai tambah bruto (PDRB) suatu kabupaten/kota terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi pada periode tertentu. Indikator ini menunjukkan seberapa besar peran perekonomian daerah tersebut dalam membentuk perekonomian provinsi secara keseluruhan. Secara teknis, indikator ini dihitung dengan membandingkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) kabupaten/kota dengan total PDRB provinsi pada tahun yang sama, lalu dikalikan 100 persen.

Gambar 2.35. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Bima, Tahun 2025



Proporsi Kontribusi PDRB Kota Bima terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif fluktuatif namun cenderung menurun, yakni dari 3,08% pada 2020, 3,05% pada 2021, turun ke 2,91% pada 2022, sedikit meningkat menjadi 2,99% pada 2023, dan kembali turun ke 2,91% pada 2024. Perubahan ini mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi Kota Bima dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan.

Penurunan proporsi kontribusi pada tahun-tahun tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Perubahan struktur ekonomi NTB yang pada periode ini mengalami peningkatan signifikan pada sektor-sektor unggulan provinsi seperti pertambangan (khususnya tambang tembaga dan emas) serta industri pengolahan yang berpusat di kabupaten lain, sehingga kontribusi relatif Kota Bima terhadap total PDRB NTB menjadi lebih kecil.
- b. Ketergantungan ekonomi Kota Bima pada sektor perdagangan, jasa, dan transportasi yang pertumbuhannya relatif lebih moderat dibandingkan sektor primer penyumbang utama PDRB provinsi.
- c. Dampak fluktuasi harga komoditas dan aktivitas perdagangan antarwilayah, terutama perdagangan hasil pertanian dan perikanan, yang mempengaruhi daya saing dan volume perdagangan Kota Bima di tingkat provinsi.
- d. Pemulihan pasca-pandemi COVID-19 yang di Kota Bima berjalan cukup baik di sektor jasa dan perdagangan, namun belum mampu menandingi laju percepatan sektor unggulan NTB yang bersifat ekstraktif dan padat modal.

Dari sisi regulasi, indikator ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggariskan bahwa pembangunan daerah harus memperkuat kontribusi terhadap pembangunan nasional dan provinsi melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, yang di level provinsi diterjemahkan melalui RPJMD Provinsi NTB.



Tantangan utama bagi Kota Bima adalah mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor bernilai tambah tinggi, termasuk industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga kontribusinya terhadap PDRB provinsi dapat meningkat. Di sisi lain, penguatan konektivitas logistik, peningkatan daya saing SDM, serta pemanfaatan ekonomi biru dan hijau menjadi strategi yang perlu didorong untuk memperbaiki posisi kontribusi Kota Bima dalam struktur ekonomi NTB.

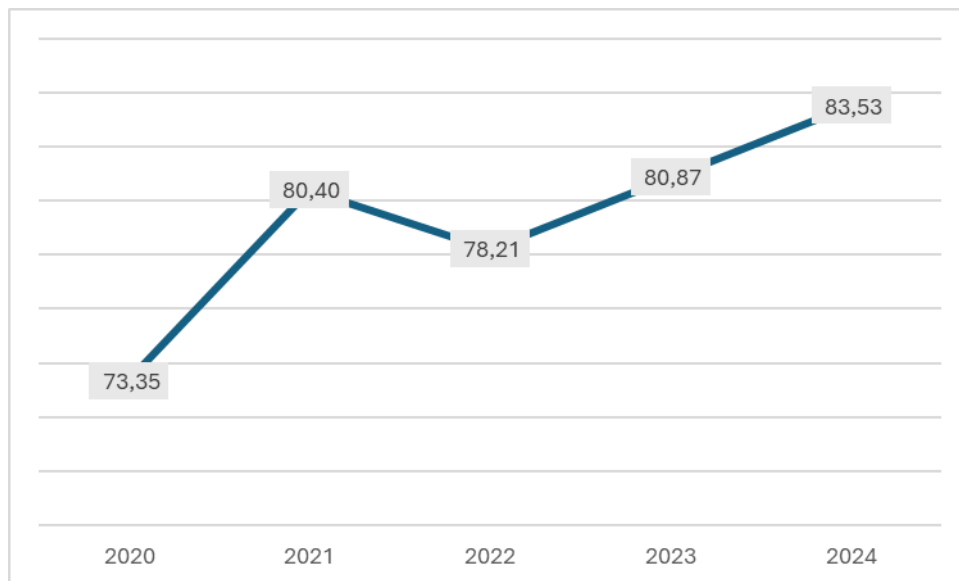
2.3.6.2. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan

Kelayakan hunian umumnya ditentukan oleh standar teknis bangunan yang aman dan sehat, memiliki akses air minum layak, sanitasi layak, dan memenuhi ketentuan tata ruang. Keterjangkauan diukur dari kemampuan rumah tangga untuk membiayai hunian tanpa membebani pengeluaran pokok lainnya, sedangkan keberlanjutan mencakup aspek efisiensi energi, ramah lingkungan, dan aman terhadap risiko bencana. Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan mengukur persentase rumah tangga yang menempati hunian sesuai kriteria kelayakan fisik, keterjangkauan harga/sewa, dan keberlanjutan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagai bagian dari hak dasar warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang sehat. UU ini menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan perumahan yang layak, terjangkau, dan sesuai tata ruang, termasuk bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).



Gambar 2.36. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Bima, Tahun 2025

Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 83,53%, yang mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kondisi fisik rumah, peningkatan akses terhadap prasarana dasar, serta program bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

2.3.6.3. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Bima pada tahun 2020-2024 umumnya terus mengalami peningkatan disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) setiap tahunnya.



**Tabel 2.27. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Bima
Tahun 2020-2024**

| No. | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Panjang Jalan (Km) | 311,425 | 311,425 | 311,425 | 311.425 | 311,425 |
| 2. | Jumlah Kendaraan | 60 569 | 63 850 | 66,597 | 66.881 | 69.434 |
| 3. | Rasio | 1:190 | 1:205 | 1:213 | 1:215 | 1:223 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bima, 2025

Jumlah orang yang melalui dermaga selama tahun 2021 sampai 2024 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh banyaknya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi laut. Demikian juga untuk muat bongkar barang mengalami peningkatan yang cukup baik dibanding tahun 2022.

Tabel 2.28. Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Bima Tahun 2020-2024

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Call (Unit) | | | | | |
| | Tiba | 1.801 | 1.925 | 1.947 | 1.839 | 1.877 |
| | Berangkat | 1.511 | 1.827 | 1.829 | 1.848 | 1.879 |
| 2 | Volume Muatan Barang (m3) | | | | | |
| | Tiba | 2.519.756 | 3.137.912 | 3.237.891 | 3.228.396 | 3.657.520 |
| | Berangkat | 2.014.644 | 3.054.797 | 3.091.787 | 3.125.697 | 3.633.339 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bima, 2024

2.3.6.4. Jenis dan Jumlah Bank

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank serta cabang-cabangnya, juga dengan jenis dan jumlah perusahaan asuransi serta cabang-cabangnya. Jumlah bank di Kota Bima pada tahun 2024 adalah sebanyak 17 unit. Adapun secara rinci fasilitas bank dan non bank dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.29. Jenis dan Jumlah Bank di Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | Sektor | Jumlah | | | | |
|--------|--------------|--------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Bank Umum | 11 | 13 | 9 | 8 | 9 |
| 2. | Bank Syariah | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 3. | BPR | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Jumlah | | 16 | 18 | 21 | 17 | 17 |

Sumber : Bagian Perekonomi dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah, 2025

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro Keamanan

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, faktor keamanan dan ketertiban adalah hal yang penting. indikator kriminalitas berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, Pemerintah Kota Bima telah diperkuat oleh aparat keamanan yang terdiri dari aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparat Kepolisian (POLRI), dan dibantu oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Kerjasama yang berkesinambungan oleh instansi yang berwenang tersebut terus dilakukan, sehingga Tingkat/Indeks kriminalitas Kota Bima dalam kurun waktu tahun 2019-2023 cenderung terus mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 9,3.

Tabel 2.30. Angka Kriminalitas Kota Bima Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah Laporan Tindak Kriminal Selama 1 Tahun | 512 | 515 | 509 | 535 | 567 |
| 2. | Jumlah Penduduk | 155.140 | 156.224 | 157.362 | 161.362 | 165.113 |
| Angka Kriminalitas | | 0,330 | 0,330 | 0,323 | 0,332 | 0,343 |

Sumber : Kepolisian Resort Bima Kota, 2024 (diolah)

Angka kriminalitas pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan adanya kasus pembunuhan, perkelahian antar kampung dan insiden serangan menggunakan panah oleh remaja. Berdasarkan karakteristik tindak kriminalitas yang terjadi, faktor penyebabnya bukan dari motif ekonomi namun lebih kepada kurang optimalisasi pengawasan lingkungan.



Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

Tabel 2.31. Lama Proses Perijinan Kota Bima Tahun 2024

| NO | NAMA - NAMA IZIN / URAIAN | Lama Mengurus (Hari) | Jumlah Persyaratan (Dokumen) | Biaya Resmi (Rata-rata mks Rph) |
|----|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | PERIZINAN MELALUI APLIKASI OSS-RBA Online Single Submission Basic Approaced | | | |
| 1 | Nomor Induk Berusaha (NIB) | 1 hari | 7 | 0 |
| 2 | Resiko Rendah (NIB) | 1 hari | 7 | 0 |
| 3 | Resiko Menengah Rendah (NIB, Sertifikat Standar Terbit Otomatis) | 1 hari | 8 | 0 |
| 4 | Resiko Menengah Tinggi (NIB, Sertifikat Standar terverifikasi) | 3 hari | 8 | 0 |
| 5 | Resiko Tinggi (NIB, Izin Terverifikasi) | 3 hari | 8 | 0 |
| 6 | Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU) seperti tanda daftar Gudang (TDG), SPPIRT, praktek Dokter Hewan DLL (sesuai Jenis kegiatan usaha berdasarkan KBLI) | 1 hari | 8 | 0 |
| 7 | Kesesuaian antara Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) | 1 hari | 8 | 0 |
| | PERIZINAN MELALUI APLIKASI SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan | | | |



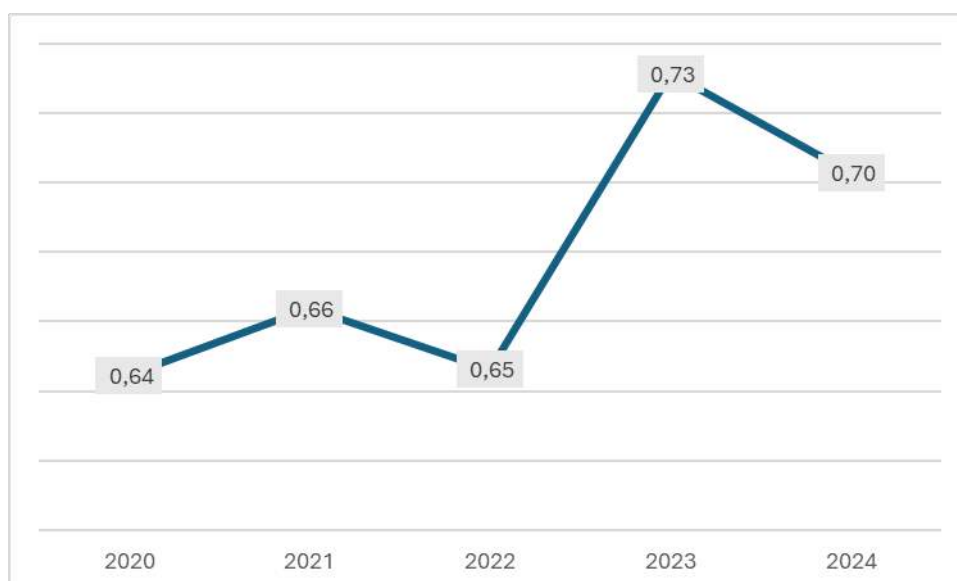
| NO | NAMA - NAMA IZIN / URAIAN | Lama Mengurus (Hari) | Jumlah Persyaratan (Dokumen) | Biaya Resmi (Rata-rata mks Rph) |
|----|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Gedung) | | | |
| 1 | Persetujuan bangunan Gedung (PBG) | | | |
| | - PBG Rumah Tangga | 1 hari | 8 | 0 |
| | - PBG Tempat Usaha | 1 hari | 13 | 0 |
| | PERIZINAN MELALUI APLIKASI SINONA (Sistem Informasi Non Perizinan) | | | |
| 1 | Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) | 1 hari | 7 | 0 |
| 2 | Surat Izin Menempati Kios (SIMK) | 1 hari | 8 | 0 |
| 3 | Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) | 1 hari | 13 | 0 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2025

2.3.7.1. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang menggambarkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Indikator ini menjadi salah satu ukuran kemampuan fiskal daerah dalam memobilisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak, serta menjadi tolok ukur kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap total perekonomian wilayah.

Gambar 2.37. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bima, 2025



Berdasarkan data capaian, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Bima pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,64% dan 2021 sebesar 0,66%, mengalami kenaikan menjadi 0,73% pada tahun 2023, namun sedikit menurun menjadi 0,70% pada tahun 2024. Secara umum, capaian ini menunjukkan tren yang relatif stabil dalam lima tahun terakhir, dengan fluktuasi tipis yang mencerminkan dinamika perekonomian daerah dan kinerja pemungutan pajak.

2.3.7.2. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Andil Inflasi merupakan besarnya sumbangan setiap komoditas yang mengalami fluktuasi harga terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi di suatu kota atau secara nasional. Besarnya nilai perubahan indeks (*inflasi/deflasi*) yang terjadi setiap bulan, merupakan gabungan andil dari jenis barang/jasa yang mengalami fluktuasi harga pada bulan yang bersangkutan.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga



menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah.

Pada Bulan Desember 2023, Kota Bima mengalami inflasi sebesar 2,91 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,94 pada Bulan November 2023 menjadi 116,59 pada Bulan Desember 2023. Angka ini searah dengan angka inflasi nasional sebesar 2,61 persen. Inflasi ini mengalami penurunan mencapai angka 2,33 persen pada tahun 2024 yang dipengaruhi oleh masifnya Pemerintah Kota Bima melaksanakan program stabilitas harga di setiap Kelurahan, sehingga bisa mengendalikan laju inflasi.

Tabel 2.32. Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2019-2024 Kota Bima

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Kota Bima | 2,05 | 0,13 | 6,39 | 2,91 | 2,33 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu elemen penilaian dalam Indeks Reformasi Birokrasi yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan reformasi di bidang hukum, khususnya dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. IRH menilai berbagai aspek, mulai dari perencanaan regulasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan, hingga evaluasi implementasi dan dampaknya terhadap pelayanan publik.

Pengukuran IRH mengacu pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022, yang mencakup aspek perencanaan regulasi, penyusunan dan harmonisasi peraturan, kemudahan akses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta evaluasi dan partisipasi publik dalam proses legislasi.

Pada tahun 2024, capaian IRH Kota Bima berada pada angka 86,4 yang menempatkannya dalam kategori A (Sangat Baik). Capaian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan, harmonisasi, dan publikasi produk hukum daerah telah berjalan dengan baik dan konsisten. Perencanaan regulasi melalui Program Pembentukan



Peraturan Daerah (Propemperda) telah terstruktur dengan baik, harmonisasi antarperaturan dilakukan secara intensif dengan melibatkan Kanwil Kemenkumham dan Biro Hukum Provinsi, serta ketersediaan dokumen hukum yang mudah diakses oleh masyarakat melalui JDIH yang terus diperbarui.

Pencapaian ini juga mengindikasikan adanya penguatan dalam transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum di Kota Bima. Pemerintah daerah telah mampu meminimalisir potensi tumpang tindih peraturan dan memastikan keterlibatan publik dalam penyusunan regulasi, khususnya pada peraturan daerah yang bersifat strategis. Selain itu, mulai diterapkannya praktik evaluasi pasca-pengesahan (post-legislative review) menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas peraturan daerah yang telah diundangkan.

Meskipun capaian ini tergolong tinggi, masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai kategori AA (Istimewa), di antaranya dengan meningkatkan kualitas naskah akademik berbasis kajian ilmiah, memperluas cakupan dan kedalaman evaluasi peraturan yang sudah berlaku, memperkuat partisipasi publik yang terdokumentasi secara baik, serta mendorong digitalisasi penuh siklus pembentukan hukum daerah. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola regulasi, sekaligus memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik, iklim investasi, dan pencapaian target pembangunan daerah.

2.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

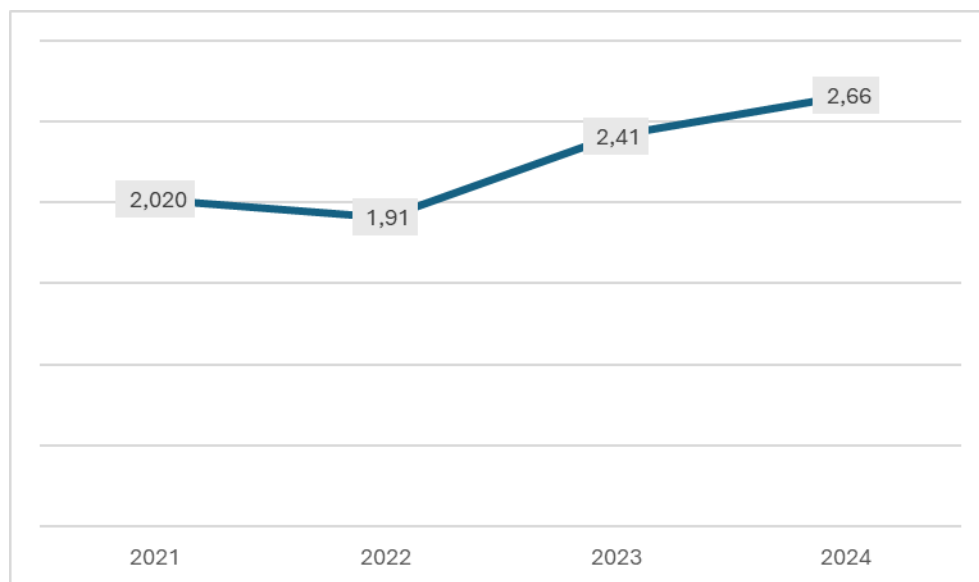
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu indikator strategis yang penting dalam mewujudkan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Indeks SPBE mengukur tingkat kematangan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang berkualitas.

Sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Bima dalam dokumen RPJMD 2025-2029, indeks SPBE berfungsi sebagai tolok ukur kemajuan transformasi digital pemerintah kota. Penerapan SPBE yang optimal akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas melalui pengelolaan data yang transparan dan akuntabel serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan regulasi. Selain



itu, kemampuan sistem yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat memungkinkan pemerintahan Kota Bima lebih responsif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada publik serta menghadapi dinamika perkembangan zaman.

Gambar 2.38. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021-2024



Sumber: KemenPAN-RB, 2025

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bima selama empat tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022. Pada tahun 2021, indeks SPBE tercatat sebesar 2,020, kemudian mengalami penurunan menjadi 1,91 pada tahun 2022. Setelah itu, capaian indeks kembali meningkat cukup signifikan menjadi 2,41 di tahun 2023 dan mencapai level tertinggi dalam periode ini, yaitu 2,66 di tahun 2024.

Penurunan indeks dari 2,020 menjadi 1,91 mengindikasikan adanya tantangan atau hambatan yang dihadapi, baik dari sisi adaptasi teknologi, sumber daya manusia, maupun dari upaya harmonisasi regulasi dan tata kelola digital. Lonjakan indeks ke angka 2,41 dan 2,66 menunjukkan adanya intervensi kebijakan dan perbaikan yang efektif, baik dari segi pembangunan infrastruktur digital, kebijakan yang mendukung integrasi pelayanan publik, serta upaya peningkatan kompetensi aparatur.



Perkembangan indeks SPBE ini memperlihatkan komitmen Kota Bima dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Penurunan yang terjadi pada tahun 2022 menjadi pembelajaran penting, yang dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi dan perbaikan pelayanan digital serta integrasi sistem yang lebih baik. Peningkatan capaian di tahun-tahun berikutnya menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam merespons tantangan, meningkatkan kualitas infrastruktur digital, serta memperkuat sumber daya manusia dan regulasi terkait pemanfaatan teknologi informasi.

2.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik telah memenuhi standar kualitas yang meliputi aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, sistem informasi pelayanan, konsultasi dan pengaduan masyarakat, serta inovasi pelayanan.

Dasar hukum pengukuran indeks pelayanan publik di Indonesia tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), seperti PermenPANRB No. 17 Tahun 2017 dan PermenPANRB No. 29 Tahun 2022. Pengukuran ini dilakukan melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP), dengan tujuan utama memperoleh nilai indeks pelayanan publik sebagai indikator utama reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

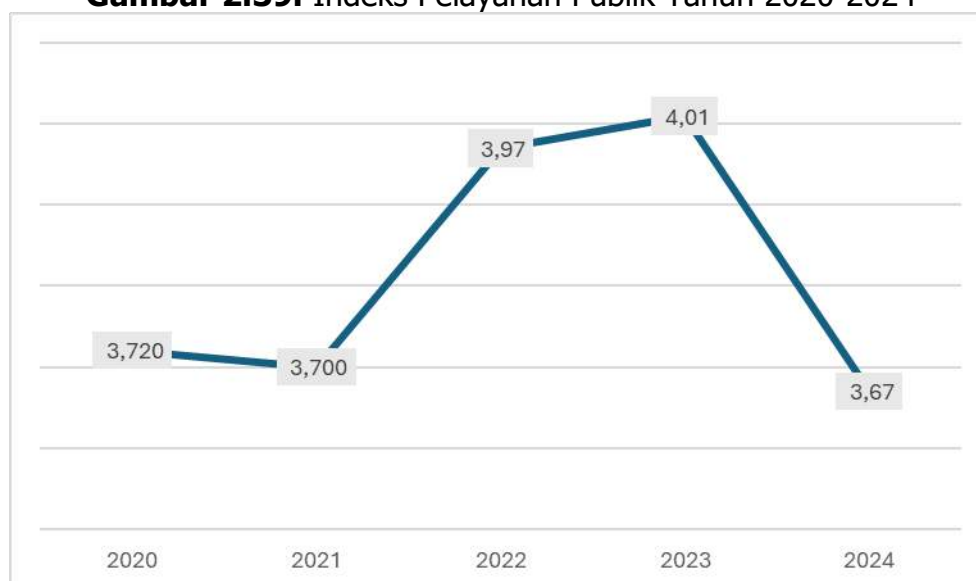
Analisis aspek hukum menegaskan bahwa indeks pelayanan publik menjadi instrumen formal yang mengukur efektivitas pemerintahan dalam memberikan layanan berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah termasuk Kota Bima wajib melakukan evaluasi berkala untuk memastikan pelayanan publik memenuhi kebutuhan masyarakat secara adaptif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Data nilai indeks ini juga menjadi acuan dalam dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD, sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perbaikan



layanan publik. Oleh karena itu, indeks pelayanan publik tidak hanya sebagai ukuran kinerja, tetapi juga alat pengelolaan tata kelola pemerintahan yang terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan yang berkesinambungan.

Gambar 2.39. Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2024



Sumber: KemenPAN-RB, 2025

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Bima selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 3,72, kemudian sedikit menurun menjadi 3,70 pada tahun 2021. Setelah itu, terjadi peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2022 menjadi 3,97 dan mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan nilai 4,01. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan.

Capaian ini menjadi sinyal penting bahwa meskipun telah ada kemajuan signifikan, ada kebutuhan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan penurunan indeks di tahun terakhir. Strategi adaptif dan inovatif dalam pelayanan publik, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan infrastruktur digital menjadi fokus utama untuk memastikan kualitas pelayanan yang konsisten dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk menjamin pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan memenuhi harapan masyarakat Kota Bima sesuai dengan visi misi RPJMD 2025-2029. cukup nyata hingga mencapai angka 3,67.



2.4.1.4. Survei Penilaian Integritas

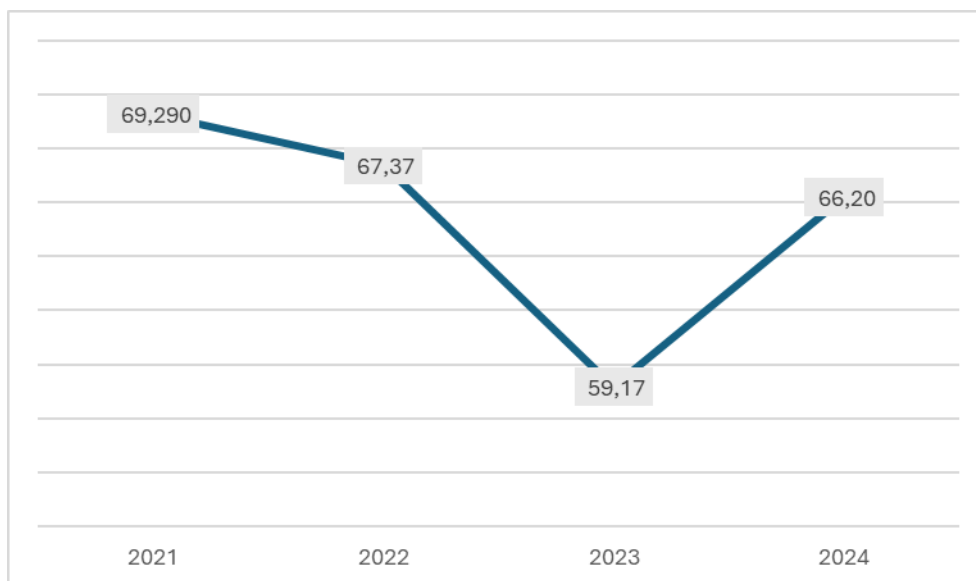
Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Survei ini menilai integritas suatu lembaga pemerintahan dengan mengumpulkan data dari tiga sumber utama: pegawai internal, masyarakat pengguna layanan (eksternal), dan para ahli atau ekspert. SPI bertujuan memberikan gambaran obyektif mengenai integritas organisasi, transparansi, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, intervensi luar dalam pemberian izin atau rekomendasi, serta sosialisasi antikorupsi dalam instansi terkait.

Indeks Integritas pada SPI dihitung dengan menggabungkan penilaian dari ketiga sumber tersebut (internal, eksternal, dan ekspert) dengan metode sampling acak yang representatif dan validasi yang ketat. Hasilnya berupa angka dalam rentang 1 hingga 100, dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat integritas yang lebih baik dan risiko korupsi yang lebih rendah. Skor ini mencerminkan seberapa efektif sistem pengendalian internal dan pencegahan korupsi dalam organisasi tersebut.

Pelaksanaan SPI berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengamanatkan upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan integritas dan tata kelola yang baik di lembaga pemerintahan. SPI juga menjadi bagian dari indikator reformasi birokrasi yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam mengevaluasi kinerja birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).



Gambar 2.40. Nilai Survey Penilaian Integritas Tahun 2021-2024



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

Capaian Survey Penilaian Integritas Kota Bima selama empat tahun terakhir menunjukkan dinamika yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, nilai capaian berada pada posisi tertinggi 69,29, kemudian mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2022 menjadi 67,37 dan turun drastis ke angka 59,17 pada tahun 2023. Namun, di tahun 2024 terjadi pemulihan dengan naik ke angka 66,20.

Capaian ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan strategis Kota Bima agar penguatan integritas menjadi prioritas. Strategi penguatan integritas pemerintah harus terus ditingkatkan dengan menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif, transparansi dalam tata kelola pemerintahan, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan etika. Peningkatan skoring survey integritas juga menjadi indikator kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan terpercaya dalam dokumen RPJMD 2025-2029.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

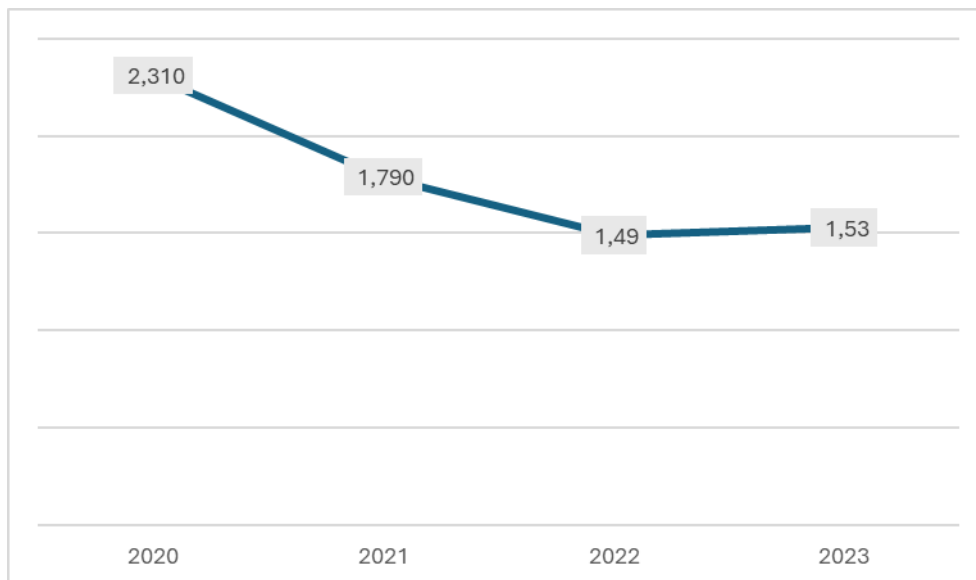
2.4.2.1. Indeks Kriminalitas

Indeks kriminalitas mengukur jumlah tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah per 1.000 penduduk dalam kurun waktu tertentu. Data periode 2020–2023 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, meskipun di akhir periode



terjadi sedikit peningkatan. Pada tahun 2020, indeks kriminalitas Kota Bima tercatat sebesar 2,31, kemudian turun menjadi 1,79 pada tahun 2021, dan kembali menurun menjadi 1,49 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, angkanya sedikit meningkat menjadi 1,53.

Gambar 2.41. Indeks Kriminalitas Tahun 2020-2023



Sumber: Kota Bima Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik, 2024

Penurunan indeks kriminalitas selama tiga tahun berturut-turut (2020–2022) menunjukkan adanya keberhasilan berbagai upaya penegakan hukum, peningkatan pengawasan lingkungan, dan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah berjalan efektif, termasuk pelaksanaan program keamanan berbasis masyarakat.

Namun, kenaikan tipis pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa potensi gangguan keamanan masih ada, terutama terkait faktor sosial-ekonomi dan dinamika masyarakat perkotaan. Peningkatan mobilitas penduduk, perkembangan teknologi, serta potensi konflik sosial dapat menjadi pemicu timbulnya tindak kriminalitas baru.

Ke depan, Pemerintah Kota Bima perlu memperkuat strategi pencegahan dengan mengoptimalkan program polisi RW/kelurahan, memperluas jangkauan CCTV kota untuk pemantauan wilayah rawan, meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat, serta memperkuat sinergi antar-instansi keamanan. Upaya tersebut



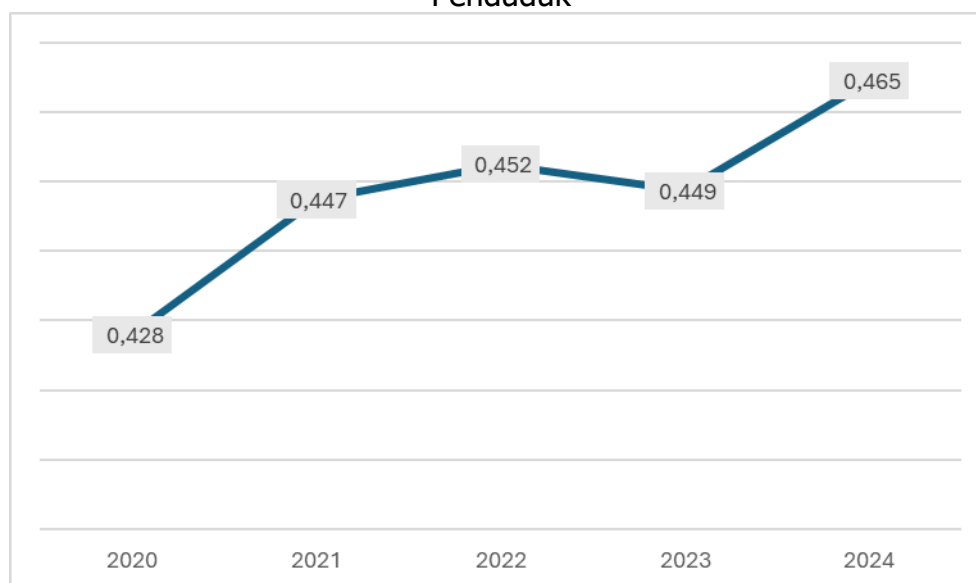
diharapkan tidak hanya menjaga tren penurunan indeks kriminalitas, tetapi juga mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kota Bima.

2.4.2.2. Rasio Jumlah Petugas Keamanan dan sejenisnya terhadap jumlah Penduduk

Rasio jumlah petugas keamanan terhadap jumlah penduduk adalah indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah personel yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di daerah - mencakup anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) - dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia dalam bidang keamanan publik, serta menjadi tolok ukur apakah jumlah petugas keamanan sebanding dengan kebutuhan perlindungan masyarakat.

Gambar 2.42. Rasio Jumlah Petugas Keamanan dan sejenisnya terhadap jumlah Penduduk



Sumber: Hasil Analisa, Bappeda Kota Bima, 2025

Secara umum, rasio petugas keamanan terhadap jumlah penduduk di Kota Bima cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2024 dengan nilai 0,465, yang berarti terdapat sekitar 0,465 petugas keamanan



untuk setiap 1 penduduk, atau sekitar 465 petugas untuk setiap 1.000 penduduk (jika dikonversi ke per seribu penduduk).

Kenaikan rasio ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas personel keamanan, baik melalui penambahan jumlah anggota maupun optimalisasi personel yang ada. Hal ini dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan rasa aman masyarakat, pengendalian ketertiban umum, dan penanggulangan potensi gangguan keamanan.

Namun, meskipun rasio meningkat, kualitas pelayanan keamanan juga perlu diperhatikan. Rasio yang tinggi tidak otomatis menjamin keamanan yang optimal jika tidak diimbangi dengan kompetensi, profesionalisme, distribusi penempatan yang tepat, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

2.4.3.1. Indeks Ketahanan Nasional

Indeks Ketahanan Nasional (IKN) adalah ukuran komposit yang dikembangkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) untuk menilai tingkat ketahanan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

IKN diukur dari delapan gatra yang mencerminkan aspek kehidupan nasional, yaitu: Gatra Geografi; Gatra Sumber Daya Alam (SDA); Gatra Kependudukan; Gatra Ideologi; Gatra Politik; Gatra Ekonomi; Gatra Sosial Budaya; dan Gatra Pertahanan dan Keamanan. Nilai IKN dinyatakan dalam skala 0–4, di mana semakin tinggi skor menunjukkan semakin kuat ketahanan nasional pada wilayah yang diukur.

Pelaksanaan IKN di daerah bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat ketahanan wilayah secara lebih spesifik, sehingga pemerintah daerah dapat:

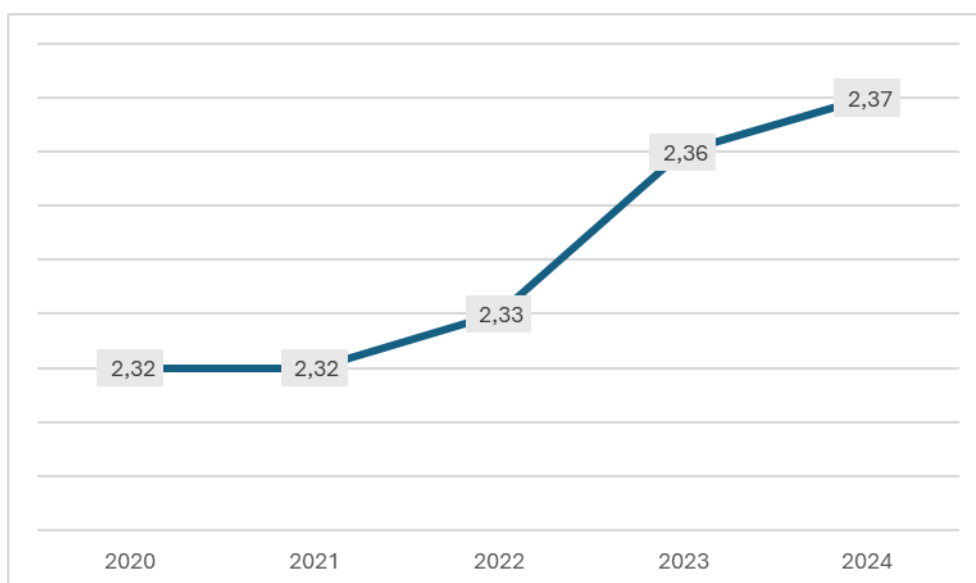
- a. Mengetahui kekuatan dan kelemahan pada masing-masing gatra;
- b. Menentukan prioritas kebijakan pembangunan daerah berbasis penguatan ketahanan;



- c. Mengintegrasikan program strategis pada RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan sektoral;
- d. Memperkuat koordinasi lintas sektor (pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, masyarakat);

Di Kota Bima, pengukuran IKN menjadi bahan evaluasi strategis dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Hasil ini juga digunakan sebagai indikator pendukung misi daerah dalam mewujudkan keamanan tangguh dan stabilitas sosial ekonomi.

Gambar 2.43. Indeks Ketahanan Nasional Kota Bima Tahun 2020-2024



Sumber: Lembaga Ketahanan Nasional, 2025

Nilai IKN Kota Bima menunjukkan tren meningkat. Peningkatan signifikan terjadi pada 2022–2023, mencerminkan perbaikan dalam gatra sosial-budaya, ekonomi, dan keamanan. Meskipun masih berada pada kategori ketahanan cukup, tren positif ini menunjukkan keberhasilan program penguatan nilai kebangsaan, pemerataan pembangunan, dan kolaborasi keamanan wilayah.

2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.4.1. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.4.4.1.1. Pendidikan



Gambaran umum kondisi layanan urusan wajib bidang pendidikan di Kota Bima mencakup keadaan yang meliputi: tinjauan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan menengah; Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD; Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar; Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama; dan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Capaian kondisi layanan bidang Pendidikan Kota Bima tahun 2021 sampai dengan 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.33. Gambaran umum kondisi layanan urusan wajib bidang pendidikan di Kota Bima Tahun 2021-2024

| No | Pendidikan | Satuan | Tahun | | | |
|----|---|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | % | 129,24 | 53,25 | 67,29 | 79,79 |
| 2 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | % | 93,96 | 81,46 | 82,33 | 97,88 |
| 3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | % | 108,59 | 29,40 | 62,96 | 97,66 |
| 4 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | % | 4,93 | 51,04 | 2,80 | 80,94 |

3. *Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2025*

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan adalah proporsi peserta didik kesetaraan dari kelompok usia tersebut terhadap total penduduk usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah. Ini diukur dalam persen dan menunjukkan seberapa besar kelompok usia yang rentan ini memanfaatkan program pendidikan kesetaraan untuk mengejar pendidikan yang belum selesai.



Pada tahun 2024 terjadi lonjakan tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kota Bima, yaitu dari 2,80% pada tahun 2023 menjadi 80,94% pada tahun 2024.

Tingginya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan menggambarkan keberhasilan program pendidikan non-formal dalam memberikan layanan pendidikan alternatif, tetapi juga menjadi indikator bahwa **masih ada tantangan dalam menjamin akses, keterjangkauan, dan keberlangsungan pendidikan formal** bagi seluruh anak usia sekolah, sehingga peningkatan akses pendidikan menjadi salah satu isu strategis pembangunan.

Gambaran umum kondisi layanan urusan wajib bidang pendidikan di Kota Bima akan mencakup keadaan yang meliputi tinjauan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Disamping itu juga akan mencakup tinjauan rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk, rasio guru dengan murid, rasio guru dengan murid per kelas rata-rata serta sebaran bangunan sekolah berdasarkan kecamatan.

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. APS di Kota Bima adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.



Tabel 2.34. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | Jenjang Pendidikan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 1. | APS SD/MI | 88,14 | 99,17 | 106,63 | 96,69 | 99,97 |
| 2. | APS SMP/MTs | 101,96 | 99,17 | 107,38 | 107,08 | 99,89 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Hal yang penting dalam rangka pembangunan dan pelayanan umum urusan wajib bidang pendidikan adalah mengetahui apakah bangunan sekolah yang ada sekarang telah memenuhi standar dan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah tingkat pendidikan (dasar dan menengah). Untuk itu perlu diketahui rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.35. Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Bima Tahun 2019-2023

| No. | Jenjang Pendidikan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1. | Jumlah gedung sekolah | 88 | 91 | 91 | 92 | 91 |
| 1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 16.773 | 14 687 | 14.570 | 17.988 | 16.704 |
| 1.3. | Rasio | 190,60 | 161,39 | 160,11 | 195,52 | 183,56 |
| 2 | SMP/MTs | | | | | |
| 2.1. | Jumlah gedung sekolah | 35 | 34 | 37 | 35 | 36 |
| 2.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 9978 | 13764 | 14089 | 8.529 | 11.804 |
| 2.3. | Rasio | 285,08 | 404,82 | 380,78 | 243,69 | 327,88 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima, 2025

Dari tabel tersebut diatas bahwa penduduk usia sekolah pendidikan 7-12 tahun (SD/MI) pada 2024 perbandingan satu gedung sekolah menampung 183,56 orang, kemudian pada penduduk usia sekolah 13-15 tahun (SMP/MTs) perbandingan satu sekolah menampung 327,88 orang.



3. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.36. Rasio Guru/Murid Sekolah Negeri di Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | Jenjang Pendidikan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | SD | | | | | |
| 1.1. | Jumlah Guru | 1.748 | 1.731 | 1678 | 1.685 | 1.023 |
| 1.2. | Jumlah Murid | 13.742 | 13.366 | 13.612 | 13.700 | 14.032 |
| 1.3. | Rasio | 7,86 | 7,72 | 8,11 | 8,13 | 13,71 |
| 2 | SMP | | | | | |
| 2.1. | Jumlah Guru | 728 | 738 | 726 | 742 | 471 |
| 2.2. | Jumlah Murid | 5.208 | 4.924 | 4.613 | 4.512 | 4.735 |
| 2.3. | Rasio | 7,15 | 6,67 | 6,35 | 6,08 | 10,05 |

Sumber : BPS, Kota Bima Dalam Angka, 2025

Tabel 2.37. Rasio Guru/Murid Madrasah Negeri di Kota Bima Tahun 2019-2023

| No | Jenjang Pendidikan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | MI | | | | | |
| 1.1. | Jumlah Guru | 52 | 52 | 58 | 80 | 82 |
| 1.2. | Jumlah Murid | 869 | 911 | 916 | 962 | 951 |
| 1.3. | Rasio | 16,71 | 17,52 | 15,79 | 12,02 | 11,59 |
| 2 | MTs | | | | | |
| 2.1. | Jumlah Guru | 223 | 227 | 255 | 277 | 273 |
| 2.2. | Jumlah Murid | 2.444 | 2.516 | 2.542 | 2.591 | 2.705 |
| 2.3. | Rasio | 10,95 | 11,08 | 9,97 | 9,35 | 9,91 |

Sumber : BPS, Kota Bima Dalam Angka, 2025

Sementara rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk



mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.38. Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-rata per 1000 Jumlah Murid di Kota Bima Tahun 2020-2024

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jumlah ruang kelas jenjang SD/MI | 847 | 847 | 929 | 929 | 1.241 |
| Jumlah ruang kelas jenjang SMP/MTs | 391 | 391 | 417 | 417 | 456 |
| Total jumlah ruang kelas pendidikan dasar | 1.238 | 1.238 | 1.346 | 1.346 | 1.697 |
| Jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar | 3.854 | 3.295 | 2.233 | 3.163 | 3.013 |
| Rata-rata jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas | 3,11 | 2,66 | 2,5 | 2,56 | 1,77 |
| Jumlah murid jenjang pendidikan dasar | 31.608 | 26.384 | 28.491 | 26.514 | 27.120 |
| Rata-rata jumlah murid pendidikan dasar per kelas | 25,53 | 21,31 | 20,00 | 21 | 21,85 |
| Rasio guru per kelas rata-rata per 1.000 jumlah murid | 0,311 | 0,101 | 0,11 | 0,11 | 0,655 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima, 2025

2.4.4.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan adanya kegiatan yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang paling mendasar untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Penyelenggaran urusan pemerintah bidang kesehatan bisa dilihat dari capaian indikator angka usia harapan hidup, yang dihitung menggunakan variabel angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi



merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kota Bima selama kurun tahun 2017–2022 menunjukkan kondisi yang cenderung stagnan. Pada tahun 2017, AKB di Kota Bima tercatat sebesar 6 per 1.000 kelahiran (6/1000 KH). Pada tahun 2018 dan 2019 berturut-turut mengalami peningkatan menjadi 7/1000 KH dan 9/1000 KH. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan tajam menjadi 4/1000 KH dan kembali naik pada angka 5/1000 KH ditahun 2022 dan 7/1000 di tahun 2023.

Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, Kesiapsiagaan Kelurahan Siaga yang ada memiliki kontribusi yang positif. Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif merupakan program pengembangan desa siaga yang sudah dimulai tahun 2006. Pengembangan Kelurahan siaga aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan. Pelaksanaan pengembangan Kelurahan Siaga di Kota Bima sampai dengan tahun 2023 tercatat dari 41 kelurahan telah mengembangkan Kelurahan siaga aktif.

Tabel 2.39. Perkembangan Pelayanan Kesehatan Kota ahun 2020-2024

| No | Urusan Kesehatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1 | Angka Kematian Bayi | 14 kasus | 19 kasus | 16 kasus | 21 kasus | 25 kasus |
| 2. | Angka Kematian Ibu (AKI) | 90/100.000 KH | 192/100000 KH | 98/100000 KH | 177/100.000 KH | 86/100.000 KH |
| 3. | Persentase Kelurahan STBM | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Persentase sarana Pelayanan kesehatan yang memenuhi standar | 70% | 75% | 75% | 80% | 90% |



| No | Urusan Kesehatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5. | % Desa Siaga Aktif | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% |
| 6. | % Pembinaan Sekolah Sehat | 24 sklh | 24 sklh | 22 sklh | 28 sklh | 36 sklh |
| 7. | Jumlah Puskesmas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8. | Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani | 69,0% | 70,0% | 99,74% | 99,56% | 100% |
| 9. | Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 94,6% | 95% | 89,20% | 81,24% | 74,45% |
| 10. | Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) | 94,4% | 95% | 94,15% | 81,03% | 80,30% |
| 11. | Cakupan peserta KB aktif | 87,1% | 88% | 88,79% | 91,81% | 81,81% |
| 12. | Cakupan Kunjungan Neonatus (KN3) | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 83,26% | 78,00% |
| 13. | Cakupan Kunjungan Bayi | 93,3% | 93,3% | 97,45% | 98,57% | 92,00% |
| 14. | Cakupan Kunjungan Balita | 89,7% | 89,7% | 91,30% | 91,33% | 85,00% |

Sumber : BPS Kota Bima dan Dinas Kesehatan, 2025

Strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus khusus pada ibu dan anak dapat dilakukan pada Posyandu. Analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita perlu dilakukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pada kondisi ideal, satu Posyandu melayani 100 balita. Artinya, minimal terdapat 10 posyandu per 1000 balita.

Puskesmas adalah sarana pelayanan dasar dan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam system pelayanan kesehatan harus mampu dijangkau dan diakses oleh masyarakat secara luas dan mudah. Salah satu



indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah dengan mengetahui rasio puskesmas per 100.000 penduduk. Sampai dengan tahun 2024, Puskesmas di Kota Bima adalah sejumlah 7 (tujuh) unit yang tersebar secara merata di 5 kecamatan dan didukung oleh 16 puskesmas pembantu.

Sejak tahun 2018 Pemerintah Kota Bima sudah memiliki rumah sakit sendiri yang terletak di Kecamatan Asakota. Ada pula rumah sakit dengan Tipe C yaitu RSUD Bima yang pengelolaannya masih dibawah Pemerintah Kabupaten Bima meskipun lokasinya berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Bima. dikelola oleh swasta masih dalam bentuk klinik yaitu PKU Muhammadiyah dan RS. Dr. Agung, Klinik Salma Husada dan Klinik Arsyafi.

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.40. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2020 – 2024

| No | Kecamatan | Jumlah Dokter | | | | |
|--------|-------------------------|---------------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kecamatan Rasanae Barat | 10 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 2 | Kecamatan Rasanae Timur | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | Kecamatan Mpunda | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 4 | Kecamatan Raba | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 |
| 5 | Kecamatan Asakota | 24 | 27 | 3 | 5 | 27 |
| Jumlah | | 56 | 56 | 27 | 30 | 67 |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025



Selain uraian pelayanan tersebut di atas, terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang menjadi indikator kinerja kunci dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang mencakup 14 indikator sebagai berikut.

Tabel 2.41. Indikator Kinerja Kunci Layanan Kesehatan Tahun 2021-2024

| No | Kesehatan | | Tahun | | | |
|----|---|---|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan | % | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi | % | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 102,80 | 94,15 | 81,03 | 80,25 |
| 4 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | % | 91,70 | 89,20 | 81,23 | 74,44 |
| 5 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | % | 94,59 | 91,14 | 83,26 | 77,95 |
| 6 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 91,48 | 91,30 | 91,96 | 85,42 |
| 7 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 29,31 | 90,98 | 1,92 | 102,19 |
| 8 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 30,58 | 67,21 | 69,27 | 72,40 |
| 9 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 71,37 | 65,14 | 84,27 | 72,65 |
| 10 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 62,18 | 82,24 | 66,18 | 97,58 |
| 11 | Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 127,20 | 100,00 | 99,83 | 100,32 |
| 12 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | % | 100,00 | 100,00 | 72,74 | 92,23 |
| 13 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | % | 100,00 | 66,02 | 124,20 | 181,37 |
| 14 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | % | 18,62 | 98,77 | 101,28 | 98,45 |

Tantangan Kota Bima saat ini adalah belum adanya Rumah Sakit Rujukan. Kondisi ini menjadi salah satu prioritas yang akan diatasi dalam periode



pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Selanjutnya, terdapat penurunan persentase layanan ibu bersalin dan bayi baru lahir pada tahun 2024. Terdapat beberapa penyebab penyebab penurunan layanan ibu bersalin dan bayi baru lahir, antara lain:

1. Tenaga medis ada, tapi tidak siaga 24 jam; dan
2. Data ibu hamil dan bayi belum tidak terintegrasi atau tidak diperbarui.

Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bima tahun 2025-2029.

2.4.4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan ekonomi suatu daerah. Jalan dan jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah. Untuk mendukung kelancaran transportasi darat, hingga tahun 2023 di Kota Bima telah dibangun jalan sepanjang 258,105 km Jalan Kota. Dari total panjang Jalan Kota, 70,41% dalam kondisi baik, 6,12% dalam kondisi sedang, dan sedangkan sisanya sebesar 22,47% kondisi jalan masih kategori rusak ringan maupun rusak berat.

Tabel 2.42. Kondisi Jalan di Kota Bima Tahun 2020-2024 (km)

| Kondisi Jalan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Baik | 160,501 | 164,997 | 171,614 | 181,735 | 169,773 |
| Sedang | 24,112 | 27,006 | 21,382 | 15,803 | 13,973 |
| Rusak | 16,267 | 18,75 | 11,357 | 8,257 | 17,284 |
| Rusak Berat | 57,225 | 47,352 | 53,752 | 52,310 | 96,069 |
| Jumlah | 258,105 | 258,105 | 258,105 | 258,105 | 297,099 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima, 2025

Terjadinya peningkatan panjang jalan dalam kondisi rusak berat ini dikarenakan banyaknya pembukaan ruas jalan baru dalam beberapa tahun terakhir sehingga kecenderungan terdapat peningkatan jalan rusak dan rusak berat khususnya jalur jalan ekonomi yang mengarah ke perbukitan dan gunung-gunung.



Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Pada tahun 2020, rasio pelayanan jaringan irigasi di Kota Bima baru mencapai angka 54,80. Namun pada tahun 2023 rasio ini mengalami penurunan menjadi 22,73 karena banyak jaringan irigasi yang mengalami kerusakan karena banjir.

Tabel 2.43. Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jaringan primer (meter) | 5.578 | 6.564,46 | 11.275,76 | 5.392,13 | 20.271 |
| 2. | Jaringan Sekunder (meter) | 29.440 | 26.200,73 | 27.845,1 | 16.687,88 | 18.379 |
| 3. | Jaringan Tersier (meter) | 19.844 | 14.537,1 | 14.537,1 | 14.537,10 | 15.109 |
| 4. | Luas lahan budidaya (Ha) | 1.001,12 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 1.492,67 |
| Rasio | | 54,80 | 20,03 | 22,73 | 15,51 | 36,02 |

Sumber : Dinas PUPR dan data diolah Tahun 2025

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, yaitu fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), dan pembuangan sampah.

Tabel 2.44. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Bima Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah rumah tinggal bersanitasi | 33.196 | 37.352 | 38.052 | 38.832 | 34.305 |
| 2. | Jumlah rumah tinggal | 35.349 | 41.506 | 39.056 | 39.330 | 36.639 |
| Persentase (%) | | 93,91 | 98,23 | 97,42 | 98,73 | 93,63 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima Tahun 2025

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. Dalam bidang pelayanan air minum, penduduk Kota Bima yang memiliki akses air minum pada tahun 2021 mencapai 95,71%.



Tabel 2.45. Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2020-2024

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah penduduk yang berakses air Minum (Jiwa) | 148.159 | 149.522 | 157.189 | 160.055 | 164.403 |
| Jumlah penduduk (Jiwa) | 155.140 | 156.224 | 157.362 | 161.362 | 165.113 |
| Persentase penduduk berakses air minum (%) | 95,5 | 95,71 | 99,89 | 99,19 | 99,57 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima, 2025

Secara umum kinerja pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.46. Perkembangan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | URUSAN PEKERJAAN UMUM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|---|--------|-------|-------|-------|--------|
| 1. | panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik (%) | 70,08 | 74,39 | 74,77 | 76,53 | 80,00 |
| 2. | Rasio Jaringan Irigasi Teknis | 0,72 | 0,70 | 2,69 | 5,77 | |
| 3. | Persentase Jaringan Irigasi Teknis (%) | 70,50 | 70,04 | 81,88 | 92,78 | 98,35 |
| 4. | Rumah tangga pengguna air bersih (%) | 95,05 | 95,71 | 99,89 | 99,19 | 94,551 |
| 5. | Rumah tangga bersanitasi layak (%) | 90,25 | 89,99 | 97,43 | 93,56 | 98,67 |
| 6. | luas permukiman kumuh (%) | 13,37 | 11,66 | 7,91 | 10 | |
| 7. | luas kawasan tepian air (waterfront city) yang tertata (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 8. | konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Penerangan Jalan Umum yang berfungsi baik (%) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase (%) | 74,54 | 74,23 | 80,75 | 84,95 | |
| 11. | Luas Wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang (%) | 20 | 10,55 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas PUPR Kota Bima, 2025

Pada bidang penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikatornya yaitu dengan tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu Perda Nomor 4 Tahun



2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031, telah terealisasi.

Adapun sistem perkotaan menurut Perda Nomor 4 Tahun 2012, yaitu menyebutkan bahwa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Kota Bima; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Bima; Sub Pusat Kota berada di Mpunda dan Raba.

2.4.4.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Urusan perumahan sebagai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan setiap tingkatan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertindak sebagai pembina penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, yang melakukan pembinaan dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.



Tabel 2.47. Persentase Permukiman Kumuh dan Rumah Layak Huni di Kota Bima Tahun 2020-2024

| No. | Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | % luas permukiman kumuh | 13,37 | 11,66 | 10,10 | 10 | 7,74 |
| 2. | % Rumah Layak Huni | 93,91 | 69,17 | 70,15 | 76,43 | 76,72 |

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, 2025

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 2.48. Luas Permukiman yang Tertata di Kota Bima Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | luas area permukiman tertata (Ha) | 1.701,12 | 1.690,30 | 1709.71 | 1.735,36 | 1.168,59 |
| 2. | luas area permukiman keseluruhan (Ha) | 1.885,23 | 1.860,22 | 1.880,32 | 1.895,73 | 1.267,11 |
| 3. | Persentase Luas Permukiman yang Tertata (%) | 90,23 | 90,87 | 90,93 | 91,54 | 92,22 |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, 2024

Sementara jumlah rumah layak huni dan tidak layak huni di Kota Bima pada tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49. Jumlah Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni di Kota Bima Menurut Kecamatan Tahun 2024

| No. | Kecamatan | Jumlah Rumah | Rumah Layak Huni | Rumah Tidak Layak Huni |
|-----|---------------|--------------|------------------|------------------------|
| 1 | Rasanae Barat | 7.637 | 6.521 | 1.116 |
| 2 | Mpunda | 7.766 | 6.685 | 1.081 |
| 3 | Rasanae Timur | 4.432 | 1.618 | 2.814 |
| 4 | Raba | 9.272 | 7.806 | 1.466 |



| No. | Kecamatan | Jumlah Rumah | Rumah Layak Huni | Rumah Tidak Layak Huni |
|-----|-----------|--------------|------------------|------------------------|
| 5 | Asakota | 7.532 | 5.480 | 2.052 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

2.4.4.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu faktor syarat terlaksananya pembangunan adalah terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum. Selama kurun waktu tahun 2020–2024, konflik yang terjadi terus menunjukkan trend penurunan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.50. Kondisi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Bima Tahun 2020 - 2024

| No. | Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|--|------|------|-------|------|-------|
| 1 | Jumlah konflik SARA | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat dalam menghadapi potensi konflik | 20% | 20% | 0,27% | | |
| 3 | % Gejala Konflik yang diatasi | 30% | 30% | 33% | 53% | 3,33% |
| 4 | Persentase Cakupan wilayah potensi konflik | 20% | 20% | 24% | | |
| 5 | Persentase Pembinaan terhadap LMS dan Ormas | 50% | 50% | 50% | | |
| 6 | Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat | 45% | 45% | 50% | | |

Sumber : Badan Kesbangpol, 2025

Upaya penurunan konflik dilakukan dengan melakukan pemilihan strategi, kebijakan, dan program yang tepat dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi (mitra kerja) yang dibentuk untuk keperluan tersebut seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan



konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini. Namun demikian jika konflikpun terjadi maka akan diusahakan agar cepat diselesaikan secara optimal agar tidak berdampak luas. Untuk penanganan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota telah dilakukan secara preventif. Selama kurun waktu tahun 2018 - 2022, jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebanyak 110 kasus dan telah tertangani seluruhnya.

2.4.4.1.6. Sosial

Permasalahan sosial merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh Kota Bima saat ini dan di masa yang akan datang, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima dan masyarakat serta swasta diantaranya pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kegiatan penanganan PMKS, dan jumlah sarana sosial (seperti panti sosial, panti jompo, dan panti rehabilitasi). Adapun jumlah sarana sosial pada tahun 2023 di Kota Bima berjumlah 3 LKS. Pemerintah Kota Bima dalam melakukan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga kini terus diupayakan oleh Dinas Sosial dengan berbagai cara, salah satunya pendampingan serta pemberian pekerjaan bagi orang-orang yang bekerja di jalan agar menjadi produktif. Jenis dan jumlah masalah kesejahteraan sosial di Kota Bima pada tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.51. PMKS di Kota Bima Tahun 2020–2024

| No | PMKS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1. | Anak Balita Terlantar (jiwa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Anak Terlantar (jiwa) | 531 | 273 | 286 | 475 | 603 |
| 3. | Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Anak Nakal (jiwa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Anak Jalanan (jiwa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Korban Tindak Kekerasan (jiwa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Anak yang berhadapan dengan Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| No | PMKS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 8. | Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Penyandang Disabilitas | 450 | 715 | 807 | 884 | 1018 |
| 10. | Penyandang Disabilitas Berat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Lanjut Usia Terlantar (jiwa) | 280 | 460 | 281 | 596 | 801 |
| 12. | Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13. | Tuna Susila (jiwa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Gelandangan (jiwa) | 50 | 30 | 30 | 5 | 50 |
| 15. | Keluarga Bermasalah Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (jiwa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Korban Penyalahgunaan Napza (jiwa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Orang dengan HIV/AIDS (jiwa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kelompok Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 21. | Korban Trafficking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (jiwa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 23. | Keluarga Fakir Miskin (KK) | 19.700 | 29.460 | 34.520 | 33.131 | 91.216 |
| 24. | Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Korban Bencana Alam (KK) | 343 | 5.963 | 386 | 142 | 7.766 |
| 26. | Korban Bencana Sosial atau Pengungsi (KK) | 116 | 130 | 817 | 969 | 43 |
| Total | | 21.470 | 37.031 | 37.127 | 36.197 | 101.873 |

Sumber : Dinas Sosial Kota Bima, 2025

Dari jumlah PMKS sebagaimana ditunjukkan dalam tabel tersebut di atas, penanganan PMKS di Kota Bima pada tahun 2023 tingkat pencapaian PMKS yang ditangani mengalami peningkatan menjadi 84,24 persen atau sebesar 30.492 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari 36.197 orang PMKS yang ada di Kota Bima. Pada tahun 2024 jumlah PMKS sebesar 101.873 orang dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 74.914 orang atau sebesar 73,537 persen. Persentase penurunan PMKS yang ditangani dipengaruhi oleh adanya perubahan



data PPKS yang diakibatkan oleh faktor eksternal seperti adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang beresiko stunting dan anya perubahan inflasi daerah.

2.4.4.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.4.4.2.1. Tenaga Kerja

Sampai dengan tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bima mencapai 3,27 persen atau 2.844 orang, mengalami penurunan sebesar 0.3 persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 3.57 persen atau setara dengan 3.252 orang.

Tabel 2.52. Angka Pengangguran di Kota Bima Tahun 2020 – 2024

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | JUMLAH PENDUDUK ≥ 15 THN (JIWA) | 133.836 | 137.149 | 140.440 | 116.598 | 110.854 |
| 2 | ANGKATAN KERJA (JIWA) | 99.361 | 103.498 | 98.020 | 91.046 | 86.914 |
| | Bekerja | 94.970 | 99.811 | 94.370 | 87.794 | 84.070 |
| | Pengangguran/TPT | 4.391 | 3.687 | 3.650 | 3.252 | 2.844 |

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2024 dan Dinas Tenaga Kerja, 2025

Adapun penanganan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja mencapai 73,24%, serta kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 12 kasus. Strategi yang dilakukan dalam penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan diantaranya mendukung Pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dalam rangka mendekatkan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di LTSP, kegiatan Informasi Pasar Kerja (job fair), peningkatan kompetensi kepada calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, dan menjaga kondusifitas hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dengan meningkatkan peran Pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi/penegakan penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan di perusahaan.

Tingkat pendidikan juga dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2024, distribusi penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan Perguruan Tinggi yaitu sebanyak 88,31 persen.



Sementara distribusi penduduk bekerja yang rendah didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 2.53. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Terhadap Penduduk Usia Kerja Kota Bima Tahun 2024

| No. | Pendidikan | Bekerja | Pengangguran |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 96,79 | 3,21 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Paket B | 98,08 | 1,92 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) / Paket C | 97,13 | 2,87 |
| 4 | Sekolah Menengah Kejuruan | 91,98 | 8,02 |
| 5 | Diploma I/II/III | 100,00 | - |
| 6 | Universitas | 97,26 | 2,74 |
| Total | | 97,26 | 3,27 |

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

2.4.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Untuk melihat pemberdayaan perempuan, kita dapat melihat dua indikator makro yang dapat mengukur sejauh mana upaya pengarusutamaan gender dilakukan di Kota Bima yaitu indikator Partisipasi perempuan dalam pembangunan serta tingkat penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah maupun lembaga swasta menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2019 partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah mencapai 53,66 persen, lembaga swasta 57,90 persen dan Legislatif sebesar 16 persen, pada tahun 2024 menurun menjadi 51,12 persen pada lembaga pemerintahan, 22,60 persen pada lembaga swasta dan yang berpartisipasi di lembaga legislatif sebanyak 20 persen.

Tabel 2.54. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan di Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|---|-------|-------|-------|-------|------|
| 11.1 | Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah (%) | 53,66 | 53,66 | 55,95 | 51,12 | 6,20 |
| 11.2 | Partisipasi perempuan di Lembaga | 57,90 | 19,79 | 26,14 | 22,60 | 1,79 |



| No | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Swasta (%) | | | | | |
| 11.3 | Partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%) | 16,00 | 16,00 | 16,01 | 20,00 | 24,00 |
| 11.4 | Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan (%) | 0,72 | 0,02 | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| 11.5 | Terwujudnya Kota Bima Kota Layak Anak | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Dinas PPPA Kota Bima, 2025

Keberhasilan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pengarusutamaan gender di Kota Bima juga dapat dilihat dari dua indikator makro yaitu: Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain itu, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan serta cakupan Kota Layak Anak juga merupakan indikator pencapaian urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini di Kota Bima. IPG merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasioakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Perkembangan kedua indikator tersebut disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.55. Perkembangan IPG dan IDG Nasional, Provinsi dan Kota Bima

| No. | Indeks | Tahun | | | | | Peningkatan |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | | | | | |
| | Nasional | 91,06 | 91,27 | 91,63 | 91,85 | 91,85 | 0,79 |
| | Provinsi NTB | 90,45 | 90,53 | 91,08 | 91,39 | 91,54 | 0,68 |
| | Kota Bima | 96,41 | 96,41 | 96,95 | 96,90 | 96,88 | 0,47 |
| 2 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | | | | | |
| | Nasional | 75,57 | 76,26 | 76,59 | 76,90 | 77,62 | 2,05 |
| | Provinsi NTB | 51,96 | 52,54 | 53,47 | 53,28 | 64,44 | 12,48 |
| | Kota Bima | 69,58 | 70,16 | 69,86 | 70,76 | 77,48 | 7,9 |

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025



Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Bima tahun 2020-2024 berada di atas Provinsi NTB dan Nasional. Hal ini menunjukkan usia harapan hidup perempuan dan harapan lama sekolah perempuan yang tinggi. Indikator selanjutnya yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dimana IDG Kota Bima juga berada di atas Provinsi NTB, namun masih jauh berada di bawah IDG Nasional. IDG dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi.

Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dan cenderung terus meningkat, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 0,050 persen bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,11 persen. Sedangkan untuk indikator angka kekerasan terhadap anak mulai tahun 2020-2024 juga mengalami fluktuatif dan cenderung meningkat, namun pada tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,076 persen.

Penurunan persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan, penyusutan alokasi anggaran. Pananganan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait menunjukkan kemajuan signifikan yang mencerminkan penanganan tuntas dan berkualitas dan didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat.

Tabel 2.56. Indikator Kinerja Kunci Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No | Uraian | Sat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|-----|-------|-------|--------|--------|
| 1 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | % | 22,34 | 27,40 | 28,06 | 0,088 |
| 2 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota | % | 0,10 | 0,123 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | % | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 35,03 |

Sumber : Bappeda 2021-2024

2.4.4.2.3. Ketahanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah



maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pangan diukur melalui indikator Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi terhadap total energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. PPH menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk hidup sehat dan dikatakan ideal bila mendekati skor 100 berdasarkan kesepakatan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998 yang menggunakan bobot (rating) FAO RAPA (1989) yang terus disempurnakan menjadi Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2023.

Tabel 2.57. Perkembangan Pola Pangan Harapan Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | Ketahanan Pangan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|----------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 1. | - Skor pola pangan harapan (PPH) | 85,7 | 86,0 | 81,8 | 79,8 | 84,87 |
| 2. | - Penanganan daerah rawan pangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, 2025

Pada tahun 2024, pertanian tanaman pangan Kota Bima didominasi oleh produksi padi sawah dan jagung. Total luas panen untuk masing-masing komoditas tersebut untuk padi seluas 3.093 dan untuk jagung seluas 7.711 hektar. Sementara itu, produksi tanaman perkebunan didominasi oleh jambu mente sebesar 147,52 ton diikuti dengan kemiri sebesar 46,15 ton dan asam sebesar 33,14 ton. Selain itu, produksi buah mangga dan pisang menjadi produksi buah-buahan tertinggi di Kota Bima yaitu sebanyak 15,844 ton buah mangga dan 9,16 ton buah pisang. Keterbatasan air dan kemarau panjang menjadi tantangan tersendiri bagi petani dalam upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian Kota Bima.



Subsistem ketahanan pangan yang sangat menentukan ketersediaan pangan adalah subsistem ketersediaan pangan. Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 mensyaratkan penyediaan pangan setara energi minimal yang harus disediakan sebesar 2.200 kal/kapita/hari dan protein sebesar 57 Gr/kapita/hari, sebagai penilaian jumlah zat gizi yang diperlukan setiap individu untuk hidup sehat dan beraktifitas. Ketersediaan energi dan protein di Kota Bima tahun 2015-2019 cukup berfluktuatif, namun selalu melampaui ketersediaan minimal yang dipersyaratkan.

Selain menjamin ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi, penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dalam mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan terutama pada saat terjadi bencana, paceklik serta menjaga stabilitas harga. Cadangan pangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kuatnya ketahanan pangan suatu wilayah atau daerah. Perkembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di Kota Bima tahun 2021 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.58. Perkembangan Cadangan Pangan Kota Bima Tahun 2021-2024

| No. | Cadangan Pangan (Ton Beras) Tahun | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Ketersediaan Pangan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima | 13,5 | 11,00 | 24,360 | 21,94 |
| 2 | Cadangan Pangan Masyarakat | 21,669 | 13,128 | 10.586 | |
| 3 | Persentase Cadangan pangan | 134,00 | 64,70 | 121,80 | 168,80 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, 2025

Cadangan pangan Pemerintah Kota Bima adalah cadangan pangan milik dan dikelola oleh Pemerintah Kota Bima yang berada di Gudang Cadangan Pangan Kota Bima. Selain ketersediaan, distribusi, dan harga pangan yang stabil, keamanan pangan segar juga perlu dijamin agar masyarakat dapat memperoleh dan mengkonsumsi pangan yang aman.



2.4.4.2.4. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diukur melalui pengukuran nilai IKLH (indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas air laut) serta neraca pengelolaan sampah (persentase penanganan sampah dan persentase pengurangan sampah). Ketersediaan air di Kota Bima yang belum tercukupi dan mengingat kemarau panjang menjadi perhatian penting untuk ditindak lanjuti.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Bima selama 4 (empat) tahun mengalami peningkatan, ini mengindikasikan adanya perbaikan pengelolaan lingkungan dan menunjukkan perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kota Bima. Pengelolaan sampah tahun 2021-2024 tergolong cukup baik, meskipun belum stabil yang dipengaruhi oleh keterbatasan operasional dan fasilitas penunjang yang masih terbatas.

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota sangat fluktuatif, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan secara berkala dan konsisten, pendampingan dan edukasi terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM.

Tabel 2.59. Urusan Wajib Non Dasar Lingkungan Hidup

| No | Uraian | Sat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|--------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota | Indeks | 52,73 | 56,08 | 56,08 | 60,25 |
| 2 | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota | % | 72,06 | 72,06 | 84,48 | 74,34 |
| 3 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | % | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 |

Sumber : Bappeda, 2021-2024

Pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bima selama kurun waktu tahun 2020 -2024 terus mengalami peningkatan. Kondisi kinerja pada tahun 2021 dalam pelayanan



persampahan sebesar 54,10%, selanjutnya meningkat pada tahun 2023 angka penanganan sampah sudah mencapai 78% atau 22.969 ton dari jumlah produksi sampah sebesar 29.448 ton. Pelayanan persampahan ini di Kota Bima masih difokuskan pada kawasan perkotaan yang meliputi kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba serta sebagian Kecamatan Asakota. Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur baru sebagian Kelurahan yang sudah terlayani dengan baik penanganan persampahannya.

Tabel 2.60. Jumlah dan Produksi Sampah di Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah volume produksi sampah (M ³) | 475,83 | 461,81 | 28.570 | 29.448 | 19.749 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS, 2025

Tabel 2.61. Penanganan Sampah Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2019 - 2023

| No | Kecamatan | Tahun | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Kecamatan Rasanae Barat | 104,69 | 108,72 | 87,57 | 5.612 | 7.038 |
| 2 | Kecamatan Mpunda | 105,51 | 111,72 | 98,22 | 6.140 | 5.889 |
| 3 | Kecamatan Raba | 113,17 | 117,59 | 111,84 | 3.414 | 4.741 |
| 4 | Kecamatan Rasanae Timur | 47,82 | 49,82 | 53,81 | 7.107 | 5.928 |
| 5 | Kecamatan Asakota | 84,94 | 87,98 | 110,37 | 6.297 | 5.852 |
| Jumlah | | 416,00 | 456,13 | 475,83 | 28.570 | 29.448 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS, 2024

Jumlah timbunan sampah setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 sebesar 2.380,83 m³ naik menjadi 2.454 m³. Sementara Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Daya tampung TPS dihitung dengan satuan Ton. Dengan menggunakan konversi maka 1 ton setara dengan 3 M3. Angka Pencemaran dan Perusakan Lingkungan juga dapat



dikendalikan seiring dengan makin meningkatnya peran lembaga masyarakat yang peduli terhadap pelstarian sumber daya alam, dimana pada tahun 2022 telah terbentuk 5 POKMAS Peduli lingkungan. Dari aspek ketersediaan Ruang Hijau Publik minimal 20% juga sudah memenuhi ketentuan minimum tersebut dimana pada tahun 2017 luas RTH Publik baru mencapai 16,90% dan pada tahun 2022 telah mencapai 23,75%.

2.4.4.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil, tergambar bahwa Rasio penduduk yang telah memiliki e-KTP sampai pada tahun 2023 adalah sebesar 97,15 persen. Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Tabel 2.46. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2020 - 2024

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Penduduk keseluruhan | 152.516 | 155.519 | 156.067 | 157.851 | 165.840 |
| Jumlah Penduduk Wajib KTP | 107.565 | 110.362 | 109.573 | 112.119 | 115.789 |
| Jumlah Penduduk Pemegang e-KTP | 106.669 | 103.789 | 108.510 | 108.921 | 111.028 |
| Jumlah Penduduk Pemegang KTP Manual (non e-KTP) | - | - | - | - | - |
| Total Penduduk ber-KTP | 106.669 | 103.789 | 109.573 | 108.921 | 111.028 |
| Kepemilikan KTP (%) | 99,18% | 100 % | 100% | 97,15% | 95,89 |
| Jumlah Penduduk ber-akte lahir | 73.033 | 81.739 | 145.200 | 86.595 | 51.114 |
| Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk) | 486,33 | 525,59 | 930,37 | 548,59 | 308,21 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, 2025 (diolah)

Perekaman KTP Elektronik dan kepemilikan akta kelahiran setiap tahun mengalami peningkatan, ini mencerminkan efektivitas pelayanan adminduk untuk penduduk usia wajib KTP. Lonjakan tajam dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh terintegrasinya pelayanan penduduk dengan layanan pendidikan/kesehatan.



Pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah mengalami penurunan drastis pada tahun 2023, namun naik kembali pada tahun 2024 menjadi 51,42 persen. Tantangan utama pada pemanfaatan data kependudukan antar Perangkat Daerah yakni diperlukannya perbaikan kerja sama lintas sektor dan penguatan sistem digitalisasi.

Tabel 2.63. Urusan Wajib Non Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|-----|-------|-------|-------|--------|
| 1 | Perekaman KTP Elektronik | % | 94,04 | 94,04 | 98,13 | 99,40 |
| 2 | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | % | 30,46 | 30,46 | 60,93 | 100,00 |
| 3 | Kepemilikan akta kelahiran | % | 95,80 | 95,80 | 98,83 | 98,87 |
| 4 | Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | % | 64,70 | 64,70 | 32,35 | 51,42 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.4.4.2.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan penduduk alamiah dipengaruhi oleh dua komponen utama yaitu tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas). Fertilitas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk usia produktif, status perkawinan, dan usia pada perkawinan pertama. Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur oleh 3 (tiga) indikator kinerja kunci yang harus dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima. Yang pertama adalah cakupan peserta KB aktif, yang kedua Jumlah peserta KB aktif, dan ketiga, persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera.

Tabel 2.64. Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana Tahun 2021-2024

| No | Uraian | Sat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | TFR (Angka Kelahiran Total) | Rasio | 2,28 | 0,61 | 5,55 | 2,37 |
| 2 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | % | 52,49 | 81,37 | 66,28 | 62,91 |



| No | Uraian | Sat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|-----|------|------|------|------|
| 3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | | | | 8,73 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

2.4.4.2.7. Perhubungan

Meningkatnya jumlah penduduk Kota Bima akan disertai dengan penambahan jumlah sarana angkutan darat baik angkutan publik yaitu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta angkutan umum, dan menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa baik dalam kota maupun ke luar kota. Tantangan yang dihadapi dalam sarana dan prasarana perhubungan darat adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan angkutan publik melalui penyebaran jalur-jalur angkutan dan peningkatan serta pembangunan prasarana jalan. Kendaraan bermotor di Kota Bima mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Bima pada tahun 2023 adalah 67.171 dengan jenis kendaraan tertinggi adalah sepeda motor mencapai jumlah 58.824 sepeda motor. Jumlah angkutan umum AKAP dan AKDP di Kota Bima pada tahun 2023 sejumlah 279 kendaraan. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun lalu yaitu sejumlah 208 kendaraan. Begitu juga dengan kendaraan umum untuk trayek dalam kota dan juga trayek angkutan pedesaan.

Tabel 2.65. Jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan di Kota Bima Tahun 2021-2023

| No | Kendaraan Umum | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Alat Berat | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2 | Sedan | 205 | 211 | 213 | 214 |
| 3 | Jeep | 379 | 405 | 407 | 407 |
| 4 | Bus | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 5 | Mikrobus | 76 | 77 | 77 | 77 |
| 6 | Minibus | 3.527 | 3.648 | 3.771 | 3.789 |
| 7 | Truk | 936 | 980 | 983 | 988 |
| 8 | Mobil box | 51 | 51 | 51 | 51 |



| No | Kendaraan Umum | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 | Pick up | 1.902 | 2.049 | 2.060 | 2.068 |
| 10 | Sepeda motor | 55.989 | 58.391 | 58.824 | 59.036 |
| 11 | Kendaraan tak bermotor | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Jumlah | | 63.450 | 66.597 | 67.171 | 69.434 |

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS, 2025

Sedangkan berdasarkan trayek, Angkutan umum di Kota Bima didominasi oleh trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Antar Kota Dalam Provinsi terutama Bus Malam jurusan Bima- Mataram PP. Hal ini ditunjang oleh keberadaan terminal AKAP Dara, serta terminal type C Kumbe dan Jatibaru.

Tabel 2.66. Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Trayek di Kota Bima Tahun 2021-2024

| No | Kendaraan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Bus | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 2 | Mobil Penumpang | 137 | 140 | 143 | 143 |
| 3 | Mobil Barang | 1.063 | 1.072 | 1.080 | 1.093 |
| 4 | Kendaraan Tak Bermotor | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Jumlah total | | 1.960 | 1.972 | 1.983 | 1.996 |

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS, 2025

Adapun pelayanan pada urusan perhubungan terkait dengan penyediaan fasilitas dan prasarana perhubungan menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.67. Ketersediaan Prasarana Perhubungan di Kota Bima Tahun 2018-2024

| No | Prasarana LLAJ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|------|
| 1. | Persentase ketersediaan fasilitas dan prasarana LLAJ (%) | 64,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 90% |
| 2. | Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| 3. | Persentase angkutan umum yang lulus uji KIR (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | - |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bima, 2025



Sementara pelayanan pada urusan perhubungan laut terkait dengan ketersediaan fasilitas angkutan laut. Jumlah perahu/kapal di Kota Bima hingga tahun 2024 berjumlah 630 perahu/kapal, terdiri dari perahu tanpa motor sejumlah 28, perahu motor tempel sejumlah 359 dan kapal motor sejumlah 243. Jumlah orang yang melalui dermaga selama tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh banyaknya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi laut. Demikian juga untuk muat bongkar barang mengalami peningkatan yang cukup baik.

Tabel 2.68. Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Bima Tahun 2020-2024

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Call (Unit) | | | | | |
| | Tiba | 1.801 | 1.925 | 1.947 | 1.839 | 1.877 |
| | Berangkat | 1.511 | 1.827 | 1.829 | 1.848 | 1.879 |
| 2 | Volume Muatan Barang (m3) | | | | | |
| | Tiba | 2.519.756 | 3.137.912 | 3.237.891 | 3.228.396 | 3.657.520 |
| | Berangkat | 2.014.644 | 3.054.797 | 3.091.787 | 3.125.697 | 3.633.339 |

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS, 2025

Rasio konektivitas 2021–2024 menunjukkan peningkatan signifikan: dari 44,57 menjadi 85,00, kenaikan ini menunjukkan peningkatan akses antarwilayah, disebabkan oleh peningkatan pembangunan jalan penghubung/kelurahan dan konektivitas antar kecamatan atau antar pusat layanan.

Indikator V/C Rasio (Volume to Capacity Ratio) digunakan untuk mengukur tingkat kinerja jalan berdasarkan perbandingan antara volume kendaraan yang melintas dengan kapasitas maksimum jalan. Nilai ini mencerminkan sejauh mana jalan mampu menampung lalu lintas kendaraan dengan lancar, serta membantu mengidentifikasi potensi kemacetan dan kebutuhan peningkatan infrastruktur. Peningkatan V/C Rasio secara bertahap selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan volume kendaraan tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan, baik dari segi pelebaran, perawatan, maupun manajemen lalu lintas. Jika tidak ada intervensi kebijakan, maka nilai rasio ini berpotensi melampaui angka



0,85, yang menandai kondisi jenuh atau macet. untuk itu hal yang perlu dilakukan antara lain :

- Pelebaran dan peningkatan kualitas jalan pada ruas-ruas dengan beban lalu lintas tinggi
- Penerapan sistem manajemen lalu lintas berbasis teknologi (smart traffic management)
- Penguatan transportasi publik sebagai alternatif kendaraan pribadi
- Penataan ruang kota dan pengendalian pembangunan agar tidak membebani jaringan jalan utama.

Tabel 2.69. Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Rasio konektivitas | Indeks | 44,57 | 75,00 | 75,00 | 85,00 |
| 2 | V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota | % | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,81 |

Sumber : Bappeda, 2021-2024

2.4.4.2.8. Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Kota Bima telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui <http://bimakota.go.id/> .

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kota Bima menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai data perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, capaian kinerja, statistik, regulasi, LHKPN dan data aset. Selain itu, informasi mengenai pelayanan publik meliputi maklumat pelayanan, daftar informasi pelayanan (DIP), jenis pelayanan, standar pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan laporan permohonan dan keberatan terpublikasikan dalam website Kota Bima. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran Pemerintah Kota diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kota Bima dan meningkatkan kepercayaan publik kepada birokrasi.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 ditujukan untuk mewujudkan tata kelola



pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Tabel 2.70. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

| Indikator Kinerja | Target | | | Realisasi | | |
|---|--------|------|------|-----------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 1,91 | 2,41 | 2,66 |

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, 2025

Realisasi indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,5 dari tahun 2022 hanya sebesar 1,91 dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 0,25 menjadi 2,66 dengan predikat **Baik**. Tidak tercapainya sesuai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh masih adanya indikator-indikator yang dibutuhkan di dalam penilaian SPEB belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bima diantaranya belum adanya Rencana Induk dan Arsitektur SPBE Kota Bima.

Perkembangan konektivitas antar-perangkat daerah melalui jaringan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan tren positif, meskipun masih tergolong rendah. Capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan dukungan infrastruktur jaringan internal, meskipun cakupannya masih terbatas. Ke depan, penguatan sistem jaringan terintegrasi sangat diperlukan untuk mendukung efisiensi komunikasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah. Digitalisasi layanan publik merupakan prioritas transformasi pemerintahan, lonjakan dari tahun 2022 ke 2024 mengindikasikan adanya perluasan sistem layanan berbasis elektronik (e-service), termasuk dalam hal perizinan, administrasi kependudukan, dan pelayanan sosial. Peningkatan ini perlu terus dikawal melalui penguatan infrastruktur digital dan pelatihan SDM.

Indikator Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini mencerminkan keberhasilan komunikasi publik



pemerintah kepada masyarakat luas. Pada tahun 2021, cakupan masyarakat yang memahami kebijakan dan program prioritas mencapai 41,91%, namun turun drastis pada 2022 (3,17%) dan hanya sedikit meningkat pada 2023 (6,18%). Kenaikan signifikan terjadi di tahun 2024, mencapai 79,99%, menunjukkan keberhasilan strategi penyebaran informasi, termasuk penggunaan media sosial, forum warga, atau kanal digital lain. Ini menjadi bukti bahwa keterbukaan informasi publik dan transparansi semakin efektif dijalankan.

Tabel 2.71. Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|-----|--------|-------|-------|-------|
| 1 | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika | % | 0,00 | 2,94 | 5,88 | 22,85 |
| 2 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | 100,00 | 26,67 | 66,67 | 75,00 |
| 3 | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | % | 41,91 | 3,17 | 6,18 | 79,99 |

Sumber : Dinas Kominfotik, 2021-2024

2.4.4.2.9. Statistik

Penyelenggaraan urusan Statistik dilaksanakan melalui program penyelenggaraan statistik sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Satu Data Kota Bima. Pada tahun 2023 diperoleh capaian sebesar 85% Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 80%, maka terjadi peningkatan Persentase Satu Data Kota Bima.

Tabel 2.72. Persentase Satu Data Kota Bima

| Indikator Kinerja | Target | | | Realisasi | | |
|--------------------------------|--------|------|------|-----------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Satu Data Kota Bima | 84% | 92% | 84% | 80% | 85% | 80% |

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima, 2025



Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2021 belum ada perangkat daerah yang menggunakan data statistik sebagai dasar penyusunan perencanaan maupun evaluasi pembangunan (0%). Ini menunjukkan lemahnya budaya berbasis data serta belum terintegrasinya kebijakan *Satu Data Daerah*. Pada tahun 2022–2023 terjadi lonjakan signifikan ke 47%. Peningkatan dipengaruhi oleh adanya sosialisasi awal tentang pentingnya data statistik sektoral, dorongan kebijakan SPBE dan *Satu Data Indonesia* di daerah, dan dukungan teknis dari Bappeda/BPS terhadap OPD.

Pada tahun 2024 penggunaan data statistik meningkat lebih lanjut ke 74,28%, baik dalam perencanaan maupun evaluasi, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya data dalam pengambilan kebijakan, adanya sistem perencanaan dan pelaporan berbasis aplikasi yang mengintegrasikan data statistik (seperti SIPD, e-Planning, e-Monev), dan peningkatan kualitas dan ketersediaan data sektoral di lingkungan perangkat daerah.

Tabel 2.73. Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|-----|------|-------|-------|-------|
| 1 | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 74.28 |
| 2 | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 74.28 |

Sumber : Dinas Kominfotik, 2021-2024

2.4.4.2.10. Persandian

Capaian kinerja urusan persandian diukur dengan indikator persentase penurunan kasus informasi kebocoran daerah, dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 82%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 70%. Variabel indikator ini adalah jumlah kasus yang ditangani. Pada kasus filterisasi telah berhasil ditangani sebanyak 945 dari 1890 kasus/serangan.



Tabel 2.74. Penurunan Kasus Informasi Kebocoran Daerah

| Indikator Kinerja | Target | | | Realisasi | | |
|---|--------|------|------|-----------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Penurunan Kasus informasi kebocoran daerah | 75% | 95% | 75% | 70% | 82% | 75% |

Sumber : Dinas Kominfotik Kota Bima, 2025

Tingkat keamanan informasi pemerintah menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan standar pengamanan informasi dan infrastruktur TIK untuk mencegah kebocoran data, gangguan sistem, serta serangan siber yang berpotensi mengganggu layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2021 tingkat keamanan informasi berada di 60%, mencerminkan adanya upaya dasar dalam penerapan kebijakan pengamanan informasi, seperti firewall, pengendalian akses, serta penanganan insiden siber secara terbatas. Tahun 2022 mengalami penurunan ke 40%, yang dapat disebabkan oleh: belum optimalnya implementasi kebijakan keamanan data, keterbatasan SDM di bidang keamanan informasi, dan ketiadaan audit keamanan secara berkala atau sistem belum update.

Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 60%, mengindikasikan upaya perbaikan, baik melalui penguatan infrastruktur TIK, penyusunan SOP keamanan, atau penerapan standar seperti ISO/IEC 27001 (meskipun belum menyeluruh). Dan pada tahun 2024 naik signifikan ke 75%, yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kapasitas institusional dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintah. Ini bisa disebabkan oleh: implementasi sistem keamanan berlapis (multi-layered security), penambahan SDM dan pelatihan keamanan siber, dan kerja sama dengan BSSN atau instansi pengamanan digital lainnya.

Tabel 2.75. Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | % | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 75.00 |

Sumber : Dinas Kominfotik, 2021-2024



2.4.4.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah UMKM, pada awal tahun 2019 tercatat sebanyak 8.654 UMKM dan pada tahun 2023 telah tumbuh mencapai 23.926 UMKM. Sebaliknya, jumlah Koperasi Aktif menurun, dimana pada tahun 2019 tercatat sebanyak 197 koperasi aktif namun pada tahun 2023 tercatat 115 koperasi aktif.

Selain itu, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM juga telah didirikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk memberikan pelayanan konsultan pelatihan bisnis, pendampingan bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran dan promosi, networking dan layanan perpustakaan usaha, yang dibantu oleh 7 orang konsultan pendamping untuk mendampingi KUMKM.

Tabel 2.76. Pertumbuhan UMKM di Kota Bima Tahun 2020 – 2024

| No | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|------|
| 1. | Jumlah UMKM | 8.754 | 34.432 | 34.923 | 23.926 | |
| 2. | Jumlah Koperasi Aktif | 197 | 103 | 102 | 115 | 112 |

Sumber: Dinas Koperindag Kota Bima, 2024

Meningkatnya koperasi yang berkualitas menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, koperasi yang dikategorikan berkualitas tercatat sebesar 37,38%. Terjadi peningkatan sangat signifikan pada tahun 2022 menjadi 79,61%, menunjukkan keberhasilan program pembinaan dan penertiban koperasi aktif, baik secara kelembagaan maupun dari sisi laporan keuangan dan kepatuhan regulasi. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali ke angka 36,28%, yang kemungkinan disebabkan oleh pembaruan basis data koperasi, penghapusan koperasi tidak aktif, atau belum terpenuhinya standar koperasi sehat. Tahun 2024 kembali menunjukkan pemulihan dengan persentase koperasi berkualitas mencapai 73,87%.

Indikator ini mengukur proporsi pelaku usaha mikro yang mampu naik kelas menjadi wirausaha mandiri atau berkembang. Pada tahun 2021, persentasenya berada di angka 14,22%, mencerminkan dampak program-program pelatihan, permodalan, atau pendampingan. Namun, terjadi penurunan drastis di tahun 2022 menjadi hanya 0,02%, yang menunjukkan hampir tidak ada pelaku usaha mikro



yang berhasil melakukan transformasi. Meskipun pada tahun 2023 meningkat menjadi 8,94%, angka ini kembali menurun menjadi 5,01% pada tahun 2024.

Tren ini menunjukkan tantangan besar dalam mendorong usaha mikro naik kelas menjadi wirausaha. Penyebabnya dapat berkaitan dengan keterbatasan akses modal, rendahnya literasi keuangan dan pemasaran digital, serta belum optimalnya ekosistem pendukung UMKM. Perlu intervensi strategis yang lebih kuat seperti inkubasi usaha, kemudahan akses pasar, dan pendampingan usaha yang terintegrasi.

Tabel 2.77. Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|-----|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | % | 37,38 | 79,61 | 36,28 | 73,87 |
| 2 | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | % | 14,22 | 0,02 | 8,94 | 5,01 |

Sumber: Dinas Koperindag Kota Bima, 2024

2.4.4.2.12. Penanaman Modal

Kebijakan peningkatan investasi oleh Pemerintah Kota Bima baik dalam negeri maupun asing merupakan upaya untuk mendorong kegiatan ekonomi suatu daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas yang dihasilkan, penghematan devisa bahkan penambahan devisa. Kebijakan investasi yang ramah dan iklim usaha yang kondusif sangat mempengaruhi besar kecilnya nilai realisasi investasi suatu daerah.

Kegiatan investasi merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis karena harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun asset-aset produksi agar menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestic maupun ekspor. Krusial karena memerlukan daya visioner yang jauh kedepan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumberdaya nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas peran dan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lainnya dalam mengelola kegiatan investasi



untuk membangun Kota Bima. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ketahun.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Untuk mendukung pelaksanaan RUPMP guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan diperlukan kelembagaan yang kuat baik di Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, dan koordinasi masing masing pihak.

Nilai investasi PMDN di Kota Bima dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun demikian reformasi di bidang pelayanan perijinan juga sudah dimulai juga dengan melaksanakan survey kepuasan konsumen untuk memperoleh nilai indeks kepuasan konsumen terhadap pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman modal di Kota Bima.



Tabel 2.78. Nilai Investasi PMDN di Kota Bima Tahun 2024

| No | Uraian | 2024 |
|----|---|---|
| 1 | Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN <ul style="list-style-type: none">- Kategori Usaha Mikro- Kategori Usaha Kecil- Kategori Usaha Menengah- Kategori Usaha Besar | Rp. 19.109.900.000 Rp. 41.466.506.896 Rp. 6.201.128.990 Rp. 64.797.299.392 |
| 2 | Jumlah investor PMDN Total Investor pada DPMPTSP Kota Bima | 535 Investor |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Persyaratan- Prosedur- Waktu Pelayanan- Biaya/Tarif- Produk Layanan- Kompetensi Pelaksana- Perilaku Pelaksana- Sarana dan Prasarana- Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan | 91,68 3,46 3,46 3,48 3,86 3,34 3,53 3,46 3,36 3,76 |

Sumber: DPMPTSP Kota Bima, 2025

Peningkatan investasi di Kota Bima sepanjang periode 2021-2024 menunjukkan fluktuasi tajam, bahkan mencatat nilai negatif di dua tahun berbeda. Terjadi penurunan tajam pada 2021 kuat dipengaruhi oleh efek lanjutan dari pandemi COVID-19, ketidakpastian iklim usaha, atau minimnya proyek investasi yang terealisasi. Tahun 2022–2023: Terjadi pemulihan investasi, masing-masing tumbuh sebesar 61,39% dan 66,12%, yang dapat dikaitkan dengan pulihnya aktivitas ekonomi pasca-pandemi, promosi investasi yang mulai efektif, serta meningkatnya realisasi proyek di sektor-sektor strategis. Tahun 2024: Investasi kembali mengalami kontraksi sebesar -33,52%. Penurunan ini disebabkan oleh ketidakpastian global, perlambatan ekonomi nasional, perubahan kebijakan fiskal/insentif daerah, atau kurangnya daya tarik investasi baru di wilayah tersebut.



Tabel 2.79. Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|-----|--------|-------|-------|--------|
| 1 | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota | % | -76,28 | 61,39 | 66,12 | -33,52 |

Sumber: Dinas DPMPTSP, 2021-2024

2.4.4.2.13. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai tempat untuk mengakses informasi saat ini terus berbenah untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, serta pelestarian terbitan Indonesia sebagai khazanah kebudayaan serta menjamin pemeliharaan terbitan Indonesia.

Gambar 2.44. Perkembangan Pengunjung Perpustakaan di Kota Bima Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bima, 2025

Jumlah pengunjung perpustakaan tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 19.057 pengunjung, namun di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan sebesar 6.653 dan 6.675 pengunjung. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19, namun pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 13.694 dan 13.711 pengunjung, dan kembali mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2024 dengan jumlah pengunjung hanya sebesar 7.143 pengunjung, ini disebabkan



berkurangnya kegiatan perpustakaan yang melibatkan masyarakat intensitasnya sangat sedikit. Untuk mendukung minat baca dan peningkatan jumlah pengunjung pada perpustakaan di Kota Bima, tahun 2019 telah dibangun gedung perpustakaan Kota Bima beserta fasilitas lainnya untuk menarik minat baca pengunjung.

Tabel 2.80. Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | indeks | 68.40 | 68.40 | 49.19 | 69.03 |
| 2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | indeks | 0.00 | 0.00 | 66.32 | 69.46 |

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2021-2024

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat menggambarkan tingkat minat dan kebiasaan membaca masyarakat berdasarkan aspek ketersediaan bahan bacaan, akses terhadap sumber bacaan, dan perilaku membaca. Pada tahun 2021–2022 Nilai indeks stabil di 68,40, menunjukkan kondisi yang relatif baik. Tahun 2023 mengalami penurunan tajam ke 49,19, kemungkinan disebabkan oleh: terbatasnya akses fisik ke bahan bacaan, penurunan anggaran layanan perpustakaan, kurangnya program literasi masyarakat di tingkat lokal. Pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 69,03, melebihi capaian tahun 2021, yang mengindikasikan adanya upaya perbaikan dan peningkatan program layanan literasi publik.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menunjukkan tingkat pembangunan ekosistem literasi masyarakat, termasuk ketersediaan fasilitas layanan perpustakaan, dukungan SDM literasi, kebijakan literasi, dan pelibatan masyarakat. Tahun 2021–2022 Indeks berada pada titik 0,00, yang dapat diartikan bahwa belum ada pembangunan ekosistem literasi yang terstruktur atau belum dilakukan pengukuran. Tahun 2023 lonjakan besar ke 66,32, menunjukkan dimulainya pembangunan sistematis layanan literasi, seperti: Perluasan perpustakaan kelurahan/sekolah, Program literasi keluarga/komunitas, dan Digitalisasi layanan perpustakaan. Pada tahun 2024 peningkatan berlanjut ke 69,46, mencerminkan penguatan yang berkesinambungan dan meluasnya cakupan program literasi.



2.4.4.2.14. Kearsipan

Kearsipan merupakan suatu proses yang diawali dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Penyelamatan arsip Pemerintah Kota Bima yang tercipta di seluruh Perangkat Daerah dilakukan melalui proses akuisisi. Akuisisi arsip adalah pengumpulan arsip yang dilaksanakan melalui kegiatan penilaian, penataan dan pembuatan daftar arsip statis yang bertujuan untuk penyelamatan dan pelestarian serta pencari jejak informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang.

Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional (Mengacu pada Pasal 40 dan Pasal 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). Tahun 2021–2023 tingkat ketersediaan arsip relatif stabil dan bahkan meningkat dari 75,00% menjadi 78,00% pada 2023. Ini mencerminkan upaya positif dalam pengelolaan arsip sebagai elemen penting dalam akuntabilitas kinerja dan dokumentasi kegiatan pemerintahan. Pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis menjadi 50,31%, yang mengindikasikan adanya penurunan kualitas atau kuantitas ketersediaan arsip. Hal ini bisa disebabkan oleh: ketidakterpenuhinya standar pengelolaan arsip oleh Perangkat Daerah, minimnya pembinaan dan pengawasan kearsipan, dan kurangnya alokasi sumber daya (SDM, sarana, sistem informasi arsip elektronik).

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat pada tahun 2022–2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 32,30% (2022) menjadi 19,00% (2024). Hal ini menunjukkan melemahnya tata kelola arsip sebagai bukti sah pertanggungjawaban, yang berpotensi berdampak serius terhadap: Proses audit dan evaluasi kinerja, Penyelesaian hukum/sengketa administratif, Transparansi publik dan hak atas informasi. Penurunan disebabkan oleh Arsip yang rusak, tercecer, tidak



terdokumentasi dengan baik, belum optimalnya pemanfaatan sistem kearsipan digital, dan kelemahan dalam pengawasan dan pemusnahan arsip sesuai jadwal retensi.

Tabel 2.81. Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | % | 75.00 | 75.00 | 78.00 | 50.31 |
| 2 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | % | 144 | 32.30 | 23.00 | 19.00 |
| 3 | Nilai Audit Kearsipan | Angka | | | 34,25 | 41,98 |

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2021-2024

2.4.4.2.15. Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Bima tahun 2020-2024 dapat diukur melalui peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, dan peningkatan capaian prestasi pemuda dan olah raga.

Tabel 2.82. Prestasi dan Prasarana Olahraga Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | Urusan Kepemudaan dan Olahraga | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Capaian Prestasi Pemuda dan Olahraga | 4 | 10 | 2 | 70 | 75 |
| 2 | Jumlah Klub Olahraga | 205 | 2018 | 243 | 35 | |
| 3 | Jumlah Gedung Olahraga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima, 2025

Capaian prestasi pemuda dan olahraga Kota Bima tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan perolehan 70 medali pada pekan olahraga tingkat provinsi NTB tahun 2023 dan pada tahun 2024 perestasi pemuda dan olahraga meningkat menjadi 75 medali. Salah satu indikator kinerja



pada bidang olahraga berprestasi adalah jumlah medali atlet berprestasi di tingkat nasional dan internasional yang telah dicapai melebihi target yang ditetapkan. Target medali tidak bisa dicapai hanya pada tahun 2020 dan 2021, karena tidak adanya event olahraga akibat pandemi COVID-19.

Berbagai prestasi yang telah dicapai oleh atlet Kota Bima merupakan hasil dari pembinaan yang telah dilakukan melalui organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kota Bima. Pola pembinaan yang dilakukan melalui sistem promosi-degradasi artinya ketika atlet mengalami penurunan prestasi maka terdegradasi dan dikeluarkan dari pusat pelatihan, sedangkan atlet yang berpotensi akan masuk menggantikannya pada pusat pelatihan. Faktor lain yang tidak kalah penting dalam peningkatan prestasi olahraga adalah dukungan sarana prasarana olahraga.

Pembangunan dan perawatan sarana prasarana olahraga merupakan suatu hal yang krusial, karena akan memberikan pengaruh besar pada pencapaian prestasi olahraga. Sarana prasarana olahraga di Kota Bima memerlukan perhatian khusus, terutama setelah ditetapkannya Provinsi NTB menjadi tuan rumah PON tahun 2028 dan Kota Bima akan menjadi tempat bertandingnya beberapa cabang olahraga. Tuan rumah PON 2028, harus memiliki sarana dan prasarana olahraga sesuai standar nasional/internasional yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan/perlombaan cabang olahraga.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing adalah melalui pembangunan pemuda. Pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi. Sementara itu, pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan. Isu-isu strategis dalam pembangunan kepemudaan telah dipetakan dalam Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan, yaitu: Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan



Kewirausahaan Pemuda, Pengembangan Kepeloporan Pemuda, Penelitian dan Kajian Kepemudaan, dan Penanggulangan Perilaku Negatif Pemuda.

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengukur seberapa besar keterlibatan pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri seperti wirausaha, UMKM, maupun kegiatan ekonomi produktif lainnya. Pada tahun 2021–2022: Terjadi sedikit peningkatan (0,68% → 0,71%), namun angkanya masih sangat rendah secara keseluruhan. Tahun 2023–2024: Penurunan drastis menjadi 0,10% dan stagnan. Hal ini mengindikasikan lemahnya penguatan program kemandirian ekonomi bagi pemuda. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa pemuda belum menjadi kekuatan utama dalam sektor ekonomi mandiri. Intervensi perlu difokuskan pada pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, serta ekosistem pendukung bisnis pemula (startup).

Tahun 2021–2022: Partisipasi sedikit meningkat, tahun 2023 terjadi penurunan sangat tajam menjadi 0,26%, menunjukkan melemahnya minat atau akses terhadap organisasi pemuda dan tahun 2024 sedikit membaik menjadi 0,63%, tetapi masih jauh dari kondisi ideal. Keterlibatan pemuda dalam organisasi sosial belum optimal. Hal ini berpotensi menurunkan semangat kebersamaan, kepemimpinan, dan kontribusi sosial pemuda. Diperlukan penguatan kelembagaan kepemudaan dan peningkatan kapasitas organisasi tingkat lokal.

Tabel 2.83. Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|-----|------|------|------|------|
| 1 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | 0.68 | 0.71 | 0.10 | 0.10 |
| 2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | % | 1.48 | 1.58 | 0.26 | 0.63 |
| 3 | Peningkatan Prestasi Olahraga | % | 7 | 4 | 151 | 2 |

Sumber: Dinas Dikpora, 2021-2024



2.4.4.2.16. Kebudayaan

Amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 pasal 2 tentang kebudayaan menjadi acuan untuk pengamanan objek pemajuan kebudayaan. Hal ini dilakukan dengan cara memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus, mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya, dan memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2017-2023 oleh Pemerintah Kota Bima dalam rangka memperkenalkan nilai-nilai budaya daerah, membentuk karakter masyarakat serta nilai-nilai budaya lokal, yang pada akhirnya bermuara pada pelestarian nilai-nilai budaya. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk: (a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; (b) memperkaya keberagaman budaya; (c) memperteguh jati diri bangsa; (d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; (e) mencerdaskan kehidupan bangsa; (f) meningkatkan citra bangsa.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019-2023 oleh Pemerintah Kota Bima dalam rangka memperkenalkan nilai-nilai budaya daerah, membentuk karakter masyarakat serta nilai budaya lokal yang pada akhirnya bermuara pada pelestarian nilai budaya dan pembentukan pranata adat di masyarakat. Pranata adat adalah nilai luhur nenek moyang yang telah ada, terpatri dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bima sehingga menjadi sebuah karakter budaya. Perkembangan pembentukan pranata adat di Kota Bima tahun 2019-2023 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.84. Perkembangan Pranata Adat Yang Terbentuk di Kota Bima Tahun 2020 – 2024

| No | Pranata Adat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah lembaga Pranata Adat | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| | Jumlah | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, 2025



Terlestarikannya Cagar Budaya menunjukkan sejauh mana objek cagar budaya yang ada di wilayah Kota Bima telah dilakukan pelestarian secara resmi dan berkelanjutan melalui pendataan, perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada 2021–2022 pelestarian cagar budaya berjalan sangat lambat, hanya mencakup 6,60%, mengindikasikan bahwa program perlindungan terhadap objek cagar budaya masih terbatas pada tahap awal, terbatas pada inventarisasi dan pengakuan administratif. Tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan menjadi 73,52%, yang menunjukkan akselerasi besar dalam upaya pelestarian—kemungkinan melalui kegiatan restorasi, revitalisasi situs, atau peningkatan status perlindungan dari pemerintah. Pada tahun 2024 seluruh cagar budaya yang menjadi target pelestarian telah tercapai 100%. Ini merupakan capaian maksimal dan menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola warisan budaya secara menyeluruh.

Peningkatan pelestarian cagar budaya dari 6,60% menjadi 100% dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga dan mengelola warisan budaya lokal. Pencapaian ini perlu dijaga melalui:

- Pemeliharaan berkelanjutan terhadap situs dan benda cagar budaya,
- Pelibatan masyarakat lokal dalam pelestarian dan pemanfaatannya (seperti edukasi dan pariwisata budaya),
- Kolaborasi dengan lembaga kebudayaan dan akademisi, serta
- Integrasi pelestarian budaya ke dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Tabel 2.85. Capaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-------------------------------|-----|------|------|-------|------|
| 1 | Terlestarikannya Cagar Budaya | % | 6.60 | 6.60 | 73.52 | 100 |

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021-2024

2.4.4.2.17. Pertanahan

Urusan pertanahan adalah bagian dari urusan pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan dan pengaturan tanah, baik yang dilakukan oleh pemerintah



pusat maupun pemerintah daerah. Urusan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak kepemilikan, penggunaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat maupun institusi.

Pada tahun 2021 pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya 100 persen, yang menunjukkan kepatuhan penuh terhadap rencana tata ruang dan perizinan. Pada tahun 2022-2024 tidak adanya realisasi atas izin yang diterbitkan. Tahun 2021 penetapan tanah sudah berjalan cukup baik, dan pada tahun 2022 telah merupakan pencapaian maksimal. Pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dipengaruhi oleh kendala teknis, anggaran atau perencanaan yang tidak berjalan efektif.

Tabel 2.86. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------|------|------|-------|
| Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum | 45.45 | 100 | 7.88 | 15.21 |

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2021-2024

2.4.4.3. Urusan Pilihan

2.4.4.3.1. Kelautan dan Perikanan

Luas wilayah daratan pesisir Kota Bima yang diukur dari luas wilayah administratif (desa/kelurahan pesisir) sekitar 50,78 km² dan luas wilayah laut yang menjadi wilayah pengelolaannya sekitar 11,48 km² dengan panjang garis pantai sekitar 26 km. Ditinjau dari luas wilayahnya, baik wilayah pesisir dan laut maupun wilayah daratan yang hanya sekitar 222,25 km², Kota Bima memiliki luas wilayah yang lebih sempit dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi NTB. Meskipun demikian pada kawasan pesisir dan laut yang menjadi kewenangan Kota Bima memiliki nilai-nilai strategis dan keunggulan dari aspek sarana dan prasarana maupun keanekaragaman hayati dan non hayati. Hal ini juga didukung oleh kebijaksanaan Provinsi NTB yang menetapkan Kawasan Teluk Bima sebagai Kawasan Strategis Pariwisata dan Perikanan Provinsi NTB.



Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan ini perlu diupayakan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan adalah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang didukung program pengadaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan, revitalisasi kelompok tani nelayan, peningkatan pengetahuan kelompok tani dan nelayan serta kebijakan layanan pembinaan petani nelayan.

Tabel 2.87. Perkembangan Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | Perikanan dan Kelautan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 1. | Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan (kelompok) | 15 | 17 | 20 | 21 | - |
| 2. | Jumlah Produksi Perikanan (ton) | 2.587,57 | 3.056,69 | 793.156,1 | 3.231,19 | 3.302,48 |
| 3. | Jumlah Produk olahan yang dihasilkan (ton) | 5,575 | 6,765 | 5.935,180 | 5.276 | 6.849 |
| 4. | Tingkat konsumsi ikan perkapita pertahun (kg/kapita/tahun) | 38,46 | 42,64 | 48,79 | 46,82 | 50,55 |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, 2025

Cakupan Bina Kelompok Kelautan dan perikanan, pada tahun 2019 tercatat 15 kelompok dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 21 kelompok. Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan meliputi peningkatan kelas kelompok yaitu kelompok pemula, kelompok madya dan kelompok utama.

Jumlah produksi perikanan, pada tahun 2020 tercatat 2.587,57 ton dan mengalami peningkatan sampai tahun 2024 yaitu 3.302,48 ton. Beberapa faktor yang menyebabkan produksi budidaya meningkat antara lain bertambahnya sarana dan prasarana budidaya. Produksi Perikanan Budidaya di Kota Bima cenderung stabil atau menunjukkan tren yang positif di mana pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima terkait dengan bantuan bibit ikan unggul bagi kelompok budidaya baik tawar, laut maupun payau, bantuan



sarana dan prasarana budidaya serta semakin tingginya kesadaran dari kelompok pembudidaya ikan untuk terus mengembangkan usahanya.

Jumlah produk olahan yang dihasilkan semakin meningkat sampai tahun 2020 sebesar 5.575 ton namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 6.849 ton. Pengembangan produk hasil perikanan yang bernilai tambah merupakan suatu hal yang harus terus dilakukan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa pergeseran yang terjadi di masyarakat antara lain adanya perubahan gaya hidup, perubahan pola konsumsi, banyaknya wanita/ibu rumah tangga yang bekerja, konsumen yang lebih menyukai produk yang lebih praktis, daya simpan produk olahan lebih lama dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

2.4.4.3.2. Pariwisata

Sektor pariwisata Kota Bima memiliki potensi yang besar sebagai daerah transit wisata dengan banyaknya destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia yang ada di Kabupaten Bima maupun di Kabupaten Dompu seperti Pantai Lariti, Pantai Pink, Pulau Ular, Gunung Sangiang Api, Pantai Lakey, Gunung Tambora maupun kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial. Pembangunan pariwisata memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Keberhasilan kinerja pembangunan pariwisata ini ditunjukkan dengan Peningkatan Kunjungan Wisatawan baik mancanegara dan nusantara seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88. Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2020-2024

| Indikator | Tahun | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kunjungan Wisatawan | 71.416 | 71.275 | 35.485 | 33.545 | 38.962 |
| - Mancanegara | 2.251 | 1.123 | 451 | 473 | 1.345 |
| - Nusantara | 72.165 | 70.152 | 35.035 | 33.072 | 37.617 |

Sumber: BPS, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, 2025



Pertumbuhan wisatawan mancanegara melonjak tajam pada 2023 (190,72%), kemungkinan karena pemulihan pascapandemi, promosi pariwisata internasional, atau pembukaan kembali akses transportasi internasional. Pada tahun 2024 terjadi penurunan pertumbuhan ke 138,47%, namun tetap menunjukkan pertumbuhan yang tinggi secara tahunan. Capaian ini mencerminkan meningkatnya daya tarik dan konektivitas destinasi wisata terhadap pasar mancanegara, meskipun perlu perhatian untuk menjaga tren ini tetap berkelanjutan.

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2023, namun melambat di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa wisatawan domestik lebih sensitif terhadap isu ekonomi dan infrastruktur. Diperlukan inovasi produk wisata dan perbaikan aksesibilitas agar perjalanan wisatawan Nusantara terus meningkat secara stabil. Tingkat hunian akomodasi menunjukkan tren positif dan stabil, meningkat setiap tahunnya. Ini mencerminkan pertumbuhan aktivitas wisata, pemanfaatan optimal hotel dan penginapan, dan potensi meningkatnya lama tinggal wisatawan. Namun, angka hunian masih di bawah rata-rata nasional (sekitar 45–60%). Diperlukan peningkatan kualitas layanan dan promosi akomodasi lokal untuk mendorong okupansi.

Setelah capaian tinggi pada 2022, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menurun drastis di 2023 dan hanya sedikit meningkat di 2024. Penurunan tajam ini dapat disebabkan oleh kinerja sektor lain yang mendominasi (pertanian), dan belum maksimalnya monetisasi aktivitas wisata (transaksi wisata belum tercatat optimal). Perlu Upaya peningkatan pencatatan dan pelaporan aktivitas ekonomi wisata untuk mempresentasikan kontribusi yang lebih akurat terhadap PDRB. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dan menurun di 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi ekonomi dari sektor pariwisata belum tergali secara maksimal. Beberapa penyebab retribusi wisata belum optimal, Kurangnya pengelolaan destinasi oleh pemerintah daerah, pendapatan dari sektor informal belum tercatat sebagai PAD.

Sektor pariwisata Kabupaten/Kota mengalami tren pemulihan dan pertumbuhan yang positif dalam jumlah kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Namun, pertumbuhan ini belum sepenuhnya tercermin dalam



kontribusi terhadap PDRB dan PAD. Artinya, aktivitas pariwisata belum dikelola secara maksimal sebagai pendorong ekonomi daerah.

Tabel 2.89. Capaian Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SATUAN | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|--------|-------|--------|--------|
| 1 | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan | % | 4,31 | 190,72 | 138,47 |
| 2 | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota | % | 1,12 | 14,32 | 5,42 |
| 3 | Tingkat hunian akomodasi | % | 9,94 | 14,94 | 15,40 |
| 4 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku | % | 14,38 | 3,06 | 3,72 |
| 5 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | % | 1,22 | 1,255 | 0,58 |

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2022-2024

2.4.4.3.3. Pertanian

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkan kemajuan Kota Bima. Sektor pertanian Kota Bima terdiri atas tiga sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Komoditi strategis tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai yang memiliki peranan pokok dalam memenuhi kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri setiap tahunnya, yang cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan. Sehingga dari sisi ketahanan pangan nasional fungsinya menjadi sangat penting dan strategis.

Pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk menjadi agenda utama kebijakan pangan bagi pemerintah suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan dan menjadi fokus dalam pembangunan pertanian. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Oleh karena itu, pencapaian produksi pertanian yang



terus diikuti dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah dalam rangka peningkatan produksi pertanian.

Pada tahun 2024, Pertanian tanaman pangan Kota Bima didominasi oleh produksi padi sawah dan jagung. Total luas panen untuk masing-masing komoditas tersebut yaitu 2.286 dan 8.044 hektar. Sementara itu, produksi tanaman perkebunan didominasi oleh jambu mente sebesar 148,00 ton diikuti dengan tembakau sebesar 70,00 ton dan kelapa sebesar 17,00 ton. Selain itu, produksi buah mangga dan pisang menjadi produksi buah-buahan tertinggi di Kota Bima yaitu 14,96 dan 10,61 ton. Keterbatasan air dan kemarau panjang menjadi tantangan tersendiri bagi petani dalam upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian Kota Bima. Pada sektor peternakan, Kota Bima dikenal dengan produksi sapi, kambing, dan kerbau. Selama tahun 2024, produksi daging ternak sapi potong, kambing, dan kerbau masing-masing yaitu 423,78 ton, 122,96 ton, dan 7,04 ton. Pengembangan infrastruktur peternakan, termasuk fasilitas kesehatan hewan dan akses pasar yang memadai, menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dan produksi hewan ternak yang berkualitas.

Jumlah produksi pertanian tanaman pangan pada tahun 2020 adalah 76.693 ton dan mengalami penurunan menjadi 72.922 ton pada tahun 2023, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 79.024. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi. Berikut ini digambarkan perkembangan produksi sebagai berikut:

Tabel 2.90. Perkembangan Produksi Pertanian di Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | Pertanian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1. | Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan (ton) | 76.693 | 68.486 | 80.152 | 72.922 | 79.024 |
| | - Padi (GKG) | 28.427 | 25.301 | 20.403 | 20.312 | 20.326 |
| | - Jagung | 48.070 | 43.044 | 59.617 | 52.503 | 58.593 |
| | - Kedelai | 196 | 141 | 132 | 107 | 105 |
| | -Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Produksi perkebunan (ton) | | | | | |
| | 1) Tembakau | 1)10,00 | 1)2,13 | 1)2,05 | 1) 17,82 | 1) 70,00 |
| | 2) Jambu mente | 2)147,17 | 2)147,17 | 2)114,87 | 2) 147,52 | 2) 148,00 |



| No | Pertanian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|----------|---------|---------|----------|----------|
| | 3) Kelapa | 3)162,65 | 3)19,52 | 3)14,38 | 3) 17,06 | 3) 17,00 |
| 3. | Pengkartuan Ternak (ekor) | 18,057 | 11.302 | 9.495 | 12.326 | 8.821 |
| 4. | Vaksinasi Ternak | 18,959 | 12.319 | 9.493 | 12.519 | 8.821 |
| 5. | Penurunan Angka Kematian Pedet | 20% | 20% | 20% | 18% | 18% |
| 6. | Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular | 87% | 83% | 81% | 84% | 57% |

Sumber: Dinas Pertanian Kota Bima, 2025

Terjadi penurunan produktivitas pada tahun 2022 menjadi 5,85 ton/ha/tahun. Penurunan ini yang dipengaruhi oleh Faktor cuaca ekstrem (banjir/kekeringan), Gangguan hama dan penyakit tanaman, dan penurunan kualitas benih atau input pertanian lainnya. Tahun 2023–2024 menunjukkan tren peningkatan, bahkan melebihi capaian tahun 2021, yang menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan lahan, teknologi budidaya, dan akses petani terhadap sarana produksi. Kinerja ini mengindikasikan keberhasilan intervensi program seperti penyuluhan pertanian, subsidi benih, dan pengembangan irigasi.

Tahun 2021 mencatat penurunan kasus yang signifikan (63,50%), mencerminkan efektifnya vaksinasi, biosekuriti, dan kontrol lalu lintas ternak. Namun, pada 2023 dan 2024, terjadi peningkatan jumlah kasus (ditandai dengan nilai negatif), yaitu -11,11% dan -57,34%, yang mengindikasikan kebangkitan atau penyebaran kembali penyakit hewan menular. Hal ini disebabkan oleh masuknya penyakit baru seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), melemahnya pengawasan dan pengendalian pasca pandemi, dan Mobilitas hewan ternak yang tinggi tanpa kontrol ketat.

Tabel 2.91. Capaian Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 1 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Rata-rata Ton Per Hektar Per Tahun | 6,45 | 5,85 | 6,68 | 6,77 |
| 2 | Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | % | 63,50 | 20,59 | -11,11 | -57,34 |

Sumber: Dinas Pertanian Kota Bima, 2022-2025



2.4.4.3.4. Perdagangan

Pada tahun 2024, jumlah sarana perdagangan di Kota Bima sebanyak 1.612 unit tersebar di 5 kecamatan. Jumlah pasar sebanyak 9 unit, toko 846 unit, kios 534 unit dan warung sebanyak 223 unit. Salah satu sarana perdagangan yang ada di Kota Bima adalah Pasar. Pasar merupakan salah satu tempat kegiatan perekonomian masyarakat yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan dari suatu wilayah. Jumlah Pasar yang terdapat di Kota Bima pada tahun 2024 sebanyak 9 pasar dengan jumlah pedagang 985 orang.

Pasar yang mempunyai jumlah toko terbanyak adalah Pasar Raya Amahami. Pasar ini merupakan pasar terbesar di Kota Bima dengan jumlah toko 209 unit dan jumlah pedagang 203 orang. Sementara itu, terdapat pasar yang masih perlu pengembangan dan perhatian Pemerintah Daerah antara lain Pasar Jatibaru, Pasar Penaraga, Pasar Raba, Pasar Kumbe, Pasar Ex Terminal, Pasar Lama Bima dan Pasar Raya Bima. Dan bahkan ada pasar yang memang sudah jarang ditemukan aktivitas jual beli di dalamnya yakni Pasar Ikan Kolo. Di pasar tersebut selama tahun 2024 sudah tidak ada lagi toko dalam unit pasar dan pedagang di dalamnya.

Oleh karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Daerah dapat mengaktifkan kembali sarana pasar yang sudah mulai sepi agar dapat menopang perekonomian di wilayah tersebut. Berbagai upaya juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima dalam rangka menjaga kestabilan harga, antara lain melalui pasar murah berupa paket sembako kepada masyarakat miskin yang terdampak kenaikan harga.

Tabel 2.92. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Bima Tahun 2020-2024

| Jenis Sarana Perdagangan | Tahun | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pasar/Market | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Toko/Store | 572 | 615 | 642 | 731 | 846 |
| Kios | 243 | 272 | 295 | 447 | 534 |
| Warung | 112 | 147 | 172 | 215 | 223 |
| Jumlah | 948 | 1.055 | 1.149 | 1.402 | 1.612 |

Sumber: BPS Kota Bima & Dinas Koperindag Kota Bima, 2025



Pada tahun 2021, pencapaian sangat tinggi (88,28%) menunjukkan efektivitas pelayanan perizinan usaha saat itu. Namun, terjadi penurunan tajam di tahun 2022–2023, diduga karena perubahan kebijakan sistem OSS (Online Single Submission), adaptasi pelaku usaha terhadap regulasi baru, kurangnya sosialisasi atau pendampingan teknis dalam pengurusan perizinan. Pada tahun 2024, capaian meningkat kembali menjadi 82,85%, mencerminkan perbaikan sistem, pelayanan, dan kesadaran pelaku usaha untuk taat regulasi. Pemulihan capaian ini penting dalam mendorong iklim usaha yang tertib, legal, dan kondusif.

Kinerja realisasi pupuk fluktuatif dan sempit sangat rendah pada 2023 (1,16%). Penurunan drastis di 2023 dapat disebabkan oleh: keterlambatan distribusi, Ketidaksihinggaan alokasi dan kebutuhan lapangan, dan Masalah validasi data e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Pada 2024 terjadi lonjakan capaian hingga 94,78%, menunjukkan adanya pembenahan dalam tata kelola distribusi pupuk bersubsidi, validasi petani penerima, dan penguatan sistem monitoring. Perlu dokumentasi terhadap praktik baik 2024 agar bisa direplikasi di tahun-tahun berikutnya.

Pada tiga tahun pertama (2021–2023), capaian sangat rendah (<1%), menandakan lemahnya pelaksanaan kegiatan tera/tera ulang oleh unit metrologi legal. Lonjakan besar pada 2024 (99,82%) merupakan capaian luar biasa yang bisa menandakan aktifnya kembali UPT Metrologi, adanya kegiatan pengawasan dan penertiban UTTP secara massif, serta dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah untuk alat tera atau rekrutmen petugas. Hal ini sangat penting karena tera sah menjamin keadilan dalam transaksi perdagangan, serta mendukung perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

Tabel 2.93. Capaian Urusan Pilihan Perdagangan Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|-----|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan | % | 88.28 | 55.09 | 51.71 | 82.85 |
| 2 | Persentase kinerja realisasi pupuk | % | 5.22 | 44.57 | 1.16 | 94.78 |



| | | | | | | |
|---|---|---|------|------|------|-------|
| 3 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | % | 0.22 | 0.03 | 0.23 | 99.82 |
|---|---|---|------|------|------|-------|

Sumber: Dinas Koperindag Kota Bima, 2022-2025

2.4.4.3.5. Perindustrian

Sektor industri masih memiliki peran strategis dalam perekonomian Kota Bima. Hal ini terlihat dari kemajuan ekonomi kerakyatan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal dan mampu menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bima terus berupaya meningkatkan daya saing produk industri dengan menumbuhkan Industri Kecil Mengah (IKM), bimbingan teknis desain produksi, dan memfasilitasi berbagai kebutuhan para pelaku industri.

Tujuan pokok pembangunan industri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya sekedar pencapaian pembangunan yang tinggi melainkan untuk menciptakan suatu kegiatan yang mandiri. Bertambahnya jumlah industri, akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kapasitas produksi disuatu daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertambahan jumlah industri yang ada dapat memperluas penyerapan tenaga kerja dalam sektor perekonomian. Untuk itu dengan tumbuhnya IKM sudah tentu akan dapat mendukung perekonomian daerah.

Tabel 2.94. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut Klasifikasi Industri di Kota Bima Tahun 2024

| Klasifikasi Industri | Jumlah Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja | Nilai Produksi (Rp) |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Industri makanan dan minuman | 3 | 87 | 18.423.400.000 |
| Industri pengolahan tembakau | - | - | - |
| Industri pakaian jadi dan tenun | 5 | 426 | 7.695.100.000 |
| Industri pengolahan kayu dan rotan | - | - | - |
| Industri moulding kayu, kerajinan anyaman bambu dan rotan, dan ukiran kayu | - | - | - |



| Klasifikasi Industri | Jumlah Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja | Nilai Produksi (Rp) |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Industri barang-barang dari tanah | - | - | - |
| Industri kapur, semen, dan barang-barang dari kapur dan semen | 1 | 20 | 2.160.000.000 |
| Industri pengolahan batu apung | - | - | - |
| Industri pengolahan lainnya | - | - | - |

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS, 2025

Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan pertumbuhan positif, dengan kenaikan jumlah IKM masing-masing sebesar 23,50% dan 30,79%. Ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat berwirausaha, keberhasilan program pelatihan dan pemberdayaan IKM, serta dukungan regulasi dan akses pembiayaan mikro. Namun, 2023 mengalami penurunan tajam (-80,40%), yang menunjukkan bahwa jumlah IKM menyusut secara drastis, yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku dan logistik, rendahnya permintaan pasar atau lemahnya daya saing produk local. Tahun 2024 masih mengalami kontraksi meskipun membaik (-10,24%), yang mengindikasikan belum pulih sepenuhnya. Penurunan ini menandakan perlunya program intervensi yang lebih kuat untuk mendorong lahirnya wirausaha baru dan menjaga keberlangsungan IKM yang ada.

Capaian tertinggi di 2022 (75%) didorong oleh digitalisasi data IKM dan adanya sistem informasi terintegrasi. Namun terjadi penurunan drastis pada 2023 menjadi 25%, yang disebabkan oleh Kurangnya pembaruan data lapangan, Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, dan Minimnya alokasi anggaran untuk pembaruan sistem informasi industri. Di tahun 2024, capaian meningkat kembali menjadi 60%, yang mencerminkan pemulihan pengelolaan data dan informasi industri, meskipun belum stabil sepenuhnya. Ketersediaan data yang akurat dan terkini sangat penting sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pemberian stimulus bagi sektor industri.



Tabel 2.95. Capaian Urusan Pilihan Perdagangan Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|-----|-------|-------|--------|--------|
| 1 | Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota | % | 23,50 | 30,79 | -80,40 | -10,24 |
| 2 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | % | 45,00 | 75,00 | 25,00 | 60,00 |

Sumber : Dinas Koperindag, 2022-2025

2.4.4.4. Unsur Pendukung Pemerintahan

Unsur pendukung merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan Penghubung Daerah. Selama kurun waktu sampai dengan tahun 2024, beberapa capaian kinerja dari unsur pendukung pemerintahan antara lain pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2024 Target nilai SAKIP kategori B (68,48), dengan realisasi nilai sebesar 67,10 sehingga capaian pada tahun 2024 sebesar 98,04 persen.

Tabel 2.96. Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Bima Tahun 2020-2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 5 Tahun Terakhir | | | | |
|--|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan daerah | Nilai SAKIP | Huruf& Angka | B (68,48) | B (68,69) | B (68,17) | B (67,42) | B (67,10) |

Sumber: LKIP Setda Kota Bima 2024, 2025

Indeks Reformasi Birokrasi dapat memperlihatkan kinerja pemerintah dalam mengupayakan terlaksana tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Indeks Reformasi Birokrasi adalah indikator yang merupakan aspek daya saing daerah menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar



132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.97. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima Tahun 2022-2024

| Indikator | Satuan | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|----------------------------|--------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Reformasi Birokrasi | % | 50,18 | 54,04 | 107,59 | 55,64 | 58,33 | 105,98 | 60,18 | 72,3 | 120,14 |

Sumber: LPPD Kota Bima 2024, 2025

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bima pada tahun 2022 adalah 55,18 dengan kategori cukup (CC). Nilai ini sesuai dengan hasil rilis Laporan Hasil Evaluasi dari Kementerian RB Tahun 2022 dan tahun 2022 mencapai CC sesuai target. Pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari target 55,64 dengan realisasi sebesar 58,33. Pada Tahun 2024 terus mengalami peningkatan dengan nilai 72,3 persen dari target sebesar 60,18 persen. Ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, bersih dari KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, reformasi birokrasi adalah instrumen untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat, yang dimaknai bukan sekedar persoalan administrasi belaka, tetapi harus membawa dampak pada tingkat kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.

Berdasarkan data diatas, bahwa sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bima telah berada dalam kondisi yang baik, meskipun masih perlu peningkatan kualitas sistem yang didukung oleh modifikasi atau inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi secara online. Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen kepala daerah dan perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah, sedangkan hambatan dalam pencapaian kinerja berupa masih lemah aspek koordinasi dalam penggunaan aplikasi pada setiap pelayanan sehingga menghambat akuntabilitas kinerja lingkup Pemerintah Kota Bima secara transparan. Solusi untuk meningkatkan akuntabilitas



kinerja lingkup Pemerintah Kota Bima adalah melalui pembangunan berbasis teknologi informasi, baik perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Selama kurun waktu 2020 - 2024, Bagian Hukum Setda Kota Bima telah menghasilkan produk hukum sebagai indikator kinerja yang dapat diukur, yakni pada tahun 2020 jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebanyak 959 produk hukum, mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 775 produk hukum.

Tabel 2.98. Jumlah Produk Hukum Yang Dihasilkan Tahun 2020-2024

| No. | Produk Hukum | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Peraturan Daerah | Perda | 11 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 2 | Peraturan Walikota | Perkada | 85 | 105 | 63 | 68 | 70 |
| 3 | Keputusan Walikota | Keputusan Walikota | 863 | 508 | 566 | 685 | 695 |
| Jumlah | | | 959 | 619 | 637 | 761 | 775 |

Sumber : LKIP Setda Kota Bima Tahun 2024, 2025

Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama mencerminkan ketepatan waktu perencanaan dan pelaksanaan kontrak proyek konstruksi, terutama yang bersifat multiyears (tahun jamak). Pada tahun 2021–2022, hanya sebagian kecil proyek konstruksi lintas tahun yang ditandatangani di kuartal I (1,02% dan 2,30%). Tidak ada proyek konstruksi multiyears yang ditandatangani pada kuartal I pada tahun 2023 dan 2024, Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan pengadaan dini, keterlambatan dalam proses lelang atau finalisasi dokumen perencanaan proyek.

Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif terjadi penurunan tajam dalam proporsi pengadaan yang dilakukan secara kompetitif dari 14,73% (2022) ke hanya 5,52% (2024). Metode kompetitif (tender umum/seleksi terbuka) menandakan keterbukaan akses penyedia barang/jasa, persaingan sehat, dan efisiensi harga serta kualitas barang/jasa.

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan menunjukkan proporsi anggaran belanja yang direalisasikan melalui proses pengadaan barang/jasa. Tahun 2024 mencapai 100,03%, yang tampak tidak wajar dan kemungkinan merupakan



kesalahan input atau terjadi karena pengadaan barang/jasa dilakukan untuk pembelanjaan melebihi target. Tahun 2022 menunjukkan penurunan tajam (26,03%), mengindikasikan rendahnya serapan anggaran belanja melalui mekanisme formal pengadaan.

Tabel 2.99. Capaian Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Pengadaan Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|-----|-------|-------|-------|--------|
| 1 | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama | % | 1,02 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif | % | 11,93 | 14,73 | 8,50 | 5,52 |
| 3 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | % | 47,67 | 26,03 | 55,01 | 100,03 |

Sumber : Setda, 2022-2025

2.4.4.5. Unsur Penunjang Pemerintahan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah fungsi penunjang merupakan urusan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi: unsur pendukung pemerintahan, perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan pelatihan, serta Pemerintahan Umum. Urusan pemerintah fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima diuraikan sebagai berikut.

2.4.4.5.1. Urusan Perencanaan dan Keuangan

Urusan pemerintah fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan diselenggarakan oleh BAPPEDA Kota Bima. Hal ini sesuai amanat Peraturan Walikota Bima Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bima. Capaian kinerja BAPPEDA Kota Bima dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 diukur dengan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi di tingkat Nasional.



Tabel 2.100. Capaian Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Tahun 2022-2024

| Indikator | Satuan | Target | | | Realisasi | | |
|--|--------|--------|------|------|-----------|--------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Kualitas Perencanaan pembangunan daerah | % | 78,97 | 90 | 98,5 | 98,36 | 96,859 | 102,307 |

Sumber : LKIP Bappeda Kota Bima 2022-2024, 2025

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, selaras dan konsisten secara substantif antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas juga dimaknai sebagai perumusan program pembangunan harus benar-benar terukur dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian visi misi daerah maupun tujuan dan sasaran seluruh perangkat daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah juga dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Capaian kinerja meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,501 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 98,36 persen dengan target 78,97 persen, dan pada tahun 2024 capaian indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah sebesar 103,86 persen. Keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Kota Bima menjadi informasi yang dapat diakses melalui website: <https://bappeda.bimakota.go.id/>.

Urusan Pemerintah fungsi penunjang bidang keuangan diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima. Adapun capaian dari penyelenggaraan urusan pada BPKAD Kota Bima dapat diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan Indikator Sasaran RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima melaksanakan urusan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi mencapai indikator kinerja tersebut yang mempertahankan Opini WTP dari BPK RI. Salah satu wujud tata kelola organisasi yang dilakukan oleh BPKAD Kota Bima adalah menyajikan laporan



keuangan Pemerintah Daerah dengan akuntabel dan transparan guna mempertahankan Opini WTP dari BPK RI.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Opini Audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, walaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembalikan keputusan. Di dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah memenuhi kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
- c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Kota Bima telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun 2023. Prestasi tersebut adalah yang ke-9 secara berturut-turut dari tahun 2014-2023. Opini WTP ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Bima telah melakukan best practice dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian target RPJMD sampai tahun 2023 telah tercapai 100%. Faktor yang mendukung capaian hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bima adalah sebagai berikut:

- 1) Komitmen yang sangat tinggi kepala daerah dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik;
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan LKPD bekerja sama dengan BPKP perwakilan NTB;
- 3) Pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi SIPD.

Salah satu sasaran dalam RPJMD 2018-2023 yaitu meningkatnya kemandirian keuangan daerah, diukur dengan Indikator Kinerja Utama Rasio



Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Bima memperoleh PAD sebesar Rp. 51.354.520.245,70 atau 82,25% dari target sebesar Rp.62.434.155.760,00 Berdasarkan PAD tersebut, maka capaian kinerja Pemerintah Kota Bima untuk indikator kinerja sasaran Rasio PAD terhadap APBD yaitu sebesar 135,05%. Hasil perolehan tersebut mencerminkan kinerja Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan PAD dalam kondisi sangat baik.

Tabel 2.101. PAD Pemerintah Kota Bima Tahun 2020-2024

| Tahun | PAD |
|-------|-------------------|
| 2020 | 47.279.817.936,69 |
| 2021 | 46.993.516.746,67 |
| 2022 | 57.359.469.008,22 |
| 2023 | 51.354.520.245,70 |
| 2024 | 57.053.592.781,82 |

Sumber : BPKAD Kota Bima, 2025

Dilihat dari sumber Pendapatan Asli Daerah, sumber dari sektor pajak masih menjadi sumber PAD yang memberikan kontribusi yang besar. Faktor lain yang mendukung pencapaian kinerja karena adanya peningkatan komitmen petugas dalam mengamankan kebocoran penerimaan PAD, sedangkan hambatan dalam pencapaian kinerja berupa masih lemah sistem dan sarana prasarana pelayanan sehingga menghambat transparansi penerimaan. Solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada penerimaan PAD lingkup Pemerintah Kota Bima melalui identifikasi potensi sumber PAD pada sektor-sektor potensial dan penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan PAD.

Rasio PAD terus menurun sejak 2021, menunjukkan meningkatnya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Ini menandakan kurangnya optimalisasi potensi pendapatan lokal, ketidakstabilan sektor-sektor penyumbang PAD (retribusi, pajak daerah, dan BLUD). Perlu strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD secara inovatif dan berkelanjutan. Konsistensi di angka 100%



kecuali 2022 pada rasio belanja urusan pemerintahan umum, tahun 2022 mengalami penurunan, dikarenakan belanja lebih difokuskan ke urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar).

Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD 2021 dan 2022 sangat positif, menandakan realisasi PAD hampir sesuai atau melebihi target. Namun, pada 2023 dan 2024 anjlok drastis realisasi PAD hanya 7,48% dan 0,54% dari target - sangat rendah yang dipengaruhi oleh target terlalu tinggi dan tidak realistis, Sumber PAD tidak dipungut optimal (termasuk retribusi atau pendapatan BLUD). Ini sinyal penting untuk mengevaluasi kembali target PAD, potensi pendapatan riil, serta sistem monitoringnya.

Tabel 2.102. Capaian Urusan Penunjang Keuangan Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|--------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | % | 31,34 | 42,73 | 4,59 | 4,59 |
| 2 | Rasio PAD | % | 14,25 | 8,60 | 7,69 | 7,69 |
| 3 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) | % | 100 | 80,24 | 100 | 100 |
| 4 | Opini Laporan Keuangan | Indeks | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 5 | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | % | 92,67 | 93,94 | 93,57 | 3,75 |
| 6 | Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD | % | 96,00 | 102,50 | 7,48 | 0,54 |
| 7 | Assets Management | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya | % | 11,00 | 2,91 | 0,10 | 0,10 |
| 9 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service) | % | 80,25 | 97,83 | 98,92 | 98,92 |
| 10 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPKAD, 2022-2025



2.4.4.5.2. Urusan Kepegawaian

Urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima. Upaya yang dilakukan oleh BPKSDM adalah melalui Program:

- a. Program Kepegawaian Daerah;
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Salah satu kewajiban bagi ASN yang termasuk dalam kelompok Wajib LHKPN adalah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran. Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Selama kurun waktu tahun 2019 – 2023, perkembangan penyampaian LHKPN oleh ASN Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bima menunjukkan progres yang menggembirakan.

Konsistensi BKPSDM Kota Bima dalam melakukan pemetaan kompetensi dan pemetaan komposisi ASN berdasarkan kualifikasi jabatan yang diembannya terus didorong untuk peningkatkan / pengembangan manajemen kepegawaian yang lebih baik dan profesional. BKPSDM Kota Bima selaku Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan khususnya di bidang kepegawaian terus mengembangkan inovasi-inovasi seperti penyampaian informasi melalui website <https://bkpsdm.bimakota.go.id> yang dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, dimana pun. Pemutakhiran data melalui aplikasi E-Kinerja BKN, dimana sistem ini merupakan sistem aplikasi yang memudahkan user operator bahkan ASN itu sendiri. untuk secara mandiri memanfaatkan, mengolah dan *up date* data kepegawaian sehingga mampu terdokumentasi dengan baik dalam rangka pembinaan, penempatan dan pengembangan karier ASN.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bima hingga tahun 2024 sejumlah 4.291 orang. Terdiri dari 1.726 laki-laki dan 2.565 perempuan, dengan rincian sebagai berikut .



Tabel 2.103. Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2024

| No | Tingkat Pendidikan | 2024 | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Sampai dengan Sekolah Dasar (SD) | 18 | - | 18 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sederajat | 17 | - | 17 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sederajat | 230 | 129 | 359 |
| 4 | Diploma I, II / Akta I, II | 18 | 25 | 43 |
| 5 | Diploma III, IV / Akta III / Sarjana Muda | 110 | 391 | 501 |
| 6 | Tingkat Sarjana / Doktor / Ph.D | 1.333 | 2020 | 3.353 |
| Jumlah/Total | | 1.726 | 2.565 | 4.291 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka BPS, 2025

Adapun terkait dengan profesionalisme ASN Kota Bima yang mencakup kualifikasi pendidikan, tingkat kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya pada tahun 2024 dengan target 75% yang terealisasi sebesar 78,41% dengan capaian sebesar 104,55 persen.

Tabel 2.104. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

| Indikator | Target | | | Realisasi | | |
|----------------------------|--------|------|------|-----------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Profesionalisme ASN | 50% | 70% | 75% | 45% | 50,55% | 78,41% |

Sumber : LKIP BKPSDM Kota Bima 2022-2024, 2025

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2021, rasio pegawai dengan latar belakang pendidikan tinggi (dibandingkan dengan menengah/dasar) berada di angka 83,28%. Rasio ini sempat menurun menjadi 77,80% pada 2022, dan kemudian kembali meningkat menjadi 81,67% pada 2024. Secara umum, proporsi pegawai berpendidikan tinggi tetap dominan, yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang relatif baik.



Rasio pegawai Fungsional mengalami Tren kenaikan yang signifikan terlihat dalam rasio pegawai fungsional, dari 15,29% pada 2021 menjadi 24,63% di 2023, stabil di 24,58% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi jabatan struktural ke fungsional, sebagaimana amanat reformasi birokrasi. Ini mengindikasikan bahwa semakin banyak ASN berfokus pada peran teknis/substansi, bukan sekadar struktural.

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi Capaian yang sangat positif terlihat pada indikator ini, dari 12,50% pada 2021, naik drastis menjadi 39,25% pada 2024. Artinya, hampir 40% pejabat fungsional telah memiliki sertifikasi kompetensi, menandakan peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN fungsional.

Tabel 2.105. Capaian Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Pengadaan Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|-----|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 83,28 | 77,80 | 78,61 | 81,67 |
| 2 | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 15,29 | 21,21 | 24,63 | 24,58 |
| 3 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | % | 12,50 | 34,50 | 39,17 | 39,25 |

Sumber : BKPSDM, 2022-2025

2.4.4.5.3. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan pemerintah fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bima.

Tabel 2.106. Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023-2024

| Indikator | 2023 | 2024 |
|-----------------------|-------|-------|
| Indeks Inovasi Daerah | 61,30 | 76,65 |

Sumber : LKIP Brida Kota Bima Tahun 2024, 2025



Tahun 2024 Pemerintah Kota Bima memperoleh predikat sebagai Kota Sangat Inovatif pada penghargaan Innovative Government Award (IGA) sedangkan untuk capaian nilai indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah 76,65.

2.4.4.6. Unsur Pengawasan Pemerintahan

Inspektorat sebagai perangkat daerah pengampu yang melaksanakan urusan pengawasan merupakan pilar utama selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki posisi sangat strategis baik dari aspek pelaksanaan fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian Visi dan Misi serta program Pemerintah Daerah sesuai RPJMD. Inspektorat dalam kaitannya dengan pencapaian indikator RPJMD yang merupakan penegak supremasi hukum, pemerintahan yang bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) dan memantapkan otonomi daerah sekaligus mengawal pelaksanaan program yang ditetapkan dalam APBD sehingga target RPJMD dapat tercapai.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintahan.

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang efektif dan efisien, upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima. Semakin baik pemerintah melaksanakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangannya, yang ditunjukkan dengan semakin sedikitnya temuan terhadap pemeriksaan pada tahun selanjutnya.

Tabel 2.107. Persentase Penurunan temuan hasil pengawasan Tahun 2022-2024

| Indikator | Target | | | Realisasi | | |
|--|--------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Penurunan temuan hasil pengawasan | 52,38 | 57,14 | 55,04 | 57,14 | 61,90 | 68,29 |

Sumber : LKIP Inspektorat 2022-2024, 2025



Pada tahun 2022 persentase penurunan temuan hasil pengawasan menunjukkan bahwa dari 42 Perangkat Daerah dengan target 52,38 % atau 22 Perangkat Daerah yang tidak mendapatkan temuan berulang dengan realisasi sebesar 24 Perangkat Daerah atau 57,14 %. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah perangkat daerah yang tidak mendapatkan temuan berulang sebanyak 26 Perangkat Daerah melebihi target yaitu 24 Perangkat Daerah atau 57,14%. Pada Tahun 2024 dari target 24 PD terealisasi 28 PD yang tidak mendapatkan temuan berulang atau sebesar 68,29 persen dengan capaian sebesar 119,51 persen.

Maturitas SPIP adalah indikator untuk mengukur tingkat kematangan sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah. Skala penilaiannya umumnya 1 (terendah) sampai 5 (optimal). Pada tahun 2021 dan 2022, SPIP Kabupaten/Kota mencapai level 3 (Terdefinisi), yang menandakan kebijakan dan prosedur pengendalian intern telah dibangun dan diterapkan, telah tersedia dokumentasi sistematis, dan mulai digunakan secara konsisten dalam aktivitas pemerintahan. Namun, pada 2023 dan 2024 terjadi penurunan ke level 2 (Berkembang). Penurunan ini mengindikasikan melemahnya penerapan pengendalian internal, adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan atau lemahnya komitmen manajemen risiko dan kepatuhan terhadap prosedur.

Kapabilitas APIP menunjukkan sejauh mana kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal yang profesional, independen, dan berbasis risiko. Level 3 berarti "Terdefinisi", dengan ciri-ciri:

- Inspektorat telah memiliki pedoman audit yang baku,
- Telah melaksanakan audit berbasis risiko secara sistematis,
- Sumber daya manusia memiliki kompetensi memadai,
- Kinerja pengawasan memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Tabel 2.108. Capaian Urusan Penunjang Pengawasan Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN | SAT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|-----|------|------|------|------|
| 1 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | % | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | % | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Sumber : Inspektorat, 2022-2025



2.5. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja

2.5.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2024

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bima. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Pada Tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Bima berusaha mewujudkan misi dan tujuannya melalui 16 sasaran strategis dan 18 indikator kinerja dalam IKU. Kemudian telah dilakukan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.



Tabel 2.109. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bima Tahun 2019-2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 5 Tahun RPJMD | | | | | Capaian RPD (2024) | Keterangan | Analisis |
|----|--|--|---------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| 1. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | Angka | 70,20 | 70,38 | 70,50 | 70,83 | 70,35 | 73,15 | Pencapaian tahun 2020 sudah melewati target akhir masa RPJMD | Faktor pendukung: • komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong program peningkatan pelayanan pada urusan kesehatan, baik peningkatan sarana dan prasarana, SDM, dan anggaran. |
| 2. | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan | Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar | Angka | 98,79 | 99,29 | 99,17 | 98,00 | 99,79 | ta | Pencapaian tahun 2020 sudah melewati target akhir masa RPJMD | Faktor pendukung: • Komitmen daerah dalam hal alokasi anggaran pendidikan lebih dari 20% APBD Kendala: • Masih lemah kualitas SDM pendidikan serta sarana dan prasarana. |
| | | Persentase peningkatan mutu pendidikan | % | 26,12 | 27,17 | 33 | 33 | 34 | | Meningkat dari tahun ketahun | |
| | Meningkatnya kualitas pendidikan | Indeks SPM Pendidikan | Angka (1-100) | | | | | | 76,21 | Realisasi sudah melewati target akhir RPD | |
| 3. | Meningkatnya Daya Beli masyarakat | Pengeluaran Per Kapita | Rp.000 /thn | 11.334 | 11.105 | 11.135 | 11.395 | 11.740 | 1.700,00 | Meningkat dari tahun ketahun, tahun 2021 sudah melampaui target akhir masa RPJMD | Faktor pendukung: • Pertumbuhan pada sektor perbankan, UMKM, dan jasa Kendala: • Belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah, terutama peningkatan |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 5 Tahun RPJMD | | | | | Capaian RPD (2024) | Keterangan | Analisis |
|----|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | kualitas dan promosi hasil olahan lokal sehingga produk unggulan daerah menjadi kalah bersaing dengan produk daerah lain. |
| | Meningkatnya standar hidup masyarakat | PDRB perkapita harga berlaku | Rp. Juta/ta hun | | | | | | 32,47 | Realisasi sama dengan target pada akhir tahun RPD | Faktor yang mempengaruhi : - Pertumbuhan ekonomi - Peningkatan investasi - Peningkatan SDM |
| 4. | Meningkatnya ketahanan pangan | Indeks Ketahanan Pangan | Angka | 63,52 | 65,90 | 69,28 | 70,25 | 74,49 | 75,94 | Realisasi sudah melewati target akhir RPD | Faktor pendukung: • ketersediaan pangan dan tingkat distribusinya cukup merata. Kendala: • masih kurangnya tingkat keberagaman/diversifikasi pangan. • luas lahan pertanian yang mengalami penurunan. |
| 5. | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan PDRB | % | 5,22 | -4,95 | 2,08 | 2,70 | 5,16 | 4,04 | Pertumbuhan ekonomi menurun secara signifikan pada tahun 2020. Hal ini merupakan kondisi umum global sebagai dampak pandemi Covid 19, dimana pertumbuhan ekonomi nasional juga berada pada angka -2,03% dan Provinsi NTB pada angka -3,58%. | |
| 6. | Menurunnya angka kemiskinan | Angka Kemiskinan | % | 8,60 | 8,35 | 8,88 | 8,80 | 8,67 | 8,12 | Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, angka | Faktor pendukung: • komitmen kepala daerah untuk melaksanakan program penanganan kemiskinan yang |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 5 Tahun RPJMD | | | | | Capaian RPD (2024) | Keterangan | Analisis |
|----|---|------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------------|--|--|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | kemiskinan Kota Bima mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Pemberian paket bantuan ekonomi melalui jaring pengaman sosial efektif menaikkan daya beli masyarakat. | terintegrasi, baik perencanaan dan pelaksanaannya. Kendala: <ul style="list-style-type: none"> • masih lemahnya aspek koordinasi dalam pendataan dan verifikasi data kemiskinan di daerah sehingga menghambat pelayanan. |
| 7. | Meningkatnya kesempatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,18 | 4,42 | 3,56 | 3,73 | 3,57 | 3,27 | Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan. Hal ini merupakan imbas dari terganggunya kegiatan usaha masyarakat dikarenakan pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial sebagai dampak pandemi Covid-19. | Kendala: <ul style="list-style-type: none"> • Angkatan kerja di Kota Bima masih perlu ditingkatkan kompetensi/skill-nya sehingga dapat langsung terserap sesuai kebutuhan. Rencana kedepan: <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong program perluasan lapangan kerja, membangun kelembagaan dan sarana prasarana ketenagakerjaan, seperti membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK). |
| 8. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai SAKIP | Huruf dan Angka | B (67,05) | B (68,48) | B (68,69) | B (68,17) | B (67,42) | | Meningkat dari tahun ketahun | Faktor pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan <i>good governance</i>. |
| | | Skor LPPD | Angka | Sangat Tinggi (3,2595) | Sangat Baik (3,2595) | Sangat Baik (3,259) | Sangat Baik (3,2595) * | Sedang (2,65) | | Pencapaian tahun 2019 sudah melewati target akhir masa RPJMD | <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bekerja sama dengan BPKP perwakilan NTB. |
| | | Opini BPK | Huruf | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | Predikat WTP 8 tahun berturut-turut | <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pemanfaatan teknologi |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 5 Tahun RPJMD | | | | | Capaian RPD (2024) | Keterangan | Analisis |
|-----|---|---|--------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|---|--|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | informasi, seperti aplikasi SIMDA dan SIMBADA. | |
| | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | | | | | | 72,3 | Realisasi sudah melewati target akhir RPD | |
| 9. | Meningkatnya kemandirian keuangan daerah | Rasio PAD terhadap APBD | % | 5,62 | 6,41 | 6,2 | 8.99 | 8.13 | | Pencapaian tahun 2020 sudah melewati target akhir masa RPJMD | Faktor pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • peningkatan komitmen petugas dalam mengamankan kebocoran penerimaan PAD. Kendala: <ul style="list-style-type: none"> • masih lemah sistem dan sarana prasarana pelayanan sehingga menghambat transparansi penerimaan • Pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia termasuk Kota Bima sangat berdampak pada beberapa sumber PAD Kota bima. |
| 10. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82,36 | 82,61 | 83,42 | 86,89 | 88,05 | | Meningkat dari tahun ketahun dan tahun 2023 sudah melampaui target | Faktor pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • semakin membaiknya penyiapan pada standar pelayanan publik, baik persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya, produk, kompetensi, perilaku pelayanan, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan. |
| 11. | Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata | Persentase Kesesuaian Tata Ruang | % | 98 | 98 | 98,5 | 98.8 | 99,47 | | Kesesuaian Tata Ruang menunjukkan ketaatan terhadap rencana tata ruang. Masih ada kawasan | |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 5 Tahun RPJMD | | | | | Capaian RPD (2024) | Keterangan | Analisis |
|-----|--|----------------------------------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--|--|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | ruang | | | | | | | | | yang pemanfaatan lahannya belum sesuai rencana tata ruang, misalnya di kawasan bantaran sungai. | |
| 12. | Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup | Indeks kualitas lingkungan hidup | Angka | 74,13 | 74,13 | 52,73 | 56,08 | 60,25 | 60,25 | Penurunan Indeks kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh penurunan kualitas air secara signifikan (bakteri coli) | <ul style="list-style-type: none"> - diperlukan peningkatan anggaran pengelolaan lingk. Khususnya untuk pengendalian pencemaran udara, air & kualitas lahan; - Perlu meningkatnya peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar; - Perlu mempertahankan dan meningkatkan tutupan belukar dalam Kawasan melalui kolaborasi dengan instansi terkait. |
| 13. | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Luas kawasan kumuh | % | 7,32 | 13,37 | 11,66 | 10,10 | 11,00 | | <p>Sasaran strategis ke-13 masih mengacu pada RPJMD sebelum perubahan. Namun untuk tahun 2022, sudah disesuaikan berdasarkan Perubahan RPJMD yang ditetapkan tanggal 7 Juni 2021.</p> <p>Luasan kawasan kumuh pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebagai akibat</p> | <p>Faktor pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektifnya pelaksanaan Program Perencanaan Pemukiman Kumuh melalui kegiatan Pendampingan Perencanaan dan Penanganan Kumuh Kota Bima melalui Pokja PKP dan (Kotaku). <p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penanganan sampah permukiman dan penanganan air limbah permukiman sebagai bagian dari upaya terintegrasi mengatasi kekumuhan. <p>Rencana kedepan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya terintegrasi penanganan air limbah |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 5 Tahun RPJMD | | | | | Capaian RPD (2024) | Keterangan | Analisis |
|-----|--|--|--------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------------------|--|--|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | penyesuaian indikator kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018. | permukiman untu pengurangan kekumuhan di Kota Bima. |
| 14. | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik | % | 4,21% | 2,80% | 9,94% | 9,96% | 10,05% | | <p>Ada 3 komponen infrastruktur yang diukur yaitu irigasi teknis, jalan dan saluran drainase. Pada tahun 2019, 61,09% infrastruktur irigasi teknis, jalan dan saluran drainase berada dalam kondisi baik. Pada tahun 2020, 63,78% infrastruktur dalam kondisi baik. Dengan demikian terdapat peningkatan sebesar 2,8%.</p> | <p>Faktor pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> keterpaduan pendanaan kegiatan baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun dari lembaga non pemerintah lainnya. <p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> masih banyaknya jalan di Kota Bima yang belum memiliki status sehingga apabila diterbitkan SK status jalan baru maka akan menambah panjang jalan Kota dengan kondisi yang belum baik. Disamping itu, kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir bandang Tahun 2016 yang lalu belum sepenuhnya mampu diperbaiki. <p>Rencana kedepan:</p> <p>Peningkatan kualitas kemitraan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bima.</p> |
| | Meningkatnya kemandapan infrastruktur | Indeks Infrastruktur | Angka | | | | | | 83,3 | Realisasi sudah melewati target akhir RPD | |
| 15. | Meningkatnya Ketahanan terhadap | Indeks Ketahanan Daerah | Angka | 84 | 74 | 74 | 74 | 72 | 0,6 | Skor Indeks Ketahanan Daerah Kota Bima menurun pada tahun 2020 | <p>Faktor pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> adanya PUSDALOPS yang telah terintegrasi dengan pusat. |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 5 Tahun RPJMD | | | | | Capaian RPD (2024) | Keterangan | Analisis |
|-----|--|---|--------|-----------------------|--------|------|------|-------|--------------------|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | bencana | | | | | | | | | karena beberapa dokumen perencanaan mitigasi bencana belum berhasil diperbarui karena penundaan kegiatan sebagai akibat pandemi Covid-19. | Kendala: <ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya penyelarasan semua dokumen yang mendukung pengkajian risiko dan perencanaan terpadu dan masih belum optimalnya pencegahan dan mitigasi bencana maupun kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. |
| 16. | Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban | Persentase penurunan Angka kriminalitas | % | 33 | -104.1 | 66 | 68 | 27,64 | 45 | Berdasarkan data pada Kepolisian Resort Bima Kota, angka kriminalitas pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Dengan demikian, capaian persentase penurunan angka kriminalitas bernilai negatif. Namun demikian, angka ini tidak hanya menunjukkan angka kriminalitas di wilayah Kota Bima, melainkan juga di wilayah Kabupaten Bima (Kecamatan Wawo dan Sape) yang merupakan wilayah kewenangan Polres Bima Kota. | Faktor pendukung: <ul style="list-style-type: none"> Adanya intervensi program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan terbentuknya forum-forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Konflik Sosial (FPK) yang ikut mendukung penurunan angka kriminalitas dan konflik sosial di Kota Bima. Kendala: <ul style="list-style-type: none"> masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan tindakan kriminal. |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian 5 Tahun RPJMD | | | | | Capaian RPD (2024) | Keterangan | Analisis |
|----|--------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|------|------|------|------|--------------------|---|----------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | Meningkatnya keamanan dan ketertiban | Indeks Rasa Aman | Angka (1-100) | | | | | | 97,6 | Realisasi sudah melewati target akhir RPD | |

Sumber: Review RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 dan RPD Kota Bima Tahun 2024-2026



2.5.2. Capaian Program Pendukung Sasaran atau Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bima periode tahun 2024-2026. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.

Selengkapnya, Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bima periode tahun 2024. Capaian kinerja IKD Kota Bima Tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2.110. Capaian kinerja IKD Kota Bima Tahun 2024

| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|--|--|--------|-------------------------|--|------------------------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|---------|------------------------|------------|------------|--|------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| Tujuan 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia | Nilai | 76,84 | 76,92 | 129.015.340 .176,00 | 138.443.962 .603,00 | 76,96 | 129.015.340 .176,00 | 76,99 | 129.015.340 .176,00 | 78,91 | 130.740.866 .397,00 | 102,5 9 | 101,3 4 | 94,44 | |
| Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Umur Harapan Hidup | Tahun | 70,83 | 71,11 | 50.198.875. 122,00 | 52.050.748. 542,00 | 71,26 | 50.198.875. 122,00 | 71,4 | 50.198.875. 122,00 | 73,15 | 49.060.608. 164,00 | 100,4 1 | 97,73 | 94,26 | sangat tinggi |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase penurunan Angka kesakitan | Persen | 35 | 37 | 45.435.939. 622,00 | 46.699.519. 842,00 | 38 | 45.435.939. 622,00 | 40 | 45.435.939. 622,00 | 91,77 | 44.599.457. 198,00 | 248,0 3 | 98,16 | 95,50 | sangat tinggi |
| | Penurunan Angka Kematian Bayi | KH | 2/100 | 2/100 | | | 2/100 | | 2/100 | | 2/100 | | 100 | | | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Penurunan Angka TFR | Persen | 80 | 80 | 368.134.000 ,00 | 71.400.000, 00 | 80 | 368.134.000 ,00 | 80 | 368.134.000 ,00 | 84,38 | 36.656.686, 00 | 105,4 8 | 9,96 | 51,34 | sangat tinggi |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase Penurunan (UNMET NEED) | Persen | 25 | 25 | 3.178.637.0 00,00 | 3.342.158.0 00,00 | 25 | 3.178.637.0 00,00 | 25 | 3.178.637.0 00,00 | 91,63 | 2.607.610.8 30,00 | 366,5 2 | 82,04 | 78,02 | sangat tinggi |
| | Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna mCPR (Modern Contraceptive Prevalance Rate) | Persen | 70 | 70 | | | 70 | | 70 | | 62,9 | | 89,86 | | | Tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|--|-------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------|------------|--|------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| | Persentase Penurunan ASFR (Age Specific Fertility Rate) | Persen | 37/100 0 | 38/1.0 00 | | | 38/1.0 00 | | 38/1.0 00 | | 37,62/ 1000 | | 99,00 | | | sangat tinggi |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Jumlah ketersediaan energi | kka/ka p/hari | 3.198 | 3.198 | 663.743.000 ,00 | 839.044.300 ,00 | 3.198 | 663.743.000 ,00 | 3.198 | 663.743.000 ,00 | 2.950, 21 | 793.571.250 ,00 | 92,25 | 119,5 6 | 94,58 | sangat tinggi |
| | Jumlah ketersediaan protein | gram/k ap/hari | 75,74 | 75,74 | | | 75,74 | | 75,74 | | | | | | | |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani | persen | 92 | 92 | 75.987.200, 00 | 115.963.100 ,00 | 92 | 75.987.200, 00 | 92 | 75.987.200, 00 | 122,9 0 | 114.273.100 ,00 | 133,5 9 | 150,3 8 | 98,54 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi Standar | persen | 91 | 91 | 50.918.000, 00 | 552.832.300 ,00 | 91 | 50.918.000, 00 | 91 | 50.918.000, 00 | 100,0 0 | 479.208.100 ,00 | 109,8 9 | 941,1 4 | 86,68 | sangat tinggi |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Jumlah Fasilitas Pelayanan Farmasi dan Alkes yang aman | persen | 95 | 95 | 425.516.300 ,00 | 429.831.000 ,00 | 95 | 425.516.300 ,00 | 95 | 425.516.300 ,00 | 95,00 | 429.831.000 ,00 | 100,0 0 | 101,0 1 | 100,0 0 | sangat tinggi |
| Meningkatnya kualitas pendidikan | Rapor Pendidikan: | Tahun | | | 49.367.365. 850,00 | 64.829.423. 000,00 | | 49.367.365. 850,00 | | 49.367.365. 850,00 | | 61.623.621. 679,00 | | 124,8 3 | 95,06 | |
| | PAUD | Persen | 35,49% | 36,20 % | | | 36,57 % | | 36,93 % | | | | | | | |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|---|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|--|------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| | SD/Sederajat (Rata-rata) | Angka (rentan g 1-3) | 1,8 | 1,84 | | | 1,86 | | 1,88 | | | | | | | |
| | SMP/Sederajat (Rata-rata) | Angka (rentan g 1-3) | 1,7 | 1,73 | | | 1,75 | | 1,77 | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase sekolah yang mendapat akreditasi A | Persen | 100 | 100 | 48.354.298. 250,00 | 63.363.085. 050,00 | 100 | 48.354.298. 250,00 | 100 | 48.354.298. 250,00 | 100,0 0 | 60.205.227. 699,00 | 100,0 0 | 124,5 1 | 95,02 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Cakupan pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik dan kependidikan | Persen | 75 | 75 | 2.417.604.1 53,00 | 28.050.000, 00 | 75 | 2.465.956.2 36,06 | 75 | 2.515.275.3 60,78 | 95,00 | 28.050.000, 00 | 126,6 7 | 1,16 | 100,0 0 | sangat tinggi |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase perpustakaan yang representatif | Persen | 100 | 100 | 529.086.800 ,00 | 806.314.950 ,00 | 100 | 529.086.800 ,00 | 100 | 529.086.800 ,00 | 100,0 0 | 789.908.800 ,00 | 100,0 0 | 149,3 0 | 97,97 | sangat tinggi |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase lembaga yang memenuhi kriteria layak anak | Persen | 47,62 | 54,76 | 215.856.200 ,00 | 283.095.000 ,00 | 54,76 | 215.856.200 ,00 | 54,76 | 215.856.200 ,00 | 61,90 | 256.495.900 ,00 | 113,0 4 | 118,8 3 | 90,60 | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|--|-----------------|-------------------------|--|-------------------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------|------------------|----------|----------|--|---------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan | Persen | 8,5 | 10 | 927.943.600 | 348.878.000 | 2.5.3. | 927.943.600 | 10 | 927.943.600 | 10 | 343.939.280 | 100,00 | 37,06 | 98,58 | sangat tinggi |
| Meningkatnya standar hidup masyarakat | PDRB per kapita harga berlaku | Rp. Juta /Tahun | 23,4 | 23,63 | 23.982.692.105,00 | 6.647.751.128,00 | 23,75 | 23.982.692.105,00 | 23,87 | 23.982.692.105,00 | 32,47 | 6.185.587.299,00 | 137,41 | 25,79 | 93,05 | sangat tinggi |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO | Persentase Usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha | Persen | 2,00 | 2,58 | 414.225.200,00 | 357.076.300,00 | 2,58 | 414.225.200,00 | 2,58 | 414.225.200,00 | 23,58 | 348.977.971,00 | 913,95 | 84,25 | 97,73 | sangat tinggi |
| | Meningkatnya Produktifitas UKM | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | | sangat tinggi |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan. | Persen | 65,00 | 69,32 | 211.663.800,00 | 268.812.700,00 | 69,32 | 211.663.800,00 | 69,32 | 211.663.800,00 | 100,00 | 262.264.500,00 | 144,26 | 123,91 | 97,56 | sangat tinggi |
| | Persentase Keanggotaan Koperasi yang mengikuti Pelatihan. | Persen | 1,40 | 1,42 | | | 1,42 | | 1,42 | | 27,66 | | 1.947,89 | | | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|---|--------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|---------|----------------------|------------|------------|--|------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| | Kualitas Sumber Daya Pengelola Koperasi | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,0 0 | | | sangat tinggi |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase perusahaan yang melaksanakan K3 | Persen | 89,6 | 25 | 97.647.900, 00 | 168.253.000 ,00 | 89,6 | 97.647.900, 00 | 89,6 | 97.647.900, 00 | | 140.559.283 ,00 | 0,00 | 143,9 5 | 83,54 | sangat tinggi |
| | Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan | Persen | 78,57 | | | | 78,57 | | 78,57 | | | | | | | |
| | Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK) | Persen | 60,8 | 75 | | | 60,8 | | 60,8 | | | | | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS yang terlatih Persentase PSKS yang diberdayakan | Persen | 82,06 | 83 | 96.450.000, 00 | 150.136.000 ,00 | 83 | 96.450.000, 00 | 83 | 96.450.000, 00 | 50,00 | 143.290.800 ,00 | 60,24 | 148,5 6 | 95,44 | Renda h |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase anak-anak terlantar yang ditangani Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persen | 75 | 80 | 2.514.620.6 00,00 | 2.790.538.7 02,00 | 80 | 2.514.620.6 00,00 | 80 | 2.514.620.6 00,00 | 80,00 | 2.569.847.4 50,00 | 100,0 0 | 102,2 0 | 92,09 | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|---|--------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------------|----------------------|------------|------------|--|------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase pengembangan ODTW | Persen | 50 | 55 | 12.089.086. 479,00 | 39.250.000, 00 | 56 | 12.089.086. 479,00 | 57 | 12.089.086. 479,00 | 32,00 | 35.288.000, 00 | 58,18 | 0,29 | 89,91 | Renda h |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | Persen | 10 | 32 | 1.292.787.9 00,00 | 1.479.004.4 64,00 | 32 | 1.292.787.9 00,00 | 32 | 1.292.787.9 00,00 | 32,00 | 1.445.040.7 83,00 | 100,0 0 | 111,7 8 | 97,70 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah produksi Perikanan Tangkap | Ton | 2378,1 | 2400 | 268.607.600 ,00 | 726.171.200 ,00 | 2400 | 268.607.600 ,00 | 2400 | 268.607.600 ,00 | 2.468, 50 | 654.502.993 ,00 | 102,8 5 | 243,6 7 | 90,13 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah produksi Perikanan Budidaya | Ton | 809,86 | 850 | 528.797.100 ,00 | 319.630.762 ,00 | 900 | 528.797.100 ,00 | 950 | 528.797.100 ,00 | 833,9 8 | 241.876.239 ,00 | 98,12 | 45,74 | 75,67 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan | Persen | 8,5 | 10 | 927.943.600 | 348.878.000 | 10 | 927.943.600 | 10 | 927.943.600 | 10 | 343.939.280 | 100,0 0 | 37,06 | 98,58 | sangat tinggi |
| Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat | Indeks Ketahanan Pangan | Angka | 70,25 | 70,75 | 5.466.407.0 99,00 | 6.094.047.5 83,00 | 71,25 | 5.466.407.0 99,00 | 72,75 | 5.466.407.0 99,00 | 75,94 | 5.836.786.7 12,00 | 107,3 4 | 106,7 8 | 95,78 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran | Persen | 100 | 100 | 3.076.238.8 75,00 | 3.568.730.2 97,00 | 100 | 3.076.238.8 75,00 | 100 | 3.076.238.8 75,00 | 100,0 0 | 3.544.170.7 30,00 | 100,0 0 | 115,2 1 | 99,31 | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|--|--|--------------------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------|--------------------|------------|------------|--|----------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase penurunan ternak yang terinvestasi PHMS (%) | Persen | | 0,14 | 254.958.524 ,00 | 254.958.524 ,00 | 0,14 | 254.958.524 ,00 | 0,14 | 254.958.524 ,00 | 0,14 | 231.485.450 ,00 | 100,0 0 | 90,79 | 90,79 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah produksi Perikanan Tangkap | Ton | 2378,1 | 2400 | 268.607.600 ,00 | 726.171.200 ,00 | 2400 | 268.607.600 ,00 | 2400 | 268.607.600 ,00 | 2.468, 50 | 657.802.993 ,00 | 102,8 5 | | | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah produksi Perikanan Budidaya | Ton | 809,86 | 850 | 528.797.100 ,00 | 319.630.762 ,00 | 900 | 528.797.100 ,00 | 950 | 528.797.100 ,00 | 833,9 8 | 251.476.239 ,00 | 98,12 | | | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Produk Olahan | Ton | 5.930 | 6000 | 598.074.800 ,00 | 269.549.400 ,00 | 6100 | 598.074.800 ,00 | 6200 | 598.074.800 ,00 | 6.849, 00 | 244.006.950 ,00 | 114,1 5 | 40,80 | 90,52 | sangat tinggi |
| | Angka Konsumsi Ikan (AKI) | Kg/Per kapita/ Thn | 101,2 | 101,2 | | | 101,2 | | 101,2 | | 50,55 | | 49,95 | | | Sangat Renda h |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Jumlah ketersediaan energi | kka/ka p/hari | 3.198 | 3.198 | 663.743.000 ,00 | 839.044.300 ,00 | 3.198 | 663.743.000 ,00 | 3.198 | 663.743.000 ,00 | 2.950, 21 | 793.571.250 ,00 | 92,25 | 119,5 6 | 94,58 | sangat tinggi |
| | Jumlah ketersediaan protein | gram/k ap/hari | 75,74 | 75,74 | | | 75,74 | | 75,74 | | 122,9 | | 162,2 7 | | | sangat tinggi |
| PROGRAM | | persen | 92 | 92 | 75.987.200, | 115.963.100 | 92 | 75.987.200, | 92 | 75.987.200, | 122,9 | 114.273.100 | 133,5 | 150,3 | 98,54 | sangat |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|--|--------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|---------|----------------------|------------|----------|--|----------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani | | | | 00 | ,00 | | 00 | | 00 | 0 | ,00 | 9 | 8 | | tinggi |
| Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemuda | Indeks pemberdayaan gender (IDG) | Angka | 70,16 | 70,23 | 9.303.691.1 26 | 8.821.992.3 50,00 | 70,27 | 9.303.691.1 26 | 70,3 | 9.303.691.1 26 | 70,3 | 8.034.262.5 43,00 | 100,1 0 | 86,36 | 91,07 | sangat tinggi |
| | Jumlah Pemuda berprestasi tingkat nasional | Orang | 10 | 12 | 9.303.691.1 26 | 8.821.992.3 50,00 | 13 | 9.303.691.1 26 | 14 | 9.303.691.1 26 | 9 | 8.034.262.5 43,00 | 75,00 | 86,36 | 91,07 | Sedan g |
| PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi | Persen | 29,94 | 32 | 3.290.168.5 26,00 | 2.294.014.5 50,00 | 32 | 3.290.168.5 26,00 | 32 | 3.290.168.5 26,00 | 11,75 | 2.269.235.9 35,00 | 36,72 | 68,97 | 98,92 | Sangat Renda h |
| | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta | Persen | 35,00 | 47,02 | | | 47,02 | | 47,02 | | 8,67 | | 18,44 | | | Sangat Renda h |
| | Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan | Persen | 55,00 | 57,4 | | | 57,4 | | 57,4 | | 64,34 | | 112,0 9 | | | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|--|--|--------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|-----------------------|------------|----------|--|----------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan | Persen | 8,5 | 10 | 927.943.600 | 348.878.000 | 10 | 927.943.600 | 10 | 927.943.600 | 10 | 343.939.280 | 100,0 0 | 37,06 | 98,58 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan yang diakomodir | Persen | 8,5 | 10 | 5.085.579.0 00 | 2.836.941.8 00 | 10 | 5.085.579.0 00 | 10 | 5.085.579.0 00 | 35 | 2.813.476.4 98 | 350,0 0 | 55,32 | 99,17 | sangat tinggi |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase Penurunan (UNMET NEED) | Persen | 25 | 25 | 3.178.637.0 00,00 | 3.342.158.0 00,00 | 25 | 3.178.637.0 00,00 | 25 | 3.178.637.0 00,00 | 8,73 | 2.607.610.8 30,00 | 34,92 | 82,04 | 78,02 | Sangat Renda h |
| | Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna mCPR (Modern Contraceptive Prevalance Rate) | Persen | 70 | 70 | | | 70 | | 70 | | 62,91 | | 89,87 | | | Tinggi |
| | Persentase Penurunan ASFR (Age Specific Fertility Rate) | Persen | 37/100 0 | 38/1.0 00 | | | 38/1.0 00 | | 38/1.0 00 | | 37,62/ 1000 | | 101,6 8 | | | sangat tinggi |
| Tujuan 2.1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan | Indeks Gini | Angka | 0,429 | 0,425 | 97.599.046. 330,00 | 99.565.688. 039,00 | 0,421 | 98.599.046. 330,00 | 0,416 | 102.749.046. .330,00 | 0,38 | 94.170.974. 381,00 | 89,41 | 96,49 | 94,58 | Tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|--|--------------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------|-------------------|---------|----------|--|---------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi | % | 2,7 | 2,98 | 13.251.237.336,00 | 21.998.224.159,00 | 3,13 | 13.251.237.336,00 | 3,28 | 13.251.237.336,00 | 4,04 | 21.624.740.255,00 | 135,57 | 163,19 | 98,30 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Produk Olahan | Ton | 5.930 | 6000 | 598.074.800,00 | 269.549.400,00 | 6100 | 598.074.800,00 | 6200 | 598.074.800,00 | 6.849,00 | 244.006.950,00 | 114,15 | 40,80 | 90,52 | sangat tinggi |
| | Angka Konsumsi Ikan (AKI) | Kg/Per kapita/ Thn | 101,2 | 101,2 | | | 101,2 | | 101,2 | | | | | | | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase peningkatan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian dalam kondisi baik (%) | Persen | 60 | 62 | 40.368.800,00 | 3.568.730.297,00 | 62 | 40.368.800,00 | 62 | 40.368.800,00 | 100,00 | 3.544.170.730,00 | 161,29 | 8.779,48 | 99,31 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI | Persentase Capaian Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah | persen | N/A | 75 | 25.168.000,00 | | 80 | 26.168.000,00 | 85 | 26.168.000,00 | | | | | | Perindustrian |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Kelompok Industri Kecil Menengah yang mendapat Bantuan Hibah | Persen | 100 | 100 | 1.467.765.250,00 | 1.302.728.250,00 | 100 | 1.467.765.250,00 | 100 | 1.467.765.250,00 | 19,60 | 1.279.101.670,00 | 19,60 | 87,15 | 98,19 | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|--|--------|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------|------------|--|------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| | Meningkatnya Pembangunan Industri Kota Bima | Persen | 128,6 | 100 | | | 100 | | 100 | | | | | | | |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraa n Pembangunan | Persen | 90 | 100 | 2.306.861.7 00,00 | 3.854.408.5 90,00 | 100 | 2.306.861.7 00,00 | 100 | 2.306.861.7 00,00 | 100,0 0 | 3.822.334.2 50,00 | 100,0 0 | 165,6 9 | 99,17 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat | Persen | 90 | 100 | 8.838.166.7 86,00 | 13.002.807. 622,00 | 100 | 8.838.166.7 86,00 | 100 | 8.838.166.7 86,00 | 85,00 | 12.735.126. 655,00 | 85,00 | 144,0 9 | 97,94 | Tinggi |
| Meningkatnya kesempatan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 3,73 | 3,55 | 617.213.000 ,00 | 691.638.400 ,00 | 3,38 | 617.213.000 ,00 | 3,21 | 667.213.000 ,00 | 3,27 | 612.330.783 ,00 | 92,11 | 99,21 | 88,53 | sangat tinggi |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase tenaga kerja terlatih | Persen | 27,00 | 30 | 498.316.100 ,00 | 511.543.000 ,00 | 30 | 498.316.100 ,00 | 30 | 548.316.100 ,00 | 30,00 | 460.131.500 ,00 | 100,0 0 | 92,34 | 89,95 | sangat tinggi |
| | Angka produktivitas Tenaga Kerja | Rupiah | 43,72 | 44 juta | | | 44 juta | | 44 juta | | 77,82 juta | | 176,8 6 | | | sangat tinggi |
| PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Persentase Kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi | Persen | 93,75 | 95 | 21.249.000, 00 | 11.842.400, 00 | 95 | 21.249.000, 00 | 95 | 21.249.000, 00 | 92,30 | 11.640.000, 00 | 97,16 | 54,78 | 98,29 | sangat tinggi |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase perusahaan yang | Persen | 89,6 | 25 | 97.647.900, 00 | 168.253.000 ,00 | 89,6 | 97.647.900, 00 | 89,6 | 97.647.900, 00 | | 140.559.283 ,00 | | 143,9 5 | 83,54 | |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|---|--------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|------------|--|----------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| | melaksanakan K3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan | Persen | 78,57 | 75 | | | 78,57 | | 78,57 | | | | | | | |
| | Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK) | Persen | 60,8 | 75 | | | 60,8 | | 60,8 | | | | | | | |
| Menurunnya tingkat kemiskinan | Persentase penduduk miskin | Persen | 8,8 | 7,94 | 83.730.595. 994,00 | 76.875.825. 480,00 | 7,54 | 84.730.595. 994,00 | 7,17 | 88.830.595. 994,00 | 8,12 | 71.933.903. 343,00 | 97,78 | 85,91 | 93,57 | sangat tinggi |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS yang terlatih | Persen | 82,06 | 83 | 96.450.000, 00 | 150.136.000 ,00 | 84 | 96.450.000, 00 | 85 | 96.450.000, 00 | 30,00 | 143.290.800 ,00 | 36,14 | 148,5 6 | 95,44 | Sangat Renda h |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi | Persen | 193 | 60 | 1.262.704.8 02,00 | 1.326.114.8 00,00 | 60 | 1.262.704.8 02,00 | 60 | 1.262.704.8 02,00 | 50,00 | 1.217.407.8 00,00 | 83,33 | 96,41 | 91,80 | Tinggi |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase anak-anak terlantar yang ditangani Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persen | 185 | 80 | 2.514.620.6 00,00 | 2.790.538.7 02,00 | 80 | 2.514.620.6 00,00 | 80 | 2.514.620.6 00,00 | 80,00 | 2.569.847.4 50,00 | 100,0 0 | 102,2 0 | 92,09 | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|--|---|--------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|--|------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase sekolah penerima buku muatan lokal | Persen | 100 | 100 | 200.000.000 ,00 | | 100 | 200.000.000 ,00 | 100 | 200.000.000 ,00 | | | | | | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase penurunan Angka kesakitan | Persen | 35 | 37 | 45.435.939. 622,00 | 46.699.519. 842,00 | 38 | 45.435.939. 622,00 | 40 | 45.435.939. 622,00 | 91,77 | 44.599.457. 198,00 | 248,0 3 | 98,16 | 95,50 | sangat tinggi |
| | Penurunan Angka Kematian Bayi | KH | 2/100 | 2/100 | | | 2/100 | | 2/100 | | 2/100 | | 100 | | | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh Kota Bima yang ditangani | Persen | 1,90* | 2,31 | 10.032.741. 094,00 | | 2,31 | 11.032.741. 094,00 | 2,31 | 15.032.741. 094,00 | 100,0 0 | | 4.329, 00 | 0,00 | | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase jumlah penduduk yang memperoleh akses air minum layak | Persen | 1,78 | 100 | 8.157.162.7 44,00 | 11.008.426. 691,00 | 100 | 8.157.162.7 44,00 | 100 | 8.157.162.7 44,00 | 94,55 | 9.062.617.8 91,00 | 94,55 | 111,1 0 | 82,32 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | % luas wilayah permukiman bebas genangan | Persen | 79,52 | 91,75 | 7.567.261.7 86,00 | 6.887.496.5 00,00 | 91,75 | 7.567.261.7 86,00 | 91,75 | 7.567.261.7 86,00 | 69,18 | 6.798.884.3 44,00 | 75,40 | 89,85 | 98,71 | Sedan g |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|--|--------|-------------------------|--|------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|---------|----------|--|---------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah | Persen | 98,36 | 100 | 1.527.505.200,00 | 1.109.966.380,00 | 100 | 1.527.505.200,00 | 100 | 1.527.505.200,00 | 89,48 | 987.869.793,00 | 89,48 | 64,67 | 89,00 | Tinggi |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Persen | 99 | 100 | 1.149.967.820,00 | 1.422.721.735,00 | 100 | 1.149.967.820,00 | 100 | 1.149.967.820,00 | 94,74 | 1.347.942.800,00 | 94,74 | 117,22 | 94,74 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat | Persen | 98,04 | 99,72 | 374.815.400,00 | 76.314.400,00 | 99,72 | 374.815.400,00 | 99,72 | 374.815.400,00 | 90,95 | 76.313.500,00 | 91,21 | 20,36 | 100,00 | sangat tinggi |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Index Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Persen | 100 | 100 | 1.785.213.800,00 | 1.962.471.280,00 | 100 | 1.785.213.800,00 | 100 | 1.885.213.800,00 | 102,41 | 1.744.678.232,00 | 102,41 | 97,73 | 88,90 | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|---|--------|-------------------------|--|------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|---------|----------|--|---------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| | Persentase program dan kegiatan yang diakomodir dalam RKPD | Persen | 100 | | | | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | Persentase renja perangkat daerah yang diakomodir dalam RKPD | Persen | 100 | | | | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | Persentase keselarasan antar bab dalam setiap dokumen perencanaan | Persen | 100 | | | | 100 | | 100 | | | | | | | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi | Persen | 29,94 | 32 | 3.290.168.526,00 | 2.294.014.550,00 | 32 | 3.290.168.526,00 | 32 | 3.290.168.526,00 | 11,75 | 2.269.235.935,00 | 36,72 | 68,97 | 98,92 | Sangat Rendah |
| | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta | Persen | 35,00 | 47,02 | | | 47,02 | | 47,02 | | 8,67 | | 18,44 | | | Sangat Rendah |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|--|--------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|----------|--|---------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| | Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan | Persen | 55,00 | 57,4 | | | 57,4 | | 57,4 | | 64,34 | | 112,09 | | | sangat tinggi |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan | Persen | 0,1 | 0,1 | 336.044.600,00 | 344.104.600,00 | 0,1 | 336.044.600,00 | 0,1 | 336.044.600,00 | 0,05 | 336.937.600,00 | 50,00 | 100,27 | 97,92 | Sangat Rendah |
| | Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani | Persen | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100,00 | | | sangat tinggi |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Cakupan peningkatan kualitas keluarga | Persen | | 50 | | 804.000.000,00 | | | | | 37,44 | 779.420.000,00 | 74,88 | | 96,94 | Sedang |
| Tujuan 3.1. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 55,6 | 60,14 | 14.299.991.513,00 | 14.742.384.125,00 | 62,55 | 14.299.991.513,00 | 65,05 | 14.799.991.513,00 | 72,30 | 11.761.949.179,00 | 120,22 | 82,25 | 79,78 | sangat tinggi |
| Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 55,6 | 60,14 | 14.299.991.513,00 | 14.742.384.125,00 | 62,55 | 14.299.991.513,00 | 65,05 | 14.799.991.513,00 | 72,30 | 11.761.949.179,00 | 120,22 | 82,25 | 79,78 | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|--|---|--------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------|--|------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase capaian kinerja pengendalian perencanaan pembangunan daerah (hasil Monev yang menjadi dasar perencanaan pembangunan) | Persen | 122,34 | 100 | 717.645.000 ,00 | 648.336.000 ,00 | 100 | 717.645.000 ,00 | 100 | 817.645.000 ,00 | 98,50 | 633.702.162 ,00 | 98,50 | 88,30 | 97,74 | sangat tinggi |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Index Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Persen | 100 | 100 | 1.785.213.8 00,00 | 1.962.471.2 80,00 | 100 | 1.785.213.8 00,00 | 100 | 1.885.213.8 00,00 | 102,4 1 | 1.744.678.2 32,00 | 102,4 1 | 97,73 | 88,90 | sangat tinggi |
| | Peresentase program dan kegiatan yang diakomodir dalam RKPD | Persen | 100 | | | | 100 | | 100 | | | | | | | |
| | Persentase renja perangkat daerah yang di akomodir dalam RKPD | Persen | 100 | | | | 100 | | 100 | | | | | | | |
| PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum | Persen | 100 | 100 | 472.970.225 ,82 | | 100 | 472.970.225 ,82 | 100 | 472.970.225 ,82 | 100 | | 100 | | | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|---|--------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------|----------|--|------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase Menurunnya Temuan APIP dan BPK | Persen | 35 | 40 | 879.368.900 ,00 | 132.300.000 ,00 | 40 | 879.368.900 ,00 | 40 | 879.368.900 ,00 | 68,29 | 111.060.000 ,00 | 170,7 3 | 12,63 | 83,95 | sangat tinggi |
| | Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil | persen | 57,14 | 57,14 | | | 57,14 | | 57,14 | | | | | | | |
| | Persentase tindakanj penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK | persen | 93,37 | 93,37 | | | 93,37 | | 93,37 | | | | | | | |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Level Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima | Level | 85,71* | 86 | 181.386.300 ,00 | 395.270.400 ,00 | 87 | 181.386.300 ,00 | 88 | 181.386.300 ,00 | Level 3 (2,842) | 346.296.000 ,00 | 190,9 2 | 87,61 | sangat tinggi | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik | Persen | 100 | 100 | 6.773.739.9 09,00 | 5.472.714.0 91,00 | 100 | 6.773.739.9 09,00 | 100 | 6.873.739.9 09,00 | 100,0 0 | 3.496.722.4 38,00 | 100,0 0 | 51,62 | 63,89 | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|--|--------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|----------|--|---------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) | Persen | 98,4 | 100 | 160.183.500,00 | 1.302.588.500,00 | 100 | 160.183.500,00 | 100 | 160.183.500,00 | 219,80 | 1.106.240.057,00 | 219,80 | 690,61 | 84,93 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase peningkatan ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan | Persen | 46,46 | 65 | 1.286.616.900,00 | 1.274.253.000,00 | 65 | 1.286.616.900,00 | 65 | 1.286.616.900,00 | 80,00 | 1.188.766.350,00 | 123,08 | 92,39 | 93,29 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah | Persen | 100 | 100 | 1.592.263.204,00 | 2.395.836.410,00 | 100 | 1.592.263.204,00 | 100 | 1.692.263.204,00 | 100,00 | 2.078.229.751,00 | 100,00 | 130,52 | 86,74 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate | Persen | 100 | 100 | 923.574.000,00 | 1.158.614.444,00 | 100 | 923.574.000,00 | 100 | 1.023.574.000,00 | 100,00 | 1.056.254.189,00 | 100,00 | 114,37 | 91,17 | sangat tinggi |
| Tujuan 4.1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman | Persentase kawasan permukiman layak huni | Persen | 68,84 | 72,28 | 53.382.832.606,00 | 39.862.224.902,00 | 75,9 | 55.882.832.606,00 | 79,69 | 55.982.832.606,00 | 60,25 | 38.087.915.962,00 | 83,36 | 71,35 | 95,55 | Tinggi |
| Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman | Indeks kualitas lingkungan hidup | Angka | 56,08 | 61,83 | 5.606.814.220,00 | 5.516.669.394,00 | 64,92 | 5.606.814.220,00 | 68,17 | 5.606.814.220,00 | 60,25 | 5.464.678.075,00 | 97,44 | 97,46 | 99,06 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN | Persentase Luas RTH Publik | Persen | 11,30 | 11,64 | 4.142.449.675,00 | 4.338.106.749,00 | 11,64 | 4.142.449.675,00 | 11,64 | 4.142.449.675,00 | 14,55 | 4.293.587.462,00 | 125,00 | 103,65 | 98,97 | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|--|---|--------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------|--|------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| HAYATI (KEHATI) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Air/Udara | Nilai | 28,75/8 7,33 | 29,75 87,83 | 403.054.095 ,00 | 266.888.474 ,00 | 30,75 88,33 | 403.054.095 ,00 | 31,75 88,83 | 403.054.095 ,00 | 29,75 87,83 | 263.147.136 ,00 | 100,0 0 100,0 0 | 65,29 | 98,60 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan | Persen | 97,73 | 97,73 | 658.256.355 ,00 | 911.674.171 ,00 | 97,73 | 658.256.355 ,00 | 97,73 | 658.256.355 ,00 | 99,59 | 907.943.477 ,00 | 101,9 0 | 137,9 3 | 99,59 | Sangat tinggi |
| Meningkatnya kemantapan infrastruktur | Indeks Infrastruktur | Angka | 78,26 | 79,04 | 46.656.657. 186,00 | 32.822.266. 628,00 | 79,83 | 49.156.657. 186,00 | 80,63 | 49.256.657. 186,00 | 83,30 | 31.635.501. 887,00 | 105,3 9 | 67,80 | 96,38 | Sangat tinggi |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Jalan Kota dalam kondisi mantap | Persen | 18,33 | 2,43 | 26.424.491. 100,00 | 17.200.526. 580,00 | 2,43 | 28.924.491. 100,00 | 2,43 | 28.924.491. 100,00 | -5,34 | 16.617.678. 818,00 | 101,9 0 | 62,89 | 96,61 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | persentase luas wilayah pertanian yang terlayani irigasi teknis | Persen | 22,74 | 73,01 | 4.731.797.0 00,00 | 3.316.316.0 85,00 | 73,01 | 4.731.797.0 00,00 | 73,01 | 4.831.797.0 00,00 | 94,55 | 3.268.913.8 09,00 | 101,9 0 | 69,08 | 98,57 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase pengembang an perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah | Persen | 98,36 | 100 | 1.527.505.2 00,00 | 1.109.966.3 80,00 | 100 | 1.527.505.2 00,00 | 100 | 1.527.505.2 00,00 | 0,45 | 987.869.793 ,00 | 101,9 0 | 64,67 | 89,00 | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|---|--------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|------------|----------------------|------------|------------|--|------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat | Persen | 90 | 100 | 8.838.166.7 86,00 | 8.279.243.5 12,00 | 100 | 8.838.166.7 86,00 | 100 | 8.838.166.7 86,00 | 90,00 | 8.136.368.4 51,00 | 101,9 0 | 92,06 | 98,27 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Predikat PLID Kota Bima | Nilai | B (83,04) | A | 3.054.062.0 00,00 | 1.467.961.2 00,00 | A | 3.054.062.0 00,00 | A | 3.054.062.0 00,00 | A | 1.409.491.2 00,00 | 100,0 0 | 46,15 | 96,02 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase pemenuhan sistem kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana | Persen | 83,40 | 85 | 2.080.635.1 00,00 | 1.448.252.8 71,00 | 85 | 2.080.635.1 00,00 | 85 | 2.080.635.1 00,00 | 64,25 | 1.215.179.8 16,00 | 101,9 0 | 58,40 | 83,91 | sangat tinggi |
| Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana dan perubahan iklim | Indeks ketahanan daerah | Angka | 74 | 74,74 | 1.119.361.2 00,00 | 1.523.288.8 80,00 | 75,49 | 1.119.361.2 00,00 | 76,24 | 1.119.361.2 00,00 | 60,00 | 987.736.000 ,00 | 80,28 | 88,24 | 64,84 | Tinggi |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat | Persen | 100 | 100 | 139.882.500 ,00 | 392.460.000 ,00 | 100 | 139.882.500 ,00 | 100 | 139.882.500 ,00 | 100,0 0 | 375.080.000 ,00 | 101,9 0 | 268,1 4 | 95,57 | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|--|------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Luas Wilayah yang terlayani kegiatan Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persen | 97 | 100 | 979.478.700 ,00 | 1.130.828.8 80,00 | 100 | 979.478.700 ,00 | 100 | 979.478.700 ,00 | 80,00 | 612.656.000 ,00 | 101,9 0 | 62,55 | 54,18 | sangat tinggi |
| Meningkatnya keamanan dan ketertiban daerah | Indeks Rasa Aman | Angka (skala 1-100) | 87,6 | 88,48 | 26.769.783. 108,00 | 33.224.517. 767,00 | 88,92 | 26.769.783. 108,00 | 89,37 | 26.769.783. 108,00 | 97,60 | 32.467.891. 874,00 | 110,3 1 | 121,2 9 | 97,72 | sangat tinggi |
| Meningkatnya keamanan dan ketertiban | Indeks Rasa Aman | Angka (skala 1-100) | 87,6 | 88,48 | 26.769.783. 108,00 | 33.224.517. 767,00 | 88,92 | 26.769.783. 108,00 | 89,37 | 26.769.783. 108,00 | 97,60 | 32.467.891. 874,00 | 110,3 1 | 121,2 9 | 97,72 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Tingkat penyelesaian keamanan, ketenteraman dan ketertiban (K3) | Persen | 92,50 | 100 | 1.852.724.5 00,00 | 1.520.242.1 00,00 | 100 | 1.852.724.5 00,00 | 100 | 1.852.724.5 00,00 | 37,79 | 1.016.195.8 15,00 | 101,9 0 | 54,85 | 66,84 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Pelayanan Pemerintahan umum | Persen | 100 | 100 | 13.960.400, 00 | | 100 | 13.960.400, 00 | 100 | 13.960.400, 00 | | | | | | sangat tinggi |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Gangguan Kamtibmas yang tertangani | Persen | 98,75* | 91,89 | 190.604.800 ,00 | 265.332.587 ,00 | 91,89 | 190.604.800 ,00 | 91,89 | 190.604.800 ,00 | 100,0 0 | 265.252.165 ,00 | 101,9 0 | 139,1 6 | 99,97 | sangat tinggi |



| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal 2022 | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA | | | | | | REALISASI | | TINGKAT CAPAIAN | | | Skala Nilai Pering kat Kinerja | |
|---|--|--------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|--|------------------|
| | | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2024 | | 2024 | | | |
| | | | | TARGET | RP (000) | DPA | TARGET | RP (000) | TARGET | RP (000) | KINERJA | RP (000) | KINERJA | RP (000) | | DPA |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Kelompok masyarakat yang diberdayakan | Persen | 92 | 93,02 | 21.363.400. 398,00 | 29.601.386. 630,00 | 93,02 | 21.363.400. 398,00 | 93,02 | 21.363.400. 398,00 | 100,0 0 | 29.461.166. 453,00 | 101,9 0 | 137,9 0 | 99,53 | sangat tinggi |
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa | Persen | 91,20 | 70 | 689.446.800 ,00 | 753.215.600 ,00 | 70 | 689.446.800 ,00 | 70 | 689.446.800 ,00 | 100,0 0 | 729.651.561 ,00 | 101,9 0 | 105,8 3 | 96,87 | sangat tinggi |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persen | 92,48 | 80 | 181.184.600 ,00 | 1.084.340.8 50,00 | 80 | 181.184.600 ,00 | 80 | 181.184.600 ,00 | 88,59 | 995.625.880 ,00 | 101,9 0 | 549,5 1 | 91,82 | sangat tinggi |



2.5.3. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.

SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib secara lebih sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM masing-masing sesuai petunjuk Kementerian/Lembaga terkait dan dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah dan wajib melaporkan penerapan SPM, karena hasil penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang SPM, terdapat 6 bidang SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima yaitu:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas)
6. Sosial.

Pelaporan SPM dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi pada laman <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> Menurut evaluasi Kemendagri terhadap laporan realisasi SPM Kota Bima pada aplikasi tersebut, pada tahun 2024 tingkat capaian SPM Kota Bima adalah 91,49% dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 2.111. Tingkat Capaian Menurut Bidang SPM Kota Bima Tahun 2024

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--------|---------|-----------|---------------------|---|--------|---------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | |
| | | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | Indikator | Target | Capaian Mutu |
| SPM Bidang Pendidikan | | TUNTAS MADYA | | | | | | | 80.25% |
| 1 | Pendidikan anak usia dini | Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | Jiwa | 4.206 | 3.155 | 74,75 | Jumlah barang, jasa dan sumberdaya manusia | 80% | 60,01% |
| 2 | Pendidikan dasar | Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Jiwa | 20.848 | 18.700 | 86,77 | | 80% | 71,76% |
| 3 | Pendidikan kesetaraan | Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Jiwa | 2.534 | 1.950 | 79,23 | | 80% | 61,56% |
| SPM Bidang Kesehatan | | TUNTAS MADYA | | | | | | | 84.34% |
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Jiwa | 3.130 | 2.512 | 81,65 | Jumlah barang dan atau jasa, sumberdaya manusia dan tata cara pemenuhan | 20% | 17,44% |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Jiwa | 3.112 | 2.296 | 76,69 | | | 17,67% |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Jiwa | 2.917 | 2.274 | 62,37 | | | 18,11% |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Jiwa | 15.212 | 10.501 | 71,39 | | | 16,17% |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Jiwa | 31.767 | 32.463 | 100,00 | | | 20,00% |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Jiwa | 102.284 | 87.191 | 87,57 | | | 19,38% |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Jiwa | 16.087 | 11.688 | 77,28 | | | 19,16% |



| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--------|--------|-----------|---------------------|----------------------------|--------|--------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | |
| | | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | Indikator | Target | Capaian Mutu |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Jiwa | 8.049 | 7.594 | 95,38 | | | 19,91% |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Jiwa | 3.054 | 3.064 | 100,00 | | | 20,00% |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Jiwa | 425 | 131 | 41,58 | | | 16,93% |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Jumlah warga negara orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Jiwa | 2.857 | 5.182 | 100,00 | | | 20,00% |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) | Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Jiwa | 5.264 | 5.399 | 100,00 | | | 20,00% |
| SPM Bidang Pekerjaan Umum | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jiwa | 1.080 | 1.080 | 80,00 | Jumlah barang dan jasa | 20% | 20% |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic | Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jiwa | 496 | 496 | 80,00 | | | |
| SPM Bidang Perumahan Rakyat | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Jiwa | 0 | 0 | 98,57 | Jumlah barang dan jasa | 100% | 92,86% |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah | Jiwa | 76 | 0 | 100,00 | | 100% | 0,00% |



| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | | |
|---|---|--|--------|---------|-----------|---------------------|--|---------------|--------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | |
| | | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | Indikator | Target | Capaian Mutu |
| | masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota | Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | | | | | | | |
| SPM Bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) | | | | | | | | | |
| TUNTAS UTAMA | | | | | | | | 94.85% | |
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM | | | | | | | | | |
| 94.56% | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (TRANTIBUM) | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota | Jiwa | 100 | 100 | 80,00 | Jumlah Mutu Barang/jasa /Sumber Daya Manusia | 20,00% | 14,56% |
| 2 | Pelayanan informasi rawan bencana (KEBENCANAAN) | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Jiwa | 132.595 | 83.705 | 63,13 | | 69,36% | |
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN | | | | | | | | | |
| 90.00% | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jiwa | 161.577 | 112.180 | 55,54 | | 20,00% | 18,47% |
| 2 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (KEBENCANAAN) | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jiwa | 965 | 995 | 100,00 | | 20,00% | 20,00% |
| 3 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (KEBENCANAAN) | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jiwa | 29.390 | 29.390 | 80,00 | | 20,00% | 16,00% |
| KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR | | | | | | | | | |
| 100,00% | | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (DAMKAR) | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jiwa | 9.619 | 9.619 | 80,00 | | 20,00% | 20,00% |
| SPM Bidang Sosial | | | | | | | | | |
| TUNTAS UTAMA | | | | | | | | 94.75% | |



| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian | | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|-----------|---------------------|--|--------|--------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | | | | | Mutu Minimal Layanan Dasar | | |
| | | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | Indikator | Target | Capaian Mutu |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Jiwa | 519 | 515 | 79,38 | Jumlah Mutu Barang/jasa /Sumber Daya Manusia | 20,00% | 19,38% |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Jiwa | 274 | 274 | 80,00 | | 20,00% | 20,00% |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | Jiwa | 459 | 459 | 80,00 | | 20,00% | 20,00% |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | Jiwa | 50 | 50 | 80,00 | | 20,00% | 20,00% |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | Jiwa | 7.784 | 7.784 | 80,00 | | 20,00% | 20,00% |

Sumber: Data Diolah



2.5.4. Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) Kota Bima Tahun 2024

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Ketujuh belas tujuan TPB tersebut, yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Untuk memudahkan pelaksanaan, 17 Tujuan TPB dikelompokkan ke dalam empat pilar, yaitu 1) Pilar pembangunan sosial meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5; 2) Pilar pembangunan ekonomi meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17; 3) Pilar pembangunan lingkungan, meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15, serta 4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola meliputi Tujuan 16.

Pelaksanaan TPB di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat tujuan TPB, yaitu untuk 1) menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; 2) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; 3) menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan 4) terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Prinsip-prinsip TPB/SDGs diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. Prinsip pertama adalah *universality*, yaitu mendorong penerapan TPB/SDGs di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah *integration*, yang mengandung makna terintegrasinya dan saling keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Prinsip ketiga



adalah “*No One Left Behind*” atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal” yang menjamin bahwa pelaksanaan TPB/SDGs harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan TPB/SDGs dilaksanakan secara inklusif melalui gerakan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, antara lain ormas, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi.

Komitmen pencapaian TPB melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga nonpemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah hingga desa. Komitmen pelaksanaan di tingkat nasional dilaksanakan melalui penyusunan Peta Jalan TPB 2030, Metadata Indikator TPB, Rencana Aksi Nasional (RAN), laporan tahunan, dan laporan kepada PBB yang disampaikan melalui *Voluntary National Review* (VNR). Sementara itu, komitmen pelaksanaan TPB di tingkat daerah terwujud dengan Rencana Aksi Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan untuk keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah terwujud melalui SDGs Center/Network/Hub di perguruan tinggi, serta perusahaan/asosiasi yang memiliki program/kegiatan berdasarkan empat pilar utama. Pelaksanaan TPB memerlukan pembiayaan dan investasi yang memadai. Strategi pendanaan TPB tidak dapat hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas pada sumber-sumber lain yang inovatif. Potensi pendanaan inovatif dapat berasal antara lain dari pelaku usaha, filantropi, dan potensi keuangan global (*global finance*).

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, antara lain adalah pemutakhiran sasaran nasional TPB serta memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam implementasi TPB di tingkat daerah, serta mendorong skema pembiayaan inovatif untuk pelaksanaan TPB. Penyesuaian dalam Rencana Aksi Nasional TPB maupun Peta Jalan TPB perlu dilakukan untuk mengakselerasi pencapaian TPB mengingat adanya dampak Pandemi Covid-19. Penguatan sinergi antara pihak pemerintah dan nonpemerintah, termasuk dari sisi pembiayaan, diperlukan demi mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada tahun 2024, sebanyak 20 Perangkat Daerah menjadi pengampu TPB dengan capaian kinerja sebagai berikut.



Tabel 2.112. Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Bima Tahun 2022-2024

| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|---|---------------|---|-----------------|--------|-------|-------|-----------|--------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | sosial | - | - | - | 8,8 | 8,67 | 8,12 |
| | | 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | kesehatan | 100 | 100 | 100 | 99,72 | 105,66 | 99,46 |
| | | 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | tenaga kerja | 4,7 | 5,4 | 6 | 4,07 | 4,6 | 5,4 |
| | | 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | sosial | 128 | 176 | 368 | 128 | 176 | 368 |
| | | 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | sosial | 9.432 | 8.584 | 8.173 | 9.432 | 8.584 | 8.173 |
| | | 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 thn yg proses melahirkan terakhirnya di faskes | kesehatan | 90 | 90 | 90 | 89,2 | 78,52 | 73,8 |
| | | 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. | kesehatan | 95 | 100 | 100 | 94,00 | 76,6 | 98 |
| | | 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | kesehatan, PPKB | 80 | 80 | 80 | 88,79 | 91,81 | 81,58 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|--|---|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | pekerjaan umum & penataan ruang | 85,03 | 87,53 | 90,03 | 92,25 | 95,01 | 96,26 |
| | | 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | pekerjaan umum & penataan ruang | 91,69 | 94,61 | 95,86 | 91,68 | 93,07 | 98,67 |
| | | 1.4.1.(f) | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. | perumahan rakyat & kawasan permukiman | 90,34 | 89,05 | 87,18 | 92,47 | 91,01 | 80,99 |
| | | 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. | pendidikan | 85 | 88 | 97 | 88,81 | 90,08 | 98,39 |
| | | 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. | pendidikan | 100 | 100 | | 72,69 | 71,04 | 108,33 |
| | | 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. | administrasi kependudukan & catatan sipil | - | - | - | 98,56 | 98,83 | 98,98 |
| | | 1.4.1.(k) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. | energi & sumber daya mineral | | | | 100 | 100 | - |
| | | | | | | | | 94,9 | 97,2 | - |
| | | | | | | | | 5,1 | 2,48 | - |
| | | 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | ketenteraman, ketertiban | - | - | - | 49.429 | 41.872,30 | 18.189,47 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | umum, & perlindungan masyarakat | | | | | | |
| | | 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 0 Kawasan |
| | | 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | sosial, trantiblinmas | 1.213 | 1.111 | 530 | 1.213 | 1.111 | 530 |
| | | 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | sosial | 20 | 10 | 35 | 12 | 10 | 0 |
| | | 1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) | pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.5.1.(e) | Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | - | - | - | 92,23 | 92 | 91,74 |
| | | 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | - | - | - | 1.425.000.000 | 5.289.857.000 | 3.528.500.000 |
| | | 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | ketenteraman, ketertiban umum, & | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 4 Dokumen |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|---|---------------|---|-------------------------|-------------|------|------|-------------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | perlindungan masyarakat | | | | | | |
| | | 1.a.1* | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. | sosial | 100 | 100 | 100 | 98,15 | 97,74 | 94,15 |
| | | 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | sosial | 970.839.409 | | | 345.421.761 | | |
| 2 | Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan | 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | pangan | - | - | - | 1,44 | 1,19 | 1,52 |
| | | 2.1.1.(a) | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | kesehatan | 15 | 15 | 15 | 14,41 | 15,31 | 16,95 |
| | | 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | pangan | - | - | - | - | - | - |
| | | 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. | pangan | - | - | - | - | - | - |
| | | 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | kesehatan | 18,4 | 16 | 14 | 13,7 | 11,32 | 10,17 |
| | | 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. | kesehatan | 18,4 | 16 | 14 | 5,1 | 9,02 | 7,94 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|--|---------------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | kesehatan | 7,5 | 7,3 | 7 | 8,65 | 8,87 | 9,44 |
| | | 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil. | kesehatan | 28 | 28 | 28 | 5,57 | 6,02 | 9,28 |
| | | 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | kesehatan | 50 | 55 | 60 | 24,4 | 41,25 | 61,8 |
| | | 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | pangan | - | - | - | 79,8 PPH 26,8 Ikan (Kg/th/ka pita) | 80,8 PPH 24,1 Ikan (Kg/th/ka pita) | 88,7 PPH 29 Ikan (Kg/th/ka pita) |
| | | 2.3.1* | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). | tenaga kerja | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | kesehatan | 305/ 100000 KH | 305/ 100000 KH | 305/ 100000 KH | 98/ 100000 KH | 177/ 100000 KH | 86/ 100000 KH |
| | | 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | kesehatan | 90 | 90 | 90 | 89,41 | 81,24 | 74,45 |
| | | 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | kesehatan | 90 | 90 | 90 | 89,2 | 78,52 | 73,8 |
| | | 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | kesehatan | 32 | 32 | 32 | 6 | 8 | 11 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|--|--------------|--------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | kesehatan | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 |
| | | 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | kesehatan | 24 | 24 | 24 | 5 | 7 | 11 |
| | | 3.2.2.(b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | kesehatan | 80 | 80 | 80 | 92,6 | 61 | 82,9 |
| | | 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | kesehatan | 4.340 | 4.446 | 4.941 | 98 | 100 | 102 |
| | | 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | kesehatan | 688 | 752 | 529 | 450 | 405 | 354 |
| | | 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | kesehatan | <1% | <1% | <1% | 0,08% | 0,02% | 0,07% |
| | | 3.3.3.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. | kesehatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 3.3.4.(a) | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | kesehatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 3.3.5* | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.3.5.(a) | Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. | kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.3.5.(b) | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). | kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|--|----------------|--------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | keehatan | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 7,3 | 7,9 | 8,2 |
| | | 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | keehatan | 100 | 100 | 100 | 75,8 | 66,4 | 97,8 |
| | | 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | keehatan | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 12,5 | 10,6 | 10,2 |
| | | 3.4.2* | Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. | keehatan | 9513 | 9741 | | 7126 | | |
| | | 3.4.2.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. | keehatan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | 3.5.1.(e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba. | keehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.5.2* | Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. | keehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | keehatan, PPKB | 62,05 | 62,05 | 58,10 | 57,50 | 56,90 | 62,50 |
| | | 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 thn yang berstatus kawin. | keehatan, PPKB | 80 | 80 | 80 | 88,79 | 91,81 | 81,58 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. | kesehatan, PPKB | 50,00 | 50,00 | 38,70 | 38,34 | 45,70 | 53,30 |
| | | 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | kesehatan, PPKB | 37/1000 | 37/1000 | 36/1000 | 37,18/1000 | 22,2/1000 | 37,62/1000 |
| | | 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR). | kesehatan, PPKB | 2,27 | 2,20 | 2,00 | 2,69 | 2,29 | 2,37 |
| | | 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan. | kesehatan | | | | | | |
| | | 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | kesehatan | | | | 155.636 | 168.221 | 162.936 |
| | | 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | kesehatan | 100 | 100 | 100 | 99,72 | 105,66 | 99,46 |
| | | 3.9.3.(a) | Proporsi kematian akibat keracunan. | kesehatan | | | | | | |
| | | 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. | kesehatan | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 16,2 | 19,35 | 18,7 |
| | | 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | kesehatan | 80 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| | | 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | kesehatan | | | | 4/1000 | 4/1000 | 5/1000 |
| 4 | Menjamin Kualitas | 4.1.1* | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) | pendidikan | (a. 70) (b. 70) | (a. 80) (b. 80) | (a. 90) (b. 90) | (a. 100) (b. 100) | (a. 100) (b. 100) | (a. 100) (b. 100) |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|-----------|---|--|--|--------------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | | tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. | | (c. 70) | (c. 80) | (c. 90) | (c. 100) | (c. 100) | (c. 100) |
| 4.1.1.(a) | | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | pendidikan | 63 | 63 | 63 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | |
| 4.1.1.(b) | | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | pendidikan | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | |
| 4.1.1.(d) | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. | pendidikan | 100 | 100 | 96 | 102,46 | 102,34 | 98,39 | |
| 4.1.1.(e) | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. | pendidikan | 100 | 100 | 62 | 109,18 | 107,24 | 64,78 | |
| 4.1.1.(g) | | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun. | pendidikan | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 8,17 | 8,29 | 0,0 | |
| 4.2.2.(a) | | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | pendidikan | 82 | 80 | 78 | 84,2 | 78,35 | 80,76 | |
| 4.4.1* | | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | tenaga kerja | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|--|--------------|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | pendidikan | (1. 92) (2. 98) (3. 0) (4. 0) | (1. 94) (2. 99) (3. 0) (4. 0) | (1. 95) (2. 100) (3. 0) (4. 0) | (1. 94,52) (2. 104,33) (3. 0) (4. 0) | (1. 96,52) (2. 106,74) (3. 0) (4. 0) | (1. 98,39) (2. 108,33) (3. 0) (4. 0) |
| | | 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | pendidikan | 30 | 29 | 28 | 31,4 | 30,4 | 27,4 |
| | | 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | pendidikan | 84 | 81 | 74 | 85,14 | 80,14 | 75,14 |
| | | 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)). | pendidikan | (a. 80) (b. 78) (c. 40) (d. 0) (e. 68) (f. 49) (g. 68) | (a. 95) (b. 95) (c. 55) (d. 0) (e. 78) (f. 57) (g. 84) | (a. 95) (b. 83) (c. 55) (d. 0) (e. 78) (f. 57) (g. 73) | (a. 100) (b. 80) (c. 50) (d. 0) (e. 70) (f. 50) (g. 70) | (a. 100) (b. 85) (c. 60) (d. 0) (e. 80) (f. 60) (g. 75) | (a. 100) (b. 98) (c. 60) (d. 0) (e. 80) (f. 60) (g. 85) |
| | | 4.c.1* | Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. | pendidikan | - | - | - | 110 | 119 | 121,19 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|--|---------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5 | Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan | 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | pemberdayaan perempuan & perlindungan anak | 1 Program | 1 Program | 1 Program | 1 Program | 1 Program | 1 Program |
| | | 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | pemberdayaan perempuan & perlindungan anak | 58 Kasus | 56 Kasus | 53 Kasus | 0,0006 | 0,00043 | 0,00037 |
| | | 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | pemberdayaan perempuan & perlindungan anak | 39 Kasus | 46 Kasus | 58 Kasus | 0,00112 | 0,00105 | 0,00088 |
| | | 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | pemberdayaan perempuan & perlindungan | 58 Kasus | 56 Kasus | 53 Kasus | 0,00016 | 0,00004 | 0,00005 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|--|--|---------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | anak | | | | | | |
| | | 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | pemberdayaan perempuan & perlindungan anak | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 thn & sebelum umur 18 thn. | pemberdayaan perempuan & perlindungan anak | 0,005 | 0,005 | 609 orang | 0,008 | 0,006 | 0,045 |
| | | 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | pemberdayaan perempuan & perlindungan anak | 28 | 28 | 246 orang | 27 | 27 | 0,004 |
| | | 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | PPKB | 37/1000 | 37/1000 | 36/1000 | 37,18/1000 | 22,2/1000 | 37,62/1000 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|--|--|--------|-------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | pemberdayaan perempuan & perlindungan anak | 30 | 30 | 30 | 20% pada DPRD Kota Bima | 16% pada DPRD Kota Bima | 24% pada DPRD Kota Bima |
| | | 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | pemberdayaan perempuan & perlindungan anak | 30 | 30 | 30 | 8,33 | 5,56 | 8,33 |
| | | 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, | pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, PPKB | 0,001 | 0,001 | | 0,003 | 0,001 | |
| | | 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | kesehatan, PPKB | 12,00 | 10,00 | 9,90 | 11,20 | 9,10 | 9,20 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|--|---------------|--|---------------------------------|--------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | kesehatan, PPKB | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | | 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | komunikasi & informatika | 90 | 95 | 97 | 90 | 95 | 97 |
| 6 | Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan | 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | pekerjaan umum & penataan ruang | 85,03 | 87,53 | 90,03 | 92,25 | 95,01 | 96,26 |
| | | 6.1.1.(b) | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. | pekerjaan umum & penataan ruang | 291 | 293 | 295 | 291,9 | 293,9 | 293,9 |
| | | 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | pekerjaan umum & penataan ruang | 32,00 | 33,00 | 33,75 | 32,21 | 33,51 | 33,83 |
| | | 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. | pekerjaan umum & penataan | | | | 66,57 | | |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | ruang | | | | | | |
| | | 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | pekerjaan umum & penataan ruang | 91,69 | 94,61 | 95,86 | 91,68 | 93,07 | 98,67 |
| | | 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | pekerjaan umum & penataan ruang | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | | 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop B A B Sembarangan (SBS). | pekerjaan umum & penataan ruang | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | | 6.2.1.(e) | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. | pekerjaan umum & penataan ruang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 6.2.1.(f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. | pekerjaan umum & penataan | 4 | 4,16 | 4,2 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|---|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | ruang | | | | | | |
| | | 6.3.1.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). | pekerjaan umum & penataan ruang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 6.3.1.(b) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. | pekerjaan umum & penataan ruang | - | 0,39 | 0,46 | - | 0,37 | 0,34 |
| | | 6.3.2.(a) | Kualitas air danau. | lingkungan hidup | - | - | - | - | - | - |
| | | 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | lingkungan hidup | 30 | 40 | 41 | 28,75 | 38,24 | 38,5 |
| | | 6.4.1.(b) | Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. | lingkungan hidup | 5 Pokmas | 5 Pokmas | 5 Pokmas | 3 Pokmas/ Tahun | 3 Pokmas/ Tahun | 3 Pokmas/ Tahun |
| | | 6.5.1.(a) | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | kehutanan | - | - | - | - | - | - |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|--|---------------|---|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 6.5.1.(c) | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | pekerjaan umum & penataan ruang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 6.5.1.(f) | Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. | kehutanan | 1.000 | 1.000 | 500 | 1.071 | 1.162 | 417 |
| | | 6.5.1.(g) | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. | lingkungan hidup | 5 Pokmas | 5 Pokmas | 5 Pokmas | 3 Pokmas/ Tahun | 3 Pokmas/ Tahun | 3 Pokmas/ Tahun |
| 7 | Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua | 7.2.1* | Bauran energi terbarukan. | energi & sumber daya mineral | - | - | - | - | - | - |
| | | 7.3.1* | Intensitas energi primer. | energi & sumber daya mineral | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan | 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | statistik | - | - | - | 1,24 | 3,69* | 2,61** |
| | | 8.1.1.(a) | PDB per kapita. | statistik | - | - | - | 28.751.80 0,00 | 30.901.45 0,00 | 32.478.73 0,00 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|---|---------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. | tenaga kerja | 4 | 5 | 31 juta | -2,87 | 8,62 | 31 juta |
| | | 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. | tenaga kerja | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | 17 |
| | | 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal. | tenaga kerja | 35 | 36 | - | 35,28 | 35,99 | - |
| | | 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. | tenaga kerja | 11 | 11 | - | 11,3 | 11,13 | - |
| | | 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | koperasi, usaha kecil, & menengah | 2,75 | 2,5 | 2,25 | 1,87 | 2,13 | 1,55 |
| | | 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja. | tenaga kerja | 11.325,00 | 12.125,15 | 13.000,00 | 11.325,00 | 12.500,49 | 13.000,00 |
| | | 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | tenaga kerja | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,73 | 3,57 | 3,27 |
| | | 8.5.2.(a) | Tingkat setengah pengangguran. | tenaga kerja | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,78 | 1,86 | 1,78 |
| | | 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | tenaga kerja | - | - | - | - | - | - |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|--|---------------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. | pariwisata | - | - | - | - | - | - |
| | | 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara. | pariwisata | 200 | 250 | 275 | 194 | 564 | 1.345 |
| | | 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | pariwisata | 52.731 | 60.200 | 66.500 | 112.170 | 128.240 | 135.200 |
| | | 8.9.1.(c) | Jumlah devisa sektor pariwisata. | pariwisata | - | - | - | - | - | - |
| | | 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | tenaga kerja | 120 | 125 | 130 | 100 | 110 | 117 |
| | | 8.10.1* | Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa | penanaman modal | - | - | - | - | - | - |
| | | 8.10.1.(a) | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). | penanaman modal | - | - | - | - | - | - |
| | | 8.10.1.(b) | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | koperasi, usaha kecil, & menengah | 40 | 50,5 | 65,15 | 37 | 40 | 80 |
| 9 | Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif | 9.1.1.(b) | Panjang pembangunan jalan tol. | perhubungan | - | - | - | - | - | - |
| | | 9.1.1.(c) | Panjang jalur kereta api. | perhubungan | - | - | - | - | - | - |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|--|---------------|---|---------------|--------|------|-------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi | 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan. | perhubungan | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis. | perhubungan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. | perindustrian | 26,35 | 26,5 | 26,65 | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
| | | 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | perindustrian | 3,26 | 5,32 | 8,59 | 2,26 | 8,13 | 11,54 |
| | | 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | tenaga kerja | - | - | - | 16,44 | 21,33 | - |
| | | 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. | perindustrian | 5,36 | 6,25 | 7,85 | 7,5 | 6,86 | 13,09 |
| | | 9.3.2* | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. | perindustrian | - | - | - | - | - | - |
| | | 9.5.1* | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. | pendidikan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | | 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | komunikasi & | 80 | 90 | 95 | 80 | 90 | 95 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|---|---------------|---|---|--------|------|------|-----------|-------|------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | informatika | | | | | | |
| | | 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | komunikasi & informatika | 90 | 93 | 95 | 90 | 93 | 95 |
| | | 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan internet | komunikasi & informatika | 85 | 93 | 95 | 85 | 93 | 95 |
| 10 | Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara | 10.1.1* | Koefisien Gini. | sosial | - | - | - | 0,429 | 0,411 | |
| | | 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | sosial | - | - | - | 8,8 | 8,67 | 8,12 |
| | | 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | sosial | - | - | - | - | - | - |
| | | 10.3.1.(a) | Indeks Kebebasan Sipil. | Bakesbang | - | - | - | - | - | - |
| | | 10.3.1.(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan | - | - | - | - | - | - |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|------------|--|---|--|---------------------------------------|--------|------|------|-----------|------|------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | masyarakat | | | | | | |
| | | 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | tenaga kerja | 4,7 | 5,4 | 6 | 4,07 | 4,6 | 5,4 |
| 11 | Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | 11.1.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | perumahan rakyat & kawasan permukiman | 142 | 113 | 125 | 164 | 139 | 134 |
| 11.1.1.(b) | | Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). | pekerjaan umum & penataan ruang | - | - | - | - | - | - | |
| 11.1.1.(c) | | Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP. | pekerjaan umum & penataan ruang | - | - | - | - | - | - | |
| 11.2.1.(a) | | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | perhubungan | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | |
| 11.2.1.(b) | | Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar. | perhubungan | - | - | - | - | - | - | |
| 11.3.1.(a) | | Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus | pekerjaan umum & | - | - | - | - | - | - | |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|---|--|--------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama. | penataan ruang | | | | | | |
| | | 11.3.1.(b) | Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). | pekerjaan umum & | - | - | - | - | - | - |
| | | 11.3.2.(a) | Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. | pekerjaan umum & penataan ruang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 11.4.1.(a) | Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. | pekerjaan umum & penataan ruang | - | - | - | - | - | - |
| | | 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | - | - | - | 49.429 | 41.872,30 | 18.189,47 |
| | | 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | - | - | 91 | 92,23 | 92 | 91,74 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|--|--|--------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 11.5.1.(b) | Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | | | | | | |
| | | | 11.5.1.(b) Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk | | 38 | 40 | 41 | 37 | 38 | 37 |
| | | 11.5.1.(c) | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | - | - | - | 1.425.000.000 | 5.289.857.000 | 3.528.500.000 |
| | | 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | lingkungan hidup | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 |
| | | 11.6.1.(b) | Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. | lingkungan hidup | - | - | - | - | - | - |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|--|---------------|--|--|--------|------|------|-----------|------|------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 11.7.1.(a) | Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. | pekerjaan umum & penataan ruang | - | - | - | - | - | - |
| | | 11.b.1* | Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | 25 | 37,5 | 50 | 25 | 37,5 | 50 |
| | | 11.b.2* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan | 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | lingkungan hidup | 10 | 10 | 15 | 5 | 5,05 | 5,5 |
| | | 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | lingkungan hidup | 26 | 27 | 28 | 4 | 4,48 | 5 |
| | | 12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | lingkungan hidup | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 12 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|---|---------------|--|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 12.7.1.(a) | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. | lingkungan hidup | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | 12.8.1.(a) | Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. | lingkungan hidup | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya | 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| | | 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | - | - | - | 49.429 | 41.872,30 | 18.189,47 |
| 15 | Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan | 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | kehutanan | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.674,00 | 4.882,00 | 4.250,60 |
| | | 15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | lingkungan hidup | 8471,64 | 8471,64 | 8471,64 | 2 | 2 | 2 |
| | | 15.6.1* | Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian | lingkungan hidup | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|--|---------------|--|--|--------|------|------|-----------|------|------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati | | keuntungan yang adil dan merata. | | | | | | | |
| | | 15.9.1.(a) | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | lingkungan hidup | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan | 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| | | 16.1.2.(a) | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| | | 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan | ketenteraman, ketertiban | 0 | 0 | - | 53 | 82 | - |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|--|--|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Inklusif di Semua Tingkatan | | terakhir. | umum, & perlindungan masyarakat | | | | | | |
| | | 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | pemberdayaan perempuan & perlindungan anak | 39 Kasus | 46 Kasus | 58 Kasus | 0,00101 | 0,00024 | 0,00018 |
| | | 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | pemberdayaan perempuan & perlindungan anak | 39 Kasus | 46 Kasus | 58 Kasus | 0,00120 | 0,00073 | 0,00050 |
| | | 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami | pemberdayaan perempuan | 0 | 0 | 0 | - | - | - |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|--|---------------------|--------|------|------|-----------|-------|---------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | kekerasan seksual sebelum umur 18 Thn. | & perlindungan anak | | | | | | |
| | | 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). | statistik | 4,06 | 4,09 | 4,14 | 3,93 | 3,92 | 3,85 |
| | | 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | Keuangan | 100 | 100 | 100 | 92,94 | 72,93 | 96,24 |
| | | 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemda (Provinsi/Kab./Kota). | Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Keuangan | | | | B | B | Indeks SAKIP (67,1) |
| | | 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. | Keuangan | - | - | - | - | - | - |
| | | 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Keuangan | | | | CC | CC | Indeks RB (72,89) |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|--|--|--------|------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 16.6.2.(a) | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Balitbang Daerah | | | | 82,11 (B) | 85,9 (B) | 90,22 (A) |
| | | 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | pemberdayaan perempuan & perlindungan anak | 30 | 30 | 30 | 20% pada DPRD Kota Bima | 16% pada DPRD Kota Bima | 24% pada DPRD Kota Bima |
| | | 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan dilembaga eksekutif (Eselon I & II) | pemberdayaan perempuan & perlindungan anak | 30 | 30 | 30 | 8,33 | 5,56 | 8,33 |
| | | 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | administrasi kependudukan & catatan sipil | - | - | - | 98,96 | 99,22 | 99,28 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|---|--|--------|-------|--------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. | administrasi kependudukan & catatan sipil | - | - | | 91,65 | 91,90 | 94,70 |
| | | 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | administrasi kependudukan & catatan sipil | - | - | - | 98,56 | 98,83 | 98,98 |
| | | 16.10.2.(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | komunikasi & informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | Menguatkan Sarana | 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | Keuangan | 26,04 | 25,59 | 27,,70 | 26,7 | 24,36 | 27,24 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|---|---------------|--|--------------------------|--------|-------|------|-----------|-------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan | 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | Keuangan | 0,81 | 0,78 | 0,78 | 0,71 | 0,73 | 0,7 |
| | | 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | Keuangan | 33,08 | 35,68 | 36 | 35,08 | 30,8 | 38,53 |
| | | 17.6.2.(b) | Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. | komunikasi & informatika | 90 | 95 | 97 | 90 | 95 | 97 |
| | | 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | komunikasi & informatika | 93 | 96 | 97 | 93 | 96 | 97 |
| | | 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet. | komunikasi & informatika | 85 | 93 | 95 | 85 | 93 | 95 |
| | | 17.17.1.(a) | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | Keuangan | - | - | - | - | - | - |
| | | 17.17.1.(b) | Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | Keuangan | - | - | - | - | - | - |
| | | 17.18.1.(a) | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data | statistik | - | - | - | 100 | 91,55 | 100 |



| NO. TPB | TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | NO. INDIKATOR | INDIKATOR TPB | JENIS URUSAN | TARGET | | | REALISASI | | |
|---------|----------------------------------|---------------|---|--------------|--------|------|------|-----------|--------|--------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | statistik. | | | | | | | |
| | | 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | statistik | - | - | - | 100 | - | - |
| | | 17.18.1.(c) | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). | statistik | - | - | - | 10 | 6 | 8 |
| | | 17.18.1.(d) | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. | Perencanaan | | | | 72,07 | | |
| | | 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | statistik | - | - | - | - | - | - |
| | | 17.19.2.(c) | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | statistik | - | - | - | 11.685 | 19.905 | 20.531 |
| | | 17.19.2.(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | statistik | - | - | - | 100 | 93,55 | 100 |

Sumber: Hasil Analisis



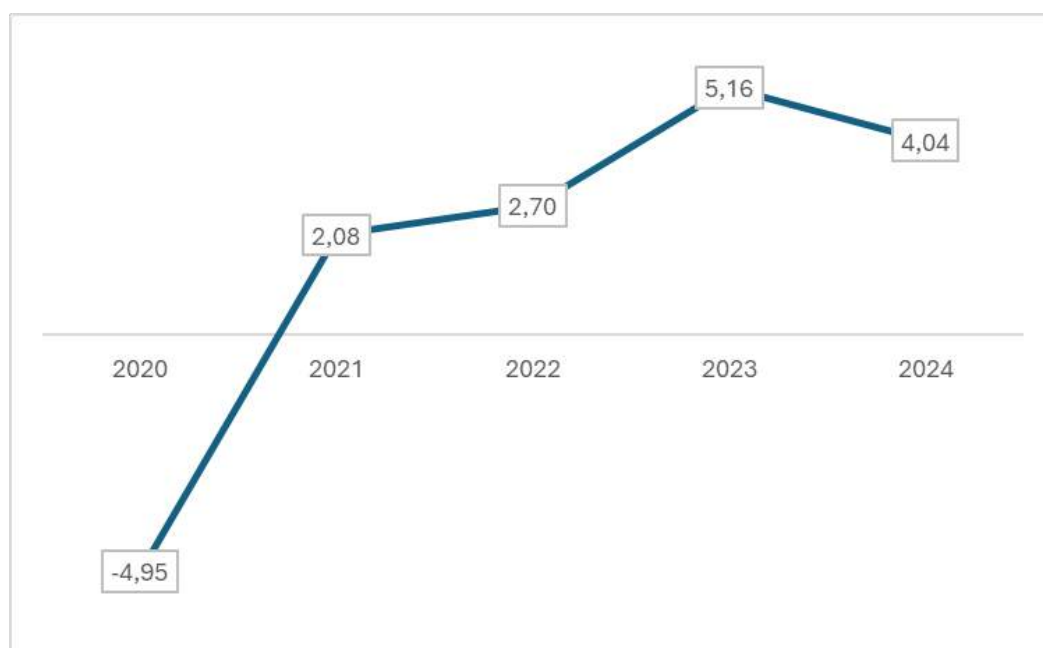
2.6. Gambaran Keuangan Daerah

2.6.1. Indikator Makro Ekonomi

2.6.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Terjadinya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek termasuk ekonomi secara global telah membuat pertumbuhan ekonomi Kota Bima berkontraksi di angka -4,95 persen di tahun 2020 dari angka 5,15 persen pada tahun 2019. Berbagai upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan beriringan dengan penanganan pandemi Covid-19 telah membawa perbaikan sehingga Kota Bima mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedikit meningkat sebesar 2,08 persen pada tahun 2021. Pemulihan ekonomi yang terus berlanjut membawa ekonomi Kota Bima terus tumbuh sebesar 2,70 persen di tahun 2022 hingga mencapai 4,04 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima dapat dilihat pada gambar ini.

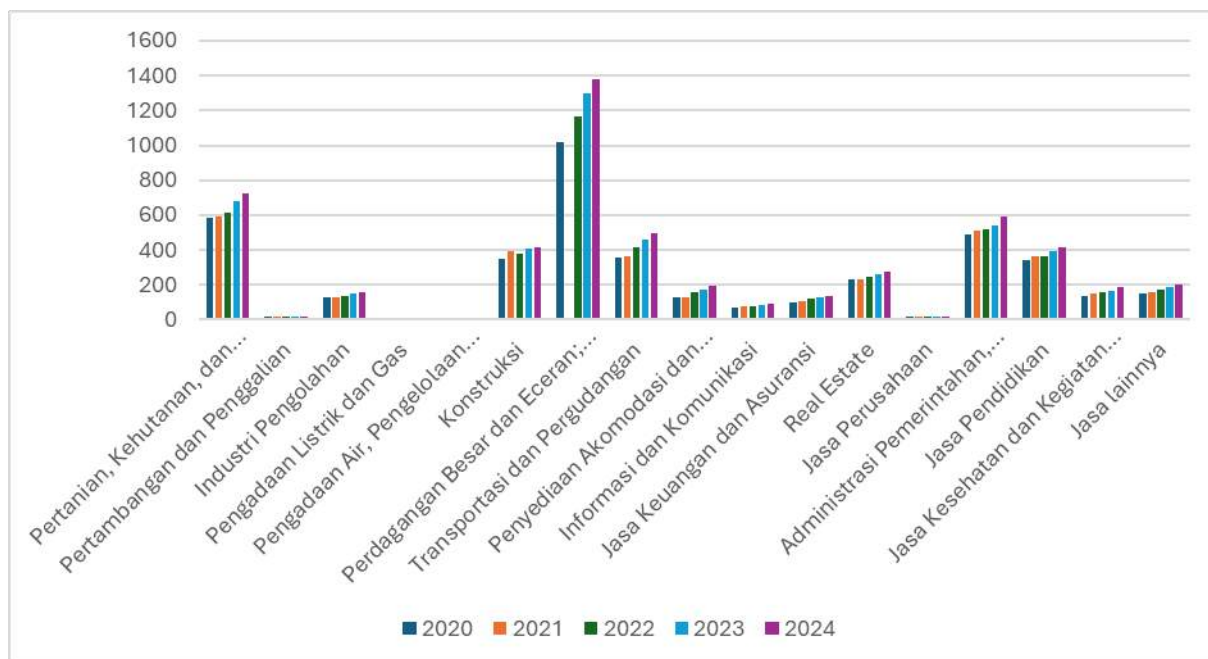
Gambar 2.45. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima Tahun 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024



Gambar 2.46. PDRB adhb Tahun 2020-2024



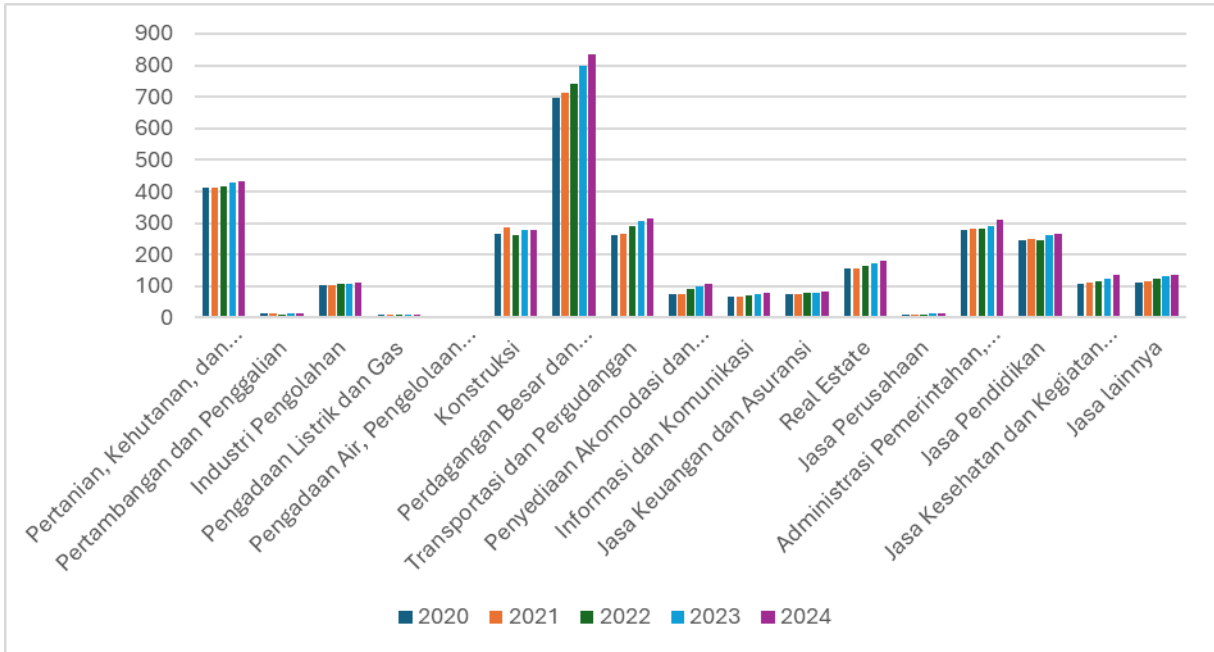
Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima hingga tahun 2020 setiap tahun mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Bima mengalami peningkatan, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan PDRB Kota Bima adalah pencapaian PAD sesuai target dan pengendalian belanja daerah yang berdampak hampir di semua sektor lapangan usaha dan mengalami peningkatan. Seiring dengan pemulihan ekonomi, nilai PDRB Kota Bima pun mengalami peningkatan.

Apabila dilihat dari nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga konstan, pada tahun 2023 mencapai 3.302,30 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 128,21 miliar rupiah (4,04%) dari nilai PDRB tahun 2022 yaitu sebesar 3.174,09 miliar rupiah.

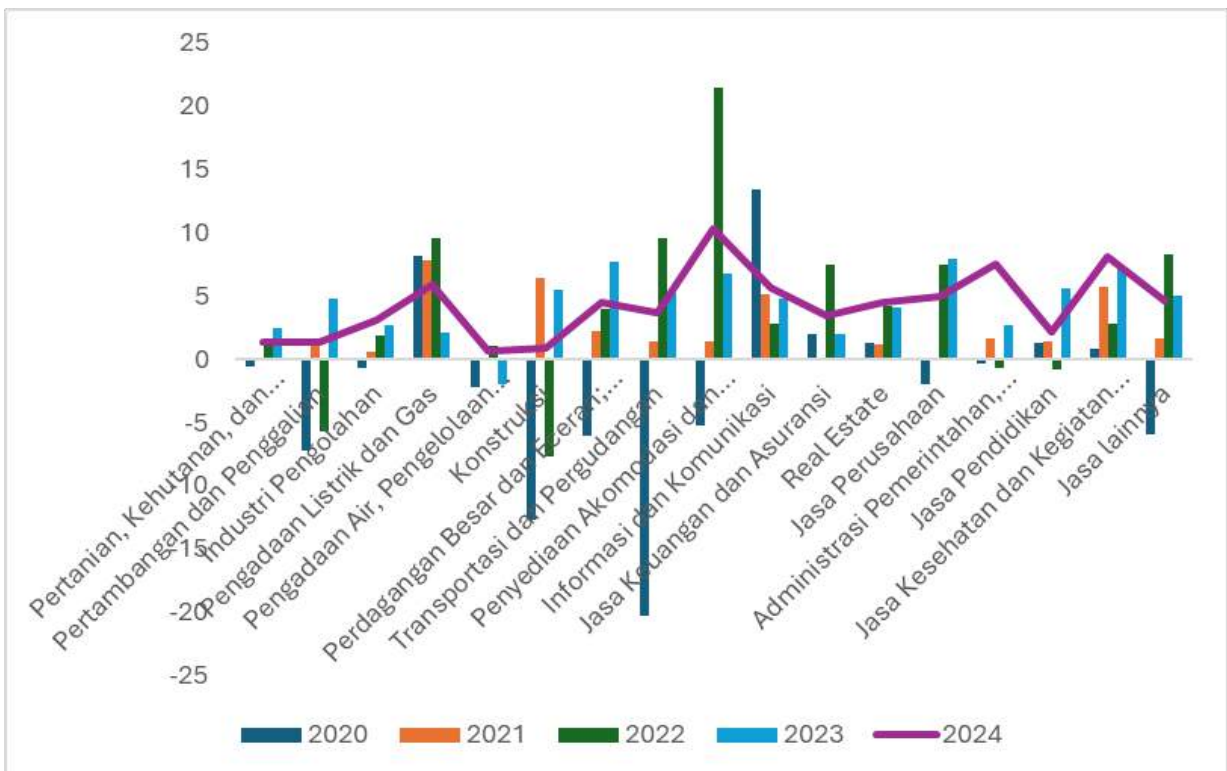


Gambar 2.47. PDRB adhk Tahun 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024

Gambar 2.48. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024



Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan kenaikan PDRB Per Kapita, berdasarkan hasil Susenas Maret 2023, pengeluaran masyarakat terbesar tercatat ada di kelompok Perumahan dan fasilitas rumah tangga, makanan dan minuman jadi serta aneka komoditas dan jasa. Selain itu, pada tahun 2023 penduduk Kota Bima secara rata-rata mengalami penurunan pengeluaran baik untuk barang bukan makanan, dari yang semula Rp. 729.817 di tahun 2022 menjadi 632.595 pada 2023. Kondisi ini menyebabkan secara total, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat turun menjadi 1.309.508 di tahun 2023 dari yang semula 1.434.157 di tahun 2022.

Oleh karena itu, lebih dari separuh penduduk Kota Bima di tahun 2023 mengalami penurunan yang termasuk pada golongan pengeluaran kurang dari Rp. 1.000.000. meskipun demikian, penduduk Kota Bima paling banyak berada pada kelompok dengan pengeluaran lebih dari Rp.1.499.999 yaitu sejumlah 28,20 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan ekonomi, PRDB Kota Bima di proyeksikan sampai dengan tahun 2031 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.113. Proyeksi PDRB Kota Bima Tahun 2025-2031

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nilai (Miliar Rp) | | | | | | | | |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 707 | 765 | 829 | 881 | 939 | 1.001 | 1.075 | 1.151 |
| Pertambangan dan Penggalian | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 |
| Industri Pengolahan | 154 | 166 | 180 | 194 | 209 | 225 | 245 | 267 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Konstruksi | 436 | 488 | 547 | 605 | 672 | 746 | 841 | 946 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.411 | 1.647 | 1.923 | 2.189 | 2.497 | 2.843 | 3.285 | 3.774 |
| Transportasi dan Pergudangan | 482 | 531 | 586 | 637 | 694 | 757 | 834 | 918 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 184 | 204 | 227 | 247 | 271 | 297 | 330 | 365 |
| Informasi dan Komunikasi | 90 | 97 | 105 | 112 | 121 | 131 | 143 | 156 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 135 | 148 | 161 | 173 | 186 | 201 | 218 | 237 |
| Real Estate | 271 | 293 | 318 | 341 | 367 | 395 | 429 | 466 |
| Jasa Perusahaan | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 37 | 41 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 559 | 600 | 644 | 676 | 710 | 747 | 790 | 832 |



| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Jasa Pendidikan | 410 | 449 | 492 | 530 | 573 | 619 | 676 | 736 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 176 | 192 | 209 | 225 | 243 | 262 | 286 | 312 |
| Jasa lainnya | 193 | 209 | 227 | 243 | 261 | 281 | 304 | 329 |
| PDRB | 5.258 | 5.844 | 6.509 | 7.121 | 7.815 | 8.581 | 9.542 | 10.582 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024

Sektor perdagangan masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kota Bima sampai pada tahun 2031, sementara sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua. Dengan rata-rata pertumbuhan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.114. Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Tahun 2024-2031

| Pertumbuhan | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3,6 | 8,3 | 8,3 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 7,4 | 7,1 |
| Pertambangan dan Penggalian | 4,5 | 9,6 | 9,7 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 9,3 | 8,9 |
| Industri Pengolahan | 4,3 | 8,3 | 8,5 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 8,9 | 8,8 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 3,5 | 7,7 | 7,8 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 7,2 | 6,9 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 3,4 | 7,7 | 7,7 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 7,0 | 6,7 |
| Konstruksi | 6,2 | 11,8 | 12,1 | 10,6 | 11,0 | 11,1 | 12,7 | 12,6 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8,6 | 16,8 | 16,7 | 13,9 | 14,1 | 13,8 | 15,6 | 14,9 |
| Transportasi dan Pergudangan | 5,0 | 10,2 | 10,4 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 10,3 | 10,0 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 5,4 | 10,8 | 11,0 | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 11,0 | 10,8 |
| Informasi dan Komunikasi | 4,5 | 7,7 | 8,1 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 9,1 | 9,1 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,3 | 9,0 | 9,1 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 8,8 | 8,6 |
| Real Estate | 4,2 | 8,3 | 8,5 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 8,7 | 8,5 |
| Jasa Perusahaan | 5,5 | 11,2 | 11,4 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 11,3 | 11,0 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,8 | 7,4 | 7,3 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 5,3 |
| Jasa Pendidikan | 4,5 | 9,5 | 9,6 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 9,2 | 8,9 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,5 | 8,7 | 8,9 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 9,0 |
| Jasa lainnya | 4,1 | 8,6 | 8,7 | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 8,4 | 8,2 |
| PDRB | 5,4 | 11,2 | 11,4 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 11,2 | 10,9 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Bima menunjukkan tren positif dalam jangka menengah tahun 2024–2031. Berdasarkan data Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha, PDRB Kota Bima diproyeksikan tumbuh dengan



rata-rata di atas 10% per tahun selama periode tersebut, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini menunjukkan arah pemulihan dan penguatan ekonomi pascapandemi, serta mengindikasikan sektor tersier yang mendominasi struktur ekonomi Kota Bima.

Di sisi lain, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) juga mengalami kenaikan signifikan dari Rp 4.133,13 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 5.313,65 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) meningkat dari Rp 2.879,22 miliar menjadi Rp 3.302,30 miliar dalam periode yang sama. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi riil, meskipun laju pertumbuhan tahunan secara konstan terpantau masih moderat.

Dari sisi pengeluaran, struktur PDRB menunjukkan dominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terus meningkat dari Rp 2.728,28 miliar (ADHB) pada tahun 2020 menjadi Rp 3.391,74 miliar pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan tingkat daya beli dan konsumsi masyarakat yang membaik. Namun, kontribusi sektor net ekspor masih negatif dan cukup besar (misalnya, -Rp 1.681,47 miliar pada tahun 2024), yang menunjukkan adanya ketergantungan terhadap barang/jasa dari luar wilayah serta potensi surplus permintaan lokal yang tidak diserap oleh produksi lokal.

Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami peningkatan dari Rp 1.473,94 miliar (2020) menjadi Rp 1.783,90 miliar (2024), mencerminkan adanya geliat investasi fisik di wilayah Kota Bima. Namun demikian, nilai PMTB yang relatif stagnan menunjukkan bahwa investasi perlu lebih ditingkatkan, terutama untuk menopang transformasi ekonomi jangka panjang dan mendukung pembiayaan pembangunan.

Secara umum, kinerja ekonomi ini menjadi modal fiskal strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer ke daerah. Kekuatan sektor perdagangan, akomodasi, transportasi dan jasa lainnya dapat dimaksimalkan melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan pelayanan publik yang mendorong iklim investasi yang sehat. Selain itu, potensi fiskal juga dapat didorong melalui skema kerja sama pemerintah dengan



badan usaha (KPBU), optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta reformasi sistem penganggaran berbasis kinerja.

Namun demikian, risiko fiskal tetap perlu diantisipasi, terutama berkaitan dengan tekanan inflasi, ketergantungan pada konsumsi, serta ketimpangan antara sektor pengeluaran dan produktivitas lokal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya konsolidasi fiskal yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada prinsip keadilan serta efisiensi belanja.

Tabel 2.115. PDRB berdasarkan pengeluaran ADHB

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nilai (Miliar Rupiah) | | | | | |
| Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga | 2.728,28 | 2.825,82 | 2.996,16 | 3.187,17 | 3.391,74 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 82,23 | 84,50 | 91,95 | 101,27 | 115,58 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 1.457,77 | 1.455,95 | 1.509,41 | 1.578,44 | 1.703,65 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 1.473,94 | 1.570,62 | 1.539,36 | 1.734,01 | 1.783,90 |
| Perubahan Inventori | 20,59 | -2,81 | -3,04 | -1,06 | 0,24 |
| Net Ekspor | -1.629,69 | -1.633,05 | -1.559,23 | -1.613,50 | -1.681,47 |
| PDRB | 4.133,13 | 4.301,03 | 4.574,61 | 4.986,32 | 5.313,65 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

Tabel 2.116. PDRB berdasarkan pengeluaran ADHK

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Nilai (Miliar Rupiah) | | | | | |
| Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga | 2.000,05 | 2.052,73 | 2.100,60 | 2.186,42 | 2.276,97 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 58,68 | 59,16 | 61,59 | 65,51 | 73,32 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 904,54 | 888,90 | 899,37 | 921,31 | 970,29 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 983,12 | 1.016,11 | 946,80 | 1.037,64 | 1.053,70 |
| Perubahan Inventori | 8,50 | -1,14 | -1,20 | -0,39 | 0,08 |
| Net Ekspor | -1.075,67 | -1.076,63 | -988,75 | -1.036,40 | -1.072,07 |
| PDRB | 2.879,22 | 2.939,13 | 3.018,40 | 3.174,09 | 3.302,30 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Bima dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren positif yang patut dicermati sebagai dasar penguatan fiskal daerah. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK), terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2023 hingga 2024.



Pada PDRB ADHB, nilai ekonomi Kota Bima meningkat dari Rp4.133,13 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 5.313,65 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, dari sisi PDRB ADHK yang mencerminkan pertumbuhan riil (tanpa efek inflasi), terjadi kenaikan dari Rp2.879,22 miliar menjadi Rp 3.302,30 miliar pada periode yang sama. Meskipun sempat terjadi kontraksi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, perekonomian berhasil pulih dan tumbuh stabil kembali.

Kinerja pertumbuhan ekonomi ini juga tercermin dalam proyeksi rata-rata pertumbuhan PDRB per sektor tahun 2024–2031. Beberapa sektor utama seperti Perdagangan, Konstruksi, Transportasi, dan Akomodasi-Makan Minum diperkirakan tumbuh di atas rata-rata, yang menunjukkan potensi sektor-sektor tersebut dalam menopang pendapatan dan fiskal daerah di masa mendatang.

Dengan kinerja dan tren positif PDRB tersebut, potensi peningkatan kapasitas fiskal daerah terbuka lebar, baik dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) maupun kemampuan belanja modal untuk pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan strategi fiskal ke depan perlu diarahkan untuk:

- a. Mendorong optimalisasi sektor-sektor dengan kontribusi tinggi terhadap PDRB,
- b. Meningkatkan efisiensi belanja daerah,
- c. Serta memperkuat kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.

2.6.1.2. Kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pengeluaran PDRB

Berdasarkan data PDRB Kota Bima menurut pengeluaran (ADHB dan ADHK) tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap total PDRB tergolong relatif kecil namun stabil. Pada tahun 2024, kontribusi konsumsi pemerintah terhadap total PDRB ADHB hanya sekitar 30% dari komponen terbesar, yakni konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.117. Proyeksi kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB adhb

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nilai (Miliar Rupiah) | | | | | | |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga | 2.322 | 2.411 | 2.516 | 2.630 | 2.750 | 2.896 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 73 | 75 | 78 | 81 | 87 | 91 |



| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nilai (Miliar Rupiah) | | | | | | |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 954 | 975 | 1.000 | 1.026 | 1.054 | 1.086 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 1.155 | 1.235 | 1.332 | 1.441 | 1.559 | 1.708 |
| Perubahan Inventori | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Net Ekspor | -1.072 | -1.093 | -1.118 | -1.146 | -1.179 | -1.215 |
| PDRB | 3.432 | 3.602 | 3.805 | 4.031 | 4.269 | 4.564 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024

Tabel 2.118. Proyeksi kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB adhk

| SHARE (%PDRB) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga | 67,7 | 66,9 | 66,1 | 65,3 | 64,4 | 63,5 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 27,8 | 27,1 | 26,3 | 25,5 | 24,7 | 23,8 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 33,7 | 34,3 | 35,0 | 35,7 | 36,5 | 37,4 |
| Perubahan Inventori | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Net Ekspor | -31,2 | -30,3 | -29,4 | -28,4 | -27,6 | -26,6 |
| PDRB | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2024

Sebagai ilustrasi, pada tahun 2024:

- Pengeluaran konsumsi pemerintah (ADHB) tercatat sebesar Rp 1.703,65 miliar dari total PDRB Rp 5.313,65 miliar, setara dengan kontribusi sekitar 32,03%.
- Pada tahun-tahun sebelumnya, kontribusi ini cenderung stagnan, dengan fluktuasi ringan dalam rentang Rp1.448 – Rp1.539 miliar.
- Dalam ADHK, tren pengeluaran pemerintah bahkan menunjukkan stagnasi di kisaran Rp889 – Rp921 miliar sejak 2020, mencerminkan kinerja belanja pemerintah yang belum terlalu ekspansif secara riil.

Jika dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga yang konsisten menyumbang lebih dari 60% terhadap PDRB, maka peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja publik masih sangat terbatas. Namun demikian, proyeksi rata-rata pertumbuhan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib selama periode 2024–2031 yang mencapai rata-rata 6,0% per tahun (dengan puncak 7,4% pada 2025) mengindikasikan adanya ruang akselerasi peran fiskal pemerintah di masa mendatang. Hal ini juga sejalan



dengan meningkatnya tuntutan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan jaminan sosial bagi masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memperkuat peran fiskal daerah dalam pertumbuhan ekonomi ke depan, strategi yang perlu ditempuh antara lain:

- a. Optimalisasi belanja pemerintah daerah, terutama yang bersifat produktif dan berbasis output;
- b. Refocusing anggaran dari belanja rutin ke belanja modal dan pelayanan publik strategis;
- c. Sinkronisasi program antar sektor agar dampak fiskal lebih merata ke berbagai lapisan ekonomi masyarakat;
- d. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran kinerja, sehingga belanja pemerintah lebih efisien dan efektif.

2.6.2. Kinerja keuangan masa lalu

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis obyek pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum komponen APBD Kota Bima terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah; (2) Komponen Belanja



Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.



Tabel 2.119. Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bima Tahun 2020-2024

| Kode | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 47.279.817.936,69 | 46.993.516.746,67 | 57.359.469.008,22 | 51.354.520.245,70 | 57.053.592.781,82 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 648.337.522.906,00 | 664.762.654.304,00 | 748.451.787.052,00 | 714.474.487.535,00 | 757.753.927.550,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 19.766.446.840,26 | 17.931.340.700,00 | 0,00 | 9.521.776.963,00 | 84.762.193.674,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 715.383.787.682,95 | 729.687.511.750,67 | 805.811.256.060,22 | 775.350.784.743,70 | 899.569.714.005,82 |
| 5 | BELANJA | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 604.662.659.665,71 | 575.787.111.971,68 | 594.440.854.017,00 | 680.574.756.827,25 | 774.585.834.029,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 165.721.375.475,02 | 138.378.990.564,74 | 153.809.784.287,73 | 147.480.020.226,00 | 117.434.068.509,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 26.269.055.823,00 | 2.534.050.750,00 | 945.418.000,00 | 1.862.720.872,00 | 1.305.034.700,00 |
| | Jumlah Belanja | 796.653.090.963,73 | 716.700.153.286,42 | 749.196.056.304,73 | 829.917.497.925,25 | 893.324.937.238,00 |
| | Total Surplus/(Defisit) | -81.269.303.280,78 | 12.987.358.464,25 | 56.615.199.755,49 | -54.566.713.181,55 | 6.244.776.767,82 |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 93.243.087.895,71 | 10.974.821.367,93 | 21.967.826.874,18 | 76.592.231.592,67 | 17.799.857.573,12 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 1.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |



| Kode | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Pembiayaan Netto | 92.243.087.895,71 | 8.974.821.367,93 | 19.967.826.874,18 | 74.592.231.592,67 | 17.799.857.573,12 |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 10.973.784.614,93 | 21.962.179.832,18 | 76.583.026.629,67 | 20.025.518.411,12 | 24.044.634.340,94 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2019-2023 (Audited)



2.6.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bima diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalan dan pengembangan sumber penerimaan daerah, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah. Untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka Pemerintah Kota Bima melakukan berbagai upaya dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap).

Pemerintah Kota Bima berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kota Bima untuk Tahun 2020 hingga tahun 2024 disajikan sebagai berikut.



Tabel 2.120. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024

| Uraian | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | Realisasi | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pendapatan | 6,17 | 715.383.787.682,95 | 729.687.511.750,67 | 805.811.256.060,22 | 775.350.784.743,70 | 899.569.714.005,82 |
| Pendapatan Asli Daerah | 5,52 | 47.279.817.936,69 | 46.993.516.746,67 | 57.359.469.008,22 | 51.354.520.245,70 | 57.053.592.781,82 |
| Pajak Daerah | 5,80 | 18.558.631.974,13 | 19.507.819.782,88 | 21.355.298.265,81 | 23.211.800.485,23 | 23.190.263.988,51 |
| Retribusi Daerah | 50,92 | 11.151.090.529,36 | 15.196.689.454,00 | 19.710.293.760,28 | 8.635.034.896,00 | 25.378.365.488,40 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 15,66 | 1.579.915.958,62 | 1.284.388.411,79 | 1.545.139.285,00 | 2.140.790.453,00 | 2.622.635.153,00 |
| Lain-Lain PAD Yang Sah | -11,41 | 15.990.179.474,58 | 11.004.619.098,00 | 14.748.737.697,13 | 17.366.894.411,47 | 5.862.328.151,91 |
| Pendapatan Transfer | 4,16 | 648.337.522.906,00 | 664.762.654.304,00 | 748.451.787.052,00 | 714.474.487.535,00 | 757.753.927.550,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3,76 | 607.033.428.216,00 | 624.035.340.074,00 | 696.779.883.471,00 | 656.468.584.397,00 | 698.388.310.312,00 |
| Dana Perimbangan | | | | | | |
| Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | | 26.793.098.072,00 | 37.344.039.204,00 | 69.899.355.791,00 | 55.895.742.054,00 | |
| Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | | 439.644.557.000,00 | 432.159.814.000,00 | 430.503.529.123,00 | 453.939.356.950,00 | |
| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) | | 121.110.004.144,00 | 124.506.343.870,00 | 157.268.313.557,00 | 125.461.275.393,00 | |
| Dana Insentif Daerah (DID) | | 19.485.769.000,00 | 30.025.143.000,00 | 39.108.685.000,00 | 21.172.210.000,00 | |



| Uraian | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | Realisasi | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 10,02 | 41.304.094.690,00 | 40.727.314.230,00 | 51.671.903.581,00 | 58.005.903.138,00 | 59.365.617.238,00 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya | | 41.304.094.690,00 | 40.727.314.230,00 | 51.671.903.581,00 | 58.005.903.138,00 | 59.365.617.238,00 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | 19.766.446.840,26 | 17.931.340.700,00 | 0,00 | 9.521.776.963,00 | 84.762.193.674,00 |
| Pendapatan Hibah | | 19.766.446.840,26 | 17.911.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pendapatan Lainnya | | 0,00 | 20.000.700,00 | 0,00 | 9.521.776.963,00 | |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 (Audited)



Selama periode tahun 2020 hingga 2024, pendapatan daerah Kota Bima menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,17 persen per tahun. Pendapatan meningkat dari Rp715,38 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp899,57 miliar pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan secara umum, struktur pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, yang mencerminkan ketergantungan fiskal daerah yang cukup tinggi terhadap sumber dana eksternal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,52 persen selama lima tahun terakhir. Komponen utama PAD seperti pajak daerah tumbuh stabil dengan rata-rata 5,80 persen per tahun, sedangkan retribusi daerah menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya pada tahun 2024 yang melonjak tajam setelah sempat turun pada tahun sebelumnya. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga meningkat, meskipun kontribusinya terhadap total PAD masih relatif kecil. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah justru mengalami tren penurunan, mengindikasikan perlunya perbaikan dalam pengelolaan potensi pendapatan yang belum tergarap secara optimal.

Sumber utama pendapatan daerah tetap berasal dari transfer pemerintah, baik dari pusat maupun provinsi, yang tumbuh rata-rata sebesar 4,16 persen per tahun. Transfer antar daerah, khususnya dari Pemerintah Provinsi NTB, juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan rata-rata 10,02 persen. Meskipun demikian, dominasi pendapatan transfer ini menandakan tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.

Selain PAD dan pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah memperlihatkan fluktuasi cukup besar. Setelah tidak terealisasi pada tahun 2022 dan hanya kecil pada tahun 2023, pada tahun 2024 pendapatan dari komponen ini melonjak hingga mencapai Rp84,76 miliar. Lonjakan ini berpotensi berasal dari hibah atau bantuan keuangan bersifat khusus yang tidak bersifat rutin, sehingga penggunaannya perlu dikelola dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketergantungan pada sumber pendapatan yang tidak berkelanjutan.

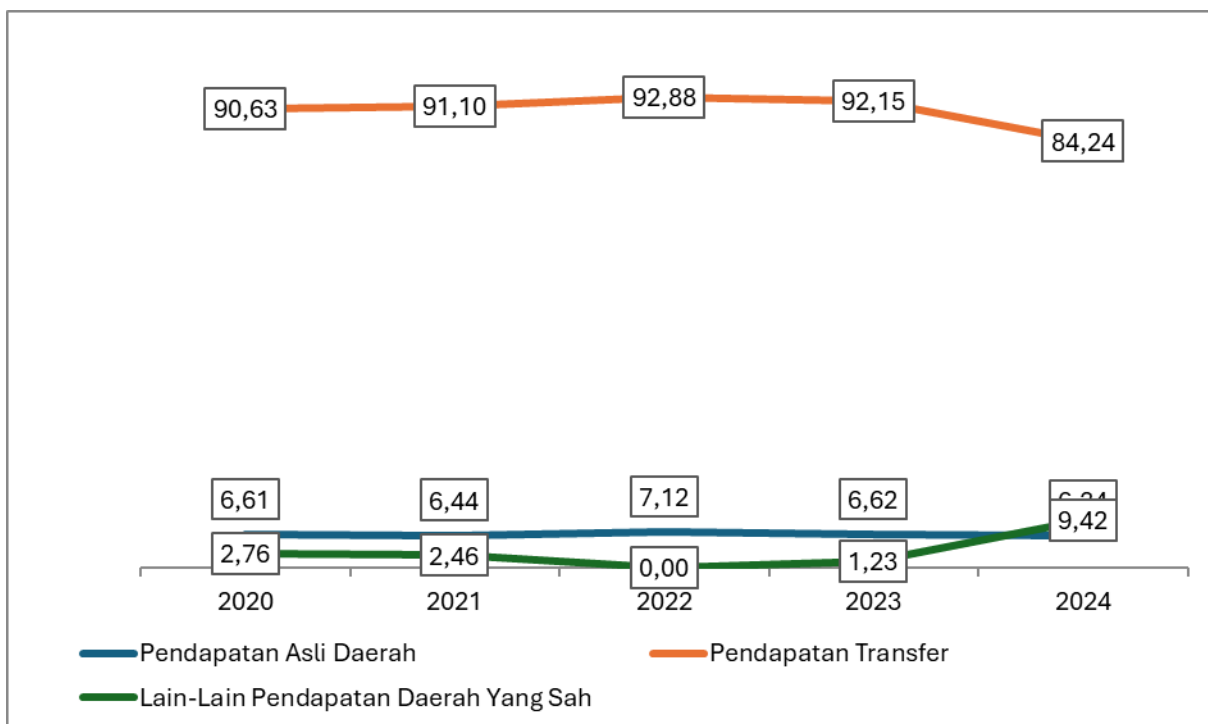
Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah Kota Bima dalam lima tahun terakhir memperlihatkan kemajuan, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas fiskal secara mandiri. Oleh karena itu, perlu dirancang



strategi yang komprehensif dalam optimalisasi PAD, pemetaan potensi pendapatan baru, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana transfer agar pembangunan daerah dapat dibiayai secara berkelanjutan dan mandiri.

Namun jika dilihat dari nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah yang membentuk rasio kemandirian daerah, kinerja keuangan Kota Bima belum cukup baik dan belum mengarah pada kemandirian. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Tahun 2024 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan sebesar 6,34 persen dan sebaliknya Rasio Transfer terhadap Total Pendapatan sebesar 84,24 persen. Hal ini menunjukkan Pendapatan Transfer masih menjadi mayoritas pembentuk pendapatan daerah Kota Bima sebagaimana disajikan dalam Gambar dibawah ini.

Gambar 2.49. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024

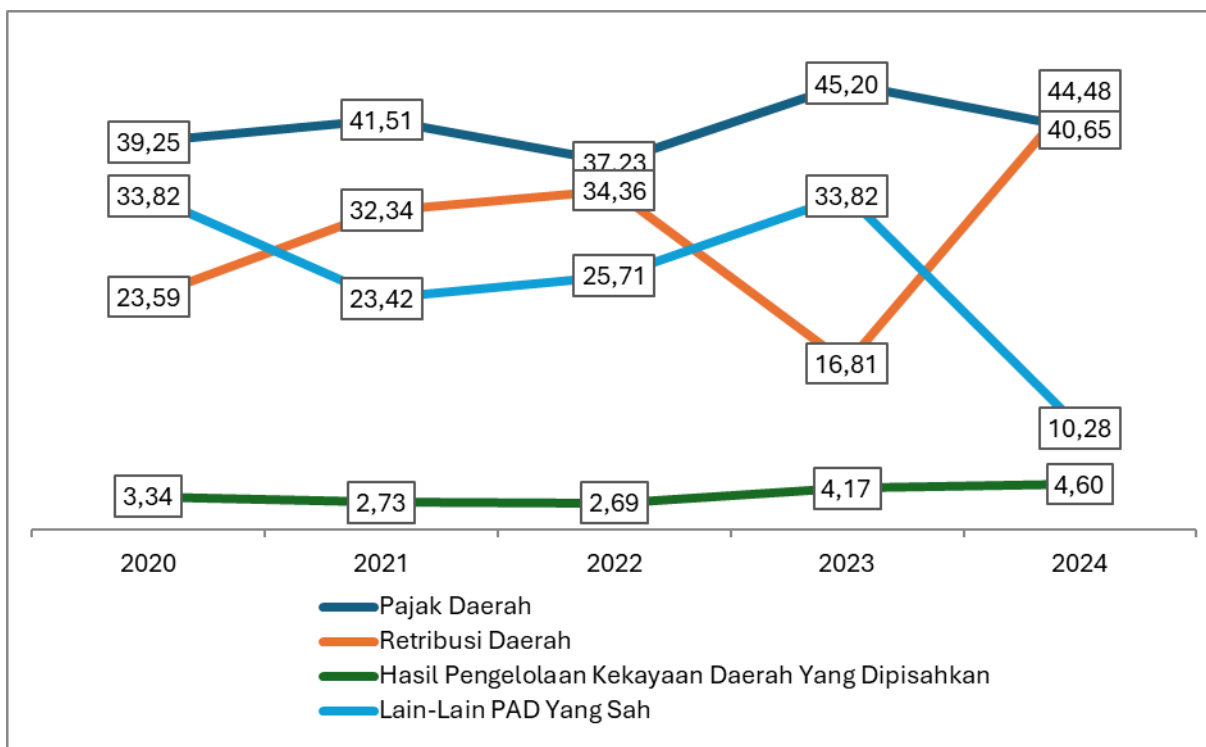


Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 (Audited)



Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah, terlihat bahwa pendapatan dari Pajak Daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi paling rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bima. Lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.50. Proporsi Realisasi Komponen Pembentuk PAD
Kota Bima Tahun 2020-2024



*Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024
(Audited)*

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Total Pendapatan. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Pendapatan Transfer dan Lain-Lain



Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi Pendapatan Asli Daerah maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya semakin besar angka proporsi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi Pendapatan Asli Daerah yang tinggi sekaligus proporsi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang rendah.

Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan masih rendahnya derajat kemandirian fiskal daerah. Dari grafik tersebut terlihat bahwa kontribusi utama PAD didominasi oleh pajak daerah dan retribusi daerah, yang secara konsisten memberikan sumbangan terbesar terhadap total PAD. Namun demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer, yang menandakan tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan provinsi.

Pada tahun 2020, kontribusi pajak daerah sebesar Rp39,25 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp23,59 miliar menunjukkan potensi lokal yang belum tergarap maksimal. Meskipun pajak daerah terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp44,48 miliar pada tahun 2024, laju pertumbuhan ini belum cukup untuk mengurangi dominasi pendapatan transfer secara signifikan. Sementara itu, retribusi daerah sempat menurun drastis pada tahun 2023 menjadi Rp16,81 miliar, sebelum akhirnya melonjak tajam menjadi Rp40,65 miliar pada tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan belum stabilnya pengelolaan sumber-sumber PAD yang bersifat langsung dari masyarakat.

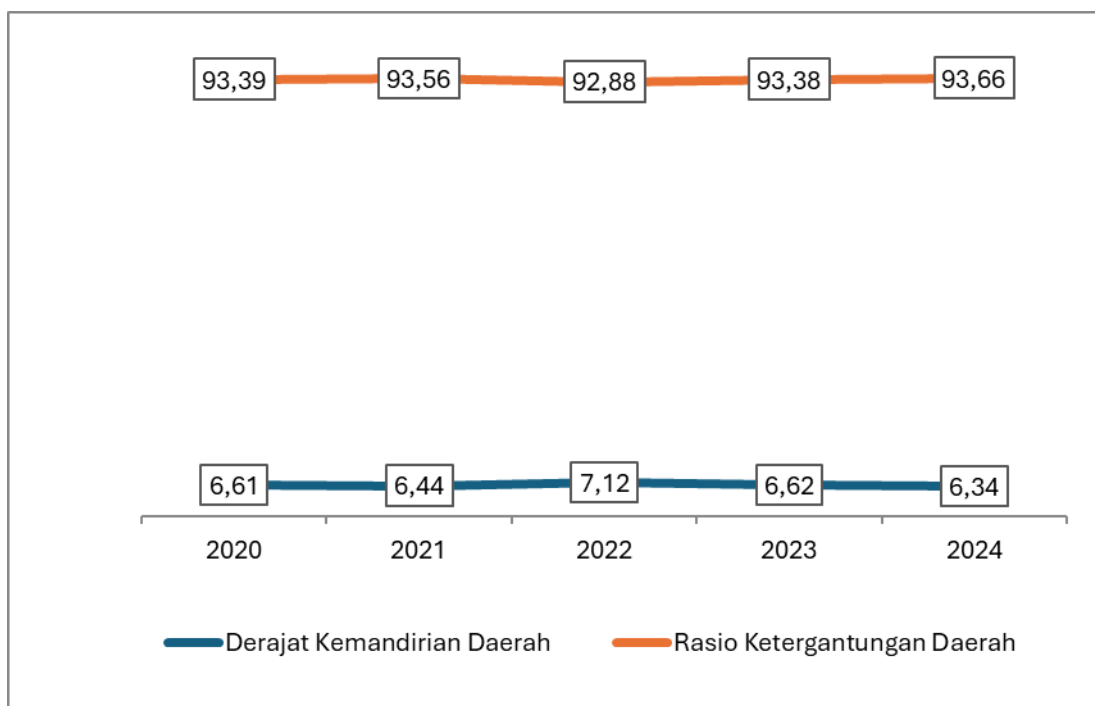
Komponen lain seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi yang jauh lebih kecil. Meskipun terjadi peningkatan pada kedua komponen ini di tahun 2023 dan 2024, nilainya masih belum cukup signifikan dalam mendorong kemandirian fiskal.

Secara umum, rasio ketergantungan fiskal Kota Bima masih tergolong tinggi, tercermin dari dominasi pendapatan transfer dalam struktur APBD. Sementara itu, derajat kemandirian fiskal masih rendah karena PAD belum mampu menjadi sumber



pendapatan utama untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bima perlu memperkuat basis pajak dan retribusi daerah, serta menggali potensi-potensi ekonomi lokal yang belum tergarap optimal, sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Gambar 2.51. Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Kota Bima



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2019-2023 (Audited)

2.6.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi: (1) Belanja Operasi, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek; (2) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi; (3) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD



untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan (4) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Struktur belanja daerah Kota Bima pada periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan positif secara umum, dengan rata-rata pertumbuhan total belanja sebesar 3,23%. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, meskipun tidak merata pada seluruh komponen belanja.



Tabel 2.121. Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024

| Uraian | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | Realisasi | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Belanja | 3,23 | 796.653.090.963,73 | 716.700.153.286,42 | 749.196.056.304,73 | 829.917.497.925,25 | 893.324.937.238,00 |
| Belanja Operasi | 6,69 | 604.662.659.665,71 | 575.787.111.971,68 | 594.440.854.017,00 | 680.574.756.827,25 | 774.585.834.029,00 |
| Belanja Pegawai | 5,88 | 360.913.051.466,29 | 357.437.167.837,55 | 361.680.806.870,00 | 372.071.721.926,00 | 448.064.545.062,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 18,29 | 146.888.810.652,00 | 200.214.962.134,13 | 209.804.746.008,00 | 267.851.512.668,25 | 279.668.139.717,00 |
| Belanja Bunga | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Subsidi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 22,09 | 35.979.307.432,36 | 16.712.982.000,00 | 16.448.051.139,00 | 37.168.222.233,00 | 43.680.149.250,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 51,14 | 60.881.490.115,06 | 1.422.000.000,00 | 6.507.250.000,00 | 3.483.300.000,00 | 3.173.000.000,00 |
| Belanja Modal | -7,46 | 165.721.375.475,02 | 138.378.990.564,74 | 153.809.784.287,73 | 147.480.020.226,00 | 117.434.068.509,00 |
| Belanja Tanah | 77,98 | 1.325.411.000,00 | 737.365.000,00 | 3.035.329.060,00 | 1.094.391.000,00 | 2.282.760.420,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | -9,24 | 49.272.656.662,00 | 28.081.390.647,00 | 45.650.535.702,00 | 35.595.128.839,00 | 23.323.712.118,00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 27,51 | 29.214.336.894,29 | 66.975.887.199,03 | 34.349.972.004,73 | 49.102.960.640,00 | 42.504.291.643,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | -2,63 | 74.078.224.366,82 | 40.902.636.451,71 | 69.040.535.395,00 | 59.909.921.028,00 | 47.137.157.328,00 |



| Uraian | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | Realisasi | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | -44,76 | 11.830.746.551,91 | 1.681.711.267,00 | 1.733.412.126,00 | 1.640.198.419,00 | 148.641.000,00 |
| Belanja Aset Lainnya | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.420.300,00 | 2.037.506.000,00 |
| Belanja Tidak Terduga | -21,49 | 26.269.055.823,00 | 2.534.050.750,00 | 945.418.000,00 | 1.862.720.872,00 | 1.305.034.700,00 |
| Belanja Tidak Terduga | -21,49 | 26.269.055.823,00 | 2.534.050.750,00 | 945.418.000,00 | 1.862.720.872,00 | 1.305.034.700,00 |
| Belanja Transfer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bagi Hasil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Surplus / (Defisit) | | -81.269.303.280,78 | 12.987.358.464,25 | 56.607.153.392,23 | -54.566.713.181,55 | 6.244.776.767,82 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 (Audited)



Belanja operasi mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan pos belanja lainnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, yang masing-masing tumbuh sebesar 5,88% dan 18,29%. Pertumbuhan ini mengindikasikan meningkatnya kebutuhan biaya rutin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan belanja barang dan jasa juga dapat mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar kepada masyarakat.

Selain itu, belanja hibah dan bantuan sosial mengalami pertumbuhan cukup tinggi, yaitu 22,09% dan 51,14%. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan program bantuan sosial dan kemitraan yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat, respons terhadap kondisi sosial-ekonomi, serta upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19.

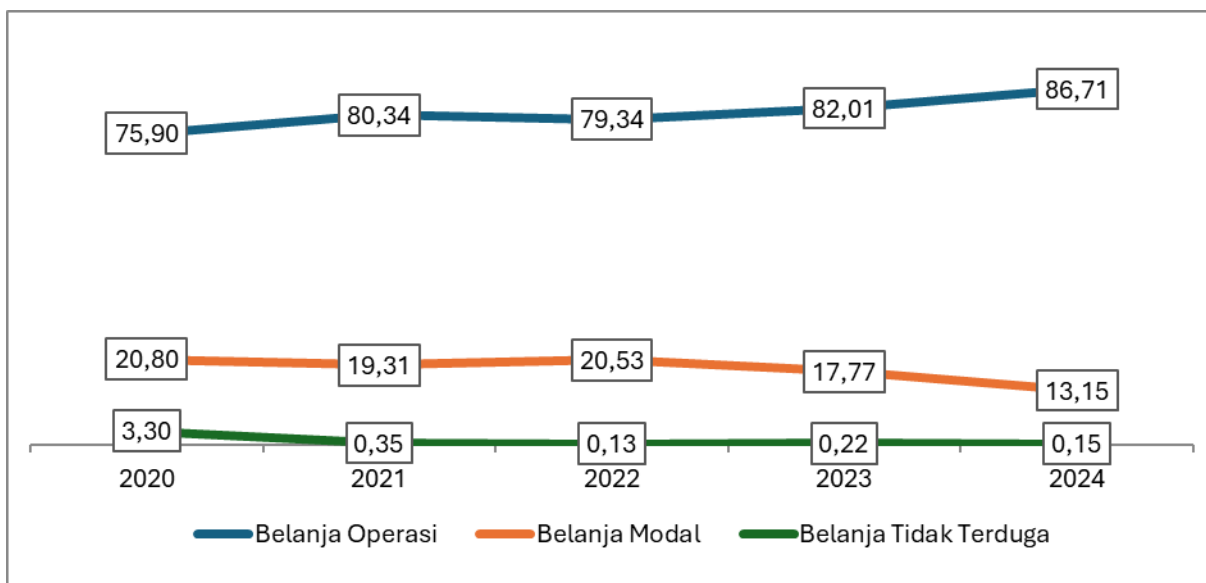
Berbeda dengan belanja operasi, belanja modal justru mengalami penurunan rata-rata sebesar 7,46%. Penurunan ini cukup mencolok dan mengindikasikan adanya pengalihan fokus belanja dari belanja infrastruktur ke belanja rutin/operasional. Beberapa komponen belanja modal bahkan mencatat pertumbuhan negatif, seperti belanja peralatan dan mesin (-9,24%) dan belanja aset tetap lainnya (-44,76%).

Meskipun belanja tanah tumbuh signifikan sebesar 77,98% dan belanja gedung dan bangunan tumbuh 27,51%, namun hal tersebut tidak cukup mengimbangi penurunan pada komponen lainnya. Penurunan belanja modal ini bisa dipengaruhi oleh terbatasnya kapasitas fiskal, perubahan kebijakan nasional, atau skema pembiayaan pembangunan yang bergeser ke sumber-sumber pembiayaan lain (misalnya DAK fisik).

Sepanjang Tahun 2020-2024, penggunaan Belanja Daerah berfluktuatif yang diperuntukkan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer sebagaimana disajikan dalam Gambar dibawah ini.



Gambar 2.52. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Total Belanja



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 (Audited)

Pada periode ini, belanja operasi secara konsisten mendominasi struktur APBD, dengan proporsi yang terus meningkat dari 75,90% di tahun 2020 menjadi 86,71% di tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan orientasi belanja yang lebih banyak diarahkan pada kebutuhan rutin dan operasional pemerintahan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah dan bantuan sosial.

Dominasi belanja operasi ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk memastikan kelangsungan layanan publik, stabilitas birokrasi, dan perlindungan sosial kepada masyarakat. Namun, tingginya porsi belanja operasi yang tidak diimbangi oleh belanja pembangunan dapat menjadi tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih progresif.

Belanja modal mengalami tren penurunan, dari 20,80% pada tahun 2020 menjadi hanya 13,15% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan berkurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan investasi pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur fisik, pengadaan aset tetap, dan fasilitas layanan publik. Penurunan proporsi belanja modal berisiko menghambat akselerasi pembangunan jangka menengah, terutama dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan daya saing daerah.

Tren ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

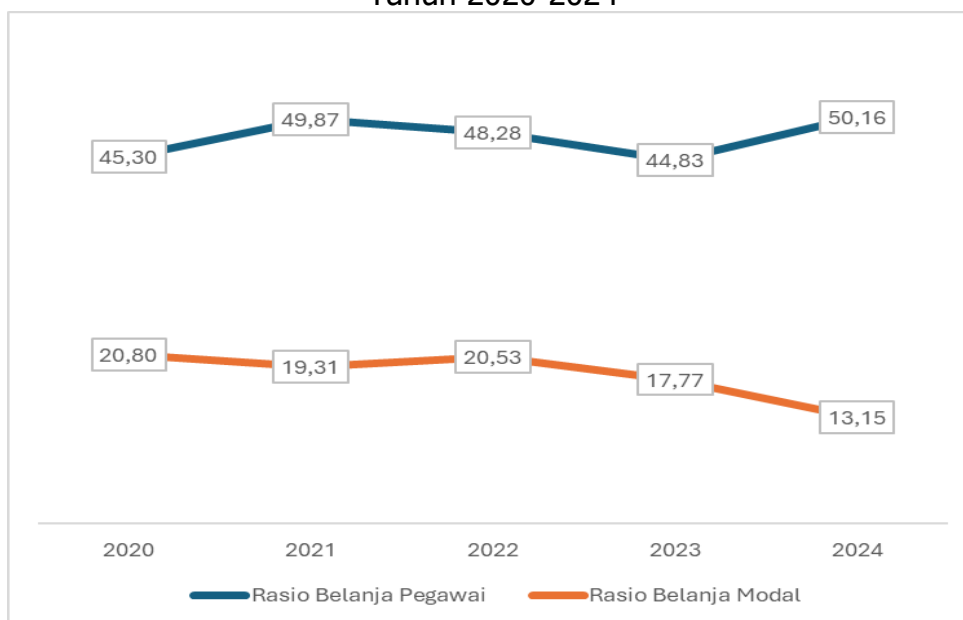


- Keterbatasan fiskal Kota Bima, yang menyebabkan belanja lebih difokuskan pada kebutuhan wajib dan mengikat.
- Ketergantungan terhadap transfer pusat (DAK fisik), yang apabila menurun akan langsung berdampak pada kapasitas belanja modal.

Analisis belanja daerah meliputi rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan rasio belanja modal per total belanja. Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai.

Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai APBD. Belanja pegawai yang dihitung dalam rasio ini meliputi belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung.

Gambar 2.53. Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Modal Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2019-2023 (Audited)



Rasio belanja pegawai mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan tren meningkat dari 45,30% pada tahun 2020 menjadi 50,16% pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan bahwa lebih dari separuh belanja daerah difokuskan untuk membiayai belanja pegawai, baik berupa gaji, tunjangan, maupun tambahan penghasilan lainnya.

2.6.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari: SiLPA; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk: Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Bima dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan struktur belanja daerah yang sehat dan produktif. Selama lima tahun terakhir, proporsi belanja daerah menunjukkan dominasi belanja operasional, khususnya belanja pegawai, yang cenderung meningkat dari 45,30% pada tahun 2020 menjadi 50,16% pada tahun 2024. Di sisi lain, rasio belanja modal menunjukkan kecenderungan menurun, dari 20,80% menjadi 13,15% pada periode yang sama. Fenomena ini mencerminkan perlunya penguatan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada belanja pembangunan dan pelayanan publik.

Tantangan tersebut mendorong perlunya penataan kembali kebijakan belanja agar mampu menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk mendanai program prioritas pembangunan. Peningkatan kebutuhan belanja pegawai, terutama akibat kebijakan nasional pengangkatan PPPK, menuntut efisiensi pengelolaan belanja operasional dan penguatan pengendalian anggaran.



Selain itu, karakteristik pembiayaan daerah yang sangat bergantung pada sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) turut menjadi tantangan tersendiri. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan dari SILPA sebesar 86,86% mencerminkan adanya volatilitas yang cukup tinggi, yang disebabkan oleh variasi daya serap anggaran dari tahun ke tahun. Kondisi ini menuntut perencanaan dan penganggaran yang lebih realistis dan akuntabel, agar SILPA tidak lagi menjadi sumber utama pembiayaan belanja pembangunan.

Di sisi lain, rendahnya alokasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMD, yang rata-rata hanya sebesar 2 miliar dan tidak dianggarkan lagi pada tahun 2024, membuka ruang tantangan baru dalam hal penguatan peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan sumber pendapatan alternatif.

Adapun Pembiayaan Daerah Kota Bima periode tahun 2020 hingga tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2.122. Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024

| Uraian | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | Realisasi | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pembiayaan | | | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 45,96 | 93.243.087.895,71 | 10.974.821.367,93 | 21.967.826.874,18 | 76.592.231.592,67 | 17.799.857.573,12 |
| Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 45,96 | 93.241.433.641,71 | 10.973.784.614,93 | 21.962.179.832,18 | 76.583.026.629,67 | 17.799.857.573,12 |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya | 92,59 | 1.654.254,00 | 1.036.753,00 | 5.647.042,00 | 9.204.963,00 | 0,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | | 1.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |
| Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | | 1.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |
| Pembiayaan Netto | 57,41 | 92.243.087.895,71 | 8.974.821.367,93 | 19.967.826.874,18 | 74.592.231.592,67 | 17.799.857.573,12 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | 76,79 | 10.973.784.614,93 | 21.962.179.832,18 | 76.583.026.629,67 | 17.799.857.573,12 | 24.044.634.341,00 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 (Audited)



2.6.2.4. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari: (1) aset lancar; (2) investasi jangka panjang; (3) aset tetap; (4) dana cadangan; dan (5) aset lainnya.

Perkembangan Neraca Daerah Kota Bima pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut di bawah ini.



Tabel 2.123. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | Uraian | Realisasi (Rp) | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | A S E T | | | | | | |
| 2 | ASET LANCAR | | | | | | |
| 3 | KAS | | | | | | |
| 4 | Kas di Kas Daerah | 10.735.155.328,67 | 21.804.706.778,67 | 71.620.257.944,90 | 14.428.033.676,32 | | |
| 5 | Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP | 113.613.390,00 | 0,00 | 7.894.544,00 | 139.665.450,00 | | |
| 6 | Kas di Kas Bendahara Penerimaan | 206.938.889,12 | 143.889,12 | 0,00 | 88.063.700,00 | | |
| 7 | Kas di Kas Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 5.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Kas di Kas BLUD | 0,00 | 0,00 | 4.954.209.979,26 | 3.144.094.746,80 | | |
| 9 | Kas di Kas Dana BOS | 125.015.896,26 | 151.753.053,51 | 664.161,51 | 11.510.000,00 | | |
| 10 | Kas Lainnya - di Bendahara Pengeluaran | 5.577.486,00 | 642.444,00 | 30.489.379,00 | 0,00 | | |
| 11 | Jumlah Kas | 11.186.300.990,05 | 21.962.966.165,30 | 76.613.516.008,67 | 17.811.367.573,12 | 24.034.322.346,94 | 75,84 |
| 12 | Piutang | | | | | | |
| 13 | Piutang Pajak | 10.100.588.296,12 | 11.543.811.889,54 | 13.211.288.451,55 | 10.352.833.424,96 | 12.916.022.520,45 | |
| 14 | Penyisihan Piutang Pajak | -5.590.475.390,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Piutang Pajak Netto | 4.510.112.905,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Piutang Retribusi | 3.045.942.462,00 | 3.243.676.649,00 | 6.570.013.361,00 | 5.241.427.815,00 | 6.617.875.947,00 | |
| 17 | Penyisihan Piutang Retribusi | -1.808.532.774,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Piutang Retribusi Netto | 1.237.409.687,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Piutang Dana Bagi Hasil | 10.025.579.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Piutang Dana Bagi Hasil Netto | 10.025.579.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Piutang Deviden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Piutang Lainnya | 35.000.000,00 | 0,00 | 2.778.761.737,25 | 56.904.527.841,25 | 2.778.761.737,25 | |
| 24 | Penyisihan Piutang Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Piutang Lainnya Netto | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| No | Uraian | Realisasi (Rp) | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 26 | Belanja Dibayar Dimuka | 381.153.304,45 | 2.969.280.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 2.845.318.495,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto | 2.845.318.495,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.569.480.270,00 | 0,00 | |
| 31 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 0,00 | 1.239.295,74 | 13.557.402.496,83 | 12.324.774.233,81 | |
| 32 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 1.010.385.620,00 | 728.448.661,00 | 1.268.829.245,00 | 12.276.356.000,00 | |
| 33 | Piutang Transfer Antar Daerah | 0,00 | 4.799.141.791,00 | 4.361.716.996,00 | 4.528.880.817,00 | 3.448.116.876,00 | |
| 34 | Penyisihan Piutang | 0,00 | -9.145.910.533,21 | -11.235.490.023,86 | -8.686.677.242,40 | -10.850.192.023,41 | |
| 35 | Beban Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 | 274.770.484,00 | 13.750.000,00 | 13.750.000,00 | |
| 36 | Jumlah Piutang | 19.034.573.512,55 | 14.420.385.616,33 | 16.690.748.962,68 | 85.750.454.667,64 | 39.525.465.291,10 | 87,84 |
| 37 | Persediaan | 17.698.117.595,74 | 10.469.710.895,88 | 12.186.271.978,05 | 18.330.422.816,30 | 16.313.952.383,87 | 3,74 |
| 38 | JUMLAH ASET LANCAR | 47.918.992.098,34 | 46.853.062.677,51 | 105.490.536.949,40 | 121.892.245.057,06 | 79.873.740.021,91 | 26,00 |
| 39 | INVESTASI JANGKA PANJANG | | | | | | |
| 40 | Investasi Non Permanen | | | | | | |
| 41 | Investasi Dana Bergulir | 3.532.526.489,00 | 3.531.489.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | Dana Bergulir Diragukan Tertagih | -3.532.526.489,00 | -3.531.489.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | Jumlah Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | Investasi Permanen | | | | | | |
| 45 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 13.412.370.394,00 | 14.612.249.186,29 | 23.023.125.259,72 | 18.137.504.969,22 | 18.137.504.969,22 | 11,32 |
| 46 | Jumlah Investasi Permanen | 13.412.370.394,00 | 14.612.249.186,29 | 23.023.125.259,72 | 18.137.504.969,22 | 18.137.504.969,22 | 11,32 |
| 47 | JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 13.412.370.394,00 | 14.612.249.186,29 | 23.023.125.259,72 | 18.137.504.969,22 | 18.137.504.969,22 | 11,32 |
| 48 | ASET TETAP | | | | | | |
| 49 | Tanah | 542.813.686.849,00 | 547.910.105.241,37 | 566.178.193.169,87 | 605.155.129.175,00 | 615.761.651.695,00 | 3,23 |



| No | Uraian | Realisasi (Rp) | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 50 | Peralatan dan Mesin | 266.321.791.632,74 | 292.753.815.364,26 | 331.728.951.182,14 | 358.928.790.783,25 | 382.394.450.345,10 | 9,49 |
| 51 | Gedung dan Bangunan | 576.481.970.544,44 | 614.844.747.188,93 | 719.111.405.819,66 | 794.793.378.334,16 | 830.284.861.344,00 | 9,65 |
| 52 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.128.750.005.178,81 | 1.173.746.744.126,20 | 1.235.419.949.690,20 | 1.301.044.811.594,24 | 1.334.437.691.827,09 | 4,28 |
| 53 | Aset Tetap Lainnya | 76.900.049.609,80 | 80.079.328.699,71 | 85.432.671.685,71 | 87.161.832.504,71 | 88.411.731.818,60 | 3,57 |
| 54 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 3.412.148.409,46 | 29.496.862.800,00 | 8.402.727.432,20 | 1.778.987.297,00 | 11.409.227.623,50 | 288,86 |
| 55 | Akumulasi Penyusutan | -753.190.943.027,20 | -873.866.912.418,86 | -999.062.323.851,54 | - | - | 13,63 |
| 56 | JUMLAH ASET TETAP | 1.841.488.709.197,05 | 1.864.964.691.001,61 | 1.947.211.575.128,24 | 2.023.919.402.348,75 | 2.007.750.412.531,64 | 2,21 |
| 57 | PROPERTI INVESTASI | | | | | | |
| 58 | Properti Investasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370.904.337,55 | 11.370.904.337,55 | |
| 59 | Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -887.174.838,00 | -895.016.187,10 | |
| 60 | JUMLAH PROPERTI INVESTASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.483.729.499,55 | 10.475.888.150,45 | |
| 61 | ASET LAINNYA | | | | | | |
| 62 | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 64.898.774,20 | 34.766.666,67 | 34.766.666,67 | 34.766.666,67 | 2.600.535.720,67 | 1.833,38 |
| 63 | Aset Tak Berwujud | 2.515.568.535,00 | 2.561.978.535,00 | 2.596.965.735,00 | 2.764.386.035,00 | 4.803.392.035,00 | 20,85 |
| 64 | Amortisasi Aset Tak Berwujud | -438.920.014,78 | -567.018.941,56 | -692.600.664,00 | -829.668.867,45 | -977.594.568,88 | 22,24 |
| 65 | Aset Lain-Lain | 17.892.965.155,29 | 43.921.240.450,79 | 52.605.390.698,56 | 80.518.412.947,82 | 43.179.236.618,15 | 42,98 |
| 66 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | -350.910.849,89 | -26.341.073.228,06 | -29.069.395.063,50 | -29.473.262.830,90 | -24.865.487.614,63 | -0,97 |
| | Kas yang Dibatasi Penggunaannya | | | | 29.342.498.000,00 | 3.289.683.000,00 | |
| 67 | JUMLAH ASET LAINNYA | 19.683.601.599,82 | 19.609.893.482,84 | 25.475.127.372,73 | 82.357.131.951,14 | 28.029.765.190,31 | 46,71 |
| 68 | JUMLAH ASET | 1.922.503.673.289,21 | 1.946.039.896.348,25 | 2.101.200.364.710,09 | 2.256.790.013.825,72 | 2.144.267.310.863,53 | 2,90 |
| 69 | KEWAJIBAN | | | | | | |
| 70 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | | | |
| 71 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 5.577.486,00 | 642.444,00 | 30.489.379,00 | 11.510.000,00 | 0,00 | 1.098,78 |
| 72 | Pendapatan diterima dimuka | 176.542.524,40 | 219.049.135,76 | 201.506.362,51 | 35.126.301,07 | 64.732.400,00 | 4,45 |
| 73 | Utang Belanja | 2.074.300.840,00 | 508.956.003,00 | 507.862.042,00 | 8.848.781.210,80 | 332.882.992,00 | 367,61 |



| No | Uraian | Realisasi (Rp) | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 74 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 2.256.420.850,40 | 728.647.582,76 | 739.857.783,51 | 8.895.417.511,87 | 397.615.392,00 | 235,15 |
| 76 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | | | |
| 77 | Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 78 | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 79 | JUMLAH KEWAJIBAN | 2.256.420.850,40 | 728.647.582,76 | 739.857.783,51 | 8.895.417.511,87 | 397.615.392,00 | 235,15 |
| 80 | EKUITAS | | | | | | |
| 81 | Ekuitas | 1.920.247.252.438,80 | 1.948.090.010.502,74 | 2.100.460.506.926,58 | 2.218.552.098.313,85 | 2.143.869.695.471,53 | 2,88 |
| 82 | JUMLAH EKUITAS | 1.920.247.252.438,80 | 1.948.090.010.502,74 | 2.100.460.506.926,58 | 2.218.552.098.313,85 | 2.143.869.695.471,53 | 2,88 |
| 83 | JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS | 1.922.503.673.289,20 | 1.948.818.658.085,50 | 2.101.200.364.710,09 | 2.227.447.515.825,72 | 2.144.267.310.863,53 | 2,87 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 (Audited)



Neraca daerah Pemerintah Kota Bima menunjukkan pertumbuhan total aset dari Rp1,92 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,14 triliun pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,85% per tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan aset secara agregat. Namun, struktur pertumbuhan menunjukkan dinamika yang perlu dicermati secara strategis.

Aset lancar mengalami peningkatan signifikan, dari Rp19,03 miliar (2020) menjadi Rp40,91 miliar (2024), atau tumbuh rata-rata sebesar 87,84% per tahun. Pertumbuhan ini sebagian besar disumbang oleh kenaikan saldo kas dan setara kas, khususnya pada akun Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, serta peningkatan piutang-piutang seperti piutang pajak daerah dan retribusi. Hal ini dapat mencerminkan dua hal: (1) meningkatnya kemampuan pemungutan pendapatan, dan (2) adanya piutang yang belum tertagih, yang berpotensi menimbulkan risiko penurunan kualitas pendapatan jika tidak dikelola dengan baik.

Nilai aset tetap sebagai komponen utama kekayaan daerah tumbuh relatif stabil, dari Rp1,84 triliun menjadi Rp2,05 triliun, atau rata-rata tumbuh 2,21% per tahun. Peningkatan ini berasal dari akumulasi perolehan aset berupa jalan, irigasi, jaringan, gedung, dan tanah, yang mencerminkan kesinambungan belanja modal di masa lalu. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa seluruh aset tetap tersebut telah dimanfaatkan secara optimal, tercatat secara akuntabel, dan dilakukan penilaian ulang secara periodik agar nilai wajar tercermin dengan baik dalam neraca.

Pada sisi investasi, terdapat dinamika yang menarik. Investasi jangka panjang permanen tumbuh moderat (11,32%) yang mencerminkan masih terbatasnya ekspansi peran BUMD maupun penyertaan modal daerah. Sementara itu, investasi non-permanen, khususnya pada akun dana bergulir, telah ditiadakan sejak tahun 2022. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali efektivitas skema dana bergulir sebagai salah satu alternatif pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan UMKM.

Dari sisi kewajiban, jumlah kewajiban daerah mengalami fluktuasi tinggi. Kewajiban jangka pendek bahkan tumbuh sangat tinggi dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 235,15%, dari Rp2,07 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp10,44 miliar di tahun 2024. Kenaikan ini terutama berasal dari Utang



Jangka Pendek Lainnya serta Utang Pengembalian PFK (Pajak yang belum disetorkan). Kondisi ini menuntut manajemen kewajiban yang lebih ketat, terutama dalam pengendalian belanja yang menimbulkan utang jangka pendek serta penataan tata kelola perpajakan daerah.

Ekuitas daerah tetap tumbuh stabil dari Rp1,92 triliun menjadi Rp2,13 triliun selama lima tahun terakhir, yang mengindikasikan akumulasi surplus APBD dari tahun ke tahun masih positif dan mampu memperkuat posisi keuangan daerah secara umum.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi:

- Kebijakan fiskal nasional dan daerah: Penyesuaian alokasi transfer ke daerah dan kebijakan belanja pegawai (PPPK) berdampak pada struktur kas dan kewajiban.
- Tingkat serapan anggaran belanja modal: Realisasi yang belum optimal menyebabkan akumulasi kas dan SILPA, yang mendorong kenaikan aset lancar tetapi membatasi optimalisasi aset tetap.
- Manajemen aset dan akuntabilitas pencatatan: Belum semua aset tercatat dengan nilai wajar, terutama aset lama atau yang diperoleh dari hibah pusat/provinsi.
- Ketepatan waktu pembayaran belanja dan kewajiban pihak ketiga: Meningkatkan kewajiban jangka pendek dan menunjukkan tantangan pengendalian pelaksanaan anggaran.
- Realisasi pendapatan dan penagihan piutang: Peningkatan piutang PAD menandakan tantangan dalam pengelolaan penerimaan daerah secara aktif dan efektif.



Tabel 2.124. Analisis Rasio Likuiditas Neraca Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024

| No. | Uraian | Rasio Likuiditas | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Aset Lancar | 1.922.503.673.289,21 | 1.946.039.896.348,25 | 2.101.200.364.710,09 | 2.227.447.515.825,72 | 2.144.267.310.863,53 |
| | Kewajiban Lancar | 1.922.503.673.289,20 | 1.948.818.658.085,50 | 2.101.200.364.710,09 | 2.227.447.515.825,72 | 2.144.267.310.863,53 |
| 1 | Current Ratio | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Aset Lancar | 1.922.503.673.289,21 | 1.946.039.896.348,25 | 2.101.200.364.710,09 | 2.227.447.515.825,72 | 2.144.267.310.863,53 |
| | Persediaan | 17.698.117.595,74 | 10.469.710.895,88 | 12.186.271.978,05 | 18.330.422.816,30 | 16.313.952.383,87 |
| | Kewajiban Lancar | 1.922.503.673.289,20 | 1.948.818.658.085,50 | 2.101.200.364.710,09 | 2.227.447.515.825,72 | 2.144.267.310.863,53 |
| 2 | Quick Ratio | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 (Audited)



Rasio likuiditas merupakan indikator utama dalam menilai kemampuan keuangan jangka pendek pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Dalam periode 2020 hingga 2024, Pemerintah Kota Bima menunjukkan nilai Current Ratio yang konsisten sebesar 1,00 setiap tahunnya. Ini mengindikasikan bahwa aset lancar secara nominal selalu seimbang dengan kewajiban lancar. Dengan kata lain, pemerintah secara teknis memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya.

Namun, nilai Quick Ratio yang sedikit lebih rendah (0,99) dalam beberapa tahun (2020, 2022, dan 2024) memberikan sinyal bahwa ketergantungan pada persediaan sebagai komponen aset lancar masih cukup tinggi. Quick Ratio mengukur likuiditas dengan mengecualikan persediaan yang dianggap kurang likuid dibandingkan kas atau piutang. Maka, Quick Ratio yang tidak mencapai angka 1 mengindikasikan bahwa apabila persediaan tidak cepat dikonversi menjadi kas, terdapat potensi risiko keterbatasan likuiditas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara mendadak.

Rasio solvabilitas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Dalam periode tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kota Bima menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam rasio solvabilitasnya, yang ditunjukkan oleh fluktuasi rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal (ekuitas).



Tabel 2.125. Analisa Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | Uraian | Rasio Solvabilitas | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Total Aset | 1.922.503.673.289,21 | 1.946.039.896.348,25 | 2.101.200.364.710,09 | 2.256.790.013.825,72 | 2.144.267.310.863,53 |
| | Kewajiban | 2.256.420.850,40 | 728.647.582,76 | 739.857.783,51 | 8.895.417.511,87 | 397.615.392,00 |
| 1 | Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | 0,02 |
| | Ekuitas | 1.920.247.252.438,80 | 1.948.090.010.502,74 | 2.100.460.506.926,58 | 2.218.552.098.313,85 | 2.143.869.695.471,53 |
| | Kewajiban | 2.256.420.850,40 | 728.647.582,76 | 739.857.783,51 | 8.895.417.511,87 | 397.615.392,00 |
| 2 | Rasio Hutang Terhadap Modal | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,40 | 0,02 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 (Audited)



2.6.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, akan diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; serta Analisis Pembiayaan, yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

2.6.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk kebutuhan aparatur dapat menurun dan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan menjadi meningkat, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Proporsi penggunaan belanja daerah Kota Bima disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.126. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bima Tahun 2020-2024

| No. | Uraian | Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Belanja Pegawai) | Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) | Persentase (%) |
|-----|---------------------|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | $5 = 3 / 4 \times 100\%$ |
| 1 | Tahun Anggaran 2020 | 360.913.051.466,29 | 797.653.090.963,73 | 45,25 |
| 2 | Tahun Anggaran 2021 | 357.437.167.837,55 | 718.700.153.286,42 | 49,73 |
| 3 | Tahun Anggaran 2022 | 361.680.806.870,00 | 751.196.056.304,73 | 48,15 |
| 4 | Tahun Anggaran 2023 | 372.071.721.926,00 | 831.917.497.925,25 | 44,72 |
| 5 | Tahun Anggaran 2024 | 448.064.545.062,00 | 893.324.937.238,00 | 50,16 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 (Audited)

2.6.3.2. Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran dikenal Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang



perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis Pembiayaan Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Surplus/defisit riil anggaran Kota Bima yang disajikan pada tabel di bawah menunjukkan bahwa Kota Bima memiliki surplus pada tahun 2021, 2022 dan 2024. Sementara pada tahun 2020 dan 2023 anggaran mengalami defisit.



Tabel 2.127. Defisit Riil Anggaran Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | Uraian | Realisasi (Rp) | | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 715.383.787.682,95 | 729.687.511.750,67 | 805.811.256.060,22 | 775.350.784.743,70 | 899.569.714.005,82 |
| | <i>Dikurangi Realisasi :</i> | | | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 796.653.090.963,73 | 716.700.153.286,42 | 749.196.056.304,73 | 829.917.497.925,25 | 893.324.937.238,00 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 1.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |
| | Defisit Riil | -82.269.303.280,78 | 10.987.358.464,25 | 54.615.199.755,49 | -56.566.713.181,55 | 6.244.776.767,82 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 (Audited)



Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), Pemerintah Kota Bima dihadapkan pada tantangan dinamis dalam menjaga keseimbangan fiskal antara pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan. Defisit riil anggaran yang terjadi pada beberapa tahun menjadi refleksi atas tekanan fiskal yang membutuhkan perhatian strategis.

Tahun 2020 menjadi tahun paling menantang dengan defisit riil mencapai Rp82,27 miliar, dipengaruhi oleh tingginya realisasi belanja daerah yang mencapai hampir Rp797 miliar, sementara pendapatan hanya Rp715 miliar. Kondisi ini merepresentasikan tekanan fiskal yang signifikan, terutama dalam masa awal pandemi COVID-19 yang memengaruhi kinerja pendapatan dan mendorong kebutuhan belanja penanganan krisis. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, Pemerintah Kota Bima berhasil mengubah tantangan tersebut menjadi peluang konsolidasi fiskal, dengan mencatat surplus riil masing-masing sebesar Rp10,99 miliar dan Rp54,61 miliar. Ini menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui efisiensi belanja dan peningkatan kapasitas pendapatan. Peningkatan surplus ini juga memperlihatkan adanya perbaikan disiplin fiskal dan perencanaan anggaran yang lebih realistis.

Tantangan kembali muncul pada tahun 2023, di mana tercatat defisit riil sebesar Rp56,57 miliar, disebabkan oleh realisasi belanja yang meningkat signifikan hingga Rp829,9 miliar, sementara pendapatan tidak mengalami pertumbuhan yang sebanding. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja prioritas yang bersifat strategis dan perluasan program pembangunan belum sepenuhnya didukung oleh pendapatan riil yang cukup, sehingga menimbulkan tekanan kembali terhadap kestabilan fiskal. Tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang positif, dengan surplus riil sebesar Rp6,24 miliar, sebagai hasil pengendalian belanja dan peningkatan pendapatan daerah menjadi hampir Rp900 miliar. Namun, perlu dicatat bahwa tahun ini tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan, yang menunjukkan pendekatan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.



Tabel 2.128. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bima Tahun 2020-2024

| No | Uraian | Realisasi (Rp) | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|---|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pendapatan Daerah | 715.383.787.682,95 | 729.687.511.750,67 | 805.811.256.060,22 | 775.350.784.743,70 | 899.569.714.005,82 | 6,17 |
| 2 | Belanja Daerah | 796.653.090.963,73 | 716.700.153.286,42 | 749.196.056.304,73 | 829.917.497.925,25 | 893.324.937.238,00 | 3,23 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan | 1.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | -25,00 |
| A | Defisit Riil | -82.269.303.280,78 | 10.987.358.464,25 | 54.615.199.755,49 | -56.566.713.181,55 | 6.244.776.767,82 | -7,72 |
| Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan | | | | | | | |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 93.241.433.641,71 | 10.973.784.614,93 | 21.962.179.832,18 | 76.583.026.629,67 | 17.799.857.573,12 | 45,96 |
| 2 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 1.654.254,00 | 1.036.753,00 | 5.647.042,00 | 9.204.963,00 | 0,00 | 92,59 |
| B | Total Realisasi Penerimaan | 93.243.087.895,71 | 10.974.821.367,93 | 21.967.826.874,18 | 76.592.231.592,67 | 17.799.857.573,12 | 45,96 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | | 10.973.784.614,93 | 21.962.179.832,18 | 76.583.026.629,67 | 20.025.518.411,12 | 24.044.634.340,94 | 73,76 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 (Audited)



2. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2019 hingga 2023 disajikan dalam Tabel di bawah ini.



Tabel 2.129. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bima Tahun 2020-2024

| No. | Uraian | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-----|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 |
| 1 | Jumlah SiLPA | 10.973.784.614,93 | 100,00 | 21.962.179.832,18 | 100,00 | 76.574.980.266,41 | 100,00 | 20.025.518.411,12 | 100,00 | 24.044.634.340,94 | 100,00 |
| 2 | Pelampauan Penerimaan PAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kegiatan Lanjutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2020-2024 (Audited)



2.6.4. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan daerah dimaksud untuk memberikan gambaran proyeksi pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Analisa kerangka pendanaan didahului dengan menganalisa sumber dan jenis obyek-obyek pendapatan, bidang-bidang pembangunan yang membutuhkan pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dalam susunan/struktur APBD serta perkembangan neraca daerah yang meliputi aset daerah, hutang dan ekuitas dana.

2.6.4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan Daerah untuk tahun 2025-2029 secara umum didasarkan pada perkembangan penerimaan pendapatan pada kurun waktu 2020-2024. Tren pertumbuhan anggaran dalam kurun waktu yang semakin panjang secara konseptual merefleksikan bagaimana kemampuan pencapaian penerimaan pendapatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan dari berbagai sumber yang ada. Namun demikian, penentuan anggaran ini juga mempertimbangkan karakteristik pendapatan daerah, sehingga penentuan anggaran berdasarkan tren relatif kurang tepat; sebagai contoh terkait dengan dana perimbangan, yang penentuan besarnya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Mengingat karakteristik pendapatan yang berbeda, proyeksi pendapatan diperhitungkan dari perkembangan masing-masing sumber pendapatan daerah dan berbagai asumsi yang diperkirakan akan mempengaruhi penerimaan di masa mendatang. Terkait dengan itu, beberapa asumsi yang digunakan dalam memproyeksikan besaran anggaran pendapatan daerah dengan data dasar APBD murni tahun 2024 yaitu:

- a. Asumsi perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan pendekatan pertumbuhan linier untuk setiap komponennya.
- b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diproyeksikan meningkat sebesar 8,5%, hal ini didasarkan pada komitmen pemerintah kota dalam upaya mengoptimalkan potensi lokal sebagai penunjang dalam peningkatan pendapatan. Sedangkan



komponen PAD berupa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah dianggap konstan.

- c. Perhitungan proyeksi Pendapatan Transfer mengalami kenaikan pada komponen Pendapatan Transfer Pusat sebesar 10 persen dengan asumsi terjadi peningkatan pada penerimaan alokasi DAU dan DAK, penentuan terjadinya kenaikan tersebut sebetulnya masih dalam pertimbangan yang relatif optimis bahwa pemerintah pusat tidak menerapkan kebijakan penurunan pemberian dana perimbangan. Sedangkan pada komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksi akan mengalami kenaikan sebesar 22 persen. Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari komponen Bantuan Keuangan Provinsi. Komponen ini diproyeksikan menurun dengan asumsi bahwa Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kota Bima akan semakin berkurang seiring dengan semakin banyaknya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Kota Bima dengan nilai yang semakin naik juga.

Kebijakan pendapatan merupakan rencana jangka menengah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan agar kapasitas fiskal daerah mampu menopang upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan pendapatan tahun 2025-2029 difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

1. Optimalisasi Pajak Daerah
 - Program digitalisasi pemungutan pajak daerah (aplikasi pembayaran online dan QRIS).
 - Pemutakhiran database wajib pajak melalui pendataan ulang berbasis GIS.
 - Program peningkatan kepatuhan pajak (sosialisasi, insentif/diskon, dan penegakan hukum).
 - Intensifikasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PBB-P2, dan BPHTB.
2. Peningkatan Retribusi Daerah
 - Modernisasi sistem retribusi pasar tradisional, parkir, dan terminal.
 - Pengembangan sistem retribusi persampahan berbasis digital.
 - Peningkatan layanan perizinan berusaha melalui aplikasi terpadu dengan tarif retribusi sesuai potensi.



- Penataan dan optimalisasi pemungutan retribusi fasilitas umum (gedung serbaguna, lapangan olahraga, area wisata).
 - Pada Tahun 2026 Retribusi Daerah di proyeksi akan mengalami penambahan dari Rumah Sakit Rujukan yang telah selesai dibangun dan dioperasikan, selain itu parkir elektronik pada Rumah Sakit Rujukan memberikan kontribusi tambahan pada kenaikan retribusi daerah.
 - Pada tahun 2027 Pemerintah Kota Bima berencana untuk membangun Pengolahan Limbah B3, selain untuk mengatasi permasalahan pengolahan limbah medis yang selama ini dikirim ke luar pulau, pengolahan limbah B3 yang dibangun juga akan meningkatkan retribusi daerah mengingat cakupan layanan pengolahan limbah B3 termasuk wilayah Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Revitalisasi dan Penguatan BUMD
- Restrukturisasi BUMD untuk meningkatkan kinerja usaha.
 - Program pengembangan BUMD sektor potensial: air bersih, perdagangan hasil bumi, pariwisata, dan energi terbarukan.
 - Penetapan target dividen tahunan BUMD untuk meningkatkan kontribusi PAD.
 - Penerapan tata kelola BUMD berbasis good corporate governance.
4. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
- Program inventarisasi aset daerah secara menyeluruh berbasis digital.
 - Valuasi aset sesuai harga pasar untuk meningkatkan nilai sewa/kerja sama.
 - Pemanfaatan aset idle melalui kerja sama swasta (KPBU atau sewa jangka panjang).
 - Penyusunan masterplan pemanfaatan aset strategis daerah.
5. Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai Basis PAD Baru
- Pengembangan destinasi wisata unggulan Kota Bima (wisata pantai, sejarah, dan budaya).
 - Penyelenggaraan event pariwisata, budaya, dan olahraga bertaraf regional/nasional.
 - Penguatan branding produk UMKM Kota Bima agar masuk dalam rantai pasar modern dan digital.



- Peningkatan retribusi wisata melalui sistem tiket elektronik.
6. Peningkatan Kapasitas SDM dan Sistem Pengelolaan PAD
- Pelatihan dan sertifikasi aparatur pengelola pajak, retribusi, dan aset.
 - Integrasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) yang realtime dan akuntabel.
 - Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja PAD per OPD.
 - Program transparansi publik melalui dashboard PAD berbasis web yang bisa diakses masyarakat.

Tabel 2.130. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026-2030

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pemanfaatan aset daerah (sewa gedung, lapangan, kios). - Implementasi e-parking di titik strategis. - Inovasi retribusi baru (lingkungan & pariwisata). - Parkir elektronik Rumah Sakit Rujukan - Retribusi Rumah Sakit Rujukan | <ul style="list-style-type: none"> - Digitalisasi penuh semua pajak daerah. - Audit aset daerah untuk meningkatkan pemanfaatan. - Kerja sama swasta (CSR, BUMD, BPR) untuk investasi PAD. - Pengolahan Limbah B3 Medis | <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan destinasi wisata lokal untuk sumber retribusi baru. - Penyesuaian tarif retribusi berbasis inflasi. - Integrasi sistem PAD dengan aplikasi Pemda (transparansi publik). | <ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak reklame, parkir, dan hiburan. - Mendorong BUMD lebih produktif → dividen meningkat. - Monitoring realisasi triwulan dengan reward/punishment OPD. | <ul style="list-style-type: none"> - Konsolidasi seluruh sistem PAD digital. - Evaluasi akhir RPJMD: proyeksi menuju RPJPD 2045. - Finalisasi potensi PAD baru berbasis ekonomi digital & pariwisata. |

Sumber: Hasil Analisis, Bappeda, 2025

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kota Bima dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kota Bima untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kota Bima. Sumber-sumber pendanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) Bantuan Keuangan Provinsi; dan 3) Corporate Social Responsibility (CSR).



Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

CSR terbagi menjadi beberapa jenis kegiatan, diantaranya yaitu:

- 1) Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Lingkungan, kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
- 3) Kesehatan, diarahkan untuk menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pendidikan, diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- 5) Peningkatan daya beli, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan dan pasar tradisional;
- 6) Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;



- 7) Lainnya, program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan Pemda.

Program Corporate Social Responsibility (CSR)¹ dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menduduki peran penting. Pertama, program CSR menunjukkan kepedulian dari corporate atau perusahaan untuk ikut memikirkan dan mengembangkan masyarakat baik dari sisi program sosial maupun dari sisi penyisian sebagian dana profit perusahaan yang diperuntukkan pada program tanggung jawab sosial. Kedua, program CSR menunjukkan keikutsertaan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan ketika melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Disisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha maksimalisasi keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan Corporate Social Responsibility (CSR) kini menjadi isu sentral dan semakin populer serta ditempatkan pada posisi yang terhormat. Karena itu, kian banyak pula kalangan dunia usaha dan pihak-pihak terkait mulai merespon wacana ini, tidak sekedar mengikuti tren tanpa memahami esensi dan manfaatnya. Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. Kegiatan CSR penting dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan. juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial.

Hasil proyeksi pendapatan daerah Kota Bima tahun 2025-2030 secara rinci ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 2.131. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030

| Kode | Uraian | Baseline Tahun 2024 | Proyeksi Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | |
| 04:01 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 57.053.592.782 | 95.447.255.577 | 99.919.396.695 | 107.073.110.464 | 122.587.502.495 | 140.734.838.592 | 10,28 |
| 04:01:01 | Pajak Daerah | 23.190.263.989 | 42.624.430.102 | 44.755.651.607 | 46.993.434.187 | 51.692.777.606 | 56.862.055.367 | 7,50 |
| 04:01:02 | Retribusi Daerah | 25.378.365.488 | 46.818.392.265 | 49.159.311.878 | 54.075.243.066 | 64.890.291.679 | 77.868.350.015 | 13,75 |
| 04:01:03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.622.635.153 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0,00 |
| 04:01:04 | Lain-lain PAD yang Sah | 5.862.328.152 | 4.004.433.210 | 4.004.433.210 | 4.004.433.210 | 4.004.433.210 | 4.004.433.210 | 0,00 |
| 04:02 | PENDAPATAN TRANSFER | 757.753.927.550 | 754.917.384.521 | 767.944.481.768 | 770.033.885.426 | 772.227.759.268 | 774.531.326.802 | 0,65 |
| 04:02:01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 698.388.310.312 | 715.065.633.296 | 726.102.822.296 | 726.102.822.296 | 726.102.822.296 | 726.102.822.296 | 0,39 |
| 04:02:02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 59.365.617.238 | 39.851.751.225 | 41.841.659.472 | 43.931.063.130 | 46.124.936.972 | 48.428.504.506 | 4,99 |
| 04:03 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 84.762.193.674 | 15.270.000.000 | 15.270.000.000 | 15.270.000.000 | 15.270.000.000 | 19.851.000.000 | 7,50 |
| 04:03:01 | Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 04:03:03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 84.762.193.674 | 15.270.000.000 | 15.270.000.000 | 15.270.000.000 | 15.270.000.000 | 19.851.000.000 | 7,50 |
| | Jumlah Pendapatan | 899.569.714.006 | 865.634.640.098 | 883.133.878.463 | 892.376.995.890 | 910.085.261.764 | 935.117.165.394 | 1,95 |

Sumber: Hasil Analisis



2.6.4.2. Proyeksi Belanja yang Bersifat Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Format laporan keuangan yang dibuat mengikuti ketentuan dalam Permendagri Nomor 60 tahun 2020 yang membagi belanja menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi belanja dilakukan dengan menggunakan pendekatan linear. Namun demikian, penentuan belanja ini juga mempertimbangkan anggaran pendapatan dan ketersediaan surplus anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Mencermati pola belanja dalam laporan keuangan yang tersedia yaitu tahun anggaran 2019 sampai dengan 2023, dapat diambil beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pola perubahan belanja operasi menunjukkan perubahan yang relatif konstan. Oleh karena itu, proyeksi terhadap belanja ini menggunakan pendekatan linear dengan mempertimbangan kebijakan penerimaan pegawai PPPK serta asumsi kenaikan DAK Non fisik TPG dan Tamsil sehingga mempengaruhi ketentuan perhitungan belanja pegawai maksimal 30% selama 5 tahun.
2. Pola perubahan belanja modal sangat berfluktuasi, tidak sama antar satu belanja dengan belanja lain. Namun demikian, dikarenakan karakteristik belanja ini yang bersifat strategis terhadap peningkatan pelayanan publik, maka target belanja ini dinaikkan sesuai (akan linear) dengan perubahan pendapatan. Idealnya porsi belanja ini akan terus meningkat seiring dengan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik. Selama periode ini, Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kapasitas fiskalnya dengan mengoptimalkan potensi lokal yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.



Hasil proyeksi belanja daerah Kota Bima tahun 2025-2029 secara rinci ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 2.132. Proyeksi Belanja Tahun 2026-2030

| Kode | Uraian | Baseline Tahun 2024 | Proyeksi Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5 | BELANJA | | | | | | | |
| 05:01 | BELANJA OPERASI | 774.585.834.029 | 791.962.957.946 | 799.882.587.525 | 807.081.530.813 | 815.152.346.121 | 823.303.869.582 | 0,98 |
| 05:01:01 | Belanja Pegawai | 448.064.545.062 | 513.500.190.272 | 518.635.192.174 | 523.302.908.904 | 528.535.937.993 | 533.821.297.373 | |
| 05:01:02 | Belanja Barang dan Jasa | 279.668.139.717 | 258.226.943.474 | 260.809.212.909 | 263.156.495.825 | 265.788.060.783 | 268.445.941.391 | |
| 05:01:05 | Belanja Hibah | 43.680.149.250 | 13.689.774.200 | 13.826.671.942 | 13.951.111.989 | 14.090.623.109 | 14.231.529.340 | |
| 05:01:06 | Belanja Bantuan Sosial | 3.173.000.000 | 6.546.050.000 | 6.611.510.500 | 6.671.014.095 | 6.737.724.235 | 6.805.101.478 | |
| 05:02 | BELANJA MODAL | 117.434.068.509 | 102.095.727.085 | 104.248.894.938 | 106.293.069.077 | 115.930.519.643 | 132.810.899.812 | 6,92 |
| 05:02:01 | Belanja Modal Tanah | 2.282.760.420 | 2.094.328.460 | 2.136.215.029 | 2.178.939.330 | 2.375.043.869 | 2.719.425.231 | |
| 05:02:02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 23.323.712.118 | 7.245.018.015 | 7.389.918.375 | 7.537.716.743 | 8.216.111.250 | 9.407.447.381 | |
| 05:02:03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 42.504.291.643 | 70.456.960.500 | 71.866.099.710 | 73.303.421.704 | 79.900.729.658 | 91.486.335.458 | |
| 05:02:04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 47.137.157.328 | 22.134.420.110 | 22.691.661.823 | 23.107.991.300 | 25.273.634.866 | 29.032.691.743 | |
| 05:02:05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 148.641.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:02:06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 2.037.506.000 | 165.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 | |



| Kode | Uraian | Baseline Tahun 2024 | Proyeksi Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|----------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 05:03 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.305.034.700 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 | 0,00 |
| 05:03:01 | Belanja Tidak Terduga | 1.305.034.700 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 | |
| | Jumlah Belanja | 893.324.937.238 | 896.061.081.031 | 906.133.878.463 | 915.376.995.890 | 933.085.261.764 | 958.117.165.394 | 1,69 |

Sumber: Hasil Analisis, Bappeda, 2025



2.6.4.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah, yaitu total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan belanja yang bersifat mengikat. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.133. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030

| Uraian | Baseline Tahun 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan | 917.369.571.579 | 896.061.081.031 | 908.133.878.463 | 917.376.995.890 | 935.085.261.764 | 960.117.165.394 |
| Pendapatan | 899.569.714.006 | 865.634.640.098 | 883.133.878.463 | 892.376.995.890 | 910.085.261.764 | 935.117.165.394 |
| Penerimaan Pembiayaan | 17.799.857.573 | 30.426.440.933 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 |
| | | | | | | |
| Prioritas 1 (Belanja Yang Bersifat Mengikat) | 727.732.684.779 | 771.727.133.746 | 779.444.405.083 | 786.459.404.729 | 794.323.998.776 | 802.267.238.764 |
| Belanja Pegawai | 448.064.545.062 | 513.500.190.272 | 518.635.192.174 | 523.302.908.904 | 528.535.937.993 | 533.821.297.373 |
| Belanja Barang dan Jasa | 279.668.139.717 | 258.226.943.474 | 260.809.212.909 | 263.156.495.825 | 265.788.060.783 | 268.445.941.391 |
| | | | | | | |
| Kapasitas riil kemampuan keuangan | 189.636.886.800 | 124.333.947.285 | 128.689.473.380 | 130.917.591.161 | 140.761.262.988 | 157.849.926.630 |

Sumber: Hasil Analisis



Pengalokasian belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Kota Bima menyesuaikan dengan pendapatan daerah. Belanja daerah diproyeksikan meningkat dari **896,061 miliar** pada tahun 2026 menjadi **958,117 miliar** pada tahun 2030. Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kota Bima sebagai berikut.

1. Anggaran belanja daerah yang ditetapkan dalam periode 2025-2029 sebagian besar melebihi anggaran pendapatan daerah. Anggaran selama periode berjalan cenderung mengalami defisit setiap tahunnya, namun hal ini relatif teratasi karena adanya SiLPA pada tahun-tahun sebelumnya.
2. Belanja diprioritaskan pada belanja yang bersifat mengikat, dalam hal ini belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
3. Selebihnya dari saldo anggaran yang ada, akan digunakan untuk membiayai belanja wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
4. Belanja modal dianggarkan semakin meningkat. Peningkatan belanja ini ditujukan untuk pemenuhan barang-barang publik (*public goods*), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari layanan publik yang disediakan.
5. Komitmen pembiayaan terkait dengan kepemilikan pada Badan Usaha Milik Daerah, baik yang dimiliki oleh pemerintah kota maupun provinsi mengacu pada peraturan tentang penyertaan modal pemerintah daerah.
6. Belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil penghitungan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.134. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030

| Kode | Uraian | Baseline 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | | | |
| 04:01 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 57.053.592.782 | 95.447.255.577 | 99.919.396.695 | 107.073.110.464 | 122.587.502.495 | 140.734.838.592 |
| 04:01:01 | Pajak Daerah | 23.190.263.989 | 42.624.430.102 | 44.755.651.607 | 46.993.434.187 | 51.692.777.606 | 56.862.055.367 |
| 04:01:02 | Retribusi Daerah | 25.378.365.488 | 46.818.392.265 | 49.159.311.878 | 54.075.243.066 | 64.890.291.679 | 77.868.350.015 |
| 04:01:03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.622.635.153 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 04:01:04 | Lain-lain PAD yang Sah | 5.862.328.152 | 4.004.433.210 | 4.004.433.210 | 4.004.433.210 | 4.004.433.210 | 4.004.433.210 |
| 04:02 | PENDAPATAN TRANSFER | 757.753.927.550 | 754.917.384.521 | 767.944.481.768 | 770.033.885.426 | 772.227.759.268 | 774.531.326.802 |
| 04:02:01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 698.388.310.312 | 715.065.633.296 | 726.102.822.296 | 726.102.822.296 | 726.102.822.296 | 726.102.822.296 |
| 04:02:02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 59.365.617.238 | 39.851.751.225 | 41.841.659.472 | 43.931.063.130 | 46.124.936.972 | 48.428.504.506 |
| 04:03 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 84.762.193.674 | 15.270.000.000 | 15.270.000.000 | 15.270.000.000 | 15.270.000.000 | 19.851.000.000 |
| 04:03:01 | Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:03:03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 84.762.193.674 | 15.270.000.000 | 15.270.000.000 | 15.270.000.000 | 15.270.000.000 | 19.851.000.000 |
| | Jumlah Pendapatan | 899.569.714.006 | 865.634.640.098 | 883.133.878.463 | 892.376.995.890 | 910.085.261.764 | 935.117.165.394 |
| | | | | | | | |



| Kode | Uraian | Baseline 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5 | BELANJA | 893.324.937.238 | 896.061.081.031 | 906.133.878.463 | 915.376.995.890 | 933.085.261.764 | 958.117.165.394 |
| 05:01 | BELANJA OPERASI | 774.585.834.029 | 791.962.957.946 | 799.882.587.525 | 807.081.530.813 | 815.152.346.121 | 823.303.869.582 |
| 05:01:01 | Belanja Pegawai | 448.064.545.062 | 513.500.190.272 | 518.635.192.174 | 523.302.908.904 | 528.535.937.993 | 533.821.297.373 |
| 05:01:02 | Belanja Barang dan Jasa | 279.668.139.717 | 258.226.943.474 | 260.809.212.909 | 263.156.495.825 | 265.788.060.783 | 268.445.941.391 |
| 05:01:05 | Belanja Hibah | 43.680.149.250 | 13.689.774.200 | 13.826.671.942 | 13.951.111.989 | 14.090.623.109 | 14.231.529.340 |
| 05:01:06 | Belanja Bantuan Sosial | 3.173.000.000 | 6.546.050.000 | 6.611.510.500 | 6.671.014.095 | 6.737.724.235 | 6.805.101.478 |
| 05:02 | BELANJA MODAL | 117.434.068.509 | 102.095.727.085 | 104.248.894.938 | 106.293.069.077 | 115.930.519.643 | 132.810.899.812 |
| 05:02:01 | Belanja Modal Tanah | 2.282.760.420 | 2.094.328.460 | 2.136.215.029 | 2.178.939.330 | 2.375.043.869 | 2.719.425.231 |
| 05:02:02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 23.323.712.118 | 7.245.018.015 | 7.389.918.375 | 7.537.716.743 | 8.216.111.250 | 9.407.447.381 |
| 05:02:03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 42.504.291.643 | 70.456.960.500 | 71.866.099.710 | 73.303.421.704 | 79.900.729.658 | 91.486.335.458 |
| 05:02:04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 47.137.157.328 | 22.134.420.110 | 22.691.661.823 | 23.107.991.300 | 25.273.634.866 | 29.032.691.743 |
| 05:02:05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 148.641.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:02:06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 2.037.506.000 | 165.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 |
| 05:03 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.305.034.700 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 |
| 05:03:01 | Belanja Tidak Terduga | 1.305.034.700 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 | 2.002.396.000 |
| | Jumlah Belanja | 893.324.937.238 | 896.061.081.031 | 906.133.878.463 | 915.376.995.890 | 933.085.261.764 | 958.117.165.394 |



| Kode | Uraian | Baseline 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Total Surplus/(Defisit) | 6.244.776.768 | -30.426.440.933 | -23.000.000.000 | -23.000.000.000 | -23.000.000.000 | -23.000.000.000 |
| | | | | | | | |
| | 6 PEMBIAYAAN | | | | | | |
| 06:01 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 17.799.857.573 | 30.426.440.933 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 |
| 06:01:01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 17.799.857.573 | 30.426.440.933 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 17.799.857.573 | 30.426.440.933 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 |
| 06:02 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0 | 0 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 06:02:02 | Penyertaan Modal Daerah | 0 | 0 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| | Pembiayaan Netto | 17.799.857.573 | 30.426.440.933 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 |
| 06:03 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 24.044.634.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Hasil Analisis, 2024



2.7. Permasalahan dan Isu Strategis

Gambaran kondisi Kota Bima yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan. Untuk itu, tentunya diperlukan analisis yang bersifat adaptif dan solutif atas berbagai kondisi masyarakat yang belum ideal tersebut. Analisis isu strategis merupakan sebuah jawaban dimana dapat menghasilkan rumusan isu yang bersifat adaptif dan solutif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan suatu daerah. Di sisi lain, isu strategis juga merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Perumusan permasalahan dan isu-isu strategis Kota Bima juga tidak terlepas dari kebijakan di tingkat nasional dan provinsi. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi baik di level nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat turut diperhatikan agar tercipta kesinambungan terhadap isu-isu dan permasalahan yang harus diselesaikan bersama.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kota Bima merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas

2.7.1. Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur di suatu wilayah dengan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Proses ini melibatkan berbagai upaya dan strategi yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan saat ini, serta menciptakan peluang baru, sehingga wilayah tersebut dapat berkembang secara lebih seimbang dan berkelanjutan. Akan tetapi, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, sering kali



dihadapi berbagai masalah dan isu yang kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah kesenjangan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang tertinggal. Kesenjangan ini mencerminkan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan kesempatan ekonomi, yang sering kali menghambat pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah.

Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk sumber daya alam, finansial, maupun manusia, menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa sumber daya yang memadai, sulit untuk melaksanakan program-program pembangunan secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Tata kelola pemerintahan yang tidak optimal juga dapat memperburuk situasi. Masalah seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar lembaga sering kali mengakibatkan pemborosan sumber daya dan pelaksanaan yang tidak efisien.

Kemungkinan terjadinya bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, atau kekeringan, hingga longsor juga dapat memberikan dampak negatif yang besar terhadap proses pembangunan. Bencana alam dapat merusak infrastruktur, mengakibatkan kerugian ekonomi, dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Isu sosial budaya, seperti konflik antar kelompok, perbedaan nilai, dan ketidaksetaraan gender, juga memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Dalam mengatasi masalah-masalah ini dibutuhkan pendekatan yang sensitif dan inklusif agar proses pembangunan dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di samping itu, struktur ekonomi daerah yang tidak seimbang, misalnya ketergantungan pada satu sektor ekonomi atau kekurangan dalam diversifikasi, dapat menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam pembangunan daerah sangat diperlukan. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan langkah krusial untuk menciptakan daerah yang lebih maju, adil dan berkelanjutan.

Pembahasan mengenai permasalahan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ini sangat penting sebagai dasar untuk merumuskan solusi yang tepat. Solusi ini kemudian dapat dituangkan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok



pembangunan jangka menengah. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kerjasama dari berbagai pihak, Kota Bima dan daerah lainnya memiliki potensi untuk mengatasi tantangan yang ada, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk.

2.7.1.1. Tingkat ketenteraman dan perlindungan masyarakat belum optimal, serta nilai-nilai agama dan budaya belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan sosial.

Tingginya angka pelanggaran terhadap prinsip Ketertiban, Kenyamanan, dan Keindahan (K3) di Kota Bima mencerminkan masih lemahnya ketundukan masyarakat terhadap norma sosial dan peraturan daerah. Permasalahan ini ditandai oleh meningkatnya kasus konflik sosial, kriminalitas, dan pelanggaran peraturan daerah, yang menunjukkan belum optimalnya sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban wilayah.

Beberapa akar masalah turut memperburuk kondisi ini, di antaranya rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai hidup berbangsa, lemahnya deteksi dini terhadap potensi konflik, serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING). Kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi menjaga lingkungan yang tertib dan nyaman juga masih lemah karena minimnya sistem kolaborasi antara masyarakat dan aparat keamanan, baik secara teknis maupun kelembagaan.

Selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah juga masih rendah, yang diperparah oleh belum optimalnya pelayanan terhadap pengaduan pelanggaran, minimnya sarana-prasarana penegakan Perda, serta lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengawasan dan penegakan peraturan.

Rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan nyaman. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem deteksi dini, revitalisasi SISKAMLING, peningkatan literasi hukum dan wawasan kebangsaan, serta penegakan Perda secara konsisten dan kolaboratif.



Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **tingkat ketenteraman dan perlindungan masyarakat belum optimal, serta nilai-nilai agama dan budaya belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan sosial** dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135. *Tingkat Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat Belum Optimal, Serta Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Belum Sepenuhnya Tercermin Dalam Kehidupan Sosial*

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---|--|--|
| 1 | Angka Pelanggaran Ketertiban, Kenyamanan dan Keindahan (K3) yang masih tinggi | Angka konflik sosial dan kasus kriminalitas yang masih tinggi | Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan |
| | | | Deteksi dini potensi konflik masih rendah |
| | | | Lemahnya Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) dengan swadaya Masyarakat |
| | | | Sarana dan prasarana deteksi konflik yang belum terintegrasi |
| | | | Belum Optimalnya kemitraan dengan pihak eksternal |
| | | | Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah |
| | | Rendahnya kesadaran dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah (Perda) | Belum optimalnya pelayanan terhadap aduan masyarakat |
| | | | Kurangnya sarana prasarana pendukung penegakan Peraturan Daerah |
| | | | Masih banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah |
| | | | Lemahnya regulasi penegakan Peraturan Daerah |
| | | | Lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah |
| | | | 2 |
| Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menerapkan nilai ajaran agama | | | |
| Perubahan budaya yang cepat | | | |
| Pengaruh budaya Luar dan perkembangan teknologi | | | |
| Masih rendahnya pendidikan karakter | | | |
| Kurangnya keteladanan pemimpin, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama | | | |



| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---------------|---------|--|
| | | | Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang nilai nilai budaya lokal dan adat istiadat |
| | | | Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, dan pemeliharaan terhadap obyek budaya |
| | | | tradisi dan budaya lokal yang belum sepenuhnya diterima oleh sebagian kelompok masyarakat |

Sumber: Bappeda, Hasil Analisis, 2025

2.7.1.2. Kualitas SDM masih tertinggal, minimnya prestasi serta partisipasi dalam pembangunan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, Kota Bima masih menghadapi tantangan serius dalam hal kualitas SDM, yang tercermin dari beberapa indikator penting pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bima dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, namun masih berada di bawah Kota Mataram, rata-rata Provinsi NTB, maupun nasional. Pada tahun 2023, IPM Kota Bima mencapai angka 78,24, lebih rendah dari 81,64 di Kota Mataram dan 74,97 di Provinsi NTB. Hal ini menandakan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita penduduk di Kota Bima masih belum setara dengan daerah-daerah lain yang lebih maju.

Rendahnya kualitas SDM ini juga diperkuat oleh capaian Umur Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2023, UHH Kota Bima berada di angka 70,58 tahun, lebih rendah dibandingkan UHH Kota Mataram (73,15 tahun) dan nasional (73,29 tahun). Fakta ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Bima masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi pelayanan kesehatan dasar, lingkungan hidup, maupun kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

Sektor pendidikan juga menjadi salah satu akar dari rendahnya kualitas SDM. Berdasarkan data Rapor Pendidikan 2024, kemampuan numerasi siswa SD dan SMP masih rendah, dengan nilai Indeks SPM sebesar 76,21. Di samping itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bima pada tahun 2023 hanya 9,71 tahun, lebih rendah dari Kota Mataram (11,04 tahun) dan rata-rata nasional (8,85 tahun). Bahkan, Kota



Bima berada di urutan ke-55 dari 101 kota di Indonesia, menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan masih perlu ditingkatkan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan atas.

Selain tantangan di bidang pendidikan, aspek kesehatan juga menjadi faktor signifikan dalam rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Bima. Kondisi kesehatan ibu dan anak merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pelayanan kesehatan dasar.

Data Profil Kesehatan Kota Bima Tahun 2023 mencatat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Bima sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup, sementara Angka Kematian Balita (AKABA) tercatat sebanyak 10 kasus. Kedua angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam memastikan pelayanan kesehatan ibu dan anak berjalan secara efektif, terutama dalam aspek gizi, imunisasi, dan akses layanan kesehatan dasar di wilayah rentan.

Sementara itu, Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan fluktuasi signifikan selama periode 2018–2023. Pada tahun 2018, AKI Kota Bima tercatat sebesar 198,21 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat drastis pada 2019 menjadi 348,63, sebelum menurun pada tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai 177,43 pada tahun 2023. Walaupun tren penurunan AKI cukup menjanjikan, angkanya masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan target nasional, serta menunjukkan bahwa faktor risiko kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas masih cukup besar di Kota Bima.

Berbagai akar permasalahan yang mempengaruhi rendahnya indikator kesehatan SDM ini antara lain: belum meratanya akses layanan kesehatan berkualitas di seluruh wilayah, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kurangnya tenaga kesehatan di fasilitas layanan dasar, serta masih terbatasnya pemanfaatan teknologi dan sistem rujukan kesehatan yang optimal.

Beberapa akar permasalahan yang melatarbelakangi rendahnya kualitas SDM di Kota Bima antara lain: masih terbatasnya akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan, serta belum optimalnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung pengembangan SDM secara menyeluruh.



Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Bima perlu menjadi fokus utama pembangunan daerah, melalui pendekatan yang integratif pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta peningkatan keterampilan masyarakat untuk menghadapi tantangan masa depan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **Kualitas SDM masih tertinggal, minimnya prestasi serta partisipasi dalam pembangunan** dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.136. *Kualitas SDM masih tertinggal, minimnya prestasi serta partisipasi dalam pembangunan*

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|---|--|
| 1 | Umur Harapan Hidup Masyarakat Kota Bima yang masih rendah | Kualitas Layanan Kesehatan yang masih rendah | Rasio sebaran Nakes yang tidak merata |
| | | | Kondisi alkes pada unit layanan belum sesuai standar |
| | | | Penyediaan obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan |
| | | | Beberapa lokasi unit layanan kesehatan berada dalam kawasan rawan bencana |
| | | | Jarak tempuh ke unit layanan kesehatan yang jauh |
| | | | Pelayanan Rumah Sakit yang belum memenuhi harapan masyarakat Kota Bima |
| | | | Masih terdapat masyarakat kota bima yang belum memiliki jaminan kesehatan |
| | | | Masih rendahnya kapasitas SDM tenaga kesehatan |
| | | | Fasilitas Penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM) di kelurahan belum tersedia |
| | | Kualitas Kesehatan Masyarakat yang masih rendah | Tingginya angka kesakitan untuk penyakit KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Urinefro) |
| | | | Angka stunting yang masih tinggi |
| | | | Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak yang masih rendah |
| | | | Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil serta belum optimalnya peningkatan gizi bayi dan balita |
| | | | Penanganan Penyakit Menular yang belum terintegrasi |
| | | | Belum optimalnya penanganan komplikasi saat persalinan dan pasca persalinan |



| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|---|
| | | | Masih tingginya bayi lahir dengan berat badan bawah garis merah (BBBGM) |
| | | | Masih tingginya bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) |
| | | Perilaku Hidup Bersih Sehat Masyarakat yang masih rendah | Masih terdapat lingkungan kumuh |
| | | | Rendahnya Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih sehat |
| | | | Fasilitas publik yang belum menyediakan prasarana penunjang perilaku hidup sehat bersih |
| 2 | Kualitas Pendidikan yang masih rendah | Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang masih rendah | Rasio Guru belum sesuai standar |
| | | | Kompetensi Guru belum memadai |
| | | | Redistribusi Guru belum merata sesuai jumlah murid |
| | | | Tenaga pustakawan pada sekolah masih kurang |
| | | Kualitas Sarana Pendidikan belum memadai | Laboratorium yang masih kurang |
| | | | Keterbatasan akses ke teknologi |
| | | | Rombongan Belajar yang tidak sesuai standar jumlah |
| | | | Alat Peraga Mengajar belum memadai |
| | | | Masih terdapat lokasi sekolah pada daerah rawan bencana |
| | | Minat baca masyarakat yang masih rendah | Koleksi judul Buku pada perpustakaan yang masih kurang |
| | | | Sarana prasarana perpustakaan yang kurang menarik |
| | | Lingkungan Pendidikan belum mengarah pada peningkatan produktivitas dan daya saing | Output Pendidikan yang belum berorientasi pada pasar tenaga kerja |
| 3 | Rata-rata Lama Sekolah Yang Masih Rendah | Masih banyak siswa dari keluarga miskin | Pendapatan Keluarga dari siswa yang masih rendah |
| | | Jarak tempuh pendidikan menengah yang | Tidak tersedia sarana transportasi umum |



| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|---|
| | | masih jauh | |
| | | Kenakalan Remaja yang semakin meningkat | Rendahnya kesadaran untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi Dampak negatif teknologi informasi |
| 4 | Kontribusi perempuan di dalam proses pembangunan masih rendah | Budaya yang berkembang dalam masyarakat belum berpihak pada perempuan | Rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian kaum perempuan Stigma terhadap kaum perempuan yang lebih rendah dari laki-laki Keterlibatan perempuan di Organisasi Publik yang masih sedikit |
| | | Angka kekerasan pada perempuan yang masih tinggi | Ekonomi masyarakat yang masih rendah Tingkat Pendidikan/pemahaman masyarakat yang rendah Sumber daya penanganan masih terbatas |
| 5 | Daya saing SDM Kota Bima yang masih rendah | Kualitas Tenaga Kerja yang masih rendah | Jumlah Penduduk yang S1, S2, dan S3 masih rendah karena biaya dan Kesadaran Sumberdaya instruktur tidak ada Sarana dan prasarana tidak memadai Karakter pencari kerja yang tidak produktif Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pelatihan |
| | | Rasio Ketergantungan masih tinggi (data penduduk) | Pengendalian penduduk belum optimal tingkat kesejahteraan penduduk usia lanjut yang rendah |
| 6 | Sedikitnya masyarakat Kota Bima yang berprestasi di Tingkat Nasional | Minimnya pembinaan dan rendahnya penghargaan bagi masyarakat berprestasi | Sarana dan prasarana yang masih kurang Minimnya event yang diselenggarakan dalam menjaring masyarakat yang berprestasi |

Sumber: Bappeda, Hasil Analisis, 2025



2.7.1.3. Kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik masih rendah, capaian indeks reformasi birokrasi yang belum memadai.

Kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi di Kota Bima masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Hal ini tercermin dari berbagai capaian elemen Reformasi Birokrasi (RB) yang belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan signifikan dan berkelanjutan.

Secara umum, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2023 berada di angka 67,4 (predikat B) dan sedikit menurun menjadi 67,1 (B) pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pemerintah belum optimal dan perlu perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja berbasis hasil.

Di sisi lain, beberapa indikator pendukung juga menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan, antara lain:

- Tingkat Implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baru mencapai nilai 41,13 (predikat Kurang) di tahun 2024, setelah sebelumnya hanya memperoleh nilai 16,27 pada tahun 2023;
- Indeks Digitalisasi Arsip masih 0 pada tahun 2023 dan hanya naik sedikit menjadi 39,76 (Kurang) di tahun 2024, menunjukkan keterbatasan dalam manajemen informasi dan dokumentasi birokrasi;
- Indeks Kualitas Kebijakan juga masih rendah di angka 86,4 (kategori Sangat Baik), namun belum cukup mengangkat kualitas reformasi kebijakan sektoral secara luas;
- Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan peningkatan dari 59,17 (kategori rentan) di tahun 2023 menjadi 66,2 (masih rentan) di tahun 2024, menandakan bahwa risiko integritas dan praktik korupsi di lingkungan birokrasi masih menjadi tantangan yang nyata.

Meskipun demikian, terdapat beberapa capaian positif yang dapat menjadi modal penguatan tata kelola ke depan, seperti:

- Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meningkat dari 90,97 (istimewa) menjadi 91,89 (istimewa);
- Indeks Sistem Merit naik tajam dari 142,5 (buruk) menjadi 257 (baik), mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem manajemen ASN;



- Opini BPK yang tetap meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut (2023–2024);
- Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik meningkat dari 87,44 menjadi 88,58, mengindikasikan penerimaan publik terhadap pelayanan pemerintah.

Namun, capaian-capaian tersebut masih harus diimbangi dengan penguatan manajemen perubahan, peningkatan literasi digital ASN, keterbukaan informasi, serta penegakan etika dan integritas birokrasi yang lebih kuat. Oleh karena itu, permasalahan rendahnya tata kelola pemerintahan dan birokrasi di Kota Bima harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, dengan menekankan agenda reformasi birokrasi tematik berdampak, khususnya pada bidang pelayanan publik, efisiensi kerja, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **Kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik masih rendah, capaian indeks reformasi birokrasi yang belum memadai** dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137. *Kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik masih rendah, capaian indeks reformasi birokrasi yang belum memadai*

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|---------------------------|--|--|
| 1 | Rendahnya Nilai Indeks RB | Kualitas SDM yang belum merata | 1. Kompetensi Pegawai masih rendah |
| | | | 2. Rekrutmen dan promosi jabatan belum memperhatikan standar kompetensi Jabatan |
| | | | 3. Perencanaan Kebutuhan Pegawai belum sepenuhnya merujuk kepada Anjab ABK |
| | | Beberapa indikator Reformasi Birokrasi belum didukung oleh Regulasi yang memadai | 1. Banyak peraturan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah |
| | | | 2. Proses birokrasi yang berbelit-belit, seperti perizinan usaha yang masih lambat meskipun ada digitalisasi layanan |
| | | Rendahnya Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1. Meskipun ada digitalisasi, banyak layanan publik yang belum sepenuhnya terintegrasi |
| 2. Kurangnya pelatihan bagi pegawai dalam mengoperasikan sistem digital. | | | |



| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---------------|--|---|
| | | Lemahnya Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja | 1. Pengawasan internal sering kali tidak efektif karena adanya kepentingan tertentu 2. Masih ada toleransi terhadap pelanggaran administratif, termasuk penyalahgunaan wewenang |
| | | Kurangnya Komitmen dan Konsistensi dari Pemimpin | 1. Pergantian kepemimpinan sering kali mengubah kebijakan reformasi birokrasi tanpa kesinambungan yang jelas 2. Beberapa pemimpin hanya menjadikan reformasi sebagai formalitas tanpa implementasi nyata |
| | | Sarana Prasarana Pelayanan Belum memadai | 1. Pemanfaatan MPP belum maksimal |

Sumber: Bappeda, Hasil Analisis, 2025

2.7.1.4. Kualitas lingkungan hidup menurun dan risiko bencana meningkat, pesatnya urbanisasi dan belum optimalnya mitigasi perubahan iklim.

Permasalahan lingkungan hidup menjadi salah satu isu strategis yang krusial di Kota Bima, terutama dalam konteks kualitas lingkungan yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin secara jelas melalui data capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan penanganan sampah.

Berdasarkan data capaian:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami penurunan dari 74,13 (2019–2020) menjadi 52,73 pada 2021, dan meskipun kembali naik menjadi 60,25 pada 2023, angkanya masih jauh dari ideal. Ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan Kota Bima berada dalam tekanan, baik dari aspek kualitas udara, air, maupun tutupan lahan hijau yang semakin terbatas akibat perkembangan perkotaan yang cepat.

Sementara itu, persentase penanganan sampah justru menunjukkan penurunan drastis. Dari 456,13 ton (2019) dan 475,83 ton (2020), jumlahnya anjlok ke 28,570 ton pada 2022 dan hanya sedikit meningkat menjadi 29,448 ton pada 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala serius dalam pengelolaan



sistem persampahan, baik dari sisi pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir.

Kondisi ini diperparah oleh peningkatan produksi sampah rumah tangga akibat pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Selain itu, sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan ketersediaan armada pengangkut sampah masih belum memadai.

Kombinasi antara penurunan indeks kualitas lingkungan hidup dan tidak optimalnya sistem penanganan sampah mencerminkan bahwa tantangan pengelolaan lingkungan di Kota Bima bersifat struktural dan multidimensi, mencakup tata kelola, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Jika tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, maka akan berdampak pada kesehatan masyarakat, daya dukung lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan wilayah.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **Kualitas lingkungan hidup menurun dan risiko bencana meningkat, pesatnya urbanisasi dan belum optimalnya mitigasi perubahan iklim** dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138. *Kualitas lingkungan hidup menurun dan risiko bencana meningkat, pesatnya urbanisasi dan belum optimalnya mitigasi perubahan iklim*

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Menurunnya kualitas lingkungan hidup | Rendahnya Indeks kualitas air | Belum ada sarana pengolahan limbah B3 |
| | | | Masih adanya kegiatan/ usaha yang belum menaati/ mematuhi aspek lingkungan sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup |
| | | | Truck tinja milik swasta yang membuang tinja di sungai |
| | | | Peternakan di pinggir sungai |
| | | | Belum optimalnya pengawasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan mata air |
| | | | Belum optimalnya konservasi pada kawasan sempadan mata air |
| | | | Belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan lahan pada sempadan mata air |



| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|--|
| | | Rendahnya indeks kualitas tutupan lahan | Tutupan lahan yang gundul (run off 70%) penanaman jagung sebagian dilakukan di lokasi yang tidak sesuai, yaitu pada kawasan dengan tingkat kelerengan curam |
| 3 | Meningkatnya suhu perkotaan | Kurangnya vegetasi | Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak layak fungsi |
| | | Efek rumah kaca | Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan Penggunaan bahan bangunan yang tidak ramah lingkungan |
| 4 | Risiko bencana yang sedang tapi berada d atas Kota mataram | Menurunnya ketahanan daerah terhadap bencana | Intensitas bencana yang berulang Kurangnya koordinasi antar wilayah untuk menghadapi ancaman bencana lintas wilayah Belum ada rencana kontijensi bencana belum Optimalnya penanganan tanggap darurat dan pasca bencana Belum optimalnya peringatan dini bencana Pola pembangunan yang masih mengabaikan resiko bencana Keterbatasan dalam pengembangan teknologi mitigasi bencana Belum tersedianya rambu-rambu jalur evakuasi dan titik-titik evakuasi yang memadai Terbatasnya anggaran untuk program mitigasi dan tanggap darurat Kurangnya kegiatan simulasi bencana untuk mengedukasi masyarakat Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana belum optimal dilakukan Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bencana dan cara menghadapinya Belum optimalnya kesiapsiagaan bencana Belum tersedianya rencana tanggap darurat bencana Belum tersedianya rencana evakuasi Belum tersedianya rencana pemulihan setelah tanggap darurat Terbatasnya sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana Pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana belum optimal dilakukan |

Sumber: Bappeda, Hasil Analisis, 2025



2.7.1.5. Layanan infrastruktur wilayah belum merata, dan kawasan perkotaan masih menghadapi persoalan kekumuhan.

Pembangunan infrastruktur di Kota Bima menunjukkan progres positif dalam beberapa aspek, namun masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama dalam periode perencanaan mendatang. Capaian infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi menunjukkan peningkatan, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan kualitas dan ketimpangan pelayanan infrastruktur antarwilayah.

Beberapa data penting yang menjadi indikator permasalahan infrastruktur di Kota Bima antara lain:

- Kondisi Jalan Kota terus mengalami peningkatan, dengan persentase panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik meningkat dari 69,08% tahun 2019 menjadi 76,53% tahun 2023. Meskipun demikian, artinya masih ada sekitar 23,47% jalan kota yang belum dalam kondisi baik dan memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas;
- Rasio Jaringan Irigasi Teknis masih sangat rendah meskipun mengalami peningkatan, dari hanya 0,71% tahun 2019 menjadi 5,77% pada tahun 2023. Ini mencerminkan keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur penunjang sektor pertanian, terutama pada lahan kering dan tegalan yang sangat bergantung pada pengairan buatan;
- Sanitasi layak yang sempat mencapai 97,43% pada 2022, menurun menjadi 93,56% pada 2023, menunjukkan potensi kerentanan dalam layanan sanitasi dasar terutama di kawasan padat dan kumuh;
- Luas permukiman kumuh mengalami fluktuasi, sempat naik drastis menjadi 13,37% tahun 2020, lalu menurun menjadi 7,91% (2022) dan kembali meningkat menjadi 10% (2023). Ini menandakan masih belum optimalnya program pengurangan kawasan kumuh yang berkelanjutan, terutama di wilayah perkotaan padat dan tepi sungai;
- Kelancaran saluran drainase meningkat dari 74,54% (2019–2021) menjadi 84,95% (2023). Meskipun cukup baik, kondisi ini tetap menuntut perhatian karena tingginya intensitas curah hujan dan potensi genangan air serta banjir di beberapa titik kawasan kota;



- Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) masih tergolong rendah. Meski mengalami kenaikan dari 10,55% (2022) menjadi 19,95% (2023), artinya lebih dari 80% wilayah Kota Bima belum memiliki kepastian arah pengembangan ruang secara rinci, yang berpotensi memunculkan konflik tata ruang, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan, serta ketidakteraturan dalam investasi infrastruktur dan pembangunan perumahan;
- Penerangan jalan umum dan konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi memang sudah berada pada angka 100%, namun pemeriksaan kualitas dan keberlanjutan fungsinya tetap menjadi bagian penting dari evaluasi kinerja rutin.

Secara umum, meskipun indikator-indikator menunjukkan capaian membaik, belum semua aspek infrastruktur memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pelayanan, peningkatan kualitas hidup, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur dasar dan sistem pengelolaan ruang menjadi kebutuhan strategis untuk mendorong kemajuan pembangunan wilayah Kota Bima secara menyeluruh.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **Layanan infrastruktur wilayah belum merata, dan kawasan perkotaan masih menghadapi persoalan kekumuhan** dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139. *Layanan infrastruktur wilayah belum merata, dan kawasan perkotaan masih menghadapi persoalan kekumuhan*

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|---|
| 1 | Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah | Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi | Belum optimalnya penanganan jalan |
| | | | Pendanaan penanganan jalan yang masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus |
| | | | Minimnya upaya pemeliharaan rutin dan berkala jalan |
| | | | Masih minimnya ruas jalan yang belum dilengkapi rambu |
| | | | Pemeliharaan PJU belum optimal |
| | | | Butuh pendanaan besar untuk rehabilitasi terminal |
| | | | Parkir liar yang menjamur |
| | | | Parkir <i>on street</i> yang masih belum teratur |
| | | | Angkutan massal dalam Kota yang sudah sangat jarang |



| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|--|--|--|--|
| | | Akses air minum perpipaan masih kurang memadai | Permasalahan aset antara pemerintah kota dengan PDAM Kabupatten Bima |
| | | | Manajemen pengelolaan SPAM yang belum optimal |
| | | | Belum Optimalnya pengelolaan IPA yang sudah ada |
| | | | Tidak terdapatnya prasarana penampung air baku |
| | | | Masih banyaknya jaringan perpipaan yang rusak dan putus |
| | | | Jaringan perpipaan yang ada belum menjangkau seluruh wilayah |
| | | | Infrastruktur Pengolahan air yang ada belum memadai |
| | | | Biaya operasional tinggi karena menggunakan sumur pompa |
| | | | Sebagian besar akses masyarakat dipenuhi oleh Sumur Bor |
| | | | Kualitas pelayanan prasarana irigasi |
| | | | Sistem irigasi yang belum terintegrasi |
| | | Kapasitas sumber air baku nol m3 | Tutupan lahan yang gundul (run off 70%) |
| Belum tersedianya prarana penampung air baku | | | |
| belum memadainya bangunan pengendali banjir | | | |
| 2 | Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsi | Rencana Rinci Tata Ruang baru tersedia untuk 2 Kecamatan | Proses penyusunan Rencana Rinci yang memakan waktu lama |
| | | | Terbatasnya pendanaan untuk penyusunan Rencana Rinci |
| | | Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal | Peraturan Walikota sebagai operasional pelaksanaan belum terbit |
| | | | PPNS Penataan Ruang belum tersedia |
| 3 | Kumuh kawasan perkotaan | masih terdapat area genangan dilingkungan permukiman | Belum tersedianya masterplan drainase |
| | | | Masih kurangnya resapan air didalam lingkungan rumah |
| | | | Sistem saluran belum terintegrasi dengan baik |
| | | Rumah tidak layak huni masih banyak | Kemiskinan |
| | | | Penganggaran untuk rumah tidak layak |



| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---------------|--|---|
| | | | huni terbatas |
| | | | Regulasi yang membatasi akses masyarakat (legalitas lahan) |
| | | Backlog perumahan masih tinggi | Tingginya harga lahan |
| | | | harga rumah yang mahal |
| | | | Kendala Perijinan |
| | | | Infrstruktur pendukung perumahan belum tersedia |
| | | belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana air limbah | Limbah B3 yang belum terolah dengan baik |
| | | | IPLT kurang memadai |
| | | | 1 Septictank dipakai bersama |
| | | | Sanimas yang ada tidak dikelola dengan baik sehingga mangkrak |
| | | | Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan air limbah permukiman |
| | | | Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman |
| | | Belum optimalnya pengolahan sampah | TPST Tingkat kecamatan belum tersedia |
| | | | Sarana prasarana pengolahan sampah masih kurang |
| | | | Infrastruktur TPS 3R belum optimal dioperasikan oleh masyarakat, bank sampah belum berfungsi optimal dalam pengurangan sampah |
| | | | Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pengelolaan sampah |
| | | | Kurangnya peran serta masyarakat dalam melakukan reduksi timbulan sampah dengan pola 3R |
| | | | Belum optimalnya sosialisasi penanganan sampah kepada masyarakat |
| | | | Sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan sampah masih belum tersedia (TPS 3R) |
| | | Pedagang kaki lima | Belum tersedianya lokasi khusus untuk kaki lima |
| | | | Peran serta masyarakat dalam ikut menjaga kebersihan lokasi kaki lima masih sangat minim |

Sumber: Bappeda, Hasil Analisis, 2025



2.7.1.6. Kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan pembangunan inklusif di Kota Bima.

Pembangunan ekonomi Kota Bima masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan merata. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan ekstrem, dan meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan data:

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bima tahun 2023 tercatat sebesar 3,57%. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT Provinsi NTB sebesar 2,80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja produktif masih terbatas dan belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja secara optimal.
- Ketimpangan pendapatan, yang tercermin dari tren peningkatan Indeks Gini selama periode 2019–2022, menjadi indikator belum terwujudnya pemerataan hasil pembangunan. Ketimpangan ini memperlebar jurang sosial ekonomi antarkelompok masyarakat dan menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi.
- Rendahnya tingkat pendapatan dan produktivitas masyarakat juga masih menjadi persoalan utama. Berdasarkan data pengeluaran per kapita, pada tahun 2023 rata-rata pengeluaran masyarakat Kota Bima adalah sebesar Rp 1.309.508 per bulan. Namun, sebagian besar penduduk Kota Bima masih berada pada kelompok pengeluaran di bawah Rp 1.000.000 per bulan, yang mengindikasikan tingkat produktivitas dan kesejahteraan yang masih rendah.
- Kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan nyata. Tahun 2023, estimasi jumlah penduduk Kota Bima yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem mencapai sekitar 1.300 jiwa, meskipun telah menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 2.460 jiwa (2022). Jumlah ini harus terus ditekan agar sesuai dengan target nasional, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2025.

Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun telah ada perbaikan di beberapa indikator ekonomi, namun laju perbaikannya belum cukup cepat untuk



menjawab kompleksitas masalah ekonomi yang dialami masyarakat. Diperlukan strategi pembangunan ekonomi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memastikan inklusivitas, pemerataan, dan perlindungan kelompok rentan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan **Kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan pembangunan inklusif di Kota Bima** dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.140. *Kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan pembangunan inklusif di Kota Bima*

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|---|---|
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memang mengalami penurunan namun masih lebih tinggi daripada Provinsi NTB. -- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bima Tahun 2023 masih berada pada angka 3,57%. Angka ini memang menurun dari tahun 2022, namun masih tinggi jika dibandingkan dengan TPT NTB yaitu 2,80%. (Sumber: Kota Bima Dalam Angka Tahun 2024, BPS) | Adanya kesenjangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan peningkatan jumlah pencari kerja | Lapangan kerja masih terbatas Sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelatihan kerja kurang memadai Kurikulum belum mengikuti kebutuhan pasar kerja Minimnya lapangan kerja untuk tenaga kerja kurang terampil |
| | | Rendahnya daya saing, produktivitas kerja dan kesempatan kerja | Tenaga kerja Kota Bima masih didominasi oleh keterbatasan keahlian (<i>low skill</i>) |
| 2 | Rendahnya tingkat pendapatan, produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat. -- Sebagai indikator tingkat pendapatan, BPS menggunakan data jumlah pengeluaran. Pada tahun 2023 rata-rata jumlah pengeluaran per kapita masyarakat Kota Bima dalam sebulan sebesar Rp 1.309.508. Lebih dari separuh penduduk Kota Bima di tahun 2023 memiliki pengeluaran yang termasuk pada golongan pengeluaran kurang dari Rp 1.000.000 per bulan. (Sumber: Kota Bima Dalam Angka Tahun 2024, BPS) | Tingkat pendapatan masyarakat rendah | Tingkat pendidikan, keahlian dan keterampilan rendah Tingkat upah yang belum layak |
| | | Akumulasi modal masih rendah | Rendahnya investasi Kuantitas dan kapasitas UMKM dan koperasi masih rendah Kebocoran wilayah (aliran dana keluar dari daerah) |
| | | Rasio keserasian belanja modal terhadap APBD masih rendah | Sistem penganggaran yang belum sesuai peruntukan PAD masih kecil |



| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|---|
| 3 | Masih ada kemiskinan ekstrem di Kota Bima. -- Jumlah penyandang kemiskinan ekstrem di Kota Bima memang mengalami penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2022, terdapat sebanyak lebih kurang 2.460 jiwa kemudian menurun menjadi lebih kurang 1.300 jiwa pada tahun 2023 (Sumber: Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE). Meskipun jumlahnya menurun, namun penuntasan kemiskinan ekstrem tetap harus diprioritaskan karena target nasional seharusnya pada tahun 2025 tercapai 0 kemiskinan ekstrem. | Masih tingginya persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bima | Penanganan PMKS tidak tepat sasaran Rendahnya daya dukung sarpras dan PSKS Koordinasi penanganan program layanan sosial antar Perangkat Daerah masih cenderung tumpang tindih Masih ada masyarakat yang belum memiliki jaminan perlindungan sosial Belum optimalnya sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi) |

Sumber: Hasil Analisis, Bappeda, 2025

2.7.2. Isu Strategi

Penentuan isu strategis Kota Bima selain mempertimbangkan permasalahan umum dan masalah kinerja penyelenggaraan urusan juga perlu melihat berbagai perspektif lain khususnya di luar Kota Bima yang dapat berdampak terhadap pembangunan Kota Bima, antara lain isu strategis global, nasional dan propinsi NTB.

2.7.2.1. Analisis Isu Global

2.7.2.1.1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembangunan daerah menghadapi berbagai tantangan global yang perlu diperhatikan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kota Bima berkomitmen menempatkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai perhatian utama. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) disepakati pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar PBB. Para pemimpin dunia yang kurang lebih terdiri dari 193 kepala negara secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai



kesepakatan pembangunan global. Agenda pembangunan global ini memiliki tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, dimana terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan yakni berlaku sejak 2016 sampai dengan 2030. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Penerapan Sustainable Development Goals dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 memuat antara lain:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik,serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;



15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



Tabel 2.141. Indikator TPB Kota Bima yang Belum Tercapai Target Nasional (SBT)

| INDIKATOR YANG DITUJU | | TARGET PERPRES 111/2022 | PERPRES 59/2017 | PELAKSANA | SATUAN | CAPAIAN | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|------------|---------|-------------------|---------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6-7% | Menurun menjadi 7-8% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | persentase | 8,79 | 8,6 | 8,35 | 8,88 | 8,8 | |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Meningkat menjadi 98% | Meningkat menjadi 95% | Dinas Kesehatan | persentase | 96,67 | 148.466 (-99,31%) | 45,95 % | 97,44 | 99,72 | 91,55 |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Meningkat menjadi 74,57% untuk pekerja formal dan 25,94% untuk pekerja informal | Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal | Dinas Tenaga Kerja | persentase | | | | | 64,16 | 65,52 |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | | Menurun menjadi 2,8 juta | Dinas Sosial | Persen | 6.063 | 6.063 | 6532 | 9283 | | |
| 1.4.1.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Meningkat menjadi 95% | Meningkat menjadi 70% | Dinas Kesehatan | persentase | 109,8 | 109,13 | 93,94 | 91,02 | 89,2 | 67,74 |
| 1.4.1.(b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. | Meningkat menjadi 90%. | Meningkat menjadi 63%. | Dinas Kesehatan | persentase | | | 63,8 | 62,2 | 94 | 57,6 |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | Meningkat menjadi 100% | Meningkat menjadi 100% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | persentase | | | 74,55 | 95,71 | 84,95 | 85,79 |



| INDIKATOR YANG DITUJU | | TARGET PERPRES 111/2022 | PERPRES 59/2017 | PELAKSANA | SATUAN | CAPAIAN | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------|---------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | Meningkat menjadi 90% | Meningkat menjadi 100% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | persentase | | | 81,68 | 89,99 | 91,68 | 93,07 |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | 0,2 per 100.000 jiwa setiap tahunnya | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | persentase | | | 27410 | 49429 | 49429 | 40,81 |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | Meningkat menjadi 39 daerah | Meningkat menjadi 39 daerah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | 36 | 36 | 37 | 38 |
| 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | | Menurun | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rupiah | | | 1.509.700.000 | 2.587.250.000 | 1.425.000.000 | 5.289.857.000 |
| 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Meningkat | Meningkat | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | persentase | | | 1.082.548.860 | 1.047.846.300 | 345.421.761 | |
| 2.1.1* | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | Menurun menjadi 5% | Menurun | Dinas Ketahanan Pangan | Persentase | | | 0 | 0 | 83,34 | |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | Menurun menjadi 5% | Menurun | Dinas Ketahanan Pangan | Persentase | | | 6 Kelurahan | 9 Kelurahan | 92 | |



| INDIKATOR YANG DITUJU | | TARGET PERPRES 111/2022 | PERPRES 59/2017 | PELAKSANA | SATUAN | CAPAIAN | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|------------------|---------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. | | Menurun menjadi 8,5 % | Dinas Ketahanan Pangan | persentase | | | 3125,75 kkal/kapita/hari | 2684 kkal/kapita/hari | | |
| 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Menurun menjadi 7% | Menurun | Dinas Kesehatan | persentase | | | 8,25 | 7,9 | 8,65 | |
| 2.2.2.(c) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. | Meningkat menjadi: skor PPH 95,2 | Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun | Dinas Ketahanan pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan | Skor PPH; Persen | 85,4 | Belum Ada Data | 85,7 | 81,8 | 79,85 | |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan. | Meningkat menjadi 95% | Meningkat menjadi 95% | Dinas Kesehatan | Persentase | 102,23 | 100,98 | 94,65 | 91,79 | 89,41 | 70,1 |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Meningkat menjadi 95% | Meningkat menjadi 85 % | Dinas Kesehatan | Persen; unit | | | 93,94 | 91,02 | 89,2 | 67,74 |
| 3.2.2.(b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Meningkat menjadi 90% | Meningkat menjadi 95% | Dinas Kesehatan | Persentase | 82,93 | 85,97 | 51,49 | 68,2 | 92,6 | |



| INDIKATOR YANG DITUJU | | TARGET PERPRES 111/2022 | PERPRES 59/2017 | PELAKSANA | SATUAN | CAPAIAN | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------|--------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Menurun menjadi 0,18 | Menurun menjadi <0,5% | Dinas Kesehatan | Persentase | | | | | 0,1 | 75 |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Menurun menjadi 190 | Menurun menjadi 245 | Dinas Kesehatan | Proporsi per 100.000 | | 175,92 | 126 | 296 | 450 | 392 |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | Meningkat 83% | Meningkat | Dinas Kesehatan | Persen | | | 4,05 | 2,51 | 3,19 | |
| 4.1.1* | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. | Meningkat | Meningkat | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | Persen | | | | (a.18,32) (b.17,12) (c.48,57) | (a.19,66) (b.18,20) (c.50,43) | (a.13,64) (b.16,48) (c.52,81) |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. | Meningkat menjadi 100% | Meningkat menjadi 114,09% | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | Persen | 99,34 | 97,33 | 94,75 | 100,96 | 102,34 | 97,64 |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. | Meningkat menjadi 106,94% | Meningkat menjadi 106,94% | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | Persen | 111,87 | 102,25 | 110,08 | 105,11 | 107,23 | 103,97 |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | | Meningkat menjadi 96,1% | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | Persen | | | 96,9 | 97,61 | 93,7 | |



| INDIKATOR YANG DITUJU | | TARGET PERPRES 111/2022 | PERPRES 59/2017 | PELAKSANA | SATUAN | CAPAIAN | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--|------------------|----------|------------|--|----------|-------|-------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15- 24 tahun dan umur 15-59 tahun. | | Meningkat | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | Persen | | | | 5 | 4 | 2 |
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | meningkat | bertambah sebanyak 16 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kebijakan Persen | | 6 Dok | Perwali No.13 tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan usia anak | 0 | 8 | 12 |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | | Menurun menjadi kurang dari 20,48% | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Persentase | 13 Kasus | 14 Kasus | 42 kasus | 51 kasus | 22 | 28 |
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Menurun menjadi 18 tahun | Menurun menjadi 38 tahun | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persentase | | 38/1000 KH | | | 378 | |
| 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan | Meningkat | Meningkat | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | Persentase | | | | | 0,003 | 0,001 |



| INDIKATOR YANG DITUJU | | TARGET PERPRES 111/2022 | PERPRES 59/2017 | PELAKSANA | SATUAN | CAPAIAN | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|------------------------|--|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | | | Anak | | | | | | | |
| 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | | Meningkat menjadi 85% | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persentase | | | 65 | 70 | 75 | |
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak | Meningkat menjadi 100% | Meningkat menjadi 100% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persen | 77,82 | 73,62 | | 99,93 | 99,37 | |
| 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | Meningkat menjadi 15% | Meningkat menjadi 100% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persen Jiwa | | | 74,55 | 95,71 | 84,9 | 85,8 |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | layak 90%, termasuk 15% aman | Meningkat menjadi 100% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persen Jiwa | 74,27 | 78,83 | 81,68 | 89,99 | 91,7 | 93,1 |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | indeks kualitas air (IKA) 55,5 | Meningkat | Dinas Lingkungan Hidup | Persen | 4,74 | 4,3 | 24,5 | 24,5 | 38 | |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | 0,2 per 100.000 jiwa | Menurun | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persen | 0,0102 | 0,21 | 27410 | 49429 | 49429 | 40,81 |
| 11.5.1.(a) | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | | Menurun menjadi 30% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Indeks | 94.91 | 89,37 | 89,37 | 92.61 | 92,23 | |



| INDIKATOR YANG DITUJU | | TARGET PERPRES 111/2022 | PERPRES 59/2017 | PELAKSANA | SATUAN | CAPAIAN | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|-------------------------------------|---------|---------|-------|---|--|---|--|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | | Menurun | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Indeks | | | 1.509.700.000 | 2.587.250.000 | 1.425.000.000 | 5.289.857.000 |
| 12.4.2.(a) / 12.4.2* | 1. Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) 2. (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya. | Meningkat menjadi 539,8 juta ton (komulatif) | Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional) | Dinas Lingkungan Hidup | Persen | | | | | 15 | |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | | 20 ton per hari (skala nasional) | Dinas Lingkungan Hidup | ton, m3 | | | 6,9 | 7,61 | 4 | |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Rata-rata korban akibat bencanamaksimal 0,2 per 100.000 jiwa | Menurun | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | 27.410 | 49.429 | 49.429 | 40,81 |
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | Meningkat menjadi 420.000 ha per tahun. | Meningkat | Dinas Lingkungan Hidup | Persen | | 4.94% | - Rehabilitasi Hutan dan Lahan (P1) Lokasi di Kec. Ambala | - Rehabilitasi Hutan dan Lahan (P2) Lokasi di Kec. Ambalawi Kab. | - RHL 80 Ha Lokasi Kel. Nungga Kec. Rasanae Timur Kota Bima | Pembangunan Hutan Rakyat di Kecamatan Lambu, Sape, Langgud |



| INDIKATOR YANG DITUJU | | TARGET PERPRES 111/2022 | PERPRES 59/2017 | PELAKSANA | SATUAN | CAPAIAN | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|---|--------|-----------|-----------|---------------------|-------------|--------|------------------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | | wi Kab. Bima 178 Ha | Bima 178 Ha | | u, Wawo dan Wera |
| 15.3.1.(a) | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | Meningkat menjadi 20.000 ha. | 5,5 juta ha (skala nasional) | Dinas Lingkungan Hidup | Persen | 2 hektar | 2 hektar | | 10 Ha | 8 | |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita. | Meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita. | Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rupiah | 23.250,42 | 24.264,69 | 26.658,20 | 27.529 | 29.079 | |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin | meningkat | Meningkat | Dinas Tenaga Kerja | persen | | | 2,54 | 2,43 | 2,42 | |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal. | - | 51% | Dinas Tenaga Kerja | persen | 44,5 | 45,51 | 26,38 | 26,1 | 35,28 | 35,99 |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | Akses layanan keuangan formal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 30,8% | 25% | Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan | persen | 64,18 | 90,29 | | | 0,097 | 0,126 |
| | | | | | | | | | | | |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | meningkatkan kualitas pemuda | Meningkat | Dinas Tenaga Kerja | persen | | | 4,89 | 5,6 | 4,53 | |



| INDIKATOR YANG DITUJU | | TARGET PERPRES 111/2022 | PERPRES 59/2017 | PELAKSANA | SATUAN | CAPAIAN | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|---|------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. | Meningkat menjadi 21,0% | Meningkat | Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan | Persen | | 79,36 | 12,31 | 12,72 | | |
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | Meningkat menjadi 8,1% | Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB | Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan | Persen | 3,97 | 4,23 | -0,69 | 0,59 | 1,9 | |
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | Meningkat menjadi 100% | Meningkat | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Persen | | | | | 85 | 93 |
| 10.1.1* | Koefisien Gini. | Menurun menjadi 0,376-0,378 | Menurun menjadi 0,36 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | rasio | | | 0,375 | 0,413 | 0,429 | |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,5 - 9% | Menurun menjadi 7-8% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | persentase | | | 8,38 | 8,88 | 8,8 | |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | meningkat menjadi 74,57% | Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta | Dinas Tenaga Kerja | Persen | | | | | 64,16 | 65,52 |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | Meningkatnya rasio perpajakan terhadap PDB menjadi 8,41-8,87% | Di atas 12% | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rasio | | 0,8714 | 43,49 | 45,36 | 0,71 | 0,7 |



| INDIKATOR YANG DITUJU | | TARGET PERPRES 111/2022 | PERPRES 59/2017 | PELAKSANA | SATUAN | CAPAIAN | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | meningkat | Meningkat | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | persen | | | 232,96 | 272,19 | 35,08 | 30,8 |
| 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | Meningkat menjadi 100% | Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi. | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Persen | | | | | 92 | 95 |
| 17.19.2.(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | Meningkat | Meningkat | Badan Pusat Statistik | Persen | 97 | 98,51 | 89,83 | 87,52 | 100 | 93,55 |
| 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | | Menurun | Badan Kesatuan Bangsa Bangsa dan Politik | Persen | | | | | 53 | 82 |
| 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | Menurun | Menurun | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kasus Persen | 9 Kasus (P) | 9 Kasus (P) | | | 0,002 | 0,003 |
| 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). | Meningkat menjadi 4,14 | Meningkat menjadi 4,0 | Inspektorat Daerah | Indeks Persen | 3,66 | 3,7 | | | 3,93 | 3,92 |
| 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | | Meningkat | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Persen | | 87,56 | 96,15 | 95,04 | 92,94 | 72,93 |

Sumber: Hasil Kajian Tim Pokja KLHS RPMD Kota Bima, 2025



Adapun hasil penelaahan shortlist yang dilakukan tim pokja KLHS diperoleh 9 isu Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Strategis antara lain sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Konektivitas dan infrastruktur Dasar Wilayah
2. Masih Rendahnya Taraf Kesehatan Masyarakat
3. Masih Tingginya angka Pengangguran dan kurangnya Kualitas Tenaga Kerja
4. Masih Rendahnya Kualitas maupun kuantitas Pendidikan
5. Masih tingginya angka Kemiskinan
6. Degradasi Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Mitigasi bencana
7. Kurangnya Kepastian Hukum, serta lemahnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
8. Kurangnya Daya Saing Wilayah
9. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan, Birokrasi dan belum optimalnya pelayanan public

2.7.2.1.2. Perubahan Demografi

Perubahan demografi dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi pembangunan dan masyarakat secara keseluruhan. Sepanjang sejarah manusia pola demografi cukup stabil, dimana populasi manusia tumbuh secara perlahan, dan struktur umur, angka kelahiran, dan angka kematian populasi hanya berubah secara bertahap. Namun, dalam 50 tahun terakhir tren stabilitas jangka panjang ini telah menyebabkan pergolakan demografis terbesar. Dunia mempercepat transisi keluar dari stabilitas demografi jangka panjang. Ketika angka kematian bayi dan anak menurun, populasi mulai melonjak, di sebagian besar negara pertumbuhan ini menyebabkan penurunan tingkat kesuburan.

Meskipun tingkat kesuburan menurun, jumlah penduduk terus meningkat karena momentum jumlah penduduk, yang pada akhirnya akan mendatar. Sementara itu, perubahan demografi telah menciptakan generasi "bulge", yang saat ini muncul di banyak negara sebagai populasi usia kerja yang besar. Kelompok ini pada akhirnya akan menjadi populasi lansia yang besar, baik di negara maju maupun berkembang. Perubahan populasi mempunyai potensi dampak yang besar terhadap



laju dan kemajuan pembangunan ekonomi. Misalnya, peningkatan proporsi penduduk lanjut usia dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi karena populasi pekerja yang lebih kecil harus menanggung beban tanggungan yang tidak bekerja dalam jumlah yang lebih besar. Meningkatnya angka harapan hidup juga dapat mendukung perekonomian dengan menciptakan insentif yang lebih besar untuk menabung dan berinvestasi di bidang pendidikan, sehingga meningkatkan modal finansial yang dapat digunakan oleh investor dan sumber daya manusia yang memperkuat perekonomian.

Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Apabila dilihat dari komposisi penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) pada Tahun 2022 mencapai 98.022 jiwa dari jumlah penduduk (usia 15-64 tahun) sebanyak 140.438 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 43,27 persen. Pada Tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Tahun 2045 di Kota Bima mencapai 240.672 jiwa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

Kemampuan suatu negara atau daerah seperti halnya Kota Bima untuk menyadari potensi manfaat transisi demografi dan memitigasi dampak negatif penuaan sangat bergantung pada kebijakan yang dirumuskan. Perhatian pada bidang-bidang kesehatan, pendidikan, institusi pasar tenaga kerja, perdagangan, dan pensiun menjadi kunci dalam mengembangkan kebijakan yang efektif untuk menghadapi dampak perubahan demografi. Memahami tren masa depan sangat penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik.



2.7.2.1.3. Geo Politik dan Geo Ekonomi

Kondisi dunia internasional sedang mengalami perubahan geopolitik dan masuk ke tengah periode yang semakin tak menentu. Melihat tren dan tantangan geopolitik utama pada tahun 2023, kesan umum yang muncul adalah ketidakpastian. Ketegangan geopolitik yang meningkat dan volatilitas ekonomi global membuat dunia masuk ke dalam keadaan tidak stabil. Dampak ekonomi yang mengganggu dari perang di Ukraina masih akan merusak prospek pemulihan ekonomi global dan telah menambah biaya hidup yang dipicu oleh pandemi Covid-19. Kondisi geopolitik global saat ini masih menjadi perhatian dan mendorong ketegangan antar negara di berbagai kawasan, dimana terdapat masalah-masalah internasional yang terjadi, seperti sengketa wilayah akibat sembilan garis putus-putus milik Tiongkok di Laut Cina Selatan yang masih bertahan, dimana masalah ini belum juga selesai. Ketegangan di kawasan semenanjung Korea, dimana Korea Utara terus melakukan tindakan yang provokatif dengan melakukan uji coba hulu ledak nuklir, mengancam keamanan Asia Pasifik, Korea Selatan dan Jepang. Konflik di Eropa meskipun sebenarnya terlihat jauh secara geografis, tetapi dampaknya juga dirasakan sampai ke Indonesia. Konflik Ukraina dan Rusia yang sampai sekarang masih berlangsung dan ini mengganggu ketersediaan energi dunia dan bahan makanan. Konflik tersebut juga membuat tensi Rusia dengan NATO meningkat. Kekuatan dunia terbelah jadi pro-barat, kemudian ini yang mendukung Ukraina melawan Pro-Rusia. Terakhir, konflik di kawasan Timur Tengah, agresi Israel ke Palestina memicu ketegangan di wilayah Timur Tengah. Pasokan komoditas berpotensi kembali tersendat. Naiknya harga minyak juga dapat memberi dampak ke berbagai negara. Di saat negara-negara sedang mengalami permasalahan inflasi, ketegangan politik di kawasan Timur Tengah memicu permasalahan lainnya. Data International Monetary Fund (IMF) bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi global bisa melambat menjadi 2,9% pada 2024 dari perkiraan sebelumnya di angka 3%. Oleh karena itu, konflik Israel-Palestina akan memicu ketidakstabilan dan mengganggu pasokan energi serta pangan yang berujung pada naiknya harga minyak dan komoditas, dimana sektor energi dan pangan ini adalah faktor pemicu inflasi secara global.

Kondisi perubahan geopolitik dan geoekonomi pada dasarnya dapat mempengaruhi tingkat ketahanan ekonomi domestik dan regional terhadap tekanan



global, seperti halnya perekonomian Indonesia yang didalamnya terdapat Kota Bima sebagai daerah yang dipengaruhi dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian kondisi geopolitik juga menjadi tantangan bagi Kota Bima kedepan dalam menjaga stabilitas perekonomian regional, mengingat dalam struktur perekonomian di Kota Bima sebagian bergerak di sektor perdagangan dan jasa, sehingga kondisi geopolitik dan geo ekonomi akan sangat menentukan perkembangan dari sektor tersebut. Selain itu, dampak dari meningkatnya harga minyak dunia dan komoditas juga akan mempengaruhi harga minyak dalam negeri dan beberapa komoditas yang ada di Indonesia termasuk Kota Bima.

2.7.2.1.4. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Terkait dengan perkembangan teknologi telah melalui beberapa era sebelumnya, seperti Society 1.0 yang berfokus pada pertanian, Society 2.0 yang ditandai oleh revolusi industri, Society 3.0 dengan internet, dan Society 4.0 yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dan teknologi canggih. Salah satu fenomena menarik yang patut diperhatikan dan menjadi tantangan kedepan adalah era Society 5.0. Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang lahir dari Jepang dan mencerminkan tahap evolusi masyarakat berdasarkan peran teknologi yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era ini, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini adalah era dimana teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan big data digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menyelesaikan masalah sosial, yaitu perpaduan antara teknologi tinggi dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, Society 5.0 juga menekankan pada konsep "smart city". Kota-kota cerdas ini menggunakan



teknologi untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien, mengurangi emisi karbon, dan memberikan layanan publik yang lebih baik. Secara lebih mendalam, Society 5.0 adalah tentang mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan kita dengan cara yang lebih cerdas, manusiawi, dan berkelanjutan. Society 5.0 adalah gambaran masa depan di mana teknologi digunakan untuk memberikan solusi bagi masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan membawa dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan.

Perkembangan teknologi telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya di Kota Bima, seperti meningkatkan akses informasi, pelayanan publik, ekonomi digital, dan kemudahan transaksi. Namun dalam waktu yang bersamaan, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif, seperti kerugian sosial, ketergantungan teknologi, diskriminasi, dan keamanan informasi, yang menjadi tantangan baru dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga memaksa Pemerintah Kota Bima kedepan untuk melakukan langkah preventif (pencegahan) terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut. Langkah pencegahan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa teknologi digital digunakan secara bijaksana dan tidak merugikan masyarakat, serta memastikan bahwa Society 5.0 membawa manfaat bagi semua orang dan tidak membuat ada kelompok yang terpinggirkan.

2.7.2.1.5. Perubahan Iklim dan Pemanasan Global

Perubahan iklim dan pemanasan global adalah masalah yang tidak dapat disangkal dan mempengaruhi setiap orang di dunia. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia saat ini dan di masa depan. Perubahan iklim merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Perubahan iklim ini sendiri sering dikaitkan dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan pada suhu Bumi yang kemudian berlangsung selama satu dekade atau lebih dimana salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari



berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Iklim berubah secara terus menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Campur tangan manusia terhadap sistem iklim (terutama melalui emisi gas rumah kaca dan perubahan penggunaan lahan) telah meningkatkan suhu udara rata-rata global dan tahunan di permukaan bumi sebesar sekitar 0,8 °C sejak abad ke-19 (IPCC, 2013). Tren peningkatan suhu ini akan terus berlanjut di masa depan jika emisi tidak dikurangi secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang. Perubahan iklim memiliki efek yang meluas terhadap kehidupan manusia. Tidak hanya memengaruhi peningkatan suhu bumi, tetapi berbagai aspek alam dan kehidupan manusia. Hal ini mencakup kualitas dan jumlah air, lingkungan habitat, hutan, kesehatan manusia, pertanian, serta ekosistem di wilayah pesisir.

Perubahan iklim dan pemanasan global juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kota Bima, dimana dengan berkembangnya pembangunan serta aktivitas perekonomian dan transportasi yang semakin meningkat turut memberikan dampak terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, disisi lain dengan adanya perubahan iklim, Kota Bima yang awalnya sudah panas, menjadi semakin panas. Selain itu, kondisi pesisir semakin menurun akibat adanya perubahan iklim yang memberikan dampak terhadap nelayan pesisir Kota Bima. Sehingga dengan demikian perubahan iklim dan pemanasan global menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan Kota Bima kedepan yang harus diperhatikan, dimana dalam rangka melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi target pencapaian program kampung iklim.

2.7.2.1.6. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Ekonomi hijau dan ekonomi biru adalah dua konsep ekonomi yang muncul sebagai respons terhadap masalah lingkungan dan keberlanjutan. Ekonomi hijau fokus pada pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah/limbah, dan lain-lain.



Sedangkan ekonomi biru lebih berfokus pada pemanfaatan potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan memperhatikan keseimbangan ekologi laut. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kedua konsep tersebut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan beragam sumber daya laut yang melimpah. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, air, dan angin. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah minimnya kesadaran dan komitmen dari sebagian besar masyarakat dan pemerintah untuk memprioritaskan keberlanjutan dan lingkungan dalam pengembangan ekonomi. Secara terminologi istilah "Green Economy" atau "Ekonomi Hijau" didefinisikan sebagai jenis ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan suatu negara. Hal Ini terkait erat dengan ekonomi ekologis tetapi memiliki fokus untuk lebih bisa diterapkan secara politis. World Economic Forum (WEF) menyebut bahwa potensi ekonomi hijau sangat besar, di mana terdapat peluang bisnis sebesar US\$ 10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan baru hingga tahun 2030. Dengan visi ini diharapkan kegiatan aktivitas ekonomi, industri serta penyediaan sumber energi tidak akan merusak ekologi dan menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Sedangkan "Blue Economy" atau "Ekonomi Hijau" menurut Bank Dunia adalah penggunaan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan pekerjaan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Komisi Uni Eropa mendefinisikan sebagai seluruh kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan (oceans), laut (seas), garis pantai (coast) dan dasar lautan (seabed). Berdasarkan rilis resmi Bank Dunia peranan laut sangatlah penting bagi kesejahteraan Indonesia, dengan sektor perikanan senilai 27 miliar dollar AS, menghidupi 7 juta tenaga kerja, dan memenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan protein hewani di Indonesia. Angka yang fantastis dari salah satu aspek "Blue Economy". Pilar-pilar penyangga lainnya Ekonomi Biru meliputi Sumber Daya Hayati Laut, Sumber Daya Non Hayati Kelautan, Energi Terbarukan dari Lautan, Aktivitas Pelabuhan, Industri teknologi Kelautan dan Perkapalan, Transportasi Laut dan Pariwisata Bahari.



Tantangan dalam penerapan green economy dan blue economy di Indonesia masih cukup besar. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan ekonomi yang berkelanjutan, masih adanya praktik-praktik ekonomi yang merusak lingkungan, dan kurangnya akses terhadap teknologi hijau dan sumber daya keuangan. Selain itu, sektor blue economy di Indonesia juga masih mengalami tantangan, seperti pengelolaan sumber daya laut yang belum optimal, perburuan ikan yang berlebihan, dan perusakan ekosistem laut yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kota Bima memiliki potensi yang besar untuk menghadapi tantangan green economy dan blue economy. Kota Bima memiliki berbagai aktivitas perekonomian yang didalamnya berpotensi memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan seperti polusi udara, serta limbah dan persampahan, sehingga Pemerintah Kota Bima perlu melaksanakan pengembangan sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui implementasi green economy. Selain green economy, Kota Bima juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan blue economy, mengingat Kota Bima merupakan salah satu kota pesisir yang ada di Indonesia yang memiliki potensi pada sektor perikanan dan kelautan. Panjang garis pantai Kota Bima adalah 26 Km dan wilayah yang memiliki potensi sektor perikanan yang didominasi oleh produksi ikan tangkap air laut, budidaya dan tambak tersebar di 2 Kecamatan (Rasanae Barat dan Asakota). Selain itu, di Kota Bima terdapat Pelabuhan Bima yang menjadi simpul transportasi laut nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta wisata bahari pantai Lawata dan Kolo yang menjadi salah satu ikon Kota Bima.

2.7.2.2. Isu Strategis Nasional

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk mencapai visi "***Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045***". Visi tersebut akan dicapai dengan Misi yang dituangkan dalam delapan Asta Cita, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru



3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pada RPJMN Isu Strategis Nasional diejawantahkan dalam tantangan pembangunan, yaitu:

a. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Total Factor Productivity selama tahun 2015–2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010–2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971–1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005–2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang



membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005–2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010–2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015–2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US\$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Co-operation and Development sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan



tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019–2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.



d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

e. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50–75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particulate matter 2,5 (World Health Organization, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.



Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (United Nations Environment Programme, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

f. Geopolitik dan Geoekonomi

Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inflasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (International Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga



acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tecermin dari penurunan Baltic Dry Index level menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022.

g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019–2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data



dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.7.2.3. Isu Strategis Provinsi NTB

Permasalahan pembangunan Nusa Tenggara Barat menunjukkan kompleksitas persoalan pembangunan daerah yang harus menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi NTB berupaya untuk mengoptimalkan konsep pendekatan teknokratik dengan menekankan pada proses integrasi konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam perencanaan pembangunan daerah. Hasil analisis evaluasi RPJPD 2005-2025, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi NTB 2025-2045, permasalahan pembangunan daerah dan Isu Nasional diklasifikasikan menjadi kumpulan isu yang memiliki potensi sebagai penghambat dan peluang dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Kumpulan isu ini dianalisis untuk menentukan isu yang dapat dikategorikan sebagai isu strategis, sebagai prioritas yang akan ditangani dalam perumusan arah kebijakan perencanaan selama dua puluh tahun ke depan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun rumusan isu strategis daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi Non Tambang

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas sektor ekonomi non-tambang merupakan isu yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan beragam dalam suatu daerah. Selama dua dekade terakhir Provinsi Nusa Tenggara Barat pertumbuhan ekonomi dengan tambang terus mengalami kenaikan dari 1,71% pada awal RPJPD Provinsi NTB 2005-2025, hingga tahun 2022 dapat tumbuh sebesar 6,95%.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
3. Pengembangan pariwisata menuju Destinasi Wisata Internasional
4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
5. Kemiskinan, ketimpangan dan Kesempatan Kerja
6. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim



7. Akselerasi Transformasi Digital
8. Kemandirian Fiskal Daerah
9. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dasar
10. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
11. Peningkatan Stabilitas pertahanan keamanan Wilayah
12. Lingkungan Hidup, Kebencanaan dan Kemandirian Pangan

2.7.2.4. Isu Strategis Daerah Kota Bima

Strategi Pembangunan Kota Bima merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level global, nasional, provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Bima. Isu strategis merupakan jangkar (*anchor*) sebagai pengendali, dan sekaligus sebagai petunjuk arah (*compass*) yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kota Bima pada pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Ketepatan dalam perumusan isu strategis sangat menentukan dalam penentuan arah kebijakan RPJMD 2025-2029.

Berikut merupakan 6 isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Bima yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 beserta penjelasannya diurutkan dengan skala prioritasnya antara lain:

1. Peningkatan Keamanan, kehidupan beragama dan berbudaya
Konsep pembangunan yang memberikan kepastian rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Bima dalam menjalankan kehidupan beragama dan sosial serta dalam pengembangan budaya dan kearifan lokal .
Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:
 - a. Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban
 - b. Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, anti diskriminasi SARA, gotong royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal
2. Peningkatan dan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan bermartabat
Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumber daya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka Panjang pada seluruh aspek



secara berkelanjutan. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan, serta *output* kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kota Bima
 - b. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka *stunting*
 - c. Mempromosikan budaya hidup sehat bagi masyarakat segala usia
 - d. Memberikan cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 - e. Meningkatkan kualitas sarana prasarana sekolah, tenaga pendidik, serta *output* pendidikan secara merata di seluruh wilayah Kota Bima
 - f. Meningkatkan minat baca masyarakat dengan penyediaan sarana prasarana perpustakaan yang representatif
 - g. Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak
 - h. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja dengan pelatihan keterampilan kerja
 - i. Menumbuhkan potensi pemuda yang berprestasi dan mampu berperan dalam semua sektor pembangunan
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik
- a. Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
 - b. Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis teknologi informasi.
 - c. Peningkatan nilai SAKIP dan LPPD.
 - d. Pengembangan komitmen dan kualitas ASN secara *merit system* serta berkelanjutan.
 - e. Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Pengembangan Infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Informasi
- a. Pemantapan infrastruktur yang ramah lingkungan pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, industri, perdagangan dan



- jasa.
- b. Percepatan pengembangan transportasi massal orang dan transportasi barang yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan serta simpul-simpul transportasi.
 - c. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.
 - d. Pengembangan sistem sanitasi perkotaan yang terintegrasi sesuai dengan karakter wilayah, untuk mewujudkan 100% terlayani sistem sanitasi perkotaan.
 - e. Penyediaan sarana prasarana umum (RTH, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, Makam, dll) yang berkualitas dan merata.
 - f. Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik serta mengintegrasikan dengan sumber air baku sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.
 - g. Percepatan pengembangan jaringan jalan dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan melalui Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- a. Pengelolaan persampahan yang terintegrasi
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam menjaga ketahanan air, pangan dan energi
 - c. Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.
 - d. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain *command center*, jaringan pemadaman kebakaran, pos tanggap darurat dan lain sebagainya.
 - e. Penguatan Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) dan Kelurahan Siaga Bencana (KSB)
6. Percepatan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif
- a. Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan



kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan.

- b. Mengembangkan nilai tambah (*value added*) komoditas lokal unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
- c. Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis *online* yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
- d. Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan *support* bagi ekonomi masyarakat.
- e. Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuhkembangnya ekonomi lokal dan UMKM.
- f. Mendorong berkembangnya ekonomi digital melalui ekonomi kreatif



Tabel 2.142. *Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029*

| Permasalahan Daerah | Isu KLHS | Isu Nasional | Isu Regional Provinsi NTB | Isu Strategi Pembangunan Kota Bima |
|--|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum optimal - Angka Pelanggaran Ketertiban, Kenyamanan dan Keindahan (K3) yang masih tinggi - Nilai agama, budaya dan kearifan lokal belum diimplemetasikan dalam kehidupan secara optimal | <p>Kurangnya Kepastian Hukum, serta lemahnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</p> | <p>Geopolitik dan Geoekonomi</p> | <p>Penguatan Tata kelola Pemerintahan Daerah</p> | <p>Peningkatan Keamanan, Kehidupan Beragama Dan Berbudaya</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Nilai Indeks RB | <p>Lemahnya Kapasitas Kelembagaan, Birokrasi dan belum optimalnya pelayanan public</p> | <p>Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah</p> | | <p>Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kualitas Sumber daya Manusia Kota Bima - Umur Harapan Hidup Masyarakat Kota Bima yang masih rendah - Rata-rata Lama Sekolah yang masih rendah - Kontribusi perempuan di dalam proses pembangunan masih rendah - Daya saing SDM Kota Bima yang masih rendah - Sedikitnya masyarakat Kota Bima yang | <p>Masih Rendahnya Taraf Kesehatan Masyarakat</p> <p>Masih Rendahnya Kualitas maupun kuantitas Pendidikan</p> | <p>Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia</p> | <p>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</p> | <p>Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan bermartabat</p> |



| Permasalahan Daerah | Isu KLHS | Isu Nasional | Isu Regional Provinsi NTB | Isu Strategi Pembangunan Kota Bima |
|---|--|---|---|---|
| berprestasi di Tingkat Nasional | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya kualitas lingkungan hidup - Meningkatnya suhu perkotaan - Indeks risiko bencana pada level sedang | Degradasi Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Mitigasi bencana | Krisis Lingkungan | Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan | Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan melalui Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim |
| <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah - Kumuh kawasan perkotaan | Belum Optimalnya Konektivitas dan infrastruktur Dasar Wilayah Kurangnya Daya Saing Wilayah | | | Pengembangan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Peningkatan Indeks Gini periode 2019-2022 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memang masih lebih tinggi daripada Provinsi NTB - Rendahnya tingkat pendapatan, produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam Masyarakat - Masih ada kemiskinan ekstrem di Kota Bima | Masih Tingginya angka Pengangguran dan kurangnya Kualitas Tenaga Kerja Masih tingginya angka Kemiskinan | Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif Rendahnya Produktivitas | Penurunan Tingkat Kemiskinan Produktivitas dan Perkuatan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan | Percepatan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif |

Sumber: Bappeda kota Bima (Hasil Analisis), 2025



RPJMD Kota Bima 2025-2029

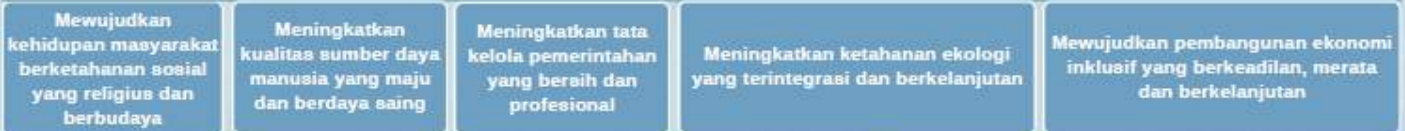
MISI PEMBANGUNAN KOTA BIMA TAHUN 2025-2029



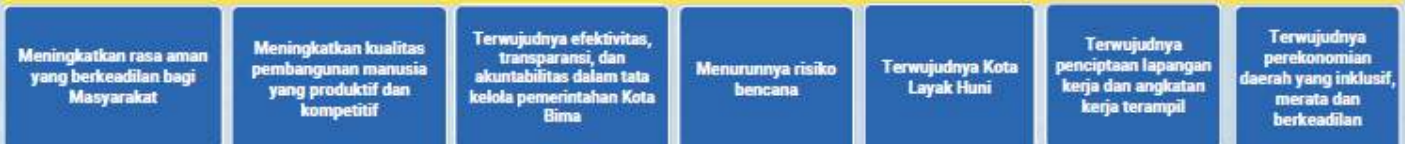
VISI

TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG MAJU, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN

LIMA MISI



TUJUH TUJUAN



17 SASARAN PEMBANGUNAN

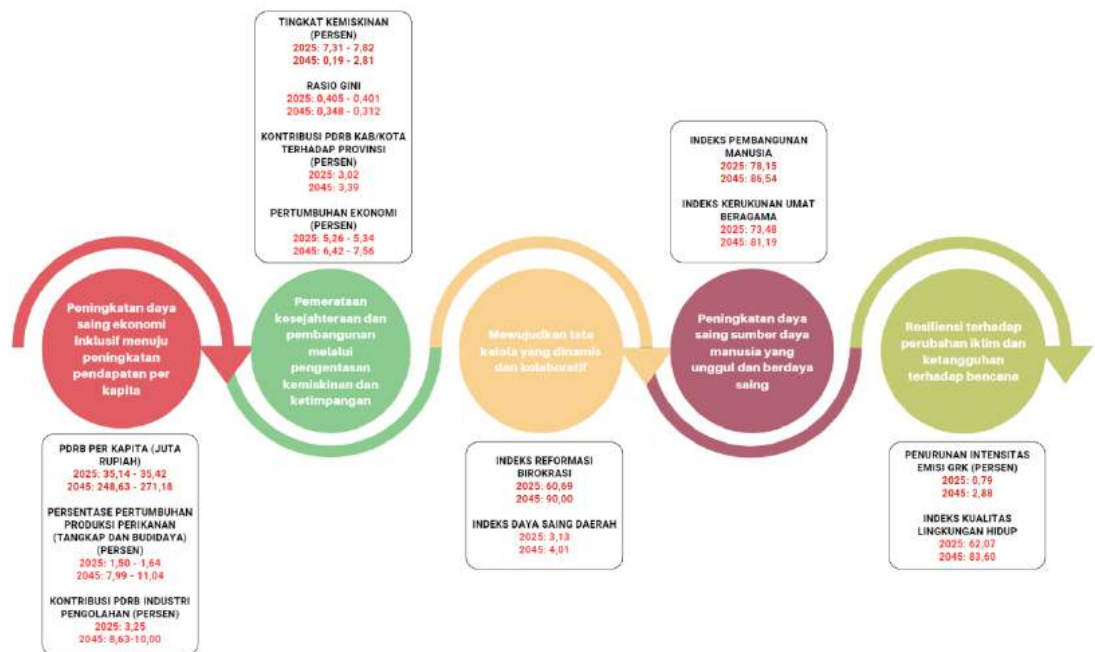


VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

3.1. RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPD Tahun 2025-2045

Kota Bima mempunyai visi Terwujudnya kota Bima yang religius, maju dan berkelanjutan . Visi besar Kota Bima tersebut termuat dalam RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2045 yang dihajatkan untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Lima Sasaran Visi RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Gambar 3.1 Sasaran Visi RPJPD Kota Bima 2025-2045



Sumber: RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2045, 2024

Untuk mencapai 5 sasaran visi tersebut dilaksanakan 8 misi (agenda) pembangunan Kota Bima tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif

Transformasi sosial dilaksanakan dengan pendekatan yang holistik dengan tetap



mempertimbangkan aspek humanisme. Transformasi sosial difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta kemampuan literasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai landasan atau pijakan dalam upaya beradaptasi pada setiap revolusi industri atau perkembangan zaman yang akan terjadi dalam 20 tahun ke depan.

Untuk mewujudkan transformasi sosial diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing hadir untuk menjadi aktor dalam pembangunan di Kota Bima. Isu kesehatan dan pendidikan masih menjadi tantangan ke depan antara lainnya terkait stunting yang memiliki pengaruh secara nyata pada kualitas sumber daya manusia Kota Bima pada tahun-tahun mendatang. Wajib belajar 12 tahun juga masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan kurangnya partisipasi dan rendahnya pola pikir sebagian masyarakat. Selain itu, dengan bonus demografi dimana pada 20 tahun mendatang hasil proyeksi menunjukkan bahwa Kota Bima memiliki proporsi penduduk usia tua yang meningkat. Hal ini juga ditunjukkan pada tren angka ketergantungan yang diproyeksikan terus meningkat. Peningkatan jumlah dan porsi penduduk usia tua serta angka ketergantungan memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, ekonomi, dan sistem kesejahteraan.

Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing

Sektor ekonomi dilandaskan pada upaya untuk mewujudkan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Iklim usaha yang kondusif, infrastruktur dan kebijakan perekonomian yang didasarkan pada konsep ekonomi hijau dapat diselenggarakan dengan optimal, sehingga setiap pelaku ekonomi dapat berkembang dengan lebih mudah dan cepat.

Perekonomian yang berdaya saing bertujuan untuk meningkatkan kemampuan suatu negara atau wilayah dalam bersaing di pasar global. Pertumbuhan ekonomi di Kota Bima merupakan hal yang perlu dipertahankan dan dioptimalkan. Melalui penguatan UMKM, IKM dan peningkatan nilai investasi maka perekonomian di Kota Bima ditargetkan dapat berdaya saing baik di tingkat regional maupun nasional. Transformasi ekonomi ini diturunkan bertujuan untuk merespon isu strategis 20 tahun ke depan terkait daya saing, yaitu berupa perkembangan ekonomi lokal yang belum



optimal di Kota Bima. Hal yang menjadi sorotan adalah terkait permodalan dan kualitas produk dari UMKM tersebut, sehingga perlu adanya langkah untuk mengatasinya.

Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Kolaboratif

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kolaboratif dan adaptif adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan melayani kepentingan seluruh masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan, cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan. Penerapan teknologi informasi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan publik dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi terdepan . Misi ini sebagai respon dari isu tata kelola di Kota Bima, seperti kualitas pelayanan publik yang belum optimal, data dan manajemen data yang kurang berkualitas, pemanfaatan sistem berbasis digital yang masih kurang, serta kurangnya koordinasi antar lembaga/instansi.

Misi 4: Membangun Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi

Dalam membangun iklim investasi diperlukan kondisi daerah yang stabil dan aman, kondisi daerah yang kondusif akan menarik investasi untuk masuk dan berkembang, sehingga pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja dan mengembangkan perekonomian daerah. Untuk mewujudkannya perlu meningkatkan kualitas demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga stabilitas ekonomi makro dan menjaga keamanan dan ketentraman umum.

Misi 5: Mewujudkan Kota Bima Religius yang Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Untuk membangun masyarakat Kota Bima yang religius, berbudaya dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan adaptasi perubahan iklim diperlukan penguatan nilai-nilai agama dan budaya lokal untuk membangun keharmonisan dan kepedulian terhadap keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim merupakan dua aspek krusial dalam



menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan ketahanan lingkungan. Terjaganya lingkungan hidup Kota Bima dari berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif seperti degradasi lingkungan, konflik sosial, dan pengurangan kualitas hidup masyarakat.

Pengelolaan persampahan yang masih menjadi prioritas untuk ditangani dan ketersediaan air bersih dapat dikaitkan dengan bencana kekeringan sebagai dampak dari perubahan iklim. Hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk diatasi dalam waktu 20 tahun ke depan.

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Merata dan Berkeadilan

Bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah yang berbeda di suatu daerah dan didasarkan pada prinsip bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang lokasi geografis atau latar belakang sosial-ekonomi, harus mendapatkan akses yang sama terhadap manfaat pembangunan, seperti infrastruktur, layanan publik, dan peluang ekonomi. Pembangunan infrastruktur (seperti jalan, jembatan, transportasi, air bersih, sanitasi, listrik) dan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan) perlu merata di seluruh wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, serta daerah terpencil dan perbatasan. Pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan berfokus pada upaya mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah dengan memastikan distribusi kekayaan, kesempatan kerja, dan sumber daya ekonomi yang lebih merata.

Misi 7: Mengembangkan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas merupakan investasi masa depan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan perumahan dan permukiman, pengelolaan air minum, sanitasi dan pengelolaan persampahan secara terpadu.

Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan

Pembangunan pertahapan periode pembangunan dapat dilaksanakan secara



berkesinambungan dengan kaidah pelaksanaan yang efektif disertai dengan pembiayaan yang berkelanjutan dan melaksanakan manajemen resiko yang efektif dan efisien.

3.1.1 Pembangunan Tahap Pertama Tahun 2025-2029

Pada tahap pertama ini arah kebijakan direncanakan untuk fokus pada penguatan fondasi pembangunan daerah menjadi lebih kokoh dengan mendayagunakan modal pembangunan yang telah dicapai dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal sehingga dapat mendukung proses akselerasi pada tahapan berikutnya. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, unggul dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat;
2. Pengembangan sumber daya alam unggulan, meningkatkan produktivitas dan mempercepat inovasi pembangunan melalui riset kolaboratif, pengolahan hasil pertanian dan perluasan kesempatan kerja, penerapan pendekatan ekonomi hijau dan transisi penggunaan energi terbarukan;
3. Peningkatan tata kelola yang akuntabel dan adaptif melalui pemantapan regulasi penguatan lembaga, pengelola regulasi, peningkatan kualitas SDM berbasis merit, penerapan manajemen resiko dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, pemberdayaan masyarakat, keterbukaan informasi publik dan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah serta penguatan kapasitas fiskal daerah;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mengembalikan kondisi lingkungan terutama perubahan tutupan lahan yang selama ini sangat masif, perlindungan mata air, penyediaan sarana dan prasarana dasar air bersih dan air limbah yang memadai untuk masyarakat dan pengelolaan sampah terintegrasi;
5. Kehidupan masyarakat yang religius, berketahanan sosial budaya dan ekologi melalui penerapan kehidupan beragama, perkuatan keluarga dan pengarusutamaan gender, melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan menjaga keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim;



6. Peningkatan kemandirian daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro dalam rangka meningkatkan minat investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, stabilitas daya beli masyarakat dan memajukan taraf hidup serta perekonomian masyarakat;
7. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan strategis, ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
8. Pembangunan yang berkelanjutan dan kerkesinambungan.

3.1.2 Arah kebijakan Tahap Pertama Tahun 2025-2029

Rumusan agenda kerja dalam melaksanakan misi RPJPD Kota Bima Tahun 2025-2045 ditempuh melalui 4 (empat) tahapan dengan tema besar pada masing-masing tahapan Pembangunan dan sejalan dengan pentahapan pembangunan yang termuat dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045. Tahap pertama tahun 2025-2029 seperti tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Arah kebijakan RPJPD Kota Bima Tahun Pertama 2025-2029

| Visi | Misi | Tahun 2025-2029 |
|--|--|--|
| Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif | Pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat di sektor Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial |
| | Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing | Pengembangan ekonomi produktif dan sektor unggulan melalui peningkatan kualitas produksi, pengolahan hasil pertanian dan perluasan kesempatan kerja |
| | Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Kolaboratif dan Adaptif | Penerapan tata Kelola yang akuntabel dan adaptif melalui pemantapan regulasi, sistem merit, manajemen resiko serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyederhanaan birokrasi. |
| | Membangun Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi | Memperkuat Penegakan Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Kondusifitas Daerah Serta Jalinan Koordinasi dan Kerjasama yang Erat |
| | Membangun Masyarakat Kota Bima yang Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi | Memperkuat kehidupan sosial budaya dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari |



| Visi | Misi | Tahun 2025-2029 |
|------|---|---|
| | Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkeadilan | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan |
| | Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas | Pemenuhan sarana dan prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas |
| | Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan | Penguatan pembangunan Sosial, Ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan |

Sumber : RPJPD Kota Bima 2025-2045

3.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Visi Pembangunan Kota Bima Tahun 2025-2029

Visi Pembangunan Kota Bima tahun 2025-2029 adalah “**Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan**”. Visi ini memiliki tiga kata kunci yaitu: Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan. Masing-masing kata kunci ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

Maju:

Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, pembangunan yang merata, serta tingkat kemajuan ekonomi yang baik. Membangun daerah yang maju dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya, meningkatkan inovasi dan mendorong kolaborasi.

Prinsip membangun daerah yang maju meliputi:

- Partisipatif
- Terpadu
- Menghargai keanekaragaman
- Mengintegrasikan tata ruang dengan pembangunan
- Menggunakan lahan secara efisien
- Meningkatkan swadaya masyarakat

Pembangunan daerah yang maju juga harus memenuhi indikator keberhasilan, seperti: Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks gini ratio (pemerataan penghasilan), Angka pengangguran rendah, dan Angka kemiskinan rendah.



Bermartabat:

Daerah yang bermartabat adalah daerah yang masyarakatnya memiliki martabat, yaitu masyarakat yang berdaya, berpendidikan, dan memiliki akses kesehatan yang memadai. Kata bermartabat juga merujuk kepada nilai-nilai yang kita anut yang menunjukkan eksistensi atau identitas kita sebagai masyarakat Bima yang *Maja Labo Dahu*.

Untuk mewujudkan daerah yang bermartabat, Pemerintah Daerah dapat melakukan berbagai program, seperti: Mengurangi angka pengangguran, Meningkatkan kualitas pendidikan, Membangun infrastruktur yang memadai, Menyediakan layanan kesehatan yang mutakhir, serta Meningkatkan daya saing masyarakat.

Berkelanjutan:

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan. Pembangunan ini juga bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan generasi masa depan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah: (1) Memaksimalkan sumber daya alam, (2) Tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang, (3) Tidak ada pemborosan dalam penggunaan SDA, (4) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan, dan (5) Meningkatkan *useable resources*.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu:

- Menjamin keutuhan lingkungan hidup;
- Menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan;
- Membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil;
- Melindungi hak-hak generasi mendatang.

3.2.2. Misi

Untuk mendukung pencapaian Visi tersebut, maka dijabarkan kedalam 5 Misi:



1. Mewujudkan kehidupan masyarakat berketahanan sosial yang religius dan berbudaya;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
4. Meningkatkan ketahanan ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan
5. Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan.

Penjelasan kerangka teoritik masing-masing Misi diuraikan dalam tabel berikut.



Tabel 3.2 Perumusan Penjelasan Misi

| No | Misi | Pokok-Pokok Misi | Penjelasan |
|----|---|---|--|
| 1 | Mewujudkan kehidupan masyarakat berketahanan sosial yang religius dan berbudaya | Berketahanan sosial, Religius, Berbudaya | <ul style="list-style-type: none"> • Berketahanan sosial adalah kondisi suatu Masyarakat yang mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ketahanan sosial juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan kekuatan dan kelebihan daerah/masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. • Masyarakat religius adalah masyarakat yang memiliki kesadaran dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai keagamaan dan spiritual, serta saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda keyakinan. Nilai-nilai keagamaan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam ritual ibadah. • Masyarakat berbudaya adalah masyarakat yang memiliki norma, nilai, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh kebudayaan yang dapat diwariskan yaitu: adat istiadat, kebiasaan, hukum adat, pakaian adat, rumah adat tradisional, alat musik tradisional, tarian adat tradisional, lagu daerah, makanan khas. |
| 2 | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing | Sumber daya manusia yang Maju, Berdaya Saing | <p>Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pembangunan, baik itu pembangunan nasional, daerah, maupun desa/kelurahan. SDM yang berkualitas dapat mendorong kemajuan dan kemandirian daerah.</p> <p>SDM yang Maju adalah SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang tinggi.</p> <p>Ciri-ciri SDM yang maju adalah yaitu memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mampu mengatasi masalah, terampil dan berpengetahuan, serta memiliki kesehatan dan gizi yang optimal.</p> <p>Sementara SDM yang berdaya saing adalah SDM yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan karakter yang unggul sehingga mampu bersaing dan berkontribusi dalam Pembangunan.</p> |



| No | Misi | Pokok-Pokok Misi | Penjelasan |
|----|---|--|---|
| 3 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional | Tata kelola pemerintahan yang bersih, Pemerintahan yang profesional | <p>Tata kelola pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dapat dicapai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Membangun integritas,</i> Membangun integritas yang tinggi dalam pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. • <i>Memastikan transparansi</i> Pemerintahan yang transparan memberikan akses terbuka bagi publik untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, anggaran, dan penggunaan sumber daya publik. • <i>Menjamin akuntabilitas</i> Para pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik dan lembaga-lembaga pengawas. • <i>Melakukan evaluasi kinerja</i> Melakukan evaluasi teratur terhadap kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga publik. • <i>Memanfaatkan teknologi</i> Perkembangan teknologi telah membuka banyak peluang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. • <i>Melibatkan masyarakat</i> Melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan dan pembangunan. • <i>Menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis</i> Pemerintahan yang bersih selalu memberlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. |



| No | Misi | Pokok-Pokok Misi | Penjelasan |
|----|--|--|---|
| | | | <p>Pemerintahan yang profesional adalah pemerintahan yang mampu menjalankan tugas dan pelayanan publik dengan baik, tepat waktu, dan berintegritas tinggi. Pemerintahan yang profesional dapat diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti reformasi birokrasi, meritokrasi ASN, penegakan hukum, dan peningkatan akuntabilitas.</p> |
| 4 | Meningkatkan ketahanan ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan | Ketahanan ekologi, Pembangunan terintegrasi, Pembangunan berkelanjutan | <p>Ketahanan ekologi adalah kemampuan ekosistem untuk bertahan dan pulih dari gangguan. Ketahanan ekologi juga dapat diartikan sebagai kemampuan ekosistem untuk beradaptasi terhadap perubahan.</p> <p>Pembangunan berketahanan ekologi adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Pembangunan ini juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.</p> <p>Pembangunan terintegrasi adalah pendekatan pembangunan yang menggabungkan berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.</p> <p>Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.</p> <p>Untuk mewujudkan pembangunan berketahanan ekologi, terintegrasi dan berkelanjutan dapat dilakukan antara lain dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menata ruang yang mempertimbangkan aspek perubahan iklim • Memperkuat instrumen pengendali iklim • Memperkuat kapasitas <i>stakeholders</i> • Melakukan koordinasi multi sektor dan jenjang • Melakukan perlindungan sosial terhadap masyarakat yang terdampak • Mengimplementasikan aksi ketahanan iklim nasional. |



| No | Misi | Pokok-Pokok Misi | Penjelasan |
|----|--|---|--|
| 5 | Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan | Ekonomi inklusif, Pembangunan berkeadilan dan merata, Ekonomi berkelanjutan | <p>Ekonomi inklusif adalah konsep pembangunan ekonomi yang memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.</p> <p>Pembangunan berkeadilan dan merata adalah pembangunan yang dilakukan secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>Ekonomi berkelanjutan adalah sistem ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Ekonomi berkelanjutan juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.</p> <p>Pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem.</p> <p>Peran pemerintah untuk membangun ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan antara lain: (1) menyediakan infrastruktur yang memadai, (2) menyediakan jaring pengaman sosial yang memadai, (3) mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi inklusif, serta (4) mendukung lembaga keuangan berbasis komunitas.</p> |

Sumber: Hasil Analisis



Pembangunan nasional dan daerah harus selaras, sehingga perlu dilakukan penyesuaian visi dan misi pembangunan pada tingkat nasional hingga daerah.

Berdasarkan Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029, Presiden menetapkan 8 misi atau Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.

Sementara misi Gubernur NTB sesuai tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif;
2. Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Pondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan



3. Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan
4. Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga
5. Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan
6. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan
7. Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Pondasi Percepatan Pembangunan Daerah.



Tabel 3.3. Penyelarasan Visi dan Misi Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bima Tahun 2025-2029

| RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 | RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 | Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 |
|---|--|---|
| Visi | | |
| <i>“Terwujudnya Kota Bima Yang Maju, Bermartabat Dan Berkelanjutan”</i> | <i>“Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”</i> | <i>“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”</i> |
| Misi | | |
| 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Berketahanan Sosial Yang Religius Dan Berbudaya | 4 Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga | 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru |
| 2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Maju Dan Berdaya Saing | 1 Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif | 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas |
| 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional | 7 Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Pondasi Percepatan Pembangunan Daerah. | 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan |



| RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 | RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 | Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 |
|--|--|---|
| 4 Meningkatkan Ketahanan Ekologi Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan | 5 Memperkuat Sistim Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan | 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur |
| | 6 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan | 6 Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan |
| 5 Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Yang Berkeadilan, Merata Dan Berkelanjutan | 2 Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Pondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan | 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi |
| | 3 Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan | 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri |
| | 4 Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga | |

Sumber: Hasil Analisis



3.2.3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan.

Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara tepat, efektif dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan Sasaran akan menjadi panduan dan pedoman pembangunan selama lima tahun dan menjadi cita-cita atau impian dalam prioritas pembangunan yang diformulasikan dari berbagai amanat atau telaahan dokumen perencanaan pembangunan antara lain RPJPN dan RPJMN, serta RPJPD dan RPMJD Provinsi maupun Kota, termasuk telaahan kajian atas dokumen-dokumen kebijakan lainnya seperti KLHS, RTRW, serta isu global maupun nasional.

Berdasarkan hasil analisis dari identifikasi permasalahan daerah, maka diperoleh 6 isu strategis dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan yaitu:

1. Peningkatan keamanan, kehidupan beragama dan berbudaya
2. Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan bermartabat
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik
4. Pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi
5. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
6. Percepatan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan melalui pengembangan ekonomi inklusif

Enam isu strategis tersebut yang akan dikembangkan menjadi tujuan dan sasaran dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan.



3.2.3.1. Tujuan

Rumusan tujuan dalam setiap misi menggambarkan kondisi yang akan dicapai dalam merespon isu strategis perencanaan. Berpijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka panjang, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual yang keberlanjutan dalam pembangunan, maka dirumuskan tujuan Pembangunan Kota Bima Tahun 2025-2029 sebagai berikut.



Tabel 3.4. Keselarasan Misi, Isu Strategis dan Penetapan Tujuan yang Menjawab Isu Strategis

| Misi | | Isu Strategis | | Tujuan | | Indikator Tujuan |
|------|--|---------------|--|--------|---|--|
| 1 | Mewujudkan kehidupan masyarakat berketahanan sosial yang religius dan berbudaya | 1 | Peningkatan Keamanan, kehidupan beragama dan berbudaya | 1 | Meningkatkan rasa aman yang berkeadilan bagi Masyarakat | Indeks Rasa Aman |
| 2 | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing | 2 | Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan bermartabat | 2 | Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan kompetitif | Indeks Pembangunan Manusia |
| 3 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional | 3 | Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik | 3 | Terwujudnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kota Bima | Persentase Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) |
| | | 4 | Pengembangan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi | | | |
| 4 | Meningkatkan ketahanan ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan | 5 | Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan melalui Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 4 | Menurunnya risiko bencana | Indeks Risiko Bencana |
| | | | | 5 | Terwujudnya Kota Layak Huni | |
| 5 | Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan | 6 | Percepatan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif | 6 | Terwujudnya penciptaan lapangan kerja dan angkatan kerja terampil | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
| | | | | 7 | Terwujudnya perekonomian daerah yang inklusif, merata dan berkeadilan | Indeks Gini |

Sumber: Hasil Analisis, Bappeda, 2025



3.2.3.2. Sasaran

Tujuan yang telah dirumuskan pada tabel 3.4. perlu dijabarkan kedalam sasaran dan target yang akan dicapai selama lima tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Tujuan maupun sasaran perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang memiliki indikator sebagai alat ukur yang akan dicapai keberhasilannya yang berorientasi pada hasil (*outcome-impact*). Rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 3.5. Penetapan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima Tahun 2025-2030

| VISI | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | | | | | |
| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | Baseline 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Misi 1 - Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Berketahanan Sosial Yang Religius Dan Berbudaya | 1. Meningkatkan rasa aman yang berkeadilan bagi Masyarakat | | Indeks Rasa Aman (Indeks) | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,89 | 3,08 | 3,27 | 3,27 |
| | | 1. Penurunan Gangguan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman | Persentase penurunan gangguan ketertiban dan ketentraman | 5,14 | 5,39 | 5,64 | 5,89 | 6,14 | 6,39 | 6,64 |
| | | 2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang didukung budaya dan tradisi serta kearifan lokal | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Indeks) | 72,04 | 73,48 | 73,85 | 74,22 | 74,59 | 74,96 | 74,96 |
| | | | Persentase warisan budaya tak benda terhadap total pencatatan yang telah ditetapkan (%) | 4,88 | 4,88 | 5,00 | 5,12 | 5,23 | 5,35 | 5,47 |
| Misi 2 - Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Maju Dan Berdaya Saing | 2. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan kompetitif | | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | 78,91 | 78,95 | 79,36 | 79,76 | 80,17 | 80,58 | 80,99 |
| | | 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang merata dan terjangkau | Indeks SPM Pendidikan (Indeks) | 76,21 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| | | | RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK USIA 25 TAHUN (TAHUN) | 10,96 | 11,19 | 11,34 | 11,48 | 11,63 | 11,78 | 11,93 |
| | | | HARAPAN LAMA SEKOLAH | 15,08 | 15,35 | 15,43 | 15,51 | 15,59 | 15,67 | 15,75 |
| | | 4. Meningkatnya daya saing sumberdaya Manusia Kota Bima | PERSENTASE PEKERJA LULUSAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI YANG BEKERJA (PERSEN) | 59,88 | 68,39 | 69,81 | 71,23 | 72,66 | 74,08 | 75,50 |
| | | | Rasio Ketergantungan (%) | 48,2 | 47,5 | 46,8 | 46,1 | 45,4 | 44,7 | 44,7 |



VISI

Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | Baseline 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 22,11 | 23,6 | 23,77 | 23,94 | 241 | 24,27 | 24,27 |
| | | 5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 73,15 | 73,88 | 74,18 | 74,47 | 74,76 | 75,06 | 75,06 |
| | | 6. Meningkatnya Prestasi masyarakat Kota Bima | Jumlah Orang Berprestasi Tingkat Nasional dan Regional (Angka) | 36 | 45 | 182 | 56 | 66 | 190 | 190 |
| | | 7. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) | 96,9 | 96,92 | 96,94 | 96,95 | 96,96 | 96,97 | 96,98 |
| Misi 3 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional | 3. Terwujudnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kota Bima | | Persentase Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| | | 8. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas | Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) | 72,30 | 73,02 | 73,75 | 74,49 | 75,24 | 75,99 | 77,51 |
| Misi 4 - Meningkatkan Ketahanan Ekologi Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan | 4. Menurunnya risiko bencana | | Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks) | 91,74 | 90,17 | 89,27 | 88,37 | 87,49 | 86,62 | 86,62 |
| | | 9. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | Indeks Ketahanan Daerah (Angka) | 0,60 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 |
| | | 10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) | 64,50 | 65,30 | 66,38 | 67,45 | 68,53 | 69,61 | 70,68 |



VISI

Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | Baseline 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|---|--|--|---|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | 5. Terwujudnya Kota Layak Huni | | Indeks Kota Layak Huni (Indeks) | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 |
| | | 11. Meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah | Indeks Infrastruktur Wilayah (Indeks) | 76,22 | 77,74 | 79,3 | 80,88 | 82,5 | 84,15 | 84,15 |
| | | 12. Menurunnya luasan Kawasan kumuh | Persentase Kawasan kumuh (%) | 4,41 | 4,32 | 4,23 | 4,14 | 4,05 | 3,96 | 3,96 |
| | | 13. Terjaminnya ketercukupan pangan masyarakat | Indeks Ketahanan Pangan (Indeks) | 75,53 | 75,62 | 76,29 | 76,96 | 77,64 | 78,32 | 78,32 |
| Misi 5 - Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Yang Berkeadilan, Merata Dan Berkelanjutan | 6. Terwujudnya penciptaan lapangan kerja dan angkatan kerja terampil | | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,27 | 3,18 | 3,15 | 3,11 | 3,08 | 3,05 | 3,02 |
| | | 14. Memperluas kesempatan kerja di Kota Bima berbasis peningkatan kualitas SDM | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 73,21 | 73,83 | 74,46 | 75,08 | 75,71 | 76,33 | 76,96 |
| | | 15. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah | PDRB per Kapita Harga Berlaku (Rp. Juta Per Tahun) | 32,48 | 35,14 | 38,55 | 41,54 | 44,91 | 48,58 | 53,21 |
| | | | Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten/kota terhadap Provinsi (%) | 2,99 | 3,02 | 3,04 | 3,06 | 3,08 | 3,09 | 3,09 |
| | 7. Terwujudnya perekonomian daerah yang inklusif, merata dan berkeadilan | | Rasio Gini (Indeks) | 0,380 | 0,380 | 0,376 | 0,372 | 0,368 | 0,364 | 0,360 |
| | | 16. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,04 | 5,26 | 5,32 | 5,37 | 5,42 | 5,48 | 5,48 |



VISI

Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | Baseline 2024 | TARGET TAHUN | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 17. Menurunnya Tingkat Kemiskinan | Tingkat Kemiskinan ((%)) | 8,12 | 7,82 | 7,57 | 7,32 | 7,07 | 6,82 | 6,82 |

Sumber: Hasil Analisis, Bappeda, 2025



3.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah-langkah konkrit Pemerintah Kota Bima dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program kegiatan perangkat daerah. Dengan demikian, implementasi RPJMD ini tidak hanya melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong sebuah pemikiran dan cara baru dalam menjalankan pemerintahan Kota Bima yang memiliki tantangan dan peluang kompleks ke depan.

3.3.1. Strategi Umum

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan, dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintahan. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah berupaya dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Strategi 1: Meningkatkan rasa aman melalui peningkatan keharmonisan sosial dan pengurangan potensi-potensi timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta konflik sosial.



Rasa aman dalam masyarakat merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Meningkatkan rasa aman tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan upaya membangun keharmonisan sosial serta mengurangi potensi gangguan ketenteraman dan konflik sosial.

Meningkatkan rasa aman dalam masyarakat membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan keharmonisan sosial, penguatan ketertiban umum, serta pengurangan potensi konflik sosial. Dengan mengimplementasikan strategi yang berfokus pada toleransi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta penegakan hukum yang adil dan humanis, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Strategi 2: Peningkatan Daya Saing SDM Kota Bima melalui pemerataan kualitas pendidikan dan akses pendidikan dalam menghasilkan *output* berkualitas pada semua jenjang pendidikan secara berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan faktor utama dalam meningkatkan daya saing suatu kota di era globalisasi. Untuk mencapai hal tersebut, pemerataan kualitas dan akses pendidikan menjadi kunci utama dalam menghasilkan lulusan yang kompetitif di semua jenjang pendidikan

Peningkatan daya saing SDM kota harus dilakukan melalui pemerataan kualitas pendidikan dan akses yang setara bagi semua masyarakat. Dengan meningkatkan kompetensi guru, memperbaiki infrastruktur pendidikan, memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan, serta mengintegrasikan teknologi dan dunia kerja dalam sistem pendidikan, kota dapat menghasilkan lulusan yang kompetitif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global secara berkelanjutan.



Strategi 3: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan berkualitas dan merata yang berbasis pada lingkungan dan kaum perempuan.

Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, kondisi lingkungan yang sehat, serta peran perempuan dalam menjaga kesehatan keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, inklusif, dan berbasis pada lingkungan serta pemberdayaan perempuan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan penyediaan layanan kesehatan berkualitas, perbaikan lingkungan yang sehat, serta pemberdayaan perempuan dalam kesehatan keluarga dan komunitas. Dengan mengimplementasikan strategi ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, lingkungan yang lebih sehat, serta peran perempuan yang lebih kuat dalam menjaga kesejahteraan masyarakat

Strategi 4: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi yang efektif merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, strategi yang berkelanjutan perlu diterapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efisiensi birokrasi.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi berbasis transparansi, efisiensi, partisipasi publik, serta pemanfaatan teknologi, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Reformasi birokrasi yang efektif juga akan menciptakan aparatur negara yang profesional, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.



Strategi 5: Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Ketahanan daerah terhadap bencana sangat bergantung pada kualitas lingkungan hidup. Lingkungan yang terjaga dengan baik dapat berperan sebagai pelindung alami dari berbagai ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup guna meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana

Perbaikan kualitas lingkungan hidup adalah langkah kunci dalam meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dengan menerapkan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana, rehabilitasi ekosistem, pembangunan infrastruktur hijau, pengelolaan sumber daya air, serta peningkatan kesadaran masyarakat, risiko bencana dapat diminimalkan. Selain itu, kebijakan lingkungan yang kuat serta pengelolaan limbah yang baik akan semakin mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Strategi 6: Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Infrastruktur wilayah yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan konektivitas, efisiensi manajemen, pemanfaatan teknologi hijau, serta partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat, infrastruktur dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan lingkungan dalam jangka panjang.

Strategi 7: Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas dan kapasitas BLK, perluasan akses informasi pasar tenaga kerja serta fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM.



Peningkatan kesempatan kerja merupakan salah satu strategi utama dalam mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja (BLK), akses yang lebih luas terhadap informasi pasar tenaga kerja, serta dukungan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Peningkatan kesempatan kerja dapat diwujudkan melalui strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas dan kapasitas BLK, perluasan akses informasi pasar tenaga kerja, serta fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM. Dengan mengembangkan pelatihan kerja yang relevan, mempermudah akses informasi tenaga kerja, serta memperkuat ekosistem bisnis bagi UMKM, Pemerintah dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

Kolaborasi antara Pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Strategi 8: Peningkatan iklim investasi dan produktivitas sektor unggulan untuk membangun perekonomian berbasis kemasyarakatan serta penataan sektor penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan iklim investasi dan produktivitas sektor unggulan merupakan kunci untuk membangun perekonomian daerah yang inklusif, berdaya saing, serta berbasis kemasyarakatan. Selain itu, optimalisasi sektor penyumbang PAD menjadi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Meningkatkan iklim investasi, memperkuat sektor unggulan berbasis kemasyarakatan, serta menata sumber PAD merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dengan mempermudah investasi, meningkatkan produktivitas sektor utama, serta mengelola sumber pendapatan daerah secara transparan dan efisien, Pemerintah dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat.



Strategi 9: Peningkatan layanan sosial bagi PMKS melalui peningkatan kapasitas PSKS serta penguatan kemitraan dengan pihak swasta, NGO dan BUMD dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan layanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang sekarang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti swasta, NGO, dan BUMD, guna mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Strategi peningkatan layanan sosial bagi PPKS dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas PSKS, kerja sama dengan berbagai pihak, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, PMKS dapat lebih mandiri secara sosial dan ekonomi, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, NGO, dan BUMD menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan efektif.

Berbagai strategi umum tersebut di atas diharapkan dapat menjawab sasaran strategis yang telah dirumuskan. Keselarasan antara Sasaran Strategis dan Strategi Umum serta Indikator Kinerja Utama RPJMD disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 3.6. Keselarasan Antara Sasaran Strategis dan Strategi RPJMD Tahun 2025-2029

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Strategi Umum | |
|--|---|--------|---|---|
| 1 Penurunan Gangguan Keamanan Ketertiban dan Ketenteraman | 1 Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman | % | 1 Meningkatkan rasa aman melalui peningkatan keharmonisan sosial dan pengurangan potensi-potensi timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta konflik sosial | |
| 2 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang didukung budaya dan tradisi serta kearifan lokal | 2 Indeks Kerukunan Umat Beragama | Angka | | |
| | 3 Persentase warisan budaya tak benda terhadap total pencatatan yang telah ditetapkan | % | | |
| 3 Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang merata dan terjangkau | 4 Indeks SPM Pendidikan | Angka | 2 Peningkatan Daya Saing SDM Kota Bima melalui Pemerataan kualitas pendidikan dan akses pendidikan dalam menghasilkan output berkualitas pada semua jenjang pendidikan secara berkelanjutan | |
| | 5 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun | Tahun | | |
| | 6 Harapan Lama Sekolah | Tahun | | |
| 4 Meningkatnya daya saing sumberdaya Manusia Kota Bima | 7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Dan Tinggi Yang Bekerja | % | | |
| | 8 Rasio ketergantungan (KB) | % | | |
| | 9 Proporsi penduduk 15 tahun ke atas berkualifikasi pendidikan tinggi | % | | |
| 5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 10 Usia Harapan Hidup | Tahun | | 3 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan berkualitas dan merata yang berbasis pada lingkungan dan kaum perempuan |
| 6 Meningkatnya Prestasi masyarakat Kota Bima | 11 Jumlah orang berprestasi Tingkat Nasional dan Regional | Orang | | |
| 7 Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak | 12 Indeks Pembangunan Gender | Angka | | |



| Sasaran Strategis | | Indikator Sasaran | Satuan | Strategi Umum |
|-------------------|--|--|-----------------|--|
| 8 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas | 13 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | Angka | 4 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi |
| 9 | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | 14 Indeks Ketahanan daerah | Angka | 5 Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui perbaikan kualitas lingkungan hidup |
| 10 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 15 Indeks Kualitas Lingkungan hidup | Angka | |
| 11 | Meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah | 16 Indeks Infrastruktur wilayah | % | |
| 12 | Menurunnya luasan Kawasan kumuh | 17 Persentase Kawasan kumuh | % | 6 Mewujudkan Kota Layak Huni melalui peningkatan kualitas layanan infrastruktur, permukiman yang tertata dan ketercukupan pangan |
| 13 | Terjaminnya ketercukupan pangan masyarakat | 18 Indeks Ketahanan Pangan | Angka | |
| 14 | Memperluas kesempatan kerja di Kota Bima berbasis peningkatan kualitas SDM | 19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | |
| 15 | Meningkatnya daya saing perekonomian daerah | 20 PDRB per kapita harga berlaku | Rp. Juta /Tahun | 7 Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas dan kapasitas BLK, perluasan akses informasi pasar tenaga kerja serta fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM |
| | | 21 Proporsi kontribusi PDRB wilayah Kota terhadap Provinsi | % | |
| 16 | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | 22 Pertumbuhan ekonomi | % | 8 Peningkatan iklim investasi dan produktivitas sektor unggulan untuk membangun perekonomian berbasis kemasyarakatan serta penataan sektor penyumbang PAD |
| 17 | Menurunnya tingkat kemiskinan | 23 Tingkat kemiskinan | % | 9 Peningkatan layanan sosial bagi PMKS melalui peningkatan kapasitas PSKS serta penguatan kemitraan dengan pihak swasta, NGO dan BUMD dalam upaya pemberdayaan masyarakat |

Sumber: Hasil Analisis, Bappeda, 2025



3.3.2. Strategi Berdasarkan Tujuan Sasaran

Sebagaimana disampaikan di atas, selain Strategi Umum sebagai pijakan merumuskan Arah Kebijakan tahunan RPJMD, maka juga dirumuskan Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang berguna sebagai pijakan pelaksanaan program Perangkat Daerah yang menjelaskan pilihan tindakan/kebijakan untuk memilih program dan kegiatan agar dapat mendukung capaian tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi berdasarkan tujuan dan sasaran disajikan secara detail dalam tabel berikut.



Tabel 3.7. Strategi Pembangunan Daerah berdasarkan Tujuan dan Sasaran

| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Strategi Per Sasaran |
|---|---|--|--|---|
| Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Berketahanan Sosial Yang Religius Dan Berbudaya | Meningkatkan rasa aman yang berkeadilan bagi masyarakat | Penurunan Gangguan Keamanan Ketertiban dan Ketenteraman | Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Ketertiban dan Ketenteraman | Meningkatkan sistem keamanan melalui pengembangan sistem pemantauan terpadu, respon cepat terhadap aduan serta koordinasi dengan mitra strategis yang berbasis lingkungan |
| | | Meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang didukung budaya dan tradisi serta kearifan lokal | Indeks Kerukukan Umat Beragama Persentase peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang eksis di masyarakat | Meningkatkan toleransi dan moderasi beragama melalui penguatan komitmen kebangsaan dan penguatan modal sosial yang didukung oleh penyediaan informasi dan deteksi dini terhadap potensi timbulnya gangguan konflik sosial |
| Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Maju Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan kompetitif | Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang merata dan terjangkau | Indeks SPM Pendidikan | Pemerataan kualitas pendidikan dengan penerapan teknologi informasi untuk menghasilkan <i>output</i> berkualitas disemua jenjang pendidikan |
| | | | Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun | |
| | | | Harapan Lama Sekolah | |
| Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia Kota Bima | Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia Kota Bima | Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia Kota Bima | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Dan Tinggi Yang Bekerja | Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian penduduk dan pengembangan keterampilan lulusan pendidikan tinggi yang akan memasuki pasar tenaga kerja |
| | | | Rasio ketergantungan (KB) | |
| | | | Proporsi penduduk 15 tahun keatas berkualifikasi pendidikan tinggi | |



| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Strategi Per Sasaran |
|--|--|---|--|--|
| | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan | Umur Harapan Hidup | Meningkatkan jangkauan akses kesehatan berkualitas khususnya pada masyarakat miskin dalam penciptaan masyarakat sehat sehingga mampu bersaing di level nasional dan regional |
| | | Meningkatnya prestasi masyarakat Kota Bima | Jumlah orang berprestasi Tingkat Nasional dan Regional | Meningkatkan jangkauan akses kesehatan berkualitas khususnya pada masyarakat miskin dalam penciptaan masyarakat sehat sehingga mampu bersaing di level nasional dan regional |
| | | Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak | Indeks Pembangunan Gender | Pengarusutamaan gender menerapkan perencanaan yang responsif gender serta pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak |
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional | Terwujudnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kota Bima. | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. | Indeks Reformasi Birokasi | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi |
| Mewujudkan Ketahanan Ekologi Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan | Menurunnya risiko bencana | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | Indeks Ketahanan daerah | Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui perkuatan mitigasi bencana, tanggap darurat dan rekonstruksi serta rehabilitasi pasca bencana |



| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Strategi Per Sasaran |
|--|--|--|---|---|
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas lingkungan Hidup | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat, perkuatan regulasi dan penegakan aturan |
| | Terwujudnya Kota yang layak huni | Meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah | Indeks Infrastruktur Wilayah | Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan |
| | | Menurunnya persentase kawasan kumuh | Persentase Kawasan Kumuh | Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui penataan kawasan permukiman |
| | | Meningkatnya kecukupan pangan | Indeks Ketahanan Pangan | Menjami ketersediaan pangan melalui produksi, distribusi, logistik dan stabilisasi harga pangan |
| Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Yang Berkeadilan, Merata Dan Berkelanjutan | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja | Memperluas kesempatan kerja di Kota Bima berbasis peningkatan kualitas SDM | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas dan kapasitas BLK, perluasan akses informasi pasar tenaga kerja |
| | | Meningkatnya Daya Saing | PDRB per kapita harga berlaku (Rp. Juta /Tahun/Orang) | Meningkatkan kapasitas UMKM dan angkatan kerja melalui fasilitasi akses permodalan, pelatihan dan keterampilan usaha serta upaya pengendalian inflasi daerah. |
| | | | Proporsi kontribusi PDRB wilayah Kota terhadap Provinsi (%) | |
| | Terwujudnya pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Pertumbuhan ekonomi (%) | Meningkatkan PAD, iklim investasi dan produktivitas sektor unggulan untuk membangun perekonomian berbasis kemasyarakatan. |
| | | Menurunnya tingkat kemiskinan | Tingkat kemiskinan (%) | Meningkatkan layanan sosial bagi PMKS melalui peningkatan kapasitas PSKS serta penguatan kemitraan dengan pihak swasta, NGO dan BUMD dalam upaya pemberdayaan masyarakat. |

Sumber: Hasil Analisis, Bappeda, 2025



3.3.3. Arah Kebijakan

3.3.3.1. Arah Kebijakan Perwilayahan

Kota Bima (Raba Bima) sebagai simpul transportasi regional dan nasional di Pulau Sumbawa bagian timur ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi pelayanan utama yaitu:

- Pusat pengembangan perdagangan dan jasa skala regional
- Simpul transportasi laut Pulau Sumbawa bagian timur
- Daerah tujuan wisata budaya dan bahari
- Pusat pengembangan industri perikanan

Dengan fungsi dan peran tersebut diatas serta dikaitkan dengan potensi distribusi dan koleksi barang dan jasa skala nasional dan secara jalur transportasi darat lintas Nusa Tenggara, maka penetapan pusat-pusat pelayanan di Kota Bima dan sistem perkotaannya diarahkan untuk meningkatkan fungsi wilayah Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, dan industri.

Tabel 3.8. Fungsi dan Kegiatan Utama Pelayanan di Kota Bima

| Fungsi Kawasan | Lokasi | Kegiatan Utama | Peran dan fungsi |
|---------------------------------|--|--|---|
| Pusat Pelayanan Kota | • Kecamatan Rasanae Barat | Perdagangan dan jasa Pariwisata | <ul style="list-style-type: none">• Pusat pengembangan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional• Simpul transportasi darat dan laut skala nasional dan regional• Daerah tujuan wisata budaya dan bahari |
| Sub Pusat Pelayanan Kota | BWP Kecamatan Mpunda: - Kelurahan Penatoi - Kelurahan Sadia - Kelurahan Sambinane | Pendidikan, Pemerintahan administrasi umum, | <ul style="list-style-type: none">• Pusat pendidikan skala Regional• Pusat pelayanan pemerintahan dan administrasi umum skala nasional dan regional• Pusat pelayanan kesehatan |
| | BWP Kecamatan Raba: - Kelurahan Rabangodu Utara | Industri, Kerajinan Kesehatan | <ul style="list-style-type: none">• Pusat pengembangan industri kerajinan dan industri kecil• Pusat pelayanan kesehatan skala regional |



| Fungsi Kawasan | Lokasi | Kegiatan Utama | Peran dan fungsi |
|-----------------------------------|--|---|---|
| | - Kelurahan Rabadompu Timur - Kelurahan Rabadompu Barat | | |
| | BWP Kecamatan Rasanae Timur: - Kelurahan Oi Fo'o dan sekitarnya | Pertanian tanaman pangan dan hortikultura | <ul style="list-style-type: none"> • Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura • Pusat pelayanan kesehatan • Simpul transportasi darat skala regional |
| Pusat Pelayanan Lingkungan | Kelurahan Mande | Pendidikan, perdagangan dan jasa | <ul style="list-style-type: none"> • Pusat pendidikan skala regional • Pusat perdagangan dan jasa skala lokal. |
| | Kelurahan Manggemaci | Perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum | <ul style="list-style-type: none"> • Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala lokal • Pusat sarana pelayanan umum skala lokal. |
| | Kelurahan Santi | Perdagangan dan jasa | <ul style="list-style-type: none"> • Pusat perdagangan dan jasa skala lokal |
| | Kelurahan Jatiwangi | Pelayanan Kesehatan, perdagangan dan jasa | <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai pusat pelayanan kesehatan • Pusat pelayanan perdagangan dan jasa |
| | Kelurahan Jatibaru Timur | Perdagangan dan jasa, transportasi | <ul style="list-style-type: none"> • Pusat perdagangan dan jasa • Simpul Transportasi darat bagian utara. |
| | Kelurahan Kodo | Pusat pelayanan kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> • Pusat perdagangan dan jasa skala lokal. • Pusat pelayanan kesehatan |
| | Kelurahan Kolo | Pariwisata, industri | <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pariwisata bahari • Pusat perdagangan dan jasa skala lokal • Pusat pelayanan kesehatan skala lokal. • Pusat Industri Perikanan Skala regional. |

Sumber: RTRW Kota Bima 2024-2044

Arahan pengembangan masing-masing BWP pada Rencana Tata Ruang



Wilayah Kota Bima antara lain :

1. BWP Rasanae Barat

BWP Rasanae Barat diarahkan untuk :

- a. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa melalui pembangunan Kawasan Super Blok Amahami disertai dengan infrastruktur penunjang berupa Peningkatan jalan Binabaru Kelurahan Dara, Perluasan dan pengembangan pelabuhan bongkar muat pada Kelurahan Tanjung, pengembangan alur pelayaran regional dan nasional, pengembangan dan revitalisasi terminal tipe A di Kelurahan Dara, Pembangunan terminal barang pada Kelurahan Tanjung, Pengembangan SPBU Minyak dan Gas pada Kelurahan Dara,
- b. Pengembangan kawasan wisata melalui penataan kawasan pantai Amahami-Niu, Reklamasi Lawata, Amahami dan Tanjung, pengembangan kawasan pantai dilakukan dengan melakukan pengawasan ketat pada kegiatan di sempadan pantai dan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai sepanjang pesisir dari kelurahan Dara sampai Kelurahan Tanjung
- c. Perlindungan kawasan ekosistem mangrove melalui penanaman kembali pada lokasi sepanjang pesisir pantai
- d. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau perkotaan pada kawasan Amahami, Niu, dan Serasuba.
- e. Pengembangan dan pelestarian kawasan Cagar Budaya, Makam Kesultanan pada Kelurahan Dara, Mesjid Kesultanan pada Kelurahan Paruga dan Museum pada Kelurahan Paruga

2. BWP Mpunda

BWP Mpunda diarahkan untuk :

- a. Pengembangan Pusat Pendidikan Skala Regional melalui pengembangan Perguruan Tinggi pada Kelurahan Mande
- b. Pusat Pemerintahan, pengembangan pusat pemerintahan pada Kelurahan Penatoi, Pengembangan Kawasan Perkantoran dan peningkatan kualitas dan bangunan kantor pada kelurahan Penatoi
- c. Pengembangan perumahan, pengembangan permukiman baru pada Kelurahan Mande dan Lewirato



3. BWP Raba

Pembangunan pada BWP Raba diarahkan sebagai :

- a. Pusat pelayanan kesehatan skala regional dengan pembangunan Rumah Sakit rujukan pada kelurahan Rabangodu Utara
- b. Pengembangan industri kerajinan dan industri kecil tenun ikat pada Kelurahan Rabadompu Timur

4. BWP Rasanae Timur

Pengembangan BWP Rasanae Timur diarahkan sebagai

- a. Pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada kelurahan Nungga, Kendo dan Ntobo
- b. Pengelolaan Kawasan konservasi hutan Maria Donggomasa, nanganae kapenta serta rehabilitasi kawasan hutan kota (rimba kota)

5. BWP Asakota

Pengembangan BWP Asakota diarahkan :

- a. Pengembangan Kawasan wisata bahari pada kelurahan Ule dan Kolo melalui penataan dan pengembangan destinasi wisata, penyediaan infrastruktur penunjang wisata
- b. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan pada Kelurahan Kolo



Tabel 3.9. Indikasi Program Utama RTRW Kota Bima tahap II 2026-2031

| No. | Indikasi Program Utama | Lokasi | Besaran (Rp Milyar) | PJM II 2026-2031 | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|---|---------------------|------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Penataan kawasan pantai Amahami – Niu | Kelurahan Dara | 50 | | APBN/ APBD | Kementerian PUPR, DPUPR |
| 2 | Reklamasi Lawata – Amahami - Tanjung | Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung | 40 | | APBN/ APBD | Kementerian |
| 3 | Pembangunan kawasan perdagangan Superblok Amahami | Kelurahan Dara | 50 | | Swasta | Kementerian PUPR, Kemendag DPUPR |
| 4 | Pembangunan fasilitas perkantoran Pemerintahan skala Kota. | Kelurahan Penatoi. | 50 | | APBN/APBD | Kementerian PUPR, DPUPR |
| 5 | Pembangunan Universitas Negeri Bima | Kelurahan Sambinae | 40 | | APBN/ APBD | Kementerian pendidikan dan kebudayaan, Dinas pendidikan dan kebudayaan |
| 6 | Pembangunan Rumah Sakit Skala Regional | Kelurahan Rabangodu Utara | 210 | | APBN/ APBD | Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Dinas kesehatan, DPUPR |
| 7 | Relokasi terminal tipe C dari Kumbe ke Lampe | Kelurahan Lampe | 10 | | APBN/ APBD | Kemenhub, Dishub, Kementerian PUPR, DPUPR |
| 8 | Pengembangan puskesmas rawat inap | Kelurahan Kodo | 5 | | APBN/ APBD | Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Dinas kesehatan, DPUPR |
| 9 | Revitalisasi terminal tipe A (terminal penumpang) di Kelurahan Dara | Kecamatan Rasanae Timur | 100 | | APBN/ APBD/ | Kemenhub, Dishub |
| 10 | Pembangunan Terminal Barang Tanjung | Kecamatan Rasanae Barat | 50 | | APBN/ APBD/ | Kemenhub, Dishub |
| 11 | Pemeliharaan depo bahan bakar minyak dan gas | Kecamatan Rasanae Barat | 10 | | APBN/ APBD/ | Kem. ESDM, Dinas ESDM, Dinas PUPRPP, PLN |
| 12 | Pengembangkan SPBU minyak dan gas | Kota Bima | 100 | | APBN/ APBD/ | Kem. ESDM, Dinas ESDM, Dinas PUPRPP, PLN |
| 13 | Pembangunan Prasarana Irigasi meliputi Rencana Pengembangan Bendungan, Dam, Embung, Cekdam. | Kel. Jatibaru, Lampe, Dodu, Nungga, dan Ntobo Kota Bima | 300 | | APBN/ APBD | Kementerian PUPR, DPUPR |



| No. | Indikasi Program Utama | Lokasi | Besaran (Rp Milyar) | PJM II 2026-2031 | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|---|---------------------|------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | Pengembangan bak penampung air hujan | Kel. Oi Fo'o, Lelamase, dan Nitu | 10 | | APBN/ APBD | Kementerian PUPR, DPUPR |
| 15 | Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) di Kelurahan Kodo. | Kec. Rasanae Timur | 10 | | APBN/ APBD | Kementerian PUPR, DPUPR |
| 16 | Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di setiap RS Kota Bima | Kota Bima | 30 | | APBN/ APBD | Kementerian PUPR, DPUPR |
| 17 | Pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kelurahan Kodo | Kecamatan Rasanae Timur | 50 | | APBN/ APBD | Kementerian PUPR, Kementerian LH, DPUPR, DLH |
| 18 | Pengembangan TPS-3R | Kota Bima | 30 | | APBN/ APBD | Kementerian PUPR, Kementerian LH, DPUPR, DLH |
| 19 | Normalisasi sungai Melayu dan sungai Padolo | Kota Bima | 250 | | APBN/ APBD | Kementerian PUPR, DPUPR, |
| 20 | Penegasan fungsi kawasan hutan lindung | Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Asakota | 10 | | APBN/ APBD | Kementerian Kehutanan, BPKH, DLH |
| 21 | Mengembalikan secara bertahap pada kawasan yang mengalami kerusakan. | Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Asakota | 10 | | APBN/ APBD | Kementerian Kehutanan, BPKH, DLH |
| 22 | Penguasaan kawasan sempadan pantai oleh pemerintah dengan batas antara 10 – 100 m dan diperkuat statusnya | Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota | 100 | | APBN/ APBD | Kementerian PUPR, DPUPR |
| 23 | Penertiban lahan-lahan yang berada di kawasan sempadan pantai | Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota | 100 | | APBN/ APBD | Kementerian PUPR, DPUPR |
| 24 | Perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan pantai | Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota | 40 | | APBN/ APBD | Kementerian PUPR, DPUPR |



| No. | Indikasi Program Utama | Lokasi | Besaran (Rp Milyar) | PJM II 2026-2031 | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|---|---------------------|------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | Mempertahankan dan menjaga kelestarian Kawasan Cagar Budaya | Kota Bima | 10 | | APBN/ APBD | Kementerian Pariwisata EK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, DPUPR, Dinas Pariwisata |
| 26 | Perlindungan kawasan ekosistem mangrove | Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota | 10 | | APBN/ APBD | Kemen LH, Kementerian KKP, Dinas KKP, DLH |
| 27 | Rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove | Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota | 10 | | APBN/ APBD | Kemen LH, Kementerian KKP, Dinas KKP, DLH |
| 28 | Penyusunan RTR pengembangan kawasan industri | Kecamatan Asakota | 1 | | APBN/ APBD, Swasta | KemenPU, Kemperindag, PUPR, Koperindag |

Sumber : RTRW Kota Bima 2024-2044



Kawasan Strategis Kota meliputi Kawasan Strategis berdasarkan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan Strategis berdasarkan Kepentingan Sosial Budaya, serta Kawasan Strategis berdasarkan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Arahan pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima pada PJM II 2026-2031 antara lain :

1. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi

Kawasan Strategis Kota berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- d. Kawasan Pantai Teluk Bima dengan sektor unggulan pariwisata yang meliputi Pantai Amahami-Ni'u di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Pantai Ule-So Nggela Kelurahan Ule dan Pantai Bonto-So Ati Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota;
- e. Kawasan Pasar Raya dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa yang terdapat di Kelurahan Sarae, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Dara, dan Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat.

2. Kawasan Strategis berdasarkan Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis di bidang sosial budaya ditetapkan pada sebuah kawasan yang dianggap memiliki nilai historis maupun kegiatan-kegiatan budaya untuk tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya. Kawasan strategis ini juga merupakan aset wisata sejarah dan budaya yang dapat menunjukkan jati diri wilayah Kota Bima. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial budaya meliputi:

- a. Kawasan Kota Tua Tanjung di Kelurahan Tanjung;
- b. Kawasan Istana Kesultanan Bima di Kelurahan Paruga;
- c. Kawasan Pemakaman Datuk Di Banta Tolobali di Kelurahan Sarae
- d. Kawasan Dana Traha di Kelurahan Dara.

3. Kawasan Strategis Berdasarkan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup mencakup kawasan lindung dan Kawasan Hutan Lampe-Maria dan



Kawasan Hutan Donggomasa di Kecamatan Rasanae Timur dan Kawasan Ncai Kapenta yang berfungsi sebagai konservasi di Kecamatan Asakota.



Tabel 3.10. Indikasi program RTRW Kota Bima Kawasan Strategis Tahap II 2026-2031

| No | Indikasi Program Utama | Lokasi | Besaran (Rp) | PJM II 2026-2031 | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|--|--|---|--------------|------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Perwujudan Kawasan Strategis Kota | | | | | | |
| 1 | Pengembangan kawasan pariwisata pantai Amahami-Ni'u, pantai Ule-Songgela, dan Pantai So Ati dan sekitarnya | Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota | 40 | | APBN/APBD | Kementerian Pariwisata EK, Kementerian PU, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata |
| 2 | Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa konsep superblok Amahami | Kecamatan Rasanae Barat | 50 | | APBN/APBD | Kementerian Perdagangan, Kementerian PU, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Koperindag |
| 3 | Revitalisasi pasar Raya dan pasar Lama | Kecamatan Rasanae Barat | 20 | | APBN/APBD | Kementerian Perdagangan, Kementerian PU, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Koperindag |
| 4 | Revitalisasi Kawasan Istana Kesultanan Bima dan sekitarnya | Kecamatan Rasanae Barat | 20 | | APBN/APBD | Kementerian Pariwisata EK, Kementerian PU, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata |
| 5 | Penataan kawasan Istana Kesultanan Bima dan sekitarnya | Kecamatan Rasanae Barat | 20 | | APBN/APBD | Kementerian Pariwisata EK, Kementerian PU, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata |
| 6 | Pengelolaan Kawasan Hutan Maria serta kawasan hutan Donggomasa dan Nanga Na'e Kapenta | Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Asakota | 20 | | APBN/APBD | Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BPKH, Dinas LH, Kehutanan |
| 7 | Rehabilitasi kawasan hutan | Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Asakota | 20 | | APBN/APBD | Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BPKH, Dinas LH, Kehutanan |

Sumber : RTRW Kota Bima 2024-2044



3.3.3.2. Arah Kebijakan Per Sasaran

Arah Kebijakan pembangunan Kota Bima Tahun 2025 – 2029 dirumuskan berdasarkan Strategi Umum yang dijabarkan pelaksanaannya dalam lima tahun ke depan. Sehingga dapat diketahui Tema Kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan Prioritas dalam RKPD. Perumusan arah kebijakan RPJMD Kota Bima didasarkan pada strategi umum sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.11. Arah Kebijakan RPJMD Kota Bima Berdasarkan Strategi Umum

| STRATEGI UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN | |
|--|---|
| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN |
| Strategi Daerah 1: Meningkatkan rasa aman melalui peningkatan keharmonisan sosial dan pengurangan potensi-potensi timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta konflik sosial | |
| Strategi Sasaran 1: Peningkatan sistem keamanan melalui pengembangan sistem pemantauan terpadu, respon cepat terhadap aduan serta koordinasi dengan mitra strategis yang berbasis lingkungan | |
| Penurunan Gangguan Kemananan Ketertiban dan Ketenteraman | Standarisasi sumberdaya aparatur penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum |
| | Penataan regulasi dan standarisasi sumberdaya aparatur penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum |
| | Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum |
| | Peningkatan peran kelurahan, RT dan RW dalam mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang efektif |
| | Penataan dan penguatan regulasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum |
| | Pembangunan sistem pengaduan terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat |
| | Pengembangan inovasi layanan pengaduan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum |
| | Optimalisasi koordinasi lintas sektoral dan kemitraan strategis dengan pihak eksternal |
| | Penguatan sistem keamanan berbasis lingkungan |
| | Pengembangan sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dengan produk sistem keamanan |
| Strategi sasaran 2: Peningkatan toleransi dan moderasi beragama melalui penguatan komitmen kebangsaan dan penguatan modal sosial yang didukung oleh penyediaan informasi dan deteksi dini terhadap potensi timbulnya gangguan konflik sosial | |



| STRATEGI UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN | |
|---|---|
| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang didukung budaya dan tradisi serta kearifan lokal | Penguatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) |
| | Peningkatan ketahanan keluarga melalui pemahaman nilai agama dan moral |
| | Penguatan budaya lokal dan tata nilai masyarakat sebagai basis tumbuhnya modal sosial |
| | Pengembangan kawasan cagar budaya di Kecamatan Rasanae Barat |
| Strategi Daerah 2: Peningkatan Daya Saing SDM Kota melalui Pemerataan kualitas pendidikan dan pemerataan Akses pendidikan dalam menghasilkan output berkualitas pada semua jenjang pendidikan secara berkelanjutan | |
| Strategi sasaran 3: Pemerataan kualitas pendidikan dengan penerapan teknologi informasi untuk menghasilkan output berkualitas disemua jenjang pendidikan | |
| Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang merata dan terjangkau | Standarisasi kompetensi Pendidik dan standarisasi ketersediaan Pendidik pada Sekolah melalui redistribusi tenaga Pendidik |
| | Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Pendidik melalui Pelatihan, Kursus dan Strata Pendidikan Lanjutan |
| | Digitalisasi proses belajar mengajar |
| | Mengembangkan sekolah tangguh bencana di Kecamatan Rasanae Barat, Asakota dan Mpunda |
| | Memastikan Wajib Belajar 13 Tahun secara gratis terutama bagi keluarga miskin dengan memaksimalkan penganggaran yang berpihak pada keluarga miskin |
| | Penunantasan infrastruktur pembelajaran layak belajar pada semua wilayah melalui penganggaran tepat guna dan tepat sasaran |
| | Mengembangkan literasi digital |
| | Menerapkan literasi berbasis inklusi sosial pada ruang-ruang kreasi masyarakat |
| | Meningkatkan konseling sekolah dan kolaborasi antar sekolah dengan keluarga |
| | Pengembangan kawasan pendidikan pada Kecamatan Mpunda |
| Strategi sasaran 4: peningkatan Kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian penduduk dan pengembangan keterampilan lulusan pendidikan tinggi yang akan memasuki pasar tenaga kerja | |
| Meningkatnya jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi di Kota Bima | peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur pelatihan dan peningkatan sarana pelatihan |
| | Kerjasama strategis dengan sekolah SMA/SMK melalui Pemetaan Kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dengan menyediakan Kurikulum pelatihan dan Modernisasi Peralatan Praktek, |



| STRATEGI UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN | |
|--|---|
| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN |
| | Mempersiapkan lulusan SMA/SMK untuk memenuhi persyaratan kerjasama G to G dengan beberapa negara dan daerah lain dalam membuka peluang bekerja di luar negeri |
| | Menguatkan Tata Kelola Beasiswa Kota Bima secara Berkelanjutan dengan Fokus pada Disiplin Ilmu Sesuai Kebutuhan Daerah terutama pada warga miskin |
| | Peningkatan kualitas hidup dengan pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi pada kelompok usia subur. |
| Strategi Daerah 3: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan berkualitas dan merata yang berbasis pada lingkungan dan kaum perempuan | |
| Strategi sasaran 5 dan 6: Peningkatan jangkauan akses kesehatan berkualitas khususnya pada masyarakat miskin dalam penciptaan masyarakat sehat sehingga mampu bersaing di level nasional dan regional | |
| Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat secara berkelanjutan | Standarisasi kompetensi Nakes dan standarisasi ketersediaan nakes pada unit layanan kesehatan melalui redistribusi tenaga |
| | Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Pelatihan, Kursus dan Strata Pendidikan Lanjutan |
| | Peningkatan Pelayanan kesehatan berbasis kelurahan dengan integrasi layanan primer secara gratis pada semua kelompok umur |
| | Penyediaan sarana Pusat pembinaan terpadu (PUSBINDU) pada tiap kelurahan |
| | Meningkatkan pelayanan dengan pola Home care dan tele medicine berbasis teknologi informasi |
| | Meningkatkan Kualitas Pelayanan FKTP dan RSUD Kota Bima melalui Penambahan Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Sub-Spesialis, dan Tenaga Kesehatan Lainnya), Alat Kesehatan, Peralatan Medis dan Pembangunan |
| | Meningkatkan Akses jaminan kesehatan dengan peningkatan angka UHC (Universal Health Coverage) |
| | Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam deteksi dini dan advokasi penanganan masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan melalui pembentukan kader Kota Bima hebat pada tiap kelurahan |
| | Penuntasan infrastruktur sanitasi dan promosi pola Hidup Bersih Sehat serta Eliminasi lingkungan tumbuh kembangnya penyakit zoonosis |
| | Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan berbasis pada kebutuhan dan ekspektasi masyarakat |
| | Pembangunan Rumah Sakit Skala Regional pada Kecamatan Raba |
| Meningkatnya Prestasi masyarakat Kota Bima | Pelibatan Pemerintah dengan menjadi Bapak asuh bagi bidang-bidang yang berpotensi mendatangkan prestasi bagi masyarakat Kota Bima |
| | Memperbanyak event lokal dan proses seleksi untuk diikutsertakan dalam event-event prestasi di Tk. Nasional dan internasional |



| STRATEGI UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN | |
|--|--|
| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN |
| | Penyediaan fasilitas olahraga yang standar untuk pelaksanaan even olahraga skala nasional di Kecamatan Mpunda |
| | Memperbanyak ruang kreasi pemuda untuk membina dan mengembangkan potensi berprestasi |
| Strategi sasaran 7: Pengarusutamaan gender menerapkan perencanaan yang responsih gender serta pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak | |
| Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak | Peningkatan pendapatan kaum perempuan melalui pengembangan kapasitas dan kuantitas usaha kaum perempuan serta fasilitasi akses modal ke lembaga keuangan |
| | Perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan |
| Strategi Daerah 4: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi | |
| Strategi sasaran 8: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi | |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. | Pemerataan dan Penguatan Sumber Daya Aparatur |
| | Penyusunan regulasi daerah yang adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional. |
| | Pemantapan Sistem Pendukung Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis digital |
| | Peningkatan Pengawasan Dan Evaluasi |
| | Pengembangan Pusat Pemerintahan pada Kelurahan Penatoi |
| | Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta optimalisasi peran BUMD |
| | Perwujudan keseimbangan rasio belanja melalui <i>Zero Growth</i> Belanja Pegawai dan Barang jasa |
| Strategi Daerah 5: Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui perbaikan kualitas lingkungan hidup | |
| Strategi sasaran 9 : Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui perkuatan mitigasi bencana, tanggap darurat dan rekonstruksi serta rehabilitasi pasca bencana | |
| Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap bencana | Pengembangan kebijakan pembangunan berbasis mitigasi bencana |
| | Peningkatan kapasitas stakeholder pada masa tanggap darurat |
| | Rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Kecamatan Rasanae Barat, Asakota dan Mpunda |
| | Pengembangan bak penampung air hujan pada Kel. Oi Fo'o, Lelamase, dan Nitu |



| STRATEGI UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN | |
|---|--|
| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN |
| Strategi sasaran 10 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat, perkuatan regulasi dan penegakan aturan | |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Penguatan regulasi Pengendalian pemanfaatan hutan dan pencemaran air |
| | Penguatan regulasi Rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat |
| | Pengelolaan Kawasan Hutan Maria serta kawasan hutan Donggomasa dan Nanga Na'e Kapenta |
| | Rehabilitasi Kawasan Hutan Kecamatan Rasanae Timur dan Asakota |
| | Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) di Kelurahan Kodo. |
| | Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di setiap RS Kota Bima |
| | Pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kelurahan Kodo |
| | Pengembangan TPS-3R di Wilayah kota Bima |
| | Rehabilitasi ekosistem mangrove dan sempadan Pantai di Kecamatan Rasanae barat dan Asakota |
| | Optimaliasi penegakan aturan dalam pemanfaatan ruang |
| | Penataan pedagang kaki lima Kecamatan Rasanae barat, Mpunda dan Raba |
| | Penguatan regulasi Pengendalian sumber emisi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan |
| Strategi Daerah 6: Mewujudkan Kota Layak Huni melalui peningkatan kualitas layanan infrastruktur, permukiman yang tertata dan kecukupan pangan | |
| Strategi sasaran 11 : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan | |
| Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur wilayah | Peningkatan layanan sarana dan prasarana transportasi ramah lingkungan untuk keselamatan lalulintas |
| | Penyelesaian masalah asset dan pembentukan lembaga pengelola SPAM |
| | Penguatan regulasi dan kebijakan Penyediaan infrastruktur penampung air baku, pengendali banjir dan irigasi di Kel. Jatibaru, Lampe, Dodu, Nungga, dan Ntobo Kota Bima |
| | Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan untuk mengurangi banjir |
| | Penguatan regulasi dan kebijakan Pengembangan sistem dan sarana prasarana air limbah |



| STRATEGI UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN | |
|---|--|
| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN |
| | Penguatan regulasi dan kebijakan Peningkatan upaya pengolahan sampah dari sumbernya |
| | Revitalisasi terminal penumpang Tipe A Dara |
| Strategi sasaran 12: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui penataan kawasan permukiman | |
| Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman | Penguatan regulasi dan kebijakan Penyediaan rumah layak huni melalui seluruh mekanisme pembiayaan |
| | Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pengembangan perumahan swadaya di Kelurahan Mande, Lewirato, Penatoi dan Rabangodu Selatan |
| | Penyediaan rumah swadaya Kelurahan Mande, Lewirato, Penatoi dan Rabangodu Selatan |
| | Penataan kawasan permukiman Kecamatan Rasanae Barat, Asakota, Mpunda |
| Strategi sasaran 13 : Menjami ketersediaan pangan melalui produksi, distribusi, logistik dan stabilitasi harga pangan | |
| Terwujudnya kecukupan pangan | Peningkatan produksi pangan di Kecamatan Rasanae Timur |
| | Stabilisasi harga dan pasok pangan |
| | Pengembangan riset dan teknologi pangan |
| Strategi Daerah 7: Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas dan kapasitas BLK, perluasan akses informasi pasar tenaga kerja serta fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM. | |
| Strategi sasaran 14 : Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kualitas dan kapasitas BLK, perluasan akses informasi pasar tenaga kerja | |
| Memperluas kesempatan kerja di Kota Bima berbasis peningkatan kualitas SDM | Meningkatkan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan |
| | Peningkatan kapasitas BLK untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di Kecamatan Mpunda |
| | Peningkatan sarana prasarana BLK sebagai modal untuk perluasan kesempatan kerja di Kecamatan Mpunda |
| Strategi sasaran 15 : Peningkatan kapasitas UMKM dan angkatan kerja melalui fasilitasi akses permodalan, pelatihan dan keterampilan usaha serta upaya pengendalian inflasi daerah. | |
| Meningkatnya daya saing ekonomi | Memberikan bantuan modal usaha, pelatihan, dan keterampilan usaha. |



| STRATEGI UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN | |
|--|--|
| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN |
| | Meningkatkan iklim investasi dan produktifitas sektor-sektor unggulan: pariwisata, pertanian tanaman pangan, kelautan dan perikanan, perdagangan dan jasa serta industri kecil di Kota Bima |
| | Penguatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi di Kota Bima |
| | Pengembangan kawasan Pedagangan dan jasa Superblok Amahami |
| | Pengembangan kawasan Industri pengolahan perikanan di Kecamatan Asakota |
| Strategi Daerah 8: Peningkatan iklim investasi dan produktivitas sektor unggulan untuk membangun perekonomian berbasis masyarakat serta penataan sektor penyumbang PAD. | |
| Strategi sasaran 16: Peningkatan PAD, iklim investasi dan produktivitas sektor unggulan untuk membangun perekonomian berbasis masyarakat. | |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | Pembangunan infrastruktur dan ODTW untuk mencegah kebocoran wilayah (aliran dana keluar dari daerah). Di Kecamatan Rasanae Barat dan Asakota |
| | Pengembangan kawasan pariwisata pantai Amahami-Ni'u, pantai Ule-Songgela, dan Pantai So Ati dan sekitarnya |
| | Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kesultanan Bima dan sekitarnya |
| | Peningkatan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja secara konsisten |
| Strategi Daerah 9: Peningkatan layanan sosial bagi PMKS melalui peningkatan kapasitas PSKS serta penguatan kemitraan dengan pihak swasta, NGO dan BUMD dalam upaya pemberdayaan masyarakat. | |
| Strategi sasaran 17: Peningkatan layanan sosial bagi PMKS melalui peningkatan kapasitas PSKS serta penguatan kemitraan dengan pihak swasta, NGO dan BUMD dalam upaya pemberdayaan masyarakat. | |
| Menurunnya tingkat kemiskinan | Membangun data penerima manfaat program layanan sosial yang akurat. |
| | Peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan daya dukung sarpras layanan sosial |
| | Melaksanakan program layanan sosial terintegrasi antar sektor dan stakeholders. |
| | Penguatan Program Perlindungan Sosial. |
| | (Memperluas dan memperbaiki program perlindungan sosial, seperti BLT, jaminan sosial, dan program kesehatan yang terjangkau, dapat membantu masyarakat miskin bertahan hidup di saat krisis. Program ini juga perlu terintegrasi agar bantuan sampai ke sasaran yang tepat.) |
| | Meningkatkan Akses terhadap Infrastruktur Dasar (Penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi, dan transportasi sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. |



| STRATEGI UMUM DAN ARAH KEBIJAKAN | |
|----------------------------------|---|
| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN |
| | Infrastruktur yang baik mendukung akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.) |

Sumber: Hasil Analisis, Bappeda, 2025



3.3.3.3. Tema Pembangunan Tahunan

Mengacu pada rencana fokus pembangunan RPJMD sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, maka dapat dirumuskan Arah Kebijakan Umum daerah tahunan, yang dapat dijadikan sebagai tema pembangunan tahunan. Namun demikian mengingat bahwa dinamika isu pembangunan dan perencanaan tahunan Pemerintah Pusat dan Provinsi relatif cepat, maka selanjutnya masih dibutuhkan penyesuaian.

Tabel 3.12. Tema Pembangunan Tahunan

| Tema Pembangunan Tahunan | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Penguatan Nilai-Nilai Dasar Masyarakat Dan Penguatan Infrastruktur Kenyamanan Kota | Peningkatan Kualitas Tata Kota Dan Infrastruktur Terpadu Pendukung Sektor Utama | Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Berkelanjutan | Penguatan Ekonomi Inklusif Dan Pemerataan Pembangunan | Peningkatan Tata Kelola Dan Kualitas Layanan Masyarakat Yang Inovatif Dan Berkelanjutan |

Sumber: Hasil Analisis, Bappeda, 2025

3.3.4. Program Prioritas dan Program Unggulan Pembangunan

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penyusunan RPJMD Kota Bima Tahun 2025–2029 menetapkan Program Prioritas dan Program Unggulan sebagai instrumen perencanaan yang saling melengkapi dan berkesinambungan.

Program Prioritas merupakan serangkaian program pembangunan yang bersifat wajib sebagai bentuk penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Program ini telah ditetapkan nomenklaturinya secara nasional melalui *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029*, sekaligus merupakan aturan pelaksanaan dari *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah*



dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan keseragaman kebijakan pembangunan antar-daerah, memastikan konsistensi perencanaan hingga tingkat nasional, serta memudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, seluruh perangkat daerah pelaksana wajib mengacu pada nomenklatur program dimaksud dalam menyusun strategi, kebijakan, dan rencana aksi yang bersifat operasional.

Sementara itu, Program Unggulan merupakan bentuk komitmen Kepala Daerah terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima selama periode kepemimpinan. Program unggulan dirumuskan dalam bentuk Kegiatan Unggulan, yang menggambarkan prioritas arah kebijakan pembangunan spesifik daerah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada penguatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, daya saing daerah, dan percepatan transformasi pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan berdasarkan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Bima periode tahun 2025-2029. Guna menjadikan Kota Bima Maju Bermartabat dan Berkelanjutan maka disusun yang merupakan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Bima untuk tahun 2025-2029. Selanjutnya untuk melaksanakan dan mewujudkan janji politik tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pokok tersebut yang diturunkan dalam program unggulan. Tujuh program unggulan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:

1. Kota Bima Tenteram dan Berbudaya;
2. Kota Bima Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing;
3. Kota Bima Good & Smart Governance;
4. Kota Bima Tangguh;
5. Kota Bima Bersih Nyaman dan Asri;
6. Kota Bima Terampil Berdaya;
7. Kota Bima Inklusif.



Tabel 3.13. Program Unggulan dan Kegiatan Unggulan Pemerintah Tahun 2025-2029

| Visi | Misi | Tujuan | Sasaran | Program Unggulan | Kegiatan Unggulan | |
|---|---|--|---|--|---|---|
| Terwujudnya Kota Bima yang maju bermartabat dan berkelanjutan | Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berketahanan Sosial Religius dan Berbudaya | 1. Meningkatnya rasa aman yang berkeadilan bagi Masyarakat | 1. Penurunan Gangguan Keamanan Ketertiban dan Ketenteraman | PU1 Kota Bima Tenram dan Berbudaya | KU-1 Gerakan Kembali ke Masjid, (Pemberdayaan Masjid Magrib mengaji, Bantuan Rumah Ibadah, Pembangunan Mesjid Agung Al Muwahiddin Hadiah dan insentif bagi marbot, guru ngaji, juara MQ, ASN Berdzikir) | |
| | | | 2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang didukung budaya dan tradisi serta kearifan lokal | | KU-2 Pengembangan nilai-nilai budaya lokal (rimpu, maja labo dahu, dll) | |
| | | | KU-3 PKH DAERAH | | | |
| | | | KU-4 Pembangunan gelanggang pacuan kuda Sambinae | | | |
| | Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Poduktif, dan Kompetitif | 2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang produktif dan kompetitif | 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang merata dan terjangkau | PU2 Kota Bima Cerdas dan Berdaya Saing | KU-5 Beasiswa bagi Guru Berprestasi | |
| | | | | | KU-6 Beasiswa bagi siswa berprestasi, tidak mampu, dan hafidz | |
| | | | | | KU-7 Taman Bacaan terpadu, Ruang bahagia dengan taman baca | |
| | | | 4. Meningkatnya daya saing sumberdaya Manusia Kota Bima | | KU-8 Pembangunan balai latihan kerja modern | |
| | | | | | 5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | KU-9 Gerakan Kota Bima menuju Zero Growth Stunting |
| | | | | | | KU-10 Pembangunan Rumah Sakit Lokus KJSU (Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi) |



| Visi | Misi | Tujuan | Sasaran | Program Unggulan | Kegiatan Unggulan |
|--|--|--|---|---|---|
| | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional | | 6. Meningkatnya Prestasi masyarakat Kota Bima 7. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak | | KU-11 Kader Kota Bima Hebat |
| | | | | | KU-12 Jaminan Kesehatan Merata dan Berkeadilan |
| | | | | | KU-13 Ruang Kreasi Milenial |
| | | | | | KU-14 Insentif bagi atlet berprestasi |
| | Mewujudkan Ketahanan Ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan | 3. Terwujudnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kota Bima | 8. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas | PU3 Kota Bima Good & Smart Governance | KU-15 Sistem Merit, Talent Pool, Assesment Centre |
| | | | | | KU-16 Pembangunan rumah jabatan walikota, wakil walikota dan kantor DPRD |
| | | | | | KU-17 Optimalisasi peran Perumda Bima Aneka |
| | | | | | KU-18 Mufakat Asik bersama elemen masyarakat |
| | | | | | KU-19 Digitalisasi Pemungutan Pajak melalui QRIS (Aplikasi Pembayaran Online) |
| | | | | | KU-20 Pemutakhiran database wajib pajak |
| Mewujudkan Ketahanan Ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan | 4. Menurunnya risiko bencana | 9. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | PU4 Kota Bima Tangguh | KU-21 Early warning system dan jalur evakuasi bencana | |
| | | | | KU-22 Sarana penanggulangan banjir, sumur resapan, biopori, pemanenan air hujan | |



| Visi | Misi | Tujuan | Sasaran | Program Unggulan | Kegiatan Unggulan |
|------|------|--------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| | | | 10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | | KU-23 Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup dan sampah KU-24 Pilot Project Kampung Iklim KU-25 Pengelolaan sempadan mata air KU-26 Konservasi hutan dan lahan |
| | | 5. Terwujudnya Kota Layak Huni | 11. Meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah 12. Menurunnya luasan Kawasan kumuh 13. Terjaminnya ketercukupan pangan masyarakat | PU5 Kota Bima Bersih, Nyaman dan Asri | KU-27 Gerakan menanam menjaga alam KU-28 Penataan dan Penyediaan Ruang terbuka hijau KU-29 Pengolahan limbah B3 KU-30 Insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang KU-31 Bangunan dan lingkungan hijau KU-32 Penanganan jalan KU-33 Lampu Jalan Tenaga Surya KU-34 Penyediaan air bersih berkelanjutan KU-35 Bangunan penampung air dan pengendali banjir, irigasi,DAM |



| Visi | Misi | Tujuan | Sasaran | Program Unggulan | Kegiatan Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | KU-36 Penanganan drainase perkotaan |
| | | | | | KU-37 IPAL Individual, IPAL Komunal |
| | | | | | KU-38 Pengelolaan sampah berkelanjutan |
| | | | | | KU-39 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah (TPS3R, TPST, Incenerator, Rumah Kompos, Bank Sampah, Mesin Pemilah sampah, Pencacah plastik, Rumah magot) |
| | | | | | KU-40 Pemberdayaan komunitas peduli lingkungan |
| | | | | | KU-41 Penyediaan rumah layak huni, bedah rumah, sewa rumah |
| | | | | | KU-42 Penanganan jalan lingkungan |
| | Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, merata dan berkelanjutan | 6. Terwujudnya penciptaan lapangan kerja dan angkatan kerja terampil | 14. Memperluas kesempatan kerja di Kota Bima berbasis peningkatan kualitas SDM 15. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah | PU6 Kota Bima Terampil Berdaya | KU-43 Pembangunan BLK Modern |
| KU-44 Jaminan Sosial bagi warga miskin | | | | | |
| KU-45 Bantuan Usaha dan Modal untuk sarana UMKM | | | | | |
| 7. Terwujudnya perekonomian daerah yang inklusif, | | 16. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 17. Menurunnya tingkat kemiskinan | PU7 Kota Bima Inklusif | KU-46 Stabilitas harga bahan makanan pokok | |
| | | | | KU-47 Pengembangan Kawasan Pergudangan dan Pengolahan Hasil | |



| Visi | Misi | Tujuan | Sasaran | Program Unggulan | Kegiatan Unggulan |
|------|------|------------------------|---------|------------------|--|
| | | merata dan berkeadilan | | | KU-48 Koperasi Syariah |
| | | | | | KU-49 Pengembangan pariwisata dan kawasan cepat tumbuh |
| | | | | | KU-50 Pengembangan ekonomi kreatif (Pekan Budaya Rimpu) |
| | | | | | KU-51 Promosi dan pemasaran wisata |
| | | | | | KU-52 Penyediaan Infrastruktur penunjang produksi dan pengolahan hasil pertanian |
| | | | | | KU-53 Pertanian terintegrasi |

Sumber: Hasil Analisis, Bappeda, 2025



1. Kota Bima Tenteram dan Berbudaya

Merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari **Tujuan 1 Meningkatkan rasa aman yang berkeadilan bagi Masyarakat.**

Program ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib melalui penguatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, program ini berorientasi pada pelestarian nilai, norma, dan budaya lokal sebagai identitas sosial masyarakat Kota Bima. Pengembangan budaya lokal dilakukan melalui pembinaan komunitas seni, revitalisasi kegiatan budaya, dan penyelenggaraan event bernilai kearifan lokal untuk memperkuat karakter dan moral publik.

2. Kota Bima Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing

Merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari **Tujuan 2 Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan kompetitif.**

Program ini mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi pembangunan manusia Kota Bima. Upaya pengembangan bidang kesehatan diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar, pelaksanaan program promotif–preventif, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan prevalensi penyakit menular maupun tidak menular, serta penurunan angka stunting melalui intervensi lintas sektor. Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah berfokus pada peningkatan mutu proses pembelajaran, pemerataan layanan pendidikan yang berkesetaraan, penguatan literasi dan numerasi, serta pengembangan keterampilan.

Lebih jauh, program ini juga menargetkan peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi berbasis keterampilan (skill-based), sertifikasi profesi, peningkatan literasi digital, serta fasilitasi akses pasar kerja. Dengan intervensi tersebut, diharapkan masyarakat memiliki kapasitas produktif yang unggul dan dapat berkompetisi secara adaptif dalam dinamika pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun global.



Selain itu, pelaksanaan program ini turut mengarusutamakan isu gender dan perlindungan anak sebagai bagian integral pembangunan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses layanan dasar yang responsif gender, memastikan tidak terjadinya diskriminasi dalam layanan pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat sistem perlindungan anak melalui peningkatan layanan pencegahan kekerasan, penyediaan ruang ramah anak, dan kemitraan komunitas. Pengarusutamaan gender juga diterapkan dalam penyusunan program dan kegiatan OPD agar manfaat pembangunan dapat dinikmati secara setara oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, dan kelompok rentan.

3. Kota Bima Good & Smart Governance

Merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari **Tujuan 3 Terwujudnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kota Bima.** Program ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan responsif melalui reformasi birokrasi, peningkatan profesionalitas aparatur, pelaksanaan sistem merit dan optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Pengembangan smart governance didukung oleh integrasi layanan publik digital, percepatan kerja birokrasi, serta penyediaan data terbuka (open data) yang mendorong partisipasi publik. Implementasi program ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas aparatur, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4. Kota Bima Tangguh

Merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari **Tujuan 4 Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana.**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap berbagai risiko, baik risiko bencana alam, sosial, ekonomi, maupun perubahan iklim. Upaya disusun melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, penguatan mitigasi struktural dan non-struktural, pengembangan sistem peringatan dini, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Masyarakat diharapkan memiliki kemampuan adaptasi dan respons cepat ketika menghadapi situasi darurat, sehingga dampak risiko dapat diminimalkan.



5. Kota Bima Bersih, Nyaman dan Asri

Merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari **Tujuan 5 Terwujudnya Kota Layak Huni**.

Program ini berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan estetika kota melalui penataan ruang publik, revitalisasi kawasan permukiman, peningkatan pengelolaan sampah terpadu, serta penghijauan wilayah. Selain menghadirkan lingkungan yang sehat dan layak huni, program ini juga mendukung terciptanya wajah kota yang tertata dan estetis. Kebersihan, kenyamanan, dan keasrian kota menjadi bagian penting dalam menciptakan identitas visual Kota Bima serta meningkatkan daya tarik bagi investasi dan pariwisata.

6. Kota Bima Terampil Berdaya

Merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari **Tujuan 6 Terwujudnya penciptaan lapangan kerja dan angkatan kerja terampil**.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi keterampilan masyarakat, terutama generasi muda dan kelompok rentan, dalam rangka menciptakan masyarakat produktif serta menurunkan tingkat pengangguran. Pengembangan dilakukan melalui pelatihan berbasis kejuruan, pengembangan UMKM, sertifikasi keterampilan, peningkatan literasi digital, hingga fasilitasi akses pembiayaan. Dengan demikian, masyarakat dapat mampu bersaing di pasar kerja serta memiliki kemampuan wirausaha yang berkelanjutan.

7. Kota Bima Inklusif

Merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari **Tujuan 7 Terwujudnya perekonomian daerah yang inklusif, merata dan berkeadilan**.

Program ini diarahkan untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali menerima manfaat pembangunan daerah. Fokusnya meliputi akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, pemberdayaan gender, pelayanan sosial bagi kelompok rentan, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah. Melalui intervensi terarah, pemerintah daerah berupaya menyediakan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh warga, mengurangi diskriminasi, serta mewujudkan kebijakan yang berkeadilan sosial.



Secara teknis, Program Unggulan tidak berdiri sendiri, melainkan dilaksanakan melalui Program Prioritas sesuai nomenklatur yang telah ditentukan. Integrasi ini dimaksudkan untuk 1) memastikan bahwa visi dan misi Kepala Daerah terimplementasi dalam koridor regulasi nasional; 2) mencegah tumpang tindih program dan duplikasi anggaran; 3) memperkuat efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program; dan 4) memudahkan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan.

Penerjemahan Program Unggulan ke dalam Program Prioritas dilakukan melalui penentuan kegiatan, sub-kegiatan, output, dan target capaian terukur pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta diturunkan lebih lanjut dalam RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada setiap tahun anggaran. Hal ini memastikan bahwa seluruh agenda pembangunan Kepala Daerah dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah, serta berorientasi hasil.



Tabel 3.14. Perumusan Program Prioritas RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029

| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Berketahanan Sosial Yang Religius Dan Berbudaya | Meningkatkan rasa aman yang berkeadilan bagi Masyarakat | Penurunan Gangguan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman | | Indeks Rasa Aman (Indeks) | | |
| | | | | Persentase penurunan gangguan ketertiban dan ketentraman (%) | | |
| | | | Keterbukaan Informasi Publik | Keterbukaan Informasi Publik (Poin) | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| | | | Meningkatnya Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan TPPO | Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani (%) | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan (%) | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3) (%) | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | Persentase konflik sosial yang tertangani (%) | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Dinas Sosial |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Rasanae Barat |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Mpunda | Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Mpunda |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Asakota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Asakota |



VISI
Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan

| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|------|--------|---------|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | | Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga) | | |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Raba | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Raba |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Rasanae Timur | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Rasanae Timur |
| | | | Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Non Kebakaran | Persentase Tingkat Respon Time Dalam Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (15 Menit) (%) | 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Asakota | Jumlah Kasus Gangguan Keamanan Ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan (Angka) | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Asakota |
| | | | Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (%) | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Mpunda |



| VISI | | | | | | |
|--|--------|--|---|--|--|--|
| Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Mpunda | | | |
| | | | Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Raba | Jumlah kasus Gangguan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman (%) | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Raba |
| | | | Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Rasanae Timur | Jumlah Kasus Gangguan Keamanan Ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan (Angka) | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Rasanae Timur |
| | | | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) di Kecamatan Rasanae Barat | Presentase penurunan jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman di wilayah kecamatan rasanae barat (%) | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Rasanae Barat |
| | | Meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang didukung budaya dan tradisi serta kearifan lokal | | Persentase warisan budaya tak benda terhadap total pencatatan yang telah ditetapkan (%) | | |
| | | | | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3) (%) | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta | Persentase lembaga layanan keluarga yg aktif (%) | 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |



| VISI | | | | | | |
|--|--------|---------|---|--|--|---------------------------------------|
| Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | perlindungan perempuan dan anak | | | |
| | | | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Nilai Rata-Rata Pengelolaan Kurikulum Satuan Pendidikan Berorientasi Peningkatan Hasil Belajar Siswa (Angka) | 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Presentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (%) | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Sekretariat Daerah |
| | | | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki | 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| | | | Meningkatnya Pemahaman tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa (%) | 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%) | 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Asakota | Jumlah Kasus Gangguan Keamanan Ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan (Angka) | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Asakota |
| | | | Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Mpunda |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|---------------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Mpunda | Agama dan Tokoh Masyarakat (%) | | |
| | | | Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Raba | Jumlah kasus Gangguan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman (%) | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Raba |
| | | | Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Rasanae Timur | Jumlah Kasus Gangguan Keamanan Ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan (Angka) | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Rasanae Timur |
| | | | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) di Kecamatan Rasanae Barat | Presentase penurunan jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman di wilayah kecamatan rasanae barat (%) | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kecamatan Rasanae Barat |
| | | | Terlaksananya Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya | Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (%) | 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan | Cakupan Pengembangan Kebudayaan (%) | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Maju Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan kompetitif | | | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) | | |
| | | Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang merata dan terjangkau | | Indeks SPM Pendidikan (Indeks) | | |
| | | | | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 25 tahun (Tahun) | | |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | | |
| | | | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Nilai Rata-Rata Pengelolaan Kurikulum Satuan Pendidikan Berorientasi Peningkatan Hasil Belajar Siswa (Angka) | 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | Perpustakaan yang telah terakreditasi (Perpustakaan) | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| | | | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | Indeks Distribusi Guru (Angka) | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki | 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| | | | Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Nilai Akreditasi Sekolah Se-Kota Bima (Angka) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| | | Meningkatnya daya saing sumberdaya Manusia Kota Bima | | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi (%) | | |
| | | | | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | | |
| | | | | Angka Ketergantungan (%) | | |
| | | | Memperkuat Ketahanan, Kesejahteraan dan Karakter Keluarga | Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan upaya pemberdayaan ekonomi (%) | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|--|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Meningkatnya ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan | persentase peningkatan ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan (%) | 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | Meningkatnya Jumlah Kesertaan BerKB Melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar Pelayanan | PERSENTASE PENURUNAN (UNMET NEED) (%) | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Meningkatnya Kesesuaian antara Rencana Tenaga Kerja dengan Realisasi | meningkatnya kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi (Angka) | 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | Meningkatnya Kualitas dan produktivitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja terlatih (%) | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | Meningkatnya Penerapan NSPK dalam manajemen kepegawaian | Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN (Angka) | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | Terkendalinya Angka Kelahiran | Penurunan angka kelahiran remaja 15-19 tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun (%) | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | Penurunan Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) (Angka) | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | | Usia Harapan Hidup (Tahun) | | |
| | | | Memperkuat Ketahanan, Kesejahteraan dan Karakter Keluarga | Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan upaya pemberdayaan ekonomi (%) | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|--------|---------|---|--|---|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%) | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Kesehatan |
| | | | Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan | rata-rata skor INM (Angka) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan |
| | | | Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan | rata-rata skor INM (Angka) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan |
| | | | Meningkatnya Jumlah Kesertaan BerKB Melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar Pelayanan | PERSENTASE PENURUNAN (UNMET NEED) (%) | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Meningkatnya Penanganann tindak kekerasan terhadap Anak dan TPPO | Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak (%) | 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | Persentase tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani (%) | 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Terpenuhinya Pemeberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase UKBM yang dibina (%) | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Dinas Kesehatan |
| | | | Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Sesuai Standar (%) | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Dinas Kesehatan |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|---|---------------------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Terpenuhi sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar (%) | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Dinas Kesehatan |
| | | | Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Perangkat Daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah (%) | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Kesehatan |
| | | Meningkatnya Prestasi masyarakat Kota Bima | | Jumlah Orang Berprestasi Tingkat Nasional dan Regional (Angka) | | |
| | | | Meningkatnya daya saing kepemudaan | Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%) | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | Meningkatnya jumlah inovasi daerah yang mendapat penghargaan tingkat provinsi atau nasional | Jumlah Inovasi daerah yang mendapat penghargaan tingkat provinsi dan nasional (Angka) | 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | Meningkatnya jumlah riset dan inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja | Jumlah Riset yang memberi Kontribusi pada Peningkatan Kinerja (Angka) | 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | | Jumlah Inovasi yang memberi Kontribusi pada Peningkatan Kinerja (Angka) | 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (%) | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Sekretariat Daerah |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|--------|---|--|---|---|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga | Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (%) | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan | Cakupan Pengembangan Kebudayaan (%) | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan TPPO | Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani (%) | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan (%) | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Meningkatnya kapasitas pemberdayaan perempuan | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta (%) | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan (%) | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Persentase lembaga layanan keluarga yg aktif (%) | 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam Pembangunan | Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi (%) | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | Meningkatnya pemenuhan data gender dan anak | Persentase pemenuhan data gender dan anak (%) | 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |



VISI
Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan

| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional | Terwujudnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kota Bima | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas | | Persentase Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi(%) | | |
| | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) | | |
| | | | Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (%) | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Sekretariat Daerah |
| | | | Kesesuaian program antar Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kesesuaian program antar Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan |
| | | | Keterbukaan Informasi Publik | Keterbukaan Informasi Publik (Poin) | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| | | | meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap (%) | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup | Bertambahnya perijinan penggunaan arsip (Layanan) | 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan (%) | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Aset PD | Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate (%) | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Meningkatnya ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan | persentase peningkatan ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan (%) | 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|--------|---------|---|--|---|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) (%) | 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rasio Pendapatan Asli Daerah (%) | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan | rata-rata skor INM (Angka) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan |
| | | | Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan | rata-rata skor INM (Angka) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan |
| | | | Meningkatnya hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti | Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian dan Monev yang ditindaklanjuti (%) | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Meningkatnya jumlah inovasi daerah yang mendapat penghargaan tingkat provinsi atau nasional | Jumlah Inovasi daerah yang mendapat penghargaan tingkat provinsi dan nasional (Angka) | 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Badan Riset dan Inovasi Daerah |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|--------|---------|--|--|--|--------------------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Meningkatnya jumlah riset dan inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja | Jumlah Riset yang memberi Kontribusi pada Peningkatan Kinerja (Angka) | 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | | Jumlah Inovasi yang memberi Kontribusi pada Peningkatan Kinerja (Angka) | 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Asakota | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Asakota |
| | | | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Mpunda | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Mpunda |
| | | | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Raba | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Raba |
| | | | Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Rasanae Timur | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Timur |
| | | | Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perencanaan | Persentase capaian kinerja perangkat daerah (%) | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Meningkatnya Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (%) | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|--------|---------|--|--|--|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Meningkatnya Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%) | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Meningkatnya Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) | Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) (%) | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-17 tahun (%) | 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | meningkatkan kualitas profil kependudukan | Jumlah dokumen profil kependudukan dan agregat kependudukan Kota Bima (Dokumen) | 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | Nilai Kapabilitas APIP (Level) | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Inspektorat |
| | | | Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (%) | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Sekretariat Daerah |
| | | | Meningkatnya Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan (%) | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Sekretariat Daerah |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | Persentase kepuasan masyarakat (nilai IKM) (%) | 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |



| VISI | | | | | | |
|--|--------|---------|---|--|---|--|
| Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%) | 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Rasanae Barat |
| | | | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Asakota | Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Asakota |
| | | | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Mpunda | Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik (%) | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Mpunda |
| | | | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Raba | Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik (%) | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Raba |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kecamatan Raba |
| | | | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Rasanae Timur | Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rasanae Timur |
| | | | Meningkatnya Penerapan NSPK dalam manajemen kepegawaian | Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN (Angka) | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |



| VISI | | | | | | |
|--|--------|---------|---|---|---|--|
| Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Meningkatnya Pengendalian Tata Kelola Keuangan PD | Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik (%) | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%) | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota | Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%) | 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Inspektorat |
| | | | meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | Bertambahnya perlindungan dan penyelamatan arsip (Arsip) | 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| | | | Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin | Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (%) | 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis | Bertambahnya arsip yang diolah (Berkas) | 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| | | | Meningkatnya tertib administrasi pendaftaran kependudukan | persentase kepemilikan KIA (%) | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | cakupan pendaftaran penduduk kepemilikan KTP (Angka) | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | Menurunnya jumlah dan luasan perumahan dan kawasan permukiman kumuh untuk mewujudkan lingkungan | Persentase Penanganan Rumah Tangga yang tidak memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%) | 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |



| VISI | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|--|---|---|---|
| Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | | |
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN | |
| | | | hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan. | | | | |
| | | | Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE | Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE (Indeks) | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | |
| | | | Penerapan pelaksanaan Standar Keamanan Informasi | Indeks Keamanan Informasi (Poin) | 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | |
| | | | Peningkatan Penyelesaian rekomendasi TL temuan | Peningkatan Penyelesaian rekomendasi TL temuan (%) | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Inspektorat | |
| | | | Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Poin) | 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | |
| | | | Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun (%) | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Sekretariat DPRD | |
| | | | Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Sesuai Standar (%) | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Dinas Kesehatan | |
| Meningkatkan Ketahanan Ekologi Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan | Menurunnya risiko bencana | | | Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks) | | | |
| | | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | | Indeks Ketahanan Daerah (Angka) | | | |
| | | | | Keterbukaan Informasi Publik | Keterbukaan Informasi Publik (Poin) | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| | | | | Menigkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Pesentase Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik (%) | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |



VISI
Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan

| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|------|--------|---------|---|--|---|---|
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak (%) | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan (%) | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Jumlah Kawasan Strategis yang tertata (%) | 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (Angka) | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan | rata-rata skor INM (Angka) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan |
| | | | Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan | rata-rata skor INM (Angka) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan |
| | | | Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3) (%) | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi | Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart (%) | 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (%) (%) | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |



| VISI | | | | | | |
|--|--------|---------|---|---|--|--|
| Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Meningkatnya Kualitas dan Kelayakan Kawasan Permukiman | Persentase penanganan Rumah Tangga yang mengalami penurunan kualitas lingkungan (%) | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | Persentase Penanganan Rumah Tangga yang tidak memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%) | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase luas ruang yang sesuai peruntukannya (%) | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik (%) | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Rasanae Barat |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Mpunda | Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Mpunda |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Asakota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Asakota |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Raba | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Raba |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|--------|---------|---|--|---|---------------------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Rasanae Timur | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Rasanae Timur |
| | | | Meningkatnya Penanganan Bencana | Persentase Korban bencana Alam, Sosial dan/ atau non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%) | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Dinas Sosial |
| | | | | Persentase Korban bencana Alam, Sosial dan/ atau non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%) | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Dinas Sosial |
| | | | Meningkatnya penanganan kerwanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Nilai Akreditasi Sekolah Se-Kota Bima (Angka) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%) | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%) | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | Meningkatnya upaya Penanggulangan Bencana | Persentase Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana (%) | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|---|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Menurunnya jumlah dan luasan perumahan dan kawasan permukiman kumuh untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan. | Persentase Penanganan Rumah Tangga yang tidak memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%) | 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Menurunnya kejadian dan kasus penyakit menular hewan ternak | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%) | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Dinas Pertanian |
| | | | Terpenuhi sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar (%) | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Dinas Kesehatan |
| | | | Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Memadai pada Kawasan Perumahan | Persentase Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan perumahan. (%) | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) | | |
| | | | Jumlah peraturan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH (%) | 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak (%) | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya Jumlah Izin Lingkungan yang diawasi | Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH (%) | 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Dinas Lingkungan Hidup |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|--------|---------|---|---|--|------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Meningkatnya Jumlah Pokmas Sadar terhadap Lingkungan | Persentase Masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup setelah pelatihan dan sosialisasi (%) | 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya Kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Jumlah tokoh/lembaga masyarakat/sekolah/dunia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kota (Angka) | 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | Indeks Kualitas Air (Indeks) | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Indeks Kualitas Udara (Indeks) | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) | Jumlah Dokumen Pengelolaan Limbah B3 (Dokumen) | 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Persentase Luas RTH Publik (%) | 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya Penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup | pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani (Angka) | 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Meningkatnya Sampah yang tertangani. | Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase) | 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | Indeks Kota Layak Huni (Indeks) | | |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|--|--|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | Terwujudnya Kota Layak Huni | Meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah | | Indeks Infrastruktur Wilayah (Indeks) | | |
| | | | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik (%) | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap (%) | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak melalui pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan penyediaan dukungan prasarana dasar perumahan. | Persentase Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Khusus (%) | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | Persentase Penanganan RTLH Korban Bencana dan/ Terdampak Relokasi (%) | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan (%) | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart (%) | 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (%) (%) | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------|--|---|--|--|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN | |
| | | | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik (%) | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| | | | Terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan | Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar (%) | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Dinas Perhubungan | |
| | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Sesuai Standar (Unit) | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Dinas Perhubungan | |
| | | | Tersedianya pengelolaan pelayaran | Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar (%) | 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Dinas Perhubungan | |
| | | Menurunnya luasan Kawasan kumuh | | Persentase Kawasan kumuh (%) | | | |
| | | | | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik (%) | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap (%) | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan (%) | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (%) (%) | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik (%) | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|--------|--|--|---|---|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Menurunnya jumlah dan luasan perumahan dan kawasan permukiman kumuh untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan. | Persentase Penanganan Rumah Tangga yang tidak memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%) | 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Non Kebakaran | Persentase Tingkat Respon Time Dalam Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (15 Menit) (%) | 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | | Terpenuhinya Pemeberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase UKBM yang dibina (%) | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Dinas Kesehatan |
| | | | Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Memadai pada Kawasan Perumahan | Persentase Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan perumahan. (%) | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | Terjaminnya ketercukupan pangan masyarakat | | Indeks Ketahanan Pangan (Angka) | | |
| | | | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Pesentase Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik (%) | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarkat | Skor Pola Pangan Harapan (Angka) | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | Prasarana Pasar yang dibangun/ direvitalisasi/ Direhabilitasi | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun (Kg/KAP/TH) | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Dinas Kelautan dan Perikanan |



VISI
Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan

| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|------|--------|---------|--|--|---|---|
| | | | Meningkatnya pelayanan teknis perizinan pertanian | Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian (%) | 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | Meningkatnya penanganan kerwanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | Meningkatnya Pengawasan mutu dan keamanan Pangan | Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan segar (%) | 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%) | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%) | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian yang memadai | Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik (%) | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | Meningkatnya penyediaan sarana pertanian yang memadai | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Angka) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Angka) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | | Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (Angka) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan | Persentase Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Dinas Kelautan dan Perikanan |



| VISI | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|
| Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Menurunnya kejadian dan kasus penyakit menular hewan ternak | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%) | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Dinas Pertanian |
| | | | Terkendalnya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya | Persentase terkendalnya Harga, dan Persediaan/ Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota Bima (%) | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Terkendalnya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya | | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Yang Berkeadilan, Merata Dan Berkelanjutan | Terwujudnya penciptaan lapangan kerja dan angkatan kerja terampil | Memperluas kesempatan kerja di Kota Bima berbasis peningkatan kualitas SDM | | Tingkat Pengangguran Terbuka(%) | | |
| | | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | | |
| | | | Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan | Pesentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%) | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | Meningkat nya cakupan perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan | Persentase perusahaan yang melaksanakan K3 (%) | 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | Meningkat nya Kesesuaian antara Rencana Tenaga Kerja dengan Realisasi | meningkatnya kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi (Angka) | 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Dinas Tenaga Kerja |



| VISI | | | | | | | |
|--|--------|---|--|--|--|---|--|
| Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | | |
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN | |
| | | | Meningkatnya Kualitas dan produktivitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja terlatih (%) | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Dinas Tenaga Kerja | |
| | | Meningkatnya daya saing perekonomian daerah | | Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten/kota terhadap Provinsi (%) | | | |
| | | | | PDRB per Kapita Harga Berlaku (Rp. Juta Per Tahun) | | | |
| | | | Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah | Persentase Peningkatan UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran (%) | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rasio Pendapatan Asli Daerah (%) | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | | Meningkatnya Kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase) | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi | Persentase koperasi aktif | 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun (Kg/KAP/TH) | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | Meningkatnya Kualitas daya tarik Destinasi Pariwisata | Persentase Pengembangan ODTW (%) | 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |
| | | | Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlibat (%) | 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | |



| VISI | | | | | | |
|--|--------|---------|--|---|---|---------------------------------|
| Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Meningkatnya Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan (%) | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Sekretariat Daerah |
| | | | Meningkatnya pemasaran pariwisata melalui promosi | Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan (%) | 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%) | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%) | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian yang memadai | Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik (%) | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | Meningkatnya penyediaan sarana pertanian yang memadai | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Angka) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Angka) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | | Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (Angka) | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Dinas Pertanian |
| | | | Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan | Persentase Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Dinas Kelautan dan Perikanan |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|---|--|--|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN | |
| | | | Meningkatnya Produktivitas, Kualitas dan Kelembagaan usaha Koperasi | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usah (%) | 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | Meningkatnya SDM pelaku utama pembangunan pertanian sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better farming) dan berusaha tani lebih menguntungkan (better bussines) | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%) | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Dinas Pertanian | |
| | Terwujudnya perekonomian daerah yang inklusif, merata dan berkeadilan | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi | | | Rasio Gini(Indeks) | | |
| | | | | | Pertumbuhan Ekonomi (%) | | |
| | | | Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah | Persentase Peningkatan UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran (%) | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | | Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan | Pesentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%) | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Dinas Tenaga Kerja | |
| | | | Meningkat nya cakupan perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan | Persentase perusahaan yang melaksanakan K3 (%) | 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Dinas Tenaga Kerja | |
| | | | Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) (%) | 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|--------|---------|--|---|--|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | Meningkatnya Kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase) | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Meningkatnya kerjasama investasi | Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi (%) | 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perencanaan | Persentase capaian kinerja perangkat daerah (%) | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Meningkatnya Kesesuaian antara Rencana Tenaga Kerja dengan Realisasi | meningkatnya kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi (Angka) | 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | Meningkatnya Kualitas dan produktivitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja terlatih (%) | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | Meningkatnya Realisasi Investasi | Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%) | 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin | Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (%) | 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | Tingkat Kemiskinan ((%)) | | |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN | |
| | | Menurunnya Tingkat Kemiskinan | Memperkuat Ketahanan, Kesejahteraan dan Karakter Keluarga | Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan upaya pemberdayaan ekonomi (%) | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak melalui pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan penyediaan dukungan prasarana dasar perumahan. | Persentase Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Khusus (%) | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| | | | | Persentase Penanganan RTLH Korban Bencana dan/ Terdampak Relokasi (%) | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |
| | | | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan (%) | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan | rata-rata skor INM (Angka) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan |
| | | | | Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan | rata-rata skor INM (Angka) | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Dinas Kesehatan |
| | | | | Meningkatnya hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti | Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian dan Monev yang ditindaklanjuti (%) | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | Meningkatnya Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan | Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |



VISI
Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan

| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
|------|--------|---------|--|--|--|--|
| | | | daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan | infrastruktur dan kewilayahan (%) | | |
| | | | Meningkatnya Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%) | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Meningkatnya Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) | Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) (%) | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | Meningkatnya Kualitas dan Kelayakan Kawasan Permukiman | Persentase penanganan Rumah Tangga yang mengalami penurunan kualitas lingkungan (%) | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | | Persentase Penanganan Rumah Tangga yang tidak memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%) | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Rasanae Barat |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Mpunda | Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Mpunda |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Asakota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Asakota |



| VISI | | | | | | |
|--|--------|---------|---|---|--|--|
| Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | | Pembangunan di Kelurahan (Lembaga) | | |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Raba | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Raba |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Rasanae Timur | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Rasanae Timur |
| | | | Meningkatnya Pemberdayaan Sosial | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan (%) | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Dinas Sosial |
| | | | Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Nilai Akreditasi Sekolah Se-Kota Bima (Angka) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS | Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%) | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Dinas Sosial |
| | | | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | Persentase PMKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial (%) | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Dinas Sosial |
| | | | Terkendalinya Angka Kelahiran | Penurunan angka kelahiran remaja 15-19 tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun (%) | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |



| VISI Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan | | | | | | |
|--|--------|---------|--|--|--|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS | KETERANGAN |
| | | | | Penurunan Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) (Angka) | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | Terpenuhinya Pemeberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase UKBM yang dibina (%) | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Dinas Kesehatan |



RPJMD Kota Bima 2025-2029

TUJUAN PEMBANGUNAN



MENINGKATKAN RASA AMAN YANG BERKEADILAN BAGI MASYARAKAT

| Indikator | Baseline 2025 | Target 2029 |
|------------------|---------------|-------------|
| Indeks Rasa Aman | 2,5 | 3,27 |



TERWUJUDNYA KOTA LAYAK HUNI

| Indikator | Baseline 2025 | Target 2029 |
|------------------------|---------------|-------------|
| Indeks Kota Layak Huni | 73 | 77 |



MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA YANG PRODUKTIF DAN KOMPETITIF

| Indikator | Baseline 2025 | Target 2029 |
|----------------------------|---------------|-------------|
| Indeks Pembangunan Manusia | 78,95 | 80,58 |



TERWUJUDNYA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN ANGKATAN KERJA TERAMPIL

| Indikator | Baseline 2025 | Target 2029 |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,18 | 3,05 |



TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOTA BIMA

| Indikator | Baseline 2025 | Target 2029 |
|---|---------------|-------------|
| Persentase Penyiapan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi | 1,00 | 2,00 |



TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN DAERAH YANG INKLUSIF, MERATA DAN BERKEADILAN

| Indikator | Baseline 2025 | Target 2029 |
|-------------|---------------|-------------|
| Indeks Gini | 0,380 | 0,384 |



MENURUNNYA RISIKO BENCANA

| Indikator | Baseline 2025 | Target 2029 |
|-----------------------|---------------|-------------|
| Indeks Risiko Bencana | 90,17 | 86,62 |

TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN

**PENINGKATAN
KUALITAS TATA KOTA
DAN INFRASTRUKTUR
TERPADU PENDUKUNG
SEKTOR UTAMA**

**PENGUATAN EKONOMI
INKLUSIF DAN
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN**



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pendidikan tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini untuk mendukung tercapainya misi ke-2 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing, yang diarahkan pada peningkatan kualitas Pendidikan yang merata dan terjangkau dengan sasaran utama meningkatnya Kualitas Pendidikan yang merata dan terjangkau pada setiap jenjang

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada pemenuhan dan ketersediaan guru secara ideal serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan,

c. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan untuk untuk mendukung capaian indikator kinerja cakupan program pengembangan kurikulum



2. Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kesehatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan lingkungan kesehatan masyarakat,

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini untuk mendukung pemenuhan dan pemerataan ketersediaan tenaga kesehatan disetiap fasilitas kesehatan dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja persentase puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dan persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan untuk pengawasan makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat serta peningkatan pelayanan kefarmasian agar sesuai dengan standart (ketentuan). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa/kelurahan disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase UKBM yang di bina

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)



Program ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan sumber daya air sehingga dalam pemanfaatannya akan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat. Program ini dilakukan untuk mendukung capaian indikator meningkatnya persentase luas wilayah pertanian yang terlayani irigasi teknis.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan air minum yang layak dan aman untuk masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: persentase peningkatan rumah tangga pengguna air bersih/air minum.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak dan aman untuk masyarakat. Program ini dilakukan untuk mendukung capaian indikator: Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses IPAL.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur (drainase perkotaan) dengan indikator kinerja yaitu Persentase panjang jaringan drainase dalam kondisi baik

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini digunakan pada kegiatan bantuan teknis pengelolaan, penyelenggaraan, dan pendataan bangunan gedung milik daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja: Persentase gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun dan persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada penataan bangunan dan lingkungan yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase dokumen RTBL yang tersusun dan Persentase kawasan/ lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan Kota Bima. Diharapkan dengan infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan konektivitas dan



perekonomian daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Pelaksanaan program ini dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kerja di bidang jasa konstruksi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi sesuai kewenangan daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini ditujukan untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku. Capaian keberhasilan program ini diukur dengan indikator kinerja Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk pemenuhan indikator SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan indikator kinerja: Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada peningkatan dan penanganan kawasan kumuh, utamanya pada kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha. Indikator keberhasilan program ini adalah Presentase Penurunan Kawasan Kumuh

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pelaksanaan program ini untuk rehabilitasi dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yang berada diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha. Indikator kinerja program ini adalah Persentase Peningkatan Jumlah Rumah dan permukiman Layak Huni



d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini digunakan untuk memfasilitasi penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan mendorong pengembang agar segera menyerahkan PSU Perumahan yang dibangun kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diukur dengan indikator kinerja Persentase Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik dan Persentase PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

Program ini ditujukan untuk pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, indikator program ini adalah: Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3) /Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda).

b. program penanggulangan bencana

Pelaksanaan program ini mendukung ketercapaian Kota Bima menjadi kota yang TANGGUH, dengan harapan masyarakat Kota Bima mampu beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri dari dampak bencana yang dialami. Program ini dimaksudkan untuk PRB inklusif dan pembentukan desa tangguh bencana (destana). Selain itu, program ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana, dengan indikator: Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Persentase pemenuhan sistem kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana/Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana

c. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Program ini diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebakaran. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Luas Wilayah



yang terlayani kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

6. Sosial

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan sosial tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program pemberdayaan sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas.

b. program rehabilitasi sosial

Program ini merupakan salah satu program unggulan dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Pusat Layanan Kesejahteraan Anak Integratif (PLKSAI); Rumah Singgah (Rusi) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Indikator keberhasilan program ini adalah Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti.

c. program perlindungan dan jaminan sosial

Program ini diarahkan pada pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar, indikator keberhasilan program ini adalah proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah.

d. program penanganan bencana

Program ini ditujukan pada pemenuhan pemenuhan sandang dan pangan untuk korban bencana, dengan indikator kinerja Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:



1. Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan tenaga kerja tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

a. program perencanaan tenaga kerja

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk pelaksanaan perencanaan tenaga kerja daerah, diharapkan seluruh kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan tenaga kerja daerah dapat terlaksana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Persentase kesesuaian perencanaan tenaga kerja dengan realisasi.

b. program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja dari sisi soft skill dan hard skill dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan potensi pasar kerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja/beriwirausaha. Ukuran keberhasilan pada program adalah Persentase tenaga kerja yang terlatih dan Angka produktivitas tenaga kerja.

c. program penempatan tenaga kerja

Program ini diarahkan pada penempatan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan dan Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan.

d. program hubungan industrial

Program ini ditujukan untuk memfasilitasi antara tenaga kerja (buruh) dan perusahaan, program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase perusahaan yang melaksanakan K3, Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK).

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Program ini diarahkan pada implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah, serta implementasi dari struktur Pokja PUG di Perangkat Daerah. Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase



partisipasi perempuan dalam berorganisasi, Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta dan Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi Perempuan.

b. program perlindungan perempuan

Program ini diarahkan untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Indikator keberhasilan pelaksanaan program ini adalah Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani.

c. program pengelolaan sistem data gender dan anak

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan data pilah gender dan anak yang ada di setiap Perangkat Daerah, dengan data pilah diharapkan perencanaan yang disusun lebih responsif gender dan anak. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase lembaga yang memiliki kriteria layak anak.

d. program pemenuhan hak anak (pha)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan kota layak anak dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah Persentase meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak dan Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak.

e. program perlindungan khusus anak

Program ini diarahkan untuk memberikan perlindungan dan penanganan anak yang menjadi korban kekerasan, indikator keberhasilan program ini adalah Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar.

3. Pangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pangan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan sumber protein dan energi yang bisa dimanfaatkan masyarakat, Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah ketersediaan energi dan protein.

b. program penanganan kerawanan pangan



Pelaksanaan program ini diarahkan pada penanganan kelurahan rawan pangan baik yang disebabkan karena akses memperoleh pangan yang sulit maupun karena bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani.

c. program pengawasan keamanan pangan

Program ini ditujukan untuk pengawasan pangan, terutama pangan segar yang beredar di pasar, hal ini dilakukan untuk memastikan setiap bahan pangan yang beredar layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Indikator keberhasilan pelaksanaan program ini adalah Presentase bahan pangan yang aman konsumsi

4. Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanahan tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

a. program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian ganti rugi tanah untuk pembangunan guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu.

b. program pengelolaan izin lokasi

c. program pengadaan tanah untuk kepentingan umum

d. program penatagunaan tanah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen penatagunaan tanah dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pertanahan dengan indikator keberhasilan: Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun.

5. Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan lingkungan hidup tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program perencanaan lingkungan hidup



Program ini diarahkan pada penyediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator kinerja Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas

b. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Program ini dilakukan dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dengan melakukan pemantauan kualitas air dan udara. Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program ini adalah: Indeks Kualitas Air/Udara.

c. program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)

Program ini ditujukan untuk pengelolaan dan pemeliharaan RTH, dengan penyediaan runag terbuka hijau hingga tingkat RW. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Presentase RTH publik yang terkelola dengan baik.

d. program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

Program ini ditujukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan lingkungan dan izin PPLH. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Jumlah Kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

e. program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Program ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup setelah pealatihan dan sosialisasi.

f. program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

Program ini ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada tokoh/ lembaga masyarakat/ sekolah/ dunia usaha yang peduli dan concern terhadap pelestarian lingkungan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Jumlah tokoh/ lembaga masyarakat /sekolah/dunia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kota.

g. program penanganan pengaduan lingkungan hidup



Program ini diarahkan untuk memastikan setiap aduan masyarakat terkait perusakan lingkungan hidup ditindaklanjuti dan ditangani. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani.

h. program pengelolaan persampahan

Program ini fokus pada Pengelolaan persampahan (TPS) dengan Pengembangan TPS Kelurahan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Sampah yang tertangani/Persentase masyarakat yang memilah sampah dari sumbernya.

i. program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)

Program ini diarahkan pada pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan limbah B3, agar tidak mencemari lingkungan disekitarnya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Persentase limbah b3 yang dikelola sesuai prosedur.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program pendaftaran penduduk

Pelaksanaan program ini ditujukan pada pelayanan pendaftaran penduduk, dengan indikator kinerja Persentase Perekaman KTP Elektronik; Cakupan kepemilikan KK dan Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA.

b. program pencatatan sipil

Program ini diarahkan pada pelayanan pencatatan sipil, dengan indikator kinerja Persentase penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran.

c. program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dalam perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja umlah persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat.



d. program pengelolaan profil kependudukan

Program ini diarahkan pada penyusunan profil kependudukan, dengan indikator kinerja: Persentase ketersediaan profil Kependudukan tahunan.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program pengendalian penduduk

Program ini diarahkan pada sinkronisasi kebijakan perencanaan dan pengendalian penduduk, dengan indikator kinerja keberhasilan: persentase penurunan angka Total Fertility Rate.

b. program pembinaan keluarga berencana (KB)

Program ini diarahkan pada penurunan masyarakat yang tidak terlayani dalam pemenuhan alat kontrasepsi, program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja persentase penurunan unmet need.

c. program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

Program ini diarahkan untuk peningkatan pembinaan keluarga, dengan indikator kinerja Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani; Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna mCPR (Modern Contraceptive Prevalance Rate); Persentase Penurunan ASFR (Age Specific Fertility Rate).

8. Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perhubungan tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

a. program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan dan pemenuhan pelayanan lalu lintas angkutan jalan, guna meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kota Bima dan untuk meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat.

b. program pengelolaan pelayaran



Program ini dilaksanakan untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan efisiensi transportasi laut, baik untuk kapal penumpang, barang, maupun logistic.

9. Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan komunikasi dan informatika tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi publik terkait dengan kebijakan pemerintah yang dikemas secara menarik. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Predikat PLID Kota Bima.

b. program pengelolaan aplikasi informatika

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mendukung ketercapaian Bima Smart City dengan menyediakan pelayanan publik secara online dan menyiapkan akses internet di setiap Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Meningkatnya Penerapan E-Government dan pelayanan TIK.

10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan koperasi usaha kecil dan menengah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi

b. program pendidikan dan latihan perkoperasian

Pelaksanaan program ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja: Persentase pengurus/ pengawas/ pengelola koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

c. program pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Program ini diarahkan pada pemberdayaan dan perlindungan koperasi dalam mengelola usahanya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.



d. program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)

Program ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Kluster UKM serta digitalisasi produk UKM, Asistensi Usaha mikro berbasis Kluster. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha dan Meningkatnya Produktifitas UKM.

e. program pengembangan umkm

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro, dengan indikator keberhasilan: Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan, Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi dan Persentase Usaha Mikro yang bermitra.

11. Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan penanaman modal tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program pengembangan iklim penanaman modal

Program ini diarahkan pada pengembangan iklim investasi untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kota Bima. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan ketersediaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal.

b. program promosi penanaman modal

Program ini diarahkan pada promosi investasi untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Kota Bima, dengan indicator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi.

c. program pelayanan penanaman modal

Program ini diarahkan agar dapat memberikan pelayanan yang prima dalam perizinan penanaman modal dengan dibangunnya Mall Pelayanan Publik (MPP). Program ini diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

d. program pengendalian pelaksanaan penanaman modal



Program ini diarahkan untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk memberikan laporan penanaman modal yang telah dilakukan. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan program ini adalah Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

e. program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Pelaksanaan program ini adalah untuk menyediakan dan mengelola data perizinan dan non perizinan serta sistem informasi penanaman modal, indikator program ini adalah Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan.

12. Kepemudaan dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Program ini diarahkan untuk mengembangkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui pelatihan dan pembinaan pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

b. program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Program ini ditujukan untuk pembinaan terhadap atlet yang dilakukan secara kontinu, indikator keberhasilan program ini adalah Jumlah Atlet berprestasi tingkat nasional dan provinsi.

13. Statistik

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan statistik tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program penyelenggaraan statistik sektoral



Pelaksanaan program ini fokus pada penyediaan data statistik ketoral dengan indikator kinerja Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data indonesia.

14. Persandian

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan persandian tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

a. program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Program ini ditujukan untuk pengamanan Informasi dan komunikasi Perangkat Daerah, program ini diukur dengan indikator Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik dan Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (*e-sign*/ tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah.

15. Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kebudayaan tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

a. program pengembangan kebudayaan

Program ini diarahkan untuk mengembangkan kebudayaan daerah agar tetap lestari dan dikenal oleh masyarakat, dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah Cakupan Pengembangan Kebudayaan.

b. program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk melestarikan dan mengelola benda peninggalan, situs dan kawasan cagar budaya yang banyak tersebar di wilayah Kota Bima. Indikator kinerja program ini adalah Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini ditujukan untuk mengembangkan kesenian tradisional di Kota Bima melalui pembinaan terhadap pelaku kesenian. Indikator yang ingin dicapai pada inidkator ini adalah Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten.



16. Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perpustakaan tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

a. program pembinaan perpustakaan

Pelaksanaan program ini dilakukan untuk meningkatkan budaya membaca dalam Masyarakat dengan menyediakan perpustakaan yang representative di Kota Bima. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini adalah Persentase perpustakaan yang representatif.

17. Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kearsipan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program pengelolaan arsip

Program ini dilakukan dalam rangka pembinaan dalam pengelolaan arsip secara baku. Indikator keberhasilan pelaksanaan program ini adalah Persentase arsip yang diakuisisi dan Presentase jumlah arsip yang diolah.

b. program perlindungan dan penyelamatan arsip

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip-arsip penting. Indikator kinerja program ini adalah Peresentasi perlindungan arsip.

c. program perizinan penggunaan arsip

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Kelautan dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program pengelolaan perikanan tangkap

Program dilaksanakan dalam rangka meningkatkan potensi dan pembinaan nelayan perikanan tangkap utamanya nelayan kecil/tradisional. Indikator



keberhasilan program ini adalah Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap.

b. program pengelolaan perikanan budidaya

Program dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan budidaya ikan berbasis minapolitan. Indikator kinerja program ini adalah Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.

c. program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Program ini ditujukan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kota Bima, dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Persentase Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan.

2. Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pariwisata tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

a. program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Program ini fokus pada peningkatan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan sehingga lebih banyak membelanjakan uangnya di Kota Bima dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Indikator keberhasilan program ini adalah Persentase Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW).

b. program pemasaran pariwisata

Program ini fokus pada promosi dan pemasaran destinasi wisata baik disalam negeri maupun luar negeri guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Indikator program ini adalah Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan.

c. program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Program ini ditujukan untuk pengemabangan dan peningkatan keterampilan SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan SDM pariwisata, pembinaan SDM pariwisata yang sadar wisata, serta peningkatan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi kreatif. Indikator program ini adalah Persentase SDM Kepariwisataan yang terlibat.



3. Pertanian

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanian tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Program ini focus pada penyediaan sarana pertanian untuk peningkatan tanaman perkebunan dan hortikultura, serta budidaya pengembangan pertanian organik di Kota Bima. Indikator kinerja program ini adalah: Cakupan penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran (%).

b. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana pertanian. Indikator pada program ini adalah: Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik.

c. program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Program ini dilaksanakan untuk pengendalian, pencegahan dan penanganan hama penyakit ternak. Indikator yang digunakan dalam program ini adalah Persentase penurunan ternak yang terinfeksi PHMS (%).

d. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

Program ini dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi bencana pertanian yang dinilai akan memberi dampak pada usaha pertanian. Indikator kinerja pada program ini adalah: Cakupan berkurangnya dampak bencana pertanian.

e. program perizinan usaha pertanian

f. program penyuluhan pertanian

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas petani dan kelompok tani yang dilakukan dengan memberikan penyuluhan pertanian. Indikator keberhasilan pada program ini adalah Persentase peningkatan kelas kelompok tani.

4. Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perdagangan tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

a. program peningkatan sarana distribusi perdagangan



Program ini untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat/ tradisional dengan melakukan revitalisasi pasar dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Indikator kinerja pada program ini adalah: Prasarana Pasar yang dibangun/ direvitalisasi/ Direhabilitasi dan Persentase PKL yang terbina.

b. program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting di masyarakat. Indikator kinerja pada program ini adalah Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang menjual Barang Kadarluasa dan Rata-rata ketersediaan Barang Pokok dan barang penting lainnya Tahun.

c. program standardisasi dan perlindungan konsumen

Pelaksanaan program ini untuk memberikan pelayanan pengukuran dan perlindungan konsumen, dengan indikator kinerja Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang.

5. Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perindustrian tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

a. program perencanaan dan pembangunan industri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah dengan indikator kinerja: Persentase perkembangan Kelompok Industri Kecil Menengah.

b. program pengelolaan sistem informasi industri nasional

Pelaksanaan pada program ini mengarah pada fasilitasi database IKM pada Sistem Industri Nasional (SIINas) dengan indikator kinerja Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

4.1.4. Unsur Pendukung urusan pemerintahan

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut:



1. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Program ini ditujukan dalam rangka fasilitasi dan pemberian bantuan kesejahteraan rakyat, bantuan sosial kepada masyarakat, pemberian bantuan hukum kepada OPD dan desa yang ditimpa kasus hukum serta pembinaan tertib administrasi bagi kecamatan dan kelurahan. Indikator kinerja pada program ini adalah: Persentase fasilitasi kesejahteraan rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan persentase produk hukum daerah yang ditetapkan;

b. program perekonomian dan Pembangunan

Program ini ditujukan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi untuk kegiatan perekonomian dan pembangunan yang menjadi kewenangan sekretariat daerah. Indikator kinerja pada program ini: Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan dan perekonomian.

2. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk memberikan dukungan pelayanan kepada anggota DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

Nomenclator Program yang akan digunakan di urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perencanaan pembangunan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah



Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai peraturan perundangan melalui penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan program ini, nantinya mendukung ketercapaian indikator: Persentase capaian kinerja perangkat daerah dan Persentase hasil dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan.

b. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Pelaksanaan program ini diarahkan guna mendukung keterpaduan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembanguann daerah agar semua target kinerja pembangunan dapat tercapai. Indikator yang digunakan dalam melakukan pengukuran adalah: Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia, Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan keuangan daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. program pengelolaan keuangan daerah

Pelaksanaan program ini ditujukan dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal, dengan indikator kinerja: Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik.

b. program pengelolaan barang milik daerah

Program ini ditujukan untuk pengelolaan aset daerah yang optimal, dengan indikator kinerja mencapai Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate.

c. program pengelolaan pendapatan daerah

Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian target pajak daerah, dengan indikator kinerja: Rasio Pendapatan Asli Daerah.



3. Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. program kepegawaian daerah

Program ini ditujukan agar pengelolaan manajemen kepegawaian daerah semakin baik dan professional guna mendukung pencapaian system merit. Program ini digunakan untuk mencapai indikator kinerja: Persentase kualifikasi calon ASN sesuai formasi; Persentase kinerja ASN bernilai baik; Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan dan Persentase mutasi pegawai sesuai kebutuhan perangkat daerah.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. program pengembangan sumber daya manusia

Pelaksanaan program ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas SDM yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAkhlak) dengan indikator kinerja: Persentase Meningkatnya tingkat Kepuasan ASN terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian.

5. Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan penelitian dan pengembangan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. program riset dan inovasi daerah

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mencapai indikator jumlah Riset dan Inovasi daerah yang mendapat penghargaan tingkat provinsi dan nasional

4.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut:



1. Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pengawasan tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

a. program penyelenggaraan pengawasan

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah yang secara efektif. Indikator program ini adalah: Persentase Menurunnya Temuan APIP dan BPK, Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil, dan Persentase tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK.

b. program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mencapai indikator: Level Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima.

4.1.7. Unsur Kewilayahan

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kewilayahan tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

a. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk memfasilitasi pelayanan publik kepada masyarakat di kecamatan, dengan indikator kinerja: Cakupan Masyarakat yang memperoleh pelayanan public.

b. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan keaktifan lembaga masyarakat dengan indikator kinerja: Persentase Kelompok masyarakat yang di berdayakan.

c. program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum

Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat, engan indikator kinerja: Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan.



4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kesatuan bangsa dan politik tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan dan Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan.

b. program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Pelaksanaan program ini lebih pada pendidikan politik masyarakat dan peningkatan peran partai politik melalui pembinaan yang dilakukan setiap tahun. Indikator keberhasilan program ini adalah Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

c. program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Program ini ditujukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Kota Bima dengan indikator kinerja ersentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

d. program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

Pelaksanaan program ini diarahkan pada pembinaan kerukunan umat beragama dan pelaksanaan P4GN, dengan indikator persentase pembentukan paguyuban kerukunan umat beragama tingkat desa yang terbentuk dan cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar.

e. program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Program ini dilaksanakan guna meningkatkan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik dengan melakukan deteksi dini potensi konflik. Indikator



keberhasilan indikator program ini adalah Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan dan Persentase deteksi dini potensi konflik sosial.

Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja target per tahun dan pendanaan indikatif tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 disajikan pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1 Rencana Program dan Pendanaan Tahun 2025-2030

| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------|------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | 246.406.711.582 | | 205.322.526.774 | | 213.548.514.782 | | 215.766.365.930 | | 218.007.491.068 | |
| 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 201.933.092.882 | | 180.690.336.024 | | 188.588.717.225 | | 190.474.604.396 | | 192.379.350.435 | |
| Terlaksananya kegiatan rutin penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 201.933.092.882 | 100 | 180.690.336.024 | 100 | 188.588.717.225 | 100 | 190.474.604.396 | 100 | 192.379.350.435 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | 44.433.668.700 | | 23.770.885.750 | | 24.087.037.200 | | 24.407.393.465 | | 24.732.010.468 | |
| Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan | Rata-rata Nilai Akreditasi Sekolah Se-Kota Bima (Angka) | 81 | 82 | 83 | 44.433.668.700 | 85 | 23.770.885.750 | 91 | 24.087.037.200 | 92 | 24.407.393.465 | 92 | 24.732.010.468 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | 0 | | 354.655.000 | | 359.371.912 | | 364.151.558 | | 368.994.774 | |
| Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Nilai Rata-Rata Pengelolaan Kurikulum Satuan Pendidikan Berorientasi Peningkatan Hasil Belajar Siswa (Angka) | 65,31 | 70 | 72 | 0 | 75 | 354.655.000 | 77 | 359.371.912 | 85 | 364.151.558 | 85 | 368.994.774 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | 39.950.000 | | 506.650.000 | | 513.388.445 | | 520.216.511 | | 527.135.391 | |
| Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | Indeks Distribusi Guru (Angka) | 0,87 | 0,9 | 0,92 | 39.950.000 | 0,93 | 506.650.000 | 0,94 | 513.388.445 | 1 | 520.216.511 | 1 | 527.135.391 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | 191.653.369.196 | | 147.706.454.235 | | 150.027.644.300 | | 151.273.969.403 | | 152.023.011.968 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------|------|---------------------------------|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 117.614.582.646 | | 87.712.403.991 | | 89.875.646.647 | | 89.875.646.647 | | 91.070.992.747 | |
| Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Perangkat Daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. | Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah (%) | 100 | 100 | 100 | 117.614.582.646 | 100 | 87.712.403.991 | 100 | 89.875.646.647 | 100 | 89.875.646.647 | 100 | 91.070.992.747 | Dinas Kesehatan |
| Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | RSUD Kota Bima |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 71.065.530.200 | | 57.599.887.260 | | 57.025.992.300 | | 58.365.965.761 | | 57.784.437.998 | |
| Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan | rata-rata skor INM (Angka) | 91,67 | 92 | 92,5 | 71.065.530.200 | 93 | 57.599.887.260 | 93,5 | 57.025.992.300 | 94 | 58.365.965.761 | 95 | 57.784.437.998 | Dinas Kesehatan |
| Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan | rata-rata skor INM (Angka) | 91,67 | 92 | 92,5 | 0 | 93 | 0 | 93,5 | 0 | 94 | 0 | 95 | 0 | RSUD Kota Bima |
| 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | 1.482.905.350 | | 638.397.915 | | 646.888.608 | | 646.888.608 | | 655.492.226 | |
| Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Sesuai Standar (%) | 100 | 100 | 100 | 1.482.905.350 | 100 | 638.397.915 | 100 | 646.888.608 | 100 | 646.888.608 | 100 | 655.492.226 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | 633.761.000 | | 471.298.807 | | 477.567.081 | | 483.918.723 | | 483.918.723 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Terpenuhi sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar (%) | 95 | 95,5 | 96 | 633.761.000 | 96,5 | 471.298.807 | 97 | 477.567.081 | 97,5 | 483.918.723 | 98 | 483.918.723 | Dinas Kesehatan |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 856.590.000 | | 1.284.466.262 | | 2.001.549.664 | | 1.901.549.664 | | 2.028.170.274 | |
| Terpeenuhnya Pemeberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase UKBM yang dibina (%) | 100 | 100 | 100 | 856.590.000 | 100 | 1.284.466.262 | 100 | 2.001.549.664 | 100 | 1.901.549.664 | 100 | 2.028.170.274 | Dinas Kesehatan |
| 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | 69.517.622.869 | | 63.589.685.258 | | 66.632.567.602 | | 66.632.567.602 | | 67.518.780.751 | |
| 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 11.017.944.673 | | 9.896.748.087 | | 10.028.374.837 | | 10.028.374.837 | | 10.161.752.222 | |
| Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Nilai SAKIP OPD (%) | 81,14 | 81,39 | 81,64 | 11.017.944.673 | 81,89 | 9.896.748.087 | 82,14 | 10.028.374.837 | 82,14 | 10.028.374.837 | 82,39 | 10.161.752.222 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | 868.351.074 | | 8.824.696.448 | | 8.942.064.911 | | 8.942.064.911 | | 9.060.994.374 | |
| Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Pesentase Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik (%) | 71,01 | 71,28 | 73,28 | 868.351.074 | 75,28 | 8.824.696.448 | 77,28 | 8.942.064.911 | 79,28 | 8.942.064.911 | 81,28 | 9.060.994.374 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | 9.042.795.568 | | 17.027.378.037 | | 10.150.981.695 | | 10.150.981.695 | | 10.285.989.751 | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap | Persentase Rumah tangga pengguna air | 33,90 | 34,28 | 34,73 | 9.042.795.568 | 35,18 | 17.027.378.037 | 35,63 | 10.150.981.695 | 35,70 | 10.150.981.695 | 35,90 | 10.285.989.751 | Dinas Pekerjaan |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|--|--|---------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | | |
| sistem penyediaan air minum | bersih Jaringan Perpipaan (%) | | | | | | | | | | | | | | Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | 3.847.208.750 | | 6.063.989.383 | | 6.144.640.442 | | 6.144.640.442 | | 6.226.364.160 | | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak (%) | 98,67 | 98,77 | 99,17 | 3.847.208.750 | 99,57 | 6.063.989.383 | 99,85 | 6.144.640.442 | 100 | 6.144.640.442 | 100 | 6.226.364.160 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | | 4.999.076.860 | | 6.852.587.624 | | 7.943.727.040 | | 7.943.727.040 | | 8.049.378.610 | | |
| Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik (%) | 63,08 | 64,21 | 66,00 | 4.999.076.860 | 68,00 | 6.852.587.624 | 69,50 | 7.943.727.040 | 71,00 | 7.943.727.040 | 72,50 | 8.049.378.610 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | 178.005.000 | | 238.639.378 | | 241.813.281 | | 241.813.281 | | 245.029.398 | | |
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (%) (%) | 48 | 50 | 51,50 | 178.005.000 | 53 | 238.639.378 | 55 | 241.813.281 | 57,50 | 241.813.281 | 60 | 245.029.398 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | 35.042.180.000 | | 10.275.771.117 | | 10.412.438.872 | | 10.412.438.872 | | 10.550.924.309 | | |
| Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Persentase Jumlah Kawasan Strategis yang tertata (%) | 40 | 60 | 80 | 35.042.180.000 | 80 | 10.275.771.117 | 80 | 10.412.438.872 | 80 | 10.412.438.872 | 80 | 10.550.924.309 | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | 3.858.017.544 | | 3.438.900.000 | | 11.484.637.370 | | 11.484.637.370 | | 11.637.383.047 | | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | | | |
| meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap (%) | 61,85 | 62,85 | 63,85 | 3.858.017.544 | 64,85 | 3.438.900.000 | 65,85 | 11.484.637.370 | 66,85 | 11.484.637.370 | 67,85 | 11.637.383.047 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | 113.265.000 | | 409.367.140 | | 714.811.723 | | 714.811.723 | | 724.318.719 | |
| meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi | Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart (%) | 20,81 | 22,29 | 23,78 | 113.265.000 | 25,26 | 409.367.140 | 26,75 | 714.811.723 | 28,24 | 714.811.723 | 29,72 | 724.318.719 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | 550.778.400 | | 561.608.044 | | 569.077.431 | | 569.077.431 | | 576.646.161 | |
| meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase luas ruang yang sesuai peruntukannya (%) | 99,91 | 99,92 | 99,93 | 550.778.400 | 99,94 | 561.608.044 | 99,95 | 569.077.431 | 99,96 | 569.077.431 | 99,97 | 576.646.161 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 9.105.831.141 | | 22.993.139.046 | | 21.662.658.386 | | 29.796.218.805 | | 18.002.893.333 | |
| 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.487.177.791 | | 4.229.708.269 | | 4.285.963.389 | | 4.285.963.389 | | 4.342.966.702 | |
| Terlaksananya layanan administrasi perkantoran | Porsentase Tersedianya layanan administrasi perkantoran yang efisien (%) | 100 | 100 | 100 | 4.487.177.791 | 100 | 4.229.708.269 | 100 | 4.285.963.389 | 100 | 4.285.963.389 | 100 | 4.342.966.702 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | 448.924.850 | | 8.538.599.020 | | 8.652.162.387 | | 13.652.162.387 | | 6.767.236.147 | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak melalui | Persentase Penanganan RTLH Korban Bencana | 98,73 | 98,10 | 97,46 | 448.924.850 | 96,19 | 8.538.599.020 | 94,92 | 8.652.162.387 | 93,65 | 13.652.162.387 | 92,38 | 6.767.236.147 | Dinas Perumahan, Kawasan |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--|
| | | | | 2026 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | | | |
| pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan penyediaan dukungan prasarana dasar perumahan. | dan/ Terdampak Relokasi (%) | | | | | | | | | | | | | Permukiman dan Pertanahan |
| | Persentase Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Khusus (%) | 60,75 | 65,42 | 70,09 | 74,76 | 79,43 | 84,10 | 88,77 | | | | | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 2.507.915.000 | | 2.248.048.017 | | 2.277.947.056 | | 2.277.947.056 | | 2.308.243.752 | |
| Meningkatnya Kualitas dan Kelayakan Kawasan Permukiman | Persentase Penanganan Rumah Tangga yang tidak memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%) | 96,46 | 88,45 | 80,44 | 2.507.915.000 | 71,97 | 2.248.048.017 | 63,50 | 2.277.947.056 | 55,03 | 2.277.947.056 | 46,56 | 2.308.243.752 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| | Persentase penanganan Rumah Tangga yang mengalami penurunan kualitas lingkungan (%) | 98,82 | 97,63 | 95 | | 92 | | 89 | | 86 | | 83 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | | 1.165.941.000 | | 5.976.783.740 | | 3.043.962.037 | | 5.580.145.973 | | 3.084.446.732 | |
| Menurunnya jumlah dan luasan perumahan dan kawasan permukiman kumuh untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan. | Persentase Penanganan Rumah Tangga yang tidak memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%) | 99,81 | 99,51 | 99,21 | 1.165.941.000 | 98,82 | 5.976.783.740 | 98,43 | 3.043.962.037 | 98,04 | 5.580.145.973 | 97,65 | 3.084.446.732 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | 495.872.500 | | 2.000.000.000 | | 3.402.623.517 | | 4.000.000.000 | | 1.500.000.000 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Memadai pada Kawasan Perumahan | Persentase Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan perumahan. (%) | 4 | 4 | 4 | 495.872.500 | 4 | 2.000.000.000 | 4 | 3.402.623.517 | 4 | 4.000.000.000 | 4 | 1.500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | 23.644.919.260 | | 35.967.257.282 | | 31.445.621.805 | | 31.945.621.805 | | 27.370.498.574 | |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 20.177.402.510 | | 18.201.136.249 | | 18.443.211.361 | | 18.443.211.361 | | 18.688.506.072 | |
| Tercapainya indikator kinerja layanan Penunjang Perangkat Daerah | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 8.349.413.046 | 100 | 7.106.520.614 | 100 | 7.201.037.338 | 100 | 7.201.037.338 | 100 | 7.296.811.135 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 7.493.311.617 | 100 | 6.917.578.638 | 100 | 7.009.582.434 | 100 | 7.009.582.434 | 100 | 7.102.809.880 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| Mengkatnya nilai saki | Nilai SAKIP OPD (%) | 65 | 67 | 71 | 4.334.677.847 | 73 | 4.177.036.997 | 75 | 4.232.591.589 | 80 | 4.232.591.589 | 81 | 4.288.885.057 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 1.778.479.700 | | 2.622.527.722 | | 3.157.407.341 | | 3.157.407.341 | | 3.199.400.858 | |
| Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Tingkat penyelesaian keamanan, ketenteraman dan ketertiban (K3) (%) | 75 | 75 | 75,25 | 1.778.479.700 | 75,50 | 2.622.527.722 | 75,75 | 3.157.407.341 | 76 | 3.157.407.341 | 76,25 | 3.199.400.858 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | 618.353.300 | | 2.997.377.990 | | 2.537.243.118 | | 3.037.243.118 | | 3.077.638.451 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Meningkatnya upaya Penanggulangan Bencana | Persentase Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana (%) | 53,79 | 66,92 | 76,98 | 618.353.300 | 81,16 | 2.997.377.990 | 91,18 | 2.537.243.118 | 95,21 | 3.037.243.118 | 95,50 | 3.077.638.451 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | 1.070.683.750 | | 12.146.215.321 | | 7.307.759.985 | | 7.307.759.985 | | 2.404.953.193 | |
| Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Non Kebakaran | Persentase Tingkat Respon Time Dalam Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (15 Menit) (%) | 75,61 | 80,49 | 85,37 | 1.070.683.750 | 92,68 | 12.146.215.321 | 97,56 | 7.307.759.985 | 100,00 | 7.307.759.985 | 100,00 | 2.404.953.193 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | 11.285.391.040 | | 23.531.827.324 | | 23.844.800.628 | | 23.844.800.628 | | 24.161.936.476 | |
| 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 5.275.268.040 | | 4.442.264.717 | | 4.501.346.838 | | 4.501.346.838 | | 4.561.214.751 | |
| Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%) | 100 | 100 | 100 | 5.275.268.040 | 100 | 4.442.264.717 | 100 | 4.501.346.838 | 100 | 4.501.346.838 | 100 | 4.561.214.751 | Dinas Sosial |
| 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | 372.213.000 | | 151.483.680 | | 153.498.413 | | 153.498.413 | | 155.539.942 | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Sosial | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan (%) | 50 | 50 | 60 | 372.213.000 | 70 | 151.483.680 | 80 | 153.498.413 | 90 | 153.498.413 | 100 | 155.539.942 | Dinas Sosial |
| 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | 641.419.500 | | 943.187.805 | | 955.732.203 | | 955.732.203 | | 968.443.441 | |
| Meningkatnya Rehabilitasi Sosial | Persentase PMKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta | 60 | 60 | 60,25 | 641.419.500 | 60,50 | 943.187.805 | 60,75 | 955.732.203 | 61 | 955.732.203 | 61,25 | 968.443.441 | Dinas Sosial |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | | | |
| | Gelandangan Pengemis) yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | 4.489.116.800 | | 17.167.481.543 | | 17.395.809.048 | | 17.395.809.048 | | 17.627.173.308 | |
| Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS | Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%) | 80 | 80,25 | 80,50 | 4.489.116.800 | 80,75 | 17.167.481.543 | 81 | 17.395.809.048 | 81,25 | 17.395.809.048 | 81,5 | 17.627.173.308 | Dinas Sosial |
| 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | 507.373.700 | | 827.409.579 | | 838.414.126 | | 838.414.126 | | 849.565.034 | |
| Meningkatnya Penanganan Bencana | Persentase Korban bencana Alam, Sosial dan/ atau non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%) | 100 | 100 | 100 | 507.373.700 | 100 | 827.409.579 | 100 | 838.414.126 | 100 | 838.414.126 | 100 | 849.565.034 | Dinas Sosial |
| | Persentase Korban bencana Alam, Sosial dan/ atau non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Sosial |
| 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | 5.232.717.167 | | 11.748.651.133 | | 8.404.908.194 | | 12.904.908.194 | | 6.892.822.278 | |
| 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.867.657.017 | | 3.097.628.386 | | 3.138.826.844 | | 3.138.826.844 | | 3.180.573.241 | |
| Laksanakan kegiatan rutin penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 3.867.657.017 | 1 | 3.097.628.386 | 1 | 3.138.826.844 | 1 | 3.138.826.844 | 1 | 3.180.573.241 | Dinas Tenaga Kerja |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------|------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | 8.314.000 | | 108.585.206 | | 110.029.389 | | 110.029.389 | | 111.492.780 | |
| Meningkatnya Kesesuaian antara Rencana Tenaga Kerja dengan Realisasi | meningkatnya kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi (Angka) | 50 | 50 | 52 | 8.314.000 | 54 | 108.585.206 | 56 | 110.029.389 | 58 | 110.029.389 | 58 | 111.492.780 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | 328.710.000 | | 7.796.096.670 | | 4.399.784.755 | | 8.899.784.755 | | 2.834.430.698 | |
| Meningkatnya Kualitas dan produktivitas tenaga kerja | Persentase tenaga kerja terlatih (%) | 200 | 200 | 200 | 328.710.000 | 200 | 7.796.096.670 | 200 | 4.399.784.755 | 200 | 8.899.784.755 | 200 | 2.834.430.698 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | 199.675.000 | | 199.171.056 | | 201.820.032 | | 201.820.032 | | 204.504.238 | |
| Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan | Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%) | 93 | 93,5 | 94,0 | 199.675.000 | 94,5 | 199.171.056 | 95 | 201.820.032 | 95,5 | 201.820.032 | 95,5 | 204.504.238 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | 828.361.150 | | 547.169.815 | | 554.447.174 | | 554.447.174 | | 561.821.321 | |
| Meningkatnya cakupan perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan | Persentase perusahaan yang melaksanakan K3 (%) | 48 | 48 | 48,5 | 828.361.150 | 49,0 | 547.169.815 | 49,5 | 554.447.174 | 50 | 554.447.174 | 50 | 561.821.321 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | 6.394.381.602 | | 6.533.559.743 | | 6.720.456.088 | | 6.720.456.088 | | 6.809.838.155 | |
| 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.662.147.202 | | 3.160.279.910 | | 3.202.311.633 | | 3.202.311.633 | | 3.244.902.377 | |
| Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 3.662.147.202 | 100 | 3.160.279.910 | 100 | 3.202.311.633 | 100 | 3.202.311.633 | 100 | 3.244.902.377 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | 1.768.597.700 | | 1.937.961.599 | | 1.963.736.489 | | 1.963.736.489 | | 1.989.854.184 | |
| Meningkatnya kapasitas pemberdayaan perempuan | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta (%) | 8,11 | 8,11 | 8,23 | 1.768.597.700 | 8,37 | 1.937.961.599 | 8,47 | 1.963.736.489 | 8,59 | 1.963.736.489 | 8,72 | 1.989.854.184 | Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan (%) | 13 | 13 | 23 | | 31 | | 37 | | 43 | | 43 | | Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam Pembangunan | Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi (%) | 11,75 | 11,75 | 11,76 | 0 | 11,78 | 0 | 11,80 | 0 | 11,82 | 0 | 11,83 | 0 | Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | 257.051.300 | | 302.590.328 | | 306.614.779 | | 306.614.779 | | 310.692.756 | |
| Meningkanya Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan TPPO | Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan (%) | 0,050 | 0,050 | 0,046 | 257.051.300 | 0,043 | 302.590.328 | 0,039 | 306.614.779 | 0,036 | 306.614.779 | 0,034 | 310.692.756 | Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | 16.721.600 | | 16.943.997 | | 17.169.352 | | 17.169.352 | | 17.397.705 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------|--------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Persentase lembaga layanan keluarga yg aktif (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 16.721.600 | 100,00 | 16.943.997 | 100,00 | 17.169.352 | 100,00 | 17.169.352 | 100,00 | 17.397.705 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | 34.743.150 | | 87.572.290 | | 188.737.001 | | 188.737.001 | | 191.247.204 | |
| Meningkatnya pemenuhan data gender dan anak | Persentase pemenuhan data gender dan anak (%) | 100 | 100 | 100 | 34.743.150 | 100 | 87.572.290 | 100 | 188.737.001 | 100 | 188.737.001 | 100 | 191.247.204 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | 165.404.000 | | 372.492.594 | | 377.446.746 | | 377.446.746 | | 382.466.787 | |
| Meningkatnya pemenuhan hak anak | Persentase meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak (%) | 61,90 | 69,05 | 76,19 | 165.404.000 | 80,95 | 372.492.594 | 85,71 | 377.446.746 | 90,48 | 377.446.746 | 95,24 | 382.466.787 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | 489.716.650 | | 655.719.025 | | 664.440.088 | | 664.440.088 | | 673.277.142 | |
| Meningkatnya Penanganann tindak kekerasan terhadap Anak dan TPPO | Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak (%) | 0,054 | 0,054 | 0,050 | 489.716.650 | 0,046 | 655.719.025 | 0,042 | 664.440.088 | 0,040 | 664.440.088 | 0,038 | 673.277.142 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Persentase tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---------------|------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | 4.665.885.700 | | 7.147.232.400 | | 8.242.290.591 | | 9.242.290.591 | | 8.351.913.057 | |
| 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.898.253.300 | | 3.732.509.483 | | 3.782.151.859 | | 3.782.151.859 | | 3.832.454.479 | |
| Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 3.898.253.300 | 100 | 3.732.509.483 | 100 | 3.782.151.859 | 100 | 3.782.151.859 | 100 | 3.832.454.479 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | 597.548.000 | | 1.120.872.833 | | 1.635.780.442 | | 2.135.780.442 | | 1.657.536.322 | |
| Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (Angka) | 86,8 | 88,5 | 90,26 | 597.548.000 | 91,99 | 1.120.872.833 | 93,72 | 1.635.780.442 | 95,45 | 2.135.780.442 | 100 | 1.657.536.322 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | 104.637.400 | | 1.168.078.648 | | 1.433.614.094 | | 1.683.614.094 | | 1.452.681.162 | |
| Meningkatnya penanganan kerwanan pangan | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 0 | 24 | 20 | 104.637.400 | 15 | 1.168.078.648 | 10 | 1.433.614.094 | 5 | 1.683.614.094 | 0 | 1.452.681.162 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | 65.447.000 | | 1.125.771.436 | | 1.390.744.196 | | 1.640.744.196 | | 1.409.241.094 | |
| Meningkatnya Pengawasan mutu dan keamanan Pangan | Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan segar (%) | 95 | 90 | 90 | 65.447.000 | 90 | 1.125.771.436 | 90 | 1.390.744.196 | 90 | 1.640.744.196 | 90 | 1.409.241.094 | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | 2.391.006.460 | | 9.773.815.000 | | 11.901.811.740 | | 15.901.811.740 | | 11.394.519.516 | |
| 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | 0 | | 303.990.000 | | 308.033.067 | | 308.033.067 | | 312.129.907 | |
| Terselesaikannya sengketa tanah garapan | Penanganan sengketa tanah garapan yang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 303.990.000 | 1 | 308.033.067 | 1 | 308.033.067 | 1 | 312.129.907 | Dinas Perumahan, Kawasan |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | | |
| | dilakukan melalui mediasi (%) | | | | | | | | | | | | | | Permukiman dan Pertanahan |
| 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | | | | | 2.191.006.460 | | 9.066.500.000 | | 11.187.084.450 | | 15.187.084.450 | | 10.672.281.353 | | |
| Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 2.191.006.460 | 1 | 9.066.500.000 | 1 | 11.187.084.450 | 1 | 15.187.084.450 | 1 | 10.672.281.353 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | | | | | 200.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | |
| Meningkatnya Pengelolaan tanah kosong | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi (Laporan / Dokumen) | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | | | 0 | | 253.325.000 | | 256.694.223 | | 256.694.223 | | 260.108.256 | | |
| Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah | Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase) | - | - | - | 0 | - | 253.325.000 | - | 256.694.223 | - | 256.694.223 | - | 260.108.256 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 27.060.712.111 | | 45.950.652.238 | | 45.521.895.911 | | 43.890.027.064 | | 49.015.431.455 | | |
| 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN | | | | | 12.718.052.179 | | 13.164.219.174 | | 13.339.303.289 | | 13.339.303.289 | | 13.516.716.023 | | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 12.718.052.179 | 100 | 13.164.219.174 | 100 | 13.339.303.289 | 100 | 13.339.303.289 | 100 | 13.516.716.023 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 281.800.000 | | 251.578.820 | | 254.924.818 | | 254.924.818 | | 258.315.318 | |
| Jumlah peraturan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH (%) | 56 | 58 | 60 | 281.800.000 | 63 | 251.578.820 | 65 | 254.924.818 | 68 | 254.924.818 | 70 | 258.315.318 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 423.061.000 | | 283.390.882 | | 287.159.980 | | 1.287.159.980 | | 1.290.979.208 | |
| Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | Indeks Kualitas Air (Indeks) | 40 | 41,4 | 42,5 | 423.061.000 | 43,5 | 283.390.882 | 44,5 | 287.159.980 | 45 | 1.287.159.980 | 45 | 1.290.979.208 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kualitas Udara (Indeks) | 94 | 94 | 94 | | 94 | | 94 | | 94 | 94 | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | 2.612.624.482 | | 5.209.648.905 | | 5.278.937.235 | | 8.114.461.427 | | 7.290.650.794 | |
| Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Persentase Luas RTH Publik (%) | 14,55 | 15 | 15,20 | 2.612.624.482 | 15,30 | 5.209.648.905 | 15,40 | 5.278.937.235 | 15,50 | 8.114.461.427 | 15,60 | 7.290.650.794 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | 27.000.000 | | 3.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | 4.500.000.000 | |
| Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) | Jumlah Dokumen Pengelolaan Limbah B3 (Dokumen) | 0 | 12 | 12 | 27.000.000 | 13 | 3.000.000.000 | 14 | 2.000.000.000 | 14 | 4.000.000.000 | 15 | 4.500.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---------------|------|---------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | 137.000.000 | | 1.153.863.087 | | 1.169.209.466 | | 1.169.209.466 | | 1.184.759.952 | |
| Meningkatnya Jumlah Izin Lingkungan yang diawasi | Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH (%) | 56 | 58 | 60 | 137.000.000 | 63 | 1.153.863.087 | 65 | 1.169.209.466 | 68 | 1.169.209.466 | 70 | 1.184.759.952 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 53.000.000 | | 621.791.734 | | 630.061.564 | | 630.061.564 | | 638.441.383 | |
| Meningkatnya Jumlah Pokmas Sadar terhadap Lingkungan | Persentase Masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup setelah pelatihan dan sosialisasi (%) | 48 | 50 | 55 | 53.000.000 | 60 | 621.791.734 | 65 | 630.061.564 | 70 | 630.061.564 | 75 | 638.441.383 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 93.000.000 | | 2.077.204.711 | | 2.104.831.534 | | 2.104.831.534 | | 2.132.825.793 | |
| Meningkatnya Kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Jumlah tokoh/lembaga masyarakat/sekolah/du nia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kota (Angka) | 75 | 75 | 80 | 93.000.000 | 80 | 2.077.204.711 | 85 | 2.104.831.534 | 95 | 2.104.831.534 | 95 | 2.132.825.793 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 26.000.000 | | 514.923.823 | | 521.772.310 | | 521.772.310 | | 528.711.882 | |
| Meningkatnya Penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup | pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani (Angka) | 28 | 30 | 32 | 26.000.000 | 35 | 514.923.823 | 37 | 521.772.310 | 40 | 521.772.310 | 45 | 528.711.882 | Dinas Lingkungan Hidup |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | 10.689.174.450 | | 19.674.031.102 | | 19.935.695.715 | | 12.468.302.676 | | 17.674.031.102 | |
| Meningkatnya Sampah yang tertangani. | Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase) | 70 | 70 | 75 | 10.689.174.450 | 75 | 19.674.031.102 | 78 | 19.935.695.715 | 80 | 12.468.302.676 | 80 | 17.674.031.102 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 5.358.365.843 | | 4.918.242.047 | | 5.183.654.666 | | 5.183.654.666 | | 5.252.597.275 | |
| 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.898.004.343 | | 4.650.422.800 | | 4.712.273.423 | | 4.712.273.423 | | 4.774.946.660 | |
| Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 4.898.004.343 | 100 | 4.650.422.800 | 100 | 4.712.273.423 | 100 | 4.712.273.423 | 100 | 4.774.946.660 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | 271.827.000 | | 155.197.327 | | 157.261.451 | | 157.261.451 | | 159.353.029 | |
| Meningkatnya tertib administrasi pendaftaran kependudukan | cakupan pendaftaran penduduk kepemilikan KTP (Angka) | 99,41 | 99,53 | 99,65 | 271.827.000 | 99,77 | 155.197.327 | 99,89 | 157.261.451 | 100 | 157.261.451 | 100 | 159.353.029 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | persentase kepemilikan KIA (%) | 64,95 | 67,97 | 70,97 | | 73,97 | | 76,97 | | 79,97 | | 79,97 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk | persentase kepemilikan KIA (%) | 64,95 | 71,96 | 78,97 | 0 | 85,98 | 0 | 92,99 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | 76.320.500 | | 39.064.651 | | 139.584.211 | | 139.584.211 | | 141.440.681 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------|-------|---------------------------------|-------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil | Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-17 tahun (%) | 98,96 | 99,06 | 99,16 | 76.320.500 | 99,26 | 39.064.651 | 99,36 | 139.584.211 | 99,46 | 139.584.211 | 99,46 | 141.440.681 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil | Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan (%) | 98,96 | 99,17 | 99,38 | 0 | 99,58 | 0 | 99,79 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | 102.941.000 | | 66.853.443 | | 67.742.594 | | 67.742.594 | | 68.643.571 | |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan | Persentase kepuasan masyarakat (nilai IKM) (%) | 9,95 | 91,45 | 91,95 | 102.941.000 | 92,45 | 66.853.443 | 92,95 | 67.742.594 | 93,45 | 67.742.594 | 93,45 | 68.643.571 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma (%) | 10 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 35 | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Persentase pengelolaan dan pemanfaatan informasi administrasi kependudukan | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%) | 5,33 | 7,32 | 9,31 | 0 | 11,30 | 0 | 13,29 | 0 | 15,28 | 0 | 15,28 | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | | 9.273.000 | | 6.703.826 | | 106.792.987 | | 106.792.987 | | 108.213.334 | |
| meningkatkan kualitas profil kependudukan | Jumlah dokumen profil kependudukan dan agregat kependudukan Kota Bima (Dokumen) | 2 | 2 | 2 | 9.273.000 | 2 | 6.703.826 | 2 | 106.792.987 | 2 | 106.792.987 | 2 | 108.213.334 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Persentase lembaga pemerintah dan non pemerintah yang | Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun (%) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Dinas Kependudukan dan |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|---------------|--|
| | | | | 2026 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | | | |
| memanfaatkan data profil kependudukan | | | | | | | | | | | | | | Pencatatan Sipil |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | 6.052.904.314 | | 7.781.845.395 | | 8.885.343.939 | | 7.885.343.939 | | 9.003.519.013 | |
| 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.600.654.314 | | 3.852.482.638 | | 3.903.720.657 | | 3.903.720.657 | | 3.955.640.142 | |
| Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 4.600.654.314 | 100 | 3.852.482.638 | 100 | 3.903.720.657 | 100 | 3.903.720.657 | 100 | 3.955.640.142 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | 47.400.000 | | 106.579.441 | | 107.996.948 | | 107.996.948 | | 109.433.307 | |
| Terkendalinya Angka Kelahiran | Penurunan Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) (Angka) | 2,37 | 2,20 | 2,15 | 47.400.000 | 2,10 | 106.579.441 | 2,05 | 107.996.948 | 2,00 | 107.996.948 | 2,00 | 109.433.307 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Penurunan angka kelahiran remaja 15-19 tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun (%) | 0,024 | 0,023 | 0,022 | | 0,020 | | 0,019 | | 0,018 | | 0,018 | | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | 567.750.000 | | 2.774.546.789 | | 2.811.448.261 | | 2.811.448.261 | | 2.848.840.523 | |
| Meningkatnya Jumlah Kesertaan BerKB Melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar Pelayanan | PERSENTASE PENURUNAN (UNMET NEED) (%) | 8,64 | 8,30 | 8,10 | 567.750.000 | 8,00 | 2.774.546.789 | 7,94 | 2.811.448.261 | 7,84 | 2.811.448.261 | 7,84 | 2.848.840.523 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN | | | | | 837.100.000 | | 1.048.236.527 | | 2.062.178.073 | | 1.062.178.073 | | 2.089.605.041 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | | | | | | | | | | |
| Memperkuat Ketahanan, Kesejahteraan dan Karakter Keluarga | Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan upaya pemberdayaan ekonomi (%) | 47 | 48 | 49 | 837.100.000 | 50 | 1.048.236.527 | 51 | 2.062.178.073 | 52 | 1.062.178.073 | 52 | 2.089.605.041 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | 18.452.489.965 | | 17.043.265.054 | | 17.269.940.479 | | 17.269.940.479 | | 17.499.630.687 | |
| 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 7.870.634.965 | | 6.052.371.210 | | 6.132.867.747 | | 6.132.867.747 | | 6.214.434.888 | |
| Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 7.870.634.965 | 100 | 6.052.371.210 | 100 | 6.132.867.747 | 100 | 6.132.867.747 | 100 | 6.214.434.888 | Dinas Perhubungan |
| 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | 10.568.655.000 | | 10.962.760.157 | | 11.108.564.867 | | 11.108.564.867 | | 11.256.308.780 | |
| Terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Sesuai Standar (Unit) | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 10.568.655.000 | 2.805 | 10.962.760.157 | 2.805 | 11.108.564.867 | 2.805 | 11.108.564.867 | 2.805 | 11.256.308.780 | Dinas Perhubungan |
| | Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar (%) | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 100 | | Dinas Perhubungan |
| 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | 13.200.000 | | 28.133.687 | | 28.507.865 | | 28.507.865 | | 28.887.019 | |
| Tersedianya pengelolaan pelayaran | Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar (%) | 95 | 100 | 100 | 13.200.000 | 100 | 28.133.687 | 100 | 28.507.865 | 100 | 28.507.865 | 100 | 28.887.019 | Dinas Perhubungan |
| 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | 8.928.371.176 | | 9.354.553.283 | | 9.488.968.842 | | 9.478.968.842 | | 9.615.172.128 | |
| 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 7.866.530.176 | | 7.169.957.546 | | 7.265.317.981 | | 7.265.317.981 | | 7.361.946.711 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Terlaksananya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 7.866.530.176 | 100 | 7.169.957.546 | 100 | 7.265.317.981 | 100 | 7.265.317.981 | 100 | 7.361.946.711 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | 856.862.000 | | 947.133.811 | | 959.730.691 | | 959.730.691 | | 972.495.109 | |
| Keterbukaan Informasi Publik | Keterbukaan Informasi Publik (Poin) | 75,65 | 77,65 | 79,65 | 856.862.000 | 81,65 | 947.133.811 | 83,65 | 959.730.691 | 85,65 | 959.730.691 | 87,65 | 972.495.109 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | 204.979.000 | | 1.237.461.926 | | 1.263.920.170 | | 1.253.920.170 | | 1.280.730.308 | |
| Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE | Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE (Indeks) | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 204.979.000 | 2,70 | 1.237.461.926 | 2,80 | 1.263.920.170 | 2,90 | 1.253.920.170 | 3,00 | 1.280.730.308 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | 7.000.052.053 | | 13.130.800.730 | | 14.705.440.379 | | 16.306.805.993 | | 21.902.406.513 | |
| 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 6.515.182.053 | | 5.465.736.516 | | 5.538.430.812 | | 5.538.430.812 | | 10.612.091.941 | |
| Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 6.515.182.053 | | 5.465.736.516 | | 5.538.430.812 | | 5.538.430.812 | | 10.612.091.941 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | 12.960.000 | | 374.615.543 | | 579.597.929 | | 379.597.929 | | 587.306.582 | |
| Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi | Persentase koperasi aktif (%) | - | - | - | 12.960.000 | - | 374.615.543 | - | 579.597.929 | - | 379.597.929 | - | 587.306.582 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | 191.700.000 | | 454.923.797 | | 660.974.283 | | 462.339.897 | | 671.149.017 | |
| Meningkatnya Produktifitas dan Sumber Daya Pengelola Usaha Koperasi | Persentase Peningkatan Pengurus /Keanggotaan Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%) | 27,66 | 26,35 | 45,00 | 191.700.000 | 50,00 | 454.923.797 | 57,00 | 660.974.283 | 60,00 | 462.339.897 | 70,00 | 671.149.017 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | 25.920.000 | | 3.173.361.638 | | 3.215.567.348 | | 4.215.567.348 | | 4.258.334.394 | |
| Meningkatnya Produktivitas, Kualitas dan Kelembagaan usaha Koperasi | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usah (%) | 100 | 100 | 100 | 25.920.000 | 100 | 3.173.361.638 | 100 | 3.215.567.348 | 100 | 4.215.567.348 | 100 | 4.258.334.394 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | 102.600.000 | | 3.075.802.168 | | 4.116.710.337 | | 5.116.710.337 | | 5.171.462.585 | |
| Meningkatnya Kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri | Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase) | 54,88 | 80,00 | 57,00 | 102.600.000 | 60,00 | 3.075.802.168 | 64,00 | 4.116.710.337 | 70,00 | 5.116.710.337 | 75,00 | 5.171.462.585 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | 151.690.000 | | 586.361.068 | | 594.159.670 | | 594.159.670 | | 602.061.994 | |
| Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah | Persentase Peningkatan UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran (%) | 100 | 56,59 | 100 | 151.690.000 | 100 | 586.361.068 | 100 | 594.159.670 | 100 | 594.159.670 | 100 | 602.061.994 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | 4.390.505.149 | | 6.013.079.856 | | 6.193.053.819 | | 6.193.053.819 | | 6.275.421.434 | |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.111.422.349 | | 3.816.394.629 | | 3.867.152.678 | | 3.867.152.678 | | 3.918.585.808 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---------------|------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) | 80 | 80 | 80 | 4.111.422.349 | 80 | 3.816.394.629 | 85 | 3.867.152.678 | 85 | 3.867.152.678 | 85 | 3.918.585.808 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | 32.271.000 | | 1.220.735.380 | | 1.236.971.161 | | 1.236.971.161 | | 1.253.422.877 | |
| Meningkatnya kerjasama investasi | Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi (%) | 25 | 5 | 5 | 32.271.000 | 5 | 1.220.735.380 | 5 | 1.236.971.161 | 5 | 1.236.971.161 | 5 | 1.253.422.877 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | 145.297.200 | | 492.901.194 | | 499.456.780 | | 499.456.780 | | 506.099.555 | |
| Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) (%) | 7,94 | 8 | 9 | 145.297.200 | 10 | 492.901.194 | 11 | 499.456.780 | 12 | 499.456.780 | 13 | 506.099.555 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | 64.638.000 | | 247.163.385 | | 350.450.658 | | 350.450.658 | | 355.111.652 | |
| Meningkatnya Realisasi Investasi | Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%) | 9,56 | 5 | 5 | 64.638.000 | 5 | 247.163.385 | 5 | 350.450.658 | 5 | 350.450.658 | 5 | 355.111.652 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | 36.876.600 | | 235.885.268 | | 239.022.542 | | 239.022.542 | | 242.201.542 | |
| Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin | Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan | 10 | 2 | 2 | 36.876.600 | 2 | 235.885.268 | 2 | 239.022.542 | 2 | 239.022.542 | 2 | 242.201.542 | Dinas Penanaman Modal dan |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------|------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| | Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (%) | | | | | | | | | | | | | Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | 4.408.172.100 | | 4.119.681.069 | | 5.174.472.827 | | 4.174.472.827 | | 7.156.696.092 | |
| 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | 349.812.600 | | 199.829.470 | | 1.202.487.202 | | 202.487.202 | | 3.131.883.058 | |
| Meningkatnya daya saing kepemudaan | Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%) | 0 | 5 | 10 | 349.812.600 | 15 | 199.829.470 | 20 | 1.202.487.202 | 25 | 202.487.202 | 25 | 3.131.883.058 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | 4.058.359.500 | | 3.919.851.599 | | 3.971.985.625 | | 3.971.985.625 | | 4.024.813.034 | |
| Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga | Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (%) | 4 | 5 | 6 | 4.058.359.500 | 7 | 3.919.851.599 | 8 | 3.971.985.625 | 9 | 3.971.985.625 | 9 | 4.024.813.034 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | 146.078.000 | | 283.851.239 | | 287.626.461 | | 287.626.461 | | 291.451.893 | |
| 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | 146.078.000 | | 283.851.239 | | 287.626.461 | | 287.626.461 | | 291.451.893 | |
| Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Poin) | 2,44 | 3,00 | 3,20 | 146.078.000 | 3,40 | 283.851.239 | 3,60 | 287.626.461 | 3,80 | 287.626.461 | 4,00 | 291.451.893 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | 196.990.000 | | 210.628.904 | | 213.430.269 | | 213.430.269 | | 216.268.891 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | 196.990.000 | | 210.628.904 | | 213.430.269 | | 213.430.269 | | 216.268.891 | |
| Penerapan pelaksanaan Standar Keamanan Informasi | Indeks Keamanan Informasi (Poin) | 0,5 | 1 | 2 | 196.990.000 | 2,5 | 210.628.904 | 3 | 213.430.269 | 4 | 213.430.269 | 4,5 | 216.268.891 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | 5.694.077.123 | | 6.020.187.834 | | 6.113.562.109 | | 6.185.991.319 | | 6.284.541.003 | |
| 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 5.201.946.123 | | 4.632.315.721 | | 4.693.925.520 | | 4.756.354.730 | | 4.819.614.247 | |
| Terlaksananya layanan administrasi perkantoran | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 5.201.946.123 | 100 | 4.632.315.721 | 100 | 4.693.925.520 | 100 | 4.756.354.730 | 100 | 4.819.614.247 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | 385.458.000 | | 613.903.795 | | 635.374.493 | | 645.374.493 | | 670.233.974 | |
| Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan | Cakupan Pengembangan Kebudayaan (%) | - | 10 | 10 | 385.458.000 | 10 | 613.903.795 | 10 | 635.374.493 | 10 | 645.374.493 | 10 | 670.233.974 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | 106.673.000 | | 773.968.318 | | 784.262.096 | | 784.262.096 | | 794.692.782 | |
| Terlaksananya Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya | Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (%) | 100 | 50 | 50 | 106.673.000 | 50 | 773.968.318 | 50 | 784.262.096 | 50 | 784.262.096 | 50 | 794.692.782 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | 5.137.793.052 | | 5.916.670.930 | | 6.710.608.713 | | 6.710.608.713 | | 6.799.859.809 | |
| 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN | | | | | 4.765.923.202 | | 4.418.583.031 | | 5.192.596.245 | | 5.192.596.245 | | 5.261.657.775 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 4.765.923.202 | 100 | 4.418.583.031 | 100 | 5.192.596.245 | 100 | 5.192.596.245 | 100 | 5.261.657.775 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | 352.947.850 | | 1.498.087.899 | | 1.518.012.468 | | 1.518.012.468 | | 1.538.202.034 | |
| Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | Perpustakaan yang telah terakreditasi (Perpustakaan) | 6 | 6 | 6 | 352.947.850 | 6 | 1.498.087.899 | 6 | 1.518.012.468 | 6 | 1.518.012.468 | 6 | 1.538.202.034 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | | 18.922.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%) | - | - | - | 18.922.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | 414.911.826 | | 397.107.548 | | 1.102.389.077 | | 902.389.077 | | 1.117.050.853 | |
| 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | 397.301.163 | | 183.544.306 | | 185.985.445 | | 185.985.445 | | 188.459.052 | |
| Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis | Bertambahnya arsip yang diolah (Berkas) | 186 | 186 | 186 | 397.301.163 | 186 | 183.544.306 | 186 | 185.985.445 | 186 | 185.985.445 | 186 | 188.459.052 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | | 17.610.663 | | 110.100.626 | | 411.564.964 | | 211.564.964 | | 417.038.778 | |
| meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | Bertambahnya perlindungan dan penyelamatan arsip (Arsip) | 120 | 125 | 130 | 17.610.663 | 135 | 110.100.626 | 140 | 411.564.964 | 145 | 211.564.964 | 150 | 417.038.778 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | | | | | 0 | | 103.462.616 | | 504.838.668 | | 504.838.668 | | 511.553.023 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------|--------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup | Bertambahnya perijinan penggunaan arsip (Layanan) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 103.462.616 | 1 | 504.838.668 | 1 | 504.838.668 | 1 | 511.553.023 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | 5.275.197.787 | | 5.751.732.289 | | 6.328.230.329 | | 6.588.970.814 | | 6.412.395.793 | |
| 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.285.199.587 | | 3.912.314.797 | | 3.964.348.584 | | 4.725.089.069 | | 4.017.074.420 | |
| Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkata Daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 4.285.199.587 | 100 | 3.912.314.797 | 100 | 3.964.348.584 | 100 | 4.725.089.069 | 100 | 4.017.074.420 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | 289.998.350 | | 468.505.533 | | 974.736.656 | | 474.736.656 | | 987.700.654 | |
| Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 2.488,24 | 2,48 8,24 | 2,52 1,47 | 289.998.350 | 2,55 9,40 | 468.505.533 | 2,59 9,4 | 974.736.656 | 2,64 9,4 | 474.736.656 | 2,64 9,4 | 987.700.654 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | 554.998.950 | | 1.144.948.553 | | 1.160.176.369 | | 1.160.176.369 | | 1.175.606.715 | |
| Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 913,62 | 913, 62 | 928, 60 | 554.998.950 | 944, 70 | 1.144.948.553 | 962, 90 | 1.160.176.369 | 981, 80 | 1.160.176.369 | 981, 80 | 1.175.606.715 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | 145.000.900 | | 225.963.406 | | 228.968.720 | | 228.968.720 | | 232.014.004 | |
| Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat | Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun (Kg/KAP/TH) | 53,21 | 53,2 1 | 54,9 9 | 0 | 58,1 5 | 0 | 61,7 0 | 0 | 65,4 9 | 0 | 65,4 9 | 0 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan | Persentase Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (%) | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 145.000.900 | 1,35 | 225.963.406 | 1,38 | 228.968.720 | 1,65 | 228.968.720 | 1,65 | 232.014.004 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | 2.231.820.000 | | 13.277.995.367 | | 9.331.391.071 | | 9.454.592.705 | | 9.455.498.573 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | 743.320.000 | | 11.143.910.154 | | 6.168.922.525 | | 6.292.124.159 | | 6.250.969.195 | |
| Meningkatnya Kualitas daya tarik Destinasi Pariwisata | Persentase Pengembangan ODTW (%) | 32 | 10 | 10 | 743.320.000 | 10 | 11.143.910.154 | 10 | 6.168.922.525 | 10 | 6.292.124.159 | 10 | 6.250.969.195 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | 1.201.400.000 | | 1.869.112.545 | | 1.893.971.742 | | 1.893.971.742 | | 1.919.161.566 | |
| Meningkatnya pemasaran pariwisata melalui promosi | Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan (%) | - | 100 | 100 | 1.201.400.000 | 100 | 1.869.112.545 | 100 | 1.893.971.742 | 100 | 1.893.971.742 | 100 | 1.919.161.566 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | 36.500.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase) | - | - | - | 36.500.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | 250.600.000 | | 264.972.668 | | 1.268.496.804 | | 1.268.496.804 | | 1.285.367.812 | |
| Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlibat (%) | 21,6 | 30 | 30 | 250.600.000 | 30 | 264.972.668 | 30 | 1.268.496.804 | 30 | 1.268.496.804 | 30 | 1.285.367.812 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | 18.375.420.176 | | 25.153.188.489 | | 26.187.725.897 | | 26.187.725.897 | | 26.536.022.650 | |
| 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 14.112.315.151 | | 13.312.470.726 | | 13.489.526.587 | | 13.489.526.587 | | 13.668.937.290 | |
| Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 14.112.315.151 | | 13.312.470.726 | | 13.489.526.587 | | 13.489.526.587 | | 13.668.937.290 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | 2.455.919.926 | | 4.312.985.691 | | 4.370.348.400 | | 4.370.348.400 | | 4.428.474.034 | |
| Meningkatnya penyediaan sarana pertanian yang memadai | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Angka) | 2,02 | 8,21 | 8,25 | 2.455.919.926 | 8,27 | 4.312.985.691 | 8,30 | 4.370.348.400 | 8,33 | 4.370.348.400 | 8,36 | 4.428.474.034 | Dinas Pertanian |
| | Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (Angka) | 31,73 | 29,46 | 29,50 | | 29,54 | | 29,58 | | 29,62 | | 29,62 | | Dinas Pertanian |
| | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Angka) | 40,08 | 54,70 | 54,74 | | 54,78 | | 54,82 | | 54,86 | | 54,86 | | Dinas Pertanian |
| 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | 1.154.655.075 | | 6.182.677.814 | | 6.264.907.429 | | 6.264.907.429 | | 6.348.230.698 | |
| Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian yang memadai | Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik (%) | 50 | 52 | 54 | 1.154.655.075 | 56 | 6.182.677.814 | 58 | 6.264.907.429 | 60 | 6.264.907.429 | 60 | 6.348.230.698 | Dinas Pertanian |
| 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | 135.570.842 | | 139.325.509 | | 141.178.539 | | 141.178.539 | | 143.056.213 | |
| Menurunnya kejadian dan kasus penyakit menular hewan ternak | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%) | 57,34 | 58,36 | 59,38 | 135.570.842 | 60,40 | 139.325.509 | 61,42 | 141.178.539 | 62,44 | 141.178.539 | 62,44 | 143.056.213 | Dinas Pertanian |
| 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | 25.281.000 | | 329.167.596 | | 533.545.525 | | 533.545.525 | | 540.641.681 | |
| Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%) | 100 | 100 | 100 | 25.281.000 | 100 | 329.167.596 | 100 | 533.545.525 | 100 | 533.545.525 | 100 | 540.641.681 | Dinas Pertanian |
| | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%) | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Pertanian |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | | 43.530.000 | | 139.187.264 | | 641.038.455 | | 641.038.455 | | 649.564.266 | |
| Meningkatnya pelayanan teknis perizinan pertanian | Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian (%) | 100 | 100 | 100 | 43.530.000 | 100 | 139.187.264 | 100 | 641.038.455 | 100 | 641.038.455 | 100 | 649.564.266 | Dinas Pertanian |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | 448.148.182 | | 737.373.889 | | 747.180.962 | | 747.180.962 | | 757.118.468 | |
| Meningkatnya SDM pelaku utama pembangunan pertanian sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better farming) dan berusaha tani lebih menguntungkan (better bussines) | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%) | 5 | 10 | 15 | 448.148.182 | 20 | 737.373.889 | 25 | 747.180.962 | 30 | 747.180.962 | 30 | 757.118.468 | Dinas Pertanian |
| 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | 229.597.000 | | 8.647.362.674 | | 3.762.372.598 | | 3.762.372.598 | | 18.812.412.153 | |
| 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | 26.500.000 | | 8.202.660.000 | | 3.311.755.378 | | 3.311.755.378 | | 18.355.801.725 | |
| Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | Prasarana Pasar yang dibangun/ direvitalisasi/ Direhabilitasi (%) | 0 | 0 | 1 | 26.500.000 | 1 | 8.202.660.000 | 1 | 3.311.755.378 | 1 | 3.311.755.378 | 1 | 18.355.801.725 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | 113.400.000 | | 263.086.935 | | 266.585.992 | | 266.585.992 | | 270.131.585 | |
| Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya | | | | | 113.400.000 | | 263.086.935 | | 266.585.992 | | 266.585.992 | | 270.131.585 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|----------------|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya | Persentase terkendalinya Harga, dan Persediaan/ Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota Bima (%) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | 89.697.000 | | 181.615.739 | | 184.031.228 | | 184.031.228 | | 186.478.843 | |
| Meningkatnya Pelayanan, perlindungan konsumen dan kemetrolagian | | | | | 89.697.000 | | 181.615.739 | | 184.031.228 | | 184.031.228 | | 186.478.843 | |
| Meningkatnya Pelayanan, perlindungan konsumen dan kemetrolagian | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan (%) | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0 | 0,23 | 0 | 0,25 | 0 | 0,36 | 0 | 0,45 | 0 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | 842.059.700 | | 582.518.721 | | 790.266.220 | | 790.266.220 | | 11.100.776.762 | |
| 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | 831.259.700 | | 472.317.369 | | 478.599.190 | | 478.599.190 | | 10.484.964.560 | |
| Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase) | - | - | - | 831.259.700 | - | 472.317.369 | - | 478.599.190 | - | 478.599.190 | - | 10.484.964.560 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
| 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | 10.800.000 | | 110.201.352 | | 311.667.030 | | 311.667.030 | | 615.812.202 | |
| Tersedianya Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri | | | | | 10.800.000 | | 110.201.352 | | 311.667.030 | | 311.667.030 | | 615.812.202 | |
| Persentase terlaksananya Penyusunan Data IKM dan | Persentase Ketersediaan Dokumentasi Rencana | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Dinas Koperasi, Perindustrian |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | | | |
| Sentra serta Profile IKM dan Profil Sentra IKM | Pembangunan Industri (%) | | | | | | | | | | | | | dan Perdagangan |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 44.504.805.173 | | 34.165.235.039 | | 34.619.632.666 | | 34.619.632.666 | | 35.080.073.779 | |
| 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 30.456.464.381 | | 25.797.286.892 | | 26.140.390.808 | | 26.140.390.808 | | 26.488.058.005 | |
| Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (%) | 100 | 100 | 100 | 30.456.464.381 | 100 | 25.797.286.892 | 100 | 26.140.390.808 | 100 | 26.140.390.808 | 100 | 26.488.058.005 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | 11.262.703.550 | | 6.162.172.017 | | 6.244.128.905 | | 6.244.128.905 | | 6.327.175.819 | |
| Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Presentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (%) | 100 | 100 | 100 | 11.262.703.550 | 100 | 6.162.172.017 | 100 | 6.244.128.905 | 100 | 6.244.128.905 | 100 | 6.327.175.819 | Sekretariat Daerah |
| 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | 2.785.637.242 | | 2.205.776.130 | | 2.235.112.953 | | 2.235.112.953 | | 2.264.839.955 | |
| Meningkatnya Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan (%) | 100 | 100 | 100 | 2.785.637.242 | 100 | 2.205.776.130 | 100 | 2.235.112.953 | 100 | 2.235.112.953 | 100 | 2.264.839.955 | Sekretariat Daerah |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | 24.992.877.387 | | 25.243.325.263 | | 25.385.710.248 | | 25.579.061.489 | | 25.723.340.194 | |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 17.854.232.387 | | 19.467.222.158 | | 19.532.784.972 | | 19.726.136.213 | | 19.792.571.012 | |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima | Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun (%) | 100 | 100 | 100 | 17.854.232.387 | 100 | 19.467.222.158 | 100 | 19.532.784.972 | 100 | 19.726.136.213 | 100 | 19.792.571.012 | Sekretariat DPRD |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN | | | | | 7.138.645.000 | | 5.776.103.105 | | 5.852.925.276 | | 5.852.925.276 | | 5.930.769.182 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun (%) | 100 | 100 | 100 | 7.138.645.000 | 100 | 5.776.103.105 | 100 | 5.852.925.276 | 100 | 5.852.925.276 | 100 | 5.930.769.182 | Sekretariat DPRD |
| 5.01 - PERENCANAAN | | | | | 7.670.826.002 | | 7.437.240.344 | | 7.536.155.640 | | 7.536.155.640 | | 7.636.386.511 | |
| 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 6.222.653.277 | | 5.572.314.206 | | 5.646.425.985 | | 5.646.425.985 | | 5.721.523.451 | |
| Tercapainya indikator kinerja layanan Penunjang Perangkat Daerah | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 6.222.653.277 | 100 | 5.572.314.206 | 100 | 5.646.425.985 | 100 | 5.646.425.985 | 100 | 5.721.523.451 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 306.093.000 | | 539.555.854 | | 546.731.947 | | 546.731.947 | | 554.003.482 | |
| Meningkatnya hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti | Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian dan Monev yang ditindaklanjuti (%) | 65 | 65 | 65,25 | 306.093.000 | 65,5 | 539.555.854 | 65,75 | 546.731.947 | 66 | 546.731.947 | 66 | 554.003.482 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perencanaan | Persentase capaian kinerja perangkat daerah (%) | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 1.142.079.725 | | 1.325.370.284 | | 1.342.997.708 | | 1.342.997.708 | | 1.360.859.578 | |
| Meningkatnya Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah | Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan | 80,25 | 80,25 | 81,25 | 1.142.079.725 | 82,25 | 1.325.370.284 | 83,25 | 1.342.997.708 | 84,25 | 1.342.997.708 | 84,25 | 1.360.859.578 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | dan pembangunan manusia (%) | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) | Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) (%) | 95 | 95 | 95,25 | 0 | 95,50 | 0 | 95,75 | 0 | 96,00 | 0 | 96,00 | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Meningkatnya Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (%) | 95 | 95 | 95,25 | 0 | 95,50 | 0 | 95,75 | 0 | 96,00 | 0 | 96,00 | 0 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5.02 - KEUANGAN | | | | | 20.760.732.196 | | 21.042.537.983 | | 20.822.403.739 | | 21.322.403.739 | | 21.099.341.708 | |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 14.807.347.896 | | 13.686.120.432 | | 13.868.145.834 | | 13.868.145.834 | | 14.052.592.173 | |
| Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 14.807.347.896 | 100 | 13.686.120.432 | 100 | 13.868.145.834 | 100 | 13.868.145.834 | 100 | 14.052.592.173 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | 3.894.988.000 | | 3.981.115.259 | | 3.534.064.092 | | 4.034.064.092 | | 3.581.067.144 | |
| Meningkatnya Pengendalian Tata Kelola Keuangan PD | Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik (%) | 100 | 100 | 100 | 3.894.988.000 | 100 | 3.981.115.259 | 100 | 3.534.064.092 | 100 | 4.034.064.092 | 100 | 3.581.067.144 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | 504.676.200 | | 1.150.304.730 | | 1.165.603.783 | | 1.165.603.783 | | 1.181.106.314 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Aset PD | Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate (%) | 100 | 100 | 100 | 504.676.200 | 100 | 1.150.304.730 | 100 | 1.165.603.783 | 100 | 1.165.603.783 | 100 | 1.181.106.314 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | 1.553.720.100 | | 2.224.997.562 | | 2.254.590.030 | | 2.254.590.030 | | 2.284.576.077 | |
| Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rasio Pendapatan Asli Daerah (%) | 6,65 | 7 | 7 | 1.553.720.100 | 8 | 2.224.997.562 | 8 | 2.254.590.030 | 8 | 2.254.590.030 | 9 | 2.284.576.077 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.03 - KEPEGAWAIAN | | | | | 8.775.908.572 | | 7.958.638.324 | | 6.064.488.213 | | 6.064.488.213 | | 6.630.156.847 | |
| 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 6.191.118.572 | | 4.872.684.585 | | 4.937.491.290 | | 4.937.491.290 | | 5.003.159.924 | |
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%) | 100 | 100 | 100 | 6.191.118.572 | 100 | 4.872.684.585 | 100 | 4.937.491.290 | 100 | 4.937.491.290 | 100 | 5.003.159.924 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | 2.584.790.000 | | 3.085.953.739 | | 1.126.996.923 | | 1.126.996.923 | | 1.626.996.923 | |
| Meningkatnya Penerapan NSPK dalam manajemen kepegawaian | Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN (Angka) | 70,17 | 70,01 | 71,01 | 2.584.790.000 | 72,01 | 3.085.953.739 | 73,01 | 1.126.996.923 | 74,01 | 1.126.996.923 | 74,01 | 1.626.996.923 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | 885.806.750 | | 3.809.366.388 | | 1.860.030.961 | | 1.860.030.961 | | 1.884.769.373 | |
| 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | 885.806.750 | | 3.809.366.388 | | 1.860.030.961 | | 1.860.030.961 | | 1.884.769.373 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Meningkatnya ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan | persentase peningkatan ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan (%) | 25 | 25 | 25 | 885.806.750 | 25 | 3.809.366.388 | 25 | 1.860.030.961 | 25 | 1.860.030.961 | 25 | 1.884.769.373 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | 4.165.518.340 | | 4.021.215.734 | | 4.074.697.903 | | 4.074.697.903 | | 4.628.891.385 | |
| 5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 2.860.383.340 | | 2.530.725.465 | | 2.564.384.114 | | 2.564.384.114 | | 2.598.490.422 | |
| Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 2.860.383.340 | 100 | 2.530.725.465 | 100 | 2.564.384.114 | 100 | 2.564.384.114 | 100 | 2.598.490.422 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | 1.305.135.000 | | 1.490.490.269 | | 1.510.313.789 | | 1.510.313.789 | | 2.030.400.963 | |
| Meningkatnya jumlah inovasi daerah yang mendapat penghargaan tingkat provinsi atau nasional | Jumlah Inovasi daerah yang mendapat penghargaan tingkat provinsi dan nasional (Angka) | 3 | 4 | 5 | 1.305.135.000 | 6 | 1.490.490.269 | 7 | 1.510.313.789 | 8 | 1.510.313.789 | 8 | 2.030.400.963 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| Meningkatnya jumlah riset dan inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja | Jumlah Riset yang memberi Kontribusi pada Peningkatan Kinerja (Angka) | 10 | 10 | 15 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | Jumlah Inovasi yang memberi Kontribusi pada Peningkatan Kinerja (Angka) | 16 | 18 | 20 | | 22 | | 24 | | 26 | | 30 | | |
| 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH | | | | | 11.408.621.575 | | 10.760.489.530 | | 10.903.604.040 | | 11.903.604.040 | | 12.048.621.975 | |
| 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 10.556.386.325 | | 9.318.164.754 | | 9.442.096.345 | | 9.442.096.345 | | 9.567.676.227 | |
| Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota | Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%) | 100 | 100 | 100 | 10.556.386.325 | 100 | 9.318.164.754 | 100 | 9.442.096.345 | 100 | 9.442.096.345 | 100 | 9.567.676.227 | Inspektorat |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | 585.985.600 | | 695.062.960 | | 704.307.297 | | 1.204.307.297 | | 1.213.674.584 | |
| Peningkatan Penyelesaian rekomendasi TL temuan | Peningkatan Penyelesaian rekomendasi TL temuan (%) | 10,36 | 10,36 | 9,42 | 585.985.600 | 8,73 | 695.062.960 | 8,21 | 704.307.297 | 7,82 | 1.204.307.297 | 7,82 | 1.213.674.584 | Inspektorat |
| 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | 266.249.650 | | 747.261.816 | | 757.200.398 | | 1.257.200.398 | | 1.267.271.164 | |
| Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP | Nilai Kapabilitas APIP (Level) | 3 | 3 | 3 | 266.249.650 | 3 | 747.261.816 | 3 | 757.200.398 | 3 | 1.257.200.398 | 3 | 1.267.271.164 | Inspektorat |
| 7.01 - KECAMATAN | | | | | 73.848.741.520 | | 74.138.686.635 | | 79.623.421.300 | | 75.824.731.167 | | 81.182.412.805 | |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 54.165.166.475 | | 50.149.754.020 | | 54.615.435.881 | | 50.816.745.748 | | 55.341.821.178 | |
| Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Rasanae Timur | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 9.875.516.058 | 100 | 9.100.826.250 | 100 | 9.221.867.239 | 100 | 9.221.867.239 | 100 | 9.344.518.073 | Kecamatan RasanaE Timur |
| Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Asakota | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 8.607.204.724 | 100 | 7.899.551.279 | 100 | 9.990.199.221 | 100 | 8.004.615.311 | 100 | 10.123.068.871 | Kecamatan Asakota |
| Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Mpunda | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 97 | 97 | 97,50 | 12.741.189.640 | 97,60 | 11.607.652.104 | 98 | 11.762.033.877 | 98,10 | 11.762.033.877 | 98,50 | 11.918.468.928 | Kecamatan Mpunda |
| Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Raba | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 14.605.473.931 | 100 | 13.841.735.182 | 100 | 14.025.830.260 | 100 | 14.025.830.260 | 100 | 14.212.373.802 | Kecamatan Raba |
| Kesesuaian program antar Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kesesuaian program antar Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) | 72 | 100 | 100 | 8.335.782.122 | 100 | 7.699.989.205 | 100 | 9.615.505.284 | 100 | 7.802.399.061 | 100 | 9.743.391.504 | Kecamatan RasanaE Barat |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 141.966.400 | | 114.596.001 | | 616.120.129 | | 616.120.129 | | 624.314.526 | |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Rasanae Timur | Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.454.642 | 100 | 110.593.689 | 100 | 110.593.689 | 100 | 112.064.585 | Kecamatan RasanaE Timur |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Asakota | Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) | 80 | 80,25 | 80,50 | 18.387.000 | 80,75 | 18.879.860 | 81 | 119.130.962 | 81,25 | 119.130.962 | 81,5 | 120.715.404 | Kecamatan Asakota |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Mpunda | Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik (%) | 98 | 98,10 | 98,20 | 60.072.000 | 98,50 | 44.153.460 | 98,70 | 144.740.701 | 99 | 144.740.701 | 99,20 | 146.665.752 | Kecamatan Mpunda |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Raba | Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik (%) | 100 | 100 | 100 | 13.724.100 | 100 | 13.906.666 | 100 | 114.091.625 | 100 | 114.091.625 | 100 | 115.609.043 | Kecamatan Raba |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) | 80 | 80,25 | 80,50 | | 80,75 | | 81 | | 81,25 | | 81,5 | | Kecamatan Raba |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) | 72,3 | 76 | 77 | 49.783.300 | 78 | 27.201.373 | 79 | 127.563.152 | 81,5 | 127.563.152 | 81,5 | 129.259.742 | Kecamatan RasanaE Barat |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 19.248.382.645 | | 22.263.448.719 | | 22.559.552.588 | | 22.559.552.588 | | 22.859.594.638 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Rasanae Timur | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga) | 15 | 15 | 15 | 3.165.651.920 | 15 | 3.803.037.219 | 15 | 3.853.617.614 | 15 | 3.853.617.614 | 15 | 3.904.870.729 | Kecamatan RasanaE Timur |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Asakota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga) | 15 | 15 | 15 | 3.757.104.900 | 15 | 4.343.443.039 | 15 | 4.401.210.832 | 15 | 4.401.210.832 | 15 | 4.459.746.936 | Kecamatan Asakota |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Mpunda | Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%) | 91 | 91,5 | 92 | 4.246.273.550 | 93 | 4.734.746.069 | 93,60 | 4.797.718.192 | 94 | 4.797.718.192 | 95 | 4.861.527.844 | Kecamatan Mpunda |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Raba | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga) | 15 | 15 | 15 | 4.979.632.275 | 15 | 5.563.885.838 | 15 | 5.637.885.519 | 15 | 5.637.885.519 | 15 | 5.712.869.397 | Kecamatan Raba |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga) | - | - | - | 3.099.720.000 | - | 3.818.336.554 | - | 3.869.120.431 | - | 3.869.120.431 | - | 3.920.579.732 | Kecamatan RasanaE Barat |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 277.220.000 | | 1.610.887.895 | | 1.832.312.702 | | 1.832.312.702 | | 2.356.682.463 | |
| Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, | Jumlah Kasus Gangguan Keamanan Ketertiban dan ketentraman di | 75 | 70 | 65 | 113.475.000 | 60 | 372.793.672 | 55 | 377.751.827 | 50 | 377.751.827 | 50 | 382.775.927 | Kecamatan RasanaE Timur |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---------------|------|---------------------------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| dan Lurah) Kecamatan Rasanae Timur | Wilayah Kecamatan (Angka) | | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Asakota | Jumlah Kasus Gangguan Keamanan Ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan (Angka) | 10 | 9 | 8 | 1.705.000 | 7 | 340.038.257 | 6 | 344.560.765 | 5 | 344.560.765 | 4 | 349.143.424 | Kecamatan Asakota |
| Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Mpunda | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (%) | 89 | 90 | 92 | 38.040.000 | 93 | 323.520.702 | 95 | 327.823.527 | 96 | 327.823.527 | 97 | 332.183.580 | Kecamatan Mpunda |
| Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Raba | Jumlah kasus Gangguan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman (%) | 30 | 5 | 5 | 58.000.000 | 5 | 196.196.997 | 5 | 398.806.417 | 5 | 398.806.417 | 5 | 404.110.543 | Kecamatan Raba |
| Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) di Kecamatan Rasanae Barat | Presentase penurunan jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman di wilayah kecamatan rasanae barat (%) | 32 | 5 | 5 | 66.000.000 | 5 | 378.338.267 | 5 | 383.370.166 | 5 | 383.370.166 | 5 | 888.468.989 | Kecamatan RasanaE Barat |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 16.006.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan wawasan Kebangsaan di tingkat Kecamatan (%) | - | - | - | 14.070.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Kecamatan Mpunda |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan wawasan | - | - | - | 1.936.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Kecamatan Asakota |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------|------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----|---------------|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | | | |
| | Kebangsaan di tingkat Kecamatan (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 8.553.890.125 | | 8.689.631.361 | | 8.805.203.458 | | 8.805.203.458 | | 8.922.312.664 | |
| 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 3.939.280.375 | | 3.703.412.088 | | 3.752.667.469 | | 3.752.667.469 | | 3.802.577.946 | |
| Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 3.939.280.375 | 100 | 3.703.412.088 | 100 | 3.752.667.469 | 100 | 3.752.667.469 | 100 | 3.802.577.946 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | 432.560.650 | | 473.089.506 | | 479.381.596 | | 479.381.596 | | 485.757.371 | |
| Meningkatnya Pemahaman tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa (%) | 75 | 88 | 100 | 432.560.650 | 100 | 473.089.506 | 100 | 479.381.596 | 100 | 479.381.596 | 100 | 485.757.371 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | 1.355.448.000 | | 1.462.084.661 | | 1.481.530.387 | | 1.481.530.387 | | 1.501.234.742 | |
| Meningkatnya Partisipasi Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%) | 60 | 80 | 80 | 1.355.448.000 | 80 | 1.462.084.661 | 80 | 1.481.530.387 | 80 | 1.481.530.387 | 80 | 1.501.234.742 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | 1.023.463.150 | | 1.342.061.800 | | 1.359.911.222 | | 1.359.911.222 | | 1.377.998.041 | |



| Bidang Urusan / Program / Outcome | Indikator Outcome | Baseline 2024 | 2025 | Target Dan Pagu Indikatif Tahun | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------|------|---------------------------------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|----|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2026 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | | | |
| Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%) | 91 | 91 | 94 | 1.023.463.150 | 94 | 1.342.061.800 | 94 | 1.359.911.222 | 94 | 1.359.911.222 | 94 | 1.377.998.041 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | 100.833.500 | | 79.530.031 | | 80.587.780 | | 80.587.780 | | 81.659.598 | |
| Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%) | 65 | 69 | 83 | 100.833.500 | 83 | 79.530.031 | 83 | 80.587.780 | 83 | 80.587.780 | 83 | 81.659.598 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | 1.702.304.450 | | 1.629.453.275 | | 1.651.125.004 | | 1.651.125.004 | | 1.673.084.966 | |
| Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase konflik sosial yang tertangani (%) | 67 | 78 | 76 | 1.702.304.450 | 67 | 1.629.453.275 | 62 | 1.651.125.004 | 58 | 1.651.125.004 | 58 | 1.673.084.966 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| TOTAL KESELURUHAN | | | | | 896.061.081.032 | | 906.133.878.463 | | 915.376.995.890 | | 933.085.261.764 | | 958.117.165.394 | |

Sumber : Bappeda, Hasil Analisis



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Ukuran keberhasilan suatu daerah diukur dari indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan antara target yang diinginkan dengan hasil atau realisasi yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran).

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program Pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Selanjutnya, Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.



Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dijabarkan dalam dua indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bima dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal ini adalah indikator tujuan RPJMD yang menggambarkan dampak final/akhir (final impact) dari pembangunan sebagai agregasi dari hasil (outcome) multi-urusan pemerintahan daerah.

Secara umum indikator kinerja daerah menggambarkan tingkat keberhasilan dalam 4 aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Indikator Kinerja Kunci (IKK) menggambarkan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi: 1) aspek geografi dan demografi; 2) aspek kesejahteraan; 3) aspek daya saing; 3) aspek pelayanan umum yang terdiri fokus layanan urusan pemerintahan wajib dan fokus layanan urusan pemerintahan pilihan. Gambaran lengkap ukuran keberhasilan pembangunan Kota Bima periode 2025 – 2030, dapat dilihat pada tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kota Bima dan tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030.



Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Kota Bima Tahun 2025-2030

| No | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | |
|----|---|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Persentase penurunan gangguan ketertiban dan ketentraman | % | 5,14 | 5,39 | 5,64 | 5,89 | 6,14 | 6,39 | 6,64 |
| 2 | Indeks Kerukukan Umat Beragama | Indeks | 72,04 | 73,48 | 73,85 | 74,22 | 74,59 | 74,96 | 74,96 |
| 3 | Persentase warisan budaya tak benda terhadap total pencatatan yang telah ditetapkan | % | 4,88 | 4,88 | 5,00 | 5,12 | 5,23 | 5,35 | 5,35 |
| 4 | Indeks SPM Pendidikan | Indeks | 76,21 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| 5 | Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun | Tahun | 10,96 | 11,19 | 11,34 | 11,48 | 11,63 | 11,78 | 11,93 |
| 6 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 15,08 | 15,35 | 15,43 | 15,51 | 15,59 | 15,67 | 15,75 |
| 7 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Dan Tinggi Yang Bekerja | % | 59,88 | 68,39 | 69,81 | 71,23 | 72,66 | 74,08 | 75,50 |
| 8 | Rasio ketergantungan (KB) | % | 48,2 | 47,5 | 46,8 | 46,1 | 45,4 | 44,7 | 44,7 |
| 9 | Proporsi penduduk 15 tahun ke atas berkualifikasi pendidikan tinggi | % | 22,11 | 23,6 | 23,77 | 23,94 | 24,1 | 24,27 | 24,27 |
| 10 | Umur Harapan Hidup | Tahun | 73,15 | 73,88 | 74,18 | 74,47 | 74,76 | 75,06 | 75,06 |
| 11 | Jumlah orang berprestasi Tingkat Nasional dan Regional | Angka | 36 | 45 | 182 | 56 | 66 | 190 | 190 |
| 12 | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 96,9 | 96,92 | 96,94 | 96,95 | 96,96 | 96,97 | 96,97 |
| 13 | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | Indeks | 72,89 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 |



| No | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | |
|----|---|-------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 14 | Indeks Ketahanan daerah | Indeks | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 |
| 15 | Indeks Kualitas Lingkungan hidup | Indeks | 60,25 | 62,07 | 63,15 | 64,22 | 65,3 | 66,38 | 66,38 |
| 16 | Indeks Infrastruktur wilayah | Indeks | 76,22 | 77,74 | 79,3 | 80,88 | 82,5 | 84,15 | 84,15 |
| 17 | Persentase Kawasan kumuh | % | 4,41 | 4,32 | 4,23 | 4,14 | 4,05 | 3,96 | 3,96 |
| 18 | Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 75,53 | 75,62 | 76,29 | 76,96 | 77,64 | 78,32 | 78,32 |
| 19 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 73,21 | 73,83 | 74,46 | 75,08 | 75,71 | 76,33 | 76,96 |
| 20 | PDRB per kapita - ADHB | juta Rupiah | 32,48 | 35,14 | 38,55 | 41,54 | 44,91 | 48,58 | 53,21 |
| 21 | Proporsi kontribusi PDRB wilayah Kota terhadap Provinsi | % | 2,91 | 3,02 | 3,04 | 3,06 | 3,08 | 3,09 | 3,09 |
| 22 | Pertumbuhan ekonomi | % | 4,04 | 5,26 | 5,32 | 5,37 | 5,42 | 5,48 | 5,48 |
| 23 | Tingkat kemiskinan | % | 8,12 | 7,82 | 7,57 | 7,32 | 7,07 | 6,82 | 6,82 |

Sumber: Bappeda, Hasil Analisis



Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030

| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|----------|--|----------------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| I | ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan | Angka | 75,53 | 75,62 | 76,29 | 76,96 | 77,64 | 78,32 | 79,01 | IUP 43b |
| 2 | Konsumsi Listrik per Kapita | kWh/ Kapita | 593,38 | 637,91 | 653,86 | 670,20 | 686,96 | 704,13 | 721,73 | IUP 43a |
| 3 | AKSES RUMAH TANGGA PERKOTAAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK | Persen | 29,63 | 30,00 | 32,50 | 35,00 | 37,50 | 40,00 | 42,50 | IUP 43c |
| 4 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 64,50 | 62,07 | 63,15 | 64,22 | 65,30 | 66,38 | 67,45 | IUP 42a |
| 5 | RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN | Persen | 92,65 | 93,30 | 93,64 | 93,97 | 94,31 | 94,64 | 94,98 | IUP 42b |
| 6 | TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH | Persen | 6,93 | 8,54 | 11,56 | 14,57 | 17,59 | 20,60 | 23,62 | IUP 42c |
| 7 | PROPORSI RUMAH TANGGA (RT) DENGAN LAYANAN PENUH PENGUMPULAN SAMPAH | Persen | 72,00 | 74,55 | 75,82 | 77,10 | 78,37 | 79,64 | 80,91 | IUP 42c |
| 8 | PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK | Persen | 0,79 | 0,79 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,21 | 1,31 | IUP 44 |
| 9 | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 91.74 | 90,17 | 89,27 | 88,37 | 87,49 | 86,62 | 85,75 | IUP 45 |
| 10 | PERSENTASE RTH TERHADAP LUAS WILAYAH DARATAN (PERSEN) | Persen | 0,39 | 0,50 | 0,85 | 1,20 | 1,55 | 1,89 | 2,24 | IUP 41 |
| | | | | | | | | | | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----------|--|-------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| II | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | |
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,04 | 5,26 | 5,32 | 5,37 | 5,42 | 5,48 | 5,48 | Sasaran Visi |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 8,12 | 7,82 | 7,57 | 7,32 | 7,07 | 6,82 | 6,82 | IUP 8 |
| 3 | PDRB Per Kapita | juta Rupiah | 32,48 | 35,14 | 38,55 | 41,54 | 44,91 | 48,58 | 53,21 | Sasaran Visi |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,27 | 3,18 | 3,15 | 3,11 | 3,08 | 3,05 | 3,02 | IUP 15 |
| 5 | Indeks Gini | Angka | 0,380 | 0,380 | 0,376 | 0,372 | 0,368 | 0,364 | 0,360 | Sasaran Visi |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 78,91 | 78,15 | 78,55 | 78,95 | 79,36 | 79,76 | 80,17 | Sasaran Visi |
| 7 | Usia Harapan Hidup | Tahun | 73,15 | 73,88 | 74,18 | 74,47 | 74,76 | 75,06 | 75,35 | IUP 1 |
| 8 | Prevalensi Stunting | Persen | 28,40 | 28,05 | 27,05 | 26,05 | 25,04 | 24,04 | 23,04 | IUP 2b |
| 9 | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 10,96 | 11,19 | 11,34 | 11,48 | 11,63 | 11,78 | 11,93 | IUP 5c |
| 10 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 15,08 | 15,35 | 15,43 | 15,51 | 15,59 | 15,67 | 15,75 | IUP 5d |
| 14 | CAKUPAN KEPERSERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN/KOTA | % | 56,05 | 28,97 | 32,50 | 36,03 | 39,55 | 43,08 | 46,60 | IUP 9 |
| 15 | INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB) | Angka | 76,47 | 73,48 | 73,85 | 74,22 | 74,59 | 74,96 | 75,34 | Sasaran Visi |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|--|--------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 16 | INDEKS PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA (iBangga) | Angka | 64,67 | 64,99 | 65,38 | 65,77 | 66,16 | 66,55 | 66,95 | IUP 39 |
| 17 | INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG) | Angka | 0,458 | 0,452 | 0,443 | 0,434 | 0,425 | 0,417 | 0,408 | IUP 40 |
| 18 | PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS BEKERJA | Persen | 3,20 | 6,42 | 7,87 | 9,31 | 10,76 | 12,20 | 13,65 | IUP 10 |
| 19 | INDEKS KOTA TOLERAN | Indeks | 4,403 | 4,600 | 4,645 | 4,690 | 4,735 | 4,780 | 4,825 | IUP 38 |
| 20 | Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran (PERSEN) | Persen | 2,97 | 2,97 | 3,04 | 3,11 | 3,19 | 3,26 | 3,33 | IUP 37a |
| 21 | Persentase warisan budaya tak benda terhadap total pencatatan yang telah ditetapkan | Persen | 4,88 | 4,88 | 5,00 | 5,12 | 5,23 | 5,35 | 5,47 | IUP 37b |
| 22 | PROPORSI PENDUDUK BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BERKUALIFIKASI PENDIDIKAN TINGGI (PERSEN) | Persen | 21,76 | 23,60 | 23,77 | 23,94 | 24,10 | 24,27 | 24,44 | IUP 6 |
| 23 | PERSENTASE PEKERJA LULUSAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI YANG BEKERJA (PERSEN) | Persen | 66,84 | 68,39 | 69,81 | 71,23 | 72,66 | 74,08 | 75,50 | IUP 7 |
| 24 | CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS (TREATMENT COVERAGE) (PERSEN) | Persen | 56,500 | 58,96 | 60,52 | 62,08 | 63,65 | 65,21 | 66,77 | IUP 3a |
| 25 | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS (TREATMENT SUCCESS RATE) (PERSEN) | Persen | 96,570 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IUP 3b |
| 26 | CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (PERSEN) | Persen | 82,490 | 83,73 | 84,54 | 85,36 | 86,17 | 86,98 | 87,80 | IUP 4 |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 27 | ANGKA KEMATIAN IBU (PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP) | Angka | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| III ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | % | 3,00 | 3,25 | 3,52 | 3,79 | 4,06 | 4,33 | 4,60 | IUP 11 |
| 2 | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum | % | 3,72 | 3,76 | 3,95 | 4,13 | 4,32 | 4,50 | 4,69 | IUP 12a |
| 3 | JUMLAH TAMU WISATAWAN MANCANEGERA (ORANG) | Angka | 564,00 | 604,17 | 625,32 | 647,20 | 669,86 | 693,30 | 717,57 | IUP 12b |
| 4 | Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota (Milyar Rupiah) | Milyar Rupiah | 335,72 | 335,72 | 383,36 | 429,10 | 481,63 | 540,24 | 614,74 | IUP 13 |
| 5 | RASIO KEWIRAUSAHAAN DAERAH | % | 1,90 | 1,95 | 2,01 | 2,07 | 2,13 | 2,19 | 2,24 | IUP 14b |
| 6 | TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN | % | 64,58 | 72,14 | 72,83 | 73,52 | 74,21 | 74,90 | 75,59 | IUP 16 |
| 7 | Indeks Kapabilitas Inovasi | Angka | 2,97 | 3,44 | 3,51 | 3,58 | 3,66 | 3,73 | 3,80 | IUP 17 |
| 8 | Persentase Pertumbuhan Produktivitas Sektor Pertanian | % | 3,67 | 3,85 | 4,04 | 4,24 | 4,45 | 4,66 | 4,89 | IUP 18a |
| 9 | PERSENTASE PERTUMBUHAN PRODUKSI PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA) | % | 1,42 | 1,50 | 1,82 | 2,15 | 2,47 | 2,80 | 3,12 | Sasaran Visi |
| 10 | Rasio Penggunaan EBT Terhadap Distribusi Energi Listrik | % | 0,33 | 0,77 | 1,29 | 1,80 | 2,32 | 2,84 | 3,36 | IUP 18b |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|--|---------------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 11 | Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) | Angka | 44,26 | 45,00 | 47,00 | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 | IUP 19 |
| 12 | Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok antar Waktu | Angka | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,82 | 0,78 | IUP 20 |
| 13 | PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PERSEN PDRB) | % | 33,57 | 34,87 | 34,90 | 34,94 | 34,98 | 35,02 | 35,06 | IUP 21 |
| 14 | NET EKSPOR BARANG DAN JASA (PERSEN PDRB ADHB) | % | -31,64 | -31,71 | -31,26 | -30,81 | -30,35 | -29,90 | -29,45 | IUP 22 |
| 16 | PROPORSI KONTRIBUSI PDRB KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROVINSI (PERSEN) | Persen | 2,99 | 3,02 | 3,04 | 3,06 | 3,08 | 3,09 | 3,11 | IUP 23a |
| 17 | RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN (PERSEN) | % | 97,97 | 82,50 | 83,35 | 84,20 | 85,05 | 85,89 | 86,74 | IUP 23b |
| 18 | Persentase kelurahan Berkategori Cepat Berkembang | % | 7,32 | 7,32 | 11,95 | 16,59 | 21,22 | 25,85 | 30,49 | IUP 23c |
| 19 | RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB (PERSEN ADHK) | % | 0,70 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | IUP 31 |
| 20 | TINGKAT INFLASI (PERSEN) | % | 2,33 | 2,33 | 2,23 | 2,14 | 2,04 | 1,95 | 1,85 | IUP 32 |
| 21 | TOTAL DANA BUMD/PDRB KABUPATEN/KOTA (NILAI TAMBAH BUMD KAB./KOTA TERHADAP PDRB KABUPATEN/KOTA) | Persen | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | IUP 33a |
| 22 | Nilai Realisasi Investasi per Kabupaten/kota Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan (milyar rupiah) | Milyar Rupiah | 382,27 | 401,62 | 411,66 | 421,95 | 432,50 | 443,32 | 454,40 | IUP 33b |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----------|---|--------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 23 | Indeks Akses Keuangan Daerah | Indeks | 39,50 | 6,37 | 6,45 | 6,53 | 6,61 | 6,69 | 6,69 | IUP 34 |
| 24 | PERSENTASE KERJASAMA DAERAH YANG DIREALISASIKAN | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | IUP 35 |
| 25 | INDEKS KETAHANAN NASIONAL | Indeks | 2,36 | 2,45 | 2,54 | 2,63 | 2,72 | 2,81 | 2,90 | IUP 36 |
| 26 | PROPORSI JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH NON PERTANIAN PADA LEVEL KABUPATEN/KOTA (PERSEN) | Persen | 80,96 | 81,77 | 82,20 | 82,63 | 83,06 | 83,48 | 83,91 | IUP 14ai |
| 27 | PROPORSI JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA LEVEL KABUPATEN/KOTA (PERSEN) | Persen | 2,59 | 3,13 | 3,64 | 4,16 | 4,67 | 5,19 | 5,70 | IUP 14aii |
| 28 | RASIO VOLUME USAHA KOPERASI TERHADAP PDRB (PERSEN) | Persen | 1,31 | 2,62 | 2,69 | 2,77 | 2,84 | 2,91 | 2,99 | IUP 14c |
| 29 | RETURN ON ASSET (ROA) BUMD (PERSEN) | Persen | 1,00 | 1,05 | 1,12 | 1,19 | 1,27 | 1,34 | 1,41 | IUP 14d |
| 30 | Indeks Zakat Nasional (Kabupaten/Kota) | Indeks | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | |
| | | | | | | | | | | |
| IV | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | |
| 1 | INDEKS REFORMASI BIROKRASI | Indeks | 58,33 | 60,69 | 61,90 | 63,14 | 64,40 | 65,69 | 67,00 | Sasaran Visi |
| 2 | INDEKS DAYA SAING DAERAH | Indeks | 3,05 | 3,13 | 3,17 | 3,21 | 3,25 | 3,29 | 3,33 | Sasaran Visi |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|----------|---|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 3 | INDEKS REFORMASI HUKUM | Indeks | 86,42 | 70,00 | 71,50 | 73,00 | 74,50 | 76,00 | 77,50 | IUP 24 |
| 4 | INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK | Indeks | 2,66 | 2,60 | 2,68 | 2,77 | 2,85 | 2,93 | 3,01 | IUP 25 |
| 5 | INDEKS PELAYANAN PUBLIK | Indeks | 2,67 | 4,03 | 4,03 | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 4,07 | IUP 26 |
| 6 | SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) | Angka | 66,20 | 61,20 | 62,43 | 63,65 | 64,88 | 66,11 | 67,33 | IUP 27 |
| 7 | INDEKS KRIMINALITAS/CRIME RATE | Indeks | 1,53 | 1,50 | 1,48 | 1,45 | 1,43 | 1,40 | 1,38 | IUP 28 |
| 8 | Rasio Jumlah Petugas Keamanan dan sejenisnya terhadap jumlah Penduduk | Persen | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | IUP 29 |
| 9 | TINGKAT PARTISIPASI PEMILU | Persen | 88,46 | 88,46 | 88,79 | 89,11 | 89,44 | 89,77 | 90,10 | IUP 30 |
| | | | | | | | | | | |
| V | INDIKATOR KINERJA KUNCI | | | | | | | | | |
| | Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| | <i>Pendidikan</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) | % | 79,84 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|---|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 2 | Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | % | 99,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) | % | 29,97 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 | |
| 4 | Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | % | 74,04 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | |
| 5 | Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | % | 74,93 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 91 | |
| 6 | Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | % | 50,35 | 67 | 69 | 70 | 73 | 75 | 75 | |
| 7 | Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | % | 53,99 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 | |
| 8 | Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | % | 29,71 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | |
| 9 | Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV | % | 79,84 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 95 | |
| 10 | Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD | % | 79,28 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 93 | |
| 11 | Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP | % | 68,09 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 | |
| 12 | Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD | % | 75,79 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 93 | |
| 13 | Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP | % | 71,78 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|--|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 14 | Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD | % | 62,39 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 73 | |
| 15 | Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP | % | 56,07 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Kesehatan | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Kematian Ibu | Orang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita | % | 28,40 | 28,05 | 27,05 | 26,05 | 25,04 | 24,04 | 23,04 | |
| 3 | Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar | % | 81,9 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 4 | Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar | % | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 5 | Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | % | 81,21 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 6 | Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 85,42 | 87,12 | 87,12 | 87,12 | 88,86 | 88,86 | 88,86 | |
| 7 | Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar | % | 35,94 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | |
| 8 | Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar | % | 75 | 72,4 | 73,84 | 75,31 | 76,6 | 78,34 | 78,34 | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|--|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 9 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 90,81 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | |
| 10 | Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar | % | 97,7 | 99,53 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| 11 | Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar | % | 120,94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 13 | Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar | % | 213,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14 | Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar | % | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota | % | 89,13 | 90,92 | 92,74 | 94,59 | 98,1 | 98,38 | 100 | |
| 2 | Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota | % | 88,93 | 93,37 | 98,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota | % | 70,05 | 70,75 | 71,46 | 72,17 | 72,89 | 73,62 | 74,36 | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|--|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 4 | Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota | % | 71,01 | 71,28 | 71,82 | 72,26 | 72,85 | 73,80 | 75,12 | |
| 5 | Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota | % | 96,26 | 97,16 | 98,06 | 98,96 | 99,86 | 100 | 100 | |
| 6 | Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | % | 98,67 | 98,77 | 99,17 | 99,57 | 99,85 | 100 | 100 | |
| 7 | Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota | % | 50 | 50 | 51,5 | 53 | 55 | 57,5 | 60 | |
| 8 | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota | % | 61,84 | 62,85 | 63,85 | 64,85 | 65,85 | 65,85 | 66,85 | |
| 9 | Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/anal is | % | 2,13 | 2,63 | 3,12 | 3,62 | 4,11 | 17,33 | 31,35 | |
| 10 | Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan | % | 20,81 | 22,29 | 23,78 | 25,27 | 26,75 | 29,94 | 33,12 | |
| 11 | Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah | Hari | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 12 | Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota | % | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| | | | | | | | | | | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|---|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni | % | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 2 | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 3 | persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | % | 6,99 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
| 4 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani | % | 1,34 | 2,06 | 1,12 | 0,00 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | |
| 5 | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) | % | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP | % | 87 | 89 | 90 | 92 | 93 | 93 | 93 | SatPol-PP |
| 2 | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | % | 92 | 92,37 | 92,74 | 93,11 | 92,74 | 93,11 | 93,11 | SatPol-PP |
| 3 | Jumlah PPNS pada Satpol PP | orang | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SatPol-PP |
| 4 | Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas | % | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | SatPol-PP |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|--|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5 | Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat | % | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | SatPol-PP |
| 6 | Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | SatPol-PP |
| 7 | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | % | 62,41 | 64,34 | 65,72 | 66,48 | 68,44 | 76,78 | 77,42 | BPBD |
| 8 | Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 1,01 | 1,3 | 2,05 | 2,35 | 3,47 | 3,98 | 4,48 | BPBD |
| 9 | Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPBD |
| 10 | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | % | 16,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BPBD |
| 11 | Persentase penanganan pra bencana | % | 90 | 58,33 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | BPBD |
| 12 | Persentase penanganan pasca bencana | % | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | BPBD |
| 13 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | BPBD |
| 14 | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Damkar |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|---|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Sosial | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 34,68 | 34,68 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | |
| 2 | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 42,62 | 42,62 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | |
| 3 | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 28,71 | 28,71 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | |
| 4 | Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 6 | Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8 | Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|---|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 9 | Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 46,18 | 46,18 | 46,5 | 50 | 50,3 | 50,5 | 51 | |
| 11 | Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar | % | 80 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 100 | |
| 12 | Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar | % | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | |
| 13 | Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi | % | 2,7 | 2,7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| 14 | Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun | % | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| | Tenaga Kerja | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | % | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | |
| 2 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | % | 50 | 50 | 50,10 | 50,20 | 50,50 | 60 | 60,30 | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|---|----------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 3 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Rp/Orang | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | |
| 4 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | % | 17,19 | 17,20 | 17,22 | 17,24 | 17,26 | 17,30 | 17,30 | |
| 5 | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | % | 70,20 | 70,25 | 70,35 | 70,35 | 75 | 75,20 | 80 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 96,9 | 96,92 | 96,94 | 96,95 | 96,96 | 96,97 | 96,98 | |
| 2 | Persentase ARG Daerah | % | 0,088 | 0,089 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,091 | 0,091 | |
| 3 | Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Pangan | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | % | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|--|-------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 2 | Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota | Nilai 0-100 | 86,8 | 88,5 | 90,26 | 91,99 | 93,72 | 95,45 | 100 | |
| 3 | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | % | 0 | 24 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 4 | Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan | % | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Pertanahan | | | | | | | | | |
| 1 | Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota | Nilai | 60,25 | 62,07 | 63,15 | 64,22 | 65,3 | 66,38 | 67,45 | |
| 2 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | % | - | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 3 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota | % | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| | | | | | | | | | | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|---|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan | % | 76,57 | 81,25 | 85,93 | 90,62 | 95,31 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan | % | 73,57 | 78,85 | 84,14 | 89,43 | 94,72 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan | % | 98,96 | 99,17 | 99,38 | 99,58 | 99,79 | 100 | 100 | |
| 5 | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | % | 64,95 | 71,96 | 78,97 | 85,98 | 92,99 | 100 | 100 | |
| 6 | Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital | Persen | 5,33 | 7,32 | 9,31 | 11,3 | 13,29 | 15,28 | 15,28 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | |
| 1 | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun | % | 2,27 | 2,27 | 2,26 | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
| 2 | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) | % | 62,5 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|--|------------------------------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | 9,2 | 9 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8 | |
| 4 | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 25,4 | 23,6 | 22 | 20,8 | 19,8 | 18,9 | 18,9 | |
| 5 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Nilai 0-100 | 64,67 | 66 | 67,2 | 68,4 | 69,5 | 70,6 | 70,6 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Perhubungan | | | | | | | | | |
| 1 | Konektivitas Kabupaten/Kota | Rasio | 85,00 | 85,00 | 85,03 | 85,06 | 85,09 | 85,12 | 85,15 | |
| 2 | Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota | % | 0,79 | 0,81 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | |
| 3 | Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan | % | 10,64 | 14,90 | 20,85 | 29,20 | 40,87 | 57,22 | 80,11 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | % | 22,86 | 22,86 | 25,71 | 28,57 | 31,43 | 34,29 | 37,14 | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|---|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 2 | Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah | % | 22,86 | 22,86 | 25,71 | 28,57 | 31,43 | 34,29 | 37,14 | |
| 3 | Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) | % | 57,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | % | 14,09 | 14,25 | 14,50 | 14,95 | 15,30 | 15,75 | 15,95 | |
| 2 | Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | % | 0,5 | 0,7 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | |
| 3 | Pertumbuhan Wirausaha | % | 15,32 | 15,65 | 16,25 | 16,75 | 17,05 | 17,35 | 17,65 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Penanaman Modal | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | % | -33,52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2 | Realisasi Total terhadap Target Investasi | % | 102,8 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | |
| | | | | | | | | | | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|---|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat | % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
| 2 | Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi | % | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Statistik | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Poin | 2,44 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Persandian | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah | % | 30,94 | 30,94 | 33,22 | 34,97 | 36,38 | 38,67 | 39,76 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Kebudayaan | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|---|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 3 | Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan | % | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| | Perpustakaan | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Nilai | 69,46 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| 2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Nilai | 69,03 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| | Kearsipan | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah | Nilai | 41,98 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 61 | |
| | Urusan Pilihan | | | | | | | | | |
| | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | |
| 1 | Produksi Perikanan Tangkap | % | 0,8 | 0,8 | 1,34 | 1,48 | 1,54 | 1,89 | 1,89 | |
| 2 | Produksi Perikanan Budi Daya | % | 1,6 | 1,6 | 1,65 | 1,69 | 1,89 | 1,93 | 1,93 | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|--|--------|---------------------|--------------|------|------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Pariwisata | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum | % | 4,95 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 2 | Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) | % | 184,95 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 3 | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual | % | 0,77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| | Pertanian | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan produksi tanaman pangan | % | 9,28 | 9,28 | 9,30 | 9,30 | 9,29 | 9,28 | 9,28 | |
| 2 | Peningkatan Produksi Hortikultura | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 3 | Peningkatan Produksi komoditas Peternakan | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 4 | Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan | % | 9,45 | 9,45 | 9,65 | 9,65 | 12,14 | 13,52 | 13,52 | |
| 5 | Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|--|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 6 | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Perdagangan | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | % | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,35 | 0,36 | 0,42 | |
| | Perindustrian | | | | | | | | | |
| 1 | Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor | % | 53,90 | 54,10 | 54,35 | 54,65 | 54,90 | 55,15 | 55,25 | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|---|--------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 3 | Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan. | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan. | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Urusan Penunjang | | | | | | | | | |
| | Perencanaan | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Keuangan | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD | % | | | | | | | | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|--|--------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 2 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | % | 6,65 | 6,98 | 7,33 | 7,7 | 8,08 | 8,49 | 8,91 | |
| 3 | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar | % | 93,59 | 94,25 | 94,65 | 94,75 | 95,32 | 95,68 | 95,98 | |
| 4 | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | % | 80 | 83,09 | 86,3 | 89,63 | 93,09 | 96,68 | 100 | |
| 5 | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik | % | 93,59 | 94,53 | 94,53 | 94,53 | 94,53 | 94,53 | 94,53 | |
| 6 | Persentase Penurunan SILPA | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN | indeks | 70,01 | 70,01 | 71,01 | 72,01 | 73,01 | 74,01 | 74,01 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | |
| 1 | Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah | Rasio | 100,6 | 100,63 | 100,66 | 100,69 | 100,72 | 100,75 | 100,78 | |
| | | | | | | | | | | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|--|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Pengawasan | | | | | | | | | |
| 1 | Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir) | Kategori / Opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| 2 | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai (1-5) | Berkembang | Berkembang | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | |
| 3 | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Nilai (2-5) | Terintegrasi (Integrated) | Terintegrasi (Integrated) | Terintegrasi (Integrated) | Terintegrasi (Integrated) | Terintegrasi (Integrated) | Terintegrasi (Integrated) | Terintegrasi (Integrated) | |
| 4 | Manajemen Risiko Indeks | Nilai (1-5) | 2,67 | 2,72 | 2,78 | 2,81 | 2,87 | 2,92 | 2,92 | |
| 5 | Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | % | 10,36 | 10,36 | 9,42 | 8,73 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan | | | | | | | | | |
| 1 | Pemanfaatan Sistem Pengadaan | poin | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ | poin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Tingkat Kematangan UKPBJ | poin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | |



| No. | Indikator | Satuan | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun | | | | | | Keterangan |
|-----|--|--------------------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Hubungan dengan Perwakilan Daerah | | | | | | | | | |
| 2 | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N | Tepat/ Tidak Tepat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Persentase Penetapan RanPerda Tahun N | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Pelayanan Publik | | | | | | | | | |
| 1 | Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N | Nilai | 90,22 | 91,50 | 92,00 | 93,00 | 94,50 | 95,00 | 96,85 | |
| | | | | | | | | | | |

Sumber: Bappeda, Hasil Analisis





RPJMD

Kota Bima

2025-2029

VISI PEMBANGUNAN KOTA BIMA TAHUN 2025-2029

TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG MAJU,
BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN



Kota Bima akan menjadi salah satu kutub pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan religius

Pembangunan Kota Bima mampu menjaga keberlanjutan dan keterpaduan yang berwawasan lingkungan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima tahun 2025-2045. Dokumen RPJMD ini juga merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Wali Kota/Wakil Wali Kota yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses Konsultasi Publik, Focus Group Discussion (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sedangkan pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan secara berjenjang di daerah hingga nasional, serta dengan penyesuaian kebijakan dan program nasional dan provinsi.

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan RPJMD, maka diperlukan penjabaran secara teknis dalam rencana strategis perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD. Sedangkan untuk penjabaran dalam pelaksanaan tahunan, RPJMD ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) secara sinergi dan berkesinambungan.

5.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kota Bima, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai



berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2025

Penyusunan RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 dan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2025 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Perubahan RKPD 2025 tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. RKPD Tahun 2026

Dikarenakan saat penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, dokumen RPJMD 2025-2029 belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 masih berpedoman pada Rancangan RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029. Sedangkan untuk penyusunan tahapan selanjutnya akan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

3. RKPD Tahun 2030

Penyusunan RKPD Tahun 2030 disusun tetap dengan berpedoman pada dokumen RPJMD 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045, serta memperhatikan rancangan RPJMN Tahun 2025-2045.

Pedoman transisi seperti diuraikan di atas bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2029.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Visi dan misi Kota Bima dapat diwujudkan dengan membangun sinergi, kolaborasi dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. RPJMD harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan baik pihak pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan lainnya.

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Bima 2025-2029 berfungsi sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkup pemerintah daerah maupun masyarakat. Kaidah pelaksanaan ini menjadi instrumen pengaman untuk memastikan terwujudnya visi dan misi RPJPD 2025-2045 mendukung terwujudnya



visi Indonesia EMAS 2045. Kaidah-kaidah ini menekankan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keterpaduan dan Konsistensi

RPJMD dijalankan secara terpadu dengan dokumen perencanaan lainnya, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima 2025-2045, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta RPJMN dan RPJPD Provinsi NTB 2025-2045. Konsistensi antar-dokumen perencanaan menjadi landasan untuk menciptakan kesinambungan pembangunan.

2. Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder

Pelaksanaan RPJMD melibatkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan. Untuk meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat terhadap pembangunan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

3. Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah dilakukan secara efisien dan efektif dengan mengutamakan prioritas program yang mendukung visi, misi, dan tujuan pembangunan Kota Bima untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan memberikan dampak besar tanpa pemborosan sumber daya.

4. Akuntabilitas dan Transparansi

Seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan seluruh program dan kegiatan kepada masyarakat. Transparansi berarti memberikan akses yang jelas terhadap informasi pelaksanaan pembangunan.

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan



tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bima agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
4. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja RPJMD tahun 2025-2029, maka dokumen RPJMD ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
5. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

5.3. Kerangka Pengendalian

Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan perencanaan yang berkualitas sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dimana terdapat kesesuaian antar dokumen perencanaan dengan pelaksanaannya. Perencanaan yang berkualitas tercermin pada konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan mulai dari RPJPN, RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Renja setiap Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.



Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah maupun pelaku non pemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan perlu didukung dengan komitmen dari pemerintah daerah dan DPRD dalam pengambilan keputusan penetapan alokasi APBD setiap tahunnya. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan prioritas pembangunan daerah mendapat alokasi yang semestinya. Pendekatan teknokratis dalam penetapan prioritas harus lebih diutamakan dibanding pendekatan yang bersifat politis. Dalam pendekatan teknokratis prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan kedalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarus utamaan pembangunan yang mencakup GEDSI, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi sirkuler, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan serta kebencanaan.
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan dalam satu kesatuan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sebagai alat ukur ketercapaian pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja menerapkan kriteria SMART; Spesific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant dan Time-Bound sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator



dalam perencanaan pembangunan. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari RKPD dan Renstra Perangkat daerah.





RPJMD Kota Bima 2025-2029

visi

Terwujudnya KOTA BIMA yang MAJU,
BERMARTABAT dan BERKELANJUTAN

PEMERINTAH KOTA BIMA
2025